LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
AKHIR MASA JABATAN BUPATI BULELENG
TAHUN 2012 – 2017

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,

Dengan menghaturkan Sesanti Angayubagia / puji dan syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, berkat Asung Kertha Wara Nugraha – Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Masa Jabatan Bupati Buleleng Periode 2012-2017. Adanya dukungan semua pihak dan sinergitas seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng berimplikasi pada ketepatan waktu penyelesaian penyusunan laporan.

Dengan terbitnya Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas serta kepentingan strategi nasional untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyusunan LPPD AMJ Bupati Buleleng Tahun 2012-2017 ini adalah bentuk kewajiban kami sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dengan sistematika penyusunan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Masa jabatan Bupati Buleleng Tahun 2012-2017 mencakup gambaran kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng secara utuh sepanjang periode masa jabatan jabatan Bupati Buleleng Tahun 2012-2017, dalam rangka pencapaian sasaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan berdasarkan tolak ukur kinerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng 2012 – 2017, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buleleng sepanjang Tahun 2012-2017. Dengan demikian gambaran kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017 merupakan sebuah implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Perundang – Undangan.

Semoga melalui penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Masa Jabatan Bupati Buleleng Tahun 2012-2017 ini, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat dalam rangka pengembangan kapasitas Pemerintahan Daerah. Kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian laporan ini, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih dengan harapan semoga segala daya dan upaya kita dalam rangka membangun Bumi Panji Sakti tercinta akan senantiasa mendapatkan tuntunan dan petunjuk Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa.
Om Cantih,Cantih,Cantih Om.

Singaraja, Mei 2017

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA,ST.

DAFTAR ISI

		HALAMAN
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR		vi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN KABUPATEN BULELENG.	1
	A. Sejarah Kota Singaraja.	1
	B. Dasar Hukum Pembentukan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Buleleng.	3
	2. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BULELENG.	6
	A. Kondisi Geografis Daerah.	6
	B. Gambaran Umum Demografis Daerah.	13
	C. Kondisi Ekonomi Daerah.	19
BAB II	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH.	35
	A. VISI DAN MISI.	38
	B. SETRATEGI DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH.	39
	C. PRIORITAS DAERAH.	46
BAB III	URUSAN DESENTRALISASI.	56
	A. Ringkasan Urusan Desentralisasi.	56
	B. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan.	79
	1. Urusan Pendidikan.	79
	2. Urusan Kesehatan.	95
	3. Urusan lingkungan hidup	122
	4. Urusan Pekerjaan Umum	129
	5. Urusan Tata Ruang	141
	6 Urusan Perencanaan Pembangunan	143
	7. Urusan Perumahan	152
	8. Urusan Pemuda dan Olah Raga	158
	9. Urusan Penanaman Modal	163
	10. Urusan Koperasi dan UKM	171
	11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	176
	12. Urusan Tenaga Kerja	183
	13. Urusan Ketahanan Pangan	192
	14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	201
	15. Urusan KB dan Keluarga Sejahtera	211

16. Urusan Perhubungan 227
17. Urusan Komunikasi dan Informatika 241
18 Urusan Pertanahan 251
19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 255
20. Urusan Otonomi Daerah 264
21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat 322
22. Urusan Sosial 334
23. Urusan Budaya 343
24. Urusan Kearsipan 348
25. Urusan Perpustakaan 354
C. Prioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan. 359
1. Urusan Perikanan. 359
2. Urusan Pertanian. 372
3. Urusan Kehutanan. 399
4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral. 406
5. Urusan Pariwisata. 410
6. Urusan Perdagangan. 414
7. Urusan Industri. 418
8. Urusan Transmigrasi. 421
BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN 422
A. Tugas Pembantuan Yang Diterima 422
B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan 502
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 503
A. Kerjasama Antar Daerah. 503
B. Kerjasama Antar Pemerintah 506
C. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga. 511
D. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah. 519
E. Pembinaan Batas Wilayah. 525
F. Penanggulangan Dan Pencegahan Bencana. 542
G. Pengelolaan Kawasan Khusus. 549
H. Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban. 553
BAB VI PENUTUP. 559

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

NO TABEL			JUDUL TABEL /GAMBAR	HAL
TABEL	1	:	Luas Kecamatan di Kabupaten Buleleng, 2016	7
TABEL	2	:	Kondisi Beberapa Unsur Iklim di Kabupaten Buleleng,2016	12
TABEL	3	:	Jumlah Penduduk Kabupaten Buleleng berdasarkan jenis kelamin, Tahun 2012- 2015	13
TABEL	4	:	Jumlah penduduk per kecamatan Kabupaten Buleleng, 2015	14
TABEL	5	:	Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan Kabupaten Buleleng, Tahun 2012-2015	15
TABEL	6	:	Rasio Jenis Kelamin Per Kecamatan Kabupaten Buleleng, 2015	16
TABEL	7	:	Tingkat Pendidikan Penduduk berdasarkan jenis kelamin Tahun 2015	17
TABEL	8	:	Perkembangan luas panen dan produksi komoditas pertanian Kabupaten Buleleng tahun 2012-2015	20
TABEL	9	:	Luas areal tanaman dan produksi perkebunan di Kabupaten Buleleng dalam Tahun 2012-2015	22
TABEL	10	:	Populasi ternak di Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2015	23
TABEL	11	:	Perkembangan produksi ternak di kabupaten Buleleng Tahun 2012-2015	23
TABEL	12	:	Unit usaha Industri Menurut Kelompok Industri di Kabupaten Buleleng dalam Tahun 2012-2015	25
TABEL	13	:	PDRB Kabupaten Buleleng Menurut Lapangan Usaha atas Harga Berlaku dan Konstan Tahun 2014-2015	26
TABEL	14	:	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Buleleng Menurut Lapangan Usaha 2012-2015 (Persen)	29
TABEL	15	:	Indikator Agregatif PDRB Kabupaten Buleleng 2011-2015	34
TABEL	16	:	Alokasi dan realisasi anggaran urusan wajib T.A. 2016	69
TABEL	17	:	Alokasi dan Realisasi anggaran Urusan Pilihan T.A. 2016	72
TABEL	18	:	Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016	74
TABEL	19	:	Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng Berdasarkan Perda No 13 Tahun 2016	76
TABEL	20	:	Kondisi pelayanan dasar bidang Pendidikan	81
TABEL	21	:	Capaian idikator pendidikan Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2016	86
TABEL	22	:	Jumlah penduduk dan jumlah buta huruf Tahun 2013-2016	87
TABEL	23	:	Jumlah sekolah menurut tingkat pendidikan tahun 2012-2016	88
TABEL	24	:	Perkembangan anak melanjutkan sekolah Tahun 2013-2016	88
TABEL	25	:	Capaian program pendidikan luar sekolah (PPLS) Tahun 2014-2016	89
TABEL	26	:	Capaian kerja penyelenggaraan urusan pendidikan selama	90

periode RPJMD Tahun 2012-2017
TABEL 27 : Capaian Kinerja urusan pendidikan Tahun 2013-2016 91
TABEL 28 : SPM bidang Kesehatan Tahun 2013-2016 97
TABEL 29 : Angka Kematian Ibu dan Anak Tahun 2012-2016 98
TABEL 30 : Cakupan imunisasi bayi dan ibu hamil tahun 2016 99
TABEL 31 : Hasil cakupan imunisasi bayi dan ibu hamil tahun 2012-2016 101
TABEL 32 : Jumlah penduduk penderita 10 jenis penyakit tahun 2012-2016 102
TABEL 33 : Jumlah sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2016 103
TABEL 34 : Jumlah Tenaga Paramedis Non Perawat Kesehatan Tahun 2012-2016 104
TABEL 35 : Jumlah Tenaga Paramedis Perawat Kesehatan dan Jenis Pendidikan Tahun 2012-2016 105
TABEL 36 : Jumlah Tenaga Medis Kesehatan dan Jenis Pendidikan Tahun 2012-2016 105
TABEL 37 : Anggaran dan Realisasi Anggaran urusan Kesehatan tahun 2012-2017 106
TABEL 38 : Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan sesuai RPJMD Tahun 2012-2017 109
TABEL 39 : Anggaran dan Realisasi Urusan Kesehatan (RSUD) tahun 2012-2016 110
TABEL 40 : Jumlah Pasien Untuk Rawat Inap dan Rawat Jalan RSUD Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2016 111
TABEL 41 : Kinerja Pelayanan Rawat Inap RSUD Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2016 111
TABEL 42 : Indikator Pelayanan Rawat Inap RSUD kabupaten Buleleng Tahun 2012-2016 112
TABEL 43 : Kualifikasi SDM RSUD Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2016 113
TABEL 44 : Target dan Realisasi Pendapatan RSUD Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2016 114
TABEL 45 : Penghargaan yang diterima RSUD Kabupaten Buleleng tahun 2012-2016 118
TABEL 46 : Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan (RSUD) sesuai RPJMD Tahun 2012-2017 120
TABEL 47 : Daya Tampung Tempat Pembuangan Sampah 124
TABEL 48 : Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Buleleng 126
TABEL 49 : Indikator Tersedianya Jalan yang Memudahkan Masyarakat per Individu Melakukan Perjalanan 131
TABEL 50 : Indikator Tersedianya Jalan yang Menjamin Pengguna Jalan Berkendara dengan Selamat 132
TABEL 51 : Indikator Tersedianya Jalan yang Menjamin Kendaraan dapat Berjalan dengan Selamat dan Nyaman 133
TABEL 52 : Indikator Tersedianya Jalan yang Menjamin Perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan KECEPATAN rencana 134
TABEL 53 : Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 135

			Cm, selama 2 jam) dan tidak lebih 2 kali setahun	
TABEL	54	:	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 Cm, selama 2 jam) dan tidak lebih 2 kali setahun	136
TABEL	55	:	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di Kawasan Perkotaan	137
TABEL	56	:	Indikator tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari	138
TABEL	57	:	Indikator tersedianya pedoman standar harga bangunan Negara di Kabupaten/ Kota	139
TABEL	58	:	Kondisi Pegawai pada Urusan Pekerjaan Umum	140
TABEL	59	:	Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan penataan ruang di Kabupaten Buleleng	142
TABEL	60	:	Jumlah program di RPJMD 2012-2017	146
TABEL	61	:	Jumlah program di RKPD 2016	147
TABEL	62	:	Kondisi kepegawaian Bappeda Kabupaten Buleleng	150
TABEL	63	:	Kondisi pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat	152
TABEL	64	:	Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Pemuda dan Olahraga	162
TABEL	65	:	Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada BPPT Kabupaten Buleleng Tahun 2015	165
TABEL	66	:	Kondisi Pelayanan Dasar bidang Penanaman Modal	167
TABEL	67	:	Kondisi pegawai pelaksana urusan penanaman modal	169
TABEL	68	:	Kondisi kepegawaian pelaksana urusan Koperasi dan UKM	175
TABEL	69	:	Alokasi dan Realisasi Belanja Langsung pelaksanaan peogran dan Kegiatan Tahun 2015	188
TABEL	70	:	Kondisi pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan	190
TABEL	71	:	Kondisi Pegawai pelaksana urusan tenaga kerja	191
TABEL	72	:	Realisasi belanja urusan ketahanan pangan Tahun 2012	195
TABEL	73	:	Alokasi dan realisasi belanja langsung pelaksanaan program ketahanan pangan pertanian/ perkebunan pada dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun 2015	197
TABEL	74	:	Kondisi Pelayanan Dasar Bidang Ketahanan Pangan	198
TABEL	75	:	Kondisi Pegawai urusan ketahanan pangan	200
TABEL	76	:	Pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Keluarga Berancana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Buleleng untuk Tahun 2012	203
TABEL	77	:	SPM bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	207
TABEL	78	:	Kondisi pegawai urusan Pembberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	210
TABEL	79	:	Pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Keluarga Berencana dan Permberdayaan Perempuan Kabupaten Buleleng tahun 2012	212
TABEL	80	:	Alokasi dan realisasi anggaran program dan kegiatan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun	216

			2014	
TABEL	81	:	Alokasi dan realisasi belanja langsung urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2015	218
TABEL	82	:	Kondisi pelayanan dasar bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	221
TABEL	83	:	SPM urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	223
TABEL	84	:	Kondisi pegawai pada urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	226
TABEL	85	:	Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng untuk Tahun 2012	228
TABEL	86	:	Alokasi dan Realisasi anggaran program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Tahun 2014	230
TABEL	87	:	Alokasi dan realisasi belanja urusan Perhubungan tahun 2015	231
TABEL	88	:	Kondisi pelayanan dasar bidang Perhubungan sampai dengan tahun 2016	234
TABEL	89	:	Kondisi pelayanan dasar bidang Komunikasi dan Informatika	243
TABEL	90	:	Alokasi dan realisasi anggaran program dan kegiatan pada Diskominfo kabupaten Buleleng Tahun 2014	244
TABEL	91	:	Alokasi dan realisasi belanja langsung Dinas Komunikasi dan infromatika Kabupaten Buleleng tahun 2015	245
TABEL	92	:	Kondisi pelayanan dasar bidang komunikasi dan informasi	247
TABEL	93	:	Perkembangan tenaga keamanan dan ketertiban masyarakat Tahun 2012-2017	256
TABEL	94	:	Anggaran dan realisasi urusan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Satpol PP) 2012-2017	257
TABEL	95	:	Jumlah Ormas dan LSM	261
TABEL	96	:	Anggaran dan realisasi urusan Pemerintahan Umum (Bagian Organisasi) tahun 2012-2017	265
TABEL	97	:	Capaian indikator kinerja urusan pemerintahan umum (Bagian Organisasi) sesuai RPJMD	266
TABEL	98	:	Anggaran dan realisasi urusan Pemerintahan Umum (Bagian Umum) tahun 2012-2017	271
TABEL	99	:	Anggaran dan realisasi urusan Pemerintahan Umum (Bagian Humas dan Protokol) tahun 2016-2017	278
TABEL	100	:	Anggaran dan realisasi urusan Pemerintahan Umum (Bagian Pemerintahan) tahun 2012-2016	281
TABEL	101	:	Anggaran dan realisasi urusan Pemerintahan Umum (Bagian Ekonomi dan Pembangunan) Tahun 2012-2016	284
TABEL	102	:	Capaian indikator kinerja urusan Pemerintahan Umum (Bagian Kesejahteraan Rakyat) Tahun 2012-2016	286
TABEL	103	:	Jumlah produk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2012-2016	290
TABEL	104	:	Anggaran dan realisasi urusan Pemerintahan Umum (Sekretariat DPRD) Tahun 2012-2016	291

TABEL	105	:	Perkembangan pelaksanaan diklat structural dan fungsional Tahun 2012-2016	296
TABEL	106	:	Anggaran dan realisasi urusan Pemerintahan Umum (BKD) tahun 2012-2016	297
TABEL	107	:	Capaian indikator kinerja urusan Pemerintahan Umum (Inspektorat) Tahun 2013-2017	298
TABEL	108	:	Perkembangan kegiatan pengawasan tahun 2012-2016	299
TABEL	109	:	Perkembangan temuan hasil pemeriksaan tahun 2012-2016	300
TABEL	110	:	Jumlah program dan kegiatan pada Inspektorat kabupaten Buleleng tahun 2012-2017	302
TABEL	111	:	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2012-2016	302
TABEL	112	:	Perbandingan pagu sesuai anggaran perubahan pada Inspektorat kabupaten Buleleng tahun 2012-2017	303
TABEL	113	:	Anggaran dan realisasi Kecamatan Gerokgak tahun 2012-2017	311
TABEL	114	:	Anggaran dan realisasi Kecamatan Busungbiu tahun 2012-2017	312
TABEL	115	:	Anggaran dan realisasi Kecamatan Banjar tahun 2012-2017	312
TABEL	116	:	Anggaran dan realisasi Kecamatan Buleleng tahun 2012-2017	314
TABEL	117	:	Anggaran dan realisasi Kecamatan Sawan tahun 2012-2017	315
TABEL	118	:	Anggaran dan realisasi Kecamatan Seririt tahun 2012-2017	315
TABEL	119	:	Anggaran dan realisasi Kecamatan Tejakula tahun 2012-2017	316
TABEL	120	:	Anggaran dan realisasi Kecamatan Sukasada tahun 2012-2017	318
TABEL	121	:	Anggaran dan realisasi Kecamatan Kubutambahan tahun 2012-2017	321
TABEL	122	:	Capaian indikator kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai RPJMD tahun 2012-2017	324
TABEL	123	:	Alokasi keuangan Desa tahun 2012-2017	328
TABEL	124	:	Perbandingan realisasi kinerja pada BPMPD Kabupaten Buleleng tahun 2012-2016	329
TABEL	125	:	Perbandingan pagu/ anggaran pada BPMPD kabupaten Buleleng tahun 2012-2016	329
TABEL	126	:	Kondisi kepegawaian pada BPMPD Kabupaten Buleleng	332
TABEL	127	:	Kondisi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) tahun 2011-2015	334
TABEL	128	:	Jumlah Panti Asuhan dan Penghuni Panti Tahun 2011-2015	336
TABEL	129	:	Anggaran dan realisasi urusan sosial tahun 2012-2017	336

TABEL	130	:	Rekapitulasi capaian kinerja urusan sosial RPJMD tahun 2012-2017	337
TABEL	131	:	Capaian indikator kinerja urusan sosial sesuai RPJMD tahun 2012-2017	338
TABEL	132	:	Perkembangan sanggar seni tahun 2012-2016 di Kabupaten Buleleng	343
TABEL	133	:	Prestasi penyelenggaraan urusan kebudayaan	344
TABEL	134	:	Anggaran dan realisasi urusan kebudayaan tahun 2012-2017	344
TABEL	135	:	Data perkembangan pengelolaan dokumen arsip	348
TABEL	136	:	Capaian indikator Kinerja urusan kearsipan sesuai RPJMD tahun 2012-2017	350
TABEL	137	:	Kondisi kepegawaian urusan kearsipan	353
TABEL	138	:	Data perkembangan jumlah bahan	355
TABEL	139	:	Data perkembangan jumlah anggota perpustakaan/ jenis kelamin	355
TABEL	140	:	Data perkembangan jumlah pengunjung perpustakaan/ jenis kelamin	355
TABEL	141	:	Data perkembangan jumlah peminjam perpustakaan/ jenis kelamin	356
TABEL	142	:	Data perkembangan program/ kegiatan	356
TABEL	143	:	Kondisi kepagawaian urusan perpustakaan	358
TABEL	144	:	Anggaran dan realisasi anggaran urusan perikanan dan kelautan tahun 2012-2017	361
TABEL	145	:	Capaian indikator kinerja urusan perikanan dan kelautan sesuai RPJMD tahun 2012-2017	361
TABEL	146	:	Jumlah produksi perikanan serta nilai penjualan di kabupaten Buleleng Tahun 2012-2016	362
TABEL	147	:	Produksi hasil pengolahan ikan di Kabupaten Buleleng tahun 2012-2016	365
TABEL	148	:	Data nelayan di Kabupaten Buleleng tahun 2012-2016	367
TABEL	149	:	Perkembangan luas panen dan produksi komuditas pertanian tanaman pangan dan holtikultura Kabupaten Buleleng tahun 2012-2016	373
TABEL	150	:	Populasi ternak di Kabupaten Buleleng dalam tahun 2012-2016	375
TABEL	151	:	Perkembangan produksi daging dan telur di Kabupaten Buleleng tahun 2012-2016	376
TABEL	152	:	Anggran dan realisasi penyelenggaraan urusan pertanian tahun 2012-2016	379
TABEL	153	:	Kondisi kepegawaian pelaksana urusan pertanian	388

TABEL	154	:	Capaian indikator kinerja RPJMD urusan pertanian tahun 2012-2017	393
TABEL	155	:	Anggaran dan realisasi urusan pertanian (sube sector perkebunan) tahun 2013-2016	397
TABEL	156	:	Realisasi fisik urusan pertanian (sub sector pertanian) tahun 2013-2016	397
TABEL	157	:	Keadaan lahan kritis diluar kawasan hutan di kabupaten Buleleng	399
TABEL	158	:	Keadaan lahan kritis di dalam kawasan hutan di Kabupaten Buleleng	400
TABEL	159	:	Capaian indikator kinerja urusan kehutanan sesuai RPJMD tahun 2012-2017	401
TABEL	160	:	Kondisi pegawai yang menangani urusan kehutanan	402
TABEL	161	:	Anggaran dan realisasi urusan ESDM tahun 2013-2017	407
TABEL	162	:	Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Buleleng tahun 2012-2016	410
TABEL	163	:	Perkembangan lima besar kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Buleleng selama 5 tahun dari tahun 2012-2016	411
TABEL	164	:	Pelaksanaan kegiatan penataan daya tarik wisata tahun 2012-2016	411
TABEL	165	:	Prestasi penyelenggaraan urusan pariwisata di Kabupaten Buleleng tahun 2014-2016	413
TABEL	166	:	Anggaran dan realisasi anggaran urusan pariwisata tahun 2012-2017	413
TABEL	167	:	Capaian indikator kinerja urusan perdagangan sesuai RPJMD tahun 2012-2017	415
TABEL	168	:	Capaian indikator kinerja urusan perindustrian sesuai RPJMD tahun 2012-2017	419
TABEL	169	:	Anggaran dan realisasi urusan ketransmigrasian tahun 2012-2016	421
TABEL	170	:	Perkembangan tugas anggaran pembantuan yang diterima Kabupaten Buleleng tahun 2012-2017	423
TABEL	171	:	Pagu anggaran dan realisasi dana tugas pembantuan per SKPD penerima tahun 2012-2016	423
TABEL	172	:	Realisasi program peningkatan produksi, produktifitas dan mutu hasil tanaman pangan	477
TABEL	173	:	Realisasi program peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk tanaman holtikultura berkelanjutan tahun 2015	484
TABEL	174	:	Pencegahan dan penanggulangan bencana kabupaten Buleleng tahun 2012-2016	543
TABEL	175	:	Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Kabupaten Buleleng tahun 2012-2016	555

GAMBAR	1	:	Peta Wilayah Kabupaten Buleleng	6
GAMBAR	2	:	Grafik persentase luas kecamatan di Kabupaten Buleleng, 2015	8
GAMBAR	3	:	Perbandingan Luas Wilayah Kabupaten Buleleng berdasarkan Ketinggian Tempat, 2016	9
GAMBAR	4	:	Pertumbuhan Penduduk Kab. Buleleng 2012-2015	15
GAMBAR	5	:	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng Tahun 2011 - 2015 (persen)	27
GAMBAR	6	:	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng dengan Provinsi Bali , 2011-2015 (persen)	30
GAMBAR	7	:	Kontribusi Sektor Primer, Sekunder dan Tersier dalam PDRB Kabupaten Buleleng 2015 (persen)	31
GAMBAR	8	:	Lima kontribusi terbesar PDRB Kabupaten Buleleng 2015	32
GAMBAR	9	:	Kontribusi Kategori pertanian dalam pembentukan PDRB kabupaten Buleleng 2015	33
GAMBAR	10	:	Jumlah kunjungan pasien ke Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Tahun 2012-2017	100
GAMBAR	11	:	Presentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan RSUD Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017	116
GAMBAR	12	:	Penggunaan alat kontrasepsi KB di kabupaten Buleleng Tahun 2013	214
GAMBAR	13	:	Presentase luas Kecamatan terhadap luas Kabupaten	308
GAMBAR	14	:	Realisasi pendapatan daerah pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng	377
GAMBAR	15	:	Capaian produktifitas padi 1	385
GAMBAR	16	:	Capaian produktifitas padi 2	385
GAMBAR	17	:	Capaian produksi buah-buahan	386
GAMBAR	18	:	Grafik capaian produksi sayur-sayuran	386
GAMBAR	19	:	Luas areal komoditas unggulan tahun 2016	394

BAB I
PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN KABUPATEN BULELENG.

1. Sejarah Kota Singaraja.

Sejarah kota Singaraja tidak bisa lepas dari munculnya seorang penguasa di Bali Utara pada pertengahan abad XVII, yang berhasil membangun daerah tersebut sehingga maju dan disegani oleh daerah – daerah lain baik yang ada di Bali maupun di luar Bali. Beliau adalah I Gusti Ngurah Panji Sakti. Putra dari Dalem Sagening yang pusat kekuasaannya di Gelgel dan ibunya bernama Si Luh Pasek Panji. Masa pemerintahan I Gusti Ngurah Panji Sakti di Bali Utara cukup lama kurang lebih 81 tahun yaitu dari tahun 1599 – 1680. Beliau bersama ibunya diperintahkan kembali ke Den Bukit oleh ayahandanya yaitu Dalem Sagening disertai pasukan pengawal sebanyak 40 orang dengan pimpinannya Ki Kadosot dan Ki Dumpyung. Dalem Sagening memberikan bekal Ki Barak (nama kecil I Gusti Ngurah Panji Sakti) sebuah tombak yang kemudian terkenal dengan nama Pangkaja Tatwa dan sebuah keris anugrah dewata bernama Ki Mundaran Cacaran Babang. Setelah sampai di desa Panji beliau tinggal bersama ibundanya Si Luh Pasek Panji di rumah kakeknya bernama Pasek Gobleg. Sedang pengiringnya berjumlah 40 orang kembali ke Gelgel kecuali Ki Kadosot dan Ki Dumpyung yang selalu mengemban dan mendampingi Ki Barak Panji sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Dalem Sagening. Pada waktu itu di daerah Gendis dikuasai oleh seorang penguasa bernama Pungakan Gendis, yang menurut cerita suka bermain judi dan mabuk-mabukkan. Karena itu ia kurang disenangi oleh rakyatnya.

Setelah Ki Barak menginjak dewasa dan berkat bimbingan dari Ki Kadosot dan Ki Dumpyung beliau menjadi seorang pemuda yang mempunyai karisma dan mempunyai daya tarik sendiri, sehinngga sangat disenangi dan disayangi oleh lingkungannya. Dan selanjutnya diceritakan bahwa Ki Barak Panji dapat mengalahkan Ki Pungakan Gendis. Mulai saat

itu Ki Barak Panji mulai dilirik oleh masyarakat Gendis untuk menjadi pimpinannya. Masyarakat Desa Gendis sangat terkagum – kagum setelah Ki Barak Panji dapat membantu kandasnya sebuah perahu milik saudagar dari Cina dan saudagar Cina tersebut menghadiahkan banyak barang – barang seperti kain – kain sutra, barang – barang keramik, yang dibawa oleh saudagar Cina tersebut. Setelah kejadian di Segara Penimbangan tersebut beliau kemudian secara aklamasi diangkat sebagai penguasa di daerah Gendis dan selanjutnya beliau membangun sebuah istana di desa Panji. Kemudian menyunting anak satu- satunya Ki Pungakan Gendis menjadi Permaisurinya. Setelah menjadi penguasa di Panji beliau secara berencana membentuk suatu kelompok prajurit tersebut terkenal dengan nama "Taruna Goak".

Karena pertimbangan – pertimbangan politis dan strategis I Gusti Ngurah Panji memindahkan ibukotanya yang didiami hampir sepuluh tahun kearah timur yaitu Sukasada. Di istana yang baru inilah bintang beliau secara cepat bersinar terang. Karena prajurit – prajurit Taruna Goaknya semakin kuat berkat merekrut tenaga – tenaga pelarian dari VOC. Seperti Hendrik Berede Roode dengan anak buahnya, yang diangkat sebagai instruktur Taruna Goak. Setelah merasa diri kuat sesuai petunjuk pawisik yang diterima dan setelah 8 tahun pemerintahannya di Istana Sukasada ki Gusti Ngurah Panji menyerang daerah Blangbangan. Dalam penyerangan tersebut akal dan pikiran yang cemerlang beliau bekerja sama dengan sama dengan prajurit mataram pimpinan Tumenggung Danupaya (Tahun 1602 M). Dari kerja sama ini dalam waktu yang relatif singkat Blangbangan dapat di taklukkan. Kemenangan terhadap Blangbangan di samping kegembiraan bagi prajurit Taruna Goak tetapi sangat sedih karena anak Ki Gusti Ngurah Panji Sakti yang Ketiga yang lahir dari permaisuri Ni Ayu Juruh, gugur dalam pertempuran. Hal ini sangat dirasakan sebagai pukulan yang hebat, bagi beliau karena Ki Danu Dresta sangat diharapkan nantinya sebagai pengganti beliau. Akibat hal itu baliau mengasingkan diri ke sebelah utara sukasada, dimana didaerah tegalan tersebut tumbuh pohon Buleleng (jagung gembal). Selanjutnya setelah 18 tahun beliau beristana di Sukasada secara bertahap

ditinggalkannya dan dibangunlah istana yang baru di sebelah utara Sukasada. Dan istana yang baru tersebut diberi nama SINGARAJA, untuk mengenang keperkasaan Ki Gusti Ngurah Panji Sakti seperti seekor Singa. Dari Puri inilah berkembang dan dikembangkan pembentukan kota baru yang kita kenal bernama KOTA SINGARAJA. Kota yang kelak menjadi Ibu Kota Kabupaten Buleleng hingga sekarang. Singaraja menjadi pusat Kerajaan Buleleng pada abad ke-17 sampai abad ke-18. Tahun 1846 Belanda menjadikan Singaraja sebagai ibu kota Kepulauan Sunda Kecil. Dan Tahun 1958 Buleleng adalah pusat Pemerintahan Provinsi Sunda Kecil dengan Gubernur MR.I Gusti Ketut Pudja, putra Buleleng yang berasal dari Sukasada. Tahun 1960 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No Des.52/2/36-136 Tanggal 23 Juni 1960, ibu kota Provinsi Bali dipindahkan ke Denpasar.

2. Dasar Hukum Pembentukan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng.

Dasar hukum yang melandasi pembentukan dan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2008-2013;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005 – 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2012 – 2017;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 13),
21. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 253); sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 30);

B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BULELENG.

1. Kondisi Geografis Daerah.

a. Batas Administrasi Daerah.

Secara geografis Kabupaten Buleleng terletak pada posisi 6°03'40" - 8°23'00" LS dan 114°25'55" - 115°27'28" BT; berada di belahan Utara Pulau Bali memanjang dari Barat ke Timur. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Buleleng cukup bervariasi, sebagian berupa daerah berbukit dan pegunungan yang membentang di Bagian Selatan, sedangkan di Bagian Utara sepanjang pantai merupakan dataran rendah yang sempit dan kurang landai. Tipologi geografis yang demikian dikenal sebagai *Nyegara Gunung*, posisi yang cukup strategis menurut konsep Hindu yang menganut sistem hulu (*ulun*) dan hilir (*teben*). Dengan batas-batas wilayah di Sebelah Barat Kabupaten Jembrana, Sebelah Utara Laut Bali, Sebelah Timur Kabupaten Karangasem dan di Sebelah Selatan Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung dan Bangli.

b. Luas Wilayah.

Kabupaten Buleleng memiliki potensi pembangunan berupa luas wilayah yang cukup besar, yaitu 1.365,88 Km^2 atau 24,25% dari luas Provinsi Bali. Kabupaten Buleleng merupakan Kabupaten dengan wilayah terluas di Provinsi Bali. Dengan wilayah pantai sepanjang 157,05 Km2, membentang sepanjang pesisir utara Pulau Bali. Secara administrasi wilayah Kabupaten Buleleng mencakup 9 (sembilan) kecamatan, 129 desa, 19 kelurahan, 546 banjar dinas, 63 lingkungan dan 169 Desa Pakraman/ Desa Adat.

Gambar 1

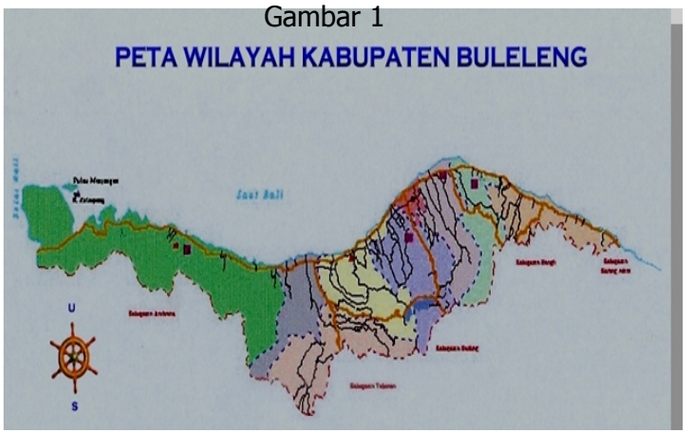

Tabel 1
Luas Kecamatan di Kabupaten Buleleng, 2016

Kecamatan	Panjang Pantai Km	Luas Wilayah Km2
(1)	(2)	(3)
1. Gerokgak	76,89	356,57
2. Seririt	11,61	111,78
3. Busungbiu	-	196,62
4. Banjar	8,06	172,60
5. Sukasada	-	172,93
6. Buleleng	16,52	46,94
7. Sawan	6,92	92,52
8. Kubutambahan	9,82	118,24
9. Tejakula	27,23	97,68
Jumlah/*Total* :	**157,05**	**1 365,88**

Sumber : Buleleng Membangun, 2016

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kecamatan Gerokgak merupakan kecamatan di Kabupaten Buleleng dengan luas wilayah terluas yaitu 356,57 Km2 dan memiliki pantai sepanjang 76,89 Km2. Sedangkan kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Buleleng, yang juga merupakan ibukota Kabupaten Buleleng yaitu 46,94 Km2. Hampir semua kecamatan memiliki pantai kecuali Kecamatan Sukasada dan Kecamatan Busungbiu. Kecamatan Gerokgak memiliki luas wilayah dengan persentase mencapai 26,11 persen dari luas kabupaten. Disusul Kecamatan Busungbiu 14,40 persen, Kecamatan Sukasada 12,66 persen, Kecamatan Banjar 12,62 persen, Kecamatan Kubutambahan 8,66 persen, Kecamatan Seririt, 8,18 Persen, Kecamatan Tejakula 7,15 persen, Kecamatan sawan 6,77 Persen dan Kecamatan Buleleng sebesar 3,44 persen.

Secara administrasi pemerintahan Kecamatan Gerokgak terdiri atas 14 desa dan 75 banjar dinas. Kecamatan Busungbiu meliputi 15 desa dan 41 banjar dinas. Kecamatan Sukasada terdiri atas 14 desa dan 1 kelurahan, 68 banjar dinas dan 5 lingkungan. Banjar dengan wilayah administrasi meliputi 17 desa dan 17 banjar dinas. Selanjutnya Kecamatan Kubutambahan dengan 13 desa dan 46 banjar dinas. Kecamatan Seririt

terdiri atas 20 desa , 1 kelurahan, 80 banjar dinas dan 5 lingkungan. Kecamatan Sawan yang terdiri atas 14 desa dan 68 banjar dinas. Kecamatan Tejakula secara admistrasi terbagi atas 10 desa dan 60 banjar dinas serta Kecamatan Buleleng mencakup, 12 desa dan 17 kelurahan, 41 banjar dinas, 53 lingkungan dan desa pakraman yang bersifat otonom sebanyak 21 desa pakraman.

Gambar 2
Grafik persentase luas kecamatan di Kabupaten Buleleng, 2016

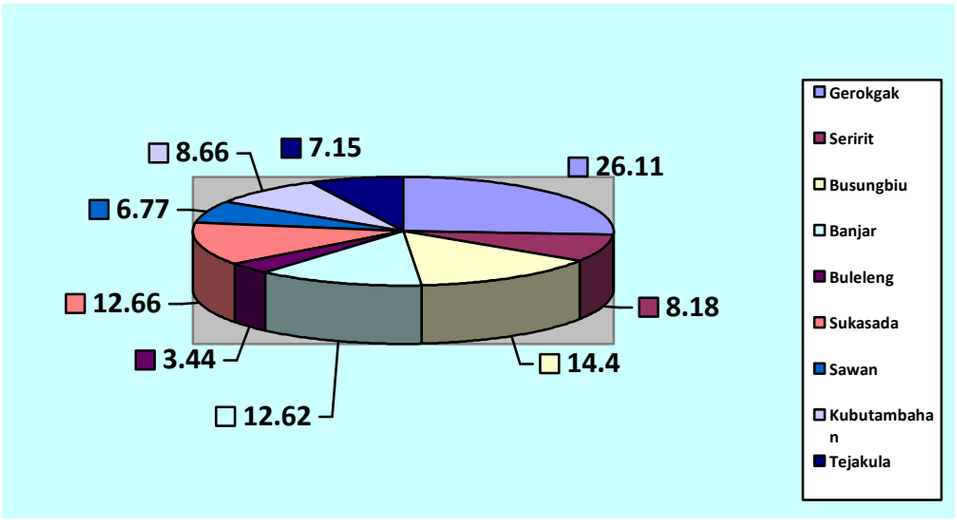

Sumber : Buleleng Membangun, 2016

c. Topografi.

1) Kemiringan Lahan.

Wilayah Kabupaten Buleleng sebagian besar (53,81%) berada pada fisiografi lahan tergolong landai (kemiringan lahan 0-25%). Sisanya tersebar pada kemiringan 25-40% dan di atas 40%. Kecamatan Gerokgak yang memiliki wilayah paling luas, sebagian besar (82,68%) wilayahnya tergolong landai. Sedangkan Kecamatan Busungbiu dengan luas wilayah 9.528 Ha sebagian besar (74,31%) berada pada fisiografi lahan tergolong miring.

2) Ketinggian Tempat.

Ditinjau dari ketinggian tempat, sebagian besar (58,12%) wilayah Kabupaten Buleleng berada pada ketinggian 0-499,9 m dpl.

Daerah yang berada pada ketinggian di atas 1.000 m dpl. hanya sekitar 15,52%, sebagaimana dapat disimak pada Gambar I.3

Gambar 3
Perbandingan Luas Wilayah Kabupaten Buleleng
Berdasarkan Ketinggian Tempat, 2016

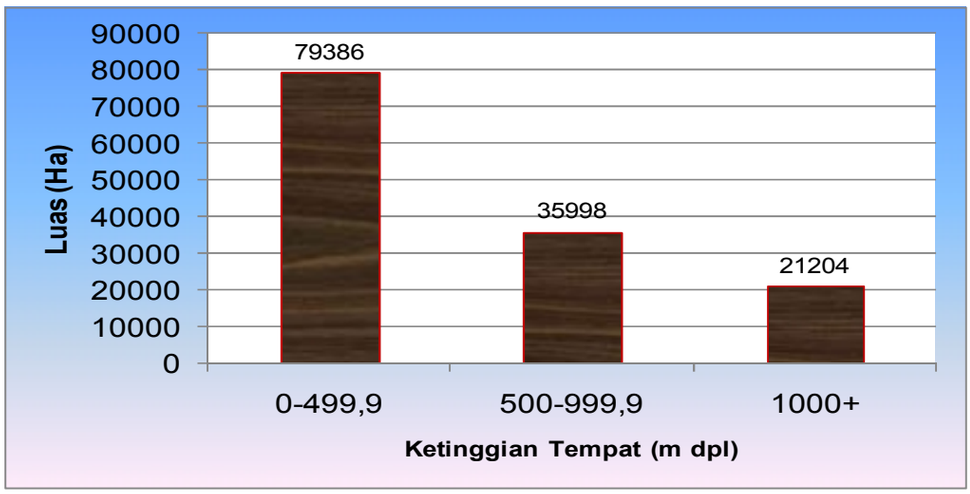

Sumber : Bappeda Kabupaten Buleleng, 2016 (data diolah)

3) Geologi.

a. Struktur dan Karakteristik Geologi.

Struktur geologi wilayah Kabupaten Buleleng tersusun oleh : (1) lapisan aluvial yang tersebar di bagian Utara, (2) batuan gunung berapi tersebar di bagian Selatan, dan (3) formasi Asah, formasi Palasari, dan formasi Prapat Agung tersebar di bagian Barat.

b. Potensi Geologi.

Kabupaten Buleleng mempunyai potensi mineral bukan logam dan batuan yang terbatas. Jenis batuan yang ada antara lain batu kapur, batu apung, batu lahar, batu pilah, tanah liat, batu andesit, dan sirtu. Selama lima tahun terakhir, pengelolaan bahan-bahan galian tersebut belumlah optimal. Jika dikelola dengan baik tentu dapat menunjang pelaksanaan pembangunan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan.

4) Hidrologi.

a. Daerah Aliran Sungai (DAS).

Pengelolaan DAS di wilayah Kabupaten Buleleng selama lima tahun terakhir difokuskan pada DAS prioritas I dan II. Das prioritas I adalah DAS yang prioritas pengelolaannya paling tinggi karena menunjukkan kondisi dan permasalahan biofisik dan sosek DAS paling kritis atau tidak sehat. Sedangkan prioritas II adalah DAS-DAS yang prioritas pengelolaannya sedang.

Dari 12 Sub Wilayah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (SWP DAS) yang ada di Provinsi Bali, 9 SWP DAS diantaranya melingkupi wilayah Kabupaten Buleleng, yaitu Unda (prioritas 1), Blingkang Anyar (prioritas 1), Teluk Terima Pancoran (prioritas 2), Pangiayung (prioritas 2), Saba Daya (prioritas 2), Biluk Poh Gumbrih (prioritas 2), Klatakan Lubang (prioritas 2), Leh Balian (prioritas 2) dan Oten Sungi (prioritas 2).

b. Sungai.

1) Kuantitas Sungai.

Secara kuantitatif, ada 88 sungai di Kabupaten Buleleng; 61 sungai (69%) diantaranya merupakan sungai tadah hujan, yaitu sungai yang hanya mengalirkan air pada musim hujan, sisanya 31% merupakan sungai mengalir sepanjang tahun. Panjang sungai antara 2,3 - 23,2 Km. Tukad Saba merupakan sungai terpanjang yaitu 23,2 Km. Sedangkan yang terpendek adalah Tukad Sema hanya 2,3 Km. Debit maksimal sungai bervariasi antara 112.000 - 62.119.000 m^3/tahun. Sungai yang memiliki debit air tahunan terbesar adalah Tukad Saba mencapai 62.119.000 m^3/tahun, sedangkan yang terkecil adalah Tukad Pekecor hanya 112.000 m^3/tahun.

2) Kualitas Air Sungai.

Secara umum kualias air sungai (Tukad Buleleng, Tukad Saba dan Tukad Banyumala) di bagian hulu dan tengah masih tergolong baik, namun pada bagian hilir sudah tercemar dan tidak layak sebagai air baku air minum karena nilai *Biochemical*

Oxygen Demand (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD), Total Fosfat sebagai P, Besi, Nitrit Sebagai N, Fecal Coliform dan Total Coliform melampaui baku mutu air minum.

c. Air Danau/Waduk/Bendung/Embung.

Terdapat dua buah danau, satu buah waduk, 24 bendung dan satu buah embung di Kabupaten Buleleng dengan total volume air sekitar 123.603.500 m^3. Volume air yang tertampung di danau Buyan sekitar 92.00.000 m^3. Sedangkan di danau Tamblingan sekitar 27.050.000 m^3. Danau Buyan dan Tamblingan merupakan danau vulkanik yang semuanya berada pada rantai pegunungan dan merupakan penyangga tata air di daerah hilir dan sekitarnya. Kondisi danau Buyan maupun Tamblingan lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Proses sedimentasi dan pendangkalan danau ini dipicu oleh pola pengelolaan lahan-lahan pertanian di pinggir danau yang kurang memperhatikan aspek-aspek konservasi tanah dan air. Beban erosi yang tinggi bercampur dengan pupuk dari lahan pertanian menyebabkan kondisi danau mengalami pengayaan nutrien yang memacu pertumbuhan tumbuhan air di danau. Selain danau, juga terdapat waduk dan embung, yaitu waduk Gerokgak di Kecamatan Gerokgak dan embung Tembok di Desa Tembok Kecamatan Tejakula. Secara potensial, volume air waduk Gerokgak rata-rata 3.750.000 m^3 dan kondisinya berfluktuasi menurut musim selama lima tahun terakhir. Pada musim hujan volume air yang tertampung lebih banyak, namun pada musim kemarau akan menurun. Sampai dengan tahun 2011 telah dipersiapkan rencana pembangunan Bendungan Titab di Kecamatan Busungbiu. Pembangunan bendungan ini diharapkan dapat menjawab sebagian persoalan pengembangan pertanian lahan kering di wilayah Kabupaten Buleleng, yang utamanya terkendala karena keterbatasan air irigasi.

d. Mata Air.

Mata air bagi masyarakat Buleleng memiliki nilai yang sangat strategis. Selain memiliki fungsi sosial ekonomi sebagai sumber air baku dan air irigasi, juga punya fungsi religi, yaitu sebagai sarana pelaksanaan ritual/upacara adat/agama. Kedepan kelestarian sumber mata air perlu terus ditingkatkan. Terdapat 243 buah sumber mata air di Kabupaten Buleleng dengan potensi air lebih dari 1.125 liter per detik atau 79,528 juta m^2/tahun.

Tabel 2
Kondisi Beberapa Unsur Iklim di Kabupaten Buleleng,2016

No	Unsur Iklim	Stasiun Pengamatan			
		Meteorologi Ngurah Rai	Geofisika Sanglah	Geofisika Karangasem	Klimatologi Negara
1.	Temperatur (^oC)				
	Maksimum	30,8	32,7	30,3	30,8
	Minimum	25,3	24,32	24,4	23,9
	Rata-rata	27,6	28,0	27,2	26,8
2.	Kelembaban Udara (%)				
	Maksimum	91	90	90	94
	Minimum	76	73	79	87
	Rata-rata	84	82	69	87
3.	Tekanan Udara (mb)	1.008,8	1.009,3	1.006,8	1.011,4
4.	Kecepatan Angin (knot)	6	5	7	3
5.	Curah Hujan (mm)	2.524,8	2.812,6	2.288,6	3.3001,7
6.	Penyinaran Matahari (%)	73	68	52	62

Sumber data : Buleleng Membangun, 2016

5) Klimatologi.

Tipe iklim wilayah Kabupaten Buleleng berdasarkan klasifikasi Schmidth – Ferguson bervariasi mulai dari tipe iklim C (nilai Q = 50,68) di Wanagiri Kecamatan Sukasada dan sekitarnya, sampai tipe F (nilai Q = 170,73 - 244,33) di Pemuteran Kecamatan Gerokgak dan sekitarnya. Suhu udara rata-rata 28,0^oC; kelembaban udara rata-rata mencapai 87%, curah hujan antara 2.288,3 - 3.001,7 mm/tahun atau 190,69 - 250,14 mm/bulan; dan penyiraran matahari mencapai 73%, sebagaimana dapat disimak pada Tabel 2.

2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS DAERAH.

Jumlah penduduk berdasarkan hasil Registrasi Database Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun 2012-2015 seperti dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3

Jumlah Penduduk Kabupaten Buleleng Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2012– 2015
(Berdasarkan Data Hasil Registrasi
Penduduk Pada Server Disdukcapil Kab. Buleleng)

No	Tahun	Penduduk Laki- laki	Penduduk Perempuan	Jumlah penduduk (Orang	Perkembangan (%)	Sex Ratio
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*5*	*6*
1.	2012	485.598	486.336	971.934	0,63	100,15
2.	2013	485.598	405.760	805.723	0,63	99,06
3.	2014	400.963	402.942	806.449	0,63	100,14
4.	2015	404.274	403.324	807.598	0,61	100,24

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Buleleng, 2016

Pada Tahun 2015 jumlah penduduk Kabupaten Buleleng sebanyak 807.598 jiwa yang terdiri dari 404.274 penduduk laki – laki dan 403.324 penduduk perempuan. Penduduk tersebut menyebar di 9 (Sembilan) wilayah kecamatan, sebagaimana tersaji pada tabel 3. Kecamatan Buleleng mempunyai jumlah penduduk paling banyak yaitu 146.198 jiwa atau 18,10 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Buleleng. Besarnya penduduk di Kecamtan Buleleng dipengaruhi faktor bahwa Kecamatan Buleleng merupakan pusat pemerintahan, perekonomian, pendidikan, social, budaya dan lainnya sehingga pembangunan perkantoran, perumahan, perdagangan, transportasi terpusat di wilayah Kecamatan Buleleng. Hal tersebut yang mempengaruhi banyaknya penduduk pendatang yang memilih berdomisili di wilayah Kecamatan Buleleng. Sebaliknya Kecamatan Busungbiu memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu sebanyak 58.662 jiwa atau 7,26 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Buleleng. Kondisi wilayah Kecamatan Busungbiu yang sebagain besar merupakan wilayah perbukitan berpengaruh terhadap besarnya populasi yang mendiami daerah tersebut.

Tabel 4
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Buleleng,
Tahun 2015

Kecamatan	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
Gerokgak	48,573	48,302	96,875
Seririt	51,817	52,618	104,435
Busungbiu	29,178	29,484	58,662
Banjar	46,603	46,468	93,071
Sukasada	41,034	41,201	82,235
Buleleng	73,296	72,902	146,198
Sawan	41,233	41,515	82,748
Kubutambahan	32,485	32,153	64,638
Tejakula	40,055	38,681	78,736
Kab. Buleleng	404,274	403,324	807,598

Sumber Data : Disdukcapil Kab. Buleleng

Kepadatan penduduk Kabupaten Buleleng pada Tahun 2015 mencapai 591,27 orang /Km2. Ini berarti bahwa dalam setiap kilometer persegi wilayah Kabupaten Buleleng dihuni kurang lebih 591 penduduk. Jika dilihat per kecamatan maka rasio kepadatan penduduk tertinggi ada di Kecamatan Buleleng yaitu sebesar 3.114,57 orang/km2, disusul masing – masing oleh Kecamatan Seririt dengan kepadatan mencapai 934,29 orang/Km2, Kecamatan Sawan dengan kepadatan sebesar 894,38 orang/Km2, Kecamatan Tejakula ; 806,06 orang/Km2, Kecamatan Banjar ; 539,23 orang/Km2, Kecamatan Kubutambahan ; 546,67 orang/Km2, Kecamatan Sukasada ; 475,54 orang/Km2, Kecamatan Busungbiu dengan kepadatan mencapai 298,35 orang/km2 serta Kecamatan Gerokgak dengan kepadatan penduduk sebesar 270,93 orang/Km2. Bila dibandingkan dengan keadaan Tahun 2012 dimana kepadatan penduduk Kabupaten Buleleng mencapai 465 jiwa/Km2, selanjutnya meningkat menjadi 467,32 jiwa/Km2 dan menjadi 470,25 jiwa/Km2. Gambaran itu mengindikasikan bahwa terjadi pertambahan penduduk sepanjang kurun waktu Tahun 2012-2015.

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Buleleng dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 mengalami penurunan yang signifikan. Kurun waktu 2011-2012 pertumbuhannya mencapai 0,635, Tahun 2012-2013 tingkat pertumbuhan menurun dari pertumbuhan tahun sebelumnya yakni sebesar 0,631 dan pada Tahun 2013-2014 laju pertumbuhan mencapai 0,627.

Gambaran pertumbuhan penduduk Kabupaten Buleleng ditunjukkan gambar 4 berikut ini.

Gambar 4
Pertumbuhan Penduduk Kab. Buleleng 2012-2015

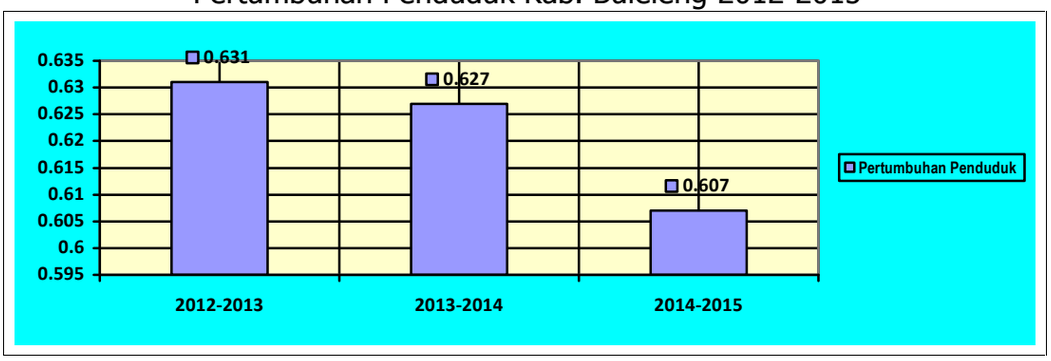

Sumber data : Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2016.

Kurun waktu Tahun 2012 – 2015 pertumbuhan penduduk terbesar terjadi di Kecamatan Sukasada yaitu sebesar berturut – turut, 0.936 antara Tahun 2012-2013 dan 0.954 pada Tahun 2013-2014 dan 0,865 kurun waktu Tahun 2014-2015. Hal ini dipengaruhi factor bahwa wilayah ini merupakan wilayah berkembang yang dekat dengan pusat kegiatan perekonomian, pendidikan, pemerintahan dan sector jasa. Besarnya pertumbuhan penduduk juga terjadi di Kecamatan Gerokgak yang mencapai 0,845 pada kurun Tahun 2014-2015.

Tabel 5
Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan Kabupaten Buleleng, Tahun 2012-2015

Kecamatan	Pertumbuhan Penduduk		
	2012-2013	2013-2014	2014-2015
Gerokgak	0.869	0.886	0.845
Seririt	0.609	0.549	0.476
Busungbiu	0.399	0.447	0.198
Banjar	0.628	0.666	0.606
Sukasada	0.936	0.954	0.865
Buleleng	0.775	0.769	0.786
Sawan	0.506	0.420	0.401
Kubutambahan	0.386	0.421	0.456
Tejakula	0.093	0.056	0.111
Kab. Buleleng	0.631	0.627	0.607

Sumber data : Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2016

Kecamatan dengan pertumbuhan penduduk terendah adalah Kecamatan Tejakula dengan pertumbuhan penduduk pada kurun Tahun 2012-2015 rata – rata 0,086.

Berdasarkan data *Buleleng Membangun 2016* bahwa rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Buleleng pada Tahun 2015 sebesar 99,26 yang berarti dari setiap 100 orang penduduk perempuan di Kabupaten Buleleng terdapat sebanyak 99 orang penduduk laki – laki. Namun dari Data Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng berdasarkan data penduduk Tahun 2015, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Buleleng sebesar 100,24. Angka ini menunjukkan adanya perimbangan antara penduduk laki – laki dan perempuan di Kabupaten Buleleng.

Tabel 6
Rasio Jenis Kelamin Per Kecamatan Kabupaten Buleleng Tahun 2015

Kecamatan	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	RJK
1	2	3	4	5
Gerokgak	48,573	48,302	96,875	100.56
Seririt	51,817	52,618	104,435	98.48
Busungbiu	29,178	29,484	58,662	98.96
Banjar	46,603	46,468	93,071	100.29
Sukasada	41,034	41,201	82,235	99.59
Buleleng	73,296	72,902	146,198	100.54
Sawan	41,233	41,515	82,748	99.32
Kubutambahan	32,485	32,153	64,638	101.03
Tejakula	40,055	38,681	78,736	103.55
Kab. Buleleng	404,274	403,324	807,598	100.24

Sumber data : Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2016

Mengacu pada rasio jenis kelamin penduduk tiap kecamatan di Kabupaten Buleleng terdapat 5 Kecamatan yang sex rasio penduduknya lebih dari 100, yang berarti bahwa di wilayah tersebut jumlah penduduknya didominasi oleh penduduk laki – laki. Sex Rasio Penduduk di Kecamatan Gerokgak (100,56), Kecamatan Banjar (100,29), Kecamatan Buleleng (100,54), Kecamatan Kubutambahan (101,03), Kecamatan Tejakula (103,55).

Jika mengacu pada Struktur Usia maka Penduduk Kabupaten Buleleng paling banyak berada pada struktur usia 10-14 Tahun dan 30-34 Tahun.

Sekitar 70,977 jiwa atau sekitar 8,79 persen penduduk kabupaten Buleleng berada pada struktur usia 30-34 Tahun. Sedangkan pada Struktur Usia 10-14 Tahun penduduk kabupaten Buleleng sebanyak 69,997 jiwa atau 8,67 persen dari keseluruhan Penduduk Kabupaten Buleleng pada Tahun 2015.

Sedangkan untuk struktur usia yang paling sedikit jumlah penduduknya berada pada tingkatan usia 70-74 Tahun yakni berjumlah 18,681 jiwa. Jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun) di Kabupaten Buleleng sebesar 178.410 jiwa. Penduduk usia tua (>=65 tahun) ; 69.317 jiwa dan penduduk usia produktif 559.871 jiwa.

Berdasarkan tingkat pendidikan maka Penduduk Kabupaten Buleleng dapat dirinci sebagai berikut, belum bersekolah 190.095 jiwa, 56.189 jiwa tidak tamat SD, 277.683 duduk di jenjang Sekolah Dasar, 100.814 berada pada tingkatan pendidikan SMP. Pada jenjang pendidikan menengah, yakni pada tingkat SMA terdapat 145.897 jiwa dan pada jenjang pendidikan tinggi yaitu pada jenjang Diploma II ; 8.337 jiwa, Diploma III ; 7.017 jiwa, Strata I ; 20.336 jiwa Strata II ; 1.091 jiwa dan Strata III ; 139 jiwa.

Tabel 7
Tingkat Pendidikan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2015

No	Tingkat Pendidikan	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	TIDAK/BELUM SEKOLAH	91,559	98,536	190,095
2	BELUM TAMAT SD	27,579	28,610	56,189
3	TAMAT SD	125,612	152,071	277,683
4	TAMAT SLTP	52,833	47,981	100,814
5	TAMAT SLTA	85,155	60,742	145,897
6	D1/D2	5,225	3,112	8,337
7	D3/SARJANA MUDA	3,686	3,331	7,017
8	D4/STRATA 1	11,759	8,577	20,336
9	S2	768	323	1,091
10	S3	98	41	139
	Jumlah	404,274	403,324	807,598

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Buleleng.

Jika dilihat dari jenis kegiatan atau pekerjaan yang dilaksanakan maka komposisi Penduduk Kabupaten Buleleng pada Tahun 2015 dapat diuraikan

sebagai berikut : Penduduk yang belum bekerja berjumlah 214,655 jiwa, mengurus rumah tangga 74,307 jiwa, Mahasiswa / Pelajar sebanyak 107,031 jiwa, PNS sebanyak 13,077 jiwa dan sisanya bekerja pada sector lainnya. Secara rinci komposisi penduduk Kabupaten Buleleng berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan dapat dilihat pada tabel 10.

Aspek lain yang tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan kependudukan adalah ketersediaan pemukiman yang layak. Pada Tahun 2016 jumlah rumah yang ada di 9 kecamatan di Kabupaten Buleleng 171.218 rumah yang terinci sebagai berikut ; **di Kecamatan Banjar** terdapat 2.512 unit rumah mewah, 14.484 unit rumah sederhana, dan 4025 unit rumah tidak layak huni. Dari total rumah yang ada 745 unit diantaranya merupakan rumah tradisional dan 160 unit merupakan rumah rawan bencana. Di **Kecamatan Buleleng** terdapat 27.073 unit rumah yang terdiri atas 6.207 unit rumah mewah, 25.652 unit rumah sederhana, dan 3.101 unit rumah tidak layak huni. Dari total rumah yang ada 32 unit diantaranya merupakan rumah tradisional dan 1.070 unit merupakan rumah rawan bencana. Di **Kecamatan Busungbiu** terdapat 11.505 unit rumah yang terdiri atas 1.232 unit rumah mewah, 8.846 unit rumah sederhana, dan 1.427 unit rumah tidak layak huni. Dari total rumah yang ada 1 unit diantaranya merupakan rumah tradisional dan 113 unit merupakan rumah rawan bencana. Di **Kecamatan Gerokgak** terdapat 22.601 unit rumah yang terdiri atas 3.198 unit rumah mewah, 13.668 unit rumah sederhana, dan 5.735 unit rumah tidak layak huni. Dari total rumah yang ada 9 unit diantaranya merupakan rumah tradisional dan 1.506 unit merupakan rumah rawan bencana. Di **Kecamatan Kubutambahan** terdapat 13.525 unit rumah yang terdiri atas 485 unit rumah mewah, 8.561 unit rumah sederhana, dan 4.479 unit rumah tidak layak huni. Dari total rumah yang ada 8 unit diantaranya merupakan rumah tradisional dan 648 unit merupakan rumah rawan bencana. Di **Kecamatan Tejakula** terdapat 15.229 unit rumah yang terdiri atas 743 unit rumah mewah, 11.334 unit rumah sederhana, dan 2.730 unit rumah tidak layak huni. Dari total rumah yang ada 28 unit diantaranya merupakan rumah tradisional dan 452 unit merupakan rumah rawan bencana. Di **Kecamatan Seririt** terdapat 20.395 unit rumah yang terdiri atas 3.093 unit rumah

mewah, 14.787 unit rumah sederhana, dan 2.515 unit rumah tidak layak huni. Dari total rumah yang ada 58 unit diantaranya merupakan rumah tradisional dan 449 unit merupakan rumah rawan bencana. Di **Kecamatan Sukasada** terdapat 22.668 unit rumah yang terdiri atas 2.306 unit rumah mewah, 13.570 unit rumah sederhana, dan 2.003 unit rumah tidak layak huni. Dari total rumah yang ada 132 unit diantaranya merupakan rumah tradisional dan 408 unit merupakan rumah rawan bencana. Di **Kecamatan sawan** terdapat 17.500 unit rumah yang terdiri atas 2.306 unit rumah mewah, 13.570 unit rumah sederhana, dan 1.712 unit rumah tidak layak huni. Dari total rumah yang ada 28 unit diantaranya merupakan rumah tradisional dan 452 unit merupakan rumah rawan bencana.

3. KONDISI EKONOMI KABUPATEN BULELENG.

a. Potensi Unggulan Daerah.

Kabupaten Buleleng dengan berbagai potensinya mempunyai beberapa produk unggulan yaitu :

- Pertanian tanaman pangan, yaitu mangga, jeruk, anggur, durian, pisang, stroberry, wani ngumpen dan tamarillo.
- Perkebunan, yaitu kopi robusta.
- Peternakan, yaitu sapi Bali.
- Perikanan, terdiri dari ikan kerapu, ikan bandeng.
- Industri kecil/kerajinan, terdiri dari anyaman inovatif,anyaman bambu serta kerajinan kain tenun ikat (endek) Buleleng.

Produk unggulan Kabupaten Buleleng berkembang karena ditunjang oleh keunggulan alamiah dan keunggulan kompetitif. Keunggulan alamiah berupa kecocokan lahan dengan tanaman di atasnya dan kultur masyarakat Buleleng yang senang bekerja. Sedangkan keunggulan kompetitif perlu ditingkatkan dengan meningkatkan teknologi inovatif, efisiensi produksi, dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia, keberlanjutan dan ramah lingkungan, produksi bersih dari penggunaan bahan kimia yang tidak bisa ditoleransi oleh alam. Selain itu telah dilakukan namun masih perlu peningkatan berupa upaya-upaya perbaikan

dan perluasan aspek pemasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- **Produk Unggulan Pertanian Tanaman Pangan.**

  Produk hasil Tanaman pangan di Kabupaten Buleleng didominasi oleh hasil tanaman buah – buahan yang tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng. Beberapa produk tanaman buah – buahan yang sudah diakui oleh pangsa pasar baik lokal maupun nasional diantaranya adalah anggur bali, anggur prabubestari, mangga arumanis, mangga legong (amplem sari), durian bestala, jeruk keprok tejakula, pisang hijau taiwan, buah naga merah, wani ngumpen, stroberi dan tamarillo. Variaetas Anggur Hitam yang banyak dibudidayakan di Kabupaten Buleleng adalah Anggur Bali, dengan kulit tipis dan rasanya yang masis segar sehingga cocok sebagai bahan olahan minuman. Anggur jenis ini banyak dibudidayakan di Desa Temukus, Desa Dencarik dan Desa Banjar di Kecamatan Banjar, Desa Banyupoh di Kecamatan Gerokgak dan beberapa wilayah di Kecamatan Seririt. Produktifitas $\pm$ 20 ton /ha/th dengan masa panen 3 kali setahun kisaran Bulan Pebruari – Maret, Juni – Agustus dan Bulan Nopember.

Tabel 8
Perkembangan Luas Panen dan Produksi Komoditas Pertanian
Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2015

Jenis Komoditi	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
	Luas panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Padi								
Padi Sawah	22.359	134.028	2.361	136.286	22.198	133.440	21.135	128.209
Padi Ladang	-	-	-	-	-	-	-	-
Palawija								
Jagung	7.714	24.941	5.860	23.524	6.603	18.397	5.674	15.850
Kedelai	127	161	25	37	27	29	18	20
Kacang Tanah	1.860	2.555	1.093	1.538	996	1.200	1.061	1.215
Kacang Hijau	390	243	295	188	330	213	134	82
Ubi Kayu	553	12.657	627	15.947	635	14.572	753	7.787

Ubi Jalar	20	222	18	286	12	115	9	101
Sayur-sayuran								
Cabe	2.738	47.816	294	5.301	1.197	4.291	1.311	6.006
Bawang Merah	10	55	15	77	24	78	28	142
Bawang Putih	2	5	3	28	1	1	1	10
Kubis	92	3.013	107	3.816	82	2.519	61	2.063
Wortel	107	2.063	143	3.227	94	1.831	58	1.480
Kentang	43	1.221	49	1.534	43	1.206	25	560
Buah-buahan								
Mangga	7.261	27.622	7.147	30.078	3.625	27.711	5.565	36.732
Rambutan	3.096	18.138	3.021	6.567	1.346	11.236	2.425	12.626
Anggur	3.891	8.754	390	9.118	798	9.474	919	11.038
Pisang	9.370	19.026	910	19.343	929	25.499	429	2.127
Manggis	522	1.650	543	755	222	1.915	826	4.96
Durian	1.032	3.308	1.068	1.224	702	3.890	n/a	n/a
Jeruk	1.714	3.268	1.519	4.219	1.285	7.651	1.476	10.080

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan

- **Produk Unggulan Perkebunan.**

  Tanaman kopi dibudidayakan dan berkembang dengan baik di dataran tinggi hampir di semua kecamatan di Kabupaten Buleleng kecuali Kecamatan Gerokgak dan Kecamatan Buleleng yang wilayahnya berada di dataran rendah. Petani kopi di Kabupaten Buleleng sudah menguasai teknik budidaya kopi dengan teknik menyambung sehingga ketinggian pohon dan jumlah cabang dalam satu pohon bisa diatur. Dengan pengaturan ketinggian dan cabang, memungkinkan petik merah sehingga kualitas kopi terjamin. Areal pengembangan kopi robusta mencapai seluas 10.745 Ha dengan produksi sebanyak 2.106,71 ton. Pemasaran kopi menjangkau pasar lokal, nasional dan ekspor. Selain dipasarkan dalam bentuk bijian, di Buleleng sudah ada industri yang mengolah biji kopi menjadi kopi bubuk. Pemasaran kopi bubuk menjangkau pasar lokal dan nasional.

Tabel 9
Luas Areal Tanaman dan Produksi Perkebunan di Kabupaten Buleleng
Dalam Tahun 2012 – 2015

No	Komoditas	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
		Luas areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas areal (Ha)	Produksi (Ton)
1.	Kopi robusta	10.810	8.977,21	10.764,91	6.215,90	10.744,91	8.468,49	10.512,91	9.454,62
2.	Kopi arabika	2.615	875,35	2.714	767,55	2.767,00	554,24	2.842,00	2.610,75
3.	Cengkeh	7.551	6.553,97	7.572,10	2.359,98	7.857,32	5.270,75	7.075,39	4.907,39
4.	Panili	119	1,43	118,42	0,62	-	-	-	-
5.	Kakao	1.265	761,04	1.273,63	755,18	1.278,58	759,54	1.267,50	884,15
6.	Jambu mete	2.224	529,97	2.223,45	567,05	2.162,45	369,45	1.812,50	478,04
7.	Tembakau virginia	562	1.342,76	396	554,57	343,50	626,61	435,50	491,02
8	Kelapa dalam	8.631	6.865,42	8.730,69	8.026,82	8.772,69	8.994,46	8.773,69	10.178,83
9	Kelapa hybrid	41	32,53	39,60	28,28	39,60	27,63	39,60	30,34
10	Kapok	258	50,32	257,75	25,08	257,75	68,46	257,75	72,84
11	Lada	9	1,75	8,90	1,88	4,75	0,02	5,00	-
12	Lontar	189	62,91	189	81,19	182,00	71,83	189,00	48,55
13	Aren/Enau	123	48,62	123	40,61	108,00	35,93	137,00	16,29
14	Kunir	85	470,00	60	335,75	-	-	-	-

Sumber Data : Dinas Kehutanan dan Perkebunan,2016

- **Produk Unggulan Peternakan.**

  Ternak sapi dikembangkan di semua kecamatan di Kabupaten Buleleng. Dengan melibatkan kelompok-kelompok tani ternak khususnya di wilayah Kecamatan Gerokgak, Banjar, Tejakula, dan Kubutambahan yang merupakan penghasil ternak sapi potong yang cukup banyak di Kabupaten Buleleng. Populasi sapi potong di Kabupaten Buleleng mencapai 121.613 ekor. Pemasaran daging sapi sementara ini masih memenuhi pasar lokal Bali. Sedangkan ternak sapi selain dipasarkan di pasar lokal Bali, juga pasar nasional sampai ke Jakarta.

Tabel 10

Populasi Ternak di Kabupaten Buleleng
Tahun 2012-2015

NO	JENIS TERNAK	BANYAKNYA POPULASI (ekor)			
		2012	2013	2014	2015
1	Sapi potong	145.600	120.127	121.613	119.491
2	Kerbau	173	106	134	103
3	Kuda	47	43	43	5
4	Babi Bali	153.344	134.794	133.457	111.802
5	Babi Sadleback	43.078	46.604	46.281	44.412
6	Babi landrace	26.254	27.689	27.960	28.837
7	Kambing kacang	6.429	6.105	6.191	59.950
8	Kambing PE	33.043	25.409	25.969	22.482
9	Ayam buras	752.772	768.450	778.028	776.789
10	Ayam ras petelur	15.124	18.997	19.012	22.253
11	Ayam ras pedaging	209.087	227.958	285.816	229.850
12	Itik	67.104	70.110	64.289	70.662

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan

Tabel 11
Perkembangan Produksi Ternak di Kabupaten Buleleng
Tahun 2012- 2015

NO	JENIS PRODUKSI	TAHUN (TON)			
		2012	2013	2014	2015
I	**PRODUKSI DAGING**	9.301,17	6.428,25	6.353,61	7.858,344
1	Daging sapi	2.917,40	1.668,39	1.205,91	1.496,951
2	Daging Kerbau	19,82	11,06	88,85	86,857
3	Daging Kambing	110,55	97,45	107,94	116,753
4	Daging babi	5.146,42	3.576,45	3.859,41	5.147,904
5	Daging ayam buras	869,47	828,39	838,45	826,599
6	Daging ayam ras	200,61	206,75	216,59	224,984
7	Daging itik	36,90	39,76	36,46	37,999
II	**PRODUKSI TELUR**	1.063,77	1.046,70	1.019,78	1.055,834
1	Telur ayam buras	517,91	497,57	503,62	496,496
2	Telur ayam ras	127,04	143,05	143,16	169,824
3	Telur itik	418,82	406,08	373,01	388,714

- **Produk Unggulan Perikanan.**

  Produk unggulan perikanan terutama budidaya ikan bandeng, ikan kerapu, rumput laut dan mutiara yang dilakukan di Kecamatan Gerokgak. Pembenihan ini didukung oleh keberadaan Balai Besar Penelitian Budidaya Perikanan Laut Gondol. Produksi perikanan budidaya mencapai 280,3 ton kerapu, 22,9 ton bandeng, dengan luas budidaya 64,9 Ha atau 12,98 persen dari potensi budidaya yang seluas 500 Ha. Potensi yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya rumput laut seluas 250 Ha dengan pemanfaatan baru mencapai 14,0 Ha (5,60 %) dengan hasil produksi sebesar 84,9 ton, masih tersisa peluang investasi seluas 236,0 Ha (94,4%). Potensi yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya mutiara seluas 250 Ha dan pemanfaatan baru mencapai seluas 130,0 Ha (52,0%), dengan hasil produksi mencapai 5 ton dan sisa peluang investasi seluas 120.0 Ha (48,0%) Pemasaran benih bandeng selain memenuhi pasar nasional juga pasar internasional. Pemasaran benih bandeng sangat fluktuatif. Pemasaran kerapu konsumsi menjangkau pasar nasional.

- **Produk Unggulan Industri.**

  Produk industri yang dapat dikembangkan berupa industri rumahan kerajinan anyaman bambu yang terutama dikembangkan di Desa Sangket Kecamatan Sukasada, dan anyaman inovatif terutama dikembangkan di Desa Ambengan Kecamatan Sukasada. Dengan bimbingan dan arahan instansi terkait kedua jenis produksi kerajinan itu selain telah memasuki pasar lokal, juga menjangkau pasar nasional dan pasar internasional. Namun demikian masih dirasa ada kekurangan karena produksi kerajinan inovatif Desa Ambengan yang mestinya sudah bisa memberi merk sendiri sampai saat ini belum memiliki merk sendiri. Hasil kerajinan ini diberi merk dan dipasarkan ke pasar internasional oleh pengusaha dari Denpasar dan Gianyar. Dengan adanya merk dan ciri khas daerah asal, diharapkan akan meningkatkan daya jual dan pada akhirnya akan mensejahterakan para perajinnya.

Tabel 12
Unit Usaha Industri Menurut Kelompok Industri di Kabupaten Buleleng
Dalam Tahun 2012-2015

No	Kelompok Industri	Jumlah Unit Usaha				Tenaga Kerja (orang)			
		2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	12	9	24	19	86	9	93	116
2	Tekstil, Pakaian dan Kulit	5	1	6	2	25	20	39	7
3	Kayu bambu, Rumput laut dan Perabot rumah tangga	26	14	10	6	134	61	31	29
4	Kertas dan barang dari kertas, Percetakan dan	1	6	1	-	1	16	3	-
5	Penerbitan	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kimia dan barang-barang dari bahan kimia	4	7	7	8	11	30	20	29
7	Barang dari logam, mesin dan peralatan Barang galian bukan logam kecuali minyak bumi & batu bara	1	-	-	-	22	-	-	-
8	Pengolahan lainnya	4	5	13	29	19	13	43	29
	Jumlah	**5**	**4**	**6**	**6**	**298**	**149**	**229**	**210**

Sumber : Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian, 2016

Kerajinan tenun ikat (endek) khas Buleleng, sebagai salah satu hasil industry kerajinan yang sangat potensial, dikembangkan dalam rangka menggali kembali kekayaan di bidang sandang. Tenun ikat Buleleng sampai saat ini memiliki 19 motif khas, dari motif yang telah ada sejak jaman penjajahan Belanda hingga motif modern yang mulai dikembangkan. Salah satu strategi untuk melestarikan, mengembangkan sekaligus memperkenalkan desain – desain endek atau tenun ikat khas Buleleng di mata dunia dilaksanakan melalui event Buleleng Endek Carnaval.

b. Tinjauan Perkembangan Ekonomi.

1. PDRB.

Kabupaten Buleleng memiliki luas seperempat bagian dari luas Pulau Bali secara keseluruhan. Dengan luas wilayah yang paling luas diantara seluruh kabupaten/kota di Bali, maka dapat dipastikan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Buleleng juga

melimpah. Hal ini menjadi faktor penting dalam mendukung perekonomian Kabupaten Buleleng selain pembangunan infrasetruktur yang terus dibenahi. Tercatat PDRB Kabupaten Buleleng pada Tahun 2015 sebesar 25,49 triliun rupiah. Angka ini cukup membanggakan mengingat PDRB yang terbentuk Tahun 2014 mencapai 22,33 triliun rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 3,16 triliun rupiah. Dengan total nilai yang telah dicapai pada Tahun 2015, ternyata Kabupaten Buleleng mampu menyumbangkan 14,39 persen dari total PDRB yang terbentuk di Provinsi Bali.

Tabel 13
PDRB Kabupaten Buleleng,menurut lapangan usaha,
Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan (jutaan rupiah)
Tahun 2014 – 2015

No	Lapangan Usaha	Harga Berlaku		Harga Konstan	
		2014	2015	2014	2015
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	4,962,772.75	5,827,841.72	3,852,901.95	4,047,026.08
2	Pertambangan dan penggalian	312,473.15	309,350.65	244,957.29	226,095.58
3	Industri pengolahan	1,312,046.64	1,523,192.24	1,045,296.50	1,124,680.82
4	Pengadaan listrik dan gas	21,185.68	28,270.31	23,815.09	24,050.79
5	Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang	30,316.16	33,362.67	29,017.74	29,612.60
6	Kontruksi	1,911,311.29	2,179,944.08	1,520,223.00	1,594,865.95
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	2,552,611.37	2,915,780.27	2,073,157.03	2,231,121.31
8	Transportasi dan pergudangan	299,768.45	318,169.35	244,231.42	248,788.00
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	3,976,744.14	4,568,390.83	2,685,427.10	2,850,331.99
10	Informasi dan komunikasi	1,156,206.32	1,329,434.19	1,107,804.07	1,216,479.65
11	Jasa keuangan dan asuransi	1,033,479.65	1,112,633.96	796,663.86	836,819.39
12	Real Estate	1,155,815.06	1,219,217.11	983,398.40	1,013,232.39
13	Jasa Perusahaan	140,228.18	161,312.55	117,960.08	126,166.48
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	1,196,011.12	1,302,672.06	1,103,406.64	1,175,870.56
15	Jasa pendidikan	1,480,762.15	1,705,187.86	1,226,308.70	1,337,772.90
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	444,753.21	512,723.54	378,005.37	410,224.98
	Jasa lainnya	388,651.16	444,314.11	308,258.66	331,702.85
	PDRB	22,339,136.48	25,491,797.49	17,740,832.90	18,824,842.31

Sumber data : Tinjauan Perkembangan Ekonomi
Kabupaten Buleleng Tahun 2016

Sementara potret perekonomian Kabupaten Buleleng tanpa melihat pengaruh perubahan harga, Kabupaten Buleleng mencatat angka PDRB Tahun 2015 sebesar 18,82 triliun rupiah. Nilai ini juga mengalami peningkatan sebesar 6,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 17,74 triliun rupiah. Hal ini merupakan gambaran yang baik dalam upaya pembangunan ekonomi di Kabupaten Buleleng.

2. Pertumbuhan Ekonomi.

Laju pertumbuhan ekonomi diperlihatkan dengan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan yang menggambarkan pertumbuhan produksi barang dan jasa yang dihasilkan seluruh sektor yang berperan dalam kegiatan ekonomi.

Gambar 5

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng
Tahun 2011 – 2015 (persen)

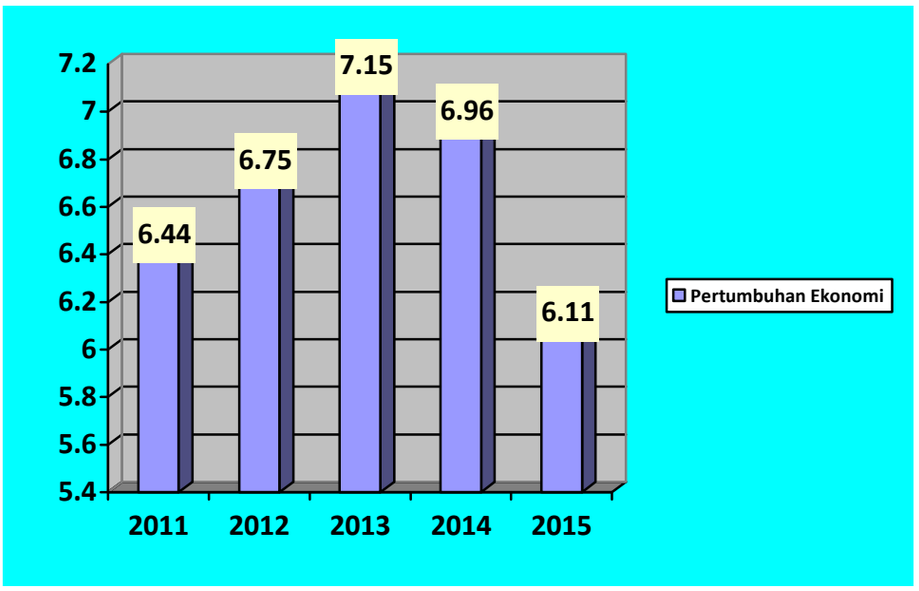

Sumber data : Tinjauan Perkembangan Ekonomi Kabupaten Buleleng Tahun 2016

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng sepanjang Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 mengalami fluktuasi. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng

terjadi selama Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013. Hal ini diduga karena digulirkannya wacana pendirian Bandar Udara yang akan dibangun di wilayah Kabupaten Buleleng. Salah satu efek domino dari adanya wacana tersebut adalah terdongkraknya berbagai aktivitas ekonomi terutama percepatan investasi dan pembangunan properti di Kabupaten Buleleng. Hal ini sejalan dengan laju pertumbuhan kategori konstruksi yang pada Tahun 2012 meningkat tajam sebesar 19,62 persen. Kategori lain yang juga meningkat cukup tajam pada tahun tersebut kategori pengadaan listrik, gas dan air bersih. Hal ini sangat berkaitan dengan adanya percepatan pembangunan property yang sedang berjalan pada tahun tersebut karena adanya peningkatan permintaan pasokan listrik dan air. Hal ini terbukti dengan adnya peningkatan jumlah pelanggan listrik yaitu sebesar 12.429 pelanggan.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi Kabupaten Buleleng terjadi pada Tahun 2013 yaitu sebesar 7,15 persen. Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh jasa keuangan dan asuransi 14,35 persen, jasa pendidikan 14,62 persen serta jasa kesehatan sebesar 13,65 persen. Pertumbuhan yang terjadi pada kategori jasa dan keuangan didorong oleh meningkatnya kepercayaan terhadap lembaga keuangan sebagai dampak dari diturunkannya BI Rate menjadi 5,75 pada Tahun 2012. Disisi lain dorongan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng yang berasala dari kategori pendidikan disaebabkan oleh pembukaan fakultas baru di salah satu perguruan tinggi negeri di Kabupaten Buleleng serta berbagai fasilitas pendidikan lainnya semakain menambah kepercayaan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan di wilayah Kabupaten Buleleng. Dari kategori kesehatan, pertumbuhan ekonomi didorong oleh adanya kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka pemberian jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat yang memiliki KTP Provinsi Bali dalam bentuk Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM).

Pada Tahun 2014 laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng mencapai 6,96 persen. Pada tahun ini laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng mengalami perlambatan dibandingkan

tahun sebelumnya. Memasuki Tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi kembali mengalami perlambatan hingga mencapai 6,11 persen. Namun perlu diapresiasi bahwa Kabupaten Buleleng mampu menjaga pertumbuhan ekonomi tetap diatas 6 persen. Bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yang juga mengalami perlambatan hingga mencapai 6,04 persen.

Tabel 14

Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Buleleng
Menurut Lapangan Usaha, 2012 – 2015 (persen)

No	Lapangan Usaha	Harga Konstan			
		2012	2013	2014	2015
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	4.67	2.85	4.90	5.04
2	Pertambangan dan penggalian	16.05	8.20	(0.23)	(7.70)
3	Industri pengolahan	6.43	9.46	9.26	7.59
4	Pengadaan listrik dan gas	11.31	8.97	2.70	0.99
5	Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang	3.34	6.34	7.27	2.05
6	Kontruksi	19.62	6.77	1.75	4.91
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	6.20	9.89	7.29	7.62
8	Transportasi dan pergudangan	5.53	7.59	9.33	1.87
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	7.36	7.91	6.78	6.14
10	Informasi dan komunikasi	8.35	6.57	7.11	9.81
11	Jasa keuangan dan asuransi	9.27	14.35	9.66	5.04
12	Real Estate	6.61	7.77	8.94	3.03
13	Jasa Perusahaan	2.27	10.05	7.63	6.96
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	1.26	0.67	10.89	6.57
15	Jasa pendidikan	0.49	14.62	10.76	9.09
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	6.24	13.65	12.56	8.52
	Jasa lainnya	5.14	4.93	7.84	7.61
	PDRB	6.78	7.15	6.69	6.11

Sumber data : Tinjauan Perkembangan Ekonomi Kabupaten Buleleng Tahun 2016

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng pada Tahun 2015 didorong oleh kategori informasi dan komunikasi sebesar 9,81 persen. Kemudian diikuti oleh jasa pendidikan yang mencapai sebesar 9,09 persen. Sedangkan kotegori lainnya memiliki pertumbuhan dibawah 9 persen pada Tahun 2015

Bahkan terdapat satu kategori yang mengalami kontraksi yang cukup dalam pada Tahun 2015 yaitu pertambangan dan penggalian dengan kontraksi sebesar 7,70 persen. Hal ini disebabkan kareana Pemerintah Kabupaten Buleleng telah mengeluarkan larangan terhadap usaha – usaha penggalian pasir liar yang tidak memiliki ijin usaha.

Gambar 6

Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Buleleng dengan Provinsi Bali, 2011 – 2015
(persen)

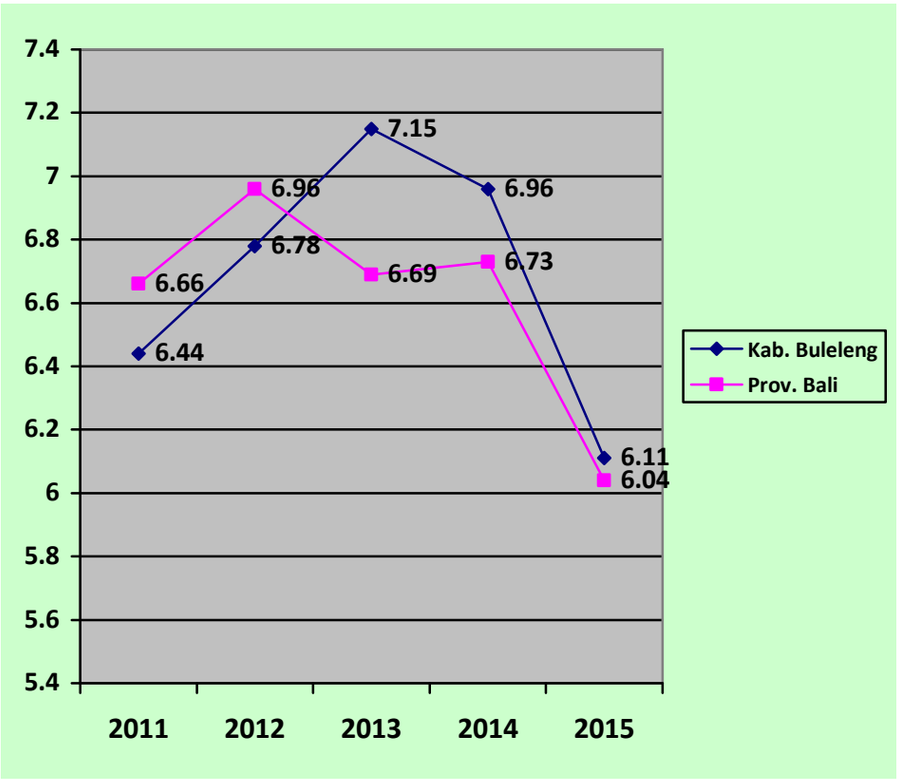

Sumber data : Tinjauan Perkembangan Ekonomi Kabupaten Buleleng Tahun 2016

3. Struktur Ekonomi.

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk melihat potensi sektoral suatu wilayah adalah struktur ekonomi. Struktur ekonomi adalah komposisi peranan masing – masing sector menurut lapangan usaha perekonomian. Struktur ekonomi digunakan untuk mengetahui sejauh mana peranan masing – masing kategori dalam pembangunan ekonomi sehingga dapat dipetakan potensi dari wialayah tersebut. Salah satu indicator yang sering dipergunakan untuk mengamati struktur perekonomian adalah distribusi presentase dari nilai tambah bruto lapangan usaha.

Gambar 7

Kontribusi Sektor Primer, Sekunder dan Tersier
Dalam PDRB Kabupaten Buleleng, 2015 (persen)

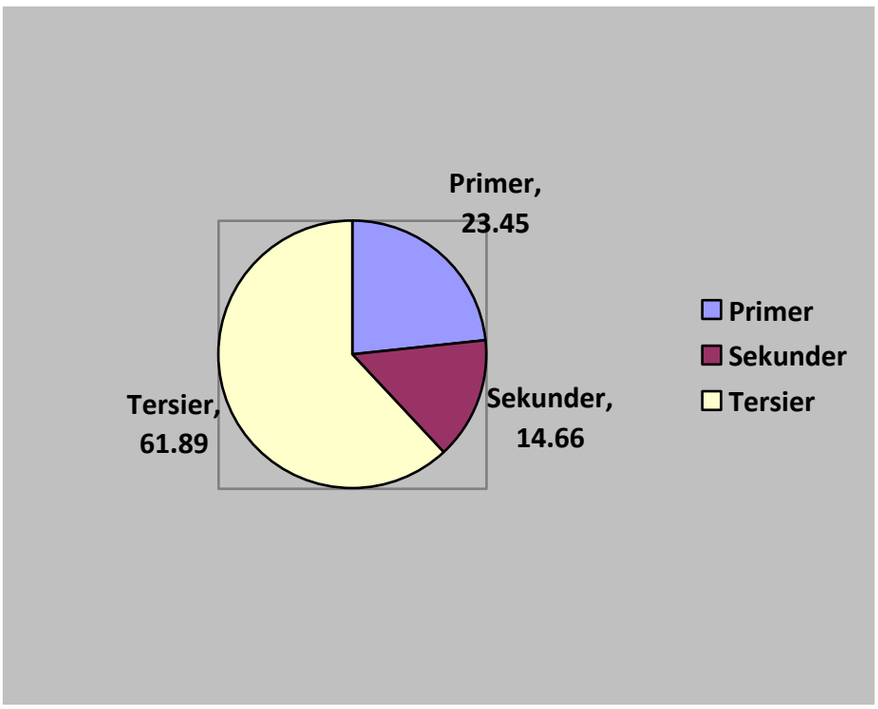

Sumber data : Tinjauan Perkembangan Ekonomi Kabupaten Buleleng Tahun 2016

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa peranan sector tersier masih mendominasi di Kabupaten Buleleng dengan total capaian share pada Tahun 2015 sebesar 61,16 persen. Angka ini mengalami

penurunan dibandingkan angka capaian pada Tahun 2014 yang mencapai 61,89 persen.Hal ini terjadi karena adanya penguatan pada sector primer yang didominasi oleh kategori pertanian sebagai akibat suksesnya Upaya Khusus (UPSUS) Pertanian yang dilaksanakan Tahun 2015. Sehingga pada Tahun 2015 sektor primer memberikan share sebesar 24,08 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 23,45 persen.

Gambar 8

Lima Kontributor Terbesar
PDRB Kabupaten Buleleng Tahun 2015 (persen)

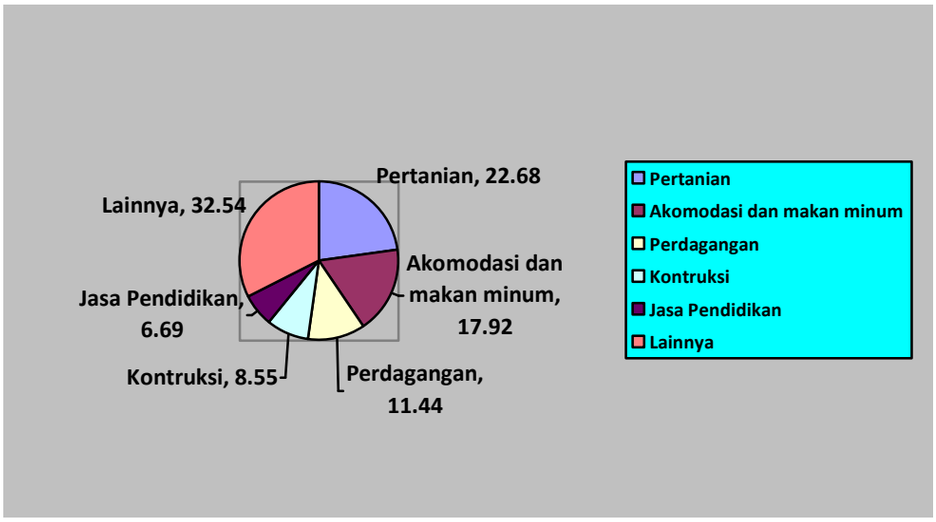

Sumber data : Tinjauan Perkembangan Ekonomi Kabupaten Buleleng Tahun 2016

Secara lebih rinci dalam kategori pembentuk PDRB, Kabupaten Buleleng memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pada Tahun 2015, kategori pertanian masih mendominasi perekonomian Kabupaten Buleleng dengan share sebesar 22,86 persen. Di posisi berikutnya adalah kategori pariwisata yang diwakili oleh kategori akomodasi dan penyediaan makan minum yang memberikan kontribusi sebesar 17,92 persen. Kategori lainnya yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian di Kabupaten Buleleng adalah perdagangan besar dan eceran. Tahun 2015 kontribusi perdagangan besar dan eceran di Kabupaten Buleleng sebesar 11,44 persen. Kemudian berikutnya kategori kontruksi dan

jasa pendidikan yang masing – masing memberikan kontribusi sebesar 8,55 persen dan 6,69 persen.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kategori pertanian masih mendominasi perekonomian di Kabupaten Buleleng. Walaupun mengalami kecendrungan penurunan, kategori pertanian Tahun 2015 mampu meningkatkan share terhadap perekonomian di Kabupaten Buleleng dari total share 22,05 persen menjadi 22,86 persen. Kondisi ini cukup menggembirakan mengingat bahwa potensi Kabupaten Buleleng masih di dominasi oleh sector pertanian. Dengan total luas lahan sawah sebesar 10.780 Ha, Kabupaten Buleleng masih mampu menjaga ketahanan pangannya bahkan menjadi penyuplai beras kedua di Provinsi Bali setelah Kabupaten Tabanan.

Gambar 9

Kontribusi Kategori Pertanian
Dalam Pembentukan PDRB Kabupaten Buleleng, 2015

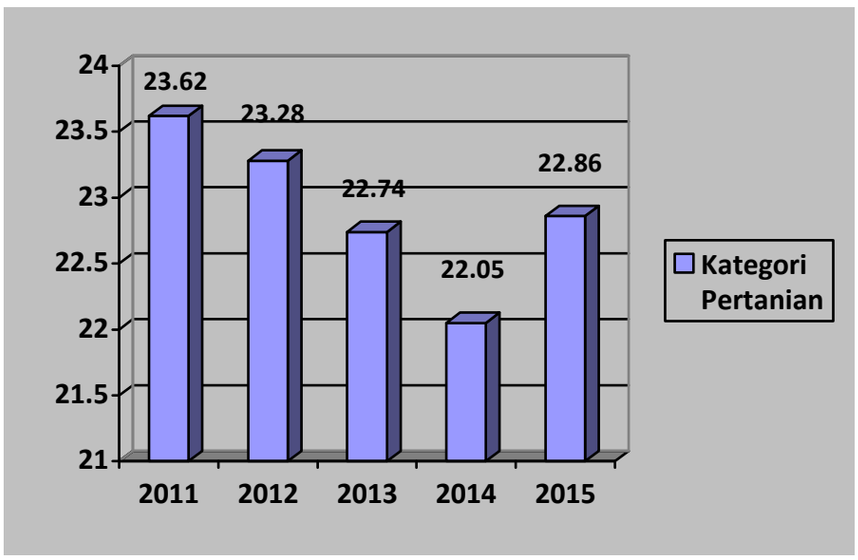

Sumber data : Tinjauan Perkembangan Ekonomi Kabupaten Buleleng Tahun 2016

PDRB Perkapita Kabupaten Buleleng Atas dasar harga Berlaku pada Tahun 2015 tercatat sebesar 34,78 juta rupiah. Angka ini masih dibawah PDRB Perkapita Provinsi Bali yang mencapai 42,66 juta rupiah. Namun disisi lain angka ini merupakan peningkatan sebesar

4,67 juta rupiah atau 14,43 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selama Tahun 2011 – 2015 rata – rata pendapatan perkapita penduduk di Kabupaten Buleleng mencapai 31 juta rupiah.

Berdasarkan harga konstan Tahun 2010, maka PDRB Perkapita Kabupaten Buleleng Tahun 2015 sebesar 29,13 juta rupiah. Laju peningkatan PDRB perkapita atas dasar harga konstan mencapai 5,47 persen masih jauh lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Buleleng yang hanya mencapao 0,6 persen.

Tabel 15
Indikator Agregatif PDRB Kabupaten Buleleng
2011 - 2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	PDRB Harga Berlaku (Miliar Rp)	15.190,23	16.927,30	19.144,31	22.339,14	25.491,80
2	PDRB Harga Konstan (Miliar Rp)	14.497,37	15.480,21	16.587,19	17.740,83	18.824,84
3	Jumlah penduduk pertengahan tahun (000 org)	630,3	634,3	638,3	642,3	646,2
4	PDRB perkapita harga berlaku (Juta Rp)	24,10	26,69	29,99	34,78	39,46
5	PDRB perkapita harga konstan (Juta Rp)	23,00	24,41	25,99	27,62	29,13

Sumber data : Tinjauan Perkembangan Ekonomi Kabupaten Buleleng Tahun 2016

Dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Bali maka nilai PDRB perkapita Kabupaten Buleleng berada di posisi kelima yaitu sebesar 39,45 juta rupiah. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan empat kabupaten/kota lain di Bali yaitu Kabupaten Badung (66,97 juta rupiah), Kota Denpasar (43,68 juta rupiah) Kabupaten Gianyar (40,50 juta rupiah) dan Kabupaten Tabanan (39,47 juta rupiah). Hal ini disebabkan jumlah penduduk Kabupaten Buleleng lebih besar dibandingkan jumlah penduduk keempat kabupaten/kota diatas.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. VISI DAN MISI.

1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*. Visi mempunyai jangkauan 5 tahun atau lebih ke depan dan merupakan keadaan ideal yang sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta posisi (*setting*) daerah di masa depan.

Berdasarkan kondisi umum daerah Kabupaten Buleleng saat ini, permasalahan, tantangan dan isu-isu strategis yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis, potensi Sumberdaya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2012-2017 dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Buleleng sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI, SEJAHTERA, DAMAI DAN LESTARI BERLANDASKAN TRI HITA KARANA"

Visi pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2012 – 2017 ini menjadi arah cita-cita pembangunan yang sistematis bagi penyelenggara pemerintah Kabupaten Buleleng dan segenap pemangku kepentingan.

Arah menuju visi tersebut dapat diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut:

1) Mandiri, diukur dengan:

a. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah yang berbasis kinerja.
b. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good and Clean Governance), yaitu profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas KKN.
c. Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna bagi masyarakat.
d. Tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan dan kemajuan pembangunan daerah.
e. Meningkatnya partisipasi/swadaya masyarakat dalam memenuhi sendiri kebutuhan pokok.
f. Terwujudnya pariwisata berbasis budaya dan keindahan alam yang unik, serta terbangunya sinergitas dengan sektor pertanian.

2) Sejahtera, diukur dengan :

a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditunjukkan oleh:
    1. Tingkat Pendidikan antara lain: terlaksananya wajib belajar 12 tahun, meningkatnya jumlah penduduk berpendidikan tinggi, menurunnya tingkat pendidikan terendah, meningkatnya angka partisipasi sekolah, dan tersedianya tenaga siap pakai melalui pendidikan kejuruan.
    2. Tingkat Kesehatan antara lain: meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, angka harapan hidup dan terpenuhnya sistem pelayanan sosial melalui Asuransi Kesehatan.
    3. Kemampuan daya beli masyarakat yang ditunjukan oleh meningkatnya pendapatan riil per kapita.
b. Berkurangnya jumlah penduduk miskin, pengangguran terbuka dan kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan sosial.
c. Meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, sanitasi, dan kesempatan berusaha).

d. Berkembangnya keterpaduan antar sektor dalam pengelolaan potensi ekonomi daerah yang berwawasan lingkungan.
e. Tersedianya jaringan Infrastruktur yang mampu mendorong perekonomian perdesaan.

3) Damai, diukur dengan:

a. Teraktualisasinya keragaman budaya lokal.
b. Terjaminnya kebebasan beribadah.
c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan supremasi hukum.

4) Lestari, diukur dengan:

a. Terkelolanya lingkungan hidup dan pemanfaatan SDA secara berkelanjutan.
b. Terpeliharanya adat istiadat dan nilai-nilai budaya Bali sebagai pedoman di dalam kehidupan bermasyarakat.
c. Terwujudnya lingkungan permukiman yang berlandaskan kearifan lokal.
d. Terwujudnya penggunaan ruang dan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Buleleng untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1) Percepatan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi, merata dan berkualitas.
2) Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah.
3) Mewujudkan Sumber Daya Manusia berkualitas yang profesional, berbudaya dan bermoral.

4) Menumbuhkembangkan sinergi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam setiap tahapan pembangunan.
5) Pelestarian budaya Bali yang ditumbuhkembangkan pada masyarakat.
6) Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.
7) Mewujudkan pembangunan Buleleng yang berkelanjutan (sustainable development).

3. Tujuan

Mengacu pada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik, maka tujuan yang secara spesifik ingin dicapai dalam 5 tahun kedepan adalah:

1) Meningkatkan perekonomian daerah.
2) Meningkatkan daya saing daerah.
3) Meningkatkan daya beli masyarakat.
4) Meningkatkan produksi dan daya saing produk unggulan daerah.
5) Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
6) Mewujudkan sinergi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan.
7) Lestarinya kebudayaan Bali yang adiluhung.
8) Mewujudkan keadilan di semua bidang pembangunan, dan
9) Mewujudkan pembangunan sesuai peruntukan ruang dan berwawasan lingkungan.

4. Sasaran.

Sasaran umum yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017, dimana atas keberhasilan target ini diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan.
2) Meningkatnya penanaman modal baik asing maupun dalam negeri.
3) Meningkatnya pendapatan masyarakat.
4) Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk unggulan daerah.
5) Meningkatnya daya saing produk-produk unggulan daerah di pasaran.

6) Terwujudnya struktur perekonomian yang tangguh berbasis unggulan daerah.
7) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.
8) Meningkatnya derajad kesehatan masyarakat.
9) Meningkatnya profesionalisme dan kemandirian Aparatur Pemerintah.
10) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
11) Meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan dalam setiap tahapan pembangunan.
12) Tumbuhnya rasa memiliki dikalangan pemangku kepentingan.
13) Meningkatnya peran pemangku kepentingan dalam pengendalian pembangunan.
14) Meningkatnya apresiasi masyarakat dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal yang adiluhung.
15) Tumbuh dan berkembangnya kesenian berbasis budaya Bali.
16) Tegaknya supremasi hukum, ketentraman, dan keadilan disemua aspek kehidupan.
17) Terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan sosial.
18) Terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan.
19) Terjaganya kualitas sumber daya alam.
20) Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan
21) Meningkatnya pemanfaatan sumber energi terbarukan.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH.

1. Strategi Pembangunan.

Strategi merupakan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam rangka mengimplementasikan agenda pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang dicanangkan, ditempuh melalui 6 (enam) strategi umum yang kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam strategi khusus yang bersifat operasional. Keenam strategi umum dimaksud adalah sebagai berikut.

1) Strategi Percepatan Reformasi Pemerintahan.

Strategi ini mencakup upaya perbaikan tata kelola pemerintahan agar lebih dinamis dan demokratis, dengan iklim kerja yang nyaman,

ditunjang oleh sikap mental dan perilaku aparatur pemerintah yang jujur, bertanggungjawab, memiliki etos kerja tinggi, santun, dan berbudaya.

2) Strategi Pemberdayaan SDM.

Penguatan sikap mental aparatur dan masyarakat agar memiliki daya saing dalam kehidupan global dengan tetap menjunjung nilai-nilai kearifan lokal guna menciptakan kehidupan yang harmonis dengan mengedepankan komunikasi, koodinasi dan keterbukaan.

3) Strategi Partisipatif

Penciptaan situasi dan kondisi agar masyarakat mampu berperan aktif dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian hasil-hasil pembangunan.

4) Strategi Pemerataan.

Menjamin bahwa pembangunan di segala bidang dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat secara manusiawi dan berkeadilan.

5) Strategi Percepatan Pembangunan Ekonomi Berbasis Sinergi antar sector.

Mengembangkan kegiatan pembangunan ekonomi secara menyeluruh sesuai dengan potensi yang ada di masyarakat, sehingga mampu memberikan kontribusi yang semakin besar dalam mewujudkan Buleleng yang Mandiri, Sejahtera, Damai dan Lestari.

6) Strategi Percepatan Pembangunan Infrastruktur.

Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur perdesaan yang dapat memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan bidang pembangunan lainnya dan mempercepat pengentasan kemiskinan.

Strategi umum di atas dijabarkan lebih lanjut menjadi beberapa strategi yang sifatnya lebih operasional sejalan dengan tujuan dan sasaran masing-masing misi, sebagai berikut :

1) Menumbuhkembangkan perekonomian berbasis masyarakat Meningkatkan infrastruktur penunjang pembangunan ekonomi.
2) Pemetaan potensi dan promosi investasi daerah.
3) Peningkatan penyerapan tenaga kerja.
4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk unggulan daerah.
5) Meningkatkan penanganan panen dan pasca produksi dalam rangka peningkatan daya saing.
6) Pemetaan dan pengembangan struktur perekonomian yang berbasis unggulan daerah.
7) Meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan pemerataan pendidikan disemua jenjang.
8) Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan sampai ke pelosok desa.
9) Meningkatkan profesionalisme dan kemandirian Aparatur Pemerintah.
10) Penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel dan jujur.
11) Meningkatkan koordinasi dan partisipasi pemangku kepentingan dalam setiap tahapan pembangunan.
12) Meningkatkan peran pemangku kepentingan dalam pengendalian pembangunan.
13) Meningkatkan penggalian, pengembangan dan pelestarian kebudaya-an Bali yang adiluhung.
14) Meningkatkan penggalian, pengembangan dan pelestarian kesenian berbasis budaya Bali.
15) Meningkatkan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
16) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar.
17) Pangarusutamaan gender dalam berbagai aspek pembangunan.
18) Pengembangan pembangunan sesuai peruntukan ruang dan berwawasan lingkungan.
19) Peningkatan kualitas penanganan bencana.
20) Pengembangan energi terbarukan dan ramah lingkungan.

2. Arah Kebijakan.

Kebijakan merupakan arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Arah kebijakan yang ditempuh selama kurun waktu tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut :

1) Menetapkan zonasi pemanfaatan kawasan sesuai potensinya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat.
2) Meningkatkan kualitas input produksi baik dengan dukungan penelitian maupun penerapan Iptek.
3) Pemetaan potensi dan zonasi kawasan pertanian untuk mendorong produksi skala ekonomi, kontinyuitas produksi dan mengefektifkan pembinaan peningkatan mutu produk.
4) Mendorong terbentuknya kawasan pertanian organik yang terstandarisasi dan tersertifikasi sehingga dapat bersaing dalam segmen pasar premium.
5) Memperkuat dan memberdayakan petani, nelayan, petambak, pedagang dan pengrajin/pelaku industri kreatif.
6) Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan daya tawar dan kompetisi (competitive advantage) sektor pertanian, koperasi, perdagangan, UMKM dan pariwisata.
7) Meningkatkan dan rehabilitasi infrastruktur penunjang pembangunan ekonomi.
8) Meningkatkan kondisi jalan di perdesaan, termasuk jalan usaha tani.
9) Menjamin akses perekonomian masyarakat.
10) Menyediakan pelayanan dan akses air bersih dan listrik dengan harga terjangkau
11) Pengembangan sarana prasarana pemasaran produk pertanian, industri kreatif/kerajinan/UKM.
12) Penyusunan profil investasi daerah.
13) Meningkatkan promosi investasi di dalam dan di luar negeri.
14) Mewujudkan proses perijinan yang cepat, mudah dan tidak berbeaya tinggi.
15) Menjamin keamanan dan ketertiban berinvestasi.

16) Menyediakan pelayanan kepada publik secara terpadu.
17) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja agar mempunyai daya saing.
18) Pendidikan dan latihan kewirausahaan di tingkat pemula dan menengah dalam mendukung inovasi dan kreativitas.
19) Meningkatkan investasi untuk terciptanya lapangan kerja.
20) Pemetaan potensi produk unggulan daerah yang mempunyai daya saing dan layak jual.
21) Meningkatkan produksi dan kualitas produk unggulan daerah.
22) Meningkatkan kualitas dan kemasan produk olahan agar mempunyai daya tarik dan daya saing.
23) Meningkatkan sentuhan Iptek dan inovasi terhadap produk-produk pertanian maupun industri kreatif/kerajinan/UKM.
24) Revitalisasi pasar tradisional melalui peningkatan kenyamanan, kemampuan bersaing, penguatan permodalan, dsb.
25) Mengembangkan sektor-sektor/lapangan usaha yang basis dan memberikan kontribusi tinggi dalam membentuk struktur perekonomian daerah.
26) Mengembangkan sektor-sektor/lapangan usaha yang pertumbuhannya tinggi dan mempunyai keunggulan komparatif.
27) Mendorong perkembangan kawasan-kawasan ekonomi penyangga, khususnya pusat-pusat ekonomi di tingkat kecamatan.
28) Percepatan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Sembilan tahun yang merata dan bermutu.
29) Meningkatkan ketersediaan, kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik
30) Meningkatkan akses, pemerataan dan relevansi pendidikan menengah yang berkualitas.
31) Meningkatkan kualitas Pendidikan Luar Sekolah.
32) Peningkatan akses dan investasi sarana dan prasarana pendidikan.
33) Pemantapan sekolah nasional bertaraf internasional.
34) Peningkatan prastasi olahraga.

35) Peningkatan aksesibilitas, pemerataan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat miskin.
36) Mendekatkan pelayanan paripurna dengan masyarakat di seluruh pelosok wilayah.
37) Peningkatan kualifikasi RSUD.
38) Peningkatan ketersediaan tenaga medis dan paramedis, terutama untuk pelayanan kesehatan dasar di daerah terpencil dan tertinggal.
39) Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular.
40) Penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil, bayi dan anak balita.
41) Meningkatkan disiplin dan waskat bagi Aparatur di lingkungan Pemkab Buleleng.
42) Meningkatkan kualitas Aparatur Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
43) Mengembangkan dan menata sistem kepegawaian daerah sesuai dengan kebutuhan struktur kelembagaan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
44) Penerapan sistem rekrutmen dan pengembangan karier PNS secara transparan, akuntabel dan berdasarkan prestasi (merit based).
45) Meningkatkan prosedur pelayanan administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.
46) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan dengan penerapan standar pelayanan minimum yang pelaksanaanya dapat diakses oleh masyarakat.
47) Meningkatkan dan menata prosedur kerja, pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kecepatan dan keakuratan dalam setiap pengambilan keputusan.
48) Peningkatan peran serta pemangku kepentingan dalam setiap tahapan pembangunan dengan mengedepankan komunikasi, koordinasi dan keterbukaan.
49) Pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan dan pengendalian pembangunan.

50) Pengembangan dan pemeliharaan kebudayaan daerah yang memiliki keunikan dan adiluhung.
51) Melestarikan kesenian-kesenian khas Buleleng.
52) Menumbuhkembangkan suasana kebebasan berkreasi dibidang seni dan budaya.
53) Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan kesenian dan kebudayaan.
54) Memberikan insentif kepada kegiatan seni dan budaya.
55) Mengembangkan budaya dan kesadaran hukum dikalangan aparat dan masyarakat dalam rangka penegakan supremasi hokum.
56) Menciptakan dan mengembangkan kondisi sosial budaya yang kondusif bagi tumbuhkembangnya kesadaran HAM masyarakat.
57) Meningkatkan koordinasi, pengkajian dan penataan peraturan daerah melalui Program Legislasi Daerah (prolegda).
58) Sosialisasi produk hukum daerah pada stakeholders dan masyarakat luas.
59) Meningkatkan dan memeratakan pelayanan sosial bagi penyandang masalah social.
60) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan pelayanan sosial bagi para penyandang masalah sosial/masyarakat miskin.
61) Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat ataupun dunia usaha terhadap penyandang masalah social.
62) Perbaikan dan pengembangan infrastruktur fisik, terutama jalan, jaringan air bersih dan listrik di perdesaan.
63) Pengendalian pertumbuhan penduduk.
64) Pelembagaan pangarusutamaan gender dan anak.
65) Meningkatkan dan memeratakan pelayanan pemberdayaan perempuan.
66) Meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam berbagai aktivitas pembangunan.

67) Optimalisasi kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada lahan kritis, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga kelestarian hutan.
68) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga kelestarian hutan dan SDA lainnya.
69) Melakukan konservasi sumber mata air.
70) Mengembangkan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (sustainable), termasuk optimalisasi Ruang Terbuka Hijau.
71) Memberikan insentif kepada kelompok maupun orang perorangan yang berperan aktif/berjasa dalam pelestarian lingkungan hidup.
72) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penanganan bencana dan pasca bencana.
73) Relokasi penduduk pesisir yang rawan terjadi bencana.
74) Menetapkan jalur dan ruang evakuasi bagi penduduk rawan terkena bencana.
75) Pengembangan kajian dan pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan yang murah dan ramah lingkungan.

C. PRIORITAS DAERAH.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan Tahun 2012-2017, dicanangkan 12 Agenda Prioritas atau Prioritas Agenda Strategis (12 PAS) sebagai berikut :

1. Penataan Birokrasi dan Kemandirian Aparatur Pemerintah.

Penataan Birokrasi dan Kemandirian Aparatur Pemerintah menjadi prioritas dalam rangka peningkatan profesionalisme Aparatur Pemerintah serta mewujudkan *Good Governance* dalam mengelola potensi serta penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat.

2. Penanggulangan Kemiskinan.

Dinamis dan kompleksnya permasalahan kemiskinan sehingga dalam penanganannya memerlukan integrasi berbagai program kegiatan dan

lintas sektoral. Penanggulangan kemiskinan merupakan agenda prioritas yang harus ditangani secara berkesinambungan dan sistemik melalui berbagai urusan dengan program dan kegiatan yang mampu mengentaskan kondisi miskinnya atau sifatnya pengamanan terhadap penderitaan keluarga miskin agar jangan terjerumus kedalam kondisi yang lebih terpuruk.

3. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan.

Pembangunan urusan pendidikan merupakan salah satu indikator penting dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karenanya, Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan menjadi agenda prioritas karena permasalahan yang dihadapi adalah belum meratanya masyarakat usia belajar dapat mengakses kesempatan belajar pada pendidikan formal maupun non formal, sehingga Angka Partisipasi Sekolah (APS) belum mencapai seratus persen, demikian juga kualitas SDM-nya masih perlu peningkatan. Sejalan dengan upaya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar, secara simultan dilakukan peningkatan persentase kelulusan siswa serta kualitas lulusan, sehingga kedepan akan berkembang SDM yang dapat memenuhi kebutuhan pelaku pembangunan, mampu membangun dirinya sendiri, membangun Bangsa dan Negara, serta mampu bersaing merebut pasar kerja baik dalam tataran regional, nasional maupun internasional.

4. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Kesehatan.

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu indikator penting dalam penentuan dan peningkatan IPM. Kualitas kesehatan masyarakat yang indikasinya tercermin melalui peningkatan umur harapan hidup merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan seluruh pembangunan yang dilaksanakan secara terintegrasi dan lintas urusan. Pembangunan kesehatan dilakukan melalui pencegahan, pemeliharaan kesehatan dan rehabilitasi kesehatan. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai dan harga hidup sehat, maka pemerintah harus mampu menyediakan kebutuhan sarana prasarana kesehatan dan tenaga medis

yang berkualitas dengan pelayanan prima. Untuk itu pembangunan kesehatan masih perlu ditingkatkan dan menjadi prioritas pembangunan.

5. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja.

Kesenjangan antara jumlah angkatan kerja dengan kesempatan kerja, pertumbuhan tenaga kerja lebih cepat dibandingkan kemampuan penciptaan kesempatan/perluasan lapangan kerja dan kemampuan tenaga kerja untuk menciptakan kesempatan kerja baru secara mandiri masih kurang merupakan salah satu tugas dan tanggungjawab pemerintah bersama *stakeholders* lainnya yang harus ditangani secara serius, sistematis dan terarah. Sehubungan dengan itu, maka agenda Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja menjadi prioritas pembangunan lima tahun kedepan. Agenda ini searah dengan agenda Perbaikan iklim investasi. Investasi yang semakin berkembang dan meningkat, akan berdampak pada tumbuhnya lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja, sehingga pendapatan dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

6. Pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah yang indikatornya tercermin dari sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dan sejauh mana peningkatan produktivitas sektoral memberikan kontribusi dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Mencermati kondisi dan potensi ekonomi Buleleng yang berbasis pada pertanian dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam pembangunan perdesaan, maka pembangunan pertanian (pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan), industri kecil dan kepariwisataan dalam mendukung pembangunan perekonomian Buleleng menjadi domain agenda prioritas pembangunan ekonomi. Bangkit dan berkembangnya kegiatan pertanian di perdesaan akan mampu meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan petani yang berdampak positif terhadap

penanggulangan kemiskinan yang jumlahnya relatif cukup besar di sektor lapangan usaha pertanian tersebut.

7. **Pembangunan Infrastruktur.**

   Keberhasilan pembangunan pendidikan, kesehatan maupun ekonomi membutuhkan dukungan infrastruktur yang baik dan mantap. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur menjadi agenda prioritas dalam rangka menyiapkan sarana dan prasarana pendukung yang memadai guna mengakselerasi pembangunan daerah dalam segala aspek dimaksud.

8. **Perbaikan Iklim Investasi.**

   Perbaikan iklim investasi menjadi agenda prioritas sejalan dengan perkembangan kependudukan, khususnya ketenagakerjaan dan penciptaan lapangan usaha/lapangan kerja dalam rangka mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Peningkatan investasi didorong melalui upaya-upaya berkesinambungan menyangkut penyempurnaan pelayanan perijinan, optimalisasi pemanfaatan potensi daerah, promosi peluang investasi, dan menggerakkan sektor riil. Peningkatan investasi diharapkan mampu semakin memperkuat keandirian keuangan daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

9. **Penegakan Hukum, Ketentraman dan Ketertiban.**

   Agenda Penegakan Hukum, Ketentraman dan Ketertiban menjadi prioritas pembangunan dalam upaya menciptakan dan menjamin adanya kepastian hukum/supremasi hukum serta menghargai hak azasi manusia. Demikian juga ketentraman dan ketertiban dimaksudkan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi investor dalam berinvestasi.

10. **Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan.**

    Agenda Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah menjadi prioritas sejalan dengan Bali sebagai daerah tujuan wisata budaya. Dengan adanya agenda prioritas ini, maka akan digali, diidentifikasi dan dikembangkan potensi budaya daerah, serta dilestarikannya kebudayaan dan kesenian daerah yang khas dan adiluhung.

11. **Peningkatan Kualitas Penanganan Bencana.**

Agenda Peningkatan Kualitas Penanganan Bencana menjadi prioritas sehubungan dengan wilayah Kabupaten Buleleng yang rentan/rawan bencana. Dengan meningkatnya kualitas penanganan bencana diharapkan segala kemungkinan bencana yang akan terjadi dapat diantisipasi dan dimitigasi.

12. Peningkatan Kualitas dan Pelestarian Fungsi Lingkungan.

Tidak bisa dihindari, peningkatan pembangunan akan memberikan tekanan terhadap lingkungan. Sementara itu, peningkatan kuallitas hidup masyarakat dan kelestarian hasil-hasil pembangunan membutuhkan kondisi lingkungan hidup yang semakin baik. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan menjadi prioritas pembangunan agar kegiatan pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati secara berkelanjutan.

Penjabaran lebih lanjut 12 Prioritas Agenda Strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1) Penataan Birokrasi dan kemandirian aparatur pemerintahan meliputi :
   a. Penerapan sistem rekrutmen dan perkembangan karier PNS secara transparan, akuntabel dan berdasarkan prestasi *(merit based).*
   b. Meningkatkan kinerja dengan memperbaiki prosedur kerja, pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kecepatan dan keakuratan layanan, dan mengatur kembali struktur organisasi agar makin efisien dan efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, regulasi, pengawasan dan penegakan aturan.
   c. Memperbaiki kesejahteraan pegawai sehingga makin mencerminkan resiko, tanggung jawab, beban kerja yang realistis dan berimbang.
   d. Melakukan pengawasan kinerja, termasuk pemberantasan korupsi dan penerapan disiplin serta hukuman yang tegas bagi pelanggaran sumpah jabatan, aturan, disiplin, dan etika kerja birokrasi.
   e. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan dengan penerapan standar pelayanan minimum yang diketahui masyarakat beserta pemantauan pelaksanaannya oleh masyarakat.
2) Penanggulangan kemiskinan, meliputi :

a. Melanjutkan program pengarusutamaan semua program penanggulangan kemiskinan sebagai pendukung program PNPM-Mandiri.
b. Mendorong peran aktif masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan pembangunan (community based monitoring).
c. Intensifikasi pelaksanaan program-program berlapis untuk rakyat miskin.

3) Perbaikan dan pengembangan infrastruktur fisik, terutama jalan di perdesaan, air bersih dan jaringan irigasi.
   a. Peningkatan peran Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi.
   b. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan meliputi :
   c. Pemetaan minat dan bakat siswa di masing-masing jenjang sekolah.
   d. Melakukan pengkajian kebutuhan kualifikasi SDM/tenaga kerja saat ini dan akan datang.
   e. Perbaikan secara mendasar kualitas kurikulum dan penyediaan buku-buku yang berkualitas.
   f. Meneruskan dan mengefektifkan program rehabilitasi gedung sekolah, memperbaiki dan menambah prasarana fisik sekolah, serta penggunaan teknologi informatika dalam proses pengajaran.
   g. Pemanfaatan alokasi anggaran pendidikan pada APBD secara optimal untuk mewujudkan pendidikan berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat secara adil.
   h. Penyempurnaan data base guru, pemetaan potensi guru, dan pemerataan sebaran guru di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng.
   i. Melanjutkan upaya perbaikan penghasilan guru.
   j. Mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam menciptakan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan bermutu.

4) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan, terdiri dari :
   a. Mendekatkan pelayanan paripurna dengan masyarakat ke seluruh pelosok wilayah.
   b. Meningkatkan sarana dan prasarana Puskesmas, Pustu dan Polindes.

c. Membangun 2 (dua) rumah sakit tanpa kelas di wilayah Timur dan Barat.
d. Meningkatkan kualifikasi RSUD menjadi rumah sakit tipe A sehingga bisa menjadi rumah sakit pendidikan.
e. Menyempurnakan dan memantapkan pelaksaan program jaminan kesehatan masyarakat Bali Mandara (JKBM) dan program jaminan kesehatan lainnya.
f. Penurunan tingkat kematian ibu melahirkan, pencegahan penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria, TBC dan penyakit menular lainnya.
g. Mengurangi tingkat prevelansi gizi buruk balita.
h. Penguatan program keluarga berencana.
i. Meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme tenaga medis dan paramedis.

5) Peningkatan kualitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja, yang meliputi:
a. Peningkatan kualitas pekerja baik dilihat dari upah yang diterima, produktivitas dan standar kualifikasinya.
b. Penyiapan tenaga kerja terdidik dan terampil untuk bekerja di luar negeri.
c. Perbaikan iklim investasi.
d. Penyusunan profil investasi.
e. Perbaikan dan pengembangan infrastruktur fisik.
f. Revitalisasi pasar tradisional melalui peningkatan kenyamanan, kemampuan bersaing, penguatan permodalan, dsb.
g. Memperluas permintaan dan meningkatkan kualitas produk-produk domestik.
h. Memperluas dan meningkatkan industri kreatif.
i. Pemetaan potensi UKM, pengembangan potensi secara terarah dan terukur sehingga menghasilkan produk berdaya saing tinggi dan layak jual.
j. Mendorong perkembangan kawasan-kawasan ekonomi penyangga, khususnya pusat-pusat ekonomi di tingkat kecamatan.

k. Penciptaan dan mengembangkan pendidikan untuk menumbuhkan wirausaha (enterpreneur) baru di tingkat paling bawah dan menengah; serta mendukung inovasi dan kreativitas masyarakat/pengusaha dalam menciptakan dan menginovasi produk sehingga mampu bersaing di pasaran yang lebih luas dalam iklim persaingan yang sehat, dan

l. Mendorong pengembangan pariwisata melalui strategi keunikan dan berbasis pertanian.

6) Pembangunan ekonomi yang meliputi :

a. Perbaikan infrastruktur penunjang pembangunan ekonomi.

b. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan/Kawasan yang di dalamnya mewadahi skala prioritas dalam pengembangannya.

c. Membentuk regulasi untuk mensinergikan sektor pertanian, pariwisata dan perdagangan.

d. Meningkatkan kualitas input produksi baik dengan dukungan penelitian dan pengembangan bibit unggul, serta penyuluhan sehingga dapat diterapkan secara tepat dan akurat dengan resiko yang dapat dijaga.

e. Menerapkan zonasi pemanfaatan kawasan pesisir, pantai dan laut untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat di bidang pariwisata, perikanan dan kelautan.

f. Menerapkan zonasi kawasan pertanian untuk mendorong produksi skala ekonomi, menjamin kotinyuitas produksi, dan mengefektifkan pembinaan dalam peningkatan mutu produk.

g. Mendorong terbentuknya kawasan pertanian organik yang terstandarisasi dan tersertifikasi sehingga dapat bersaing dalam segmen pasar premium. Contoh: beras sudaji, beras merah Banyuatis, dll.

h. Melaksanakan kebijakan pengembangan industri hilir (pasca panen dan pemasaran) pertanian.

i. Perkuatan dan pemberdayaan petani, nelayan dan petambak.

j. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan daya tawar dan kompetisi (competitive advantage) sektor pertanian, koperasi, perdagangan, industri kretaif/UMKM dan pariwisata, serta

k. Penyediaan informasi secara transparan tentang harga pasar yang akurat dan *up to date* kepada petani dan nelayan.

7) Pembangunan infrastruktur meliputi :
   a. Peningkatan kondisi jalan kabupaten dan jalan di perdesaan, termasuk jalan usaha tani.
   b. Peningkatan akses prasarana perhubungan laut dan udara.
   c. Pelayanan dan akses air bersih dengan harga terjangkau.
   d. Terjaminnya akses prasarana penunjang perekonomian masyarakat.
   e. Perbaikan dan pembangunan sarana irigasi pertanian.

8) Perbaikan iklim investasi yang terdiri dari :
   a. Proses perijinan yang cepat, mudah dan tidak berbeaya tinggi.
   b. Terjaminnya keamanan dan ketertiban berinvestasi.
   c. Ketersedian pelayanan kepada publik secara terpadu.

9) Penegakan hukum, ketentraman dan ketertiban meliputi :
   a. Perbaikan law enforcement berkaitan dengan produk hukum daerah.
   b. Pemanfaatan ruang agar sesuai dengan peruntukannya.
   c. Perbaikan produk hukum daerah untuk mendukung pembangunan daerah.
   d. Sosialisasi produk hukum daerah pada stakeholder dan masyarakat luas.

10) Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan, yang meliputi :
   a. Pengembangan dan konservasi keunikan budaya, seperti Gedong Kertia, Rumah Orang Tua Bung Karno, dan kondisi lingkungan yang kondusif untuk menunjang pembangunan pariwisata.
   b. Melestarikan kesenian-kesenian khas Buleleng, seperti Gong Kebyar, Topeng, Joged Bumbung dan sebagainya.
   c. Menjaga suasana kebebasan berkreasi dibidang seni dan budaya.
   d. Menyediakan prasarana untuk mendukung kegiatan kesenian dan kebudayaan, dan
   e. Memberikan insentif kepada kegiatan seni dan budaya.

11) Peningkatan kualitas penanganan bencana alam meliputi :

a. Penyediaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana tanah longsor berupa escavator dan pendukung lainya.
b. Menambah ketersediaan hidran dipemukiman padat penduduk yang tidak terjangkau mobil pemadam kebakaran.
c. Tersedianya jalur atau ruang evakuasi penduduk di lokasi rawan bencana.

12) Peningkatan kualitas dan pelestarian fungsi lingkungan yang meliputi :
a. Optimalisasi kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada lahan kritis, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga kelestarian hutan.
b. Melakukan konservasi sumber mata air.
c. Mengembangkan strategi pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (sustainable).
d. Memberdayakan keseluruhan komponen masyarakat maupun dunia usaha untuk secara lebih aktif menjaga lingkungan.
e. Memberikan insentif kepada kelompok maupun orang perorangan yang berperan aktif/berjasa dalam pelestarian lingkungan hidup, dan
f. Menyempurnakan sistem pengelolaan sampah dengan penguatan melalui pembuatan peraturan daerah.

BAB III
URUSAN DESENTRALISASI

A. Ringkasan Urusan Desentralisasi.

1. Ringkasan Anggaran dan Realisasi APBD TA. 2012.

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.	***Pendapatan Daerah***	**1.184.539.602.601,46**	**1.196.436.250.963,29**	**11.896.648.361,83**	**101,00**
1.1.	**Pendapatan Asli daerah**	**116.118.162.898,17**	**129.003.994.687,39**	**12.885.831.789,22**	**111,10**
1.1.1.	Pajak daerah	33.680.522.000,00	39.124.665.453,51	5.444.143.453,51	116,16
1.1.2.	Retribusi daerah	11.533.049.800,00	13.132.937.835,00	1.599.888.035,00	113,87
1.1.3.	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	9.294.337.695,00	9.369.947.813,68	75.610.118,68	100,81
1.1.4.	Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah	61.610.253.403,17	67.376.443.585,20	5.766.190.182,03	109,36
1.2.	**Dana Perimbangan**	**789.882.600.982,00**	**793.541.644.935,00**	**3.659.043.953,00**	**100,46**
1.2.1.	Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	39.595.704.982,00	43.254.748.935,00	3.659.043.953,00	100,46
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	687.697.696.000,00	687.697.696.000,00	-	100,00
1.2.3.	Dana Alokasi khusus	62.589.200.000,00	62.589.200.000,00	-	100,00
1.3.	**Lain – lain pendapatan daerah yang sah**	**278.538.838.721,29**	**273.890.611.340,90**	**(4.648.227.380,39)**	**98,33**
1.3.3.	Dana bagi hasil pajak dari Provinsi	133.021.038.893,29	129.243.140.419,90	(3.777.898.473,39)	97,16
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan otonomi khusus	126.009.808.000,00	126.021.617.140,00	11.809.140,00	100,01
1.3.5.	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	18.755.991.828,00	17.662.271.828,00	(1.093.720.000,00)	94,17
1.3.6.	Sumbangan Pihak Ketiga	752.000.000,00	963.581.953,00	211.581.953,00	128,14
	Jumlah Pendapatan	**1.184.539.602.601,46**	**1.196.436.250.963,29**	**11.896.648.361,83**	**101,00**
2.	**Belanja**	**1.257.409.388.833,32**	**1.123.510.047.496,35**	**(133.899.314.336,97)**	**89,35**
2.1.	**Belanja Tidak langsung**	**876.331.904.893,32**	**830.820.428.113,35**	**(45.511.476.779,97)**	**94,81**
2.1.1.	Belanja Pegawai	754.434.571.811,51	725.807.231.491,18	(28.627.340.320,33)	96,21
2.1.2.	Belanja Bunga	200.000.000,00	86.680.754,64	(113.319.245,36)	43,34
2.1.4.	Belanja Hibah	52.844.200.000,00	47.719.209.182,92	(5.124.990.817,08)	90,30
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	1.700.822.000,00	1.512.000.000,00	(188.822.000,00)	88,90
2.1.6.	Belanja bagi hasil Kepada Provinsi/kabupaten/Kota dan pemerintahan desa	4.000.000.000,00	3.999.969.378,61	(30.621,39)	100,00
2.1.7.	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/Kota dan pemerintahan desa	60.040.212.144,04	51.154.442.306,00	(8.885.769.838,04)	85,20
2.1.8.	Belanja tidak Terduga	3.112.098.937,77	540.895.000,00	(2.571.203.937,77)	17,38
2.2.	**Belanja langsung**	**381.077.483.940,00**	**292.689.646.383,00**	**(88.387.837.557,00)**	**76,81**
2.2.1.	Belanja Pegawai	21.160.791.875,00	19.591.457.400	(1.569.334.475,00)	92,58
2.2.2.	Belanaja Barang dan Jasa	215.954.355.971,00	193.664.350.609,00	(22.290.005.362,00)	89,68
2.2.3.	Belanja Modal	143.962.336.094,00	79.433.838.374,00	(64.528.497.720,00)	55,18
	Jumlah Belanja	**1.257.409.388.833,32**	**1.123.510.047.496,35**	**(133.899.314.336,97)**	**89,35**
	Surplus/(Defisit)	**(72.869.786.231,86)**	**72.926.176.466,94**	**145.795.962.698,80**	**-100,08**
3.	**Pembiayaan**	**72.869.786.231,86**	**73.018.042.381,86**	**148.256.150,00**	**100,20**
3.1.	**Penerimaan Pembiayaan daerah**	**75.819.786.231,86**	**75.819.786.231,86**	**-**	**100,00**
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran daerah Tahun Sebelumnya	75.819.786.231,86	75.819.786.231,86	-	100,00
	Jumlah Pembiayaan Penerimaan	**75.819.786.231,86**	**75.819.786.231,86**	**-**	**100,00**

3.2.	Pengeluaran Pembiayaan daerah	**2.950.000.000,00**	**2.801.743.850,00**	**(148.256.150,00)**	**94,97**
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah	2.600.000.000,00	2.500.000.000,00	(100.000.000,00)	96,15
3.2.3.	Pembayaran Pokok Hutang	350.000.000,00	301.743.850,00	(48.256.150,00)	86,21
	Jumlah Pembiayaan Pengeluaran	**2.950.000.000,00**	**2.801.743.850,00**	**(148.256.150,00)**	**94,97**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	**-**	**145.944.218.848,80**	**145.944.218.848,80**	**266.670,00**

2. Anggaran dan Realisasi Belanja TA. 2013.

2.1. Urusan Wajib.

No	Urusan	Anggaran			Realisasi		
		Belanja Tidak Langsung	Belanja langsung	Total	Belanja Tidak Langsung	Belanja langsung	Total
1	Pendidikan	621,246,078,076	112,050,413,566	733,296,491,642.00	586,727,170,909	91,168,569,026	677,895,739,935.00
2	Kesehatan	85,771,759,367	80,023,015,014	165,794,774,381.00	83,929,322.00	74,897,007,816.00	74,980,937,138.00
3	Lingkungan hidup	6,279,048,103.00	18,804,400,242.00	25,083,448,345.00	5,537,092,781.00	16,958,998,766.00	22,496,091,547.00
4	Pekerjaan Umum	9,138,318,747	57,591,399,238	66,729,717,985.00	8,993,114,461	49,174,914,873	58,168,029,334.00
5	Penataan ruang		28,455,900	28,455,900.00		16,292,500	16,292,500.00
6	Perencanan pembangunan	3,503,099,769	7,947,124,100	11,450,223,869.00	3,440,366,951	7,469,787,691	10,910,154,642.00
7	Perumahan		203,285,800.00	203,285,800.00		155,757,710.00	155,757,710.00
8	Kepemudaan dan Olahraga		3,456,674,500	3,456,674,500.00		3,164,959,946	3,164,959,946.00
9	Penanamn Modal	1,736,095,713.00	2,842,500,000.00	4,578,595,713.00	1,674,655,930.00	2,698,775,159.00	4,373,431,089.00
10	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4,437,959,556	2,440,858,205	6,878,817,761.00	4,276,585,251	2,323,012,355	6,599,597,606.00
11	Kependudukan dan catatan sipil	2,939,768,935	5,224,037,353	8,163,806,288.00	2,793,383,572	5,178,317,757	7,971,701,329.00
12	Ketenagakaerjaan	4,346,280,178	3,592,124,000	7,938,404,178.00	4,258,712,988	3,359,047,213	7,617,760,201.00
13	Ketahanan pangan		1,831,686,800.00	1,831,686,800.00		1,782,869,432.00	1,782,869,432.00
14	Pemberdayaan perempuan dan		843,602,000	843,602,000.00		772,843,432	772,843,432.00
15	Keluarga Berencana dan Keluarga	3,398,472,257	4,452,530,520	7,851,002,777.00	3,308,722,096	4,316,107,726	7,624,829,822.00
16	Perhubungan	6,620,048,299	5,452,067,400	12,072,115,699.00	6,398,719,218	5,266,509,920	11,665,229,138.00
17	Komunikasi dan Informatika	2,890,322,798	3,264,100,000	6,154,422,798.00	2,822,760,347	3,119,276,526	5,942,036,873.00
18	Pertanahan		22,547,915,600	22,547,915,600.00		21,148,401,810	21,148,401,810.00
19	Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri	6,327,783,274.00	5,187,350,000.00	11,515,133,274.00	6,204,028,691.00	4,679,469,443.00	10,883,498,134.00
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah	196,828,451,717.00	114,453,896,628.00	311,282,348,345.00	187,500,512,065.00	105,451,038,002.00	292,951,550,067.00
21	Pemberdayaan Masyarakat Desa	3,100,731,777	3,788,750,000	6,889,481,777.00	3,019,820,200	3,426,667,871	6,446,488,071.00
22	Sosial	2,735,306,192	4,288,170,665.02	7,023,476,857.02	2,613,233,107	4,201,007,491	6,814,240,598.00
23	Kebudayaaan	5,056,816,931	5,555,114,250	10,611,931,181.00	4,957,501,833	5,398,883,999	10,356,385,832.00
24	Statistik		1,229,452,800	1,229,452,800.00		1,093,927,750	1,093,927,750.00
25	Kearsipan		47,124,600	47,124,600.00		46,869,400	46,869,400.00
26	Perpustakaan	1,820,148,015	1,099,325,400	2,919,473,415.00	1,776,822,089	1,075,970,416	2,852,792,505.00

Efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga didukung oleh perbandingan belanja pelayanan dasar dengan APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2013 yang

mencapai 67,88%. Pelayanan dasar ini dimaksud sebagai pelayanan umum (public service) yang merupakan salah satu tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat baik melalui penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan dasar masyarakat pada bidang Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum, Sosial, Tenaga Kerja, Koperasi, Sat Pol PP dan Kependudukan dan Catatan Sipil. Untuk Tahun Anggaran 2013 jumlah belanja dasar sebesar Rp. 1.025.890.145,00 dari total belanja APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2013 yang berjumlah sebesar Rp. 1.513.580.004.661,80. Anggaran belanja untuk Urusan Pendidikan dialokasikan dengan anggaran Rp. 733.296.491.642,00 dan urusan kesehatan Rp. 165.794.774.381,00.

2.2 Urusan Pilihan

No	Urusan	Anggaran			Tealisasi		
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total
1	Kelautan dan Perikanan	4,795,552,611	8,252,216,644	13,047,769,255	4,607,013,487	8,142,073,635	12,749,087,122
2	Pertanian	12,270,044,735	11,631,631,931	23,901,676,666	11,700,366,334	11,335,348,937	23,035,715,271
3	Kehutanan	7,294,270,740	7,722,002,426.82	15,016,273,167	7,163,333,183	7,288,195,433	14,451,528,616
4	Energi dan Sumber Daya Mineral		12,150,536,860	12,150,536,860		12,129,284,409	12,129,284,409
5	Pariwisata		5,759,144,500	5,759,144,500		5,391,067,426	5,391,067,426
6	Perdagangan		6,511,864,700	6,511,864,700		5,722,439,280	5,722,439,280
7	Industri		516,949,095	516,949,095		441,285,628	441,285,628
8	Transmigrasi		254,926,000	254,926,000		252,716,320	252,716,320

Dari anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan pilihan, urusan pertanian memiliki alokasi anggaran yang paling besar, yaitu sebesar Rp.23.901.676.666,00, kemudian disusul dengan urusan kehutanan yaitu sebesar Rp.15.016.273.167,00. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Buleleng menekankan pengembangan potensi dasar yang dimiliki, yaitu sektor pertanian yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Buleleng.

3. Anggaran dan Realisasi Belanja Urusan TA. 2014.

3.1 Urusan Wajib.

Urusan Wajib	Anggaran Belanja Tidak Langsung	Anggaran Belanja Langsung			Realisasi Belanja Tidak Langsung	Realisasi Belanja Langsung			Persentase Realisasi Belanja (%)	SKPD Pelaksana
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pendidikan	692,006,946,114.38	1,788,895,000.00	22,843,842,974.35	51,087,530,704.00	657,229,368,476.00	1,739,245,000.00	19,868,675,744.00	32,429,908,379.00	92.66	Dinas Pendidikan Kab. Buleleng
Kesehatan	69,035,546,781.90	2,889,835,000.00	111,127,060,224.82	34,295,619,800.00	68,410,216,121.00	2,534,690,000.00	97,888,417,535.00	17,695,030,469.00	81.38	Dinas Kesehatan Kab. Buleleng dan RSUD Kab. Buleleng
Lingkungan Hidup	6,594,639,168.22	4,645,643,000.00	10,763,711,819.00	2,932,899,000.00	6,450,130,815.00	4,588,101,500.00	10,115,056,084.00	2,915,080,430.00	94.44	Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Buleleng dan Kantor LH Kab. Buleleng
Pekerjaan Umum	10,025,107,250.00	737,990,000.00	11,191,817,249.00	94,965,291,700.00	9,901,058,327.00	691,710,000.00	9,611,439,203.00	93,077,064,700.00	96.89	Dinas PU Kab. Buleleng
Penataan Ruang			20,116,685.00				19,761,350.00		98.23	Dinas PU Kab. Buleleng
Perencanaan Pembangunan	3,612,814,978.14	1,313,165,000.00	8,598,151,973.00	883,750,000.00	3,521,369,472.00	1,231,765,000.00	7,926,510,074.00	850,732,150.00	93.91	Bappeda Kab. Buleleng
Perumahan			176,536,000.00				160,891,250.00		91.14	Dinas PU Kab. Buleleng
Kepemudaan dan Olah raga		152,400,000.00	3,976,519,600.00	285,000,000.00		143,400,000.00	3,873,630,500.00	214,294,400.00	94.98	Dinas Pendidikan Kab. Buleleng
Penanaman Modal	1,701,689,226.38	2,055,559,226.38	2,560,085,000.00	81,500,000.00	1,605,241,100.00	1,957,411,100.00	2,495,871,309.00	80,086,000.00	95.93	KPT Kab. Buleleng dan Bagian Ekbang Setda Kab. Buleleng
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	4,427,085,412.82	142,900,000.00	1,431,626,600.00	83,631,810.00	4,162,451,349.00	138,540,000.00	1,330,766,597.00	83,100,000.00	88.55	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Industri Kab. Buleleng
Kependudukan dan Catatan Sipil	2,954,542,355.00	538,100,000.00	3,704,722,756.00	2,786,120,744.00	2,818,821,160.00	536,030,000.00	3,653,970,791.00	2,784,400,444.00	98.00	Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Buleleng
Ketenaga kerjaan	4,764,564,540.20	479,850,000.00	3,676,585,000.00	1,432,224,000.00	4,740,707,965.00	461,850,000.00	3,415,528,223.00	1,241,539,000.00	91.59	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Buleleng

Urusan Wajib	Anggaran Belanja Tidak Langsung	Anggaran Belanja Langsung			Realisasi Belanja Tidak Langsung	Realisasi Belanja Langsung			Persentase Realisasi Belanja (%)	SKPD Pelaksana
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ketahanan Pangan			1,743,260,000.00				1,720,986,588.00		98.72	Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Buleleng
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		8,440,000.00	467,083,349.00			8,420,000.00	444,765,816.00		95.30	Badan KB dan PP Kab. Buleleng
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	3,616,703,346.80	141,650,000.00	3,284,231,411.00	678,204,240.00	3,591,465,759.00	141,650,000.00	3,241,061,372.00	204,310,600.00	92.98	Badan KB dan PP Kab. Buleleng
Perhubungan	6,783,632,170.26	591,970,000.00	3,434,036,250.00	1,023,316,000.00	6,680,915,301.00	566,670,000.00	3,311,154,533.00	1,007,891,600.00	97.75	Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika	3,078,329,267.00	475,275,000.00	2,512,939,000.00	766,789,059.00	3,015,628,024.00	473,735,000.00	2,460,298,952.00	754,773,198.00	98.11	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Buleleng
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	3,031,048,000.00	653,450,000.00	2,654,923,514.00	538,225,230.00	2,983,216,906.00	613,851,400.00	2,279,487,028.00	538,225,230.00	93.16	Badan Kesbangpol linmas Kab. Buleleng
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	13,984,607,605.26	5,082,045,000.00	37,153,718,110.65	8,299,213,000.00	13,409,889,401.00	4,996,820,000.00	32,280,226,203.23	6,461,336,699.00	88.58	Sekretariat Daerah Kab. Buleleng
	15,463,429,150.32	707,854,750.00	25,786,057,250.00	1,956,180,000.00	15,167,532,351.00	640,097,350.00	23,348,292,533.00	1,701,562,800.00	94.66	Sekretariat DPRD Kab. Buleleng dan DPRD Kab. Buleleng
	3,499,704,690.18	404,305,000.00	4,315,654,150.00	1,431,726,000.00	3,498,002,956.00	381,695,000.00	4,076,904,895.00	1,414,410,500.00	97.09	BKD Kabupaten Buleleng
	3,234,370,020.72	260,920,000.00	2,141,822,000.00	3,633,317,000.00	3,150,191,922.00	260,840,000.00	2,124,236,386.00	3,630,160,900.00	98.87	Inspektorat Kab. Buleleng
	10,185,626,402.26	830,920,000.00	3,723,500,000.00	1,828,080,000.00	9,068,910,527.00	909,750,000.00	3,502,211,573.00	1,899,920,100.00	87.99	Dinas Pendapatan Kab. Buleleng
	4,170,971,089.24	508,100,000.00	3,805,405,000.00	406,710,000.00	4,120,414,520.00	480,300,000.00	3,485,285,969.00	312,928,000.00	94.46	BPBD Kab. Buleleng
	3,312,814,922.86	355,160,000.00	1,401,034,000.00	74,420,000.00	3,270,883,087.00	352,920,000.00	1,341,237,748.00	74,420,000.00	97.98	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Buleleng
	1,807,168,501.00	1,807,168,501.00	1,406,215,000.00	301,282,000.00	1,760,009,430.00	1,760,009,430.00	1,336,343,418.00	290,627,997.00	96.50	Kantor Camat Tejakula
	2,080,671,797.16	176,300,000.00	1,352,700,000.00	122,590,000.00	2,060,777,531.00	173,660,000.00	1,345,842,381.00	122,590,000.00	99.20	Kantor Camat Kubutambahan
	2,375,582,229.84	202,850,000.00	1,114,550,000.00	147,880,000.00	2,340,092,796.00	201,710,000.00	1,105,119,043.00	142,997,412.00	98.67	Kantor Camat sawan
	10,760,845,738.32	787,025,000.00	3,871,565,000.00	400,850,000.00	10,567,657,960.00	785,650,000.00	3,764,658,431.00	399,475,000.00	98.09	Kantor Camat Buleleng
	2,766,724,335.22	259,790,000.00	1,368,310,000.00	112,600,000.00	2,738,779,319.00	259,590,000.00	1,354,433,553.00	112,600,000.00	99.07	Kantor Camat Sukasada

Urusan Wajib	Anggaran Belanja Tidak Langsung	Anggaran Belanja Langsung			Realisasi Belanja Tidak Langsung	Realisasi Belanja Langsung			Persentase Realisasi Belanja (%)	SKPD Pelaksana
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2,016,020,133.00	214,030,000.00	1,369,532,360.00	173,052,640.00	1,992,305,690.00	196,760,000.00	1,333,423,065.00	171,740,640.00	97.92	Kantor Camat Banjar
	3,080,811,798.96	190,690,000.00	1,410,382,200.00	142,700,800.00	3,077,362,588.00	190,370,000.00	1,377,814,004.00	141,144,062.00	99.21	Kantor Camat Seririt
	1,944,367,917.38	205,600,000.00	1,115,627,000.00	151,250,000.00	1,926,668,816.00	201,840,000.00	1,078,177,288.00	149,824,605.00	98.23	Kantor Camat Busungbiu
	2,241,167,680.70	1,665,125,000.00	1,052,347,000.00	397,428,000.00	2,208,125,482.00	1,649,962,730.00	1,040,018,130.00	396,994,600.00	98.77	Kantor Camat Gerokgak
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2,994,997,000.00	609,735,000.00	4,076,065,000.00	121,550,000.00	2,994,942,101.00	605,850,000.00	3,932,305,605.00	121,245,889.00	98.10	BPMPD Kab. Buleleng
Sosial	2,626,064,530.08	235,320,000.00	4,293,083,000.00	1,395,806,000.00	2,596,940,716.00	214,290,000.00	4,238,822,820.00	1,386,822,820.00	98.67	Dinas Sosial Kab. Buleleng
Budaya	5,085,930,157.38	231,450,000.00	4,574,539,300.00	4,271,223,000.00	4,997,588,176.00	228,530,000.00	4,412,083,236.00	4,260,516,600.00	98.10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Buleleng
Kearsipan		2,000,000.00	54,426,200.00			2,000,000.00	54,416,200.00		99.98	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Buleleng
Perpustakaan	1,841,456,001.52	224,450,000.00	785,863,982.00	147,592,818.00	1,794,499,620.00	224,215,000.00	779,703,628.00	146,962,925.00	98.84	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Buleleng

3.2 Urusan Pilihan.

Urusan Wajib	Anggaran Belanja Tidak Langsung	Anggaran Belanja Langsung			Realisasi Belanja Tidak Langsung	Realisasi Belanja Langsung			Persentase Realisasi Belanja (%)	SKPD Pelaksana
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Perikanan dan Kelautan	4,619,913,492.68	406,785,000.00	6,675,269,163.00	1,993,812,000.00	4,559,844,387.00	406,332,500.00	6,506,592,507.00	1,828,364,200.00	98.00	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Buleleng
Pertanian	13,103,903,443.18	396,340,000.00	14,154,117,677.00	979,270,323.00	12,923,634,542.00	382,290,000.00	13,894,364,874.00	973,018,500.00	98.39	Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Buleleng
Kehutanan	6,992,003,725.96	256,180,000.00	6,827,386,765.30	272,496,900.00	6,795,663,948.00	249,630,000.00	6,373,160,947.00	269,093,750.00	95.40	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Energi dan Sumber Daya Mineral		58,080,000.00	16,533,228,715.00	2,090,652,000.00		57,640,000.00	15,594,031,122.00	2,085,272,000.00	94.94	Dinas PU Kab. Buleleng
Pariwisata		34,900,000.00	1,818,366,876.00	296,807,824.00		34,900,000.00	1,791,661,215.00	277,792,823.00	98.10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Buleleng
Industri			501,450,000.00				485,752,050.00		88.55	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Industri Kab. Buleleng
Perdagangan			2,425,929,570.00	770,584,020.00			1,697,308,991.00	765,313,000.00	88.55	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Industri Kab. Buleleng
Transmigarasi		24,020,000.00	251,810,000.00			23,960,000.00	204,578,200.00		82.85	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Buleleng

Alokasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2014 untuk pembiayaan penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan berjumlah sebesar Rp. 1.680.934.191.309,50 dan terealisasi sebesar Rp. 1.548.339.209.473,76 atau mencapai 92,11%. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2014 mengalami penurunan dibandingkan Tahun Anggaran 2013 yang mencapai 93,35%. Belanja Daerah Kabupaten Buleleng terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.071.559.661.426,73 yang terealisasi sebesar Rp. 1.024.745.248.725,53 atau 95,63% dan Belanja langsung sebesar Rp. 609.374.529.882,77 terealisasi Rp. 523.593.960.748,23 atau tercapai 85,92%

4. Anggaran dan Realisasi Belanja Urusan TA. 2015

4.1 Urusan Wajib.

Urusan Wajib	Anggaran Belanja Tidak Lansung	Anggaran Belanja Langsung			Realisasi Belanja Tidak Langsung	Realisasi Belanja Langsung			% Realisasi Belanja	SKPD Pelaksana
	Belanja Pegawai	Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Urusan Pendidikan	741.542.474.620,52	14.854.363.650	114.057.022.680	80.218.350.520,60	653.847.176.267,00	1.061.970.000	24.060.393.432,00	48.315.290.321,00	76,50	Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng
Urusan Kesehatan.	43.690.171.500	977.310.000	36.644.832.354,98	9.032.855.574	43.332.631.914	789.229.000	24.728.704.153,70	4.950.121.693	81,69	Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
	30.940.125.000	670.670.000	93.201.349.942,93	53.174.572.850,20	30.780.067.335	668.210.000	100.016.821.940	52.496.082.115,58	103,36	RSUD Kabupaten Buleleng
Urusan lingkungan hidup	2.485.336.000	142.400.000	3.547.109.000	722.010.000	2.460.994.087	136.700.000	3.374.363.205	714.242.000	96,95	Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng
	5.576.246.000	5.978.643.500	11.147.121.100	9.422.917.100	5.492.520.303	5.895.174.000	9.508.931.898	7.572.928.650	88,62	Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng
Urusan Pekerjaan Umum	10.601.822.000	706.700.000	15.850.606.672,43	52.522.388.156,10	10.477.518.599	684.600.000	13.486.044.970	49.512.785.186,10	93,07	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng
Urusan Tata Ruang			38.349.650,00	-	-	-	33.360.491,00		86,99	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng
Urusan Perencanaan Pembangunan.	3.792.516.000	1.682.105.000	7.202.690.900	180.200.000	3.759.714.762	1.614.900.000	6.718.390.674	168.246.000	95,36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng
Urusan Perumahan		60.600.000,00	96.342.675,00			45.440.000,00	92.576.550,00		87,94	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng
Urusan Pemuda dan Olah Raga		152.400.000,00	3.976.519.600,00	285.000.000,00		143.400.000,00	3.873.630.500,00	214.294.400,00	95,86	Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng
Urusan Penanaman Modal	2.274.987.600,00	239.490.000,00	2.057.112.000,00	106.750.000,00	2.165.961.936,00	236.820.000,00	1.951.633.267,00	105.298.910,00	95,33	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Buleleng
Urusan Koperasi dan UKM	4.311.631.000,00	137.520.000,00	1.708.241.730,00	203.000.000,00	4.238.096.352,00	134.420.000,00	1.554.825.469,00	193.209.000,00	91,12	Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng
Urusan Kependudukan dan	2.916.221.000	437.975.000	3.469.356.140	657.529.000	2.823.147.630	436.890.000	3.422.940.807	654.704.000	98,08	Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil										Catatan Sipil Kabupaten Buleleng
Urusan Tenaga Kerja	5,041,069,000.00	369,450,000.00	2,701,293,000.00	161,690,000.00	5,021,567,802.00	367,750,000.00	2,442,246,759.00	152,571,500.00	96,50	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng
Urusan Ketahanan Pangan		52.680.000,00	2.808.740.000,00			52.080.000,00	2.459.358.451,00		87,77	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	335.559. 300,00	19.200.000,00	564.694.415,00		318.223.200,,00	19.200.000,00	558.620.892,00		97,45	Badan KB dan PP Kabupaten Buleleng
Urusan KB dan Keluarga Sejahtera	3.454.545.700,00	141.300.000,00	3.555.425.400,00	1.080.394.264.00	3.417.720.912,00	141.270.000,00	2.928.868.792,00	986.270.850,00	90,80	Badan KB dan PP Kabupaten Buleleng
Urusan Perhubungan	7.271.189.900	636.450.000	3.156.170.768	1.128.573.000	7.167.634.552	631.320.000	3.111.071.335	1.118.802.745	98,66	Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng
Urusan Komunikasi dan Informatika	3.196.517.000	710.765.000	3.497.383.000	410.125.000	3.178.826.355	708.235.000	3.438.935.376	390.780.530	98,75	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	2.633.029.000	346.330.000	1.810.512.790	103.832.450	2.603.525.549	339.830.000	1.720.375.872	62.704.000	96,58	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng
Urusan Otonomi Daerah	12.433.676.000,00	3.630.630.000,00	30.364.343.000,00	4.562.370.000,00	12.335.541.126,00	3.417.160.000,00	28.025.336.517,00	4.401.278.000,00	94,49	Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
	18.958.302.900,00	606.709.750,00	22.203.603.700,00	692.011.550,00	18.354.129.797,00	531.432.400,00	20.988.056.502,00	657.103.720,00	95,45	Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng
	3.437.354.000,00	304.820.000,00	2.482.135.450,00	344.218.550,00	3.413.912.989,00	304.420.000,00	2.410.676.432,00	344.218.050,00	98,55	Inspektorat Kabupaten Buleleng
	4.018.412.000,00	516.690.000,00	4.890.633.260,00	528.500.000,00	3.997.108.065,00	502.470.000,00	4.604.936.839,00	517.120.000,00	96,66	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buleleng
	12.327.758.900,00	1.455.350.000,00	6.079.901.833,00	3.155.654.000,00	9.787.173.339,00	1.350.955.000,00	4.338.813.582,00	3.141.434.500,00	96,34	Dinas Pendapatan kabupaten Buleleng
	4.801.464.000,00	5.483.385.000,00	10.258.399.892,00	1.441.585.028,00	4.735.059.275,00	5.159.215.000,00	9.188.267.887,00	1.292.876.508,00	92,68	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buleleng
	4.275.206.000,00	362.925.000,00	4.645.330.160,00	649.830.000,00	4.240.935.904,00	275.910.000,00	4.175.930.313,00	614.231.000,00	93,70	Badan Penanganan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng
	1.960.907.000,00	220.510.000,00	1.478.034.000,00	128.150.000,00	1.933.006.126,00	209.630.000,00	1.328.152.922,00	124.129.500,00	94,91	Kecamatan Tejakula
	2.297.659.000,00	126.230.000,00	1.323.941.000,00	16.500.000,00	2.275.484.449,00	123.630.000,00	1.316.690.660,00	15.000.000,00	99,11	Kecamatan Kubutambahan
	2.513.238.000,00	243.490.000,00	1.415.477.500,00	83.201.500,00	2.494.039.691,00	241.090.000,00	1.326.302.637,00	77.210.000,00	97,26	Kecamatan Sawan

	12.048.770.000,00	680.745.000,00	3.991.571.000,00	406.724.000,00	11.986.398.386,00	678.145.000,00	3.887.498.982,00	367.220.000,00	98,78	Kecamatan Buleleng
	3.037.834.000,00	282.705.000,00	1.773.347.700,00	349.528.300,00	3.022.673.873,00	270.865.000,00	1.736.822.252,00	344.985.000,00	98,75	Kecamatan Sukasada
	4.640.888.000,00	599.600.000,00	2.690.602.000,00	364.225.000,00	4.611.434.736,00	582.560.000,00	2.556.889.842,00	360.700.000,00	97,79	Kecamatan Banjar
	3.637.113.000,00	159.025.000,00	1.764.435.000,00	130.050.000,00	3.604.107.695,00	155.845.000,00	1.747.201.461,00	126.882.460,00	99,01	Kecamatan Seririt
	2.186.181.000,00	155.990.000,00	1.247.869.150,00	56.246.850,00	2.162.713.190,00	155.990.000,00	1.242.557.010,00	56.125.000,00	99,20	Kecamatan Busungbiu
	2.180.882.000,00	214.590.000,00	1.405.040.000,00	248.700.000,00	2.143.206.881,00	211.590.000,00	1.387.956.389,00	247.957.100,00	98,65	Kecamatan Gerokgak
	4.640.888.000,00	599.600.000,00	2.690.602.000,00	364.225.000,00	4.611.434.736,00	582.560.000,00	2.556.889.842,00	360.700.000,00	97,79	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng
Urusan Pemberdayaan Masyarakat	2.992.568.000,00	748.185.000,00	5.276.428.167,00	152.820.000,00	2.973.055.631,00	630.645.000,00	4.528.242.472,00	149.267.800,00	90,31	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buleleng
Urusan Sosial	2.814.119.000	201.930.000	3.195.219.000	939.275.100	2.788.432.279	198.555.000	3.131.892.839	931.363.600	98,60	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
Urusan Budaya	5.595.311.500,00	239.195.000,00	6.735.267.500,00	181.287.500,00	5.509.522.623,00	239.055.000,00	6.576.417.270,00	178.858.100,00	97,58	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Buleleng
Urusan Kearsipan			105.000.000,00				101.299.800,00		96,47	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Buleleng
Urusan Perpustakaan	1.623.099.000,00	234.615.000,00	945.296.900,00	215.088.100,00	1.608.664.288,00	232.155.000,00	929.757.081,00	212.119.700,00	98,75	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Buleleng

4.2. Urusan Pilihan.

Urusan Wajib	Anggaran Belanja Tidak Lansung	Anggaran Belanja Langsung			Realisasi Belanja Tidak Langsung	Realisasi Belanja Langsung			% Realisasi Belanja	SKPD Pelaksana
	Belanja Pegawai	Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Urusan Perikanan.	4.913.810.000	299.260.000	7.818.079.000	1.263.149.460	4.877.507.203	297.620.000	7.394.286.097	1.185.929.500	96,22	Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng
Urusan Pertanian.	12.498.681.000	369.945.000,00	18.733.332.879,30	5.501.957.073	12.400.928.223	351.890.000,00	17.373.240.973,00	5.000.438.300	94,69	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng
Urusan Kehutanan.	6.759.380.000	226.400.000	6.657.228.849	269.562.450	6.698.448.012	225.840.000	5.305.623.216	265.897.500	89,82	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Buleleng
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.		25.500.000	20.869.798.288	1.993.094.000		24.740.000	19.829.892.807	1.981.972.000	95,40	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng
Urusan Pariwisata.		68.475.000,00	2.064.425.000,00	751.000.000,00		67.275.000,00	1.986.713.694,00	700.215.000,00	95,50	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Buleleng
Urusan Perdagangan.		9.200.000,00	3.020.593.300,00	5.146.020,00		9.200.000,00	2.386.015.862,00	5.100.000 ,00	79,09	
Urusan Industri.			323.999.950,00				322.778.900,00		99,62	
Urusan Transmigrasi.		24,020,000.00	251,810,000.00			23,960,000.00	204,578,200.00		82,85	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng

Alokasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2015 untuk pembiayaan penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan berjumlah sebesar Rp. 1.986.686.780.561,37 dan terealisasi sebesar Rp. 1.823.087.663.865,58 atau mencapai 91,77 persen. Belanja Daerah Kabupaten Buleleng terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.218.563.448.618,33 yang terealisasi sebesar Rp. 1.121.044.572.791,02 atau 92 persen dan Belanja langsung sebesar Rp. 768.123.331.943,04 terealisasi Rp. 702.043.091.074,56 atau tercapai 91,40 persen.

Pendapatan Daerah sebagian besar masih didominasi oleh Dana Perimbangan dengan anggaran sebesar Rp. 993.724.558.933 dan terealisasi sebesar Rp. 983.333.688.183 atau 98,95 persen, yang sebagian besar bersumber dari realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu sebesar Rp. 868.511.959.000 atau 46,02 persen dari total realisasi pendapatan daerah.

Efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga didukung oleh proporsi belanja pelayanan dasar dalam APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2015 yang mencapai 73,04 persen dari Total Belanja dalam APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2015. Pelayanan dasar ini dimaksud sebagai pelayanan umum (public service) yang merupakan salah satu tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat baik melalui penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan dasar masyarakat pada bidang Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum, Sosial, Tenaga Kerja, Koperasi, Sat Pol PP dan Kependudukan dan Catatan Sipil. Untuk Tahun Anggaran 2014 jumlah belanja dasar sebesar Rp. 1.130.967.678.684,38 dari total belanja APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2015 yang berjumlah sebesar Rp. 1.823.087.663.865,58. Anggaran belanja untuk Urusan Pendidikan dialokasikan dengan anggaran Rp. 727.284.810.020,00 dan urusan kesehatan Rp. 257.761.868.151,28.

5. Anggaran Belanja, Realisasi dan Pelaksana Urusan TA. 2016.

5.1 Urusan Wajib.

Tabel 16
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Wajib TA. 2016

Urusan Wajib	Anggaran Belanja Tidak Lansung	Anggaran Belanja Langsung			Realisasi Belanja Tidak Langsung	Realisasi Belanja Langsung			Prosentase Realisasi Belanja	SKPD Pelaksana
	Belanja Pegawai	Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Urusan Pendidikan	764.311.688.937,18	16.846.048.448,90	112.221.578.306,11	66.038.990.887,00	678.233.793.411,00	26.509.855.561,07	120.795.348.321,55	62.104.483.584,44	107,33	Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng
Urusan Kesehatan.	48,986,815,500.00	1,553,780,000.00	57,494,732,731.82.00	63,398,640,053.67.00	48.881.452.509,00	1.320.215.000,00	45.178.281.112,98	46.936.948.752,25	83,02	Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
	35,046,412,000.00	1,017,682,000.00	125,519,125,163.00	57,484,804,359.49	34.888.834.033,00	10.800.000,00	122.886.743.057,12	55.027.050.666,27	97,14	RSUD Kabupaten Buleleng
Urusan lingkungan hidup	2,704,811,000.00	267.745,000.00	3,295,541,703.89	1,273,590,700.00	2.684.132.237,00	262.895.000,00	3.075.571.162,00	1.212.270.300,00	95,94	Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng
	5,995,939,000.00	1,156,368,000.00	14,814,173,000.00	13,637,515,000.00	5.917.319.327,00	1.151.469.000,00	12.340.320.324,00	12.158.975.500,00	88,66	Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng
Urusan Pekerjaan Umum	11.583.669.000,00	1.082.480.000,00	9.160.493.303,24	146.545.658.852,73	11.583.669.000,00	968.945.000,00	6.684.428.743,00	113.089.929.202,00	77,08	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng
Urusan Tata Ruang		15.300.000,00	47.281.700,00			13.800.000,00	45.258.950,00		94,37	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng
Urusan Perencanaan Pembangunan.	4,018,869,597.00	2,528,315,000.00	8,586,659,113.75	198,060,000.00	3.959.165.569,00	2.445.630.000,00	8.294.735.258,00	193.740.000,00	97,14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng
Urusan Perumahan		6.000.000,00	93.439.261,00	-	-	4.485.000,00	85.025.000,00		90,01	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng

Urusan Pemuda dan Olah Raga		213.225.000,00	5.244.142.525,00	200.425.400,00		201.025.000,00	4.684.898.109,00	31.523.800,00	86,91	Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng
Urusan Penanaman Modal	2,259,467,050.00	314,315,000.00	1,644,742,124,00	24,000,000.00	2.430.688.005,00	313.529.000,00	1.628.455.292,00	23.699.500,00	97.43	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Buleleng
Urusan Koperasi dan UKM	4.526.356.000,00	*255.195.000,00*	*2.080.138.376,00*	*127.040.000,00*	4.438.778.943,00	206.935.000,00	1.551.224.095,00	-	76,85	Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	3,082,421,000.00	485,680,000.00	3,560,329,100.00	188,640,000.00	3.054.730.643,00	485.221.000,00	3.523.864.479,00	184.830.500,00	99,06	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng
Urusan Tenaga Kerja	5,361,725,000,00	502,230,000,00	2,226,695,935,00	104,000,000,00	5,273,480,866,00	491,575,000,00	2,082,954,358,00	90,645,000,00	96,88	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng
Urusan Ketahanan Pangan		57.580.000,00	1.245.715.345,57			54.090.000,00	1.193.379.965,00		95,72	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	354.187. 200,00		521.301.385,00	94.305.500,00	325.221.994,00		466.153.243,00	94.305.500,00	91,32	Badan KB dan PP Kabupaten Buleleng
Urusan KB dan Keluarga Sejahtera	4.073.152.800,00	186.640.000,00	3.833.563.786,58,00	1.340.489.755.00	3.740.052.930,00	137.015.000,00	2.988.613.916,00	1.027.082.255,00	83,66	Badan KB dan PP Kabupaten Buleleng
Urusan Perhubungan	8,101,631,749.00	768,325,000.00	3,503,751,028.00	1,932,490,727.00	8.023.466.112,00	767.760.000,00	3.491.420.803,00	1.930.551.450,00	99,35	Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng
Urusan Komunikasi dan Informatika	3,446,052,000.00	482,960,000.00	2,968,608,000.00	299,072,000.00	3.391.406.792,00	478.790.000,00	2.924.921.691,00	298.247.000,00	98,56	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	2,600,244,000.00	403,280,000.00	1,853,728,500.00	133,479,500.00	2.541.638.398,00	397.000.000,00	1.807.059.846,00	133.479.500,00	97,76	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng
Urusan Otonomi Daerah	12,168,782,000.00	4,119,475,000.00	38,541,695,194.58	4,963,046,919.96	12.101.873.595,00	4.025.255.000,00	35.687.489.384,70	4.527.304.325,00	94,23	Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
	4,971,518,000.00	873,524,750.00	37,094,876,250.00	756,130,000.00	4.948.606.769,00	847.435.000,00	36.093.449.740,00	727.817.810,00	97,53	Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng
	3,825,692,000.00	456,880,000,00	2,192,942,000.00	897,178,000.00	3.803.153.219,00	456.880.000,00	2.173.420.062,00	896.622.000,00	99,42	Inspektorat Kabupaten Buleleng
	4,659,894,000.00	679,715,000.00	5,687,877,000.00	152,218,000.00	4.543.566.724,00	662.770.000,00	5.397.771.095,00	152.405.000,00	96,20	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buleleng

	15,329,838,366.46	1,665,825,000.00	6,788,989,600.00	525,185,400.00	12.325.681.865,00	1.532.930.000,00	5.561.633.446,00	509.199.000,00	81,98	Dinas Pendapatan kabupaten Buleleng
	5,416,747,000.00	7,536,260,000.0	11,998,952,127.00	1,605417,337.00	5.413.096.126,00	7.128.135.000,00	10.566.912.878,00	1.506.955.402,00	92,69	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buleleng
	11,583,669,000.00	1,121,905,000.00	27,944,252,933.44	150,661,869,852.73	11.515.844.815,00	1.005.355.000,00	24.570.791.351		96,97	Badan Penanganan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng
	2,126,197,000.00	237,200,000.00	1,627,283,056.34		2.109.704.258,00	222.000.000,00	1.443.818.302,00		94,61	Kecamatan Tejakula
	2,524,812,000.00	153,370,000.00	1,575,000,000.00	64,200,000.00	2.501.453.487,00	143.795.000,00	1.542.968.782,00	63.362.100,00	98,48	Kecamatan Kubutambahan
	2,629,639,000.000	248,020,000.00	1,572,095,620.66		2.594.486.323,00	246.405.000,00	1.525.311.043,00		98,12	Kecamatan Sawan
	13,261,841,000.00	936,315,000.00	5,362,191,988.48	308,485,000.00	13,115,901,769.00	932.025.000,00	4.979.882.818,00	302.578.990,00	97,29	Kecamatan Buleleng
	3,313,386,000.00	244,665,000.00	2,100,128,000.00	83,800,000.00	3.313.602.039,00	242.265.000,00	2.064.577.954,00	83.800.000,00	99,26	Kecamatan Sukasada
	2,226,081,000.00	239,770,000.00	1,740,784,822.22	330,040,000.00	2.168.915.742,00	228.115.000,00	1.690.766.947,00	326.958.050,00	97,31	Kecamatan Banjar
	3,940,956,000.00	183,860,000.00	2,353,168,412.16	2,646,363,000.00	3.890.275.754,00	182.255.000,00	2.331.281.003,00	2.644.857.750,00	99,17	Kecamatan Seririt
	2,343,652,000.00	157,380,000.00	1,446,907,667.84	713,750,000.00	2.327.312.416,00	156.830.000,00	1.427.220.001,00	712.436.700,00	99,19	Kecamatan Busungbiu
	2,504,453,000.00	155,080,000.00	1,611,545,000.00	573,903,000.00	2.471.203.651,00	153.340.000,00	1.576.425.306,00	566.205.000,00	98,39	Kecamatan Gerokgak
	5,078,522,000.00	638,675,000.00	3,033,123,870.00	476,679,800.00	5.071.161.029,00	628.675.000,00	2.960.194.265,00	474.884.920,00	99,00	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng
Urusan Pemberdayaan Masyarakat	3,204,665,000.00	381,050,000.00	3,839,828,168.26	33,500,000.00	3.182.341.664,00	178.985.000,00	3,782,397,922.00	28.347.300,00	98,83	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buleleng
Urusan Sosial	3,070,389,000.00	261,010,000.00	4,803,131,460.00	14,326,250,920.00	3.032.383.896,00	260.565.000,00	4.723.531.131,00	14.309.641.670,00	99,40	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
Urusan Budaya	6.255.545.944,00	383,320,000,00	8,397,754,000,00	922,055,000,00	5.564.345.198,00	323,870,000,00	6,975,991,479,00	540,127,400,00	80,31	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Buleleng
Urusan Kearsipan			99.699.830,00				84.744.818,00		83,19	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Buleleng
Urusan Perpustakaan	1.684.725.000,00	247.610.000,00	669,417,386.,25	81.771.900,00	1.663.970.456,00	246.040.000,00	670,304,357,00	81.551.900,00	99,19	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Buleleng

SUMBER DATA : BKD Kab. Buleleng

5.2 Anggaran Belanja, Realisasi dan Pelaksana Urusan Pilihan TA. 2016

Tabel 17
Alokasi Dan Realisasi Anggaran Urusan Pilihan.

Urusan Wajib	Anggaran Belanja Tidak Lansung	Anggaran Belanja Langsung			Realisasi Belanja Tidak Langsung	Realisasi Belanja Langsung			% Realisasi Belanja	SKPD Pelaksana
	Belanja Pegawai	Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Urusan Perikanan.	5,287,731,000.00	391,120,000.00	4,754,557,316.95	1,545,783,500.00	5.247.792.427,00	389.820.000,00	3.796.771.279,00	1.464.100.600,00	95,78	Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng
Urusan Pertanian.	12.841.802.000,00	462.075.000,00	11.274.639.955.57	1.676.681.863,00	12.716.866.204,00	451.070.000,00	10.956.129.278,00	1.510.963.000,00	97,64	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng
Urusan Kehutanan.	7,318,626,000.00	313,515,000.00	5,997,877,647.89	355,500,000.00	7.040.305.367,00	305.395.000,00	4.111.982.496,00	335.209.000,00	85,42	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Buleleng
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.		18.125.000,00	17.224.855.789,00	4.116.211.000,00	-	18.125.000,00	16.364.002.058,00	4.115.648.000,00	96,10	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng
Urusan Pariwisata.		98.575.000,00	2.390.735.000,00	2.280.963.229.85,00	5.564.345.198,00	59.655.000,00	1.961.806.083,00	1.303.923.900,00	80,31	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Buleleng
Urusan Perdagangan.		21.510.000,00	480.847.725,00	15.193.933.890,00		11.000.000,00	235.603.490,00	10.977.955.120,00	71,51	Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng
Urusan Industri.		*5.700.000,00*	*383.095.300,00*				305.958.500,00		78,69	Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng
Urusan Transmigrasi.		7,755,000,00	166,285,935,00			7,305,000,00	153,859,600,00		92,60	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng

SUMBER DATA : BKD Kab. Buleleng

Alokasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016 untuk pembiayaan penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan berjumlah sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23 dan terealisasi sebesar Rp. 2.200.355.657.347,43 atau mencapai 92,66 persen. Belanja Daerah Kabupaten Buleleng terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.369.560.719.162,71 yang terealisasi sebesar Rp. 1.274.346.715.665,05 atau 93,05 persen, meliputi Belanja Pegawai dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 1.052.739.186.901,40 dan terealisasi Rp. 961.075.607.179,00 atau 91,29, kemudian Belanja Hibah dengan anggaran sebesar Rp. 82.499.834.000,00 dan terealisasi Rp. 81.808.234.000,00 atau 99,16 persen, Belanja bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dengan anggaran Rp. 15.347.391.380,00 yang realisasinya mencapai 100 persen, dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan partai Politik, yang dialokasikan sebesar Rp. 215.838.828.057,15 dan terealisasi Rp. 214.928.828.057,18 atau 99,58 persen serta Belanjua Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp. 2.985.478.824,16 dan terealisasi Rp. 1.186.655.048,90 atau 35,79 persen.

Untuk Belanja Langsung pada APBD Tahun Anggaran 2016 dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 1.005.026.304.268,52 terealisasi Rp. 926.008.941.682,38 atau tercapai 92,14 persen. Yang terdiri atas Belanja Pegawai dengan anggaran Rp. 49.544.098.198,90 dan terealisasi Rp. 56.935.214.561,07 atau 114,92 persen. Selanjutnya Belanja Barang dan jasa yang direncanakan dengan anggaran sebesar Rp. 547.829.973.574,92 dan terealisasi Rp. 523.004.439.475,35 atau 96,47 persen serta Belanja Modal dengan anggaran Rp.407.652.232.494,70 dan terealisasi Rp. 346.068.287.645,96 atau 84,89 persen.

Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 yang terealisasi sebesar Rp. 2.066.054.109.742,38, sebagian besar masih didominasi oleh Dana Perimbangan dengan anggaran sebesar Rp. 1.449.970.563.193,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.305.606.678.444,00 atau 90,04 persen, yang terdiri dari realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu sebesar Rp. 982.698.080.000,00 atau 47,56 persen dari total realisasi pendapatan daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 dan realisasi dana alokasi khusus sebesar Rp. 293.888.358.759,00. Sumber pendapatan lainnya yaitu Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2016 yang ditargetkan sebesar Rp. 315.526.783.349,70

terealisasi sebesar Rp. 282.111.205.871,44 atau 89,41 persen. Belum optimalnya realisasi pendapatan asli daerah dikarenakan dibeberapa pos pendapatan realisasinya kurang maksimal, yakni pada pos hasil pajak daerah yang hanya terealisasi sebesar 76,19 persen dan retribusi daerah terealisasi 78,41 persen. Sedangkan untuk lain – lain pendapatan daerah yang sah dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 450.660.832.929,19 dan terealisasi Rp. 478.336.225.426,94 atau 106,14 persen.

6. Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng.

SKPD Kabupaten Buleleng berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 11 Th. 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng, terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 15 Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah ; 9 Badan, 1 Kantor, RSUD. Satuan Polisi Pamong Praja, dan 9 Pemerintah Kecamatan.

Tabel 18
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng
Tahun 2016.

No	SKPD	Jumlah Personil (PNS)
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng	138 orang
2	Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng	58 orang
3	Inspektorat Kabupaten Buleleng	44 orang
Dinas Daerah		
4	Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng	6.257 orang
5	Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng	736 orang
6	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	36 orang
7	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng	40 orang
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng	89 orang
9	Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng	88 orang
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng	36 orang
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng	62 orang
12	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Industri Kabupaten Buleleng	63 orang
13	Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng	104 orang

14	Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng	62 orang
15	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng	198 orang
16	Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng	115 orang
17	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng	157 orang
18	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Buleleng	84 orang
Lembaga Teknis Daerah		
19	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buleleng	65 orang
20	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Buleleng	39 orang
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng	50 orang
22	Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng	35 orang
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buleleng	63 orang
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Buleleng	30 orang
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng	62 orang
26	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Buleleng	28 orang
27	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Buleleng	48 orang
28	RSUD Kabupaten Buleleng	523 orang
29	Kantor Perpustakaan dan Arsip daerah Kabupaten Buleleng	23 orang
30	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng	77 orang
Pemerintah Kecamatan		
31	Kecamatan Gerokgak	41 orang
32	Kecamatan Seririt	63 orang
33	Kecamatan Busungbiu	35 orang
34	Kecamatan Banjar	33 orang
35	Kecamatan Buleleng	173 orang
36	Kecamatan Sukasada	49 orang
37	Kecamatan Sawan	40 orang
38	Kecamatan Kubutambahan	37 orang
39	Kecamatan Tejakula	31 orang

Sumber data : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan

dasar. Untuk melaksanakan amanat Undang-undang tersebut, dan mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah berhasil menetapkan Peraturan Derah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditetapkan pada tanggal 30 Nopember 2016. Adapun Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng yang baru secara rinci tersaji pada tabel berikut :

Tabel 19
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng
Berdasarkan Perda Kabupaten Buleleng No 13 Tahun 2016.

No	SKPD	Tipe
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng	A
2	Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng	A
3	Inspektorat Kabupaten Buleleng	A
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng	A
5	Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng	B
6	Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng	A
7	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng	B
8	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	B
9	Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng	A
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng	B
11	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng	B
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	B
13	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng	A
14	Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng	A
15	Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng	B
16	Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng	B
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng	A
18	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng	A
19	Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng	B
20	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng	A
21	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	A

	Kabupaten Buleleng	
22	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng	A
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng	B
24	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng	A
25	Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng	B
26	Dinas Statistik Kabupaten Buleleng	B
27	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng	
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng	A
29	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng	A
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng	A
31	Kecamatan Gerokgak	A
32	Kecamatan Seririt	A
33	Kecamatan Busungbiu	A
34	Kecamatan Banjar	A
35	Kecamatan Buleleng	A
36	Kecamatan Sukasada	A
37	Kecamatan Sawan	A
38	Kecamatan Kubutambahan	A
39	Kecamatan Tejakula	A

Sumber data : bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa, dalam susunan perangkat daerah Kabupaten Buleleng yang baru terdapat perangkat daerah yang baru sebagai hasil kajian terhadap beban kerja urusan yang dilaksanakan. Perangkat Daerah yang baru meliputi ; Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Statistik, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan. Terdapat pula Perangkat daerah yang terbentuk karena merupakan pemecahan dari perangkat daerah terdahulu yang meliputi ; Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata yang dahulunya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang dahulunya Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian. Dan ada pula Perangkat Daerah yang digabung menjadi satu yang meliputi Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan gabungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Badan Lingkungan Hidup, Badan Keuangan Daerah yang

merupakan gabungan Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Pendapatan. Serta Perangkat Daerah yang berubah status yang meliputi ; BPMPD menjadi Dinas PMD, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah menjadi Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, Badan KB dan PP menjadi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPPT menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu.

3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dan penggunaan sumber daya alam untuk pemenuhan hidup yang cendrung ekploitatif merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng yang sedang giat – giatnya melaksanakan pembangunan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan luas mencapai wilayah 136.588 Ha, yang merupakan 24,25 persen dari luas Provinsi Bali dan jumlah penduduk sekitar 807.598 jiwa pada Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Buleleng berkomitmen untuk mengelola dinamika kependudukan dan kelestarian sumber daya alam guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat.

Dengan landasan falsafah Tri Hita Karana, sebagaimana tertuang dalam Visi Kabupaten Buleleng "terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, damai dan lestari berlandaskan Tri Hita Karana " Pemerintah Kabupaten Buleleng telah berkomitmen mewujudkan keserasian hubungan manusia dengan Penciptanya, keserasian hubungan hubungan manusia dengan sesamanya dan keserasian hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Visi tersebut sejalan dengan pembangunan berwawasan lingkungan. Dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan maka unsur konservasi dan pelestarian lingkungan hidup harus dimasukkan dalam kerangka proses pembangunan daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka untuk pelaksanaan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Buleleng dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD yakni Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng.

Kebijakan penyelenggaraan urusan pertanahan selama kurun waktu 5 (lima) tahun (2012-2017) yaitu:

- Terjaganya kualitas sumber daya alam;
- Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- Meningkatnya pemanfaatan sumber energi terbarukan.

Implementasi kebijakan tersebut antara lain berupa program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

b. ***Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup***, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :
   - Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
   - Pemantauan Kualitas Lingkungan
   - Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
   - Pengelolaan B3 dan Limbah B3
   - Pengkajian Dampak Lingkungan
   - Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)
   - Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih
   - Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
   - Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
   - Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan

c. ***Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam***, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :
   - Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber - Sumber Air
   - Perlindungan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Flora dan Fauna

d. ***Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup***, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :
   - Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

e. ***Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut***, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :
   - Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

f. ***Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup***, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :
   - Penegakan Hukum Lingkungan
   - Penyuluhan

g. ***Program Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat***, adapun kegiatan yang di laksanakan meliputi :
   - Pengembangan Desa Sadar Lingkungan
   - Monev.

h. **Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).**

- Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH.

i. **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah**, dengan Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Sanitasi/Air Limbah.

Pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan tersebut mampu mendukung keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Buleleng selama kurun waktu 5 (lima) tahun (2012-2017) dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 47
Daya Tampung Tempat Pembuangan Sampah

No	Uraian	Lokasi	Kecamatan	Jumlah	Kapasitas (M3)
1	TPS Terpasang	Jalan Mayor Metra	Buleleng	10	10
2	TPS Terpasang	Jalan Jelantik Gingsir	Buleleng	8	8
3	TPS Terpasang	Terminal Sangket	Sukasada	1	1
4	TPS Terpasang	Jalan Gajah Mada	Buleleng	3	3
5	TPS Terpasang	Jalan Gempol	Buleleng	4	4
6	TPS Terpasang	Jalan Yudistira	Buleleng	1	1
7	TPS Terpasang	Kantor DPRD	Buleleng	1	1
8	TPS Terpasang	Ex. Pelabuhan Buleleng	Buleleng	4	4
9	TPS Terpasang	Terminal Penarukan	Buleleng	1	1
10	TPS Terpasang	Rumah Jabatan Bupati	Buleleng	1	1
11	TPS Terpasang	Jalan Gunung Rinjani	Buleleng	1	1
12	TPS Terpasang	Jalan Seririt-Singaraja (Sebelah Mapindo, Anturan)	Buleleng	1	1
13	TPS Terpasang	SMKN 1 Singaraja	Buleleng	1	1
14	TPS Terpasang	Sebelah Timur Kantor DPRD	Buleleng	1	1

15	TPS Terpasang	Dinas Perhubungan	Buleleng	1	1
16	TPS Terpasang	Kantor Bupati	Buleleng	2	2
17	TPS Terpasang	Pasar Buleleng	Buleleng	4	4
18	TPS Terpasang	Desa Giri Mas	Buleleng	2	2
19	TPS Terpasang	Desa Wanagiri	Buleleng	2	2
20	TPS Terpasang	SD N 1 Baktiseraga	Buleleng	1	1
21	TPS Terpasang	Desa Selat	Buleleng	4	4
22	TPS Terpasang	Desa Anturan	Buleleng	3	3
23	TPS Terpasang	Krisna PP	Buleleng	1	1
			Total	58	58 M3

Sumber data : DKP Kabupaten Buleleng, 2016.

Volume sampah yang ditangani di wilayah kota Singaraja mencapai 290,88 M3 yang berasal dari timbunan sampah rumah tangga yang mencapai 242,40 M3/hari dan timbunan sampah yang berasal dari fasilitas umum yang volumenya mencapai 48,48 M3/hari. Dari total timbunan sampah di wilayah Kota Singaraja tersebut jumlah yang terangkut mencapai 252,50 M3/hari sehingga masih ada sisa sampah per hari yang tidak terlayani sejumlah 38,38 M3/hari.

Sedangkan di wilayah perdesaan volume sampah yang diproduksi per harinya mencapai 1.923,87 M3/hari, yang berasal dari jumlah volume sampah rumah tangga sejumlah 1.603,23 M3/hari dan volume sampah yang berasal dari fasilitas umum sejumlah 320,65 M3/hari. Dari total volume sampah di wilayah perdesaan pada Tahun 2016, telah terangkut oleh pelayanan pengangkutan sampah sejumlah 363,65 M3/hari, di daur ulang sejumlah 59,26 M3/hari, di composting 161,21 M3/hari sehingga sisa timbunan yang belum tertangani mencapai 1.339,76 M3/hari.

Sehingga dari data tersebut dapat dijelaskan total produksi sampah per hari yang harus ditangani mencapai 2.116,27 M3, sedangkan yang sudah dikelola melalui jasa pengangkutan oleh truk persampahan, daur ulang dan diolah menjadi komposting baru mencapai 836,61 m^3/hari.

Jumlah seluruh pasar tradisional di kabupaten adalah 12 pasar yang terdiri dari : Pasar Anyar 1, Pasar Banyuasri, Pasar Buleleng, Pasar Kampung Tinggi, Pasar Seririt, Pasar Banjar, Pasar Wisata Pancasari, Pasar Sangsit, Pasar Kampung Bugis, Pasar Mumbul, Pasar Kalisari, Pasar Desa/Tenten. Pasar tradisional yang tergolong baik

dengan kriteria ada bangunan yang tertata dengan baik dan terkelompoknya jenis dagangan, memiliki sanitasi, memiliki tempat parkir, adanya sarana pembuangan limbah/sampah, adalah Pasar Banyuasri dan Pasar Buleleng.

Disamping pembangunan TPS maka Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka penanganan sampah juga telah menyediakan sarana dan prasana penunjang lainnya yang meliputi ; Loud Hald Container (LHC) sebanyak 33 unit yang terpasang di 30 lokasi, kereta dorong sebanyak 13 unit di 6 kelurahan, Truck Armroll sebanyak 13 unit, Dum truck 7 unit, pick up 27 unit, motor roda tiga 4 unit, TPST di 25 desa, transfer dipo di 14 lokasi, sanimas di 8 lokasi, TPA di 3 lokasi yang berada di Desa Bengkala dan Desa Pangkungparuk. 1 IPLT di Desa Bengkala. Kemudian bank – bank sampah yang tersebar di 5 kecamatan.

Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, social, budaya, ekonomi dan estetika. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Pasal 29) mengamanatkan proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen luas wilayah kota dengan proporsi ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. Hasil inventarisasi Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Singaraja adalah Ruang Terbuka Hijau Kota Singaraja seluas 1.175,75 ha (42,14%) dari luas kota Singaraja 2.790,00 ha yang terdiri dari 156,66 ha (5,62%) Ruang Terbuka Hijau Publik dan 1.019,09 ha (36,53%) Ruang Terbuka Hijau Privat, sesuai tabel dibawah ini.

Tabel 48
Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Buleleng

N0	JENIS	LUAS		% DARI LUAS KOTA
		PUBLIK	PRIVAT	
1.	Taman Kota	1.07	-	0,06
2.	Taman Rekreasi	4,05	-	0,16
3.	Taman Lingkungan Perumahan dan	-	3,65	0,13
4.	pemukiman.	41,44	-	1,48
5.	Taman Lingkungan Kantor & Gedung	15,18	-	0,54
6.	Komersial.	2,49	-	0,08
7.	Pemakaman Umum	0,64	-	0,02
8.	Lapangan Olahraga	-	1.015,44	36,39
9.	Parkir Terbuka	88,89	-	3,18
10.	Lahan Pertanian Perkotaan	1,67	-	0,05
11.	Sempadan Sungai,pantai,Bangunan situ	10,69	-	0,38

	dan rawa Jalur Pengaman Jln, median jln,Rel Kereta Api,PipaGas & Pendestrian Hutan Kota			
	Jumlah :	156,66	1.019,09	1.175,75
	Prosentase (%)	*5,62*	*36,53*	*42,14*

Sumber data : DKP Kabupaten Buleleng, 2016.

IPAL komunal di Kabupaten Buleleng terdapat di 8 lokasi dengan jumlah KK pemanfaatannya adalah : 1.600 KK, sedangkan Jumlah RT Miskin di Kabupaten Buleleng adalah 8.422 KK.

Penganugerahan Adipura 2016 menjadi penghargaan tertinggi bagi kota-kota di Indonesia dalam bidang kebersihan dan lingkungan hidup. Kota dan ibukota kabupaten peraih Adipura dinilai sebagai kota yang bersih, hijau, sehat, dan menerapkan pembangunan yang berkelanjutan. Tahun 2016 ini, penghargaan Adipura diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, pada Jumat 22 Juli 2016 di Siak, Riau. Selain waktu dan tempat pengumumannya yang berbeda, Adipura tahun 2016 ini pun menggunakan kategori yang berbeda. Jika sebelumnya kota penerima Adipura diumumkan pada tanggal 5 Juni (kecuali penganugerahan di tahun 2015 yang diumumkan pada tanggal 23 November 2015), pengumuman dan penyerahan penghargaan Adipura tahun 2016 diselenggarakan pada tanggal 22 Juli 2016. Tempat penganugerahannya pun bukan lagi di Istana Negara Jakarta namun di Siak, Riau. Perbedaan selanjutnya adalah kategori yang digunakan dalam Adipura 2016. Pada tahun-tahun sebelumnya Adipura dikelompokkan dalam empat kategori kota yakni Kota Metropolitan, Kota Besar, Kota Sedang, dan Kota Kecil. Namun pada tahun 2016 ini penghargaan Adipura diberikan dalam tiga kategori yakni Adipura Buana, Adipura Kirana, dan Adipura Paripurna. Adipura Buana adalah penghargaan adipura yang diberikan kepada kota / ibukota kabupaten yang layak huni (livable city). Pada Tahun ini Kabupaten Buleleng berhasil meraih Penghargaan Adipura Buana, penghargaan ini diterima langsung oleh Bupati Buleleng.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng berjumlah 92 orang. **Dengan pangkat dan golongan terdiri atas** : Pembina Utama Muda (IV/c) ; 1 orang, Pembina Tk.I (IV/b) ; 1 orang, Pembina (IV/a) ; 6 orang, Penata

Tk.I (III/d) ; 11 orang, Penata (III/c) ; 2 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) ; 8 orang, Penata Muda (III/a) ; 5 orang, Pengatur Tk.I (II/d) ; 2 orang, Pengatur (II/c) ; 16 orang, Pengatur Muda Tk.I ; 10 orang, Pengatur Muda ; 11 orang, Juru Tk.I (I/d) ; 3 orang, Juru (I/c) ; 4 orang, Juru Muda Tk.I (I/b) ; 1 orang. **Dengan kualifikasi pendidikan meliputi** : Strata 2 (S2) ; 3 orang, Strata 1/ Diploma 4 (S1/D4) ; 17 orang, Diploma 3 (D3) ; 3 orang, Diploma 2 (D2); 2 orang, SMA/SMK/Mts ; 41 orang, SMP/MI ; 13 orang, SD ; 8 orang. **Jumlah Pejabat Struktural** : Eselon II/b ; 1 pejabat, Eselon III/a ; 1 pejabat, Eselon III/b ; 4 pejabat, Eselon IV/a ; 15 pejabat. Tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng.

Permasalahan – permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup di kabupaten Buleleng antara lain ;

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup guna menghindari terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan untuk mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, sehat dan lestari.
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan menggunakan metode 3 R (Reduce , Reuse , Reycle) dimana dengan metode ini memungkinkan masyarakat untuk menambah pendapatan / penghasilan dengan mengelola sampah.
3. Secara administratif masih kurangnya kesadaran usaha/kegiatan untuk melengkapi kegiatan usahanya dengan dokumen lingkungan serta masih kurangnya kesadaran usaha untuk mengelola limbah usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terkait permasalahan yang ada maka usaha – usaha yang telah dilaksanakan untuk mengatasinya adalah ;

1. Mengadakan kegiatan lomba-lomba yang berkaitan dengan peningkatan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Menghimbau dan mengikutsertakan masyarakat agar berperan serta aktif dalam melestarikan dan mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup seperti : mengadakan penghijauan, mengadakan gerakan kebersihan di lingkungan masing-masing desa/kelurahan/ kota berupa gerakan green n clean, gerakan germaphi

3. Menambah daerah-daerah resapan air guna mengurangi genangan air pada musim penghujan berupa : pembuatan sumur resapan dan pembuatan lubang biopori.
4. Memberikan bantuan berupa hibah barang kepada masyarakat sebagai stimulan dalam upaya pengelolaan persampahan berupa : bangunan rumah atap pengolah sampah organik, tong sampah, gerobak sampah, komposter, kendaraan bermotor beroda tiga ,mesin pencacah sampah plastik.
5. Meningkatkan program Adiwiyata yaitu mengajak sektor sekolah untuk peduli terhadap lingkungan melalui pembinaan adiwiyata baik tingkat SD,SMP dan SLTA.
6. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang ada di kabupaten buleleng baik dari segi kelengkapan dokumen ijin lingkungan maupun pembinaan pengelolaan limbah usaha.
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui Diklat Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4. URUSAN PEKERJAAN UMUM.

Urusan Pekerjaan Umum merupakan urusan strategis yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penyediaan infrastruktur dasar yang handal, bermanfaat dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur dasar diharapkan dapat mendukung laju pembangunan perekonomian daerah. Keberadaan infrasetruktur dan prasarana pelayanan dasar masyarakat lainnya di Kabupaten Buleleng walaupun secara keseluruhan mengalami perbaikan dan peningkatan kualitas fisik, namun hal itu belum memadai sehingga memerlukan peningkatan dan pembangunan secara berkesinambungan, antara lain kualitas sarana dan prasarana jalan, ketersediaan air baku untuk pertanian dan air minum, kualitas dan cakupan pelayanan air minum serta berbagai infrastruktur dasar masyarakat lainnya.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang Pekerjaan Umum yaitu :

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.

- Kegiatan Penggantian Jembatan.

2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

- Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan.
- Kegiatan Peningkatan Jalan.
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan.

3. **Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan.**
   - Kegiatan Inspeksi Kondisi Jalan.
4. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.**
   - Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat.
5. **Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengailan Lainnya.**
   - Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
   - Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun.
   - Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi.
6. **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.**
   - Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah.
7. **Program Pengendalian Banjir.**
   - Kegiatan Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan - badan Sungai.
   - Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Saluran Drainase.
8. **Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.**
   - Kegiatan Pembangunan/peningkatan Infrastruktur.
9. **Program Pembangunan Infrstruktur Perdesaan.**
   - Kegiatan Peningkatan Cakupan sistem penyediaan air minum.
10. **Program Pembangunan Fasilitas Umum.**
    - Kegiatan Fasilitasi/Pembinaan Pembangunan Fasilitas Umum.

Pelaksanaan berbagai kebijakan , program dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut mampu mendukung keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dengan hasil sebagai berikut:

TABEL 49
Indikator Tersedianya Jalan Yang Memudahkan Masyarakat Per Individu Melakukan Perjalanan

TAHUN	KONDISI TAHUN 2010 s/d 2016							PENCAPAIAN SPM
	total luas wilayah kabupaten/kota	panjang ruas jalan yg menghubungkan seluruh pusat kegiatan (pk) di kab/kota	total jumlah penduduk kab/kota tahun terakhir	prediksi jumlah penduduk kab/kota akhir tahun pencapaian spm	tingkat kerapatan penduduk kab/kota rumus: σ (3) / σ (1)	angka mobilitas yang ditentukan (lihat tabel.1 berdasarkan kerapatan penduduk)	angka mobilitas pada akhir tahun pencapaian spm kab/kota rumus: σ (1) / σ (4) x 10.000 jiwa	rumus : (σ (7)/ σ (6) x 100 %)
	(KM²)	(KM)	(JIWA)	(JIWA)	(JIWA/KM²)	(KM/JIWA)	(KM/JIWA)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
2010	136,588	417	654,247	719,672	4.79	0.21	0.19	91
2011	136,588	417	662,920	729,212	4.85	0.21	0.19	91
2012	136,588	417	675,511	743,062	4.95	0.20	0.18	91
2013	136,588	417	675,511	743,062	4.95	0.20	0.18	91
2014	136,588	417	675,511	743,062	4.95	0.20	0.18	91
2015	136,588	417	675,511	743,062	4.95	0.20	0.18	91
2016	136,588	417	675,511	743,062	4.95	0.20	0.18	91

Sumber data : Dinas PU Kabupaten Buleleng

TABEL 50
Indikator Tersedianya Jalan yang Menjamin Pengguna Jalan Berkendara dengan Selamat

TAHUN	KONDISI SPM				PENCAPAIAN SPM KESELAMATAN
	TOTAL LUAS WILAYAH KABUPATEN/KOTA	KOMULATIF PANJANG RUAS JALAN YG MENGHUBUNGKAN SELURUH PUSAT KEGIATAN (PK) DI KAB/KOTA	PANJANG RUAS JALAN YANG MEMILIKI PERSYARATAN ADM.TEKNIS DAN LAIK FUNGSI (PERMEN PU 11/M/PRT/2010)	RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN SAMPAI AKHIR TAHUN PENCAPAIAN SPM	RUMUS : (Σ (3)/ Σ (4) X 100 %)
	(KM²)	(KM)	(KM)	(KM)	
2010	136,588	417	878,192	395,168	45%
2011	136,588	417	878,192	439,096	50%
2012	136,588	417	878,192	483,006	55%
2013	136,588	417	878,192	526,915	60%
2014	136,588	417	878,192	658,644	75%
2015	136,588	417	878,192	658,644	75%
2016	136,588	417	878,192	658,644	75%

Sumber data : Dinas PU Kabupaten Buleleng

TABEL 51
Indikator Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.

tahun	KONDISI SPM								pencapaian spm keselamatan
	total luas wilayah kabupaten/kota	panjang ruas jalan yg menghubungkan seluruh pusat kegiatan (pk) di kab/kota	penilaian kondisi jalan pada setiap ruas menggunakan alat pengukur kerataan jalan (roughometer)	kondisi kerataan permukaan jalan		nilai data lintas harian rata2 tahunan (lhrt) tiap ruas untuk tahun akhir pencapaian spm	panjang ruas jalan yang memenuhi kriteria kondisi jalan	panjang jalan yang menghubujbungkan semua pk pada akhir tahun pencapain spm	rumus : (σ (7)/ σ (8) x 100 %)
				international roughness index (iri) jalan kab/kota maksimum	road condition index (rci) jalan kab/kota				
	(KM²)	(KM)	(KM)	M/KM	BAIK/SEDANG		KM	KM	
2010	136,588	417			310		310	417	74.34
2011	136,588	417			310		310	417	74.34
2012	136,588	417			310		310	417	74.34
2013	136,588	417			310		310	417	74.34
2014	136,588	417			310		310	417	74.34
2015	136,588	417			310		310	417	74.34
2016	136,588	417			310		310	417	74.34

TABEL 52
Indikator Tersedianya Jalan yang Menjamin Perjalanan Dapat dilakukan Sesuai dengan KECEPATAN Rencana

Tahun	KONDISI SPM						pencapaian spm keselamatan
	total luas wilayah kabupaten/kota	panjang ruas jalan yg menghubungkan seluruh pusat kegiatan (pk) di kab/kota	hasil pengukuran dibandingkan kecepatan rencana (lihat tabel.2)	nilai data lintas harian rata2 tahunan (lhrt) tiap ruas untuk tahun akhir pencapaian spm	panjang ruas jalan yang memenuhi kriteria kecepatan jalan	rencana pembangunan jalan pada akhir tahun pencapain spm	rumus : (σ (5)/ σ (6) x 100 %)
			international roughness index (iri) jalan kab/kota maksimum				
	(KM²)	(KM)	M/KM		KM	KM	
2010	136,588	417			310	0.00	0.00
2011	136,588	417			310		0.00
2012	136,588	417			310		0.00
2013	136,588	417			310		0.00
2014	136,588	417			310		0,00
2015	136,588	417			310		0,00
2016	136,588	417			310		0,00

Sumber data : Dinas PU Kabupaten Buleleng

TABEL 53
Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun

TAHUN	Jumlah panjang saluran dan jumlah pompa dll, yang telah dibangun dan mampu dikelola O/P nya oleh Kota/Kabupaten	Jumlah panjang saluran dan jumlah pompa yang telah direncanakan untuk dibangun didalam Rencana Induk Sistem Drainase	Nilai SPM tingkat pelayanan pada akhir tahun pencapaian SPM Σ (2)/ Σ(3) x 100 %)	Sumber data dan Rujukan
	(M)	(M)	(%)	
2010	57.586	5.525	1.042	Dari Total Saluran Drainase Existing 78.345 M2
2011	57.586	5.526	1.042	Peta Jaringan Drainase Perkotaan yang dikeluarkan Bappeko/Bappekab atau Dinas Pekerjaan Umum Kota/Kabupaten;
2012	57.586	5.527	1.042	Data Kondisi Saluran dalam Laporan Monitoring Operasi dan Pemeliharaan Saluran Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum Kota/Kabupaten.
2013	57.586	5.528	1.042	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Pasal 51, Pasal 57 dan Pasal 58
2014	57.586	5.628	1.023	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 239/KPTS/1987 Tentang Pedoman Umum Mengenai Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Drainase Kota
2015	20.000	57.586	34,73	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 239/KPTS/1987 Tentang Pedoman Umum Mengenai Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Drainase Kota
2016	20.000	57.586	34,73	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 239/KPTS/1987 Tentang Pedoman Umum Mengenai Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Drainase Kota

Sumber data ; Dinas PU Kabupaten Buleleng

TABEL 54
Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun

TAHUN	Luasan daerah yang sebelumnya tergenang dan kemudian terbebas dari genangan (terendam < 30cm dan < 2 jam dan maksimal terjadi 2 kali setahun	Luasan daerah yang rawan genangan dan berpotensi tergenang (sering kali terendam > 30 cm dan tergenang > 2 jam dan terjadi > 2 kali/tahun).	Nilai SPM tingkat pelayanan pada akhir tahun pencapaian SPM Σ (2)/ Σ(3) x 100 %)	Sumber data dan Rujukan
	(M2)	(M2)	(%)	
2011				Peta Jaringan Drainase Perkotaan yang dikeluarkan Bappeko/Bappekab atau Dinas Pekerjaan Umum Kota/Kabupaten;
2012				Data Kondisi Saluran dalam Laporan Monitoring Operasi dan Pemeliharaan Saluran Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum Kota/Kabupaten.
2013	0,5 Ha	13,7 Ha	36,50	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Pasal 51, Pasal 57 dan Pasal 58
2014	0,5 Ha	13,2 Ha	37,88	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 239/KPTS/1987 Tentang Pedoman Umum Mengenai Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Drainase Kota
2015	1 Ha	12,2 Ha	81,97	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 239/KPTS/1987 Tentang Pedoman Umum Mengenai Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Drainase Kota
2016	1 Ha	12,2 Ha	81,97	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 239/KPTS/1987 Tentang Pedoman Umum Mengenai Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Drainase Kota

Sumber data ; Dinas PU Kabupaten Buleleng

TABEL 55
Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.

TAHUN	Luasan pengurangan permukiman kumuh sejak diterbitkannya Peraturan Menteri PU pada Akhir pencapaian SPM	Total luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Walikota/Bupati	Nilai SPM Pelayanan pada akhir tahun pencapaian SPM Σ (2)/ Σ(3) x 100 %)	Sumber data dan Rujukan
	(Ha)	(Ha)	(%)	
2011				Rencana pengembangan wilayah dari Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten/Kota
2012				Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota
2012				Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kabupaten/Kota
2013				Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten/Kota
2014				Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman
				Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
2015	15 Ha	94,75 Ha	16%	SK Bupati Buleleng Nomor 050/309/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Buleleng
2016	15 Ha	164,39 Ha	9%	SK Bupati Buleleng Nomor 050/74/HK/2016 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Buleleng

Sumber data : Dinas PU Kabupaten Buleleng

TABEL 56

Indikator Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari

TAHUN	Jumlah Masyarakat yang memiliki Akses Air Minum Yang Aman	Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten/Kota pada akhir tahun pencapaian SPM	PENCAPAIAN SPM Air Minum RUMUS (Σ (2)/ Σ (3) X 100 %)
	(Jiwa)	(Jiwa)	(%)
1	2	3	4
2010	467,102	654,147	71.40627412
2011	467,102	654,147	71.40627412
2012	467,102	654,147	71.40627412
2013	467,102	654,147	71.40627412
2014	494,236	641,136	77,09
2015	500,088	638,309	78,34
2016	500,088	638,309	78,34

Sumber data : Dinas PU Kabupaten Buleleng

TABEL 57
Indikator Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kab/kota

TAHUN	Biaya maksimum per m2 pelaksanaan konstruksi untuk pembangunan bangunan gedung negara	Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) di Kabupaten/Kota sehingga diharapkan di tahun 2015 seluruh kabupaten/kota telah memiliki HSBGN.	Nilai SPM 2016
		Ada/Tidak	ada =100 % Tidak ada= 0%
1	2	3	4
2010		Ada	100%
2011	3,411,000	Ada	100%
2012	3,984,000	Ada	100%
2013	4,263,000	Ada	100%
2014	4.446.000	Ada	100%
2015	5.256.000	Ada	100%
2016	5.256.000	Ada	100%

Sumber data : Dinas PU Kabupaten Buleleng

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng selaku Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pekerjaan Umum didukung oleh personil sejumlah 251 orang sebagaimana terinci pada tabel berikut ;

Tabel 58
Kondisi Pegawai Urusan Pekerjaan Umum, 2016

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Pegawai	
	PNS	172 Orang
	Pegawai Harian /Kontrak	79 Orang
2.	Pangkat dan Golongan	
	Pembina Tk.I (IV/b)	1 Orang
	Pembina (IV/a)	3 Orang
	Penata Tk. I (III/d)	4 Orang
	Penata (III/c)	4 Orang
	Penata Muda Tk.I (III/b)	12 Orang
	Penata Muda (III/a)	5 Orang
	Pengatur Tk.I (II/d)	2 Orang
	Pengatur (II/c)	44 Orang
	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	41 Orang
	Pengatur Muda (II/a)	13 Orang
	Juru Tk.I	13 Orang
	Juru	11 Orang
	Juru Muda Tk. I	17 Orang
	Juru Muda	2 Orang
3.	Tingkat Pendidikan	
	S2	1 Orang
	SI/D4	30 Orang
	D3	6 orang
	SMA/SMK/MTs	120 Orang
	SMP/MI	19 Orang
	SD	23 Orang
4.	Jumlah Pejabat	
	Eselon IIb	1 Orang
	Eselon IIIa	Orang
	Eselon IIIb	3 Orang
	Eselon Iva	9 Orang

Sumber data : Dinas PU Kabupaten Buleleng, 2016

5.URUSAN PENATAAN RUANG.

Urusan Penataan Ruang merupakan urusan strategis yang menyangkut pengendalian dan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang ada (RUTR, RDTR, RTBL) sehingga pemanfaatan ruang oleh semua pihak perlu dikendalikan melalui pengawasan pemanfaatan ruang. Penataan ruang dan bangunan tetap diarahkan sebagai pengendali pemanfaatan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi, selaras dan seimbang serta berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pedoman dalam penyusunan rencana rinci tata ruang. Dalam rangka penyusunan Rencana Kawasan Induk Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng, maka pengembangan wilayah Kabupaten Buleleng diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan tata ruang meliputi Kawasan budidaya seluas 89.593,67 Ha atau 65,59% dari luas wilayah kabupaten, meliputi Kawasan peruntukan hutan produksi seluas 4.731,95 Ha, Kawasan hutan rakyat, Kawasan peruntukan pertanian dirancang seluas 48.741,51 Ha atau 35,68% dari luas wilayah Kabupaten Buleleng, Kawasan peruntukan hortikultura seluas 5.391 Ha, Kawasan peruntukan perkebunan seluas sekitar 20.274 Ha, Kawasan peruntukan peternakan,Kawasan peruntukan perikanan, Kawasan peruntukan pariwisata, Kawasan peruntukan pertambangan berupa pertambangan skala kecil, Kawasan peruntukan industry mencakup kawasan peruntukan aneka 141ndustry Celukan Bawang dan Sentra-sentra 141ndustry kecil kreatif dan kerajinan rumah tangga, makanan olahan dan unggulan lainnya yang lokasinya tersebar pada kawasan permukiman dan Pengembangan agroindustri di kawasan Agropolitan Depeha, Tista, Banjar dan Pancasari. Kawasan peruntukan pemukiman merupakan kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan permukiman atau didominasi oleh lingkungan hunian ruang di arahkan seluas 10.960,72 Ha atau 8,03 % dari luas wilayah Kabupaten.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang penataan ruang meliputi 1

program dan 1 kegiatan, yaitu Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang.

Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang di Kabupaten Buleleng ditunjukkan melalui pencapaian beberapa indikator berupa Izin Pemanfaatan Ruang yaitu terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya telah tercapai 100 persen . Jumlah kumulatif Perda tentang RTRW Kabupaten/Kota sampai akhir tahun pencapaian SPM dibagi Jumlah kumulatif Perda tentang RTRW Kabupaten/Kota yang seharusnya sampai akhir tahun pencapaian SPM juga telah tercapai 100 persen dengan telah ditetapkannya Perda Kabupaten Buleleng Nomor . 9 Tahun 2013 tentang rencana tata Ruang wilayah Kabupaten Bulelemg tahun 2013 – 2033. Selanjutnya Jumlah kumulatif kasus pengaduan pelanggaran di bidang penataan ruang yang dapat ditangani di tingkat Kab/Kota/Kecamatan pada Tahun 2016 berjumlah 35 pengaduan berbanding jumlah kumulatif kasus pengaduan pelanggaran di bidang penataan ruang yang diterima laporannya dan seharusnya ditangani di tingkat Kab/Kota/ Kecamatan sampai akhir tahun pencapaian SPM yang jumlahnya sebanyak 35 pengaduan, jadi tingkat capaiannya 100 persen.

Tabel 59

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan penataan ruang di Kabupaten Buleleng

Tahun	Anggaran	Realisasi	Presentase (%)
2012	16.492.150,00	10.802.500,00	65,50
2013	28.455.900,00	16.292.500,00	57,26
2014	20.116.685,00	19.761.350,00	98,23
2015	38.349.650,00	33.360.491,00	86,99
2016	62.581.700,00	59.058.950,00	94,37

Urusan Penataan Ruang di Kabupaten Buleleng di tangani oleh Dinas Pekerjaan Umum yang didukung oleh personil sejumlah 12 orang dimana 9 diantaranya adalah PNS dengan pangkat golongan ; Pembina Tk.I (IV/b) ;

1 orang, Pembina (IV/a) ; 1 orang, Penata (III/c) ; 1 orang, Penata Muda ; 1 orang, Pengatur ; 1 orang, Pengatur Muda ; 3 orang dan Pengatur Muda Tk.I ; 1 orang. Dengan kualifikasi pendidikan Sarjana 4 orang dan 5 orang lulusan SMA/SMK. Terdapat 3 pejabat structural yang menangani urusan ini yakni pejabat eselon IIb ; 1 pejabat, eselon IIIb ; 1 pejabat dan eselon IVa ; 1 pejabat.

6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN.

Bappeda sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Penyelengaaraan urusan perencanaan dan pengendalian pembangungan daerah secara eksplisit tercantum dalam RPJP 2005-2025 Kabupaten Buleleng, secara implisit kedudukan Bappeda untuk penyelenggaraan program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dinyatakan dalam RPJMD. Kedudukan Bappeda sebagai pelaksana program pembangunan daerah terbagi kedalam tiga kategori yaitu pelaksana utama, pelaksana penunjang dan pelaksana pendukung.

Program RPJMD yang termasuk bidang urusan lingkup Bappeda perlu dituangkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang kemudian dikristalkan menjadi visi Bappeda dalam Rencana strategis Bappeda. Penyusunan kegiatan perlu memperhatikan kedudukan dalam urusan, evaluasi kegiatan RPJMD sebelumnya, proyeksi lima tahun ke depan, skala prioritas dan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sehingga rencana strategis Bappeda yang dirumuskan dapat efesien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan.

Penyusunan Rencana strategis Bappeda mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, melalui keterlibatan semua pemangku kepentingan di Bappeda baik unsur pimpinan, unsur staf sekretariat maupun unsur pelaksana bidang.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut di atas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan program pembangunan Daerah yang terdiri dari rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang;
b. Penyusunan rencana pembangunan daerah;
c. Pelaksanaan koordinasi perencanaan di antara unit kerja lingkungan pemerintah Kabupaten dan instansi vertikal;
d. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama – sama dengan bagian/Unit yang menangani keuangan di bawah koordinasi Sekda;
e. Pelaksanaan koordinasi dan atau penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah;
f. Pemantauan, evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
g. Pelaksanaan tata usaha Badan.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran meliputi :

a. Program Pengembangan Data/Informasi, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :
- Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan.
- Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan.
- Penyusunan Profile Daerah.
- Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Iptek.

b. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :
- Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

c. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :
- Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan.

d. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :
- Penyusunan rancangan RKPD.
- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD.
- Penetapan RKPD.

- Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
- Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

e. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, adapun kegiatan yang di laksanakan meliputi :

- Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat.
- Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi.
- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Koperasi, Perdagangan, Perindustrian dan Pengembangan Dunia Usaha.
- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dalam arti luas.

f. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, adapun kegiatan yang di laksanakan meliputi :

- Koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial.
- Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan mental dan pemerintahan.
- Koordinasi Penanggulan Kemiskinan Daerah.

g. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.

- Koordinasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah sumber daya alam dan lingkungan hidup.

h. Program Perencanaan Tata Ruang.

- Penyusunan detail tata ruang kawasan.

Selama tahun 2012-2016 seluruh tahapan proses perencangan telah dilakukan secara rutin dengan melibatkan unsur-unsur terkait yang dikoordinasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPA, Renstra dan Renja SKPD, serta APBD. Upaya pemantapan penyelenggaraan urusan perencanaan juga terus dilakukan oleh pemerintah daerah melalui kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, studi kelayakan, pengumpulan data dan informasi pelaksanaan pembangunan serta peningkatan kualitas

SDM perencanaan melalui diklat teknis perencanaan. Sasaran dalam penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan antara lain:

- Tersedianya dokumen perencanaan musrenbang tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten.
- Tersusunnya dasar acuan penyusunan APBD Kabupaten Buleleng.
- Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Kinerja perencanaan pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyusunan dokumen – dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Buleleng baik jangka panjang, menengah maupun perencanaan tahunan. Arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Buleleng telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng 2012 -2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013. Sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng 2012 – 2017 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2013. Sedangkan untuk perencanaan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada Tahun 2016 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2015.

RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2012 – 2017 memuat 88 Program, yang secara rinci tertuang dalam tabel berikut ini ;

TABEL 60
Jumlah Program di RPJMD 2012 – 2017

NO	SKPD	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan	5
2	Dinas Kesehatan	12
3	Dinas Pekerjaan Umum	6
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1
5	Energi dan Sumber Daya Mineral	1
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4
7	Dinas Perhubungan	1
8	Badan Lingkungan Hidup	3
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1
10	Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2
11	Keluarga Berencana dan Keluarga	3

	Sejahtera	
12	Urusan Sosial	4
13	Ketenagakerjaan	3
14	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1
15	Otonomi Daerah dan Pemerintah Umum	11
16	Ketahanan Pangan	1
17	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2
18	Kerasipan	1
19	Perpustakaan	1
20	Komunikasi dan Informasi	1
21	Pemuda dan Olahraga	1
22	Pertanian	5
23	Kehutanan	1
24	Perkebunan	3
25	Pariwisata	2
26	Perdagangan	3
27	Perindustrian	3
28	Perikanan dan Kelautan	6
	JUMLAH	88

Sumber data Bappeda Kab. Buleleng

TABEL 61
Jumlah Program di RKPD 2016

NO	SKPD	JUMLAH
1	Sekretariat Daerah	13
2	Kecamatan Tejakula	11
3	Kecamatan Kubutambahan	9
4	Kecamatan Sawan	10
5	Kecamatan Banjar	12
6	Kecamatan Seririt	12
7	Kecamatan Busungbiu	11
8	Kecamatan Gerokgak	11
9	Kecamatan Sukasada	10
10	Kecamatan Buleleng	11
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	16
12	Dinas Sosial	12

13	Badan Lingkungan Hidup	14
14	Dinas Komunikasi dan Informasi	9
15	Dinas Pendidikan	15
16	Dinas Kesehatan	20
17	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	16
18	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	9
19	Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian	18
20	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	8
22	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	14
23	Dinas Perikanan dan Kelautan	14
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	12
25	Satuan polisi Pamong Praja	8
26	Sekretariat DPRD	10
27	Badan Kepegawaian Daerah	9
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9
29	Rumah Sakit Umum Daerah	3
30	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	6
31	Dinas Ketenagakerja dan Transmigrasi	8
32	Dinas Pertanian dan Peternakan	14
33	Dinas PU	19
34	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	10
35	Dinas Perhubungan	9
36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9
37	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah	10
38	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	11
39	Dinas Pendapatan	7
40	Inspektorat	7
	JUMLAH	436

Sumber data : Bappeda Kab. Buleleng

Dalam pelaksanaan Urusan Perencanaan Pembangunan, Bappeda Kabupaten Buleleng tahun 2016 didukung dengan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng dengan rincian ; Anggaran

belanja daerah yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp.4.018.869.597 dan terealisasi Rp. 3.959.165.569 atau 98,51 persen dan belanja langsung sebesar Rp.11.313.034.113,75 dan realisasi anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp. 10.934.105.258 atau mencapai 96,65 persen, yang meliputi : Belanja Pegawai dengan anggaran Rp.2.528.315.000 dan terealisasi Rp.2.445.630.000, atau 96,73 persen, Belanja Barang dan jasa dengan anggaran Rp.8.586.659.113,75 dan terealisasi Rp.8.294.735.258 atau mencapai 95,60 persen, Belanja Modal dengan anggaran Rp.198.060.000 dan terealisasi Rp.193.740.000 atau 97,82 persen. Hasil – hasil pelaksanaan kegiatan pokok yang dilaksanakan Bappeda Kabupaten Buleleng pada Tahun 2016 meliputi ;

- Terwujudnya Buku Profil Daerah Kabupaten Buleleng.
- Terwujudnya inovasi-inovasi baru penelitian dan pengembangan Iptek dan Pengembangan Iptek di Kabupaten Buleleng.
- Terbitnya Majalah Dimensi Perencanaan Pembangunan di Kabupaten.
- Tersedianya dokumen RPIJM bidang Cipta Karya Tahun 2017-2021.
- Tersedianya dokumen identifikasi kebutuhan infrastruktur Kabupaten Buleleng.
- Tersedianya dokumen sinkronisasi perencanaan penanganan sanitasi.
- Tersedianya dokumen SS.
- Terselenggaranya sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
- Tersedianya dokumen perencanaan Bappeda yang terdiri dari Pedoman forum SKPD 2016, Pedoman Musrenbang Kabupaten 2016, Pedoman Musrenbang Desa 2016, Pedoman Musrenbang Kecamatan 2016.
- Rancangan Awal RKPD.
- Terwujudnya hasil-hasil musrenbang RKPD.
- Terwujudnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2015.
- Laporan Rekap PKK BL (125 Buku).
- Laporan Realisasi Tugas Pembantuan (25 Buku).
- Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) akhir tahun 2015 (20 buku).
- Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) triwulan 2015 (30 buku).
- Kualitas dan Kuatitas Dokumen KUA dan PPAS yang Baik.
- Tersedianya Pedoman Perlindungan dan Pengembangan Petani di Kabupaten Buleleng, terwujudnya koordinasi perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat.

- Terarahnya pengembangan kawasan ekonomi khusus di kabupaten buleleng, terwujudnya koordinasi bidang penanaman modal.
- Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan koperasi, perdagangan, perindustrian dan pengembangan dunia usaha.
- Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan pertanian dan perikanan kabupaten buleleng.
- Terarahnya sasaran pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang Kesos pada 9 bidang urusan / 7 SKPD.
- Terarahnya sasaran pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan mental dan pemerintah pada 7 urusan pemerintahan / 7 SKPD.
- Terarahnya sasaran pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan pada 9 bidang urusan / 21 SKPD.
- Tersedianya laporan hasil koordinasi bidang prasarana wilayah sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- Tersedianya dokumen kajian daya tampung dan daya dukung lingkungan.
- Tersedianya dokumen studi awal kelayakan sistem pengelolaan limbah skala kawasan.
- Tersedianya review dokumen rencana penanganan pemukiman kumuh perkotaan.
- Tersedianya persetujuan substansi materi teknis RDTR dan peraturan zonasi kawasan perkotaan Singaraja.
- Tersedianya persetujuan substansi materi teknis RDTR dan peraturan zonasi kawasan perkotaan Seririt.
- Tersedianya persetujuan substansi materi teknis RDTR dan peraturan zonasi kawasan perkotaan Banjar.
- Terkoordinasikannya pelaksanaan penataan ruang.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Buleleng selaku pelaksana Urusan Perencanaan Pembangunan didukung oleh personil sejumlah 112 orang dengan rincian sebagaimana tersaji pada tabel berikut ;

Tabel 62

Kondisi Kepegawaian Bappeda Kabupaten Buleleng

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Pegawai	
	PNS	48 orang
	Pegawai Kontrak	64 orang
2.	Pangkat dan Golongan	
	Pembina Utama Muda (IV/c)	1

	Pembina Tk.I (IV/b)	1
	Pembina (IV/a)	5
	Penata Tk. I (III/d)	4
	Penata (III/c)	6
	Penata Muda Tk.I (III/b)	13
	Penata Muda (III/a)	2
	Pengatur Tk.I (II/d)	1
	Pengatur (II/c)	6
	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	7
	Pengatur Muda (II/a)	2
3.	Tingkat Pendidikan	
	S2	8
	SI/D4	20
	D3	1
	SMA/SMK/MTs	18
	SMP/MI	1
4.	Jumlah Pejabat	
	Pejabat Setruktural :	
	Eselon IIb	1
	Eselon IIIa	1
	Eselon IIIb	4
	Eselon Iva	11
	Pejabat Fungsional	
	1. Nama Jabatan Fungsional : P2BJ dan Umum	31

Sumber : Bappeda Kabupaten Buleleng.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan terdapat beberapa permasalahan – permasalahan yang meliputi ;

1. Belum Optimalnya Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Belum Optimalnya Pengendalian dan Penyelarasan antara Perencanaan dengan Penganggaran.
3. Belum Optimalnya Pengendalian dan Penyelarasan Penjabaran RPJPD ke RPJMD dan RPJMD ke RKPD.
4. Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kabupaten - Provinsi masih perlu ditingkatka.

Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi :

1. Membangun Sistem Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah/E-planing.
2. Melakukan Pengendalian dan Evaluasi antara Perencanaan dengan Penganggaran.

3. Melakukan Evaluasi dan Review kembali terhadap Dokumen RPJPD, RPJMD dan Renstra.
4. Melakukan koordinasi dengan lebih intensif serta melakukan sinkronisasi perencanaan kabupaten - provinsi sebagai bahan Evaluasi dan Review perencanaan kabupaten sehingga selaras dengan dokumen perencanaan kabupaten - provinsi.

7. URUSAN PERUMAHAN.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang penataan ruang pada Tahun Anggaran 2016 meliputi 1 program dan 1 kegiatan, yaitu Program Pengembangan Perumahan dengan kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan masyarakat kurang mampu yang dibiayai dengan anggaran sebesar Rp. 99.439.261 dan terealisasi sebesar 89.510.000 atau 90,01 persen. Hasilnya adalah terlaksananya Fasilitas dan Stimulasi Pengembangan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu.

Bidang Perumahan Rakyat memiliki 2 (dua) Jenis pelayanan dasar dengan 3 (tiga) jumlah indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22?PERMEN/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk dapat melaksanakan target Pencapaian dan Penerapan SPM Bidang ini dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawab yaitu Dinas Pekerjaan Umum. Adapun kondisi Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyatsampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 63
Kondisi Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM		Hasil Capaian (%)		
				2014	2015	2016
I.	Rumah Layak Huni dan terjangkau	1.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	83.97	90.97	90.97
		2.	Cakupan Layanan rumah layak huni yang terjangkau	70.00	70.00	70.00

II.	Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perkotaan	3.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	75.00	85.00	85.00

Sumber data Dinas PU Kab. Buleleng,

Kondisi urusan perumahan di Kabupaten Buleleng pada tahun 2012 fasilitas umum, fasilitas sosial, serta fasilitas ekonomi dan prasarana lingkungan permukiman lainnya baik di perkotaan maupun di perdesaan tetap ditingkatkan dan semakin diperluas sefta disempurnakan pengelolaannya sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Kawasan peruntukan permukiman di kabupaten Buleleng mencakup mencakup luasan sekitar 7.873,49 Ha atau 5,76% dari luas wilayah kabupaten meliputi kawasan permukiman perkotaan yakni kawasan permukiman di kawasan perkotaan fungsi PKW di perkotaan Singaraja, kawasan permukiman di kawasan perkotaan fungsi PKL di perkotaan Seririt , Kawasan permukiman di kawasan perkotaan yang berfungsi PKK meliputi kawasan perkotaan Gerokgak, Celukan Bawang, Busungbiu, Banjar, Kalibukbuk, Pancasari, Kubutambahan, Sangsit dan Tejakula dan kawasan permukiman perdesaan yang merupakan bagian dari kawasan perdesaan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan penghidupan beserta pusat-pusat pelayanan kawasan perdesaan sesuai fungsi kawasan baik yang berfungsi PPL, kawasan agropolitan maupun kawasan perdesaan murni.

Tahun 2013 Pencapaian kinerja pelaksanaan urusan perumahan ditunjukkan melalui indikator rumah tangga pengguna air bersih mencapai 52,50%, yang merupakan hasil pembagian antara jumlah rumah tangga pengguna air bersih, 131.480 dengan jumlah seluruh rumah tangga di Kabupaten Buleleng pada tahun 2013, 250.416. Lingkungan pemukiman kumuh sampai saat ini belum ada data. Rumah layak huni mencapai 90,40%, sebagai perbandingan jumlah rumah layak huni yang mencapai 142.089 berbanding dengan jumlah rumah yang ada di Kabupaten Buleleng pada tahun 2013 yang berjumlah 157.159 Rumah.

Tahun 2014 Kebanyakan penduduk (39,56%) menempati rumah tempat tinggal dengan luas lantai antara 50-99 M2. Walaupun masih terdapat rumah tangga yang memiliki rumah dengan luas lantai kurang dari 20 M2, namun hanya sebagain kecil (7,67%).

Atap rumah penduduk didominasi oleh bahan dengan kualitas baik yaitu genteng/seng/beton (99,42 %), dan hanya 0,85 persen saja yang memiliki atap kualitas rendah (daun dan lainnya). Hal itu mencerminkan penduduk Kabupaten Buleleng pemenuhan kebutuhan papannya relatif cukup baik.

Apabila dilihat dari jenis lantai terluas yang ditempati tercatat hampir sebagian besar (95,29 %) rumah penduduk menggunakan lantai bukan tanah, walaupun sementara masih ada yang menggunakan lantai tanah sebesar 4,71 persen. Selain atap dan lantai rumah, jenis dinding rumah juga dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk. Dari 176.474 rumah tangga di Kabupaten Buleleng Tahun 2013, 93,77 persen diantaranya telah menggunakan dinding tembok sebagai dinding rumah, sementara 6,23 persen diataranya masih menggunakan kayu/bambu sebagai dinding rumah.

Selanjutnya pemenuhan akan listrik dan air, rumah tangga di Kabupaten Buleleng tercatat 99,05 persen telah menggunakan listrik sebagai penerangan, namun masih ditemukan 0,95 persen rumah tangga yang menggunakan pelita/lampu sentir, petromak dan lainnya. Penggunaan air bersih seperti air ledeng dan air kemasan tercatat 37,49 persen sementara 8,77 persen masih menggunakan air yang berasal dari mata air tak terlindung, sumur tak terlindung dan sumber air lainnya.

Untuk rumah tangga bersanitasi, sebagian besar rumah tangga (60,04%) jarak sumber air minumnya yang dari pompa, mata air dan sumur lebih dari 10 Meter dari tempat penampungan kotoran/tinja, namun masih ada ditemukan sekitar 10,27 persen dari 176.474 rumah tangga pada Tahun 2013, jarak sumber airnya ke penampungan kotoran/tinja, kurang dari 10 Meter. Sementara untuk fasilitas pembuangan air besar, 86,46 persen rumah tangga telah menggunakan jamban, sementara 13, 54 persen tidak menggunakan jamban. Untuk pembuangan akhir mencegah terkontaminasinya sumber air oleh resapan pembuangan kotoran, 81,14

persen rumah tangga telah menggunakan tangki sebagai tempat pembuangan akhir tinja, menggunakan kebun/pantai sebesar 7,52 persen, langsung ke sungai /laut/danau, 6,89 persen, lobang tanah (3,57%), dan sebesar 0,88 persen ke kolam/sawah.

Memperhatikan penggunaan bahan bakar untuk kebutuhan rumah tangga, sebagian besar masyarakat telah menggunakan gas/elpiji (52,79%), kayu bakar (43,20%) dan minyak tanah (1,02%). Penggunaan bahan bakar listrik untuk memasak di Kabupaten Buleleng baru sekitar 0,30 persen, sementara sisanya 0,57 persen sisanya menggunakan bahan bakar lainnya seperti arang, briket.

Tahun 2014 terkait pembangunan urusan perumahan, telah diterbitkan 830 ijin mendirikan bangunan (IMB) yang tersebar di 9 (Sembilan) kecamatan. IMB yang diterbitkan paling banyak di Kecamatan Buleleng sejumlah 480 ijin, Kecamatan Sukasada, 138 ijin, Kecamatan Seririt 81 ijin, selanjutnya berturut – turut, Kecamatan Gerokgak 54 ijin, Kecamatan Sawan (32 ijin), Banjar (31 ijin), Kubutambahan dan Tejakula masing – masing 6 ijin dan Kecamatan Busungbiu 2 ijin.

Di dalam upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya di Kabupaten Buleleng, salah satu syarat yang harus pula dipenuhi adalah tersedianya fasilitas akan kebutuhan sarana air bersih disamping faktor pendukung lainnya. Untuk memenuhi keperluan penyediaan sarana air minum bagi masyarakat di Kabupaten Buleleng, khususnya masyarakat diperkotaan telah terlayani dengan menggunakan fasilitas dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng. Sedangkan kebutuhan air minum untuk masyarakat dipedesaan telah pula diupayakan dengan fasilitas program pembangunan sarana air bersih pedesaan tersebar diseluruh Desa yang ada di Kabupaten Buleleng. Untuk pelayanan sarana air bersih bagi masyarakat perkotaan guna kebutuhan minum/masak, berdasarkan data tahun 2013 jumlah sambungan rumah 40.091, Kran umum sebanyak 196 yang telah terpasang oleh PDAM Kabupaten Buleleng. Jumlah produksi mencapai 13.331.617 m3, dan air yang didistribusikan dan dapat dipertanggung jawabkan sebesar

10.675.438 m3, dan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebanyak 2.656.179 m3 atau tingkat kebocoran mencapai 19,92 persen.

Urusan perumahan Tahun 2014 di Kabupaten Buleleng dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buleleng dan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1) Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2014, dalam rangka pembangunan bidang perumahan adalah Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial dengan kegiatan Fasiltasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam dan kegiatan Fasiltasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Sosial pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng Program dan kegiatan ini dibiayai melalui anggaran yang dialokasikan pada APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2014, sebesar Rp.87.776.000 dan terealisasi sebesar Rp. 72.136.350, (82,19), dengan hasil yang dicapai adalah terwujudnya fasilitas dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam di 4 lokasi dan terpenuhinya bahan bangunan (100%).
2) Selanjutnya Program penyelenggaraan peningkatan pelayanan perijinan terpadu, melalui kegiatan pengendalian dan penerbitan perijinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng. Dengan alokasi anggaran untuk kegiatan sebesar Rp. 88.760.000 dan terealisasi Rp. 88.754.900 atau 99,99 persen, dengan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan adalah adanya pengendalian dan penerbitan ijin selama 12 bulan sebanyak 6.743 ijin.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang penataan ruang pada Tahun Anggaran 2015 meliputi 1 program dan 1 kegiatan, yaitu Program Pengembangan Perumahan dengan Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan masyarakat kurang mampu.

Pada Tahun 2016 jumlah rumah yang ada di 9 kecamatan di Kabupaten Buleleng 171.218 rumah yang terinci sebagai berikut ; **di Kecamatan Banjar** terdapat 2.512 unit rumah mewah, 14.484 unit rumah sederhana, dan 4025 unit rumah tidak layak huni. Dari total rumah yang ada 745 unit diantaranya merupakan rumah tradisional dan 160 unit merupakan rumah rawan bencana. Di **Kecamatan Buleleng** terdapat 27.073 unit rumah yang terdiri atas 6.207 unit rumah mewah, 25.652 unit rumah sederhana, dan 3.101 unit rumah tidak layak huni. Dari total rumah yang ada 32 unit diantaranya merupakan rumah tradisional dan 1.070 unit merupakan rumah rawan bencana. Di **Kecamatan Busungbiu** terdapat 11.505 unit rumah yang terdiri atas 1.232 unit rumah mewah, 8.846 unit rumah sederhana, dan 1.427 unit rumah tidak layak huni. Dari total rumah yang ada 1 unit diantaranya merupakan rumah tradisional dan 113 unit merupakan rumah rawan bencana. Di **Kecamatan Gerokgak** terdapat 22.601 unit rumah yang terdiri atas 3.198 unit rumah mewah, 13.668 unit rumah sederhana, dan 5.735 unit rumah tidak layak huni. Dari total rumah yang ada 9 unit diantaranya merupakan rumah tradisional dan 1.506 unit merupakan rumah rawan bencana. Di **Kecamatan Kubutambahan** terdapat 13.525 unit rumah yang terdiri atas 485 unit rumah mewah, 8.561 unit rumah sederhana, dan 4.479 unit rumah tidak layak huni. Dari total rumah yang ada 8 unit diantaranya merupakan rumah tradisional dan 648 unit merupakan rumah rawan bencana. Di **Kecamatan Tejakula** terdapat 15.229 unit rumah yang terdiri atas 743 unit rumah mewah, 11.334 unit rumah sederhana, dan 2.730 unit rumah tidak layak huni. Dari total rumah yang ada 28 unit diantaranya merupakan rumah tradisional dan 452 unit merupakan rumah rawan bencana. Di **Kecamatan Seririt** terdapat 20.395 unit rumah yang terdiri atas 3.093 unit rumah mewah, 14.787 unit rumah sederhana, dan 2.515 unit rumah tidak layak huni. Dari total rumah yang ada 58 unit diantaranya merupakan rumah tradisional dan 449 unit merupakan rumah rawan bencana. Di **Kecamatan Sukasada** terdapat 22.668 unit rumah yang terdiri atas 2.306 unit rumah mewah, 13.570 unit rumah sederhana, dan 2.003 unit rumah tidak layak huni. Dari total rumah yang ada 132 unit diantaranya merupakan rumah tradisional dan 408 unit merupakan rumah rawan bencana. Di **Kecamatan sawan** terdapat 17.500 unit rumah yang terdiri atas 2.306 unit rumah mewah, 13.570 unit rumah sederhana, dan 1.712 unit rumah tidak layak huni. Dari total rumah yang ada 28 unit diantaranya merupakan rumah tradisional dan 452 unit merupakan rumah rawan bencana.

Luas lingkungan perumahan dan pemukiman kumuh yang ada di masing – masing kecamatan di Kabupaten Buleleng pada Tahun 2016 meliputi wilayah seluas, 114,70 Ha di Kecamatan Gerokgak, 89,58 Ha di Kecamatan Kubutambahan, 34,24 ha di Kecamatan Sawan, 47,40 Ha di Kecamatan Tejakula, 50,30 Ha di Kecamatan seririt, 40,06 Ha di Kecamatan Sukasada, 28,54 Ha di Kecamatan Busungbiu, 62,02 ha di Kecamatan Buleleng dan 80,50 Ha berada di Kecamatan Banjar. Lokasi kawasan pemukiman kumuh di Kabupaten Buleleng terbagi atas kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Untuk kawasan perkotaan meliputi ; **kawasan Seririt – Pengastulan** seluas 54,77 Ha, **Kawasan Kota Singaraja** ; Kelurahan kampong Baru, Kelurahan kampong Bugis, Kelurahan kampong Anyar, Kelurahan Kampung kajanan, Kelurahan Kampong Singaraja dan Kelurahan Banyuning, dengan total seluas 44,74 Ha. **Kawasan Penarukan** seluas 15,60 Ha, **Kawasan sawan** seluas 15,50 Ha, **kawasan Gerokgak – Sanggalangit** seluas 16,18 Ha. Sedangkan kawasan kumuh di Perdesaan meliputi ; kawasan Penglatan seluas 1 Ha, kawasan banjar Tegeha ; 2,6 Ha, kawasan Tigawasa ; 4,8 Ha, Kawasan Pejarakan ; 4,6 Ha dan kawasan Sumberkima seluas ; 4,8 Ha.

Pembangunan di bidang perumahan dilaksanakan oleh Dinas PU Kabupaten Buleleng dan didukung oleh personil yang berjumlah 11 orang yang terdiri atas 6 Orang PNS dan 5 orang Pegawai Kontrak. PNS yang ada dengan pangkat dan golongan berikut ; Pembina Tk.I (IV/b); 1 orang, Pembina (IV/a) ; 1 orang, Penata Tk. I (III/d) ; 1 orang, Penata Muda (III/a) ; 1 orang, Pengatur (II/c) ; 1 orang dan Pengatur Muda Tk.I (II/b) ; 1 orang. Dengan tingkat pendidikan ; S2 ; 1 orang, S1 ; 3 orang dan SMA/SMK ; 2 orang. Terdapat 2 Pejabat structural yang terdiri atas pejabat eselon IIIb ; 1 orang dan pejabat eselon Iva ; 1 orang.

8. URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA.

Pengembangan kepeloporan pemuda dalam pembangunan bangsa dan Negara harus diutamakan, agar pemuda memiliki jiwa perjuangan, keperintisan, kepekaan terhadap lingkungan, disiplin dan sikap mandiri serta memiliki sikap yang bertanggungjawab, inovatif, kraetif, ulet, tangguh, jujur serta berani dan rela berkorban yang dilandasi semangat cinta tanah air. Untuk itu perlu diciptakan yang lebih sehat, dinamis dan

demokratis sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan sehingga terwujud iklim yang mendorong pemuda dapat lebih berperan dalam pembangunan seperti KNPI, OSIS, Pramuka, karang taruna dan sekaa Teruna Teruni terus dikembangkan dan ditingkatkan agar lebih mandiri, berkualitas dan memiliki semangat kebangsaan dengan didukung oleh prasarana dan sarana memadai.

Urusan pemuda dan olahraga terdiri dari 4 program yaitu Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda, Program peningkatan peran serta kepemudaan, Program Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga, dan Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

Capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemuda dan Olah Raga ditunjukkan melalui keberhasilan pencapaian prestasi bidang olah raga pada Tahun 2012-2016 yang meliputi :

1. Kadek Agus Satria Winaya Putra Cabang Olahraga Tenis Lapangan, mendapatkan Medali Emas Tunggal POPNAS dari SMK N 3 Singaraja,
2. Made Sisca Pratiwi Cabang Olahraga Tenis Meja Mendapatkan Medali Emas Tunggal OOSN Dari SD 4 Banyuasri
3. Ketut Teguh Bimantara Cabang Olahraga Catur Mendapatkan Medali Emas Tunggal OOSN dari SMK N 3 Singaraja
4. Kadek Berlian Adi Pranatha cabang olahraga Karate Mendapatkan Medali Perak Tunggal OOSN dari SMP N 1 singaraja
5. Komang Sugita cabang olahraga Tenis Meja Mendapatkan Medali Perak Tunggal OOSN dari SMA N 4 Singaraja
6. I Gede Budiarta, I Putu Jati Artawan dan I Gusti Andy Suprianto cabang olahraga Pencak Silat mendapatkan medali perak Beregu POPNAS dari SMAN 1 gerokgak
7. Putu Ary Suryawan cabang olahraga Tenis Lapangan Mendapatkan medali Perunggu Tunggal OOSN dari SDN 4 Banyuasri
8. Ni Putu Armini cabang olahraga Tenis lapangan Mendapatkan Medali Perunggu Tunggal OOSN dari SMKN 3 Singaraja
9. I Putu Niko Supriadi cabang Olahraga Pencak Silat mendapatkan Medali Perunggu Tunggal POPNAS dari SMAN 1 gerokgak
10. Desak Anggun Amorrolin Monica Cabang Olahraga Tenis Lapangan Mendapatkan Medali Perunggu Tungal OOSN Dari SDN 1 Kampung Bugis

11. Ketut Ria Darmiyanti, Luh Ita Yani dan Luh sara Sendi cabang Olahraga Sepak Takraw Mendapatkan Medali Perunggu Beregu POPNAS dari SMAN 1 Kubutambahan
12. Kadek Ratnadi cabang olahraga Sepak Takraw mendapatkan Medali Perunggu Beregu POPNAS dari SMA N 4 Kubutambahan.
13. Kadek Agus Satria Winaya Putra Cabang Olahraga Tenis Lapangan Mendapatkan Medali Emas Tunggal POPNAS dari SMK N 3 singaraja.
14. Made Sisca Pratiwi Cabang Olahraga Tenis Meja Mendapatkan Medali Emas Tunggal OOSN Dari SD 4 Banyuasri.
15. Ketut Teguh Bimantara Cabang Olahraga Catur Mendapatkan Medali Emas Tunggal OOSN dari SMK N 3 Singaraja.
16. Kadek Berlian Adi Pranatha cabang olahraga Karate Mendapatkan Medali Perak Tunggal OOSN dari SMP N 1 Singaraja.
17. Komang Sugita cabang olahraga Tenis Meja Mendapatkan Medali Perak Tunggal OOSN dari SMA N 4 Singaraja.
18. I Gede Budiarta, I Putu Jati Artawan dan I Gusti Andy Suprianto cabang olahraga Pencak Silat mendapatkan medali perak Beregu POPNAS dari SMAN 1 Gerokgak.
19. Putu Ary Suryawan cabang olahraga Tenis Lapangan Mendapatkan medali Perunggu Tunggal OOSN dari SDN 4 Banyuasri.
20. Ni Putu Armini cabang olahraga Tenis lapangan Mendapatkan Medali Perunggu Tunggal OOSN dari SMKN 3 Singaraja.
21. I Putu Niko Supriadi cabang Olahraga Pencak Silat mendapatkan Medali Perunggu Tunggal POPNAS dari SMAN 1 Gerokgak.
22. Desak Anggun Amorrolin Monica Cabang Olahraga Tenis Lapangan Mendapatkan Medali Perunggu Tungal OOSN Dari SDN 1 Kampung Bugis.
23. Ketut Ria Darmiyanti, Luh Ita Yani dan Luh sara Sendi cabang Olahraga Sepak Takraw Mendapatkan Medali Perunggu Beregu POPNAS dari SMAN 1 Kubutambahan.
24. Kadek Ratnadi cabang olahraga Sepak Takraw mendapatkan Medali Perunggu Beregu POPNAS dari SMA N 4 Kubutambahan.
25. Kadek Agus Satria Winaya Putra Cabang Olahraga Tenis Lapangan Mendapatkan Medali Emas Tunggal POPNAS dari SMK N 3 singaraja,
26. Made Sisca Pratiwi Cabang Olahraga Tenis Meja Mendapatkan Medali Emas Tunggal OOSN Dari SD 4 Banyuasri

27. Ketut Teguh Bimantara Cabang Olahraga Catur Mendapatkan Medali Emas Tunggal OOSN dari SMK N 3 Singaraja
28. Kadek Berlian Adi Pranatha cabang olahraga Karate Mendapatkan Medali Perak Tunggal OOSN dari SMP N 1 singaraja
29. Komang Sugita cabang olahraga Tenis Meja Mendapatkan Medali Perak Tunggal OOSN dari SMA N 4 Singaraja
30. I Gede Budiarta, I Putu Jati Artawan dan I Gusti Andy Suprianto cabang olahraga Pencak Silat mendapatkan medali perak Beregu POPNAS dari SMAN 1 gerokgak
31. Putu Ary Suryawan cabang olahraga Tenis Lapangan Mendapatkan medali Perunggu Tunggal OOSN dari SDN 4 Banyuasri
32. Ni Putu Armini cabang olahraga Tenis lapangan Mendapatkan Medali Perunggu Tunggal OOSN dari SMKN 3 Singaraja
33. I Putu Niko Supriadi cabang Olahraga Pencak Silat mendapatkan Medali Perunggu Tunggal POPNAS dari SMAN 1 gerokgak
34. Desak Anggun Amorrolin Monica Cabang Olahraga Tenis Lapangan Mendapatkan Medali Perunggu Tungal OOSN Dari SDN 1 Kampung Bugis
35. Ketut Ria Darmiyanti, Luh Ita Yani dan Luh sara Sendi cabang Olahraga Sepak Takraw Mendapatkan Medali Perunggu Beregu POPNAS dari SMAN 1 Kubutambahan
36. Kadek Ratnadi cabang olahraga Sepak Takraw mendapatkan Medali Perunggu Beregu POPNAS dari SMA N 4 Kubutambahan.
37. Porsenijar Provinsi Bali Tahun 2016, dengan perolehan medali ; 46 emas, 52 perak dan 70 perunggu,
38. OOSN Provinsi Bali Tk. SD dengan perolehan medali ; 5 emas, 3 perunggu.
39. OOSN Provinsi Bali Tk. SMP dengan perolehan medali ; 3 emas, 2 perak, 5 perunggu.
40. OOSN Provinsi Bali Tk. SMA dengan perolehan medali ; 2 emas,2 perak, 7 perunggu.
41. Medali Emas dalam kejuaraan catur internasional kategori Rapid Chess Team atas nama Putra Luhur Apngal Kusuma.
42. Medali Emas Kejuaraan Karate Internasional kategori Kata Masc U-11 dan kategori Komite Male U-12 – 30, atas nama Komang Sastrawan.

Fasilitas berupa sarana prasarana bagi aktifitas pemuda/remaja khususnya dalam bidang olah raga saat ini di Kabupaten Buleleng baru

tersedia 2 buah yakni Stadion Mayor Metra dan Gelanggang Olah Raga Buana Patra Singaraja. Sedangkan untuk jumlah lapangan olah raga secara keseluruhan yang ada di Kabupaten Buleleng, baik lapangan sepak bola, lapangan volley, lapangan basket, lapangan bulutangkis dan kolam renang berjumlah 411 lapangan, dengan asumsi untuk lapangan sepak bola berjumlah 20. Untuk lapangan bulutangkis berjumlah 90 lapangan, untuk lapangan volley jumlahnya mencapai 160 lapangan, karena hampir semua desa dan kelurahan di Kabupaten Buleleng mempunyai lapangan volley.Untuk lapangan basket berjumlah 140 lapangan. Sedangkan untuk kolam renang jumlahnya baru 1 yakni Kolam renang Tirta Mumbul.

Tabel 64

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pemuda dan olahraga

Tahun	Anggaran	Realisasi	Presentase (%)
2012	1,158,542,500	1,149,568,940	99,23
2013	3.456.674.500	3.164.959.946	91,56
2014	4.413.919.600	4.231.324.900	95,86
2015	21.790.333.900	Rp21.030.284.725	96,51
2016	5.657.792.925	4.917.446.909	86,91

Urusan Pemuda dan Olah Raga dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng. Dengan kondisi kepegawaian pada Tahun 2016 meliputi ; Jumlah pegawai 16 orang yang terdiri atas PNS sebanyak 6 orang dan Pegawai Kontrak sebanyak 10 orang. PNS yang ada dengan pangkat / Golongan ; Pembina (IV/a) ; 1 orang, Penata (III/c) ; 2 orang, Penata Muda Tk. I ; 2 orang dan Pengatur Muda Tk. I ; 1 orang. Dengan kualifikasi pendidikan : S1/D4 ; 4 orang dan SMA/SMK ; 2 orang. Pejabat Struktural : eselon III/b ; 1 pejabat, eselon IV/a ; 2 pejabat.

Permasalahan yang ditemui dalam proses penyelengaraan urusan pemuda dan olahraga antara lain :

1) Kurangnya pembinaan generasi muda utamanya pemuda pelajar dalam peningkatan nilai nilai kepahlawanan;
2) Disiplin pemuda pelajar masih rendah;

3) Belum meratanya penyediaan sarana prasarana olah raga di setiap kecamatan;
4) Belum meratanya usaha pembinaan atlit terutama pelajar di setiap kecamatan.

Solusi yang telah ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah:

1) Dilaksanakan kegiatan napak tilas, Gerak jalan 45 km, 8 km dan 2 km;
2) Dilakukan Pelatihan Pasukan Pengibaran Bendera;
3) Bantuan sarana dan prasarana menurut skala prestasi dan potensi atlet sebagai embrio atlit berprestasi;
4) Melakukan koordinasi dengan KONI sebagai lembaga yang membantu Dinas Pendidikan untuk melakukan pembinaan Pengcab dengan mencari atlet berbobot di setiap kecamatan untuk dilakukan pembinaan.

9. URUSAN PENANAMAN MODAL.

Investasi merupakan salah satu faktor penting keberhasilan Pembangunan Ekonomi. Keberadaannya merupakan modal dasar bagi perwujudan perubahan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan peningkatan penawaran melalui penguatan stok kapital yang pada gilirannya akan meningkatkan pula kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output atau melakukan kegiatan produksi. Kegiatan produksi tersebut akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan proses tersebut akan meningkatkan kwalitas pembangunan ekonomi karena diversifikasi kegiatan. Peningkatan nilai tambah perekonomian di daerah tersebut akan memberikan dampak positif pada besaran balas jasa terhadap faktor faktor produksi dalam bentuk Sewa tanah, upah, bunga keuntungan aktifitas Penanaman Modal yang akan terwujud multiplier effect terhadap kegiatan ekonomi dan pendapatan penduduk di kawasan sekitar pada akhirnya akan pendapatan Daerah secara keseluruhan. Disamping itu optimalisasi pelayanan perijinan yang cepat dan mudah, akan memacu proses pertumbuhan usaha di sector formal.

Jumlah investasi di Kabupaten Buleleng tahun 2012, terutama yang berskala nasional, baik berupa Penanaman Modal Dalam Negeri maupun

Penanaman Modal Asing tampak berfluktuasi, dengan kisaran investasi sebesar Rp. 60,441 Milyar lebih sampai dengan Rp. 4,199 Triliun lebih. Investasi dilakukan pada beragai sektor, seperti perikanan (budidaya kerapu dan kerang mutiara), energi/kelistrikan (Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Desa Celukan Bawang), perdagangan (retail/toko modern dan swalayan), properti (pengembangan rumah hunian), dan pariwisata (Hotel, Restoran dan Hiburan lainnya). Total investasi selama kurun waktu 2007-2010 adalah sebesar Rp. 12,028 Triliun lebih. Investari di Kabupaten Buleleng diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan upaya pemerintah untuk menerbitkan buku profil investasi, penciptakan iklim investasi yang semakin kondusif, dan kondisi infrastruktur yang semakin mantap. Perkembangan Investasi Kabupaten Buleleng Tahun 2012 dengan total Rp. 12.028.395.650.000,00 yang bersumber dari investasi dari pihak Pemerintah dengan nilai Rp. 2.945.166.100.000,00,-, phak swasta Rp. 8.464.003.610.000,00,-, pihak masyarakat Rp. 619.225.949.000,00,-.

Pelaksanaan urusan penanaman modal tahun 2013 ditunjukkan melalui indicator kenaikan / penurunan nilai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun 2013. Nilai Realisasi PMDN tahun 2013 Rp.65.505.000.000 Dikurang niali realisasi PMDN Tahun 2012 Rp.144.316.539.250, dibagi nilai realisasi PMDN Tahun 2012 dikali seratus sehingga hasilnya -56%. Jadi terjadi penurunan nilai realisasi PMDN sebesar 56%. Dalam Tahun anggaran 2013 ada beberapa investor yang sudah menanamkan modalnya sebanyak 37 investor dengan beberapa katagori (Perumahan sebanyak 9 Investor, Pariwisata sebanyak 4 Investor, Perdagangan 6 Investor, Perikanan 2 Investor, Peternakan 1 Investor, Perhubungan 3 Investor , Perindustrian 2 Investor dan Jasa lainnya 10 Iinvestor) dengan nilai investasi Rp. 57.705.000.000,- dengan jumlah Tenaga kerja yang terserap sebanyak 390 Orang.

Adapun jenis perijinan yang dikeluarkan dalam kurun Tahun 2013 dan 2014 meliputi perijinan Perumahan, Hotel, Pondok Wisata, Perdagangan, Perikanan, Peternakan, Tower, Pertambangan, dan Jasa Lainnya. Berdasrkan data nilai investasi dalam negeri pada Tahun 2014 mengalami peningkatan sekitar 207,74% dibandingkan Tahun 2013. Total

Nilai investasi dalam kurun waktu Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 berjumlah sebesar Rp. 244.822.017.250, yang berasal dari 350 bidang usaha. Sedangkan tenaga kerja yang terserap sekitar 3.115 orang. Dari nilai tersebut realisasi investasi terbesar tercapai pada Tahun 2014 yang berjumlah Rp. 247.000.478.000 yang berasal dari 136 bidang usaha dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 1.250 orang. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan nilai realisasi pada Tahun 2013 yang hanya mencapai Rp. 75.505.000.000 yang berasal dari 40 bidang usaha dengan tenaga kerja yang terserap mencapai 435 orang. Total nilai investasi tersebut sebagian besar berasal dari Nilai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri yang pada Tahun 2014 tercapai sebesar Rp. 232.360.478.000, meningkat pesat dibandingkan Tahun 2013 yang terealisasi sebesar Rp. 75.505.000.000.

Sementara itu pendapatan asli daerah pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng pada tahun 2014 terealisasi Rp. 5.110.708.450 atau terealisasi 99,31 persen dari target yang direncanakan sebesar Rp. 5.146.338.000, yang berasal dari hasil pajak daerah yakni pajak reklame yang terdiri atas reklame papan atau billboard sebesar Rp. 853.689.660, reklame kain sebesar Rp. 81.663.050, reklame selebaran Rp. 2.125.000. Serta dari retribusi daerah sebesar Rp. 4.173.260.740 yang berasal dari retribusi ijin gangguan tertentu yang terdiri atas retribusi IMB sebesar Rp. 3.329.205.740, retribusi ijin tempat penjualan minuman beralkohol sebesar Rp. 52.688.000, retribusi ijin gangguan Rp. 541.800.000 , retribusi ijin trayek sebesar Rp. 10.919.000 dan retribusi ijin usaha perikanan sebesar Rp. 58.648.000

Indikator kinerja pelaksanaan urusan penanaman modal tahun 2015 ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 65
Target dan Realisasi Pendapatan Asli daerah
pada BPPT Kab. Buleleng Tahun 2015

Uraian	2015		
	Anggaran	Realisasi	%

Hasil Pajak daerah	903.131.000,00	741.250.155,00	82.07
Retribusi daerah	4.718.100.000,00	8.973.584.770,00	190.19
PAD	5.621.231.000,00	9.714.834.925,00	172.82
Pajak daerah (2014)		937.447.710,00	
Pajak daerah (2013)		444.065.200,00	
Retribusi daerah (2014)		4.173.260.740,00	
Retribusi daerah (2013)		4.695.318.425,00	
PAD (2014)		5.139.383.625,00	
PAD (2013)		5.110.708.450,00	

Sumber data ; BPPT Kab. Buleleng

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan penanaman modal yaitu :

a. **Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu**
   - Kegiatan Verifikasi dan Penelitian Berkas Permohonan Pereijinan Masyarakat
   - Kegiatan Evaluasi Sistem dan Prosedur Pelayanan Perijinan
   - Kegiatan Pengendalian dan Penerbitan Perijinan
   - Kegiatan Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perijinan
   - Kegiatan Pengembangan sistem Informasi Pelayanan Perijinan
   - Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terpaadu
   - Kegiatan Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan
   - Kegiatan Penataan Informasi dan berkas Perijinan
   - Kegiatan Pelayanan Perijinan Retribusi dan Pengelolaan Register

Bidang Penanaman Modal memiliki 7 (tujuh) Jenis pelayanan dasar dengan 10 (sepuluh) jumlah indikator sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk dapat melaksanakan target Pencapaian dan Penerapan SPM Bidang ini dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawab yaitu Badan Perijinan dan Pelayanan Terpadu kabupaten Buleleng. Adapun kondisi Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 66
Kondisi Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal

No	Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan	Indikator SPM		Hasil Capaian (%)		
				2014	2015	2016
I.	Kebijakan penanaman modal	1	Tersedianya informasi peluang usaha sector/bidang unggulan	100	100	100
II.	Kerjasama penanaman modal		Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dlm rangka kerjasama kemintraan			
		2	Antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) tingkat provinsi dengan pengusaha nasional/asing	100	100	100
		3	Antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten/kotadengan pengusaha tingkat provinsi/nasional	100	100	100
III.	Promosi penanaman modal	4	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal propinsi	100	100	100
		5	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten	100	100	100
IV.	Pelayanan penanaman modal		Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penananman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal			
		6	Pendaftaran penanaman modal dalam negeri, izin prinsip penanaman modal dalam negeri, izin usaha penanaman modal dalam	181	104	104

			negeri, Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di lebih dari 1 kabupaten/Kota sesuai kewenangan pemerintah provinsi			
		7	Pendaftaran penanaman modal dalam negeri, izin prinsip penanaman modal dalam negeri, izin usaha penanaman modal dalam negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTKA) yang bekerja di lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan pemaerintah kabupaten/kota	60	25	25
V.	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	8	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	100	100	100
VI.	Pengeloaan data dan sistem informasi penanaman modal	9	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	25	10	10
VII.	Penyebarluasan pendidikan dan pelatihan penanaman modal	10	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	100	100	100

Sumber data: Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng.

Indikator kinerja BPPT Kabupaten Buleleng Tahun 2016 diukur melalui pencapaian pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditargetkan sebesar Rp. 908.150.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 938.106.450,00 atau 103,29 persen. Sedangkan retribusi daerah tercapai 114,87 persen, dari target sebesar Rp. 4.855.600.000,00, terealisasi Rp. 5.578.024.050,00. Jika mengacu kepada pencapaian pada Tahun 2015 maka terjadi penurunan realisasi PAD yang berasal dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi daerah sekitar 32 persen. Walaupun disatu sisi terjadi peningkatan terhadap pendapatan yang berasal dari pajak daerah sebesar 26 persen yang berasal dari realisasi pajak reklame sebesar Rp. 938.106.450 pada Tahun 2016.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PNDM) pada Tahun 2016 terealiasi sebesar Rp. 1.028.190.243.000, terjadi pnurunan dibandingkan realisasi pada Tahun 2015 yang mencapai Rp. 10.042.866.236.716. Sedangkan persetujuan ijininvestasi pada Tahun 2016 mencapai 155 ijin. Capaian ini juga menurun dibandingkan capaian pada Tahun 2015 yang berjumlah Rp. 157 ijin.

Dalam pelaksanaan Urusan Penanaman Modal, BPPT Kabupaten Buleleng didukung dengan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng dengan rincian ; Anggaran belanja daerah yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp.2.528.467.050 dan terealisasi Rp. 2.430.688.005 atau 96,09 persen dan belanja langsung sebesar Rp.1.983.057.124 dan realisasi anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp. 1.965.683.792 atau mencapai 99,12 persen, yang meliputi : Belanja Pegawai dengan anggaran Rp.314.315.000 dan terealisasi Rp.313.529.000, atau 99,75 persen, Belanja Barang dan jasa dengan anggaran Rp.1.644.742.124 dan terealisasi Rp.1.628.455.292 atau mencapai 99,01 persen, Belanja Modal dengan anggaran Rp.24.000.000 dan terealisasi Rp.23.699.500 atau 98,75 persen.

Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Buleleng selaku Perangkat Daerah pelaksana Urusan Penanaman Modal, didukung oleh 98 Pegawai, yang terdiri atas 70 PNS dan 28 Pegawai Kontrak.

Tabel 67
Kondisi Pegawai Pelaksana Urusan Penanaman Modal

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Pegawai	70
	PNS	28

	Pegawai Harian /Kontrak	2/40
2.	Pangkat dan Golongan	
	Pembina Tk.I (IV/b)	2
	Pembina (IV/a)	1
	Penata Tk. I (III/d)	4
	Penata (III/c)	3
	Penata Muda Tk.I (III/b)	6
	Penata Muda (III/a)	2
	Pengatur Tk.I (II/d)	4
	Pengatur (II/c)	2
	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	4
3.	Tingkat Pendidikan	
	S2	2
	SI/D4	13/1 /8 (PNS/harian/kontrak)
	D3	3/2(PNS/Kontrak)
	D2 / D1	1 (kontrak)
	SMA/SMK/MTs	10/1/27 (PNS/Harian/kontrak)
	SMP/MI	2 (Kontrak)
4.	Jumlah Pejabat	
	Pejabat Setruktural :	
	Eselon IIb	1
	Eselon IIIa	1
	Eselon IIIb	4
	Eselon Iva	3

Sumber data : BPPT Kabupaten Buleleng.

Hasil – hasil kegiatan pokok yang dilaksanakan pada Tahun 2016 meliputi :

- Tersedianya Data Valid sebagai bahan Penetapan/ penerbitan ijin.
- Terevaluasinya Kinerja Layanan Perijinan.
- Terlaksannya Pengendalian Penerbitan ijin.
- Tersusunnya Data dan Pelaporan Perijinan.
- Terselenggaranya Pelayanan Perijinan Berbasis IT.
- Meningkatnya Pengetahuan Perundang-undangan Perijinan bagi Calon Pemohon.

- Teridentifikasinya Indeks Kepuasan Masyarakat.
- Tersedianya data historis perijinan.
- Terlaksanya Penataan Register Perijinan dan Penerimaan.

Permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan pelayanan perijinan adalah :

- Jumlah dan kemampuan pegawai yang kurang memadai
- Sarana dan Prasarana kerja kurang memadai.
- Belum tersedianya system informasi yang mantap dalam medukung proses pelayanan perijinan.

Solusi yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan yang ada yaitu :

- Mengoptimalkan jumlah dan kemampuan pegawai yang ada.
- Melengkapi sarana dan prasarana ruang kerja secara bertahap.
- Memaksimalkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan pelayanan.

10. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menempati posisi strategis untuk mempercepat perubahan struktural dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagai wadah kegiatan usaha bersama bagi produsen maupun konsumen, koperasi diharapkan berperan didalam meningkatkan posisi tawar dan efesiensi ekonomi rakyat, sekaligus turut memperbaiki kondisi persaingan usaha dipasar melalui dampak eksternalitas positif yang ditimbulkan. Atas dasar kondisi tersebut maka kebijakan pembangunan perkoperasian dan pengembangan usaha kecil menengah ditunjukkan untuk :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi
2. Peningkatan daya saing koperasi dan usaha mikro kecil menengah
3. Meningkatkan jaringan kerjasama koperasi dan usaha mikro kecil menengah
4. Pemberdayaan koperasi usaha mikro kecil menengah
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia koperasi agar dapat mengelola koperasi secara profesional dan mandiri
6. Meningkatkan citra koperasi melalui peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang Koperasi dan UKM yaitu :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
- Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah/ Dalam Daerah

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

d. Program Perencanaan Anggaran SKPD

- Kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD

e. Program Informasi Pembangunan Daerah

- Kegiatan Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan

f. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

- Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

g. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitip Usaha Kecil Menengah

- Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

h. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

- Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
- Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

i. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

- Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi
- Kegiatan Sosialisasi Prinsip - Prinsip Pemahaman Perkoperasian
- Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
- Kegiatan Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
- Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

j. Program Pengembangan Usaha Koperasi.

- Kegiatan Pembinaan Manajemen Usaha Koperasi.

Tahun 2013 Capaian kinerja pelaksanaan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah ditunjukkan melalui indicator sebagai berikut :

- Jumlah koperasi aktif di Kabupaten Buleleng mencapai 88,74 % yang didapat melalui pembagian jumlah koperasi yang aktif 339 dibagi jumlah seluruh koperasi 382 dikali seratus.
- Jumlah usaha kecil dan menengah aktif 10.214 UKM dibagi seluruh jumlah UKM 10.263 di kali seratus sehingga hasilnya 99,62%

Berdasarkan data Dinas Koperasi, Perdagangan dan Industri Kabupaten Buleleng pada tahun 2013 di kabupaten Buleleng terdapat 382 koperasi yang terdiri atas KUD 13 koperasi, KSU 176, KSP 58, KPN 52, KOPKAR26, KOPTAN 20, KOPPONTREN 3, KOPWAN 8, KOPDIT 2, PRIMKOPAD 6, KOPERASI SEKUNDER 4 DAN Koperasi lainnya 13 koperasi, dengan asset mencapai Rp. 418.656.127.164,00. Modal luar mencapai Rp. 266.098.996.359,00, modal sendiri Rp. 152.557.130.795,00, SHU Rp.

7.713.804.022,00 Dari keseluruhan jumlah koperasi tersebut terdiri atas 66.389 anggota, dimana keanggotaan terbanyak pada koperasi unit desa yang mencapai 27.635 anggota.

Perkembangan Keragaan UKM di Kabupaten Buleleng pada tahun 2013 meliputi : pada bidang perdagangan berjumlah 6.421, industry pertanian 1.725, industry non pertanian 1.342, aneka jasa 765, sehingga total berjumlah 10.253 UKM. UKM aktif mencapai 10.214 sedangkan 39 UKM tidak aktif/beku.

Tahun 2014 jumlah Koperasi dan KUD berjumlah 381 dengan jumlah anggota 67.840 dengan jumlah simpanan mencapai Rp. 61.377.586.501,-. Jumlah UMKM 11. 279 yang terdiri dari UMKM yang bergerak dalam bidang perdagangan berjumlah 7.063; perindustrian pertanian berjumlah 1.897; industry non pertanian berjumlah 1.478 dan aneka jasa 843.

Sedangkan untuk tahun 2015 jumlah Koperasi dan KUD berjumlah 388 dengan jumlah anggota 66.518 orang dengan jumlah simpanan mencapai Rp. 61.377.586.501. Jumlah UMKM tahun 2015 berjumlah 11.813 yang terdiri dari UMKM yang bergerak di bidang perdagangan berjumlah 7.415; bidang perindustrian pertanian 1.991; bidang industry non pertanian berjumlah 1.549 dan aneka jasa berjumlah 858.

Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Koperasi dan UKM dapat diukur dari jumlah Koperasi di Kabupaten Buleleng pada Tahun 2016 yang mencapai 388 dengan keanggotaan yang mencapai 66.518 anggota dengan simpanan anggota mencapai 61.377.586.501, yang terdiri atas Koperasi Unit Desa (KUD) sebanyak 13 dengan anggota sebanyak 27.166 dan simpanan anggota mencapai Rp. 4.712.386.098. Kemudian Koperasi Pegawai Negeri ; 43 unit, dengan anggota 8.873 anggota dengan simpanan 29.547.325.845. Berikutnya KOPKAR sejumlah 22 dengan anggota 2.130 anggota, simpanan Rp. 2.754.342.935. KSU ; 170 unit dengan anggota 11.509 orang serta simpanan anggota yang mencapai Rp. 5.223.145.756. Kemudian Koperasi ABRI ; 1 unit dengan anggota 203 dan simpanan anggotanya mencapai Rp. 5.583.427.445. KOPTAN ; 21 unit dengan anggota 1.848 orang serta simpanannya mencapai Rp. 230.653.714. Koperasi Simpan Pinjam sebanyak 74 unit, 3.540 anggota dan jumlah simpanan anggota yang mencapai Rp. 3.234.725.843. Koperasi

angkutan terdata sebanyak 2 unit dengan anggota 62 orang. Koperasi Wanita sebanyak 9 unit dengan anggota 732 dan simpanannya sejumlah Rp. 329.163.250. Serta Koperasi Lainnya sejumlah 33 Unit dengan anggota mencapai 10.455 orang dan simpanan anggotanya sebesar Rp. 9.722.412.615.

Sedangkan jumlah Usaha Kecil dan Menengah yang ada di Kabupaten Buleleng sampai Tahun 2016 mencapai 12.303 UKM, yang terdiri atas UKM Perdagangan yang mencapai 7.785 unit, UKM Industri Pertanian mencapai 2.050 unit, UKM Industri Non Pertanian sejumlah 1.595 unit serta UKM Aneka Jasa sebanyak 873 unit. Dibandingka dengan Tahun 2015 keberadaan UKM pada Tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 9,08 persen. Jumlah UKM pada Tahun 2015 tercatat sejumlah 11.279 unit.

Dalam pelaksanaan Urusan Koperasi dan UKM, Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng didukung dengan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng berupa belanja langsung yang meliputi : Belanja Pegawai dengan anggaran Rp. 255.195.000 dan terealisasi Rp. 206.935.000, atau 81,08 persen, Belanja Barang dan jasa dengan anggaran Rp. 2.080.138.376 dan terealisasi Rp. 1.551.224.095 atau mencapai 74,57 persen, Belanja Modal dengan anggaran Rp. 127.040.000 dan terealisasi Rp.0 atau 0 persen.

Pembangunan Bidang pengembangan dan pembinaan Koperasi dan UKM dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng yang didukung personil berjumlah 118 orang, secara rinci tersaji pada tabel berikut :

Tabel 68
Kondisi Kepegawaian Pelaksana Urusan Koperasi dan UKM

No	Uraian	Jumlah
1.	**Jumlah Pegawai**	59 orang
	PNS	44 orang
	Pegawai Harian /Kontrak	15 orang
2.	**Pangkat dan Golongan**	
	Pembina Tk.I (IV/b)	3 orang
	Pembina	2 orang
	Penata Tk. I	10 orang
	Penata	3 orang
	Penata Muda Tk.I	6 orang
	Penata Muda	2 orang

	Pengatur Tk.I	2 orang
	Pengatur	2 orang
	Pengatur Muda Tk.I	11 orang
	Pengatur Muda	3 orang
	Juru Muda Tk. I	1 orang
3.	**Tingkat Pendidikan PNS**	
	S2	2 Orang
	SI/D4	20 orang
	D3	2 orang
	SMA/SMK/MTs	19 orang
	SD	1 orang
4.	**Jumlah Pejabat**	
	Pejabat Setruktural :	
	Eselon IIb	1 orang
	Eselon IIIa	1 orang
	Eselon IIIb	2 orang
	Eselon Iva	9 orang
	Pejabat Fungsional	
	1. Penyuluh Perindag	1 orang

Sumber data : Diskopdagrin Kab. Buleleng,

Hasil – hasil kegiatan pokok yang dilaksanakan pada Tahun 2016 meliputi :

- Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi.
- Terlaksananya Pelatihan Ke- wirausahaan.
- Terlaksananya Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah.
- Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi KSP/ USP Koperasi.
- Terlaksananya rangkaian kegiatan HORKOP Ke-67 Tahun 2016.
- Terlaksananya Penyuluhan per koperasian,
- Terlaksananya Diklat Perkoperasian,
- Terlaksananya Penerbitan dan Pembubaran Koperasi.
- Terlaksananya Pembinaan Kepada Koperasi.
- Terlaksananya Temu Mitra Usaha Bagi Pengelola Koperasi.
- Terlaksanya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Koperasi.
- Terlaksananya pembinaan manajemen usaha koperasi

11. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL.

Pembangunan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil diarahkan untuk meningkatkan Pengendalian Sistem Kependudukan melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan serta pengembangan Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan yang handal sesuai dengan perkembangan IPTEK, dan peningkatan tertib Administrasi Penduduk dan kepastian hukum Pencatatan Sipil yang dilandasi sikap dan prilaku sesuai dengan Falsafah Tri Hita Kirana, guna terwujudnya kepemilikan bukti diri yang sah, baik itu dalam bentuk Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta – Akta Catatan Sipil. Tertib Administrasi Pendaftaran Penduduk sangat penting dalam rangka pengendalian Migrasi keluar dan masuk Kabupaten Buleleng. Upaya itu dilakukan dengan upaya Peningkatan Kegiatan Pendaftaran Penduduk yang meliputi Pendaftaran dan Penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pencatatan Mutasi Penduduk, Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran, Akta perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian dan Pengesahan Pengangkatan Anak (Adopsi) dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga.

Atas dasar kondisi tersebut Kebijakan Penyelengaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ditujukan untuk : Meningkatkan kesadaran masyarakat akan tertib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil; meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang sistem informasi Administrasi Kependudukan, meningkatkan jumlah kepemilikan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), meningkatkan jumlah kepemilikan Akta Catatan Sipil yang meliputi Akta Perkawinan, Akta Kelahiran, Akta Perceraian, Akta Kematian dan Akta Pengesahan Anak (Adopsi).

Sedangkan sasaran penyelengaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil antara lain terwujudnya tertib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, tersedianya informasi dan data kependudukan yang akurat melalui sistem on line, terwujudnya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang Sistem Informasi Kependudukan dan terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan bukti diri yang sah, baik itu berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akta – akta Catatan Sipil yang meliputi, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian dan Akta Pengesahan Anak (Adopsi).

Indikator Kinerja Kunci urusan Kependudukan dan Catatan Sipil melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan maka sasaran yang

dicapai dalam urusan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah meningkatnya kesadaran masyarakat akan kepemilikan bukti diri yang sah yang meliputi :

- Kepemilikan KTP capaian kinerja 46,90%.
- Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk tercapai 210,2 / 1.000.
- Penerapan KTP Nasional sudah berbasis NIK, berbasis e-KTP.

Tingkat pencapaian kinerja urusan Kependudukan dan Catatan Sipil : Pembuatan KK untuk tahun 2012 di targetkan sebanyak 110.000 set dan terealisasi sebanyak 79.733 set atau 72,48 %. Jumlah penduduk sampai dengan akhir 2012 sebanyak 969.392 orang yang wajib memiliki KK sebanyak 271.488 KK, dan sampai saat ini yang memiliki KK sebanyak 216.393 KK, atau 79,71 %; Pembuatan KTP untuk tahun 2012 ditargetkan sebanyak 150.000 keping dan terealisasi sebanyak 104.568 lembar atau 69,71%, dari jumlah penduduk sampai dengan akhir tahun 2012 sebanyak 969.392 orang yang wajib memiliki KTP sebanyak 714.298 orang dan sampai akhir 2012 yang memiliki KTP sebanyak 334.988 orang atau 46,90 %; Pembuatan Akte Kelahiran untuk tahun 2012 di targetkan sebanyak 18.000 lembar, sedangkan terealisasi sebesar 21.622 lembar atau 120,1 %, dari jumlah penduduk sebanyak 969.392 orang yang memiliki Akte Kelahiran sebanyak 203.843 orang atau 21,03% atau 210,2 orang per 1.000 penduduk.

Tahun 2013 Indikator capaian kinerja urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2013 meliputi :

a. Penerbitan Kartu Keluarga (KK).

   Sesuai dengan target SPM bahwa pada Tahun 2015 seluruh Kepala Keluarga wajib KK sudah memiliki Kartu Keluarga (KK). Pada Tahun 2013, dari wajib KK sebanyak 478.605 yang telah memiliki KK sebanyak 402.514 atau 84 %. sehingga ada kesenjangan sebesar 16 % yang harus dituntaskan sampai dengan tahun 2015.

b. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP el)

   Sesuai dengan target SPM bahwa pada Tahun 2015 seluruh (100%) wajib KTP harus memiliki KTP elektronik. Sedangkan untuk penerbitan KTP sampai dengan tahun 2013, dari wajib KTP sebanyak 602.164

yang telah terlayani perekaman KTP elektronik sebanyak 431.576 atau 69,60 % sehingga ada kesenjangan sebesar 30,4 % yang harus dituntaskan sampai dengan tahun 2015.

c. Penerbitan Akta Kelahiran.

Sesuai dengan target SPM bahwa pada Tahun 2020 masyarakat yang memiliki akta kelahiran sebesar 90% dari jumlah masyarakat Kabupaten Buleleng. Sedangkan untuk penerbitan Akta Kelahiran dari jumlah penduduk sebanyak 809.897 jiwa yang telah memiliki akta sebanyak 253.570 atau 31,31% sehingga ada kesenjangan sebesar 68,69% yang harus dituntaskan sampai dengan tahun 2020.

d. Penerbitan Akta Kematian.

Sesuai dengan target SPM bahwa pada Tahun 2020 masyarakat yang telah meninggal wajib memiliki akta kematian dengan target sebesar 70% dari jumlah masyarakat yang meninggal. Sedangkan untuk penerbitan Akta Kematian sampai dengan tahun 2012 belum bisa dicari prosentasenya karena tidak adanya laporan/data tentang kematian. Untuk itu pada tahun-tahun mendatang diperlukan sosialisasi yang lebih intensif tentang perlunya laporan/ pentingnya akta kematian bagi masyarakat, karena akan mempengaruhi validitas jumlah penduduk.

Pencapaian indikator kinerja penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Buleleng pada tahun 2014 meliputi:jumlah Kartu Kepala Keluarga yang diterbitkan sebanyak 213.737 dari jumlah KK sebanyak 230.730; jumlah KTP elektronik yang diterbitkan 440.201 dari 620.164 penduduk yang wajib memiliki KTP elektronik; jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan berjumlah 44.069 dari 43.691 kelahiran yang terjadi; jumlah kutipan akta kematian yang diterbitkan 1.800 kutipan dari 1.695 jumlah kematian yang terjadi.

Pencapaian indikator kinerja penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Buleleng pada tahun 2015 meliputi:jumlah Kartu Kepala Keluarga yang diterbitkan sebanyak 220.450 dari jumlah KK sebanyak 233.507; jumlah KTP elektronik yang diterbitkan 328.581 dari 594.349 penduduk yang wajib memiliki KTP elektronik;

jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan berjumlah 146.814 dan jumlah kutipan akta kematian yang diterbitkan 5.131 kutipan.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang kependudukan dan capil pada meliputi program dan kegiatan, yaitu :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
   - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
   - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
   - Penyediaan Alat Tulis Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   - Penyediaan Makanan dan Minuman
   - Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah / Dalam Daerah
   - Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian.
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
   - Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
   - Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana / Prasarana Upacara
   - Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional
   - Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
   - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
   - Pemeliharaan Rutin / Berlaka Alat – alat Kantor / RT
   - Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah.
3. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
   - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
   - Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur.
4. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**, dengan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

5. **Program Perencanaan Anggaran SKPD,** dengan kegiatan Penyusunan anggaran SKPD.
6. **Program Penataan Administrasi Kependudukan**
   - Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara terpadu
   - Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)
   - Koordinasi Pelaksanaa Kebijakan Kependudukan
   - Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
   - Penyediaan Informasi yang dapat diakses Masyarakat
   - Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
   - Pengembangan Data Base Kependudukan
   - Penyusunan Kebijakan Kependudukan
   - Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
   - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
   - Analisa Kependudukan
   - Data dan Dokumentasi
   - Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bagi Rumah Tangga Miskin.

Capaian kinerja dalam rangka penataan dan pengendalian kependudukan dan pencatatan sipil Tahun 2016 ditunjukkan melalui indikator Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK) dengan indikator kinerja yaitu jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan pada Tahun 2016 sebanyak 214.494 dari seluruh rumah tangga yang ada pada Tahun 2016 sejumlah 233.929. Artinya cakupan penerbitan Kartu Keluarga pada Tahun 2016 mencapai 91,70 persen. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan pada Tahun 2015 yang hanya mencapai 89,16 persen. Sementara itu cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk pada Tahun 2016 mencapai 73,26 persen, dari 593.142 penduduk yang wajib KTP, 434.538 orang diantaranya telah diterbitkan KTP Eletrokniknya. Capaian Tahun 2016 menurun sedikit dibandingkan pada Tahun 2015 yang mencapai 73,78 persen. Sedangkan jumlah akta kelahiran yang diterbitkan pada Tahun 2016 mencapai 38.531 dan akta kematian yang terbit Tahun 2016 mencapai 4.318. Jumlah penduduk Kabupaten Buleleng Tahun 2016 807.884 jiwa, terjadi peningkatan dibandingkan Tahun 2015 dimana jumlah penduduk mencapai 807.598 jiwa.

Pembangunan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Berlokasi di Jalan Gajah Mada Singaraja Telp/Fax (0362) 25887 SINGARAJA, **Websit**e : http://disdukcapail.Buleleng.go.id **email** : disdukcapil@buleleng.go.id.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng berjumlah 38 orang. **Dengan pangkat dan golongan terdiri atas** : Pembina Tk.I (IV/b) ; 3 orang, Pembina (IV/a) ; 6 orang, Penata Tk.I (III/d) ; 8 orang, Penata (III/c) ; 4 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) ; 6 orang, Penata Muda (III/a) ; 2 orang, Pengatur Tk.I (II/d) ; 1 orang, Pengatur (II/c) ; 5 orang, Pengatur Muda Tk.I ; 1 orang, Pengatur Muda ; 2 orang. **Dengan kualifikasi pendidikan meliputi** : Strata 2 (S2) ; 2 orang, Strata 1/ Diploma 4 (S1/D4) ; 17 orang, Diploma 3 (D3) ; 5 orang, SMA/SMK/Mts ; 11 orang, SD ; 3 orang. **Jumlah Pejabat Struktural** : Eselon II/b ; 1 pejabat, Eselon III/a ; 1 pejabat, Eselon III/b ; 4 pejabat, Eselon IV/a ; 15 pejabat. Tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada Tahun 2016 adalah :

- Kurangnya sarana penunjang, seperti komputer, printer untuk pencetakan KTP Elektronik dan kendaraan /mobil pelayanan keliling sebagai penunjang peningkatan kinerja aparat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.
- Tingkat kesadaran masyarakat relatif rendah terhadap peraturan yang ada, terutama yang menyangkut kepemilikan surat-surat identitas diri, seperti KTP / KK, dan akta-akta Catatan Sipil (mencari pada saat memerlukan).
- Masih banyak penduduk yang keluar masuk Kabupaten Buleleng yang tidak dilengkapi dengan identitas diri.
- Belum terlaksananya tertib administrasi kependudukan secara merata di desa-desa / kelurahan.

Solusi yang telah ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah :

- Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada
- Pengadaan sarana komputer dan kendaraan operasional secara bertahap

- Melaksanakan sosialisasi tentang peraturan kependudukan dan catatan sipil, secara langsung maupun melalui media massa.
- Mengadakan razia penduduk keluar masuk Kabupaten Buleleng
- Sosialisasi dan penyuluhan tentang sistem SIAK untuk penyeragaman administrasi ke desa-desa.
- Mengadakan sosialisasi, penyuluhan dan pelayanan KTP, Akta Massal dan Akta Miskin dengan sistim jemput bola.

12. URUSAN TENAGA KERJA.

Perkembangan kependudukan dan ketenagakerjaan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penduduk usia produktif merupakan modal aset tenaga kerja yang perlu dioptimalkan melalui pendidikan dan pelatihan. Hal tersebut akan berdampak terhadap kualitas dan atau kapasitas tenaga kerja terhadap penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan kondisi tersebut maka tujuan pelaksanaan urusan ketenagakerjaan adalah :

1. Meningkatkan kualitas pencari kerja dan perluasan kesempatan kerja,
2. Meningkatkan pemahaman tenaga kerja terhadap peraturan ketenagakerjaan,
3. Meningkatkan upah minimum kabupaten (UMK).

Sedangkan sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan urusan ketenagakerjaan adalah :

1. Terciptanya perluasan kesempatan kerja dan berusaha,
2. Terwujudnya peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja dan
3. Terwujudnya perlindungan hukum, keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja.

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan tenaga kerja pada tahaun 2012 dengan tingkat partisipasi tenaga kerja dengan tingkat pencapaian 76,21% dimana jumlah penduduk angkatan kerja sebanyak 343.638 dengan penduduk usia kerja (umur 15-64tahun) sebanyak 450.897 orang. Prosentase tenaga kerja yang ditempatkan 8,08% dengan jumlah pekerja

yang ditempatkan sebanyak 496 orang dengan jumlah pekerja yang mendaftar sebanyak 6.134 orang.

Untuk penyelenggaraan urusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2012 dialokasikan belanja daerah sebesar Rp. 5.782.506.450,- (lima millyar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 5.399.025.659,- (lima millyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) atau 93,37%. Yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.365.267.200,- (tiga millyar tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 3.170.577.085,- (tiga millyar seratus tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh lima rupiah) atau 94,32 %, belanja langsung sebesar Rp. 2.417.239.250,- (dua millyar empat ratus tujuh bela juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 2.228.448.574,- (dua millyar dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) atau 92,19 % dan realisasi fisik 100%. Dalam tahun 2012 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng juga mengelola anggaran yang didukung oleh dana APBN melalui dekosentrasi sebesar Rp. 851.000.000,- untuk kegiatan pelatihan berbasis kompetensi di BLK Singaraja dana rupiah murni dianggarkan sebesar Rp.480.000.000,- Pelatihan berbasis kompetensi di BLK Singaraja dana PNBP dianggarkan sebesar Rp.320.000.000,- dan administrasi kegiatan di BLK Singaraja dana rupiah murni dianggarkan sebesar Rp.51.000.000,-.

Tahun 2013 Pencapaian kinerja pembangunan bidang ketenagakerjaan ditunjukkan melalui Indikator sebagai berikut :

1. Tingkat partisipasi tenaga kerja mencapai 84,44%, hasil yang didapat dari perbandingan penduduk angkatan kerja 343.638 dengan penduduk usia kerja yang berjumlah 450.897 dikali seratus sehingga hasilnya 76,12%.
2. Prosentase tenaga kerja yang ditempatkan, dengan tingkat pencapaian 8,08 persen, sebagai hasil jumlah pekerja yang ditempatkan 496 orang

dibagi 6134 pekerja yang mendaftar dikali seratus sehingga hasilnya 8,08%.

3. Pelayanan kepesertaan Jaminan sosial bagi pekerja / buruh mencapai 21,06%, dimana Jumlah pekerja / buruh peserta program jamsostek aktif 2.228 orang dibagi Jumlah pekerja / buruh 10.579 orang dikali seratus sehingga hasilnya 21,06%.

Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2013 dialokasikan belanja daerah sebesar Rp. 8.193.330.178,- (delapan millyar seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 7.870.476.521,- (tujuh millyar delapan ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) atau 96,06%. Yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.346.280.178,- (empat millyar tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 4.258.712.988,- (empat millyar dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) atau 97,99 %, belanja langsung sebesar Rp. 3.847.050.000,- (tiga millyar delapan ratus empat puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 3.611.763.533,- (tiga millyar enam ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) atau 93,88 % dan realisasi fisik 100%. Untuk urusan tenaga kerja dibiayai dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp.3.592.124.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.359.047.213,00 atau 93,51%.

Kondisi pelaksanaan urusan ketenagakerjaan tahun 2014 di kabupaten Buleleng khususnya pencapaian standar pelayanan dengan 5 (lima) Jenis pelayanan dasar dengan 8 (delapan) jumlah indikator. Untuk dapat melaksanakan target Pencapaian dan Penerapan SPM Bidang ini dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawab yaitu Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi. Adapun kondisi Pelayanan Dasar Bidang Ketenagakerjaan sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1) Pelayanan Dasar Pelatihan Kerja.

Pelayanan pelatihan tenaga kerja meliputi : besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat dan besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan.

a. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

   Pada Tahun 2014 berjumlah 300 orang.

b. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat

   300 orang.

c. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan 75 orang.

2) Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.

a. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan 1.100 orang.
b. Jumlah pencari kerja yang mendaftar 1.200 orang.

3) Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

a. Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) sebanyak 3 kasus.

4) Pelayanan Kepesertaan Jamsostek.

a. Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek 9.650 orang.
b. Jumlah seluruh pekerja 11.000 orang.

5) Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan.

a. Besaran pemeriksaan perusahaan sebanyak 280 perusahaan.
b. Besaran pengujian peralatan di perusahaan berjumlah 6 peralatan.

Belanja Daerah untuk Urusan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng Tahun 2014 dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 10,353,223,540.20 dan terealisasi Rp. 9,859,625,188 atau 95.23 persen. Belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp. 4,764,564,540.2 dan terealisasi Rp. 4,740,707,965 (99.50 %), sedangkan belanja langsung dialokasikan sebesar

Rp.5,588,659,000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 5,118,917,223.00 (91,59 %) yang terdiri atas Belanja Pegawai dengan anggaran Rp. 479,850,000.00 dan terealisasi Rp. 461,850,000.00 (96,25 %), Belanja Barang Dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 3,676,585,000.00 dan terealisasi Rp. 3,415,528,223.00 (92,90 %) dan belanja modal dialokasikan dengan anggaran Rp.1,432,224,000.00 dan terealisasi Rp. 1,241,539,000.00 (86,69 %).

Sementara itu pendapatan asli daerah pada Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng pada tahun 2014 terealisasi Rp. 124.592.000 atau terealisasi 103,82 persen dari target yang direncanakan yang berjumlah sebesar sebesar Rp. 120.000.000 yang berasal dari retribusi ijin tertentu yaitu retribusi perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga asing yang berjumlah sebesar Rp. 124.592.000.

Tahun 2015 Tingkat Capaian Kinerja Bidang Tenaga Kerja sebagai berikut:

1) Pelayanan Pelatihan Kerja.

Pelayanan pelatihan tenaga kerja meliputi : Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat dan Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan.

a) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 30 orang.
b) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat 12 orang.
c) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan 32 orang.

2) Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan 895 orang Jumlah pencari kerja yang mendaftar 2.162 orang

3) Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) 6 kasus.

4) Pelayanan Kepesertaan Jamsostek.

Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek 2.306 orang Jumlah seluruh pekerja 8.129 orang.

5) Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Besaran pemeriksaan perusahaan 120 perusahaan. Sasaran pengujian peralatan di perusahaan 6 peralatan.

Alokasi dan realisasi belanja langsung pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng Tahun 2015 :

Tabel 69
Alokasi dan realisasi belanja langsung pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015

Uraian Belanja Langsung	Alokasi	Realisasi	%
Belanja Pegawai	369.456.000	367.750.000	99,54
Belanja Barang dan Jasa	2.641.593.000	2.383.391.559	90,23
Belanja Modal	161.690.000	152.571.500	94,36
Belanja Pemeliharaan	59.700.000	58.855.200	98,58

Sumber data ; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang Tenaga Kerja pada, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan / Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan

- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah / Dalam Daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Pengadaan Mebeleur
- Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana / Prasarana Upacara
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat – Alat Kantor / RT.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
- Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD

5. Program Perencanaan Anggaran SKPD

- Penyusunan Anggaran SKPD

6. Program Informasi Pembangunan Daerah

- Penyelenggaraan Pameran / Pawai Pembangunan

7. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

- Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
- Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

8. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

- Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja
- Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
- Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan
- Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai
- Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan
- Pemberian Fasilitasi dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja.

9. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

- Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial
- Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
- Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
- Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

Bidang Ketenagakerjaan memiliki 5 (lima) Jenis pelayanan dasar dengan 8 (delapan) jumlah indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.15/MEN/X/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota. Untuk dapat melaksanakan target Pencapaian dan Penerapan SPM Bidang ini dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawab yaitu Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi. Adapun kondisi Pelayanan Dasar Bidang Ketenagakerjaan sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 70
Kondisi Pelayanan Dasar Bidang Ketenagakerjaan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Hasil Capaian (%)		
			2014	2015	2016
A.	Pelayanan Pelatihan kerja	1. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	300.00	111.00	111.00
		2. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	300.00	77.00	77.00

		3. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	76.00	62.00	62.00
B.	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	4. Besaran tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan	80.00	80.00	80.00
C.	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	5. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100.00	100.00	100.00
D.	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek	6. Besaran Pekerja Buruh yang menjadi peserta Program Jamsostek	100.00	100.00	100.00
E.	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	7. Besaran Pemeriksaan Perusahaan	100.00	100.00	100.00
		8. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	6.00	21.00	21.00

Sumber data ; Disnakertrans Kab. Buleleng,

Urusan Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng Kondisi kepegawaian tersaji pada tabel berikut ;

Tabel 71
Kondisi Pegawai Pelaksana Urusan Tenaga Kerja

No	Uraian	Jumlah
1.	**Jumlah Pegawai**	**106**
	PNS	68
	Pegawai Harian /Kontrak	38
2.	**Pangkat dan Golongan**	
	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
	Pembina Tk.I (IV/b)	5
	Pembina	9
	Penata Tk. I	12
	Penata	12
	Penata Muda Tk.I	12

	Penata Muda	2
	Pengatur Tk.I	6
	Pengatur	2
	Pengatur Muda Tk.I	3
	Pengatur Muda	3
	Juru	1
3.	**Tingkat Pendidikan**	
	S2	2
	SI/D4	34
	D3	10
	SMA/SMK/MTs	49
	SMP/MI	1
4.	**Jumlah Pejabat**	
	Pejabat Setruktural :	
	Eselon IIb	1
	Eselon IIIa	1
	Eselon IIIb	4
	Eselon Iva	15
	Pejabat Fungsional	
	1. Fungsional Instruktur Umum	1
	2. Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan	1
	3. Fungsional Instruktur Ahli	2
	4. Fungsional Instruktur Bangunan	1
	5. Fungsional Instruktur Otomotif	2
	6. Fungsional Instruktur Mekanikal	2
	7. Fungsional Instruktur Pertanian	1
	8. Fungsional Instruktur Menjahit	1
	9. Fungsional Instruktur Komputer	1
	10. Fungsional Instruktur Listrik	2

Sumber data : Disnakertrans Kab. Buleleng

13. URUSAN KETAHANAN PANGAN.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat dengan indikator tersedianya bahan pangan dalam jumlah dan

mutu yang aman, merata dan terjangkau. Pembangunan ketahanan pangan sangat berperan dalam pembentukan sumber daya yang berkualitas, kreatif dan aktif dalam menyongsong pembangunan, melalui perwujudan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, beragam dan tersebar merata serta terjangkau oleh daya beli masyarakat. Kebutuhan pangan yang terus meningkat sebagai akibat pertambahan jumlah penduduk, tuntunan konsumen terhadap kualitas produk, persaingan pasar yang semakin ketat, alih fungsi lahan produktif ke non pertanian serta perubahan lingkungan strategis lainnya yang akan berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan pada bidang ketahanan pangan. Tahun 2012 melalui Dinas Pertanian dan Peternakan kabupaten Buleleng dilaksanakan program peningkatan ketahanan pangan untuk memfasilitasi terjaminnya masyarakat untuk memperolah pangan yang cukup setiap saat, sehat dan halal melalui kegiatan penyusunan data base potensi produksi pangan, pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan, pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija, pengembangan pertanian pada lahan kering, pengembangan lumbung pangan desa dan peningkatan mutu dan keamanan pangan. Pencapaian standar pelayanan minimal urusan ketahanan pangan ditunjukkan melalui realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng dengan indikator realisasi pelaksanaan kegiatan selama tahun 2012, diantaranya Dinas Pertanian dan Peternakan kabupaten Buleleng telah berhasil menyusun data 7 (tujuh) komoditas produksi pertanian di Kabupaten Buleleng yakni untuk komoditas padi, jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar. Terselenggaranya pembinaan pada 9 (sembilan) kelompok tani / dasa wisma yang berada di Desa Bondalem, Desa Mengening, Desa Sekumpul, Desa Petandakan, Desa Padang Bulia, Desa Panji, Desa Banjar Tegeha, Desa Tanguwisia, Desa Telaga Desa Banyupoh, dan Sekretariat UKS Kabupaten Buleleng dan pemberian bantuan berupa Tanaman pekarangan untuk lahan kering dan pekarangan bagi 2 kelompok tani ternak yaitu kelompok tani ternak Kerti Winangun di desa Bukti dan Kelompok tani ternak Putra Harapan Kita di Desa Sanggalangit berupa 2150 bibit tanaman pekarangan (mangga,

nangka, toga pohon, toga cover crop, toga perdu, toga rambat, temu-temuan, benih tanaman pekarangan). Pembinaan juga dilaksanakan kepada 23 kelompok tani dalam pelaksanaan SL-PTT padi dan Jagung, 8 Kecamatan gerakan pengendalian OPT di Kecamatan Kubutambhan, Kecamatan Sawan, Kecamatan Buleleng, Kecamatan Sukasada, Kecamatan Banjar, Kecamatan Seririt, Kecamatan Busungbiu dan Kecamatan Gerokgak, serta pembinaan dalam rangka rapat koordinasi terhadap 40 orang petugas. Terselenggaranya pembinaan kepada 20 (dua puluh) subak/ kelompok tani meliputi Subak Yang Ai Desa Bungkulan, Subak Bangan Desa Silangjana, Subak Muara Desa Sambangan, Subak Penyaringan Desa Kalianget, Subak Ketug-ketug Desa Jinengdalem, Klp Tani Citta Mekarjaya, Subak Gede Penarukan, Subak Gerokgak Desa Gerokgak, Subak Babakan Sanda Sudaji, Subak Babakan Jati kelurahan Banyuning, Subak Pangkung kunyit desa Banjarasem, Klp Tani Buana Giri Ulangun desa Kaliasem, Subak Banjar Tengah desa Tukadmungga, Subak Lawas desa Petandakan, Subak Babakan desa Suwug, Klp Tani Lembu Sura Nadi desa Bukti. Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2012 juga berhasil merealisasikan 4 unit Bak penampungan air (Kelompok Tani Karya Asih desa Penuktukan, Kelompok Tani Kerti Winangun desa Bukti, Kelompok Tani Ternak Munduk Lingker Nadi desa Sumberkima, Kelompok Putra Harapan desa Sanggalangit) dan 3 unit kandang komunal, 3 unit Peralatan Biogas, 3 unit Peralatan Bio Urine, 3 unit Peralatan Pembuatan Pupuk Organik, 3 unnit Perlengkapan Bio Gas, 3 unit Perlengkapan Bio Urine dan 3 unit Perlengkapan Pembuatan Pupuk Organik (Kelompok Werdhi Boga desa Penuktukan, Kelompok Tani Kerti Winangun desa Bukti, Kanggalangit) serta 3 unit Gudang Penyimpanan (lumbung pangan) dan lantai jemur masing-masing di Subak Gede Pangkung Paruk Desa Pangkung Paruk, Gapoktan Catur Tani Susila Desa Tukad Mungga dan Subak Banga Desa Silangjana, 3 unit Bangunan Mesin, 3 unit Mesin Penggilingan Padi, 3 unit Power Threser dan 7 unit terpal diberikan kepada Subak Kedu di Desa Panji, Subak Yang Ai di desa Bungkulan, Gapoktan Klp Pala Sari Mukti desa Kaliasem serta bantuan 2 unit Power Threser Kepada Subak Beten Bekul Desa Tanguwisia dan Subak Rangdu Desa Rangdu.

Pembiayaan penyelenggaraan urusan ketahanan pangan melalui pelaksanaan 1 program dan 6 kegiatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng untuk tahun 2012, dianggarkan sebesar Rp. 1.565.340.000,00 terealisasi Rp. 1.534.979.795,00 atau 98,06 %. Dengan perincian belanja SKPD terinci pada tabel berikut :

Tabel 72

Realisasi Belanja Urusan Ketahanan Pangan

Tahun 2012

Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung	-	-	-
Belanja Langsung	1.565.340.000	1.534.979.795	98,06
Belanja Pegawai	55.800.000	55.330.000	*99,16*
Belanja Barang Jasa	1.509.630.000	1.479.649.795	*98,01*
Belanja Modal	-	-	-
Total	1.565.340.000	1.534.979.795	98,06

Sumber data Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Buleleng

Capaian kinerja pelaksanaan urusan ketahanan pangan tahun 2013 ditunjukkan melalui indicator berikut :

1) Regulasi ketahanan pangan, tidak ada.
2) Ketersediaan pangan utama 213,30 , rata – rata ketersediaan pangan utama per tahun 172.753 ton dibagi jumlah penduduk tahun 2013, 809. 897 jiwa.

Struktur corak agraris yang dimiliki Kabupaten Buleleng yang menjadi andalan perekonomian disamping sektor lain di luar sektor pertanian, memperlihatkan bahwa produktifitas tanaman bahan pangan masih cukup tinggi. Tahun 2013 luas tanam padi mencapai 24,353 Ha, dengan luas panen mencapai 22,804 Ha dengan produksi sebesar 136.286 ton/GKG. Dengan rata – rata produktifitas 59,80 Kw/Ha GKG. Untuk produksi jagung tahun 2013 mencapai 23.524 ton/ pipilan kering, dari luas tanam seluas 6.680 Ha. Sedangkan untuk ubi kayu dan ubi jalar untuk tahun 2013 dari luas tanam seluas 562 Ha, produksi yang dihasilkan mencapai 12.943 ton.

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan ketahanan pangan pada BPMPD Kabupaten Buleleng Tahun 2013 terinci melalui realisasi anggaran dari belanja langsung sebesar Rp. 218.000.000 dengan realisasi Rp. 211.494.882 atau 97,02% untuk kegiatan berikut :

- Kegiatan Koordinasi Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi Keanekaragaman Pangan dengan hasil meningkatnya efektivitas pelaksanaan dewan ketahanan pangan dialokasikan dengan anggaran Rp. 108.000.000,- realisasi anggaran Rp. 107.854.182,- atau 99.86 % dan realisasi fisik 100 %.
- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan Bagi Masyarakat dengan hasil terkendalinya kualitas bahan pangan dialokasikan dengan anggaran Rp. 110.000.000,- realisasi anggaran Rp. 103.640.700,- atau 94.22 % dan realisasi fisik 100%.

Pada Dinas Pertanian dan Peternakan dialokasikan dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 1.613.686.800 dan realisasinya mencapai Rp. 1.571.374.550 atau 97,38%, yang dijabarkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) dengan 5 kegiatan dengan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah terlaksananya kegiatan penyuluhan tentang pengendalian OPT di 15 kelompok tani hortikultura, tersedianya 6 unit hand traktor, 10 unit pompa air, 5 unit alat pencacah jerami (choper), 3 unit alat pengolah pupuk organik, 10 unit hand sprayer, 2 unit irigasi permukaan, jalan produksi sepanjang 2 Km dan jaringan irigasi tingkat desa (JIDES) sebanyak 5 unit, tersedianya bibit unggul hortikultura sebanyak 10.700 poho

Indikator Kinerja Urusan Pertanian pada Program Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan tahun 2015, Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

- Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya (ton) sebesar 125.131 ton/ tahun.
- Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya (ha) adalah seluas 21.680 Ha.

Alokasi dan realisasi belanja langsung pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun 2015 dengan anggaran sebagai berikut: Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp 52.680.000,00 dan

terealisasi sebesar Rp. 52.080.000,00, atau 98,86 persen dan Belanja Barang dan jasa dianggarkan sebesar Rp 2.808.740.000,00 dan terealisasi Rp 2.459.358.451,00 atau 87,56 persen.

Tabel 73

Alokasi dan realisasi belanja langsung pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun 2015

NO	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH DANA	REALISASI KEUANGAN	
				Rp.	%
I.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	1. Penyusunan data base potensi produksi pangan	71.720.000	71.615.183	99,85
		2. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil	166.800.000	165.970.300	99,50
		3. Pengembangan Desa Mandiri Pangan	125.520.000	124.136.806	98,89
		4. Pengembangan intensifikasi tanaman padi	324.680.000	319.350.085	98,35
		5. Pengembangan lumbung pangan desa	2.021.200.000	1.681.040.811	83,17
		6. Peningkatan mutu dan keamanan pangan	151.500.000	149.325.266	98,56
	JUMLAH TOTAL		2.861.420.000	2.511.438.451	87,76

- ***Sumber data ; Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Buleleng***

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang Ketahanan Pangan yaitu : **Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan),** yang dituangkan ke dalam kegiatan :

- Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan.

- Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil.
- Pengembangan Desa Mandiri Pangan.
- Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija.
- Pengembangan Lumbung Pangan Desa.
- Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan.

Bidang Ketahanan Pangan terdapat 4 (empat) Jenis pelayanan dasar dengan 7 (tujuh) jumlah indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/PERMENTAN/OT.140/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk dapat melaksanakan target Pencapaian dan Penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Buleleng dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai penanggung jawab yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Adapun kondisi Pelayanan Dasar Bidang Ketahanan Pangan sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 74
Kondisi Pelayanan Dasar Bidang Ketahanan Pangan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Hasil Capaian (%)		
			2014	2015	2016
1.	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1 Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita 90% tahun 2015	41.77	70.00	70.00
		2 Penguatan Cadangan Pangan 60% tahun 2015	45.97	56.78	56.78
2.	Distribusi dan Akses Pangan	3 Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah 90% tahun 2015	281.20	181.20	181.20
		4 Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan 90% tahun 2015	100.00	100.00	100.00
3.	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	5 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 90% tahun 2015	100.00	100.00	100.00

		6 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan 80% tahun 2015	25.87	55.98	55.98
4.	Penanganan Kerawanan Pangan	7 Penanganan Daerah Rawan Pangan 60% tahun 2015	30.76	44.76	44.76

Sumber data Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng.

Produksi tanaman padi / bahan pangan utama lokal lainya (ton) sebesar 137 ton/ tahun dan Luas areal tanaman padi / bahan pangan utama lokal lainya (ha) adalah seluas 22.666 Ha.

Realisasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2016 meliputi **Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan),** program ini dibiayai dengan anggaran sebesar Rp 1.303.295.346 dan terealisasi Rp 1.247.469.965,(95,72%), dengan realisasi anggaran masing – masing kegiatan :

- Kegiatan penyusunan data base potensi produksi pangan, dengan anggaran sebesar Rp 51.600.000 dan terealisasi Rp 51.552.940,- (99,91 %), dengan hasil kegiatan adalah tersedianya informasi tentang data base potensi produksi pangan sebanyak 3 dokumen.
- Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian, dengan anggaran sebesar Rp 48.170.000 dan terealisasi Rp Rp 47.997.700,- (99,64 %), dengan hasil kegiatan adalah meningkatnya produksi dan kualitas produk olahan sebanyak 2 kelompok
- Kegiatan pengembangan desa mandiri pangan, dengan anggaran sebesar Rp 123.325.345,57 dan terealisasi Rp 122.782.110 (99,56%) dengan hasil kegiatan adalah Optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan serta meningkatnya pengetahuan dalam pengelolaan pertanian sebanyak 9 kecamatan
- Kegiatan pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija, dengan anggaran sebesar Rp 256.000.000 dan terealisasi Rp 249.564.145,- (97,49%), dengan hasil Berkembangnya benih padi (5 Ha), Terwujudnya penumbuhan pengembangan padi dan kedelai pada lahan kering (10 Ha) serta meningkatnya pengetahuan/ keterampilan petani di 8 kecamatan.

- Kegiatan pengembangan lumbung pangan desa, dengan anggaran sebesar Rp 678.500.000 dan terealisasi Rp 632.439.400,- (93,21%), dengan hasil Meningkatnya olahan gabah yang dikelola oleh subah/ kelompok.
- Kegiatan peningkatan mutu dan keamanan pangan, Alokasi Anggaran Rp 145.700.000 Realisasi Anggaran Rp 143.133.670,- (98,24%) hasilnya adalah tercapainya pelaksanaan peningkatan mutu dan keamanan pangan padi (2.000 Ha), jagung (1.000 Ha) dan kedelai (250 Ha)

Pembangunan di bidang Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng, dengan Kondisi pegawai yang menangani Urusan Ketahanan Pangan berjumlah 44 orang. Secara lengkap terkait kondisi kepegawaian pelaksana Urusan Ketahanan Pangan tersaji pada tabel berikut :

TABEL 75
Kondisi Pegawai Urusan Ketahanan Pangan.

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Pegawai	
a.	PNS	35 orang
b.	- Pegawai Harian	1 orang
	- Kontrak Daerah	8 orang
2.	Pangkat dan Golongan	
	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 orang
	Pembina Tk.I (IV/b)	2 orang
	Pembina	2 orang
	Penata Tk. I	8 orang
	Penata	5 orang
	Penata Muda Tk.I	9 orang
	Penata Muda	4 orang
	Pengatur Tk.I	2 orang
	Pengatur	2 orang
	Pengatur Muda Tk.I	2 orang
3.	Tingkat Pendidikan	
	S2	4 orang
	SI/D4	13 orang
	SMA/SMK/MTs	18 orang

4.	Pejabat Setruktural :	
	Eselon IIb	1 orang
	Eselon IIIb	2 orang
	Eselon Iva	5 orang
	Pejabat Fungsional	
	1. Fungsional Umum	8 orang
	2. Fungsional Pengawas Bibit Tanaman	1 orang
	3. Fungsional PPL	2 orang

Sumber data : Distanak Kab. Buleleng.

14. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

Salah satu tujuan penting pembangunan berbasis gender adalah peningkatan kualitas hidup perempuan, hal ini bisa tercapai melalui peningkatan kapabilitas dasar perempuan. Dua faktor penting dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan adalah pendidikan dan kesehatan perempuan. Melalui pendidikan, khususnya pendidikan formal, seseorang dapat meningkatkan pengetahuannya. Jelas Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai seseorang, semakin berpotensi dalam pengembangan kemampuan diri untuk berusaha meningkatkan kualitas hidup kearah yang lebih baik. Pendidikan dan kesehatan bagi perempuan sangat penting artinya karena melalui pengetahuan yang tinggi niscaya perempuan memiliki pengetahuan yang tinggi pula dalam menjaga, memelihara dan mewujudkan kesehatan dirinya. Karena dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, perempuan diharapkan mampu menjadi SDM yang berkualitas dan budayaguna untuk dirinya dan keluarga, dan selanjutnya perempuan yang berkualitas akan melahirkan anak – anak sebagai generasi harapan bangsa yang mampu berkontribusi terhadap pembangunan. Disamping dua faktor tersebut diatas untuk memenuhi hak – hak perempuan maka faktor penegakan terhadap kekerasan perempuan dan anak sangat penting, jangan sampai terus – menerus merupakan tekanan – tekanan bagi korban kekerasan dan juga didukung oleh faktor ekonomi sehingga tidak terjadi kemiskinan. Berkaitan dengan hal tersebut mengacu pada potensi perempuan dan anak, baik

sebagai subyek maupun obyek maka perlu dirumuskan strategi pembanguna perempuan melalui upaya – upaya Pemberdayaan Perempuan termasuk perlindungan anak sesuai tugas pokok dan Fungsi bidang Pemberdayaan Perempuan.

Atas dasar kondisi tersebut maka kebijakan penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditujukan untuk : Menekan angka KDRT Perempuan dan Anak dalam rumah tangga; Meningkatkan Kualitas Ibu dan Anak; Memberikan Pelatihan dan Keterampilan bagi kelompok perempuan sesuai dengan potensi yang dimiliki di masing-masing wilayah; Mendorong Perempuan untuk meningkatkan perempuan secara formal sampai ke jenjang yang lebih tinggi; Memberikan Pelayanan Kesehatan kepada kelompok perempuan melalui Posyandu, GSI dan Pelayanan di YKI (Yayasan Kanker Indonesia).

Sedangkan sasaran urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah Seluruh masyarakat baik yang ada di perkotaan dan pedesaan juga melalui organisasi – organisasi perempuan yang ada di daerah.

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan anak tahun 2012, Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan, tercapai sebesar 39,92 % dengan jumlah pekerja perempuan di Lembaga Pemerintah sebanyak 4.406 orang dan jumlah pekerja perempuan sebanyak 11.037 orang. Angka Melek Huruf Perempuan Usia 15 Tahun Ke Atas, mencapai sebesar 61,69 % dengan jumlah anak perempuan usia > 15 yang melek huruf sebanyak 14.749 orang dan jumlah anak perempuan usia >15 tahun sebanyak 23.909 orang. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, tercapai sebesar 98,35 % dengn jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 175.582 orang dan jumlah angkatan kerja perempuan sebanyak 178.536 orang.

Pembagian pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Buleleng untuk tahun 2012, terinci melalui belanja SKPD sebagai berikut :

Tabel 76

pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Buleleng untuk tahun 2012

Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung	-	-	-
Belanja Langsung	747.242.800,00	739.138.300,00	98,92
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa	736.042.800,00	727.938.300,00	98,90
Belanja Modal	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00
Belanja Pemeliharaan	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00
Total	747.242.800,00	739.138.300,00	98,92

Tahun 2013 Tingkat capaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditunjukkan melalui indicator berikut :

1. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan, tercapai sebesar 2,51 %, sebagai hasil pembagian jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah 4.261, dengan Jumlah Pekerja Perempuan 169.536 sehingga hasilnya 2,51%.
2. Angka Melek Huruf Perempuan Usia 15 Tahun Ke Atas, mencapai sebesar 41,80 %, sebagai hasil perbandingan antara Jumlah Anak Perempuan Usia > 15 yang melek huruf 9.978 dibagi Jumlah Anak Perempuan Usia > 15 tahun 23.873 orang.
3. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, tercapai sebesar 97,30 %, jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 164.966 dibagi Jumlah Angkatan Kerja Perempuan 169.536 dikali seratus sehingga hasilnya 97,30%.

Untuk penanganan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2013 Dialokasikan belanja langsung sebesar Rp. 843.602.000,- dengan terealisasi sebesar Rp. 772.843.432,- atau 91,61 %.

Tahun 2014 pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan capaian kinerja:

1) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu, Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu 102 dan jumlah pengaduan/laporan yang masuk ke unit pelayanan terpadu 102.
2) Cakupan ketersediaan petugas di Unit Pelayanan Terpadu yg memiliki kemampuan utk menindaklanjuti pengaduan/laporan masyarakat, Jumlah petugas yang memiliki kemampuan penanganan pengaduan di unit pelayanan terpadu 9 Orang, Jumlah petugas penerima pengaduan di unit pelayanan terpadu 2 Orang.
3) Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundangundangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak 70, Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan 70.
4) Cakupan penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kepolisian, Jumlah kasus yang telah P21 dan Tahap II 70, Jumlah kasus yang dilaporkan 102.
5) Cakupan ketersediaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polda dan Polres/ta, Jumlah UPPA di suatu daerah tertentu 9 Orang di Polres Buleleng, Jumlah Polda dan Polres/ta.
6) Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di UPPA, Jumlah RPK (Ruang Pelayanan Khusus) 2 , Jumlah UPPA 1.
7) Cakupan ketersediaan polisi yang terlatih dalam memberikan layanan yang sensitif gender, Jumlah petugas polisi terlatih yang ada di UPPA 9 Orang, Jumlah petugas polisi yang ada di UPPA 9 Orang.
8) Cakupan ketersediaan jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Jumlah jaksa yang

terlatih yang ada di suatu kejaksaan negeri 7 Orang, Jumlah keseluruhan jaksa yang ada di suatu kejaksaan negeri 14 Orang.

9) Cakupan ketersediaan hakim yang terlatih dalam menanggani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak, Jumlah hakim terlatih penanganan kekerasan yang ada di Pengadilan Negeri 12 Orang, Jumlah hakim yang ada di Pengadilan Negeri 12 Orang.
10) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hokum, Jumlah korban yang mendapat layanan bantuan hokum 50 Orang, Jumlah korban yang membutuhkan layanan bantuan hokum 50 Orang.
11) Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, Jumlah pengacara yang tersedia untuk mendampingi korban kekerasan 10 Orang, Jumlah pengacara yang ada di daerah 15 Orang.

Tahun 2015 Dalam pelaksanaannya, beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan yang disebabkan oleh berbagai faktor sehingga indikator yang telah ditetapkan dalam kegiatan tersebut tidak memenuhi target. Rincian kegiatan yang tidak terlaksana dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Program Pengarusutamaan Gender.
- Sering terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan.
- Kurangnya data terpilah hasil kegiatan yang dilaksanakan pada tiap-tiap dinas/instansi.
- Kendalanya dilaporan GSI yaitu laporan bulanan dan triwulan baik dari desa maupun di Kecamatan.

Pemecahan terhadap permasalahan yang ada adalah :

- Mengadakan sosialisasi program Pengarusutamaan Gender secara berjenjang, bertingkat dan berlanjut.
- Mengadakan pelatihan kelompok perempuan baik menyangkut keterampilan maupun manajemen kewirausahaan.

- Mengadakan pembinaan dan penyuluhan terkait tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan ke pihak yang berwajib atas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Meningkatkan koordinasi lintas sektor tentang data hasil kegiatan.

Prestasi yang diraih tahun 2015.

1. Juara I Lomba Tokoh Perempuan Tingkat Provinsi Bali Tahun 2015 dari Desa Tembok, Kecamatan Tejakula.
2. Juara II Pengelola BKB Tingkat Provinsi Bali Tahun 2015 dari Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi 4 program dan 8 kegiatan, yaitu :

1. **Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan**, dengan kegiatan Penguatan Kelembagaan Jaringan Kerja Gugus Tugas Trafficking.
2. **Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**
   - Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
   - Kegiatan Fasilitasi Operasional Pusat Pelayanan Terpadu, Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
   - Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan PPRG.
   - Kegiatan Pengembangan Jejaring Kerjasama Penguatan Kelembagaan PUG.
   - Kegiatan Pengembangan Kabupaten Layak Anak.
3. **Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**, dengan kegiatan Revitalisasi GSI-B.
4. **Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan**, dengan Kegiatan Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif.

Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasaan terdapat 5 (lima) Jenis pelayanan dasar dengan 8 (delapan) jumlah indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasaan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk dapat melaksanakan target Pencapaian dan Penerapan SPM Bidang ini dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawab yaitu Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Adapun kondisi Pelayanan Dasar Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasaan sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

TABEL 77
SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Indikator SPM	Capaian		
	2014	2015	2016
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayan Terpadu	100. 00	100.00	100.00
Cakupan ketersediaan petugas di Unit Pelayanan Terpadu yg memiliki kemampuan utk menindaklanjuti pengaduan/laporan masyarakat	100.00	100.00	100.00
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS	100.00	100.00	100.00
2a. Cakupan Puskesmas mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A)	10.00	100.00	100.00
Cakupan RSU Vertikal/RSUD/RS Swasta/RS Polri yang melaksanakan pelayanan terpadu	100.00	100.00	100.00

Indikator SPM	Capaian		
	2014	2015	2016
bagi perempuan dan anak korban kekerasan			
Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) di Puskesmas	100.00	100.00	100.00
Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Rumah Sakit	100.00	100.00	100.00
Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabi-litasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	75.00	75.00	75.00
Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih	75.00	75.00	75.00
Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	75.00	75.00	75.00
Cakupan petugas bimbingan rohani terlatih dalam melakukan bimbingan rohani	75.00	75.00	75.00
Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas	70.00	80.00	80.00

Indikator SPM	Capaian		
	2014	2015	2016
Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak			
Cakupan penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kepolisian	100.00	80.00	80.00
Cakupan ketersediaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polda dan Polres/ta	100.00	80.00	80.00
Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di UPPA	80.00	80.00	80.00
Cakupan ketersediaan polisi yang terlatih dalam memberikan layanan yang sensitif gender	100.00	80.00	80.00
Cakupan ketersediaan jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	50.00	80.00	80.00
Cakupan ketersediaan hakim yang terlatih dalam menanggani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak	100.00	80.00	80.00
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	100.00	50.00	50.00
Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	67.00	50.00	50.00

Indikator SPM	Capaian		
	2014	2015	2016
Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	50.00	50.00	50.00
Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	100.00	100.00	100.00
Cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk melakukan reintegrasi sosial	100.00	100.00	100.00

Sumber data : BKBPP Kab. Buleleng,

Pembangunan di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Badan KBPP Kabupaten Buleleng. Kondisi pegawai yang menangani Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Pangan tersaji pada tabel berikut :

TABEL 78
Kondisi Pegawai Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

No	Uraian	Jumlah
1.	**Jumlah Pegawai**	10 Orang
	PNS	5 Orang
	Pegawai Harian /Kontrak	5 Orang
2.	**Pangkat dan Golongan**	
	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 Orang
	Penata Tk. I	3 Orang
	Penata Muda Tk.I	1 Orang
3.	**Tingkat Pendidikan**	
	S2	1 Orang
	SI/D4	3 Orang
	SMA/SMK/MTs	1 Orang
4.	**Jumlah Pejabat**	4 Orang
	Pejabat Setruktural :	
	Eselon IIb	1 Orang
	Eselon IIIb	1 Orang
	Eselon Iva	2 Orang

Sumber data : BKBPP Kab. Buleleng,

Prestasi dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diraih melalui Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng dengan Duta Anak di bidang jaringan perwakilan Provinsi Bali ke Tingkat Forum Anak Nasional atas nama Desak Putu Salsabhila Ardiantari Putri dari SMAN 1 Singaraja.

15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA.

Pembangunan Bidang Keluarga Berencana diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan mengendalikan jumlah kelahiran. Pengendalian penduduk dilakukan melalui Program Keluarga Berencana (KB) sehingga kemampuan daya dukung alam dan lingkungan tetap seimbang. Pengendalian kelahiran dan kematian melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi secara optimal. Untuk itu program Keluarga Berencana mendapat prioritas, demi terwujudnya Peningkatan Keluarga Sejahtera yang dilandasi sikap dan prilaku sesuai dengan Falsafah Tri Hita Karana.

Kebijakan penyelenggaraan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ditujukan untuk :

- Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga dengan Mengendalikan Angka Kelahiran.
- Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
- Meningkatkan Kualitas Lingkungan Keluarga.
- Meningkatkan Kemampuan Teknis bagi PLKB.
- Meningkatkan Penyuluhan Keluarga Berencana bidang Pasangan Usia Subur (PUS) bagi Remaja Sekolah.

Sedangkan sasaran penyelenggaraan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera antara lain :

- Terwujudnya peningkatan kemandirian pelaksanaan KB.
- Terwujudnya keluarga sejahtera.

Tahun 2012 tingkat pencapaian standar pelayanan minimal dalam hal tingkat pencapaian prevalensasi peserta KB aktif dengan capaian kinerja sebesar 86,19 %. Pencapaian ini bersumber dari jumlah peserta program KB aktif berjumlah 113.025 peserta dibagi jumlah pasangan usia subur 131.137 peserta dikali 100%. Presentase Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga sejahtera I sebesar 30,32 % dengan jumlah keluarga para sejahtera dan sejahtera I 56.552 yang dibagi dengan jumlah keluarga 186.547 dikali 100%

Pencapaian sasaran kinerja kegiatan lainnya meliputi :

a) Tingkat Prevalensasi Kesertaan KB Pria mencapai 20,95 % terhadap PB.
b) Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja 100,00 % dari target KKP Propinsi.
c) Jumlah Keluarga Balita Aktif dari sasaran 31.235 yang aktif 30.189 (94, 63 %)

Pembagian pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Buleleng untuk tahun 2012, terinci melalui belanja SKPD sebagai berikut :

Tabel 79

pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Buleleng untuk tahun 2012

Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung	3.293.931.800,00	3.095.510.685,00	93,98
Belanja Langsung	2.625.078.100,00	2.563.200.302,00	97,64
Belanja Pegawai	77.100.000,00	76.800.000,00	99,61
Belanja Barang dan Jasa	1.700.397.300,00	1.662.646.552,00	97,78
Belanja Modal	802.107.700,00	778.280.650,00	97,03
Belanja Pemeliharaan	45.473.100,00	45.473.100,00	100,00
Total	5.919.009.900,00	5.658.710.987,00	95,60

Pelaksanaan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera untuk tahun 2012 dianggarkan melalui APBD Kabupaten Buleleng sebesar Rp.

2.625.078.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.563.200.302,- atau tercapai (97,64 %).

Pelaksanaan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tahun 2013 dengan Capaian kinerja apembangunan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera ditunjukkan melalui indicator berikut :

1. Tingkat Prevalensasi peserta KB aktif dengan capaian kinerja sebesar 86,20 %, angka ini sebagi perbandingan jumlah peserta program KB aktif 114.427 peserta dengan jumlah pasangan usia subur 132.741.
2. Rasio petugas lapangan KB /PKB (PLKB/PKB) ; 1,11 Rasio ini didapat dari perbandingan jumlah desa/ kelurahan yang berjumlah 148 dengan jumlah petugas PLKB/PKB, 133 orang.
3. Pencapaian sasaran kinerja kegiatan lainnya meliputi :
   Tingkat Prevalensasi Kesertaan KB Pria (1.445 Peserta) mencapai 9,30 % terhadap PB (15.538 Peserta).
   Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja 100,00 % dari target KKP Propinsi.
   Jumlah Keluarga Balita Aktif dari sasaran 37.025 yang aktif 32.788 (88,56 %).

Pelaksanaan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera untuk tahun 2013 dianggarkan melalui APBD Kabupaten Buleleng melalui belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.398.472.257,00 yang terealisasi sebesar Rp. 3.308.722.096,00 atau tercapai 97,36% dan belanja langsung sebesar Rp. 4.452.530.520,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.316.107.726,- atau tercapai (96,95 %).

Tahun 2014 pelaksanaan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diarahkan dengan tujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana (KB). Persentase wanita usia 15-49 tahun di Kabupaten Buleleng yang pernah kawin dan pernah menggunakan alat atau cara KB adalah 86,54 persen, sisanya 13,46 persen tidak pernah atau belum menggunakan alat atau cara KB. Sementara dari wanita yang pernah memakai alat KB, proporsi wanita yang sedang menggunakan alat atau cara KB sebesar 74,78 persen.

Gambar 12
Penggunaaan alat kontrasepsi KB di Kabupaten Buleleng, 2013

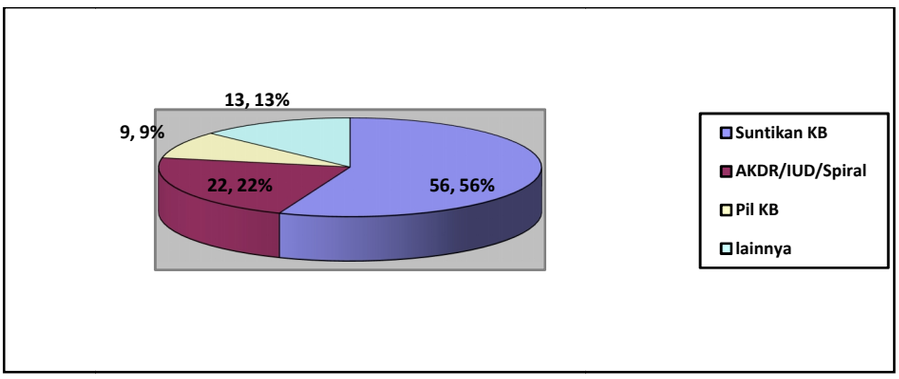

Sumber : Tinjauan kesejahteraan rakyat Kab. Buleleng, 2014.

Menurut alat kontrasepsi yang digunakan, pemakai kontrasepsi suntikan dan IUD merupakan alat KB yang banyak digunakan dengan proporsi masing – masing 60,70 persen dan 17,64 persen, sedangkan cara KB lainnya Pil KB (10,04%). MOW (5,71%), susuk KB (2,94%), serta kondom (1,01%). Sementara yang memakai alat tradisional hanya sedikit yaitu 0,65 persen.

Rata – rata jumlah anak yang dilahirkan hidup per wanita usia 15-49 tahun (WUS) atau perbandingan anak lahir hidup terhadap seluruh wanita usia 15-19 Tahun adalah 1,98 anak, sedangkan rata – rata jumlah anak lahir hidup terhadap wanita usia 15-49 tahun pernah kawin sebesar 2,35 anak.

Indikator Kinerja Urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS.

1. Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (2,5%), Jumlah PUS yg istrinya berusia <20 th : 3.179, Jumlah PUS yg istrinya berusia 15 - 49 th : 125.169.
2. Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif 83,46%, Jumlah peserta KB aktif : 104.469, Jumlah PUS : 125.169.

3. Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) 5%,Jumlah PUS tak ber KB : 64.312,Jumlah PUS 15 - 49 tahun : 125.169.
4. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB 84,54%, Jumlah Anggota BKB ber KB : 25.500, Jumlah PUS anggota BKB : 30.162.
5. Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 84,66%,Jumlah Anggota UPPKS ber KB : 2.054,Jumlah seluruh anggota UPPKS yang PUS : 2.426.
6. Ratio Petugas lapangan KB/Penyuluh KB / Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 Petugas disetiap 2 desa/ kelurahan, Jumlah Desa / Kelurahan : 148,PLKB / PKB : 131.
7. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD 1 (satu) petugas di setiap Desa / Kelurahan,Jumlah Desa /Kelurahan : 148,Jumlah PPKBD Keterangan : 148.

Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi, Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi utk Memenuhi Permintaan Masyarakat 30% setiap tahun,Kebutuhan alat dan obat : 42.265, Penyediaan oleh Pemerintah Pusat (BKKBN) : 68.732 dan Pelayanan Swasta : 8.391.

Penyediaan Informasi Data Makro, Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100% setiap Tahun, Rekap data mikro keluarga Desa / Kelurahan : 148 Desa / Kelurahan, Jumlah Desa / Kelurahan : 148 Desa / Kelurahan.

Alokasi dan realisasi belanja langsung pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Badan KB dan PP Kabupaten Buleleng Tahun 2014 :

Tabel 80
Alokasi dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, 2014

Uraian Belanja Langsung	Alokasi	Realisasi	%
Belanja Pegawai	141.650.000,00	141.650.000,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	3.186.601.411,00	3.143.443.372,00	98,65
Belanja Modal	678.204.240,00	204.310.600,00	30,13
Belanja Pemeliharaan	97.630.000,00	97.618.000,00	99,99

Prestasi yang diraih tahun 2014.

1. Juara II Tk. Propinsi Bali Lomba Keluarga Harmonis atas nama pasangan Ir. Nyoman Sutrisna, MM dengan Janarti, SE.
2. Juara I Tk. Propinsi Bali Lomba Duta Genre (Generasi Berencana) Putra atas nama I Gede Dharma Arya Wicaksana dari PIK Undiksha Singaraja.
3. Juara II Tk. Propinsi Bali Lomba Duta Genre (Generasi Berencana) Putri atas nama Ayu Candra Dewi Wesnawati dari PIK Undiksha Singaraja.
4. Juara III Tk. Propinsi Bali Lomba Motivator KB Pria atas nama Saefudin dari Desa Sumberkima Kecamatan Gerokgak.
5. Juara III Tk. Propinsi Bali Lomba Kelompok KB Pria atas nama Kelompok Ari Mandiri dari Desa Bondalem Kecamatan Tejakula.
6. Juara III Tk. Propinsi Bali Lomba KB Lestari 20 Tahun atas nama Pasangan Made Sudiarta dan Putu Yulianingsih dari Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula.

Pelaksanaan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tahun 2015 dengan Indikator Kinerja Urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

a) Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS
   - Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (2,5%) ; Jumlah PUS yg istrinya berusia <20 th : 3.179 , Jumlah PUS yg istrinya berusia 15 - 49 th : 125.169
   - Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif 81,29% ; Jumlah peserta KB aktif : 108.253, Jumlah PUS : 133.174
   - Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) 10.74% ; Jumlah PUS tak ber KB : 20.700, Jumlah PUS 15 - 49 tahun : 192.665
   - Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB 84,79% ; Jumlah Anggota BKB ber KB : 25.541, Jumlah PUS anggota BKB : 30.121
   - Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 82,48% ; Jumlah Anggota UPPKS ber KB : 1.768, Jumlah seluruh anggota UPPKS yang PUS : 2.144.
   - Ratio Petugas lapangan KB/Penyuluh KB / Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 Petugas disetiap 2 desa/ kelurahan ; Jumlah Desa / Kelurahan : 148, PLKB / PKB : 135.
   - Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD 1 (satu) petugas di setiap Desa / Kelurahan ; Jumlah Desa /Kelurahan : 148, Jumlah PPKBD Keterangan : 148

b) Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi
   - Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi utk Memenuhi Permintaan Masyarakat 30% setiap tahun ; Kebutuhan alat dan obat : 26.128, Penyediaan oleh Pemerintah Pusat (BKKBN) : 29.530, Pelayanan Swasta : 68.148.

c) Penyediaan Informasi Data Makro

- Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100% setiap Tahun ; Rekap data mikro keluarga Desa / Kelurahan : 148 Desa / Kelurahan , Jumlah Desa / Kelurahan : 148 Desa / Kelurahan.

Alokasi dan realisasi belanja langsung pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Badan KB dan PP Kabupaten Buleleng Tahun 2015 :

Tabel 81
Alokasi dan realisasi belanja langsung Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2015

Uraian Belanja Langsung	Alokasi	Realisasi	%
Belanja Pegawai	141.300.000,00	141.270.000,00	99,98
Belanja Barang dan Jasa	3.485.300.400,20	2.928.868.792,00	84,03
Belanja Modal	1.080.394.264,00	986.270.850,00	91,29
Belanja Pemeliharaan	70.125.000,00	66.636.850,00	95,03

Sumber data ; Badan KB PP Kab. Buleleng

a. **Prestasi yang diraih tahun 2015**

7. Juara II Tingkat Provinsi Lomba Motivator KB Pria atas nama I Ketut Ariawan Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula.
8. Juara III Tingkat Provinsi Lomba Rumah Sakit Tipe B : RSUD Kabupaten Buleleng.
9. Juara III Tingkat Provinsi Lomba KB Perusahaan : UD Sari Karya Kabupaten Buleleng.
10. Juara II Tingkat Provinsi Pengelola BKB Tahun 2015.
11. Juara II Tingkat Provinsi, BKB Melati Desa Kerobokan Kecamatan Sawan.
12. Juara II Tingkat Provinsi, Kader BKB atas nama Luh Budiani Desa Kerobokan Kecamatan Sawan.

13. Juara III Tingkat Provinsi Kelompok UPPKS Bukit Sari Desa Jineng Dalem Kecamatan Buleleng.
14. Juara I Tingkat Kabupaten, BKB Melati Desa Kerobokan Kecamatan Sawan.
15. Juara I Tingkat Kabupaten Kader BKR atas nama Ketut Mertama Desa Jineng Dalem Kecamatan Bueleng.
16. Juara I Tingkat Kabupaten Kader BKL atas nama Ketut Sarianta Desa Selat Kecamatan Sukasada.
17. Juara I Tingkat Kabupaten Kelompok UPPKS Bukit Sari Desa Jineng Dalem Kecamatan Buleleng.
18. Juara I Lomba Duta Generasi Berencana (GenRe) Putera Tingkat Provinsi Bali Tahun 2015 atas nama Gusti Ayu Putu Chandra Mahasari dari PIK Mahasiswa Yowana Dharma Satya Undiksha Singaraja.
19. Juara II Lomba Duta Generasi Berencana (GenRe) Putera Tingkat Provinsi Bali Tahun 2015 atas nama I Gede Anggan Bayu Permana dari PIK Mahasiswa Yowana Dharma Satya Undiksha Singaraja.
20. Juara II Lomba Duta Generasi Berencana (GenRe) Putera Tingkat Provinsi Bali Tahun 2015 atas nama Mayuni Puspita dari PIK Mahasiswa Yowana Dharma Satya Undiksha Singaraja.
21. Juara II Lomba PIK Remaja Unggulan Tingkat Provinsi Bali Tahun 2015 yang diraih oleh PIK Remaja Raka Rai Gerokgak.
22. Juara I Lomba Rap Tingkat Provinsi Bali Tahun 2015 atas nama Kusuma dan Dimas dari PIK Remaja Andrayuga SMKN 3 Singaraja.
23. Juara II Media Tradisional Tingkat Provinsi Bali Tahun 2015 atas nama Mas Stithaprajna Singgih Swandana dan Ayu Putri Alycia Dewi dari PIK Remaja Andrayuga SMKN 3 Singaraja.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, yaitu :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Kegiatan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Lingkungan Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operasional.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
- Kegiatan Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

5) Program Perencanaan Anggaran SKPD, dengan Kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD

6) Program Informasi Pembangunan Daerah, Kegiatan Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan

7) Program Keluarga Berencana, dengan Kegiatan Pelayanan KIE

8) **Program Kesehatan Reproduksi Remaja**, melalui Kegiatan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

9) **Program Pelayanan Kontrasepsi**, Kegiatan Pelayanan Konseling KB.

10) **Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri**, dengan Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB

11) **Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga**, dengan Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan.

12) **Program Pengembangan Data dan Informasi**
    - Kegiatan Pengumpulan, Updating, dan Analisa Data Informasi Capaian Target
    - Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Informasi
    - Kegiatan Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan
    - Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdapat 3 (tiga) Jenis pelayanan dasar dengan 9 (sembilan) jumlah indikator sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 65/Hk-010/BS/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk dapat melaksanakan target Pencapaian dan Penerapan SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawab yaitu Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Adapun kondisi Pelayanan Dasar Bidang Keluarga Berencanasampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 82
Kondisi Pelayanan Dasar Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Hasil Capaian (%)		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
A	Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan	1. Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%)	100.00	95.00	95.00

	Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS	2. Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (65%)	100.00	86.50	86.50
		3. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) 5%	100.00	25.51	25.51
		4. Cakupan Anggota Bina Keluar-ga Balita (BKB) ber-KB (70%)	100.00	86.81	86.81
		5. Cakupan PUS peserta KB Ang-gota Usaha Peningkatan Pen-dapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%)	100.00	89.70	89.70
		6. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan	100.00	25.12	25.12
		7. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan	100.00	100.00	100.00
B	Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi	8. Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	100.00	25.00	25.00
C	Penyediaan Informasi Data Mikro	9. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun	100.00	100.00	100.00

Sumber data BKBPP Kab. Buleleng,

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

a) Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%) 3.46%, Jumlah PUS yg istrinya berusia <20 th : 3.179, Jumlah PUS yg istrinya berusia 15 - 49 th : 91.763
b) Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif 68.41%, Jumlah peserta KB aktif : 62.770, Jumlah PUS : 191.760.

c) Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) 20.88%, Jumlah PUS tak ber KB : 19.161, Jumlah PUS 15 - 49 tahun : 91.763.
d) Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB 84,79%, Jumlah Anggota BKB ber KB : 25.539, Jumlah PUS anggota BKB : 30.121.
e) Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 82,84%, Jumlah Anggota UPPKS ber KB : 1.768, Jumlah seluruh anggota UPPKS yang PUS : 2.134.
f) Ratio Petugas lapangan KB/Penyuluh KB / Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 Petugas disetiap 2 desa/ kelurahan 93.24%, Jumlah Desa / Kelurahan : 148, PLKB / PKB : 138.
g) Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD 1 (satu) petugas di setiap Desa / Kelurahan 100%, Jumlah Desa /Kelurahan : 148, Jumlah PPKBD Keterangan : 148.
i. Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi utk Memenuhi Permintaan Masyarakat 30% setiap tahun, Kebutuhan alat dan obat : 13.261, Penyediaan oleh Pemerintah Pusat (BKKBN) : 3.000, Pelayanan Swasta : 7.846.
h) Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100% setiap Tahun, Rekap data mikro keluarga Desa / Kelurahan : 148 Desa / Kelurahan, Jumlah Desa / Kelurahan : 148 Desa / Kelurahan.

Realisasi anggaran untuk pelaksanaan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tersaji pada tabel berikut :

Tabel 83
SPM Urusan keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

KEGIATAN	DANA	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp.	%	
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Pelayanan Administrasi Perkantoran				
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.414.000	17.410.100	99,98	100
b) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	48.444.660	43.547.376	89,89	100
c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	220.984.764	218.727.626	98,98	100
d) Penyediaan jasa Pemeliharaan	23.600.000	19.918.400		

Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional			84,40	99,36
e) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	259.078.125	258.556.075	99,80	100
f) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	45.900.000	45.900.000	100	100
g) Penyediaan Alat Tulis Kantor	19.087.500	19.087.500	100	100
h) Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	8.790.000	8.445.424	96,08	99,99
i) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13.140.100	13.140.100	100	100
j) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	205.411.000	198.936.237	96,85	100
k) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.375.000	3.375.000	100	100
l) Penyediaan Makanan dan Minuman	21.000.000	21.000.000	100	100
m) Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/dalam daerah	100.000.000	98.907.655	98,91	99,26
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	537.879.155	290.370.000	53,98	100
b) Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Upacara	170.300.000	166.680.000	97,87	100
c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	160.518.000	88.422.886	55,09	100
d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	41.768.988	41.541.699	99,46	100
e) Pemeliharaan rutin/Berkala Alat-alat kantor/RT	15.000.000	15.000.000	100	100
Peningkatan Disiplin Aparatur				
a) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	25.740.000	25.740.000	100	100
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15.350.000	15.184.602	98,92	100
b) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	17.355.000	17.350.000	99,97	100
Program Perencanaan Anggaran SKPD				
a) Penyusunan anggaran SKPD	92.374.000	91.691.155	99,26	100
Program Informasi Pembangunan Daerah				
a) Penyelenggaraan Pameran /Pawai Pembangunan	23.000.000	22.999.000	100	100
Program Keluarga Berencana				
a) Pelayanan KIE	1.424.707.850	1.422.678.850	99,86	100
Program Kesehatan Reproduksi Remaja				
a) Advokasi dan KIE tentang	343.931.100	321.072.076	93,35	166,36

kesehatan reproduksi remaja				
Program Pelayanan Kontrasepsi				
a) Pelayanan Konseling KB	202.439.800	196.130.838	96,88	100
Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB-KR yang mandiri				
a) Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB	458.249.000	441.945.000	96,44	100
Program Penyiapan Tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga				
a) Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	248.531.000	245.397.200	98,74	100
Program Pengembangan data dan Informasi				
a) Pengumpulan, updating dan analisa data informasi capaian target	611.970.000	409.050.700	66,84	97,22
b) Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Informasi	29.330.000	29.149.646	99,39	100
c) Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan	6.812.000	6.806.000	99,91	100
d) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	43.500.000	43.500.000	100	100

Sumber data ; BKBPP Kab. Buleleng,

Permasalahan / Kendala dalam penyelenggaraan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah :

- Kegiatan pemberdayaan keluarga terkait dengan kelompok kegiatan (Poktan) BKB, BKR, BKL, BLK dan PIK-KRR baik dari segi kualitas dan kuantitas masih relatif rendah.
- Masih kurangnya Tenaga Teknis khususnya Tingkat Kabupaten.
- Sebagai Lembaga baru sarana dan prasarana relatif belum memadai seperti kendaraan roda empat dan roda dua untuk tim teknis di Kabupaten .
- Belum terbentuknya UPTB bidang Keluarga Berencana untuk perpanjangan tangan Badan KB-PP di tingkat Kecamatan.

Solusi untuk mengatasi permasalahan adalah :

- Mengadakan sosialisasi Program Keluarga Berencana.
- Mengadakan pelatihan bagi Petugas Lapangan Keluarga Berencana.
- Mengadakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang program KB.

Beberapa prestasi dalam Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Tahun 2016 adalah :

1. Tanda Penghargaan 'Manggala Karya Kencana' kepada Bpk. Putu Agus Suradnyana sebagai Bupati Buleleng, Bali.
2. Juara I Putri Tingkat Provinsi Bali Lomba Pemilihan Duta Mahasiswa GenRe atas nama Made Darmaprathiwi Adiningsih.
3. Juara III Tingkat Provinsi Bali Lomba KB Perusahaan.
4. Juara III Tingkat Provinsi Bali Lomba Keuarga Harmonis.

Pembangunan di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Bahagia dilaksanakan oleh Badan KBPP Kabupaten Buleleng.

Kondisi pegawai pada Badan KBPP Kabupaten Buleleng yang menyelenggarakan Urusan keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tersaji pada tabel berikut :

TABEL 84
Kondisi Pegawai pada Urusan keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Pegawai	185 Orang
	PNS	49 Orang
	Pegawai Harian /Kontrak	150 Orang
2.	Pangkat dan Golongan	
	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 Orang
	Pembina	11 Orang
	Penata Tk. I	18 Orang
	Penata	5 Orang
	Penata Muda Tk.I	1 Orang
	Pengatur Tk.I	1 Orang
	Pengatur	1 Orang
	Pengatur Muda Tk.I	9 Orang
	Pengatur Muda	2 Orang
3.	Tingkat Pendidikan	
	S2	3 Orang
	SI/D4	17 Orang
	D3	2 Orang
	SMA/SMK/MTs	27 Orang
4.	Jumlah Pejabat	14 Orang
	Pejabat Struktural :	14 Orang
	Eselon IIb	1 Orang
	Eselon IIIa	1 Orang
	Eselon IIIb	3 Orang
	Eselon Iva	9 Orang

No	Uraian	Jumlah
	Pejabat Fungsional	26 Orang
	1) Petugas Penyuluh KB	26 Orang

Sumber data : BKBPP Kab. Buleleng.

16. URUSAN PERHUBUNGAN.

Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng merupakan salah satu unsur pelaksanan Pemerintah Kabupaten Buleleng setingkat Eselon II yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi Daerah di bidang Perhubungan dan fungsi merumuskan kebijakan teknis, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evluasi, penyelenggaraan perijinan dan pelaksanaan ketata usahaan dan rumah tangga kantor serta urusan strategis yang menyangkut pelayanan dasar kepada masyarakat pengguna jasa perhubungan baik darat, laut dan udara dalam rangka memperlancar pertumbuhan ekonomi bangsa. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah yang berkesinmabungan serta meningkatkan perekonomian masyarakat disegala bidang.

Tujuan dan sasaran penyelenggaraan urusan Perhubungan adalah terwujudnya sistem sarana dan prasarana pelayanan jasa perhubungan yang terpadu, handal dan bedaya saing. Atas dasar kondisi tersebut, tujuan penyelenggaraan urusan perhubungan adalah :

1) Meningkatkan kelancaran, keamanan dan keselamatan pelayanan jasa Perhubungan untuk menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah.
2) Meningkatkan kemampuan daerah dan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan potensi daerah.
3) Meningkatkan pelaksanaan penegakkan hukum.
4) Meningkatkan disiplin dan profesionalisme aparatur Pemerintah.

Sedangkan sasaran penyelenggaraan urusan Perhubungan antara lain :

1) Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai untuk mendorong pengembangan potensi daerah.
2) Meningkatnya pemanfaatan sumber potensi daerah dengan indikator sasaran peningkatan pendapatan asli daerah.

3) Meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum dibidang Perhubungan.
4) Meningkatnya disiplin kerja dan kinerja aparatur pemerintah.

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal pelaksanaan urusan perhubungan tahun 2012:

Jumlah penumpang angkutan darat

Jumlah angkutan darat

(12.916/494.218 X 100%) = 38,26. %.

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng untuk tahun 2012, terinci melalui belanja SKPD sebagai berikut :

Tabel 85

pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng untuk tahun 2012

Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung	5.768.147.100,-	5.506.669.015,-	95,47
Belanja Langsung	3.215.715.440,-	3.045.002.397,-	94,69
Belanja Pegawai	*351.670.000,-*	*338.820.000,-*	*96,18*
Belanja Barang Jasa	*2.039.394.000,-*	*1.940.740.188,-.*	*95,16*
Belanja Modal	*824.651.440,-*	*765.442.209,-*	*92,82*
Total	8.983.862.540,-	8.551.071.412,-	95,18

Capaian kinerja urusan perhubungan tahun 2013 ditunjukkan melalui indikator angkutan darat yang mencapai 11,15% sebagai perbandingan jumlah angkutan darat 67.595 dengan jumlah penumpang angkutan darat yang berjumlah 606.104 orang. Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dialokasikan belanja daerah sebesar Rp. 12.072.115.699,00 yang terealisasi Rp. 11.665.229.138,00 atau 96,63%, yang terdiri atas belanja tidak langsung dengan anggaran Rp. 6.620.048.299,00 dan terealisasi Rp. 6.398.719.218,00 atau 96,65% serta belanja langsung dengan anggran sebesar Rp. 5.452.067.400,00 dengan realisasi Rp. 5.266.509.920,00 atau 96,56%.

Sampai akhir tahun 2013, Kabupaten Buleleng telah mampu memperbaiki kondisi sarana jalan sepanjang 594.856 Km dalam kondisi

mantap, terdiri dari Jalan Nasional sepanjang : 155,750 KM, Jalan Propinsi sepanjang : 105,880 KM, Jalan Kabupaten sepanjang : 878,192 KM. Jumlah jembatan yang ada di Kabupaten Buleleng adalah 285 buah dengan panjang keseluruhan sepanjang 3.101,85 meter dengan rincian sebagai berikut : jembatan Nasional :1.637,10 M, Jembatan Propinsi: 263,40 M, Jembatan Kabupaten : 1.201,35 M, dengan kondisi jembatan kabupaten sebagai berikut baik: 453,50 M, Sedang: 708,25 M dan Rusak: 39,6 M.

Dalam rangka melayani kebutuhan arus penumpang baik antara penumpang dalam kota, desa, maupun antar Propinsi telah pula dilengkapi dengan sarana penunjang berupa pembangunan fasilitas terminal yang berlokasi di : Desa Sangket, Kelurahan Penarukan, Kelurahan Banyuasri, Desa Pancasari, dan di Kota Seririt. Disamping adanya fasilitas perhubungan darat, sementara itu transportasi laut telah diupayakan pula, dengan tidak beroperasinya Pelabuhan Buleleng sejak beberapa puluh tahun yang lalu, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah pula mengupayakan penyediaan fasilitas dermaga Pelabuhan Laut di Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak yang pembangunannya mendapat bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat, dan nantinya akan dapat merupakan pelabuhan dagang dan pelabuhan bongkar muat barang. Salah satu segi penting dalam usaha pengembangan pembangunan ekonomi, guna memeratakan pembangunan secara regional di Propinsi Bali pada umumnya, dan Kabupaten Buleleng pada khususnya, sangatlah perlu dikembangkan prasarana perhubungan udara yang akan dapat memicu bangkitnya ekonomi Buleleng melalui kemudahan akses bagi kalangan dunia Pariwisata maupun kalangan dunia usaha lainnya yang akan datang ke Kabupaten Buleleng. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Buleleng sejak Tahun 2000 telah mengambil inisiatif untuk membangun fasilitas perhubungan udara berupa pembangunan Lapangan Terbang Perintis yang diberi nama "LAPANGAN AIR STRIP LETKOL WISNU" yang terletak di Dusun Pegametan, DesaSumberkima, Kecamatan Gerokgak, dengan jarak 60 Km dari Kota Singaraja, dan 30 Km dari kota Gilimanuk, dengan kondisi sebagai berikut : Lahan yang tersedia: luas 14 Ha, Landasan (Run Way):

panjang 841 m, dan lebar 18 m (sudah diperpanjang melalui pengadaan tanah 3 Ha lebih), Jalan masuk pesawat : panjang 77,50 m dan lebar 15 m, Pelataran parkir (Apront) : panjang 60,00 m, dan lebar 40 m dan Fasilitas terminal : panjang 10,00 m, dan lebar 8 m.

Jumlah angkutan umum yang sudah ada yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota pada Tahun 2014 berjumlah 1200 (Unit). Sedangkan jumlah angkutan umum yang seharusnya ada yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota sebanyak 1200 (Unit). Fasilitas perlengkapan jalan (Rambu, Marka, dan Guardrill) yang sudah ada pada Tahun 2013 ; 191.513 Unit dan Tahun 2014 ; 192.708 Unit. Sedangkan fasilitas perlengkapan jalan (Rambu, Marka, dan Guardrill) yang seharusnya ada berturut – turut pada Tahun 2013 – 2014 berjumlah ;192.708 Unit dan 193.985 Unit.

Jumlah halte yang sudah ada pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek sejumlah 11 Unit. Sedangkan jumlah halte yang seharusnya ada pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek adalah 11 Unit. Untuk terminal angkutan penumpang yang sudah ada yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek sebanyak 5 Unit. Jumlah Unit Pengujian kendaraan bermotor yang sudah ada 1 Unit , dari Unit Pengujian kendaraan bermotor yang seharusnya ada sebanyak 1 Unit. Untuk SDM di bidang Terminal yang sudah ada sebanyak 50 orang. SDM di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor yang sudah ada sampai Tahun 2014 berjumlah 7 (Orang). Angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/kota yang sudah menerapkan standar keselamatan sebanyak 1200 (unit).

Alokasi dan realisasi belanja langsung pelaksanaan program dan kegiatan pada Dishub Kabupaten Buleleng Tahun 2014 :

Tabel 86
Alokasi dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Pada Dinas Perhubungan Kab. Buleleng, 2014

Uraian Belanja Langsung	Alokasi	Realisasi	%
Belanja Pegawai	591.970.000,00	566.670.000,00	95,73
Belanja Barang dan Jasa	3.434.036.250,00	3.311.154.533,00	96,42

Belanja Modal	1.023.316.000,00	1.007.891.600,00	98,49

Keberhasilan pelaksanaan urusan perhubungan tahun 2015 ditandai dengan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Buleleng mempertahankan Tropy Wahana Tata Nugraha yang ke 9 kalinya pada Tahun 2015, sebagai penghargaan Pemerintah untuk daerah yang berprestasi dalam bidang tertib lalu lintas.

Tabel 87
Alokasi dan Realisasi Belanja Urusan Perhubungan Tahun 2015

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2015	%
2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	2.714.527.000,00	3.067.284.470,00	113,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.714.527.000,00	3.067.284.470,00	113,00
Retribusi Daerah	2.714.527.000,00	3.067.284.470,00	113,00
BELANJA DAERAH	12.192.383.668,30	12.028.828.632,00	98,66
BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.271.189.900,00	7.167.634.552,00	98,58
BELANJA PEGAWAI	7.271.189.900,00	7.167.634.552,00	98,58
BELANJA LANGSUNG	4.921.193.768,30	4.861.194.080,00	98,78
BELANJA PEGAWAI	636.450.000,00	631.320.000,00	99,19
BELANJA BARANG DAN JASA	3.156.170.768,30	3.111.071.335,00	98,57
BELANJA MODAL	1.128.573.000,00	1.118.802.745,00	99,13
SURPLUS/(DEFISIT)_IRA	(9.477.856.668,30)	(8.961.544.162,00)	94,55

Sumber data ; Dinas Perhubungan Kab. Buleleng, 2015

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam mempertahankan Prestasi di bidang Tertib Lalu lintas melalui Dinas Perhubungan berhasil meraih 9 (sembilan) kali Tropy Wahana Tata Nugraha Tingkat Nasional dan 2 (dua) kali meraih plakat Wahana Tata Nugraha seperti daftar di bawah ini :

- Tahun 2003 jenis penghargaan TROPHY
- Tahun 2004 jenis penghargaan TROPHY
- Tahun 2005 jenis penghargaan TROPHY
- Tahun 2006 jenis penghargaan TROPHY
- Tahun 2007 jenis penghargaan TROPHY

- Tahun 2008 jenis penghargaan TROPHY
- Tahun 2009 jenis penghargaan TROPHY
- Tahun 2010 jenis penghargaan PLAKAT
- Tahun 2011 jenis penghargaan PLAKAT
- Tahun 2012 jenis penghargaan TROPHY
- Tahun 2013 jenis penghargaan TROPHY
- Tahun 2014 jenis penghargaan TROPHY
- Tahun 2015 jenis penghargaan TROPHY

Pada kegiatan Pemilihan dan Pemberian Pengargaan sopir / Juru mudi / Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) Tahun 2015 terpilih 4 (empat) orang yang mewakili Kabupaten Buleleng dalam Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) Tk. Propinsi Bali yaitu : 1. Ketut Arimawan, 2. Ketut Sutapa, 3. Nyoman Suriawan, 4. Made Suartada dan 5. Made Suka Mahajaya.

Mengingat ketertiban dan kelancaran lalu Lintas merupakan hak masyarakat dan kedepan tantangan tertib lalu lintas menjadi suatu kebutuhan perlu didukung dengan Sumber daya Manusia (SDM) yang memadai , sehubungan hal tersebut akan dilaksanakan Diklat-diklat teknis.

Program dan kegitan yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan di bidang perhubungan meliputi :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan antara lain :

- Penyediaaan Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan Komponen instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah / dalam daerah

2) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, dengan kegiatan antara lain :
   - Penyelnggaraan dan Pengadaan Sarana / Prasarana Upacara
   - Pemeliharaan rutin/Berkala gedung kantor
   - Pemeliharaan rutin / berkala kend.Dinas / Operasional
   - Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
   - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
   - Pendataan dan inventarisasi aset barang milik daerah

3) **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**, dengan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

4) **Program Perencanaan Anggaran SKPD**, dengan kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD.

5) **Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan**, dengan kegiatan :
   - Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
   - Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat.
   - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
   - Peningkatan Pengelolaan Fasilitas Perparkiran.

6) **Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ**, dengan kegiatan ehabilitasi / Pemeliharaan sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor.

7) **Program Peningkatan Pelayanan Angkutan**, dengan kegiatan :
   - Penyuluhan bagi para sopir / juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang
   - Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang
   - Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
   - Penciptaan Kemananan penumpang di lingkungan Terminal.
   - Fasilitas Perijinan di bidang Perhubungan.
   - Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban lalu Lintas dan Angkutan.
   - Pemilihan dan Pemberian Penghargaan sopir / juru mudi / Awak KendaraanUmum Teladan (AKUT).

8) Program Pengendalian dan pengamanan Lalu Lintas, dengan kegiatan

- Pengadaan Rambu – rambu lalu lintas.
- Pengadaan Marka Jalan.
- Pengadaan Pagar Pengaman Jalan.

Bidang Perhubungan terdapat 4 (empat) jenis pelayanan dasar dengan 26 (dua puluh enam) jumlah indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM.81/2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM.2/2013 Tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Dari 26 jenis indikator, untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng yang dapat terisi hanya 11 indikator mengingat ini erat hubungannya dengan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, sedangkan indikator 12 – 26 kewenangan pengisian ada pada Dinas Perhubungan Tingkat I karena program dan kegiatan yang kewenangannya ada pada Provinsi. Untuk dapat melaksanakan target Pencapaian dan Penerapan SPM Bidang Perhubungan di Kabupaten Buleleng dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawab yaitu Dinas Perhubungan. Adapun kondisi Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tebel 88

kondisi Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan sampai dengan tahun 2016

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator SPM		Hasil Capaian (%)		
					2014	2015	2016
1	Angkutan Jalan	1 Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	1	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	27.00	80.00	80.00

			2	Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.	50.00	80.00	80.00
		2 Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	3	Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	10.00	15.00	15.00
			4	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	5.00	100.00	100.00
		3 Fasilitas Perlengkapan Jalan	5	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	78.67	95.00	95.00
			a.	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Kabupaten/Kota.	77.87	95.00	95.00
			b.	Tersedianya fasilitas penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	65.77	100.00	100.00

		4 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	6	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	70.67	95.00	95.00
		5 Sumber Daya Manusia (SDM)	7	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.	46.00	90.00	90.00

				8	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	80.77	100.00	100.00
				9	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.	175.00	65.00	65.00
				10	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	45.00	60.00	60.00
		6	Keselamatan	11	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.	78.00	100.00	100.00
2	Angkutan Sungai dan Danau.	1	Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau	12	Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	0.00	0.00	0.00
				13	Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kabupaten/Kota yang menghubung-kan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	0.00	0.00	0.00

		2	Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau	14	Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau.	0.00	0.00	0.00
		3	Keselamatan	15	Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten/Kota.	0.00	0.00	0.00
		4	Sumber Daya Manusia (SDM)	16	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau.	0.00	0.00	0.00
3	Angkutan Penyeber ang-an	1	Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberang an	17	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.	0.00	0.00	0.00
				18	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubung-kan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten/Kota.	0.00	0.00	0.00

		2	Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan	19	Tersedianya pelabuhan penyebe-rangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penye-berangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.	0.00	0.00	0.00

Sumber data : Dinas Perhubungan Kab. Buleleng,

Tahun 2016 dapat dilihat dari keberhasilan Pemerintah Kabupaten Buleleng mempertahankan Tropy Wahana Tata Nugraha, bentuk penghargaan dari pemerintah untuk daerah yang berhasil menata tertib berlalu lintas di daerahnya. Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2016 merupakan penghargaan ke 10 yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2016.

Sebagai usaha untuk mewujudkan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga sebagai pelaksanaan PP Nomor 37 Tahun 2011 serta untuk mencapai salah satu kunci sukses Pilar 1 yaitu Manajemen Keselamatan LLAJ (Safer Management) dengan Penyelarasan koordinasi melalui forum LLAJ. Maka Pemerintah Kabupaten Buleleng membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Kebupaten Buleleng tahun 2013 dengan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 550/222/HK/2013 Tanggal 7 Maret 2013. Panitia Pelaksana kegiatan Forum LLAJ Kabupaten Buleleng beranggotakan dari unsur Dinas Perhubungan, Kepolisian Resort Buleleng, Asisten Bidang Ekbang Setda Buleleng, Jasa Raharja Cabang Singaraja, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Bappeda, Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah, Satuan Polisi Pamong

Praja, Bagian Humas dan Protokol Setda Buleleng, Bagian Hukum Setda Buleleng dan Organda.

- Kegiatan yang telah dilaksanakan Forum LLAJ Kabupaten Buleleng meliputi Rapat –rapat rutin untuk membahas permasalahan – permasalahan Lalu Lintas sesuai dengan tupoksi masing-masing anggota forum dan mencarikan solusi terbaik terhadap permasalahan tersebut.
- Melaksanakan Sosialisasi, tentang pentingnya berlalu lintas yang benar, melalui Media masa, Slogan-slogan, penyuluhan-penyuluhan kepada para sopir Angkutan Umumg melalui kegiatan AKUT, Penyuluhan-penyuluhan kesekolah – sekolah guna mencegah dan meminimalisir angka kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi di Kabupaten Buleleng.
- Mendata Daerah Rawan Kecelakaan yang ada di Kabupaten Buleleng guna mencari Solusi penyebab kecelakaan tersebut.
- Menyempurnakan Sarana dan Prasaran Jalan seperti; Marka Jalan, Rambu lalu lintas, Traffic Light, Warning Light dan lainnya guna terciptanya Lalu Lintas yang Aman, Tertib, Lancar dan Nyaman.
- Melaksanakan Penertiban Parkir di Jalan Diponogoro Singaraja, Jalan Ngurah Rai Singaraja (Depan Hardys), Penertiban Pemasangan Baliho/Reklame di Jalan-Jalan Nasional, Provinsi maupun di Jalan Kabupaten yang dapat mengganggu ketertiban lalu Lintas.

Untuk penyelenggaraan Urusan Perhubungan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016 dialokasikan belanja daerah sebesar Rp.14.306.198.504 dan terealisasi sebesar Rp.14.213.198.365 atau 99,35 persen, yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp.8.101.631.749 dan terealisasi Rp.8.023.466.112 atau 99,04 persen dan belanja langsung sebesar Rp.6.204.566.755 dan realisasi anggaran untuk belanja langsung pada Dinas Perhubungan sebesar Rp.6.189.732.253 atau mencapai 99,76 persen, yang meliputi : Belanja Pegawai dengan anggaran Rp.768.325.000 dan terealisasi Rp.767.760.000, atau 99,93 persen, Belanja Barang dan jasa dengan anggaran Rp.3.503.751.028 dan terealisasi Rp.3.491.420.803 atau mencapai, 99,65 persen, Belanja Modal dengan anggaran Rp.1.932.490.727 dan terealisasi Rp.1.930.551.450 atau 99,90 persen.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng berjumlah 116 orang. **Dengan golongan ruang terdiri atas** : Golongan IV ; 6 orang, Golongan III ; 30 orang, Golongan II : 75 orang, Golongan I : 3 orang. **Dengan kualifikasi pendidikan meliputi** : Strata 2 (S2) ; 3 orang, Strata 1/ Diploma 4 (S1/D4) ; 15 orang, Diploma 3 (D3) ; 1 orang, Diploma 2 (D2) ; 1 orang, SMA/SMK/Mts ; 84 orang, SMP ; 5 orang SD ; 3 orang. **Jumlah Pejabat Struktural** : Eselon II/b ; 1 pejabat, Eselon III/a ; 1 pejabat, Eselon III/b ; 4 pejabat, Eselon IV/a ; 15 pejabat. **Pejabat Fungsional** ; Terdapat 6 jabatan fungsional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng. **Diklat Pim** ; 6 pejabat sudah mengikuti Diklat Pim III dan 14 pejabat sudah mengikuti Diklat Pim IV.

Permasalahan yang ditemui dalam proses penyelenggaraan urusan Perhubungan yang didukung dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diatas antara lain adalah :

1) Terbatasnya sumber daya manusia yang belum memiliki kwalifikasi pendidikan / diklat teknis perhubungan.
2) Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap disiplin berlalu lintas
3) Pemanfaatan lahan / ruas parkir oleh para pedagang sehingga sering menimbulkan kemacetan lalu lintas.
4) Kondisi gedung kantor dan ruang kerja yang kurang seimbang dengan jumlah pegawai, mengakibatkan kinerja pegawai belum optimal.

Solusi yang telah ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah :

1) Peningkatan sumber daya manusia melalui pemberian bimbingan tugas yang sesuai dengan bidang tugasnya ataupun diklat2 yang diselenggarakan baik oleh Daerah maupun Pusat.
2) Melakukan penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan lalu lintas dan pelanggaran operasional dan perijinan angkutan
3) Melakukan pembinaan para sopir melalui persatuan / organisasi sopir pada masing-masing trayek dan pembinaan terhadap pengusaha jasa angkutan dan pengemudi kendaraan angkutan penumpang umum agar meningkatkan pelayanan kepada masyarakat / pengguna jasa angkutan.

17. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada warsa terakhir ini sudah sangat pesat, dengan teknologi Informasi yang canggih, dunia seakan menjadi tanpa sekat, untuk itu diperlukan kesiapan dan kesigapan dalam menguasai dan memanfaatkan teknologi Informasi bagi pemerintah dan masyarakat yang ada di Kabupaten Buleleng.

Kebutuhan akan teknologi ini tidak bisa ditunda-tunda lagi demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat, untuk itu tentu saja dibutuhkan pendidikan dan pelatihan bagi Sumber daya Manusia (SDM) agar mampu menguasai Teknologi Informasi tersebut, sehingga sangat diperlukan adanya dana dan sarana yang memadai bagi terselenggaranya Pemeritah yang berbasis E-Government serta terwujudnya Masyarakat Informasi.

Di dalam Kebijaksanaan penyelenggaraan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi ini, mulai dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informtika Kabupaten Buleleng melalui beberapa program/Kegiatan seperti Media Center, Online System, Pembangunan dan Pengembangan Sistus resmi Pemerintah Kabupaten Buleleng Website (www.bulelengkab.go.id) dan lain-lain.

Kebijakan urusan dibidang Komunikasi dan informatika ditujukan untuk :

1) Meningkatkan kualitas Informasi dan komunikasi di berbagai bidang kehidupan masyarakat melalui peningkatan penguasaan dan penerapan Teknologi Informasi;
2) Meningkatkan peran media masa sebagai media Komunikasi antara masyarakat dengan Pemerintah;
3) Peningkatan keterpaduan operasional informasi lintas sektoral;
4) Peningkatan kualitas dan kuantitas operasional Pelayanan Informasi;

Dengan demikian, tujuan dan sasaran penyelenggaraan urusan di bidang Komunikasi dan Informasi antara lain :

(1). Terciptanya masyarakat yang menyadari akan arti pentingnya informasi, dan pemanfaatan informasi sebagai salah satu sumber daya utama untuk meningkatkan kualitas hidup, (2). Terwujudnya kelompok-kelompok komunikasi sosial masyarakat (KKSM) yang profesional, maju dan dinamis, (3). Terciptanya komunikasi timbal balik yang selaras serasi antara pemerintah dan masyarakat dengan berpegangan kepada azas demokrasi dan nilai budaya, (4). Terciptanya administrasi yang akuntabel, (5). Terciptanya pelayanan operasional yang efektif, (6). Terciptanya disiplin aparatur, (7).Terciptanya Laporan SKPD.

Sedangkan sasaran urusan di bidang komunikasi dan informasi yaitu :

(1). Meningkatkan mutu pelayanan administrasi perkantoran, (2). Meningkatkan pelayanan operasional dinas/kantor, (3). Menciptakan kesadaran aparatur mematuhi peraturan perundang-undangan, (4). Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap arti penting pelayanan informasi sebagai sumber daya dalam meningkatkan kualitas hidup, (5). Terjadinya interaksi positif antara masyarakat dengan pemerintah di bidang pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan, (6). Berkembangnya kelompok Komunikasi Sosial Masyarakat dalam menunjang pembangunan dibidang Penyebarluasan Informasi.

Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal pada urusan Komunikasi dan informatika Kabupaten Buleleng tahun 2012 dan 2013 adalah : Website milik Pemerintah Daerah, yaitu **www.bulelengkab.go.id** dan Pameran/Expo, pencapaian sebanyak 63 kali.

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng untuk tahun 2013 terinci melalui belanja SKPD sebagai berikut :

Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp. 6.154.422.798,00 yang terealisasi Rp. 5.942.036.873,00 atau 96,55%, yang terdiri atas anggaran untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.890.322.798,00 yang terealisasi Rp. 2.822.760.347,00 atau 97,66% dan belanja langsung

dianggarkan sebesar Rp. 3.264.100.000,00 terealisasi Rp. 3.119.276.526,00 atau 95,56%.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Buleleng tahun 2014 sebagaimana tabel dibawah in:

Tabel 89
Kondisi Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan informatika.

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Hasil Capaian (%)				
			2010	2011	2012	2013	2014
1	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui:					
		a. Media massa:		63,89	341,67	425,00	444,44
		- Majalah	12x /Tahun	25,00	25,00	25,00	50,00
		- Radio	12x /Tahun	166,67	1000,00	1250,00	1283,33
		- Televisi	12x /Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00
		b. Media website (media online)	Setiap Hari	100,00	100,00	100,00	100,00
		c. Media tradisionil seperti pertunjukan rakyat;	12x /Tahun	66,67	100,00	108,33	108,00
		d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya;	12x /Tahun	41,67	41.67	100,00	100,00
		e. Media luar ruang:		0,00	0,00	0,00	300,00
		- Buletin	12x /Tahun	0	0	0	0
		- Leaflet	12x /Tahun	0	0	0	0
		- Booklet	12x /Tahun	0	0	0	0
		- Brosur	12x /Tahun	0	0	0	0
		- Spanduk	12x /Tahun	0	0	0	0

		- Baliho	12x /Tahun	0	0	0	300,00
2	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	50	55,56 %	77.78%	77,78%	77,78%

Alokasi dan realisasi belanja langsung pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Buleleng Tahun 2014 :

Tabel 90
Alokasi dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Pada Diskominfo Kab. Buleleng, 2014

Uraian Belanja Langsung	Alokasi	Realisasi	%
Belanja Pegawai	Rp 619.175.000	Rp 616.075.000	99,49
Belanja Barang dan Jasa	Rp 3.348.420.941	Rp 3.252.929.539	97,14
Belanja Modal	Rp 766.789.059	Rp 754.773.198	98,43
Belanja Pemeliharaan	Rp 112.678.620	Rp 107.685.598	95,56

Tahun 2015 Di Kabupaten Buleleng terdapat begitu banyak medi cetak yang masuk, baik yang bersekala nasional (seperti Kompas, dan Jawa Post) maupun lokal (Bali Post dan Nusa Bali). Media cetak yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan disebarkan secara terbatas dengan jumlah yang sangat terbatas, ada dua, yaitu: Majalah Singa Manggala yang ditebitkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng, dan Tabloid Kabar Buleleng yang ditebitkan oleh Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Buleleng. Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Di Kabupaten Buleleng terdapat 6 (enam) Radio swasta, dan 1 radio pemerintah, yaitu RRI (Radio Republik Indonesia) Pro 2.

Internet (kependekan dari *interconnection-networking*) adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global *Transmission Control Protocol/*Internet Protocol *Suite* (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran paket (*packet switching communication protocol*) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia.Rangkaian internet yang terbesar dinamakan **Internet**. Internet telah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan saat ini. Komunikasi dan informasi dapat dilakukan secara luas dan tanpa batas (*borderless*). Semua orang di dunia yang terhubung dengan internet dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Sehingga segala informasi yang berbentuk digital dapat dibagikan secara luas. Di Kabupaten Buleleng, telah hadir begitu banyak tempat yang menyediakan layanan akses internet, baik yang dikelola oleh swasta dalam bentuk warung internet (warnet) maupun yang dikelola oleh pemerintah dalam bentuk media center dan free hotspot di beberapa titik. Pada tahun 2015 Dinas Komunikasi dan Informatika mengembangkan jaringan online sebanyak 95 titik yang masih fokus pada Desa dan seluruh SKPD Kabupaten Buleleng.

Alokasi dan realisasi belanja langsung pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten BulelengTahun 2015 :

Tabel 91
Alokasi dan realisasi belanja langsung Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Buleleng Tahun 2015

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2015	%
2	3	4	5
BELANJA DAERAH	**7.814.790.000,00**	**7.716.777.261,00**	**98,75**
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**3.196.517.000,00**	**3.178.826.355,00**	**99,45**
BELANJA PEGAWAI	3.196.517.000,00	3.178.826.355,00	99,45
BELANJA LANGSUNG	**4.618.273.000,00**	**4.537.950.906,00**	**98,26**
BELANJA PEGAWAI	710.765.000,00	708.235.000,00	99,64
BELANJA BARANG DAN JASA	3.497.383.000,00	3.438.935.376,00	98,33
BELANJA MODAL	410.125.000,00	390.780.530,00	95,28
SURPLUS/(DEFISIT)_IRA	**(7.814.790.000,00)**	**(7.716.777.261,00)**	**98,75**

Sumber data ; Diskominfo Kab. Buleleng, 2015

Program dan Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang Komunikasi dan informatika , yaitu :

1) **Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**.
   - Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi.
   - Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi.
   - KegiatanPengkajian dan Pengembangan System Informasi.
   - Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Piranti Lunak.
   - Fasilitasi Penyebarluasan Informasi.
2) **Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi**.
   - Kegiatan Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi.
   - Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data.
3) **Program Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi**.
   - Kegiatan Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi.
   - Kegiatan Bimbingan Teknis dalam Bidang Komunikasi dan Informasi.
   - Kegitan Pengelolaan Fasilitas Pengembangan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.
4) **ProgramKerjasama Informasi dan Media Massa.**
   - Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah.
   - Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
   - Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat.
   - Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Peliputan dan Dokumentasi.
   - Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Komunikasi Sosial Masyarakat.
   - Penyebarluasan Informasi dalam Rangka Tatap Muka dan Dialog Interaktif.

Bidang Komunikasi dan Informasi terdapat 2 (dua) Jenis pelayanan dasar dengan 2 (dua) jumlah indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PERIM.KOMINFO/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota. Untuk dapat melaksanakan target Pencapaian dan Penerapan SPM Bidang Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Buleleng terdapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawab yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun kondisi Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informasisampai dengantahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 92
Kondisi Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informasi

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Hasil Capaian (%)		
			2014	2015	2016
1	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional	1. Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui:			
		a. Media massa:	444.44	80.56	80.56
		- Majalah	50.00	50.00	16.67
		- Radio	1.283,33	225.00	225.00
		- Televisi	39.77	93.87	93.87
		b. Media website (media online)	100.00	100.00	100.00
		c. Media tradisionil seperti pertunjukan rakyat;	108.33	108,33	108,33
		d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya;	100.00	100.00	100.00
		e. Media luar ruang:	0.00	300.00	0.00
		- Buletin	0.00	0.00	0.00
		- Leaflet	0.00	0.00	0.00
		- Booklet	0.00	0.00	0.00
		- Brosur	0.00	0.00	0.00
		- Spanduk	0.00	0.00	0.00
		- Baliho	0.00	300.00	0.00
2	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	2. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	77.78	77.78	77.78

Data teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) Desa dan Kelurahan di Kabupaten Buleleng Tahun 2016 mencakup 18 Desa yang ada di 9 Kecamatan yang meliputi :

- Data TIK Desa Anturan Kecamatan Buleleng.
- Data TIK Desa Penglatan Kecamatan Bulelen.
- Data TIK Desa Pedawa Kecamatan Banjar.
- Data TIK Desa Gesing Kecamatan Banjar.
- Data TIK Desa Julah Kecamatan Tejakula.
- Data TIK Desa Bondalem Kecamatan Tejakula.
- Data TIK Desa Les Kecamatan Tejakula.
- Data TIK Desa Sambirenteng Kecamatan Tejakula.
- Data TIK Desa Patas Kecamatan Gerokgak.
- Data TIK Desa Sumberklampok Kecamatan Gerokgak.
- Data TIK Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak.
- Data TIK Desa Subuk Kecamatan Busungbiu.
- Data TIK Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu.
- Data TIK Desa Munduk Bestala Kecamatan Seririt .
- Data TIK Desa Umeanyar Kecamatan Seririt .
- Data TIK Desa Sudaji Kecamatan Sawan.
- Data TIK Desa Tajun Kecamatan Kubutambahan.
- Data TIK Desa Wanagiri Kecamatan Sukasada.

Sedangkan kantor Desa dan Kelurahan yang telah terhubung jaringan internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng sampai Tahun 2016 telah mencapai 56 dari 148 Desa / Kelurahan di Kabupaten Buleleng. Jaringan internet ini memudahkan Aparatur Desa/Kelurahan untuk mengakses informasi terkait perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kantor Desa /Kelurahan yang telah terhubung jaringan internet yaitu Kantor Desa Banyupoh, Kantor Desa Gerokgak, Kantor Desa Sanggalangit, Kantor Desa Kalianget, Kantor Desa Lokapaksa, Kantor Desa Patemon, Kantor Desa Pengastulan, Kantor Kelurahan Seririt, Kantor Desa Umeanyar, Kantor Desa Banjar, Kantor Desa Dencarik, Kantor Desa Kaliasem, Kantor Desa Temukus, Kantor Desa Pancasari, Kantor Desa Sambangan, Kantor Kelurahan Sukasada, Kantor Kelurahan Kampung Anyar, Kantor Kelurahan Kaliuntu, Kantor Desa Anturan, Kantor Kelurahan Beratan, Kantor Desa Kalibukbuk, Kantor Kelurahan Liligundi, Kantor Kelurahan Penarukan, Kantor Desa Tukad Mungga, Kantor Desa Bungkulan, Kantor Desa Kerobokan, Kantor Desa Sangsit, Kantor Desa Sinabun, Kantor Desa Bukti, Kantor Desa Kubutambahan, Kantor Desa Bondalem, Kantor Desa Tejakula, Kantor Desa Les, Kantor Desa Penuktukan, Kantor DesaSambirenteng, Kantor Desa Celukan bawang, Kantor Desa Rangdu, Kantor Desa Busungbiu, Kantor Kelurahan Kampung singaraja,

Kantor Kelurahan Astina, Kantor Desa Baktiseraga, Kantor Kelurahan Kendran, Kantor Kelurahan Banjar Bali, Kantor Kelurahan Banjar Jawa, Kantor Kelurahan Kampung Baru, Kantor Kelurahan Kampung Kajanan, Kantor Kelurahan Kampung Bugis, Kantor Kelurahan Banguasri, Kantor Kelurahan Paket Agung, Kantor Kelurahan Banyuning, Kantor Kelurahan Pemaron, Kantor Desa Giri Mas, Kantor Desa Ringdikit, Kantor Desa Madenan, Kantor Desa Wanagiri dan Kantor Desa Sudaji. Sedangkan untuk Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng hampir semua telah terlayani dengan jaringan internet.

Sementara itu dalam rangka mengelola informasi dan komunikasi antar warga masyarakat di Kabupaten Buleleng. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng mempunyai binaan kelompok – kelompok informasi masyarakat. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah suatu lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat yang secara khusus berorentasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.Secara praktis, KIM itu seperti lembaga media lokal yang meliput dan menyebarluaskan informasi seputar kegiatan lembaga masyarakat dan warga sekaligus media komunikasi antar warga. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial, tanggal 1 Juni 2010, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) atau kelompok sejenis lainnya adalah kelompok yang dibentuk oleh, dari, untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah. Sampai Tahun 2016 terdapat 15 Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang tersebar di 8 Kecamatan yakni ; KIM WAHANA GATRA, DESA UNGGAHAN, KECAMATAN SERIRIT, Alamat blog: kimwahanagatra.blogspot.com ; 2. KIM BALI SARI WANGI, DESA SEPANG, KECAMATAN BUSUNGBIU, Alamat blog: kimbalisariwangi.blogspot.com ; KIM SEKAR BHUANA, DESA MUNDUK, KECAMATAN BANJAR, Alamat blog: kimdesamunduk.blogspot.com ; KIM DESA TAJUN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN, Alamat blog: kimdesatajun.blogspot.com ; KIM DESA BULIAN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN, Alamat blog: kimdesabulian.blogspot.com ; KIM DESA SEKUMPUL, KECAMATAN SAWAN, Alamat blog: sekarbang.blogspot.com ; KIM DESA SANGGALANGIT, KECAMATAN GEROKGAK, Alamat blog: kimsaribhuana.blogspot.com ; KIM DESA WANAGIRI, KECAMATAN SUKASADA, Alamat blog: kim-desa-wanagiri.blogspot.com ; KIM DESA TAMBLANG, KECAMATAN

KUBUTAMBAHAN, Alamat blog: kimsaribhuana.blogspot.com ; KIM DESA TAMBLANG, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN, Alamat blog: kimtamblang.blogspot.com ; KIM SATYA DHARMA, DESA KALIANGET, KECAMATAN SERIRIT, Alamat blog: desakalianget2.blogspot.com ; KIM DESA PANCASARI, KECAMATAN SUKASADA, Alamat blog: kimpancasari12.blogspot.com ; KIM EKA CIPTA DHARMA PRAWERTI, DESA SELAT, KECAMATAN SUKASADA, Alamat blog: kimdesaselat.blogspot.com ; KIM ASTA GINA, DESA MENYALI, KECAMATAN SAWAN, KIM DESA SUDAJI, KEC. SAWAN, Alamat blog: kimdesasudaji.blogspot.com.

Untuk penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016 dialokasikan belanja daerah sebesar Rp. 7.196.692.000 dan terealisasi sebesar Rp.7.093.365.483 atau 98,56 persen, yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp.3.446.052.000 dan terealisasi Rp.3.391.406.792 atau 98,41 persen dan belanja langsung sebesar Rp.3.760.640.000 dan realisasi sebesar Rp.3.704.958.691 atau mencapai 98,70 persen, yang meliputi : Belanja Pegawai dengan anggaran Rp. 482.960.000 dan terealisasi Rp.478.790.000, atau 99,14 persen, Belanja Barang dan jasa dengan anggaran Rp.2.968.608.000 dan terealisasi Rp. 2.924.921.691 atau mencapai, 98,53 persen, Belanja Modal dengan anggaran Rp.299.072.000 dan terealisasi Rp.298.247.000 atau 99,72 persen.

Data pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng Tahun 2016 adalah sebagai berikut :Jumlah Pegawai Negeri Sipil: 40 orang ; Pegawai Honor Daerah/Pegawai kontrak : 44 orang; Tingkat Pendidikan: S3: 1 orang; S2: 3 orang; S1: 19; Diploma: 5; SMA/SMK: 16 orang; Golongan IV: 5 orang; Golongan III: 27 orang; Golongan II: 8 orang; Eselon II : 1 Orang; Eselon III : 5 orang; Eselon IV : 13 orang; Pejabat Struktural : 19 orang.

Permasalahan yang dihadapi di tahun 2016 adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Dinas Kominfo saat ini masih sangat kurang , terutama yang memiliki keahlian di bidang Teknik Informasi dan Komunikasi (TIK) dan di bidang Komunikasi Media atau Jurnalistik. Untuk mengatasi permasalahan diatas diharapkan adanya penambahan tenaga PNS yang memiliki keahlian di bidang Teknik Informasi dan Komunikasi (TIK) dan di bidang Komunikasi Media atau Jurnalistik agar pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kominfo dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

18. URUSAN PERTANAHAN.

Kewenangan bidang pertanahan adalah kewenangan untuk menentukan, mengatur dan menyelenggarakan hal-hal mengenai tanah. Menurut ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang merupakan landasan politik dari hukum Agraria di Indonesia, kewenangan bidang pertanahan pada asasnya merupakan urusan Pemerintah Pusat, yang pelaksanaannya di daerah menggunakan asas medebewind. Setelah keluarnya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kini telah diganti dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah. Setelah keluarnya UU tersebut, telah terjadi penafsiran yang berbeda tentang kewenangan bidang pertanahan. Pasal 10 ayat (5) UU No.32 Tahun 2004 mendefinisikan tentang kewenangan bidang pertanahan, adalah sebagai urusan-urusan lain dimana kewenangannya ada pada Pemerintah Pusat yang pelaksanaannya dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai urusan yang bersifat wajib.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang pertanahan yaitu : Izin Lokasi; Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum; Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan; Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan; Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee; Penetapan Tanah Ulayat; Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong; Izin Membuka Tanah, atas dasar tersebut Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 melaksanakan urusan pertanahan yang dituangkan melalui Program Koordinasi Pelayanan Umum Pemerintahan dengan kegiatan penanganan urusan pertanahan kewenangan pemerintah kabupaten. Berdasarkan kewenanganan yang dimiliki dalam bidang pertanahan dengan dasar hukum :

1) Undang – Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;

3) Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah.

Tahun 2012 Urusan Pertanahan secara umum masih ditangani secara vertikal oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng yang merupakan unit kerja Badan Pertanahan Nasional. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Buleleng hanya menyelenggarakan Urusan Pertanahan khusus untuk lingkup tanah yang dikuasai oleh Pemerintah kabupaten Buleleng. Maka program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah Program Koordinasi Pelayanan Umum Pemerintahan, dengan pencapaian keberhasilan kinerja pelaksanaan urusan melalui kegiatan penanganan urusan pertanahan kewenangan pemerintah kabupaten.

Keberadaan HGU 1 dan 2 di Desa Sumberklampok dan HGU 3 Sendang Pasir di Desa Sumberkima, Pemerintah Kabupaten Buleleng terus berupaya mengajukan permohonan kepada Pemerintah agar nantinya bisa diberikan HPL oleh Pemerintah. Sehingga bisa dikelola dan dikembangkan sesuai potensi yang ada. Terlepas masih adanya permasalahan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan PT. Margarana selaku pemegang Hak Guna Usaha, Pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya melaksanakan inventarisasi dan evaluasi terkait keberadaan HGU 1, 2 dan 3 tersebut. Karena nantinya keberadaan HGU 1 dan 2 di Desa Sumberklampok khususnya, secara langsung berpengaruh terhadap keberadaan warga masyarakat Desa Sumberklampok. Saat ini Warga masyarakat Desa Sumberklampok menempati tanah – tanah negara tanpa dasar kepemilikan yang sah. Untuk itu Pemerintah daerah berupaya untuk menfasilitasi agar nantinya warga masyarakat bisa memohon untuk mendapatkan hak atas lahan yang dikuasai baik dalam bentuk HGB maupun HPL. Implemntasi kearah itu diawali melalui pembentukan Tim Inventarisasi dan Evaluasi Eks. HGU 1, 2 dan 3 Sumberklampok dan juga dibentuk pansus desa yang akan membantu pelaksanaan pendataan terkait luasan tanah negara yang dikuasai masyarakat Desa Sumberklampok. Selanjutnya dalam rangka pengadaan tanah untuk lokasi Bendungan Titab di Desa Ringdikit Kecamatan Seririt untuk Tahun 2012 sudah sampai pada tahap pembebasan yang ketiga.Dimana pada tahap ini kegiatan yang merupakan sharing antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali

dan Pemerintah Kabupaten Buleleng, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Buleleng beserta Balai Wilayah Sungai bali-Penida dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali selaku instansi yang memerlukan tanah sepakat untuk menunda proses pengadaan di tahun 2012 diakibatkan terbitnya UU Nomor 2 Tahun 2012 yang mengatur tentang pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 yang ditetapkan tanggal 30 Oktober 2012.

Alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan urusan pertanahan pada tahun 2012 sebesar Rp. 12.121.088.548,- dan terealisasi Rp. 279.873.348,- atau tercapai 2,31%. Rendahnya realisasi keuangan disebabkan ditundanya pembayaran ganti rugi terhadap tanah untuk lokasi Bendungan Titab seluas 5 Hektar.

Tahun 2013 Pencapaian kinerja bidang pertanahan ditunjukkan melalui indikator berikut :

1. Luas lahan bersertifikat mencapai 15,65 % , angka ini didapat dari perbandingan luas lahan milik pemkab yang sudah bersertifikat seluas 104,2742 ha dengan luas lahan milik pemkab yang seharusnya bersertifikat seluas 666,0272 ha.
2. Penyelesaian kasus tanah negara mencapai 0 %, jumlah kasus tanah negara yang diselesaikan 0 dibagi jumlah kasus yang terdaftar sebanyak 2 kasus.
3. Jumlah ijin lokasi mencapai 100%, dimana jumlah ijin lokasi yang diterbitkan pada tahun 2013 7 ijin dibagi jumlah permohonan ijin lokasi pada tahun 2013 sebanyak 7 permohonan.

Kegiatan penanganan urusan pertanahan kewenangan pemerintah kabupaten dibiayai dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 22.547.915.600,00 , yang terdiri atas ; belanja pegawai Rp. 153.540.000,00; belanja barang dan jasa Rp. 190.675.600,00 ; dan belanja modal Rp. 22.203.700.000,00. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 21.148.401.810,00 atau tercapai 93,79% dengan realisasi fisik mencapai 95%.

Realisasi anggaran untuk kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1. Pengadaan tanah untuk bendungan titab yang belokasi di 6 (enam) desa di wilayah Kecamatan Seririt ; Desa Ularan dan Desa Ringdikit, dan di wilayah Kecamatan Busungbiu ; Desa Busungbiu, Desa Telaga, Desa Kekeran, Desa Titab. Tahun 2013 (tahap ketiga) luas lahan yang dibebaskan seluas 136.495 M2 yang terletak di Desa Titab seluas 75.315 M2 sebanyak 20 bidang dengan 18

orang pemilik dan di Desa Telaga seluas 61.180 M2 sebanyak 13 bidang dengan 9 orang pemilik. Dengan harga per are sebesar Rp. 10.000.000,00 yang merupakan hasil persetujuan dalam musyawarah kepakatan harga, maka dana ganti rugi yang dibayarkan pada tahun 2013 berjumlah Rp. 13.649.500.000,00.

2. Selanjutnya pengadaan tanah untuk sarana pengembangan pembangunan RSUD Kabupaten Buleleng. Luas tanah yang dibebsakan seluas 1245 M2 milik Drg. I Gusti Ayu Sri Haryati dengan bukti sertifikat hak milik Nomor 116 sebagaimana diuraikan dengan surat ukur/gambar situasi tanggal 28 Mei 1988 Nomor 1811/1988. Harga per are sebesar Rp. 481.927.000, sehingga total pembayaran atas lahan dimaksud sebesar Rp. 5.999.991.150,00.
3. Pengadaan tanah untuk pembangunan perluasan RSUD kabupaten Buleleng seluas 200 M2 atas lahan milik Drs. Putu Tastra Wijaya,MM berdasarkan Sertifikat hak Milik Nomor 168 berlokasi di Kelurahan Kendran, Kecamatan Buleleng. Dengan harga disepakai per are sebesar Rp. 481.927.000,00, total ganti rugi yang dibayakan berjumlah Rp. 963.854.000,00.

Pada tahun 2013 juga direncanakan 3 (tiga) kegiatan pengadaan tanah yang tidak bisa direalisasikan yakni ;

1. Pengadaan tanah untuk sarana pembangunan Rumah Sakit Pratama seluas + 3000 M2, dengan anggaran sebesar Rp. 1.012.500.000,00.
2. Selanjutnya pengadaan tanah untuk sarana umum jalan yang berlokasi di Jalan Teratai Kelurahan Banyuasri Kecamatan Buleleng seluas + 300 M2, dengan anggaran sebesar Rp. 457.000.000,00.
3. Dan yang terakhir adalah pengadaan tanah untuk penukar tanah wakaf untuk pembangunan Gedung IMACO Eks. Pelabuhan Buleleng seluas 400 M2 dengan anggaran sebesar Rp. 425.700.000,00.

Penyelenggaraan Urusan Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng pada Tahun 2016 dijabarkan melalui pelaksanaan kegiatan penanganan urusan pertanahan kewenangan pemerintah kabupaten. Pembiayaan kegiatan dialokasikan dengan anggaran belanja langsung yang berjumlah Rp. 270.115.700,00 dengan realisasi anggaran untuk Tahun 2016 berjumlah Rp. 247.937.245,00 atau mencapai 91,79 persen dari total anggaran yang direncanakan. Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Urusan Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Tahun 2016 meliputi :

1) Terlaksananya penyuluhan dan upaya penyelesaian penanganan masalah pertanahan yang diikuti oleh 120 orang.
2) Terlaksananya penyelenggaraan pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan Rumah Sakit Pratama di Desa Giri Emas Kecamatan Sawan.

Penanganan Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng yang didukung oleh personil yang berjumlah 8 pegawai yang terdiri atas 3 PNS dan 5 Pegawai Kontrak. PNS yang ada dengan pangkat dan golongan ; Penata Tk.1 ; 1 orang, Penata Muda Tk.1 ; 1 orang dan Pengatur Muda Tk.1 ; 1 orang. Dengan Kualifikasi pendidikan ; S1 ; 2 orang dan SMA/SMK ; 1 orang. Pejabat structural yang ada sebanyak 1 pejabat yakni Kepala Sub Bagian Pertanahan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2016, permasalahan yang dihadapi yaitu berkembangnya konflik-konflik dalam bidang pertanahan dalam kaitannya mendukung akselerasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan semakin berkembangnya permohonan pemanfaatan tanah Negara. Terhadap beberapa hal yang dihadapi sebagaimana diuraikan diatas maka dilaksanakan langkah – langkah sebagai upaya untuk meminimalisasikan setiap kendala dalam pelaksanaan kegiatan yaitu melaksanakan sosialisasi tentang kebijkan pertanahan kepada stokeholder terkait dan peningkatan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.

19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Buleleng merupakan harapan dan kebutuhan mendasar bagi masyarakat Buleleng. Reformasi yang sedang berlangsung membuat masyarakat lebih mudah merespon berbagai hal, bahkan merespon sesuatu secara berlebihan. Hal ini jika tidak diantisipasi dapat menimbulkan gejolak sosial yang akhirnya dapat menimbulkan kerawanan sosial. Upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Buleleng dilaksanakan melalui kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng.

Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tertib, tentu tidak bisa terlepas dari dukungan yang maksimal dari berbagai elemen masyarakat dan aparat keamanan terkait. Dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum pemerintah Kabupaten Buleleng telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna mendukung akselerasi pembangunan daerah di Kabupaten Buleleng.

Adapun data dan perkembangan tenaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dalam rangka mewujudkan kondisi ketentraman dan ketertiban umum dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 93

Perkembangan Tenaga Keamanan dan Ketertiban
MasyarakatTahun 2012 – 2017

No.	Keterangan	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Linmas	-	-	-	5.209	5.017	5.044
2.	Satpol PP Jumlah	79	83	80	88	95	99
3.	Operasi Yustisi	11	9	5	3	-	-

Sumber Data: Satuan Polisi PP

Upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Buleleng sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 linmas belum tergabung dalam satuan polisi pamong praja dan sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang barulah linmas bergabung dengan Satpol-PP, kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng melalui: Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; Penegakkan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah; Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja.

Hasil penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri tersebut di atas dicapai melalui pelaksanaan 53 program dan 185 kegiatan dengan

total anggaran dari tahun 2012 sampai 2017 sebesar Rp18.219.439.230,00 dan realisasi sebesar Rp12.685.608.775,00 atau 69,63%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 94

Anggaran dan Realisasi Urusan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Satpol PP) Tahun 2012-2017

No.	Uraian	Tah					
		201	2013	201	201	201	2017
1	Jumlah	8	8	8	10	10	9
2	Jumlah	23	24	23	36	38	41
3	Anggaran	1.309.539.000	1.683.800.000	1.830.614.000	3.654.427.000	4.148.478.670	5.592.580.560
4	Realisasi	1.262.854.859	1.626.490.150	1.768.577.748	3.500.149.842	4.063.754.185	463.781.991

Sumber Data : *Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng*

Hasil/Output

a) Pada Tahun 2012, target dan realisasinya sudah tercapai dengan baik;

b) Pada Tahun 2013, target dalam kegiatan penegakan peraturan daerah/peraturan kepala daerah dan realisasinya sudah 100% dan pada kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum satuan polisi pamong praja yang targetnya 9 kecamatan pun realisasinya sama yaitu 9 kecamatan yang artinya 100% telah terlaksana dengan baik;

c) Pada Tahun 2014, pada tahun inipun sama dengan tahun 2013 target dalam kegiatan penegakan peraturan daerah/peraturan kepala daerah dan realisasinya sudah 100% dan pada kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum satuan polisi pamong praja yang targetnya 9 kecamatan pun realisasinya sama yaitu 9 kecamatan yang artinya 100% telah terlaksana dengan baik;

d) Pada Tahun 2015, kegiatan SatpolPP ada yang bertambah dikarenakan Satpol PP telah bergabung dengan Linmas dimana kegiatan penyiapan

tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan targetnya 489 orang dan realisasinya 489 orang, kegiatan pelatihan pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan targetnya adalah 279 orang dan realisasi 279 orang, kegiatan penegakan peraturan daerah/peraturan kepala daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum satuan polisi pamong praja sama dengan tahun 2014 telah mencapai realisasi yang sama dengan taget;

e) Pada Tahun 2016, untuk kegiatan penyiapan tenaga linmas Desa/Kelurahan dalam rangka hari-hari nasional targetnya 372 orang dan realisasinya 372 orang, kegiatan pelatihan dasar targetnya adalah 279 orang dan realisasi 279 orang dan pada kegiatan penegakan peraturan daerah/peraturan kepala daerah target 48 kali dan realisasi 48 kali, kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum satuan polisi pamong praja target 12 bulan dan realisasi 12 bulan;

f) Pada Tahun 2017, yang dituangkan dalam kegiatan penyiapan tenaga Linmas Desa/Kelurahan dalam rangka hari-hari nasional targetnya bertambah menjadi 4.967 orang dan realisasinya 4.967 orang dikarenakan adanya pilkada, kegiatan pelatihan dasar targetnya adalah 279 orang dan realisasi 279 orang dan pada kegiatan penegakan peraturan

Perangkat Daerah yang juga melaksanakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun Anggaran 2016 meliputi 10 program dan 38 kegiatan, disamping program – program dimaksud perlu adanya Program Prioritas Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng ,yaitu :

1. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

- Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

- Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- Pengamanan/Pengawalan Pejabat Pemerintah Daerah

2. Program Pemeliharaan Kantrantribmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal

- Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah
- Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah

3. Program Koordinasi Pelayanan Umum Pemerintah

- Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja.

Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di KabupatenBuleleng, pada Tahun 2016 tercapai 89,02 persen, sedangkan Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tercapai 10 persen. Jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yg diselesaikan Tahun 2016 120 pelanggaran. Jumlah pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah yg dilaporkan dan/atau dipantau 139 pelanggaran dan banyaknya kelompok patroli dikalikan 3 kali patroli dalam sehari sebanyak 90 kelompok.

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kabupaten Buleleng diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan dibantu oleh 1 Sekretaris, 4 Kepala Bidang yaitu Kabid Perlindungan Masyarakat, Kabid Ketertiban Umum, Kabid Sumber Daya Aparatur, Kabid Peraturan daerah, dan 3 Kepala Sub. Bagian yaitu Kasubag Perencanaan, Kasubag Keuangan, Kasubag Umum, 8 Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, Dan Penyuluhan, Kasi Penyeledikan Dan Penyidikan, Kasi Operasional Dan Pengendalian, Kasi Kerjasama, Kasi Pelatihan Dasar, Kasi Teknis Fungsional, Kasi Pengarahan Dan Pengendalian dan Kasi Bina Potensi Masyarakatserta di bantu 153 orang staf /anggota yang terdiri dari 58 orang staf administrasi dan 95 orang anggota Sat Pol PP. Dari 169 orang Pegawai pada Sat Pol PP 74 Orang PNS, 6 orang tenaga harian dan 89 orang Tenaga Kontrak. Tingkat pendidikan pegawai pada Sat Pol PP S2 berjumlah 6 orang, S1 berjumlah 30 orang, Diploma III berjumlah 4 orang,Diploma II berjumlah 1 orang, SMA berjumlah 119 orang, SMP berjumlah 2 orang dan SD berjumlah 1 orang. Pangkat Dan Golongan pegawai pada Sat Pol PP Gol. IV/c berjumlah 1

orang,Gol. IV/b berjumlah 1 orang, Gol. IV/a berjumlah 6 orang, Gol. III/d berjumlah 5 orang, Gol. III/c berjumlah 3 orang, Gol. III/b berjumlah 4 orang, Gol III/a berjumlah 1 orang Gol. II/d berjumlah 3 orang, Gol. II/c berjumlah 24 orang, Gol. II/b berjumlah 19 orang, Gol. II/a berjumlah 4 orang, dan Gol. I/d berjumlah 2 orang, Gol. I/a berjumlah 1 orang.Bahwa untuk kelancaran dan menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas-tugas, maka dipandang perlu menetapkan tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng.

Permasalahan yang ditemui dalam proses penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan PolitikDalam Negeri yang didukung dengan pelaksanaan program dan kegiatan antara lain :

- Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja masih kurang.
- Masih kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah.
- Sarana dan prasarana pada Satuan Polisi Pamong sangat masih kurang.

Solusi yang telah ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah :

- Secara bertahap untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan pelatihan kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
- Untuk penambahan kuantitas staf dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan dengan mutasi PNS dan atau membuka formasi CPNS untuk Satuan Polisi Pamong Praja.
- Untuk melengkapi sarana dan prasarana diusulkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berikutnya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan kesatuan Bangsa memiliki 4 bidang pendukung antara lain Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan, Bidang Kewaspadaan Nasional, Bidang Pendidikan Politik Masyarakat dan Bidang Perlindungan Masyarakat. Pada Tahun 2013 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengalami perubahan pada Jumlah Bidang tugas karena Berdasarkan Persetujuan

DPRD Kabupaten Buleleng dan Bupati Buleleng Nomor 11 tahun 2013 bidang Perlindungan Masyarakat dihapus dan digabungkan di Badan Satuan Polisi Pamong Praja. Sehingga Badan Kesatuan Bangsa memiliki 3 Bidang pendukung antara lain Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan, Bidang Kewaspadaan Nasional, dan Bidang Pendidikan Politik Masyarakat.

Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kabupaten Buleleng pada tahun 2012-2016 diupayakan untuk dapat merumuskan kebijakan publik dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, lembaga organisasi kemasyarakatan dan juga melibatkan peran lembaga legislatif yaitu DPRD, sehingga rumusan kebijakan Pemerintah Daerah mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat.

Dengan mekanisme pengambilan keputusan kebijakan publik seperti tersebut diatas, maka roda pemerintahan akan berjalan sesuai dengan konstitusi.

Adapun kinerja dari sektor politik dapat dilihat dari perkembangan jumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), meningkatnya intensitas demokrasi melalui pemilihan perbekel dan munculnya forum-forum warga dalam menyikapi proses pembangunan, menurunnya tingkat kriminalitas sebagai dampak dari stabilitas politik di daerah, serta adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat dalam menanggapi suatu kebijakan publik. Berikut tabel Ormas dan LSM di Kabupaten Buleleng selama Tahun 2012 sampai 2016

Tabel 95

Jumlah Ormas dan LSM

No.	Direktori	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Ormas	14	15	17	24	35
2	LSM	14	20	25	30	32

Sumber Data : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Buleleng

Suatu aksi unjuk rasa dengan kuantitas kecil sekalipun menunjukkan bahwa kesadaran dan keberanian masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya, serta kepedulian terhadap kebijakan Pemerintah sudah tumbuh. Dengan fenomena-fenomena perkembangan politik seperti tersebut diatas, maka diharapkan akan mendorong kelancaran pembangunan di daerah.

Peran Pemerintah Daerah yang tak kalah pentingnya adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menjadikan salah satu prioritas dalam agenda pembangunan,karena dengan terciptanya suasana aman, tentram dan tertib maka Pemerintah Kabupaten Buleleng secara berkesinambungan telah mengupayakan ataupun memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui penguatan lembaga-lembaga perlindungan masyarakat.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politi dalam negeri pada Tahun Anggaran 2016 meliputi 9 program dan 30 kegiatan, yaitu :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**
   - Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
   - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
   - Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
   - Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas /Operasional.
   - Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
   - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
   - Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.
   - Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
   - Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
   - Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten.
   - Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
   - Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.
   - Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah.

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**
   - Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara.
   - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
   - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur.
   - Kegiatan Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah.
3. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur.**
   - Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu.

4. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**.
   - Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
   - Kegiatan Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun.
5. **Program Perencanaan Anggaran SKPD.**
   - Kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD.
6. **Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal**.
   - Kegiatan Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik dalam teknik pencegahan kejahatan.
   - Kegiatan Forum kewaspadaan dini Masyarakat.
   - Kegiatan Koordinasi Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
7. **Program Pengembangan wawasan kebangsaan.**
   - Kegiatan Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan social dikalangan masyarakat.
8. **Program Kemitraan pengembngan wawasan kebangsaan**.
   - Kegiatan Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan.
9. **Program Pendidikan Politik Masyarakat.**
   - Kegiatan Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik.
   - Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
   - Kegiatan Fasilitas Bantuan Keuangan Parpol.
   - Kegiatan Fasiltas Ormas.

Pembangunan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Buleleng yang beralokasi di jalan Jendral Sudirman Singaraja. Yang didukung oleh

personil sejumlah 69 orang yang terdiri atas 29 PNS, 3 Pegawai harian dan 37 Pegawai Kontrak. Pangkat dan Golongan PNS yang ada terdiri atas ; Pembina (IV/a) ; 3 orang, Penata Tk. I (III/d) ; 7 orang, Penata Muda Tk.I(III/b) ; 6 orang, Penata Muda(III/a) ; 3 orang, Pengatur (II/c) ; 3 orang, Pengatur Muda Tk.I (II/b) ; 4 orang. Dengan tingkat pendidikan pegawai yang ada terdiri atas ; S2 ; 2 orang. S1 ; 18 orang, SMA/SMK ; 47 orang, SMP ; 2 orang. Pejabat structural yang ada ; pejabat eselon IIb ; 1 pejabat, eselon IIIb ; 4 orang, eselon Iva ; 8 orang.

Untuk penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2016 dialokasikan belanja daerah sebesar Rp.4.990.732.000,- dan terealisasi sebesar Rp.4.879.177.744,- atau 97.76 persen yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp.2.600.244.000,- dan terealisasi Rp.2.541.638.398,- atau 97,75 persen dan untuk belanja langsung sebesar Rp. 2.390.488.000,- dan realisasi sebesar Rp.2.337.539.346,- atau 97,79 persen

20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN*.*

1) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG.

Terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan sistem, penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan ligitemiate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pelaksanaan urusan pemerintahan umum pada bidang penataan perangkat daerah dan tatalaksana adalah untuk meningkatkan disiplin dan kinerja Aparatur Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada Bagian Oganisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017 dilakukan melalui 2 (dua) program utama yaitu :

1)Program peningkatan disiplin aparatur;

2)Program kelembagaan dan kinerja aparatur.

Dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tentulah harus berpedoman pada kebijakan pemerintah pada Bagian Organisasi, ada beberapa kebijakan yang telah diambil, yaitu sebagai berikut :

1) Membangun Disiplin Aparatur
2) Membangun Kinerja Pemerintah
3) Membangun Pelayanan Publik
4) Membangun Mutu Pelayanan
5) Membangun Perangkat Daerah
6) Membangun Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Kepegawaian
7) Membangun Penataan Standarisasi Sarana Prasarana Kerja
8) Membangun Penyusunan SOP
9) Membangun Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi
10) Membangun Evaluasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tersebut di atas dicapai melalui pelaksanaan 9 program dan 50 jenis kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp5.990.384.068,20 dan terealisasi Rp5.713.079.579,00 atau 95,37%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 96
Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Umum (Bagian Organisasi) Tahun 2012-2017

No.	Uraian	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Program	1	2	2	2	2	9
2	Jumlah Kegiatan	5	6	13	13	13	50
3	Anggaran (Rp)	675.723.000	1.159.850.000	1.303.750.000	1.319.639.000	1.531.422.068,20	2.207.800.000
4	Realisasi (Rp)	602.989.200	1.113.873.101	1.241.025.088	1.252.536.484	1.502.655.706	-

Sumber : LRA Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng tahun 2012-2017

Tabel 97

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Umum (Bagian Organisasi)

sesuai RPJMD Tahun 2012-2017

NO	URAIAN	TAHUN										
		2012	2013		2014		2015		2016		2017	
		Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Program Peningkatan Kelembagaan dan Kinerja Aparatur	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
2	Program Peningkatan Disisplin Aparatur	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng

Program dan Kegiatan

Pencapaian sasaran dalam rangka Peningkatan disiplin aparatur dan kelembagaan serta kinerja aparatur di Kabupaten Buleleng untuk Tahun 2012-2017 didukung melalui pelaksanaan 2 (dua) program dan 13 (tiga belas) jenis kegiatan sebagai berikut ini:

1) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Bahwa peningkatan disiplin aparatur digunakan sebagai tolok ukur kinerja meningkatnya disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkup Setda Kabupaten Buleleng dimana keluaran/Outputnya jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya dan jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu dengan hasil/outcomenya persentase capaian disiplin berseragam pegawai di lingkup Setda Kabupaten Buleleng. Pencapaian sasaran program ini dari tahun

2012-2016 dengan 2 (dua) kegiatan yakni, Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya dan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu adalah 471 Potong dan 607 Stel

2) Program Peningkatan Kelembagaan dan Kinerja Aparatur

Bahwa peningkatan kelembagaan dan kinerja aparatur digunakan sebagai tolok ukur kinerja meningkatnya kelembagaan dan kinerja aparatur Pemkab. Buleleng dimana pencapaian sasaran keluaran/outputnya, yakni :

a) Tersusunnya LAKIP dan Perjanjian Kinerja Pemkab. Buleleng (2 Dokumen)
b) Terlaksananya pembinaan peningkatan pelayanan publik (6 Bidang SPM)
c) Terlaksananya SINOVIC (5 Proposal)
d) Respon terhadap pengaduan (LAPOR SP4N-1 Dokumen)
e) Tersusunnya LAKIP Setda (1 Dokumen)
f) Tersusunnya laporan IKM (1 Dokumen)
g) Terlaksananya penataan dan evaluasi organisasi perangkat daerah Pemkab. Buleleng (1 Perda, 1 Perbup UPT, Tupoksi, 1 Naskah Akademis)
h) Tersusunnya Standar Kompetensi PNS (1 Dokumen)
i) Jumlah peserta pembinaan pegawai Pemkab. Buleleng (100 orang)
j) Terlaksananya Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemkab. Buleleng (1 Dokumen)
k) Terlaksananya SOP Pemkab. Buleleng (1 Dokumen)
l) Tersusunnya Pelaporan Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (1 Laporan)
m)Tersusunnya Ranperda ANJAB dan ABK (1 Dokumen)
n) Terlaksananya evaluasi ANJAB dan ABK (35 Buku)
o) Terlaksananya nilai budaya kerja Pemkab. Buleleng (1 Dokumen)

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang ada di dalam pelaksanaan program kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, antara lain :

(1) Masih adanya SKPD yang lamban dan kurang memahami terhadap kewajibannya untuk mengirim laporan tepat waktu. Bagi Aparatur Pemerintah diperlukannya kesadaran peningkatan kinerja dari tahu ketahun agar lebih baik karena akan sangat menentukan didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

(2) Bahwa didalam penataan organisasi kelembagaan dan peningkatam status dari beberapa SKPD belum dapat dilaksanakan menunggu revisi terhadap PP 41 tahun 2007 dan PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi serta Pemerintah Kabupaten / Kota.

Namun demikian, telah diupayakan penanganannya agar permasalahan tersebut tidak menghambat pelaksanaan program kegiatan yaitu:

(1) Perlunya diberikan bimbingan teknis serta pelatihan-pelatihan secara berjenjang dan berkelanjutan kepada para aparatur pemerintah tehadap petugas administrasi dan petugas yang menangani laporan- laporan, agar dapat menjawab permasalahan tentang laporan.serta melakukan pembinaan terhadap aparatur pemerintah melalui pembinaan secara terus menerus bagi aparatur pemerintah agar didapat hasil yang diharapkan dalam memberikan pelayanan.;

(2) Menyiapkan sarana pendukung terhadap rencana perubahan PP 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa pembentukan perangkat daerah berdasarkan kemampuan daerah yang dilakukan pada kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat yang mampu dilaksanakan Pemerintah Daerah sesuai dengan PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi serta Pemerintah Kabupaten / Kota secara menyeluruh.

Penghargaan dan Prestasi

Adapun penghargaan dan prestasi yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng sampai dengan Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

(1) Penghargaan Citra Bhakti Abdi Negara (CIBAN) Tingkat Provinsi Bali dari Gubernur Bali sebagai bentuk penghargaan atas prestasi dalam peningkatan pelayanan publik.

(2) Penghargaan Lakip (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dari Menpan-Rb.

(3) Penghargaan Evaluasi Lakip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi.

Penyelenggaraan pembangunan bidang hukum di Kabupaten Buleleng terkait dengan pencapaian sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu disebutkan bahwa kebijakan Bidang Hukum dan Kamtibmas diupayakan agar terwujud: peningkatan kesadaran hukum dan kepatuhan sebagai landasan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; meningkatkan koordinasi, pengkajian dan penataan peraturan daerah; meningkatkan pembinaan hukum dan ketertiban guna menciptakan dan mendorong terwujudnya ketaatan, dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan salah satu proritas pembangunan daerah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2012-2017. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan dan menjamin adanya kepastian hukum/supremasi hukum serta menghargai hak azasi manusia. Lebih jauh diharapkan pula terwujud kesadaran dan ketaatan masyarakat dan aparat pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tujuan dan sasaran tersebut di atas, program pembangunan bidang hukum yang dicanangkan periode 2012-2017 adalah:

1) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.

2) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tentulah harus berpedoman pada kebijakan pemerintah di bidang hukum, ada beberapa kebijakan yang telah diambil, yaitu sebagai berikut :

(a) Mengembangkan budaya dan kesadaran hukum dikalangan aparat dan masyarakat dalam rangka penegakan supremasi hukum.

(b) Menciptakan dan mengembangkan kondisi social budaya yang kondusif bagi tumbuh kembangnya kesadaran Hak Asasi Manusia (HAM) masyarakat;

(c) Meningkatkan pembinaan dan penyuratan awig-awig desa pakraman; (d) Meningkatan koordinasi, pengkajian dan penataan peraturan daerah;

(d) Menerbitan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah lainnya yang sesuai dengan Potensi, kondisi dan kemampuan daerah.

Sedangkan sasaran penyelenggaraan pembangunan bidang hukum adalah :

(a) Terwujudnya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan terwujudnya aparatur yang bertanggungjawab, mempunyai integritas moral yang tinggi dan profesional di bidang hukum dan perundang- undangan.

(b) Tersusunnya Produk Hukum (Perda) sesuai tuntutan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk didalamnya penyuratan awig-awig desa pakraman.

(c) Terwujudnya Dokumentasi dan Publikasi Hukum serta Perundang-undangan.

(d) Terwujudnya supremasi hukum.

Hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tersebut di atas dicapai melalui pelaksanaan 10 program dan 45 kegiatan dengan total angaran sebesar Rp7.096.943.802,97 dan terealisasi Rp6.690.588.890,00 atau 94,27%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 98

Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Umum (Bagian Hukum)
Tahun 2012-2017

No.	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Program	2	2	2	2	2
2	Jumlah Kegiatan	7	7	7	7	7
3	Anggaran (Rp)	1.247.237.000	1.135.000.000	1.310.000.000	1.633.947.000	1.770.759.801.97
4	Realisasi (Rp)	1.117.733.707	1.047.478.205	1.217.628.802	1.633.947.000	1.673.801.176

Program dan Kegiatan

Pencapaian sasaran dalam rangka penegakan hukum dan HAM di Kabupaten Buleleng untuk Tahun 2012-2017 didukung melalui pelaksanaan 2 (dua) program dan 9 (sembilan) kegiatan sebagai berikut ini:

1. Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Bahwa dengan diberikannya kewenangan Pemerintah desa untuk mengelola keuangannya sendiri melalui Alokasi Dana Desa (ADD), maka agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pembinaan. Pembinaan dimaksud khusus dalam pembentukan Peraturan Desa agar tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa. Program ini merupakan program lanjutan dari tahun 2011, dari tahun 2012-2014 bagian hukum masih melakukan evaluasi peraturan Desa dan pendapatan desa pada tahun 2015 seterusnya kewenangan evaluasi

Perdes berda di kecamatan karena mempertimbangkan bahwa dalam pembuatan Peraturan Desa harus tetap ada evaluasi dari Pemerintah Kabupaten dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga dilaksanakan kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Sumber- Sumber Pendapatan desa .

Sasaran program ini adalah terbinanya 129 (seratus dua puluh sembilan) Rancangan Peraturan Desa dan aparat pemerintahan desa yang ditargetkan. Program ini dijabarkan melalui Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan terbinanya 129 Rancangan Peraturan Desa dan aparat pemerintahan desa yang ditargetkan. Program ini dijabarkan melalui Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Sumber- Sumber Pendapatan desa.

2. Program Penataan Peraturan Perundang-undang

Proses demokrasi yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir ini mengubah sistem politik serta peran negara dan masyarakat secara mendasar. Tuntutan masyarakat luas untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan publik serta tuntutan atas hak mengeluarkan pendapat dan aspirasi secara bebas menjadi karakteritik utama dalam kehidupan politik saat ini.

Dalam bidang hukum misalnya sering terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang begitu cepat, sehingga pemerintah daerah diharapkan cepat tanggap dan respon untuk mengadakan penyesuaian produk hukum daerah terhadap produk hukum pusat. Lain halnya kesalahan persepsi atas kebebasan dalam berdemokrasi sering menyebabkan ketidakteraturan baik berupa pelanggaran hukum maupun Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kehidupan masyarakat sehingga diperlukan usaha pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan, ketaatan bahkan lebih menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat.

Program ini dilaksanaan adalah untuk menata peraturan perundang-undangan baik dalam : penyelesaian permasalahan/kasus perundang-undangan;

pembentukan produk hukum sesuai dengan potensi, kondisi, kemampuan daerah serta kesesuaian dengan peraturan hukum diatasnya; Pemberitahuan atau sosialisasi produk hukum dan pentingnya HAM baik melalui sosialisasi, penerbitan buku, ataupun penyuluhan, sehingga dapat tercipta ketertiban dalam masyarakat.

Capaian pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum yaitu :

a) Terbinanya evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sehingga tercipta kepastian dan tertib administrasi hukum pemerintahan desa. Realisasi target fisik kegiatan ini adalah 645 Peraturan Desa tentang APB Desa dari Tahun Anggaran 2012 hingga T.A 2016.

b) Terbinanya evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pendapatan Desa sehingga tercipta kepastian dan tertib administrasi hukum pemerintahan desa. Realisasi target fisik kegiatan ini adalah 645 Peraturan Desa tentang APB Desa dari Tahun Anggaran 2012 hingga T.A 2016.

c) Penanganan permasalahan atau kasus hukum yang menyangkut pejabat/aparat pemerintah daerah sehingga masalah tersebut cepat mendapat solusi serta dapat terselesaikan. Dari kerjasama ini didapatkan berupa 25 dokumen penyelesaian kasus hukum/permasalahan pemerintah daerah Kabupaten Buleleng selama periode 2012-2017. Adapun jangka waktu kerjasama selama satu tahun masa anggaran.

d) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang nantinya menjadi Peraturan Daerah (Perda) setelah mendapat pembahasan dan disetujui oleh DPRD Kabupaten Buleleng. Dalam pelaksanaannya, Bagian Hukum bekerjasama dengan unsur akademisi dari Universitas Panji Sakti serta instasi terkait (*leading sector*) yang berwenang terhadap materi Raperda dan sebagai pelaksana teknis. Selama periode 2012-2017 kegiatan ini telah menghasilkan 32 Rancangan

Peraturan Daerah, sedangkan Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan adalahsebanyak 38 Peraturan Daerah.

e) Sosialisasi ini masyarakat menjadi paham tentang pentingnya menegakan peraturan perundang-undangan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, periode 2012-2016 bagian hukum telah mensosialisasikan 27 perda di 9 kecamatan.

f) Penyebarluasan peraturan hukum melalui publikasi peraturan perundang-undangan dengan penerbitan buku Lembaran Daerah, Himpunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati. Selama periode 2012-2017 kegiatan ini telah menghasilkan 1020 buku berupa buku Lembaran Daerah, buku Himpunan Peraturan dan buku Keputusan Bupati, selain itu bagian hukum juga sudah mengintergrasikan penyebarluasan melalui Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum berupa website.

g) Pembinaan dan penyurtan awig-awig desa pakraman sebanyak 29

Awig desa pakraman

h) pelaksanaan Penyuluhan menggunakan Kesenian Bondres untuk sebagai media penyuyluhan Realisasi kegiatannya 45 desa dimana Sosialisasi ini dilaksanakan pada 9 Desa di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Buleleng tiap tahunnya, desa-desa yang mendapatkan Penyuluhan Hukum.

i) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RANHAM di masing masing SKPD, dengan realisasi kegiatan berupa 2 laporan.

Pengelolaan sarana dan prasarana Pemerintah Kabupaten Buleleng dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng. Secara umum tujuan dan sasaran Penyelenggaraan Urusan Administrasi Umum Pemerintahan adalah dalam rangka mewujudkan visi dan merealisasikan penjabaran misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan dan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada Penyusunan Kegiatan atau Operasional

Organisasi tiap – tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Atas dasar kondisi tersebut, tujuan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Bagian Umum adalah :

1) Merumuskan standar pelayanan minimal dalam pelayanan aparatur dan pelayanan publik;
2) Meningkatkan kinerja aparatur dalam menyediakan pelayanan kepada stokeholder;
3) Menyusun rumusan standar analisa belanja sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja;
4) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur dalam melaksanakan anggaran berbasis kinerja;
5) Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.

Program dan Kegiatan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017 dilakukan melalui 4 (empat) program utama sebagai berikut :

1) Program pelayanan Administrasi Perkantoran
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3) Program Informasi Pembangunan Daerah;
4) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta prestasi yang telah dicapai pada tahun 2012-2017 yaitu :

(1) Lancarnya proses administrasi;

(2) Terbayarnya rekening listrik, Air, Telepon dan TV Berlangganan; (3) Terlaksananya jasa pelayanan yang optimal;

(4) Tersedianya jaminan barang milik daerah;

(5) Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional;

(6) Tersedianya pengelolaan administrasi Keuangan SETDA;

(7) Efektifnya pelayanan administrasi kantor yang didukung penyediaan alat tulis kantor;

(8) Meningkatnya pelayanan administrasi;

(9) Terjaganya penerangan dengan tersedianya komponen instalasi listrik;

(10) Tersedianya informasi melalui 11 Jenis bahan bacaan;

(11) Tersedianya konsumsi selama 12 bulan untuk tamu dan pegawai; (12) Tersusunnya laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah;

(13) Terwujudnya jasa pelayanan/administrasi KDH/WKDH selama 12 bulan;

(14)Tersedianya gedung / lingkungan kantor yang representative; (15) Tersedianya 6 unit kendaraan dinas / operasional;

(16) Tersedianya 43 Jenis perlengkapan gedung kantor;

(17) Tersedianya peralatan Rumah Jabatan / Dinas 2 Lokasi; (18) Termanfaatnya 3 paket gedung kantor

(19) Termanfaatnya 4 Unit mobil jabatan;

(20) Termanfaatnya 22 unit Kendaraan Dinas Operasional;

(21) Termanfaatnya Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas di 3 areal; (22) Termanfaatnya Perlengkapan Gedung Kantor (Fasilitas Umum);

(23) Termanfaatnya Peralatan Gedung Kantor/Lingkungan Kantor Selama 1 Tahun;

(24) Terdukungnya Kegiatan – kegiatan penerimaan tamu-tamu pemerintah Kabupaten Buleleng Selama 12 Bulan;

(25) Tercapainya pemanfaatan sarana teknologi informasi dan telekomunikasi antar pemerintah dan pemerintah daerah;

(26) Terwujudnya pelayanan sandi dan telekomunikasi dengan tersedianya sarana persandian dan telekomunikasi;

Permasalahan dan Solusi

Walaupun secara umum pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada Bagian Umum Setda Kabupaten Buleleng cukup berhasil namun untuk kedepan tetap belum bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana (Renstra), hal ini karena terjadi ketidakseimbangan antara Kemampuan Keuangan Daerah dibandingkan dengan kebutuhan yang dibiayai tiap tahun. Untuk mengantisipasi masalah tersebut maka dalam merencanakan satu kegiatan harus juga berpatokan dengan besaran anggaran yang ada.

Humas protokol dituntut untuk memahami, menguasai dan mampu memanfaatkan media cetak, elektronik maupun media sosial, baik untuk mengumpulkan maupun menyebarluaskan informasi serta untuk meng- *counter* informasi yang dipandang tidak benar, secara cepat dengan data yang akurat. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Humas, dimana selain dituntut harus mampu menguasai teknologi, Humas juga dituntut untuk dapat menguasai informasi dan memberikan layanan informasi kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Buleleng mempunyai komitmen yang kuat dalam proses demokratisasi di Buleleng yaitu dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melakukan control terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya kesempatan tersebut maka kesadaran masyarakat terhadap pentingnya control social terhadap pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Dengan semakin meningkatnya control social ini maka

penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Buleleng lebih transparan dan akuntabel yang pada akhirnya akan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Bagian Humas dan Protokol merupakan Bagian dari Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng yang diarahkan untuk dapat meningkatkan layanan informasi pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan untuk mewujudkan hubungan masyarakat yang selaras dan harmonis dengan kebijakan pemerintah serta terjaganya kewibawaan pemerintah dimata masyarakat. Bagian ini menyelenggarakan pengkoordinasian dibidang komunikasi dan informasi serta layanan keprotokolan bagi pimpinan daerah. Kegiatan tersebut dijabarkan kedalam 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu Sub Bagian Pengumpulan Informasi, Sub Bagian Pemberitaan dan Sub Bagian Perjalanan dan Protokol.

Hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tersebut diatas, dicapai melalui pelaksanaan 10 program dan 35 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 18.054.078.900 dan terealisasi sebesar Rp.17.618.947.387 atau 97,59% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 99

Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Umum

(Bagian Humas Protokol) Tahun 2012-2016

No.	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah	2	2	2	2	2
2	Jumlah	7	7	7	7	7
3	Anggaran	1.844.539.900	2.450.000.000	1.902.155.000	4.510.219.000	7.347.165.000

4	Realisasi	1.821.733.690	2.348.035.324	1.883.496.583	4.334.221.128	7.231.470.662

Sumber Data :Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Buleleng

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang ditemui dalam proses penyelenggaraan urusan pemerintahan umum bagian humas dan protokol adalah masalah– masalah umum seperti kurangnya tenaga operasional (SDM) dan minimnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan di bagian humas dan protokol.

Berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng maka tupoksi Bagian Pemerintahan yaitu mengkoordinasikan perumusan kebijakan yang berkaitan pada bidang pemerintahan umum, pertanahan dan kerjasama serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng. Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan, Bagian Pemerintahan selalu menekankan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah, partisipasi dengan berbagai komponen masyarakat dan penguatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Atas kondisi tersebut, tujuan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan perekonomian daerah;
2) Meningkatkan pelayanan yang berkualitas dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sedangkan sasaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yaitu :

1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan;

2) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa;

3) Meningkatnya profesionalisme dan kemandirian Aparatur Pemerintah.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng pada Tahun 2016 dijabarkan melalui pelaksanaan 3 (tiga) program dan 8 (delapan) kegiatan. Pembiayaan kegiatan pembangunan dialokasikan dengan anggaran belanja langsung yang berjumlah Rp6.419.321.820,00 dengan realisasi anggaran untuk Tahun 2016 berjumlah Rp6.161.404.572,00 atau mencapai 95,98% dari total anggaran yang direncanakan. Pencapaian sasaran pembangunan terkait pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng meliputi :

a) Terlaksananya peringatan HUT Kota Singaraja, HUT Provinsi Bali, HUT RI, Harkitnas, Hari Otda, Hari Kesaktian Pancasila, Hari Korpri dan Perayaan Tahun Baru.

b) Terlaksananya evaluasi bentuk - bentuk kerjasama Pemerintah Daerah. Program ini dijabarkan melalui pelaksanaan kegiatan evaluasi bentuk-bentuk kerjasama pemerintah daerah.

c) Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah.

d) Terlaksananya pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

e) Terlaksananya koordinasi dan Evaluasi pelaksanaan Pemerintahan daerah.

f) Terlaksananya inventarisasi Pembakuan Nama Rupabumi.

g) Terlaksananya koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

h) Terlaksananya pendataan Penegasan Batas Wilayah Desa/Kelurahan.

Secara rinci capaian kinerja program dan kegiatan tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 100

Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Umum

(Bagian Pemerintahan) Tahun 2012-2016

No	Tahun	Prg	Keg	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
						Keuanga	Fisik
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	2012	4	6	2.865.911.452,	2.453.253.030,	85,60	100
2	2013	4	7	4.195.884.400,	3.847.828.030,	91,70	100
3	2014	3	7	5.973.268.300,	5.223.115.745,	87,44	100
4	2015	3	8	4.721.106.200,	4.583.103.499,	97,08	100
5	2016	3	8	6.419.321.820,	6.161.404.572,	95,98	100

Sumber data ; Bagian Pemerintahan Setda Kab. Buleleng,

Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, belum ditemukan permasalahan – permasalahan yang mendasar, namun beberapa hal yang menjadi catatan dalam pelaksanaan kegiatan, yaitu :

a) Banyak instansi yang melaksanakan kerjasama tanpa melibatkan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Pemerintah Kabupaten Buleleng sehingga banyak kerjasama yang belum dapat kami himpun.

b) Dalam rangka pembakuan nama rupabumi, cakupan luas wilayah kabupaten Buleleng yang begitu besar, sinkronisasi data awal dari pemerintah berbeda dengan data riil di lapangan, masih banyaknya unsur rupabumi yang belum bernama dan tidak diketahui sejarahnya, penentuan titik koordinat yang hanya bisa dilakukan dengan foto udara dengan biaya yang tinggi, merupakan beberapa hal yang menjadi catatan sehingga dalam perencanaan kegiatan pada

tahun anggaran berikutnya semua catatan diatas bisa dijadikan refrensi dan tolak ukur.

c) Belum optimalnya peran dan fungsi pemerintah kecamatan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Terhadap beberapa hal yang dihadapi sebagaimana diuraikan diatas maka dilaksanakan langkah – langkah sebagai upaya untuk meminimalisasikan setiap kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu :

a) Melakukan sosialisasi terkait PP No.50 Tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan kerjasama daerah kepada SKPD yang akan melaksanakan kerjasama.

b) Melakukan sosialisasi langsung ke tingkat Desa untuk segera mendapatkan data rupabumi serta adanya komunikasi yang lebih efektif dengan pemerintah kecamatan sebagai fasilitasi kegiatan pemerintah desa.

Kemajuan perekonomian suatu daerah juga ditunjukkan dengan bergairahnya kondisi investasi di daerah tersebut sehingga dalam hal ini sangat diperlukan upaya-upaya tepat untuk menarik investor menanamkan modalnya di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan hal tersebut, dan dalam rangka meningkatkan koordinasi rencana pembangunan yang terkait dalam bidang ekonomi pembangunan, Pemerintahan telah mengambil langkah-langkah kebijakan dalam mewujudkan capaian kinerja ekonomi dan pembangunan dalam arti luas. Kebijakan pembangunan dibidang administrasi umum sektor ekonomi pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, terutama sektor ekonomi pembangunan. Penyelenggaraan urusan penanaman modal tergabung dalam program kegiatan dalam dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng.

Semua sasaran tersebut dijabarkan dalam program koordinasi dan pembangunan program utama dengan pelaksanaan koordinasi penyelesaian

perijinan penanaman modal dengan pameran penunjang lainnya. Untuk membiayai pelaksanaan pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda.

Program dan Kegiatan

Dalam melaksanakan Urusan pemerintahan umum di bidang Perekonomian pembangunan dijabarkan dalam 1 program utama yaitu Program Koordinasi Ekonomi dan Pembangunan.

Program di bidang perekonomian pembangunan perlu adanya pengkoordinasian sehingga tidak tumpang tindih dengan program dan kegiatan sejenis di SKPD lainnya. Oleh sebab itu tujuan pelaksanaan program adalah untuk memberikan arah keterpaduan pelaksanaan kegiatan di dalamnya, dengan sasaran atau target SKPD terkait Pendistribusian Raskin, Penanaman modal, investasi, Pembinaan LPD, Pengendalian pengawasan pembangunan, pembinaan pembangunan dan masyarakat Penyedia Jasa Konstruksi di Kab. Buleleng.

Pelaksanaan program ini dijabarkan melalui 7 kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

(1) Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan

(2) Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian Perijinan Penanaman Modal

(3) Pelaksanaan penarikan Investor/Penanaman modal

(4) Pembinaan Pelaksanaan LPD

(5) Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

(6) Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan

(7) Pembinaan masyarakat penyedia Jasa Konstruksi

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicapai pada tahun 2012 - 2016 yaitu :

(1) Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan

Perekonomian dan Pembangunan melalui

(2) Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian Perijinan Penanaman Modal.

(3) Pelaksanaan penarikan Investor/Penanaman Modal

(4) Kegiatan Pembinaan pelaksanaan LPD di Kab.

(5) Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

(6) Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan

(7) Kegiatan Pembinaan masyarakat penyedia Jasa Konstruksi

Tabel 101

Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Umum

(Bagian Ekonomi dan Pembangunan) Tahun 2012-2016

No	Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan		Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
		Anggaran	1.785.037.000	1.312.000.000	1.676.535.000	2.037.046.000	1.977.311.251
		Realisasi	1.374.560.250	1.297.969.505	1.665.501.735	1.983.461.160	1.946.512.747
		Fisik	104.12 %	100 %	106.86 %	106.51 %	107.57 %
1	Koordinasi Pelaksanaan & Pengendalian Keg. Perekonomian & pembangunan	Dana	627.237.000	320.000.000	680.360.000	552.046.000	263.725.824
		Realisasi	553.912.350	318.791.900 (46.89 %)	679.344.855 (46.89 %)	547.261.619 (46.89 %)	260.317.173 (46.89 %)
2	Pelaks. Koordinasi penyelesaian perijinan penanaman modal	Dana	420.000.000	120.000.000	140.000.000	339.000.000	371.837.593
		Realisasi	163.717.100	112.809.640	137.674.190	328.918.443	368.901.291
3	Pelaksanaan penarikan Investor/Penanaman modal	Dana	0	90.000.000	90.000.000	295.000.000	319.548.025
		Realisasi	0	89.604.390	87.610.295	289.780.380	318.270.325
	Pembinaan Pelaksanaan.LPD	Dana	167.800.000	162.000.000	96.175.000	147.000.000	225.831.771
		Realisasi	113.791.400	159.036.850	96.010.210	141.292.822	222.484.489
	Pengendalian	Dana	285.000.000	250.000.000	250.000.000	280.000.000	340.000.000

	Pelaks Pembangunan	Realisasi	265.623.000	248,876,155	249,048,805	274.595.933	333.490.185
4	Pembinaan Pelaksanaan	Dana	285.000.000	300.000.000	394.500.000	380.000.000	439.576.038
		Realisasi	277.516.400	299.085.860	390.693.230	359.394.786	428.072.734
5	Pembinaan Masyarakat Penyedia Jasa Konstruksi	Dana	-	70.000.000	25.500.000	44.000.000	16.792.000
		Realisasi	-	69.764.710	25.120.150	42.217.177	14.976.550

Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada urusan Perekonomian dan Pembangunan sebagai beikut :

1) Terlaksananya pendistribusian raskin sehingga terpenuhinya kebutuhan pokok khususnya beras bagi RTM di Kab. Buleleng
2) Terkendalinya Inflasi di Kab. Buleleng
3) Terkajinya rencana investasi sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada investor
4) Terlaksananya promosi Investasi Daerah
5) Pelaksanaan Pembinaan Teknis LPD sehingga terciptanya kualitas SDM pengelola LPD yang professional
6) Terwujudnya pembangunan yang teratur sesuai dengan rencana dan kebutuhan masyrakat
7) Terwujudnya laporan montoring dan evaluasi pembangunan di kab Buleleng
8) Terlaksananya kegiatan Kunker Bupati Buleleng
9) Pelaksanaan pembinaan masyarakat penyedia jasa konstruksi

Pembangunan di bidang Agama, Pendidikan, Kebudayaan, Pemberdayaan Perempuan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Kesehatan dan Sosial lainnya diarahkan untuk meningkatkan Kualitas SDM dalam rangka menyiapkan Sumber Daya Pembangunan yang berkualitas serta mempertahankan dan melestarikan nilai–nilai Agama dan nilai–nilai Budaya. Pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia di dalam memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai arti Agama, Sosial dan Budaya, Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, Pendidikan serta Pemberdayaan Perempuan yang diperlukan dalam Pembangunan di Bidang Politik, Ekonomi, Hukum, dan Sosial Budaya Serta Bidang lainnya sesuai dengan Tupoksi Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Tabel 102

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Umum

(Bagian Kesejahteraan Rakyat) Tahun 2012-2016

No.	Indikator Kinerja (Outcome)	Fisik	Capaian dari Tahun 2012 - 2017 Realisasi Keuangan
1	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur dan Program Sinkronisasi Dan Koordinasi Kesejahteraan Sosial.		
	Tahun 2012	Rp2.469.079.000 (100 %)	Rp1.835.789.650
	Tahun 2013	Rp3.865.000.000 (100 %)	Rp3.617.367.943
	Tahun 2014	Rp5.545.060.000 (100 %)	Rp5.367.450.261
	Tahun 2015	Rp5.623.020.000 (100 %)	Rp5.431.013.757

	Tahun 2016	Rp8.158.787.552 (100 %)	Rp7.752.731.410

Keberhasilan capaian kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng didukung dengan kekuatan personil sebanyak 138 orang PNS, Pangkat dan Golongan PNS ; Pembina Utama madya (IVd) ; 1 orang, Pembina Utama Muda (Ivc) ; 6 orang, Pembina Tk.I / IVb ; 5 orang, pembina / Iva ; 5 orang, Penata Tk.I/IIId ; 9 orang, Penata /IIIc ; 14 orang, Penata Muda Tk.I / IIIb; 19 orang, Penata Muda/IIIa; 14 orang, Pengatur Tk.I/Iid; 5 orang, Pengatur/Iic; 37 orang, Pengatur Muda Tk.i/Iib; 18 orang, Pengatur Muda/Iia; 5 orang, Pejabat Struktural ; eselon Iia ; 1 pejabat, eselon Iib ; 8 pejabat, eselon IIIa ; 7 pejabat dan eselon Iva ; 21 pejabat.

2)SEKRETARIAT DEWAN

Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng melaksanakan urusan pemerintahan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, dimana tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng. Dimana tugas dan fungsi menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyelenggarakan fungsi Memberikan pelayanan kepada Pimpinan dan anggota DPRD; Menyiapkan bahan dan memfasilitasi rapat anggota DPRD; Pelaksanaan rumah tangga DPRD; serta Pengelolaan tata usaha DPRD.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng melaksanakan tugas pelayanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta memfasilitasi terwujudnya hubungan kerja yang harmonis antara DPRD dengan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah sehingga prioritas urusan yang dilaksanakan dapat tercapai.

Pencapaian sasaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng untuk Tahun 2015 dijabarkan dalam 1 (satu)

program prioritas dan 7 (tujuh) program rutin kesekretariatan sebagai penunjang penyelenggaraan program prioritas. Adapun program – program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah,

Sebagaimana dijabarkan dalam visi dan misi sekretariat DPRD maka program ini dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pelayanan administrasi yang prima dengan aparatur yang frofesional bagi peningkatan kinerja Anggota DPRD dalam perannya sebagai pengemban aspirasi masyarakat yang harus diperjuangkan perwujudannya. Pelaksanaan program ini didukung dengan kegiatan dan anggaran sebagai berikut :

- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah,
- Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintahan Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama,
- Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan,
- Rapat-rapat Paripurna,
- Kegiatan Reses,
- Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah,
- Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.

Selain program pokok diatas juga dilaksanakan program rutin administrasi perkantoran yang meliputi :

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat –Menyurat,
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
- Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional,
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan,
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor,
- Penyediaan Alat Tulis Kantor,
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan,
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor,
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan,
- Penyediaan Makanan dan Minuman,
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/ Dalam daerah,

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan yang dilaksanakan :

- Pembangunan Gedung Kantor,
- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas, Pengadaan Mebeleur,
- Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara,
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan, Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor,
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional,
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor,

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya,
- Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan,
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu,

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Pendidikan dan Pelatihan Formal,
- Sosialisasi Peraturan Prundang-undangan,
- Bimbingan Teknis, Implementasi Peraturan Perundang-undangan,
- Penilaian dan Pengembangan Pegawai,

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD,

7. Program Perencanaan Anggaran SKPD dengan kegiatan Penyusunan anggaran SKPD,

8. Program Peningkatan layanan pemberitaan, pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan keprotokolan

- Publikasi Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan dengan media Massa,
- Pelaksanaan Jumpa Pers,
- Pelaksanaan pelayanan keprotokolan,

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan peran serta masyarakat dalam hal ini yang diwakili oleh para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) turut mengambil peran, sehingga prinsip dasar

Pemerintahan yang meliputi transparasi, akuntabilitas, legalitas, asas manfaat dan partisipasi masyarakat dapat diwujudkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diupayakan untuk meningkatkan kinerja lembaga/instansi pemerintah dan DPRD baik dalam melaksanakan koordinasi antar instansi/ aparat pemerintah maupun dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Sasaran program adalah terlayani kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai ketentuan yang berlaku. Sekretariat DPRD mengagendakan dan menyelenggarakan administrasi persidangan, rapat-rapat serta menjadikannya sebagai produk-produk dewan dalam bentuk: Risalah Rapat, Keputusan Dewan, Keputusan Pimpinan Dewan dan Peraturan Daerah (Perda). Data jumlah produk yang dihasilkan dewan selama tahun 20012-2016 terlihat dalam Tabel 20.16.

Tabel 103

Jumlah Produk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tahun 2012 - 2016

No.	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Keputusan Dewan	1	12	16	15	17
2.	Keputusan Pimpinan	6	7	9	8	5
3.	Peraturan Daerah	5	11	8	9	11
4.	Risalah Rapat	100	100	100	100	100
5.	Risalah Sidang	75	75	75	75	75

Sumber Data: Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng

Produk dewan selama tahun 2012-2014 dihasilkan oleh DPRD periode 2009-2014. Sedangkan produk dewan pada tahun 2015-2016 dihasilkan oleh DPRD periode 2014-2019. Jumlah produk dewan setiap tahun dalam bentuk Keputusan

Dewan terkait dengan intensitas kegiatan Pemerintah Daerah, kebutuhan daerah, perkembangan situasi, kondisi dan dinamika pembangunan di daerah. Jumlah Keputusan Pimpinan Dewan dari tahun ke tahun selalu variatif tergantung dari tingkat kebutuhan di dewan.

Produk dewan selama kurun waktu 3 tahun periode 2012-2014 untuk resume rapat-rapat berjumlah 300 resume. Sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 resume rapat yang dihasilkan berjumlah 200 resume oleh DPRD Kabupaten Buleleng Periode 2014-2019. Sedangkan untuk Peraturan Daerah adanya peningkatan dari Tahun 2012 yang hanya 5 Peraturan Daerah sedangkan pada Tahun 2016 menjadi 11 Peraturan Daerah, hal tersebut dikarenakan meningkatnya kinerja dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat, baik sebagai mitra pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan daerah, maupun sebagai penampung, penjaring dan penyalur aspirasi masyarakat/ konstituen.

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan umum tersebut di atas, dicapai melalui pelaksanaan 42 buah program dan 208 buah kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp145.765.152.705,00 dan realisasi sebesar Rp135.123.642.340,00 atau 92,69% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 104

Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Umum (Sekretariat DPRD)
Tahun 2012-2016

No.	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Program	9	9	8	8	8
2	Jumlah Kegiatan	44	45	42	38	39

3	Anggaran (Rp)	23.828.247.000	31.259.957.705	28.450.092.000	23.502.325.000	38.724.531.000
4	Realisasi (Rp)	20.786748.487	28.801.591.998	25.689.952.683	22.176.592.622	37.668.756.550

Program peningkatan kapasitas lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng dengan kegiatan pembahasan rancangan Peraturan Daerah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dengan target 12 pembahasan Ranperda dapat terealisasi semua, sedangkan pada tahun 2016 dengan target 12 pembahasan Ranperda terealisasi 13 dikarenakan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa 2 tahun setelah Undang-Undang 23 Tahun 2014 ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai maksud dari Undang-Undang 23 Tahun 2014

Organisasi Perangkat Daerah wajib terbentuk. Sehingga 1 Ranperda yang terkait Organisasi Perangkat Daerah terealisasi pada tahun 2016 di luar perencanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2016. Sedangkan untuk kegiatan Hearing/ Dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama, Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan, Rapat-Rapat Paripurna, dan Kegiatan Reses dari tahun 2012 sampai tahun 2016 target yang direncanakan dapat terealisasi semua.

Untuk kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dan kegiatan Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD melalui kegiatan bimbingan Tahun 2013 dan Tahun 2014 dengan target orang tidak dapat tercapai disebabkan karena pada pelaksanaan kegiatan tersebut, ada beberapa anggota DPRD yang tidak dapat mengikuti atau berhalangan, sehingga pada tahun 2016 target diganti dengan berapa kali pelaksanaan kegiatan tersebut.

Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng didalam menfasilitasi fungsi kemitraan antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Buleleng didukung oleh

personil sebanyak 150 orang yang terdiri atas ; 59 PNS, 1 Honor Daerah dan 95 Pegawai Kontrak. Pangkat dan Golongan PNS ; Pembina Tk.I / IVb ; 3 orang, pembina / Iva ; 1 orang, Penata Tk.I/IIId ; 5 orang, Penata /IIIc ; 7 orang, Penata Muda Tk.I / IIIb; 9 orang, Penata Muda/IIIa; 1 orang, Pengatur Tk.I/Iid; 2 orang, Pengatur/Iic; 8 orang, Pengatur Muda Tk.i/Iib; 15 orang, Pengatur Muda/Iia; 3 orang, Juru Tk.I/Id; 2 orang, Juru/Ic; 1 orang, Juru Muda TkI/Ib; 1 orang dan Juru Muda /Ia; 1 orang. Dengan kualifikasi pendidikan ; S2 ;3 orang, S1 ;21 orang , D3 ;2 orang , SMA ;28 orang , SMP ;2 orang , SD ; 3 orang. Pejabat Struktural ; eselon Iib ; 1 pejabat, eselon IIIa ; 4 pejabat dan eselon Iva ; 12 pejabat.

3) KEPEGAWAIAN DAERAH.

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dewasa ini dituntut semakin berkualitas sejalan dengan dinamika kehidupan dan paradigma yang berkembang dimasyarakat. Pemerintah beserta aparaturnya dituntut mereformasi struktur dan tata pemerintahan guna mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Goverment*). Penyelenggaraan Pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, partisipasi efisien dan efektif menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaannya. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan adanya aparatur Pemerintah yang profesional. Pemerintah Kabupaten Buleleng secara bertahap dan berkesinambungan terus berupaya untuk meningkatkan profesionalisme aparaturnya melalui pembinaan pelaksanaan Diklat Fungsional, Diklat Penjenjangan maupun melalui peningkatan jenjang pendidikan Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2). Kebijakan pembangunan kepegawaian ditujukan untuk :

-Meningkatkan pelayanan kepegawaian yang berkualitas dan profesional.

-Mewujudkan sistem pengembangan karir PNS yang komprehensif mulai dari seleksi, pengembangan jabatan hingga pensiun.

-Mewujudkan pengelolaan sistem informasi kepegawaian yang benar dan akurat.

Sedangkan sasaran penyelenggaraan urusan kepegawaian yaitu :

-Meningkatkan profesionalisme dan kemandirian aparatur Pemerintah.

-Terlaksananya proses rekrutmen CPNS yang terbuka, adil, transparansi dan kompetitif.

-Terlaksananya tertib administrasi proses mutasi dan pensiun.

-Terlaksananya pengembangan karier PNS melalui jabatan struktural maupun fungsional.

-Tersedianya data kepegawaian melalui pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian yang up to date.

-Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS sesuai dengan prestasi kerja.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam pembangunan urusan kepegawaian untuk Tahun 2016 meliputi :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,

Program ini rutin yang dilaksanakan mencakup kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang – Undangan, Penyediaan Makanan dan Minuman dan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah.

2)Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,

Program ini didukung dengan pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, Pengadaan Mebeleur, Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana / Prasarana Upacara, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubeleur, Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah.

3)Program Peningkatan Disiplin Aparatur,

Program ini dijabarkan dalam Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya.

4)Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas,

Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam pengajuan usulan Batas Usia Pensiun (BUP), Pensiun Muda, Pensiun Janda/Duda dan Kartu Taspen, yang dijabarkan dalam kegiatan Pemulangan Pegawai Yang Pensiun.

5)Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, melalui Pelaksanaan Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Ijazah, Bimtek – Bimtek/Workshop, Diklat – Diklat, Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, Program ini dijabarkan melalui kegiatan sebagai berikut :

-Pendidikan dan Pelatihan Formal.
-Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan.
-Pembinaan Pegawai Daerah.
-Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNSD.
-Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah.
-Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah.

6)Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program ini dijabarkan dalam kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

7)Program Perencanaan Anggaran SKPD.

Program ini dijabarkan dalam kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD.

8)Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program ini dilaksanakan guna menata penempatan PNS sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, pelantikan sumpah jabatan, menyusun kebutuhan formasi CPNS, Penyusunan DUK, menyelesaikan dan membina PNS yang Indisiplin, mengurus usulan mutasi Kenaikan Pangkat, Karis/Karsu, Karpeg dan Satya Lencana Karya Satya. Untuk mencapai sasaran program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan antara lain :

- Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS;
- Seleksi Penerimaan CPNS;
- Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;
- Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi;
- Proses Penanganan Kasus – Kasus Pelanggaran Disiplin PNS;
- Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas;
- Penyelenggaraan Administrasi Jabatan Fungsional.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Buleleng Tahun 2016 berjumlah 9.912 orang, yang terdiri atas PNS laki – laki sebanyak 5.707 dan PNS Perempuan berjumlah 4.205 orang. Jika dikelompokkan berdasarkan golongan ruang maka PNS di Kabupaten Buleleng terbagi atas Golongan IV ; 3.966 orang, Golongan III ;

4.032 orang , Golongan II ; 1.761 orang dan Golongan I ; 153 orang. Berdasarkan jabatan yang ada dalam struktur perangkat daerah Kabupaten Buleleng, maka pada Tahun 2016 terdapat 896 Jabatan structural yang terbagi atas Jabatan Eselon II/a ; 1 jabatan, Eselon II/b ; 34 jabatan, Eselon III/a ; 53 jabatan, Eselon III/b ; 111 jabatan, Eselon IV/a ; 485 jabatan, Eselon IV/b ; 162 jabatan dan Eselon V/a ; 50 jabatan. Pejabat struktural yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pada Tahun 2016 terdiri atas ; ADUM (Diklat Pim IV) sebanyak 25 orang, SPAMA (Diklat Pim III) ; 25 orang, SPAMEN (Diklat Pim II) ; 2 orang.

Kinerja pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dilakukan melalui penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Diklat Prajabatan dan Diklat Teknis Fungsional. Hasil yang dicapai dari kegiatan pendidikan dan pelatihan adalah meningkatnya kompetensi pegawai sesuai dengan tuntutan kebutuhan organisasi, meningkatnya keterampilan dan profesionalisme pegawai dalam menjalankan tugasnya, serta terciptanya tenaga potensial untuk mengisi jabatan struktural dan fungsional. Perkembangan pelaksanaan diklat kepimpinan dan fungsional di Kabupaten Buleleng tahun 2012–2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 105

Perkembangan Pelaksanaan Diklat Struktural dan Fungsional

Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Diklat Struktural	Orang	41	77	50	29	52
2	Diklat Prajabatan	Orang	664	26	1	281	142
3	Diklat Teknis/Fungsional	Orang	0	0	59	56	136

Tabel 106

Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Umum (BKD)
Tahun 2012-2016

No	Tahun	Uraian			
		Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	2012	3	12	4.899.178.430	4.273.425.150
2	2013	3	12	4.138.153.201	3.573.842.751
3	2014	3	12	3.513.555.000	3.286.734.471
4	2015	3	15	3.821.258.260	3.560.608.476
5	2016	3	14	4.772.984.200	4.504.644.828
JUMLAH		**15**	**65**	**21.145.129.091**	**19.199.255.676**

Sumber Data : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Buleleng

4. PENGAWASAN

Inspektorat Kabupaten Buleleng sebagai bagian dari salah satu perangkat daerah yang ada, merupakan SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan. Hal ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 4

Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Buleleng No 70 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buleleng.

Sebagai instansi yang melaksanakan pengawasan peranan Inspektorat tidak lagi menjadi watchdog untuk memeriksa dan mencari kesalahan, tetapi sebagai quality assurance bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan memberikan pendampingan konsultatif dalam pembahasan penyusunan DPA SKPD, sosialisasi/konsultatif pengawasan/pemeriksaan SKPD, Review SKPD secara berkelanjutan, penerapan pemeriksaan regular/berbasis resiko dan monitoring perencanaan/probity audit.

Untuk mencapai sasaran yang telah dirumuskan maka ditetapkan beberapa arah kebijakan dalam kurun waktu 5 tahun. Implementasi atas

kebijakan tersebut tertuang dalam program yang dilakukan yaitu Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. Indikator capaian kinerja dari tahun 2013–2017 pada Inspektorat Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut

Tabel 107

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Umum (Inspektorat)
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Satuan	2013		2014		2015		2016		2017	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Peningkatan entitas yang diperiksa secara regular dan tuntasnya penanganan permasala han internal Pemkab	Kegia tan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-

Indikator kinerja Inspektorat selama periode tahun 2013-2017 dilaksanakan melalui program kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDh dan tertuang dalam 5 kegiatan sebagai target tahun 2013-2017, yaitu :

1) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler)
2) Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemeriksaan Kaus/Khusus).
3) Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
4) Kegiatan Penanganan Evaluasi LP2P.

5) Kegiatan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIPDA).

Capaian kinerja selama 5 tahun telah diperoleh hasil yang sangat baik, yakni dengan jumlah pencapaian realisasi sudah memenuhi target dengan telah terealisasikannya 5 kegiatan tersebut sebagai kegiatan prioritas setiap tahun.

Selama periode 2012-2016, Inspektorat Kabupaten Buleleng telah melakukan pengawasan berupa pengawasan regular dan khusus/kasus.

Tabel 108

Perkembangan Kegiatan Pengawasan

Tahun 2012 – 2016

No.	Jenis Pemeriksaan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Reguler (rutin)	48	56	56	60	92
2	Khusus	15	16	15	20	15
Jumla		63	72	71	80	107

Sumber : Inspektorat Kabupaten Buleleng

Kegagalan dalam menjalankan tugas pemerintahan merupakan dinamika yang perlu dicarikan solusi secara bijaksana yang disertai komitmen kuat untuk selalu berbuat lebih baik pada masa yang akan dating. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Buleleng selalu melakukan perbaikan secara terus menerus dalam menjalankan tugasnya agar tujuan yang telah direncanakan dapat diwujudkan. Melalui fungsi pengawasan ini, terlihat bahwa dari hasil pemeriksaan tahun 2012-2016 ditemukan beberapa temuan yang diklasifikasikan kedalam aspek temuan pemeriksaan sebagaimana terinci

pada Tabel dibawah

Tabel 109

Perkembangan Temuan Hasil Pemeriksaan

Tahun 2012-2016

No.	Aspek	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah LHP	48	56	56	60	92
2	Tugas Pokok dan Fungsi	20	34	57	36	13
3	Keuangan	108	187	184	134	39
4	Sarana dan Prasarana	22	41	60	64	25
5	Sumber Daya Manusia	20	43	96	46	18
6	Metode Kerja	26	69	87	61	26
7	Prosedur dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	8	15	-	10	-
8	Pelaksanaan dan Pelaporan	9	32	-	19	-
9	Kebijakan Desa	-	-	-	2	140
10	Kelembagaan Desa	-	-	-	5	142
11	Keuangan Desa	-	-	-	2	471
12	Kekayaan Desa	-	-	-	2	234

Beberapa temuan tersebut telah menjadi catatan tersendiri dan sekaligus komitmen bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk lebih meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan dating. Oleh karena itu dari berbagai temuan kelemahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Buleleng perlu mengambil kebijakan yang efektif untuk memperbaiki kembali beberapa kekurangan yang terjadi. Komitmen Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menyelenggarakan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien tergambar dari meningkatnya intensitas Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja organisasi yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Langkah tersebut ditempuh sebagai langkah awal menumbuhkembangkan budaya kerja

yang harmonis, jujur, disiplin dan berorientasi pada prestasi yang tertanam pada diri setiap aparatur pemerintah. Konsekuensi dari pilihan kebijakan tersebut berimplikasi pada perlunya komitmen dan keberanian Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk memberikan penghargaan dan hukuman (pola insentif dan disinsentif) kepada aparatur yang berprestasi dan bagi yang tidak menjalankan tugas dengan baik ataupun melakukan pelanggaran. Oleh karena itu sejalan dengan peningkatan efektivitas pengawasan perlu adanya kebijakan yang strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Berbagai temuan selama periode 2012 - 2016 pada dasarnya merupakan suatu umpan balik yang harus ditindaklanjuti sebagai pencerminan pengawasan yang baik. Meningkatnya kompetensi aparat fungsional pengawasan memberikan kontribusi besar dalam rangka peningkatan kinerja aparatur pemerintah. Meningkatnya kemampuan untuk mendeteksi kelemahan dan kesalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan tupoksi disetiap unsur perangkat daerah akan mendukung pembinaan dan perbaikan kinerja aparatur pemerintah. Peningkatan kompetensi aparat pengawasan fungsional pemerintah diperoleh melalui Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor, P2UPD serta pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS).

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kepemimpinan Bupati Buleleng, mulai terlihat adanya peningkatan kualitas aparatur sebagai hasil dari upaya meningkatnya kualitas pendidikan formal pegawai melalui jalur pendidikan formal maupun diklat penjenjangan aparatur yang selama ini telah dilakukan.

Kondisi ini diharapkan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, bukan hanya dari sesi jenjang pendidikan formal, akan tetapi lebih dari itu mampu menjadi aparatur pemerintah yang bersih, professional, ulet, bertanggung jawab, disiplin serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Sebagai wujud keberhasilan selama kurun waktu tersebut dengan peraihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI atas LKPD Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 dan 2015, bahkan pada LKPD tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Buleleng mendapat predikat sebagai peraih WTP Terbaik di Provinsi Bali dan dari hasil evaluasi LAKIP SKPD terdapat peningkatan jumlah SKPD yang memperoleh nilai B.

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di bidang pengawasan tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan 35 program dan 176 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp16.783.783.000,00 dan terealisasi Rp16.548.665.596,00 atau 98.60% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 110

Jumlah Program dan Kegiatan
pada Inspektorat Kabupaten
Buleleng Tahun 2012-2017

No.	Uraia	Tahu				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Program	7	7	7	7	7
2	Jumlah Kegiatan	28	28	30	30	30

Sumber Data : Inspektorat Kab. Buleleng

Jika dilihat pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Buleleng tiap tahun dimulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 maka akan diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 111

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2012-2016

No	Uraia	Tahu				
		2012	2013	2014	2015	2016

1	Keuangan	95.10	98.96	99.65	99.11	99,43
2	Fisik	98.25	99,86	100	99.77	99.91
	Total Kegiatan	**97.20**	**99.84**	**99.56**	**99.05**	**99.75**

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan program / kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Buleleng dari tahun anggaran 2012 sampai dengan 2017 sebagai berikut :

Tabel 112

Perbandingan Pagu Sesuai Anggaran Perubahan pada Inspektorat kabupaten Buleleng tahun 2012-2017

NO	TAHUN	PAGU		TOTAL PAGU
		BL	BTL	
1	2012	1.753.000.000,00	3.087.096.700,00	4.840.096.700,00
2	2013	2.316.550.000,00	3.306.484.264,00	5.623.034.264,00
3	2014	6.036.059.000,00	3.234.370.020.72	9.270.429.020,72
4	2015	3.131.174.000,00	3.437.354.000,00	6.568.528.000,00
5	2016	3.547.000.000,00	3.825.692.000,00	7.372.692.000,00
6	2017	5.606.800.000,00	3.373.501.750,,00	8.980.301.750,00

Inspektorat Kabupaten Buleleng di dalam menjalankan fungsi pengawasan didukung oleh personil sejumlah 54 orang yang terdiri atas 44 PNS dan 10 Pegawai Kontrak. Pangkat dan Golongan PNS meliputi ; Pembina Utama Muda (IV/c) ; 1 orang, Pembina Tk.I (IV/b); 2, Pembina (IV/a) ; 6, Penata Tk. I (III/d); 4, Penata (III/c) ; 8, Penata Muda Tk.I (III/b) ; 6, Penata Muda (III/a) ; 4, Pengatur Tk.I (II/d) ; 2, Pengatur (II/c) ; 4, Pengatur Muda Tk.I (II/b) ; 1, Pengatur Muda (II/a); 2, Juru Tk.I (I/d) ; 1, Juru Muda Tk.I (I/b); 2, Juru Muda (I/a); 1. Dengan Kualifikasi pendidikan meliputi ; S2 ; 4, SI/D4; 24, D3 ; 2, SMA/SMK/MTs ; 9 , SMP/MI ; 1, SD ; 4. Pejabat structural Eselon IIb ; 1, Eselon IIIa ; 5, Eselon Iva ; 3. Jabatan Fungsional ; JF Auditor ; 10, JF P2UPD ; 3, JF Arsiparis ; 1.

5)PENDAPATAN DAERAH (DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BULELENG).

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2016 meliputi 7 program dan 37 kegiatan, yaitu :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- Kegiatan Penyediaan jsa peralatan dan perlengkapan kantor.
- Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
- Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan.
- Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor.
- Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
- Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman.
- Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah/dalam daerah.
- Kegiatan Penyediaan jasa administrasi kepegawaian.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Kegiatan Pengadaan Mebeleur
- Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana upacara
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- Kegaiatan Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
- Kegiatan Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

f. Program Perencanaan Anggaran SKPD.

- Kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD

g. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Kegiatan Intensifikasi Pemunggutan dan Penerimaan PBB & BPHTB
- Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendataan PBB & BPHTB
- Kegiatan Pemeliharaan & Verifikasi data PBB & BPHTB
- Kegiatan Penataan Administrasi dan Evaluasi Penerimaan Daerah
- Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Verifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
- Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Pendapatan Daerah
- Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penagihan Pajak Daerah
- Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penetapan Pajak Daerah
- Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendaftaran dan Pendataan Obyek dan Subyek Pajak Daerah
- Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Daerah dengan Sistim On Line
- Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah
- Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Lain-lain
- Kegiatan Koordinasi dan Penataan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain.

Realisasi pendapatan asli daerah sebagai komponen pendukung sumber pendapatan dalam struktur APBD Kabupaten Buleleng terealisasi sebagai berikut ; pajak daerah yang ditargetkan sebesar Rp. 134.189.665.292,96, terealisasi sebesar Rp. 92.314.597.186,99, atau mencapai 68,79 persen, retribusi Daerah yang ditargetkan pencapaiannya di Tahun 2016 sebesar Rp. 19.292.474.700,00, terealisasi sebesar Rp. 13.544.667.507,00 atau 70,12 persen. Dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi 96,20 persen, dari target sebesar

Rp. 15.029.631.799,22, terealisasi Rp. 14.458.434.307,73. Serta lain – lain pendapatan daerah yang sah yang ditargetkan sebesar Rp. 147.015.011.557,52, terealisasi Rp. 128.897.688.117,62. Sehingga total dari pendapatan asli daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 yang ditargetkan sebesar Rp. 315.526.783.349,70, terealisasi sebesar Rp. 249.215.387.119,34 atau 78,98 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi PAD pada Tahun 2015, terjadi penurunan pendapatan asli daerah yang berasal dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dari Lain –lain pendapatan asli daerah yang sah. Jika pada Tahun 2015 dari sektor pajak daerah berhasil terealisasi pendapatan sebesar Rp. 110.724.589.618,49, menurun menjadi Rp. 92.314.597.186,99 pada Tahun 2016. Begitu juga dengan sektor retribusi daerah dimana pada Tahun 2015 tercapai sebesar Rp. 19.881.367.925,00 namun menurun di Tahun 2016 menjadi Rp. 13.544.667.507,00 di Tahun 2016. Lain –lain pendapatan asli daerah yang sah pada Tahun 2015 terealisasi sebesar Rp. 149.833.592.046,02, hanya tercapai sebesar Rp. 128.897.688.117,62 di Tahun 2016. Hanya pada sektor Hasil Pengeloalaan Kekayaan daerah yang dipisahkan terjadi peningkatan pendapatan, yang semula di Tahun 2015 terealisasi sebesar Rp. 12.657.529.373,69, pada Tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 14.458.434.307,73.

Sementara untuk realisasi pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan hanya terealisasi sebesar 37,11 persen, dari target sebesar Rp. 44.601.137.619,17 terealisasi sebesar Rp. 16.555.059.398,00. Jika mengacu pada perkembangan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016, terjadi tren perkembangan yang terus meningkat. Pada Tahun 2012 realisasi dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan tercapai sebesar Rp. 7.656.531.623, kemudian di Tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 8.161.885.078, meningkat lagi di Tahun 2014 menjadi Rp. 12.926.065.309, Tahun 2015 terealisasi sebesar Rp. 13.362.909.679,00 dan pada Tahun 2016 terealisasi menjadi Rp. 16.555.059.398,00.

Realisasi Pajak Daerah pada Tahun 2016 pada umumnya dapat tercapai secara optimal, dari sektor pajak hotel realisasinya mencapai 114,17 persen, dari target sebesar Rp. 20.260.491.894,79, terealisasi Rp. 23.132.209.956,97. Sektor pajak restoran pada Tahun 2016 terealisasi 111,21 persen dari target yang direncanakan. Dengan target sebesar Rp. 9.449.500.000,00 terealisasi Rp. 10.509.397.526,77. Selanjutnya pajak hiburan yang ditargetkan sebesar Rp.

1.360.355.000,00, terealisasi Rp. 1.438.510.551,39 atau mencapai 105,74 persen. Pajak penerangan jalan juga terealisasi melebihi target yang telah direncanakan. Dari target sebesar Rp. 28.200.000.000,00 berhasil terealisasi Rp. 28.928.112.105,00 atau 102,58. Pajak parker dengan target sebesar Rp. 150.500.000,00 terealisasi Rp. 168.356.860,00 atau 111,86 persen. Pajak Mineral bukan logam dan batuan, dengan target Rp. 55.000.000,00, terealisasi Rp. 56.595.000,00 atau 102,90 persen. Dan pajak sarang burung wallet terealisasi sesuai taget yakni dari target awal sebesar Rp. 500.000,00, terealisasi Rp. 500.000,00. Beberapa sektor pajak yang realisasinya masih dibawah target meliputi ; pajak air tanah dengan target Rp. 1.000.000.000,00, terealisasi sebesar Rp. 897.061.033,00 atau 89,71 persen. Pajak Perolehan Bea Atas Tanah dan bangunan (BPHTB), dengan target sebesar Rp. 28.204.030.779,00, terealisasi sebesar Rp. 19.496.134.458,00 atau 69,12 persen.

Perangkat Daerah yang menangani optimalisasi pendapatan daerah Kabupaten Buleleng adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng. Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng didukung oleh personil sejumlah 187 orang yang terdiri atas 107 PNS dan 80 Pegawai Kontrak. Pangkat dan Golongan PNS meliputi ; Pembina Utama Muda (IV/c) ; 1 orang, Pembina Tk.I (IV/b); 4, Pembina (IV/a) ; 9, Penata Tk. I (III/d); 9, Penata (III/c) ; 21, Penata Muda Tk.I (III/b) ; 4, Penata Muda (III/a) ; 3, Pengatur Tk.I (II/d) ; 24, Pengatur (II/c) ; 22, Pengatur Muda Tk.I (II/b) ; 3, Juru Tk.I (I/d) ; 1, Juru Muda Tk.I (I/b); 3, Juru Muda (I/a); 1. Dengan Kualifikasi pendidikan meliputi ; S2 ; 4, SI/D4; 31, D3 ; 6, SMA/SMK/MTs ; 61 , SMP/MI ; 3, SD ; 2. Pejabat structural Eselon IIb ; 1, Eselon IIIa ; 1, Eselon IIIb ; 3, Eselon Iva ; 15.

Untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng Tahun 2016 dialokasikan belanja daerah sebesar Rp.24.309.838.366,46 dan terealisasi sebesar Rp.19.929.444.311,00 atau 81,98% yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp.15.329.838.366,46 dan terealisasi Rp.12.325.681.865 atau 80,40% dan untuk belanja langsung sebesar Rp. 8.980.000.000 dan realisasi sebesar Rp.7.603.762.446 atau 84,67%.

6)KECAMATAN.

Kabupaten Buleleng terdiri atas 9 kecamatan yakni : Kecamatan Gerokgak, Kecamatan Seririt, Kecamatan Busungbiu, Kecamatan Banjar, Kecamatan Sukasada,

Kecamatan Buleleng, Kecamatan Sawan, Kecamatan Kubutambahan dan Kecamatan Tejakula.

Gambar 13
Persentase luas Kecamatan Terhadap Luas Kabupaten

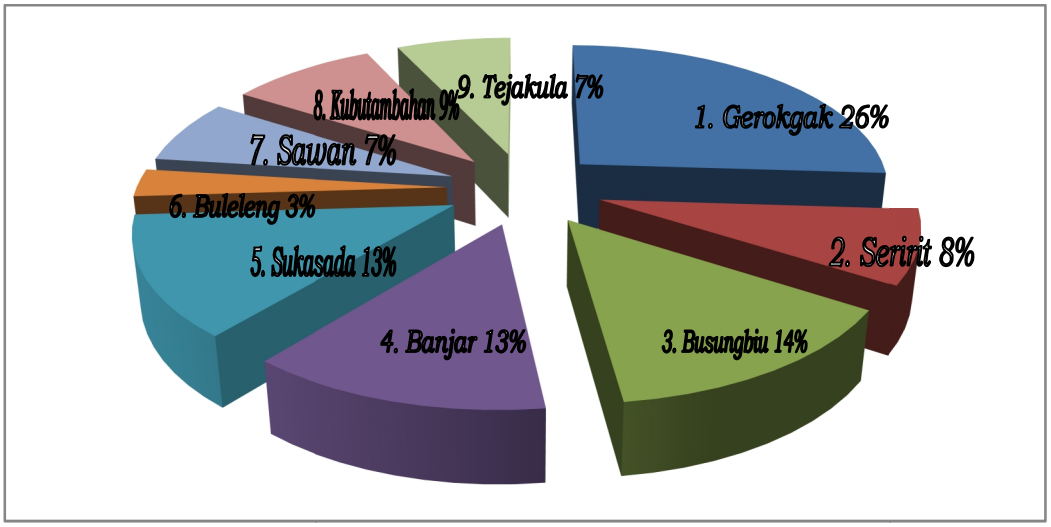

Sumber : Tinjauan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Buleleng, 2016

Dari tabel diatas apabila dilihat dari luas masing–masing kecamatan, Kec. Gerokgak merupakan kecamatan terluas, yakni 26,11% dari luas kabupaten, diikuti Kecamatan Busungbiu sebesar 14,40%, Kecamatan Sukasada & Banjar masing–masing 12,66% dan 12,64%, kemudian Kecamatan Kubutambahan sebesar 8,66%, Kecamatan Seririt 8,18%, Kecamatan Tejakula 7,15%, Kecamatan Sawan 6,77% dan yang terkecil adalah Kecamatan Buleleng, yaitu hanya 3,44%.

Kabupaten Buleleng terbagi dalam 9 kecamatan dengan 129 desa definitif, 19 kelurahan. Pembagian wilayah tersebut diatas adalah Kecamatan Gerokgak (14 desa), Kecamatan Seririt (20 desa dan 1 kelurahan), Kecamatan Busungbiu (15 desa), Kecamatan Banjar (17 desa), Kecamatan Sukasada (14 desa & 1 kelurahan), Kecamatan Buleleng (12 desa dan 17 kelurahan), Kecamatan Sawan (14 desa), Kecamatan Kubutambahan (13 desa), dan Kecamatan Tejakula (10 desa).

Pelaksanaan pemenuhan dan penyelenggaraan pelayanan publik cakupan layanannya masih dirasakan terbatas dan belum optimal. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah masih banyaknya kewenangan yang ditangani, jumlah penduduk yang besar, cakupan luas wilayah, topografi wialayah serta keterbatasan kapasitas pelayanan yang dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah

daerah. Guna mengikis keterbatasan pelayanan yang dapat diakses oleh masyarakat maka melalui Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Pemerintah mencoba menjembatani dan mengikis alur pelayanan yang dirasakan terlalu panjang dibuat menjadi sederhana melalui pemusatan cakupan pelayanan melalui tataran pemerintahan kecamatan. Implementasinya adalah adanya penyerahan sebagaian kewenangan Bupati kepada Camat. Hal ini sebagai upaya mempercepat pengambilan keputusan berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempersempit rentang kendali Bupati kepada Perbekel/ Lurah dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan Sistem Administrasi Terpadu Kecamatan adalah sebagai implementasi upaya pemerintah kabupaten untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta lebih mengembangkan potensi wilayah sehingga dipandang perlu untuk melimpahkan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan. Secara lebih jelas hal ini diatur pada Pasal 25 ayat (6) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan ; Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat dan Pasal 226 ayat (1) yang menyatakan ; selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota

Upaya penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Buleleng telah dimulai sejak Tahun 2014 dan pada Tahun 2015 telah ditetapkan 3 kecamatan yakni: Kecamatan Gerokgak, Kecamatan Buleleng dan Kecamatan Tejakula sebagai penyelenggara PATEN di Kabupaten Buleleng karena berdasarkan pertimbangan telah memenuhi 3 syarat penerapan PATEN yakni : syarat substantif, administratif dan teknis. Sebagai tindaklanjut dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 6 Desember 2016 telah dilaksanakan penetapan 6 kecamatan di Kabupaten Buleleng sebagai kecamatan penyelenggara

PATEN yang ditandai dengan penyerahan SK Bupati Buleleng Nomor 130/817/HK/2016 tertanggal 2 Desember 2016 oleh Plt. Bupati Buleleng kepada Para Camat.

Dalam Tahun Anggaran 2016, 9 Kecamatan di Kabupaten Buleleng dalam pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan melaksanakan 95 Program dan 396 kegiatan dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 26,665,305,567.70 dan terealisasi sebesar Rp. 25,737,947,397.00 atau 96,52 persen dan capaian fisik rata – rata 100 persen. Secara rinci realisasi dan alokasi anggaran untuk masing – masing kecamatan di Kabupaten Buleleng terangkum dalam tabel 66.

Pencapaian kinerja 9 Kecamatan di Kabupaten Buleleng didukung oleh personil sejumlah 502 PNS dengan pangkat dan golongan meliputi ; Pembina Tk.I (IV/b); 4, Pembina (IV/a) ; 16, Penata Tk. I (III/d); 71, Penata (III/c) ; 85, Penata Muda Tk.I (III/b) ; 49, Penata Muda (III/a) ; 14, Pengatur Tk.I (II/d) ; 14, Pengatur (II/c) ; 129, Pengatur Muda Tk.I (II/b) ; 86, Pengatur Muda (IIa); 28, Juru Tk.I (I/d) ; 2, Juru (Ic) ; 3, Juru Muda Tk.I (I/b); 1. Pejabat structural Eselon IIIa ; 9, Eselon IIIb ; 9, Eselon Iva ; 64, Eselon IVb ; 122.

Terkait relaisasi program dan kegiatn untuk masing-masing kecamatan diuraikan sebagaimana dibawah ini:

KECAMATAN GEROKGAK

Kecamatan Gerokgak pada tahun 2012-2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp7.924.472.000 dan terealisasi sebesar Rp7.741.553.303 atau sebesar 97,69%, sisa sebesar Rp182.938.697. Tahun 2017 anggaran yang dialokasikan pada Kecamatan Gerokgak sebesar Rp2.438.477.250,00 untuk alokasi anggaran kegiatan sesuai program dan kegiatan 10 program dan 46 kegiatan Adapun rincian pertahun anggaran dan realisasi dari tahun 2012-2016 pada Kantor Camat Gerokgak adalah sebagai berikut :

Tabel 113

Anggaran dan Realisasi Kecamatan Gerokgak Tahun 2012-2016

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
1	2012	930.000.000	884.582.003	45.417.997	95,12
2	2013	1.301.600.000	1.247.867.003	53.732.997	95,87
3	2014	1.665.125.000	1.649.962.730	15.162.270	99,09
4	2015	1.687.219.000	1.663.151.261	24.067.739	98,57
5	2016	2.340.528.000	2.295.970.306	44.557.694	98,10
Jumlah		**7.924.472.00**	**7.741.533.30**	**182.938.69**	**97,69**

Sumber : Kecamatan Gerokgak

KECAMATAN BUSUNGBIU

Setiap tahunnya Kecamatan Busungbiu tetap berpartisipasi dalam kegiatan lomba yang diselenggarakan kabupaten seperti lomba utsawa dharma gita, lomba baleganjur, lomba utsawa gong kebyar, lomba subak abian, lomba subak sawah, lomba desa pakraman. Di tahun 2015, dengan berkoordinasi dengan Forkom Perbekel Kecamatan sepakat untuk melaksanakan Pagelaran Seni dan Budaya Kecamatan dengan mengambil tema "Gita Merdangga Shanti". Adapun pembiayaannya bersumber dari swadaya dengan partisipasi desa, instansi dan swasta. Hal ini mendapat apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Buleleng, dimana Kecamatan Busungbiu dijadikan pioner dalam penyelenggaran festival budaya kecamatan, terbukti dengan dialokasikannya dana bagi setiap kecamatan untuk melaksanakan kegiatan yang sama di tahun berikutnya.

Dalam hal penyelenggaraan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan verifikasi APBDesa, Kecamatan Busungbiu membentuk Tim Verifikasi Kecamatan yang bertugas melaksanakan verifikasi RAPBDesa Induk dan Perubahan terhadap 15 desa yang menjadi tanggungjawab Kecamatan Busungbiu. Tentunya dengan tetap melakukan koordinasi ke dinas terkait, semua berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga tidak terjadi keterlambatan baik itu dalam penetapan Peraturan Desa maupun dalam pencairannya.

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan umum tersebut, dicapai melalui pelaksanaan 44 program dan 210 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp7.250.598.649,84 dan realisasi Rp7.111.477.052,00 atau 98,00%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 114

Anggaran dan Realisasi Kecamatan
Busungbiu Tahun 2012-2017

No	Uraian	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Program	8	8	8	9	11	11
2	Jumlah	42	42	40	43	43	47
3	Anggaran	825.000.000	1.174.977.982	1.472.477.000	1.460.106.000	2.318.037.667,84	3.764.669.100
4	Realisasi	803.114.092	1.127.452.356	1.429.841.893	1.454.672.010	2.296.396.701,00	-

Sumber Data : Kecamatan Busungbiu

KECAMATAN BANJAR

Kecamatan Banjar pada tahun 2012-2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp9.557.954.122,22 dan terealisasi sebesar Rp9.331.787.881,00 atau sebesar 97,63%, sisa sebesar Rp226.166.241,22. Tahun 2017 anggaran yang dialokasikan pada Kecamatan Banjar sebesar Rp2.409.448.540,00 untuk alokasi anggaran kegiatan sesuai program dan kegiatan 12 program dan 51 kegiatan adapun rincian pertahun anggaran dan realisasi dari tahun 2012- 2016 pada Kantor Camat Banjar adalah sebagai berikut :

Tabel 115

Anggaran dan Realisasi Kecamatan
Banjar Tahun 2012-2017

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
1	2012	2.271.964.300,00	2.245.982.441,00	25.981.859,00	98,86

2	2013	1.350.450.000,00	1.300.438.249,00	50.011.751,00	96,30
3	2014	1.756.615.000,00	1.692.023.705,00	64.591.295,00	96,32
4	2015	1.868.330.000,00	1.847.503.489,00	20.826.511,00	98,89
5	2016	2.310.594.822,22	2.245.839.997,00	64.754.825,22	97,20
Jumlah		9.557.954.122,22	9.331.787.881,00	226.166.241,22	97,63

Penyusunan Renstra Kecamatan Banjar 2012-2017 mengalami penyempurnaan beberapa kali sesuai dengan arahan dan hasil beberapa bimtek penyusunan Renstra yang diikuti. Penyesuaian itu dilaksanakan pada Tahun 2013, dan disempurnakan lagi pada Tahun 2016. Sebelumnya target kinerja yang ditetapkan belum berorientasi kinerja, tetapi masih pada output atas realisasi keuangan SKPD.

KECAMATANBULELENG

Kecamatan Buleleng pada tahun 2012-2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp8.083.059.195,00 dan terealisasi sebesar Rp7.919.554.870,00 atau sebesar 97,63%, sisa sebesar Rp1.635.043.250,00.

Tahun 2017 anggaran yang dialokasikan pada Kecamatan Buleleng sebesar Rp5.473.314.128,00 untuk alokasi anggaran kegiatan sesuai program dan kegiatan 12 program dan 69 kegiatan. Adapun rincian pertahun anggaran dan realisasi dari tahun 2012-2017 pada Kantor Camat Buleleng adalah sebagai berikut:

Tabel 116

Anggaran dan Realisasi Kecamatan
Buleleng Tahun 2012-2017

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	(%)Realisas
1	2012	Rp1.207.002.550,00	Rp1.193.741.400,00	Rp13.261.150,00	98,89
2	2013	Rp1.737.872.100,00	Rp1.646.122.280,00	Rp91.749.820,00	94,72
3	2014	Rp1.480.664.500,00	Rp1.478.547.000,00	Rp21.175.000,00	99,85
4	2015	Rp1.970.117.300,00	Rp1.948.873.425,00	Rp21.243.875,00	98,92
5	2016	Rp1.687.402.745,00	Rp1.652.270.765,00	Rp62.131.980,00	97,91
6	2017	Rp5.473.314.128,00	-	-	-
Jumlah		Rp 13.556.373.323,00	Rp	Rp 163.504.325,00	58,42

Penyusunan Renstra Kecamatan Buleleng 2012-2017 mengalami penyempurnaan beberapa kali sesuai dengan arahan dan hasil beberapa bimtek penyusunan Renstra yang diikuti. Penyesuaian itu dilaksanakan pada Tahun 2013, dan disempurnakan lagi pada Tahun 2016. Sebelumnya target kinerja yang ditetapkan belum berorientasi kinerja, tetapi masih pada output atas realisasi keuangan SKPD.

KECAMATAN SAWAN

Kecamatan Sawan pada tahun 2012-2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp7.051.979.621,00 dan terealisasi sebesar Rp6.792.757.440,00 atau sebesar 97,34%, sisa sebesar Rp259.222.181,00. Tahun 2017 anggaran yang dialokasikan pada Kecamatan Sawan sebesar Rp1.930.326.500,00 untuk alokasi anggaran kegiatan sesuai program dan kegiatan 10 program dan 35 kegiatan. Adapun rincian pertahun anggaran dan realisasi dari tahun 2012-2016 pada Kantor Camat Sawan adalah sebagai berikut :

Tabel 117

Anggaran dan Realisasi Kecamatan Sawan

Tahun 2012-2017

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi	Sisa anggaran	% Realisasi
1	2012	829.865.000	813.498.670	163.66.330	96.34
2	2013	1,194.550.000	1,113.111.995	81.438.005	97.52
3	2014	1,465.280.000	1,449.826.445	15.453.555	99.19
4	2015	1.742.169.000	1.644.602.637	97.566.363	97.80
5	2016	1.820.115.621	1.771.717.693	48.397.928	98.44
6	2017	1.930.326.500.00	-	-	-
Jumlah		**8.982.306.121.00**	**6.792.757.440**	**259.222.181**	**96.32**

KECAMATAN SERIRIT

Kecamatan Seririt pada tahun 2012-2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp27.965.979.666,00 dan terealisasi sebesar Rp27.416.113.062,00 atau sebesar 98,03%, sisa sebesar Rp549.866.604,00

Tahun 2017 anggaran yang dialokasikan pada Kecamatan Seririt sebesar Rp3.582.881.510,00 untuk alokasi anggaran kegiatan sesuai program dan kegiatan 12 program dan 57 kegiatan. Adapun rincian pertahun anggaran dan realisasi dari tahun 2012-2016 pada Kantor Camat Seririt adalah sebagai berikut :

Tabel 118

Anggaran dan Realisasi Kecamatan Seririt

Tahun 2012-2017

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2012	3.872.340.400,00	3.646.486.008,00	225.854.392,00	94,17
2	2013	4.454.084.056,00	4.300.230.277,00	153.853.779,00	96,55

3	2014	4.824.584.798,00	4.786.690.654,00	37.894.144,00	99,21
4	2015	5.690.623.000,00	5.634.036.616,00	56.586.384,00	99,01
5	2016	9.124.347.412,00	9.048.669.507,00	75.677.905,00	99,17

Penyusunan Renstra Kecamatan Seririt 2012-2017 mengalami penyempurnaan beberapa kali sesuai dengan arahan dan hasil beberapa bimtek penyusunan Renstra yang diikuti. Penyesuaian itu dilaksanakan pada Tahun 2013, dan disempurnakan lagi pada Tahun 2016. Sebelumnya target kinerja yang ditetapkan belum berorientasi kinerja, tetapi masih pada output atas realisasi keuangan SKPD. Untuk itu data yang kami tampilkan dalam perbandingan realisasi kinerja hanya dari Tahun 2014, karena pada tahun-tahun sebelumnya sangat sulit untuk mengumpulkan data kinerja dan kesulitan dalam menyimpulkan hasil kinerja dari output kegiatan tersebut.

KECAMATAN TEJAKULA

Kecamatan Tejakula pada tahun 2012-2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp17.054.489.002,57 dan terealisasi sebesar Rp16.337.585.383,00 atau sebesar 95,86%, sisa sebesar Rp716.903.619,57. Tahun 2017 anggaran yang dialokasikan pada Kecamatan Tejakula sebesar Rp2.409.448.540,00 untuk alokasi anggaran kegiatan sesuai program dan kegiatan 12 program dan 51 kegiatan. Adapun rincian pertahun anggaran dan realisasi dari tahun 2012-2016 pada Kantor Camat Tejakula adalah sebagai berikut :

Tabel 119

Anggaran dan Realisasi Kecamatan Tejakula

Tahun 2012-2017

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
1	2012	2.520.578.920,00	2.398.948.430,00	121.630.490,00	95,17
2	2013	3.027.723.525,13	2.970.735.000,00	56.988.525,13	98,12

3	2014	3.727.905.501,10	3.597.460.845,00	130.444.656,10	96,50
4	2015	3.787.601.000,00	3.594.918.548,00	192.682.452,00	94,91
5	2016	3.990.680.056,34	3.775.522.560,00	215.157.496,34	94,61
Jumlah		**17.054.489.002,**	**16.337.585.383,**	**716.903.619,5**	**95,86**

Penyusunan Renstra Kecamatan Tejakula 2012-2017 mengalami penyempurnaan beberapa kali sesuai dengan arahan dan hasil beberapa bimtek penyusunan Renstra yang diikuti. Penyesuaian itu dilaksanakan pada Tahun 2013, dan disempurnakan lagi pada Tahun 2016. Sebelumnya target kinerja yang ditetapkan belum berorientasi kinerja, tetapi masih pada output atas realisasi keuangan SKPD. Untuk itu data yang kami tampilkan dalam perbandingan realisasi kinerja hanya dari Tahun 2014, karena pada tahun-tahun sebelumnya sangat sulit untuk mengumpulkan data kinerja dan kesulitan dalam menyimpulkan hasil kinerja dari output kegiatan tersebut.

KECAMATAN SUKASADA

Sebagai Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, pemerintah Kecamatan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan menuju pelayanan prima, yang mana dapat diwujudkan dengan meningkatkan kualitas aparatur yang terlibat di dalamnya. Untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan,Program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Sukasada pada tahun 2012- 2016 dialokasikan anggaran sebesar Rp8.989.517.210,00 danterealisasi sebesar Rp8.813.147.398,00 atau (98,04%) sisa sebesar Rp176.369.812,00.

Adapun rincian pertahun anggaran dan realisasi dari tahun 2012-2017 pada Pemerintah Kecamatan Sukasada adalah sebagai berikut :

Tabel 120

Anggaran dan Realisasi Kecamatan
Sukasada Tahun 2012-2017

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi	Sisa anggaran	% Realisasi
1	2012	977.000.000,00	941.266.253,00	35.733.747,00	96,34
2	2013	1.437.643.210,00	1.401.942.386,00	35.700.824,00	97,52
3	2014	1.740.700.000,00	1.726.623.553,00	14.076.447,00	99,19
4	2015	2.405.581.000,00	2.352.672.252,00	52.908.748,00	97,80
5	2016	2.428.593.000,00	2.390.642.954,00	37.950.046,00	98,44
6	2017	2.655.702.950,00	-	-	-
Jumlah		**11.645.220.16**	**8.813.147.398**	**2.832.072.762**	**75,68**

KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan memiliki peran dalam membantu Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan tugas Pemerintah. Dimana kecamatan sebagai perangkat daerah merupakan organisasi terdepan dalam memberikan pelayanan publik. Camat beserta jajarannya bersifat operasional dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sehingga misi kecamatan tidak dapat dilepaskan dan sangat erat kaitannya dengan visi dan misi kabupaten. Sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah di kecamatan, Pemerintah Kecamatan memiliki tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, disamping melaksanakan tugas dari pelimpahan wewenang Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah, Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintah meliputi:

- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum

Dengan demikian, dengan tugas "mengkoordinasikan" pemerintah kecamatan diharapkan mampu mendorong kelancaran berbagai kegiatan di tingkat kecamatan kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan dengan tugas "membina" diharapkan mampu memfasilitasi pembuatan Peraturan Desa, terwujudnya administrasi tata Pemerintahan Desa yang baik. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 64 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan se- Kabupaten Buleleng, disebutkan bahwa tugas pokok Pemerintah Kecamatan adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi diantaranya tugas di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, pelayanan umum serta ketertiban dan keamanan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan pemerintah kecamatan adalah :

- Meningkatkan kompetensi aparat pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa, dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu terwujudnya

tertib administrasi perkantoran dan terwujudnya tertib administrasi Pemerintahan Desa.

- Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu terwujudnya pelayanan cepat dan tepat.
- Menciptakan kondisi sosial politik dan keamanan yang mantap, dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu terwujudnya kondisi wilayah aman, tertib dan kondusif.

Berdasarkan Perda Kabupaten Buleleng No. 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sedangkan Tugas Pokok dan Fungsi secara rinci diatur dengan Keputusan Bupati No. 64 Tahun 2008. Tugas pokok Pemerintah Kecamatan sesuai dengan keputusan tersebut adalah melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi diantaranya tugas di bidang Pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, Pelayanan Umum, serta ketertiban dan keamanan di Wilayah Kecamatan serta mengkoordinasikan kegiatan Instansi yang ada di Wilayah Kecamatan.

Kecamatan Kubutambahan pada tahun 2012-2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp7.136.931.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.883.964.657,00 atau sebesar 96,46%,sisa sebesar Rp252.966.343,00. Tahun 2017 anggaran yang dialokasikan pada Kecamatan Kubutambahan sebesar Rp2.396.860.000.00 untuk alokasi anggaran kegiatan sesuai program dan kegiatan 10 program dan 41 kegiatan. Adapun rincian pertahun anggaran dan realisasi dari tahun 2012-2016 pada Kantor Camat Kubutambahan adalah sebagai berikut :

Tabel 121

Anggaran dan Realisasi Kecamatan Kubutambahan
Tahun 2012-2017

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
1	2012	807.000.000	790.722.817	16.277.183	97,98 %
2	2013	1.419.100.000	1.387.122.916	31.977.084	97,75 %
3	2014	1.651.590.000	1.642.092.381	9.497.619	99,42 %
4	2015	1.466.671.000	1.455.320.660	11.350.340	99,32 %
5	2016	1.792.570.000	1.608.705.883	183.864.117	89,74 %
6	2017	2.396.860.000	-	-	-
Jumlah		**9.533.791.00**	**6.883.964.65**	**2.649.826.34**	**72,23 %**

B. PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN.

Dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017, yang kemudian dijabarkan sesuai dengan pembagian urusan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Penyelenggaraan Urusan Wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat tersebut diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundangan. Sedangkan urusan pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah. Pada periode RPJMD Tahun 2012-2017, Pemerintah Kabupaten Buleleng melaksanakan 25 urusan wajib dan 8 urusan pilihan.

1. URUSAN PENDIDIKAN.

Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pembukaannya menyebutkan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 20, 21, 28 C ayat 1, pasal 31 dan pasal 32 Batang Tubuh UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang berlandaskan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara indonesia, untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ekonomi, suku, etnis, agama

dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan dapat menjadikan warga Negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*), sehingga mendorong pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Atas dasar hal tersebut diatas, maka tujuan penyelenggaraan urusan pendidikan adalah:

- Meningkatkan kesempatan berlajar masyarakat melalui pemerataan dan perluasan akses pendidikan;
- Meningkatkan mutu pendidikan;
- Terpenuhinya mutu sarana dan prasarana pendidikan;
- Memantapkan kualitas satuan-satuan pendidikan;

Mengacu kepada tujuan penyelenggaraan pendidikan maka sasaran penyelenggaraan urusan pendidikan antara lain:

- Meningkatnya partisipasi masyarakat, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan pencapaian APK dan APM di setiap satuan pendidikan mulai dari TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK;
- Untuk meningkatkan mutu pendidikan, sasaran pokoknya adalah peningkatan kualifisasi tenaga pendidik yang berimplikasi pada optimalisasi peningkatan mutu proses belajar mengajar;
- Untuk tercapainya pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang bermutu, sasarannya terfokus pada terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan memadai dan layak untuk proses pembelajaran;
- Dalam rangka memantapkan kualitas satuan satuan pendidikan dengan sasaran seluruh satuan dan pengelola pendidikan.

Program pembangunan yang dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017 dalam bidang pendidikan meliputi :

1) Program Pendidikan Anak Usia Dini.
2) Program Wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
3) Program Pendidikan Menengah.
4) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
5) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
6) Program Pendidikan Non Formal.

Bidang Pendidikan Dasar merupakan salah satu bidang yang telah di tetapkan pemerintah dalam penerapan dan pencapaian SPM dengan 2 (dua) pelayanan dasar dan 26 (dua puluh enam) jumlah indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2013

Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota. Di Kabupaten Buleleng dalam penerapan dan pencapaian SPM dibidang Pendidikan Dasar dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawab yaitu Dinas Pendidikan. Pada tabel berikut, dapat disajikan informasi tentang Indikator dan capaian SPM bidang Pendidikan Dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten tahun 2014-2016, sebagai berikut :

Tabel 20
Kondisi Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan

Jenis Pelayanan Dasar / Indikator SPM	KONDISI CAPAIAN SPM (%)			
	Level	CAPAIAN SPM 2014	CAPAIAN SPM 2015	CAPAIAN SPM 2016
		a/b*100 %	a/b*100 %	a/b*100%
Pendidikan Dasar oleh Kab/Kota 1. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;	SD	100.00	100.00	100.00
	MI	100.00	100.00	100.00
	SMP	91.34	92.67	92.67
	MTs	100.00	100.00	100.00
2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;	SD	100.00	100.00	100.00
	MI	100.00	100.00	100.00
	SD	100.00	100.00	100.00
	MI	100.00	100.00	100.00
	SMP	100.00	100.00	100.00
	MTS	100.00	100.00	100.00
3. Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;	SMP	79.22	79.74	79.74
	MTS	85.71	85.71	85.71
	SMP	79.22	79.74	79.74
	MTs	85.71	85.71	85.71
4. Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan	SD	100.00	100.00	100.00
	MI	100.00	100.00	100.00
	SMP	100.00	100.00	100.00

lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;	MTs	100.00	100.00	100.00
5. Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan	SD	100.00	100.00	100.00
	MI	100.00	100.00	100.00
	SD	100.00	100.00	100.00
	MI	100.00	100.00	100.00
6. Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;	SMP	100.00	100.00	100.00
	MTs	100.00	100.00	100.00
7. Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	SD	100.00	100.00	100.00
	MI	100.00	100.00	100.00
8. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%	SMP	100.00	100.00	100.00
	MTS	100.00	100.00	100.00
9. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia,Bahasa Inggris dan PKn	SMP	100.00	100.00	100.00
	MTs	100.00	100.00	100.00
10.Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	SD	100.00	100.00	100.00
	MI	100.00	100.00	100.00
11. Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	SMP	100.00	100.00	100.00
	MTs	100.00	100.00	100.00
12. Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik	SD	100.00	100.00	100.00
	MI	100.00	100.00	100.00
13. Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;	SD	100.00	100.00	100.00
	MI	100.00	100.00	100.00
	SMP	100.00	100.00	100.00

	MTs	100.00	100.00	100.00
100 bila kab/ kota memiliki rencana dan telah melaksanakan kegiatan untuk membantu sekolah mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif				
50 bila memiliki rencana tetapi belum melaksanakan				
0 bila tidak memiliki rencana untuk membantu sekolah dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.				
14.Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan;	SD	100.00	100.00	100.00
	MI	100.00	100.00	100.00
	SMP	100.00	100.00	100.00
	MTs	100.00	100.00	100.00
Pendidikan pelayanan dasar oleh satuan pendidikan 15.Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	SD	100.00	100.00	100.00
	MI	100.00	100.00	100.00
16.Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik;	SMP	100.00	100.00	100.00
	MTs	100.00	100.00	100.00
17.Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;	SD	100.00	100.00	100.00
	MI	100.00	100.00	100.00
18.Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi,dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;	SD	100.00	100.00	100.00
	MI	100.00	100.00	100.00
	SMP	100.00	100.00	100.00
	MTs	100.00	100.00	100.00

19.Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;	guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan	100.00	100.00	100.00
	SD	100.00	100.00	100.00
	MI	100.00	100.00	100.00
	SMP	100.00	100.00	100.00
	MTs	100.00	100.00	100.00
20.Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut :	Jumlah rombongan belajar yang memenuhi standar	100.00	100.00	100.00
Kelas I - II : 18 jam per minggu	SD	100.00	100.00	100.00
Kelas III : 24 jam per minggu	MI	100.00	100.00	100.00
Kelas IV – VI : 27 jam per minggu	SMP	100.00	100.00	100.00
Kelas VII – IX : 27 jam per minggu	MTs	100.00	100.00	100.00
21.Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku	SD	100.00	100.00	100.00
	MI	100.00	100.00	100.00
	SMP	100.00	100.00	100.00
	MTs	100.00	100.00	100.00
22.Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	SD	100.00	100.00	100.00
	MI	100.00	100.00	100.00
	SMP	100.00	100.00	100.00
	MTs	100.00	100.00	100.00
23.Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	Jumlah guru yang mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	100.00	100.00	100.00
	SD	100.00	100.00	100.00
	MI	100.00	100.00	100.00
	SMP	100.00	100.00	100.00

	MTs	100.00	100.00	100.00
24.Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	SD	100.00	100.00	100.00
	MI	100.00	100.00	100.00
	SMP	100.00	100.00	100.00
	MTs	100.00	100.00	100.00
25.Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil presentasi belajar peserta didik	SD	100.00	100.00	100.00
	MI	100.00	100.00	100.00
	SMP	100.00	100.00	100.00
	MTs	100.00	100.00	100.00
26.Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaiakan Kelas (UKK) serta Ujian Akhire (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau	Jumlah satuan pendidikan yang menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN)	100.00	100.00	100.00
	SD	100.00	100.00	100.00
	MI	100.00	100.00	100.00
	SMP	100.00	100.00	100.00
	MTs	100.00	100.00	100.00

Sumber data : Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng

Pendidikan Anak Usia Dini.

Pendidikan anak usia dini sangat penting dilaksanakan dalam upaya menumbuh kembangkan semua potensi yang dimiliki oleh anak dalam usia ini (usia emas). Pendidikan Anak Usia Dini juga merupakan pendidikan persiapan untuk mengikuti jenjang pendidikan formal (khususnya Sekolah Dasar).

Program ini dilaksanakan untuk peningkatkan akses dan peningkatan mutu pelayanan pendidikan melalui jalur formal seperti TK, RA dan bentuk lain yang sederajat, serta jalur pendidikan non formal berbentuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak atau bentuk lain yang sederajat, dan jalur informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Sarasan atau target grup dari program ini adalah penduduk usia 0-5 tahun yang perlu mendapat pendidikan sejak usia dini melalui TPA, kelompok-kelompok bermain, dan Taman Kanak-Kanak serta SDM dan sarana prasarana yang terkait dengan program ini.

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam penyelenggaraan urusan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng yang diukur melalui indikator-indikator program antara lain: peningkatan angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM), angka drop out (DO), angka melanjutkan, tingkat kelulusan, dan nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) untuk tingkat SD, SLTP dan SLTA. Penetapan target dan realisasi dari masing-masing indikator program tersebut adalah sebagi berikut :

Tabel 21
Capaian Indikator Pendidikan Kabupaten Buleleng
Tahun 2013-2016

Indikator program	Satuan	Realisasi (Tahun)			
		2013	2014	2015	2016
1. APK :					
- SD / MI	%	111,74	106,15	107,50	104,46
- SMP / MTs	%	97,86	99,54	99,30	104,23
- SMA / MA / SMK	%	85,23	86,71	89,10	86,56
2. APM :					
- SD / MI	%	96,65	98,05	97,10	96,09
- SMP / MTs	%	75,84	77,34	87,83	94,60
- SMA / MA / SMK	%	74,96	75,01	79,20	64,52
3. Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,63	6,66	6,77	-
4. Angka Drop Out (DO)	Siswa	206	236	236	195

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam penyelenggaraan urusan pendidikan cukup berhasil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di setiap satuan pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA/SMK selama tahun 2013-2016 dan optimalisasi peningkatan mutu proses belajar mengajar. Sedangkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka sejak awal 2017 pendidikan menengah (SMA/SMK) telah menjadi kewenangan Provinsi yang proses penyerahannya dilaksanakan pada Bulan Oktober 2016.

Selama periode 2013-2016 capaian pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Buleleng mengindikasikan hasil yang menggembirakan. Data pendidikan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan penyelenggaraan

urusan pendidikan ke arah yang positif, yaitu salah satunya tercermin dari indikator penduduk buta huruf yang tersaji dalam tabel berikut

Tabel 22

Jumlah Penduduk dan Jumlah Buta Huruf Tahun 2013-2016

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Buta Huruf	%
1.	2013	638.303	6.444	0,01
2.	2014	642.452	5.544	0,01
3.	2015	646.351	4.634	0,01
4.	2016	650.230	4.374	0,01

Sumber Data: Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng

Berdasarkan tabel diatas terlihat angka buta huruf selama tahun 2013-2016 menunjukkan hasil yang cukup berarti, dari jumlah penduduk yang buta huruf pada tahun 2013 sebanyak 6.444 jiwa menurun menjadi 5.544 jiwa pada tahun 2014 atau 86,03%. Hal ini merupakan hasil dari pelaksanaan kegiatan penuntasan buta aksara yaitu pembentukan kelompok-kelompok belajar dan kegiatan keaksaraan fungsional yang tersebar di 9 kecamatan. Keberadaan angka buta huruf di Kabupaten Buleleng sebagian besar dipengaruhi oleh penduduk yang sudah lanjut usia.

Selain indikator keberhasilan diatas, hasil pembangunan di sektor pendidikan dapat dilihat melalui beberapa indikator seperti: jumlah sekolah, perkembangan angka melanjutkan sekolah, perkembangan anak usia sekolah, dan angka kelulusan serta tambahan sekolah dengan uraian sebagai berikut :

1) Jumlah Sekolah.

Salah satu upaya pemerintah daerah dalam rangka perluasan keempatan mengenyam pendidikan adalah dengan menambah jumlah sekolah dan gedung sekolah untuk seluruh jenjang pendidikan. Perkembangan jumlah sekolah menurut tingkat pendidikan selama tahun 2012 s.d 2016 tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 23

Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2012-2016

No.	Tingkat Pendidikan	Realisasi (Tahun)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	TK	199	200	205	206	209
2	SD	482	482	481	481	480
3	SMP	72	72	72	73	74
4	SMA/SMK	58	59	59	63	64

Sumber Data: Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng.

Data tabel diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Buleleng senantiasa berupaya untuk dapat mencerdaskan masyarakat dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, yang pada akhirnya bermanfaat bagi kehidupan dan pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, melalui penyediaan sekolah yang tersebar di 9 kecamatan.

2) Perkembangan Anak Melanjutkan Sekolah.

Indikator keberhasilan pendidikan tercermin juga dari jmlah penduduk yangmemanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 24
Perkembangan Anak Melanjutkan Sekolah
Tahun 2013 s.d 2016

No.	Uraian	Tahun (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Lanjutan ke SMP	98,84	93,03	93,03	91.88	98.92
2	Lanjutan ke SMA/SMK	89,21	88,34	88,34	82,42	92,66

Sumber Data: Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng

Pendidikan Non formal.

Dalam rangka memberantas buta huruf dan mencerdaskan masyarakatnya, Pemerintah Kabupaten Buleleng memberikan

kesempatan luas kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak dapat melanjutkan sekolah dan tidak mampu melalui Program Pendidikan Luar Sekolah (PPLS) dengan menyelenggarakan pendidian Paket A Keaksaraan Fungsional, Paket A setara SD dan Paket B setara SMP.

Tabel 25
Capaian Program Pendidikan Luar Sekolah (PPLS)
Tahun 2014-2016

No	Kegiatan	Tahun (%)		
		2014	2015	2016
1	Paket A Keaksaraan Fungsional	28,10%	30,00%	32,00%
2	Paket A (SD)	50,50%	75,00%	70,00%
3	Paket B (SMP)	28,90%	51,60%	44,20%

Sumber Data: Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng

Berdasarkan data tabel diatas terlihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah peserta yang mengikuti Program Pendidikan Luar Sekolah (PPLS) cenderung meningkat. Hasil ini menunjukkan kesadaran masyarakat yang tidak mampu terhadap pentingnya arti pendidikan bagi masa depan mereka.

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pendidikan selama periode RPJMD 2012-2017 dapat dilihat pada tabel ... sedangkan secara rinci capaian kinerja pembangunan Urusan Pendidikan pada Tahun 2016 ditunjukkan melalui indikator – indikator sebagai berikut :

- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mencapai 73.21 %,
- Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) 59.62%, hasil ini merupakan persentase dari perbandingan jumlah penduduk usua 15 tahun keatas yang dapat baca tulis, 3.842 dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas, 6444
- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 81.32 %, dimana jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang SD/MI /paket A, 61.612, dibagi jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun, 75.763.
- Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 85.77 %, dimana jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang SMP/MTs /paket B, 29.946, dibagi jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun, 34.916.
- Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C 69.06 %, Angka dimana jumlah siswa usia 16-18 tahun di jenjang SMA/SMK/MA/paket C, 21.237, dibagi jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun, 61.502.

Tabel 26
Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pendidikan selama periode RPJMD Tahun 2012-2017

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (*outcome*)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
(1)	*(2)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
Program Internal	Meningkatnya kelancaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.1 program Pendidikan Anak Usia	Meningkatnya APK PAUD	50,27	50,27	50,67	50,67	51,06	51,06	51,44	51,44	51,80	51,80
1.2 Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9	Peningkatan APK SD/MI/Paket A	101,70%	111,74%	101,7%	109,7%	101,78%	107,50%	101,83%	106,96%	101,86%	90,71%
	APK SMP/MTs/ Paket B	97,72%	96,65%	98,29%	96,99%	98,86%	97,10%	99,43%	97,94%	100,00%	81,32%
1.3 Program Pendidikan	Peningkatan APK SMA/SMK/MA/Paket C	85,11%	85,23%	85,15%	88,24%	90,07%	89,10%	95,04%	89,27%	100,00%	89,97%
1.4 Program Pendidikan	Pemberian bantuan operasional pendidikan Non	588 orang	588 orang	589 orang	589 orang	589 orang	589 orang	590 orang	590 orang	592 orang	592 orang
1.5 Program Peningkatan Mutu Pendidik	Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	1.642 orang	1642 orang	1396 orang	1396 orang	1187 orang	1187 orang	1009 orang	1009 orang	859 orang	859 orang

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kab. Buleleng

- Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0.40%, jumlah siswa putus sekolah pada jenjang SD/MI berjumlah 275, dibagi jumlah siswa pada tingkat yang sama pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya, 68.723
- Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0,47%, dimana jumlah putus sekolah pada jenjang SMP/MTs berjumlah 159 dibagi jumlah siswa pada tingkat yang sama pada jenjang SMP/MTs yang berjumlah 33.829.
- Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA 0,16 %, siswa putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA, 450 dibagi jumlah siswa pada tingkat yang sama pada jenjang SMA/SMK/MA yang berjumlah 27.667.
- Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100.00 %,
- Angka kelulusan SMP / MTs 100.00%
- Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 99.99%
- Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 98,92 %,
- Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 98.92 %.

Capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pendidikan dalam kurun waktu sepanjang Tahun 2013-2016 tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 27
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan
Tahun 2013-2016

NO.	IKK	Capaian Kinerja (%)			
		2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	41,27	30,26	64,09	64,09
2	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	97.72		89,21	31,36
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	98,54	70,87	97,10	81,32
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	74,56	64,81	87,83	85,77
5	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	75,36	75,62	79,20	69,06
6	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,16	0,14	0,14	0,40
7.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,39	0,44	0,49	0,49
8	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,46	0,71	0,89	0,02
9	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	98,13		99,83	100
10	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	94,56		99,62	100

NO.	IKK	Capaian Kinerja (%)			
		2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	94,45		99,62	99,99
12	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	98,84	93,03	98,84	93,33
13	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	89,21	88,34	94,35	90,40
14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	85,20		88,32	88,32

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kab. Buleleng

Pembangunan urusan pendidikan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng dan Unit – Unit Pelaksana Pendidikan Se-Kabupaten Buleleng.

Data pegawai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng Tahun 2016. Pegawai Negeri Sipil : 73 orang ; Pegawai Honor Daerah / Pegawai Kontrak : 103 orang; Golongan IV: 7 orang; Golongan III : 39 orang; Golongan II :19 orang ; Golongan I : 5 orang, dan 6.490 orang PNS Fungsional yakni Para Guru dari jenjang TK/PAUD, SD, SMP dan SMA/SMK.

Untuk penyelenggaraan urusan pendidikan Tahun 2016 dialokasikan belanja daerah sebesar Rp. 965.076.099.504,19,- dan terealisasi sebesar Rp. 840.810.001.138,96,- atau 87.12 % yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp. 764.311.688.937,18,- dan terealisasi Rp. 678.233.793.411,- atau 88.74 % dan belanja langsung sebesar Rp. 200.764.410.567,01,- dan realisasi anggaran untuk belanja langsung pada Dinas Pendidikan sebesar Rp.162.578.207.727,96, atau mencapai 80.98 % dan realisasi fisik 94.56 %,

Proses Perencanaan Pembangunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, melalui tahapan sebagai berikut :

1. Forum SKPD menghasilkan rancangan Renja SKPD yang akan dirumuskan dalam rancangan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dengan masukan dari kebijakan pemerintah dan hasil evaluasi untuk bahan Musrenbang Kabupaten.
2. Musrenbang menghasilkan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) diantaranya : Kesepakatan tentang rumusan yang akan digunakan

sebagai masukan utama untuk penyempurnaan rancangan RKPD dan Renja SKPD. Sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

3. RKPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada Bulan Mei 2016, yang antara lain ditetapkannya KUA (Kebijakan Umum APBD).
4. KUA dilaksanakan pada Bulan Desember 2016 yang menghasilkan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara).
5. KUA dan PPAS dibahas bersama-sama dengan DPRD pada Bulan Nopember 2016.
6. Nota Kesepakatan antara Bupati dan Pimpinan DPRD tentang KUA dan PPAS.
7. Berdasarkan KUA dan PPAS selanjutnya dilakukan penelitian RKA oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Buleleng
8. Kompilasi RKA yang telah dibahas oleh Tim Anggaran menjadi Rancangan APBD diajukan dan dibahas dengan DPRD pada Bulan Desember 2016 dan selanjutnya diverifikasi oleh Gubernur Bali
9. Penetapan APBD dengan PERDA dilaksanakan setelah turunnya hasil verfikasi dari Gubernur
10. Setelah APBD ditetapkan disusun DPA dari semua Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Permasalahan yang ditemui dalam proses penyelenggaraan urusan pendidikan selama tahun 2012-2016 antara lain :

- Kurang meratanya penyebaran guru;
- Budaya masyarakat terhadap pentingnya pendidikan yang relatif rendah;
- Partisipasi masyarakat terhadap pendidikan masih rendah;
- Sarana dan Prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan belum memadai;
- Masih adanya tenaga pendidik yang belum berkualifikasi S1/D IV;
- Terbatasnya lembaga pendidikan keterampilan untuk menciptakan tenaga- tenaga berjiwa *enterpreunership* atau tenaga yang siap mencari kerja;

Solusi yang telah ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah:

- Secara bertahap dan berkesinambungan melaksanakan mutasi serta memberikan kesempatan pada guru dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kapasitas;

- Melakukan pembinaan bagi masyarakat akan pentingnya pendidikan demi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara serta masa depan yang bersangkutan;
- Lebih banyak melibatkan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan dalam kegiatan pendidikan serta meningkatkan pemahaman peran serta komite dan *stakeholder* pendidikan melalui kegiatan sosialisasi dan workshop.
- Kebijakan bahwa sekolah dapat meningkatkan daya tampung dan jika memungkinkan dilakukan *double shift* pembelajaran terutama bagi di kecamatan yang tidak memiliki sekolah swasta;
- Melakukan sosialisasi dan rapat kordinasi dengan pihak sekolah dan
- masyarakat sekitar, agar ikut menjaga sarana prasarana sekolah yang ada serta turut berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan proses pembelajaran di sekolah;
- Pembinaan terhadap Guru melalui pembinaan kelembagaan baik pada KKG (Kelompok Kerja Guru), MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), MGMD (Musyawarah Guru Mata Diklat), K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) dan K2PS (Kelompok Kerja Pengawas Sekolah).

2. URUSAN KESEHATAN.

Pembangunan kesehatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada setiap tahap pembangunan. Pembangunan kesehatan dalam rangka menciptakan kualitas sumber daya manusia harus dilakukan dalam keseluruhan proses kehidupan mulai dari dalam kandungan, atau bahkan jauh sebelumnya, yaitu dengan memperhatikan tingkat kesejahteraan para calon ibu, bayi, balita, usia sekolah, remaja, pemuda, usia produktif sampai kepada usia lanjut. Urusan kesehatan meliputi perencanaan dan pembangunan kesehatan, pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemberantasan penyakit menular, penyehatan lingkungan, peningkatan gizi masyarakat, farmasi, makanan dan minuman serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kesehatan Kabupaten Buleleng "Mewujudkan Derajat Kesehatan yang Optimal berlandaskan Falsafah Tri Hita Karana". Program-program pada urusan kesehatan secara umum telah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik pasa kurun waktu 2012-2017.

Program pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Kesehatan dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017, yaitu :

1) Program Obat danPerbekalan Kesehatan.
2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
3) Program Pengawasan Obat dan Makanan.
4) Program PromosiKesehatanda Pemberdayaan Masyarakat.
5) Program Perbikan Gizi asyarakat.
6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.
8) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
9) Program Pengadaan Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu.
10) Program Pengadaan peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru,Rumah Sakit Mata.
11) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
12) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita.
13) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia.
14) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.

Standar pelayanan minimal atau biasa disingkat SPM adalah standar pelayanan minimal yang harus didapatkan oleh masyarakat dan menjadi program yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pelaksanaanya diwajibkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan sumber daya dan kemampuan daerah. Tahun 2013 ditetapkan 18 indikator SPM Kesehatan yaitu cakupan kunjungan ibu hamil K4 target 88 persen. Cakupan kompllikasi kebidanan yang ditangani target 73 persen. Pertolongan persalinan oleh bidan atau nakes yang mempunyai kompetensi kebidanan target 88 persen. Cakupan pelayanan nifas target 88 persen. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani target 70 persen. Cakupan kunjungan bayi target 86 persen. Cakupan kelurahan/desa Uci target 90 persen. Cakupan pelayanan anak balita 81 persen. Cakupan pemberian MPAsi pada anak usia 6 sampai 24 bulan keluarga miskin target 100 persen. Cakupan penderita gizi buruk mendapatkan perawatan target 100 persen. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan sederajat target 100 persen. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit AFP, pneumonia balita, TB paru, DBD dan Diare. Cakupan yankesdas masyarakat miskin target 100 persen. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin. Cakupan pelayanan Gadar level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan kabupaten/kota. Cakupan kelurahan/ desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi 《24 jam target 100 persen. Cakupan desa siaga aktif target 100 persen. Apabila kita cermati lebih jauh dari 18 indikator SPM seperti yang disebutkan diatas maka bisa dipastikan bahwa 17 indikator adalah merupakan beban dan tanggung jawab sarana pelayanan kesehatan strata 1 yaitu puskesmas kecuali indikator untuk pelayanan gawat darurat RS.

Pada Tahun 2016 capaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan yakni; cakupan kunjungan ibu hamil K4 Tahun 2016 sebesar 95,77 persen, lebih besar dari target nasional yang ditetapkan sebesar 88 persen. Cakupan kompllikasi kebidanan yang ditangani dengan target 73 persen tercapai 100 persen. Pertolongan persalinan oleh bidan atau nakes yang mempunyai kompetensi kebidanan tercapai 100,67 persen dari target 88 persen. Cakupan pelayanan nifas tercapai 97,78 persen dari target 88 persen. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang dengan target yang ditetapkan sebesar 70 persen, indikator ini tercapai 100 persen. Cakupan kunjungan bayi tercapai 96,33 persen dari target 86 persen. Cakupan kelurahan/desa Uci tercapai 96,62 persen dari target 90 persen. Cakupan pelayanan anak balita tercapai 92,65 persen dari target 81 persen. Cakupan pemberian MPAsi pada anak

usia 6 sampai 24 bulan keluarga miskin tercapai sesuai target yakni 100 persen.

Tabel 28
SPM Bidang Kesehatan Tahun 2013-2016

Indikator, Nilai (%)dan Batas waktu pencapaian SPM secara nasional		Capaian (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	Capaian (%)
		2013	2014	2015	2016
1	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4. 95% tahun 2015	93.00	96.33	95.77	95.77
2	Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani. 80% tahun 2015	100,00	100,00	100.00	100.00
3	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. 90% tahun 2015	91.00	100.74	100.67	100.67
4	Cakupan pelayanan Ibu Nifas 90% tahun 2015	92.00	98.88	97.78	97.78
5	Cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani 80% tahun 2010	100.00	100.00	100.00	100.00
6	Cakupan kunjungan bayi 90% tahun 2010	90.00	101.74	96.33	96.33
7	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100% tahun 2010	82.00	95.95	96.62	96.62
8	Cakupan pelayanan anak balita 90% tahun 2010	90.00	85.65	92.65	92.65
9	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin 100% tahun 2010	100.00	100.00	100.00	100.00
10	Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan 100% tahun 2010	100.00	100.00	100.00	100.00
11	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100% tahun 2010	100.00	100.00	100.00	100.00
12	Cakupan peserta KB Aktif 70% tahun 2010	86.00	169.94	70.92	70.92
13	Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit 100% tahun 2010	43.40	37.64	100.00	100.00
A.	Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	8.00	3.90	9.89	9.89
B.	Penemuan Penderita Pneumonia Balita	5.00	12.01	30.01	30.01
C.	Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	67.00	65.80	75.80	75.80
D.	Penderita DBD yang Ditangani	100.00	100.00	100.00	100.00
E.	Penemuan Penderita Diare	37.35	6.50	66.50	66.50
14	Cakupan pelayanan kesehatan dasar Masyarakat Miskin 100% tahun 2015	32.00	102.64	100.64	100.64
15	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100% tahun 2015	0.35	67.39	90.78	90.78
16	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota 100% tahun 2015	100.00	100.00	100.00	100.00
17	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam 100% tahun 2015	100.00	100.00	100.00	100.00
18	Cakupan Desa Siaga Aktif 80% tahun 2015	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber data : Diskes Kabupaten Buleleng,

Cakupan penderita gizi buruk mendapatkan perawatan juga tercapai sesuai target yakni 100 persen. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit AFP tercapai 9,89 persen, pneumonia balita ; 30,01 persen, TB paru ; 75,80 persen, DBD yang ditangani mencapai 100 persen dan penemuan penderita Diare ; 66,50 persen. Cakupan yankesdas masyarakat miskin target 100 persen baru tercapai 100,64 persen. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin Tahun 2016 tercapai 90,78 persen. Cakupan pelayanan Gadar level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan kabupaten/kota tercapi 100 persen. Cakupan kelurahan/ desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi 《24 jam tercapai sesuai target yaitu 100 persen. Cakupan desa siaga aktif juga tercapi sesuai target yakni sebesar 100 persen.

Hal lain yang kalah penting dalam pelaksanaan Urusan Kesehatan adalah terkait kesehatan ibu dan anak, dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dapat diketahui Indikator Keberhasilan Angka Kematian Ibu dan Anak Tahun 2012-2016.

Tabel 29
Angka Kematian Ibu dan Anak Tahun 2012-2016

No.	Indikator Keberhasilan	Tahun / Realisasi				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Angka Kematian Bayi (per 1.000 Kelahiran Hidup)	7,8	3,8	5,28	5,62	4,61
2	Angka Kematian Ibu (Orang)	10	9	14	14	10
3	Angka Kematian Balita (per 1.000 Kelahiran Hidup)	8,2	4	6	6	5,49

Sumber data : Diskes Kabupaten Buleleng

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disampaikan bahwa angka kematian ibu dan bayi yang relatif berfluktuasi dari tahun 2012 sampai 2016, namun telah mengarah pada keadaan yang lebih baik.Sebagian besar penyebab kematian tersebut adalah adanya penyakit penyerta sebagai akibat dari penyakit yang diderita oleh seorang ibu pada saat kehamilannya, seperti penyakit jantung, TBC dan lain-lain. Angka kematian ibu pada tahun 2012 sebanyak 10 orang, meningkat pada tahun 2014 menjadi 14 orang namun kembali menurun pada tahun 2016. Setiap kejadian kematian ibu sudah dilakukan audit maternal terhadap tenaga kesehatan yang melakukan

pertolongan persalinan. Secara umum, Angka Kematian Ibu di Kabupaten Buleleng masih di bawah target nasional. Angka kematian balita pada tahun 2012sebesar 8,2 per1.000 kelahiran hidup dan terus mengalami penurunan sampai tahun 2015 menjadi 6per 1.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2016 menjadi 5,49 per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini disebabkan kematian balita tidak saja disebabkan oleh faktor penyakit, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kecelakaan.Angka Kematian Balita di Kabupaten Buleleng masih berada di bawah standar nasional dan sudah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan.

Menurunnya kematian ibu melahirkan pada Tahun 2015-2016 didukung oleh cakupan pelayanan imunisasi bayi dan ibu hamil sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 30
Cakupan Imunisasi Bayi dan Ibu Hamil Tahun 2016

No.	Antigen	Target Tahunan (%)	2015	2016
1	BCG	100	100,8	91,1
2	DPT 1-H-HIb 1	100	100,4	92,1
3	DPT 2- HB-HIb- 2	100	100,3	91,7
4	DPT 3–HB-HIb 3	100	99,2	91,3
5	Polio 1	100	100,3	90,9
6	Polio 2	100	100,3	91,5
7	Polio 3	100	99,9	91,3
8	Polio 4	100	99,8	90,6
9	Hb 0-7 hari	100	98,2	90,9
10	Campak	100	101,2	93,1
11	TT+bumil	100	89,1	91,1

Sumber data : Diskes Kabupaten Buleleng

Selain indikator tersebut di atas, indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan kesehatan adalah tingkat kunjungan pasien ke Puskesmas dan Puskesmas Pembantu sebagaimana dapat dilihat dalam grafik berikut :

Gambar 10

Jumlah Kunjungan Pasien ke Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Tahun 2012-2017

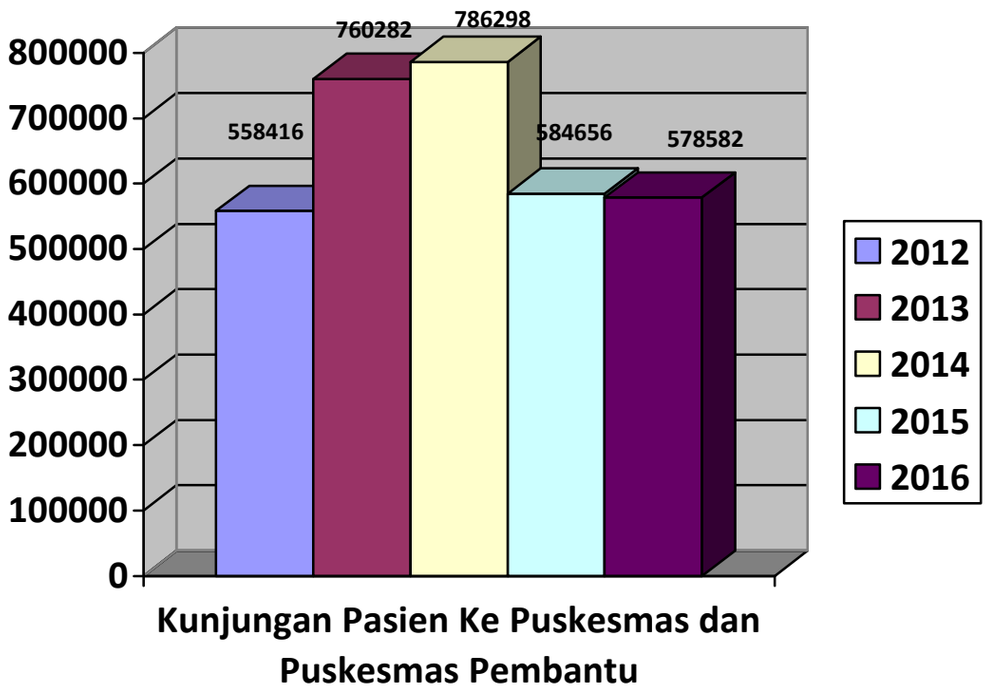

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Buleleng

Pemerintah Kabupaten Buleleng secara konsisten terus berupaya meningkatkan sarana prasarana serta pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), diantaranya dengan membangun puskesmas rawatinap di Kabupaten Buleleng sebanyak 4 unit hingga tahun 2016, namun demikian, berdasarkan data kunjungan pasien ke Puskesmas dan Puskesmas Pembantu dari tahun 2012 sampai tahun 2016, masih terjadi fluktuasi jumlah kunjungan ke sarana pelayanan kesehatan yang umumnya disebabkan karena pengaruh cuaca yang tidak menentu, serta meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di sekitar Puskesmas/Pustu.

Tahap awal pengendalian dan pencegahan berbagai penyakit dilakukan dengan serangkaian program imunisasi secara berkesinambungan. Imunisasi lengkap yang harus diterima oleh bayi terdiri dari BCG, DPT, POLIO, HB dan Campak berdasarkan standar kesehatan yang telah

ditetapkan. Capaian berdasarkan data imunisasi tahun 2012 hingga tahun 2016 diuraikan pada table berikut.

Tabel 31

Hasil Cakupan Imunisasi Bayi dan Ibu HamilTahun 2012-2016

No.	Antigen	Target Tahunan (%)	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	BCG	100	-	98,59	102,41	100,8	91,1
2	DPT 1 - Hb 1	100	94,7	95,2	103,2	100,4	92,1
3	DPT 2 - Hb 2	100	-	-	-	100,3	91,7
4	DPT 3 - Hb 3	100	94,2	97,5	101,6	99,2	91,3
5	Polio 1	100	-	-	-	100,3	90,9
6	Polio 2	100	-	-	-	100,3	91,5
7	Polio 3	100	94,39	97,84	-	99,9	91,3
8	Polio 4	100	-	-	101,97	99,8	90,6
9	Hb 0-7 hari	100	-	-	-	98,2	90,9
10	Campak	100	95,8	97,5	101,7	101,2	93,1
11	TT+bumil	100	-	95,9	82	89,1	91,1

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng

Terdapat cakupan imunisasi pada tahun 2016 yang belum mencapai target. Hal ini antara lain disebabkan oleh partisipasi masyarakat yang belum optimal, terutama dalam kehadirannya di Posyandu. Hal ini akan terus diupayakan dan ditingkatkan secara sistematis pada tahun-tahun mendatang.

Sedangkan pencapaian kegiatan imunisasi yang belum mencapai target 100% yaitu cakupan imunisasi BCG, DPT 2-Hb 2, DPT 3-Hb 3 , Polio 1, Polio 3, Polio 4, Hb 0-7hari, dan Campak. Hal ini disebabkan karena pemberian imunisasi disesuaikan dengan umur balita dan pada akhir tahun 2016 balita tersebut ada yang belum waktunya untuk mendapatkan imunisasi dimaksud. Sampai dengan bulan Desember 2016 tidak terjadi kejadian luar biasa/wabah penyakit yang berhubungan dengan imunisasi.

Upaya peningkatan kesehatan masyarakat salah satunya dilakukan melalui pengendalian terhadap jenis penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat setempat. Dengan terdatanya jenis penyakit dan jumlah penderitanya diharapkan dapat menjadi dasar untuk merencanakan pencegahan atau penanganan secara tepat sehingga dapat memberikan hasil yang optimal. Perkembangan jumlah penderita untuk 10 (sepuluh) jenis penyakit terbesar di Kabupaten Buleleng selama tahun 2012-2016 tampak pada tabel dibawah ini.

Tabel 32

Jumlah Penduduk Penderita 10 Jenis Penyakit ahun 2012-2016

No.	Tahun 2012		No.	Tahun 2013		No.	Tahun 2014		No.	Tahun 2015		No.	Tahun 2016	
	Jenis Penyakit	Jumlah		Jenis Penyakit	Jumlah		Jenis Penyakit	Jumlah		Jenis Penyakit	Jumlah		Jenis Penyakit	Jumlah
1	Hipertensi Primer	22.494	1	HipertensiPri mer	17.709	1	Hipertensi Primer	28.091	1	Hipertensi Primer	17.894	1	Hipertensi Primer	17.9391
2	Rhematoid Arthritis Lain	16.877	2	Infeksi Akut Lai n Pada Saluran pernafasan	10.389	2	Nasopharingiti s (common cold)	21092	2	Nasopharingiti s (common cold)	15.094	2	Nasopharingit is (common cold)	13.240
3	Infeksi Akut Lain Pada Saluran Pernafasan	16.440	3	Rhematoid Arthritis Lain	9.785	3	Rhematoid Arthritis Lain	11.239	3	Rhematoid Arthritis lain	12.727	3	Rhematoid Arthritis Lain	10.528
4	Nasopharingitis (common cold)	5.768	4	Nasopharing itis (common cold)	6.839	4	Pharingitis	11.010	4	Gastritis	8.749	4	Pharingitis	9.336
5	Kencing Manis	5.683	5	Kecelakaan	6.161	5	Dermatitis Kontak Alergi	8.144	5	Pharingitis	8.665	5	Gastritis	8.004
6	Penyakit Gusidan Jaringan Periodental)	5.379	6	PenyakitGus idan Jaringan Periodental	4.802	6	Kecelakaan	8.054	6	Kecelakaan	8.260	6	Kecelakaan dan Ruda Paksa	6.972
7	Kecelakaan	5.365	7	Pharingitis	4.446	7	Gastritis	7.893	7	Kencing Manis	6.448	7	Dermatitis Kontak Alergi	5.740
8	Gastritis	5.246	8	Gastritis	3.750	8	Dyspepsia	7.623	8	Ginggivitisdan Jaringan Periodental)	5.474	8	Gingivitis dan Penyakit Periodontal	5.323
9	Pharingitis	5.046	9	Dermatitis Lain	3.344	9	Gout	6.994	9	Asma	5.120	9	Diabetes Millitus type I	4.777
10	Dermatitis Lain	5.036	10	Kencing Manis	3.340	10	Asma	6.921	10	Penyakit Pulpa dan Jaringan Periapikal	5.068	10	Penyakit Pulpa dan Jaringan Periapikal	4.759

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Buleleng

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa 10 besar penyakit didominasi oleh penyakit menular diantaranya urutan pertama penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas. Disamping itu perkembangan penyakit degeneratif di Kabupaten Buleleng juga mengalami peningkatan sepert penyakit rheumatoid arthritis lain, hipertensi primer.

Upaya untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan melalui sinergi dengan masyarakat di Kabupaten Buleleng dalam kurun waktu tahun 2012-2016 telah menunjukkan peningkatan yang berarti. Perkembangan sarana dan prasarana kesehatan selama tahun 2012-2016 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 33
Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan di
Kab.Buleleng Tahun 2012–2016

No.	Jenis Tempat Berobat	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Rumah Sakit	6	6	6	6	7
2	Puskesmas	20	20	20	20	20
3	Puskesmas Rawat Inap	3	3	4	4	4
4	Puskesmas Pembantu	74	74	74	74	74
5	Posyandu	713	714	714	717	717
6	Poskesdes	83	84	82	83	82
7	Balai Pengobatan	1	3	5	7	8
8	BKIA	8	2	0	0	0
9	Dokter Praktek Swasta	244	237	266	291	318
10	Bidan Praktek Swasta	166	186	197	205	212

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Buleleng

Sarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit meningkat dari 6 buah tahun 2012 menjadi7 buah pada tahun 2016 karena ada penambahan 1 buah Rumah Sakit Kelas D Pratama di Desa Tangguwisia Kecamatan Seririt. Sarana Pelayanan Kesehatan milik pemerintah yaitu Puskesmas dan Puskesmas Pembantu dari tahun 2012 sampai 2016 tidak mengalami penambahan karena jumlahnya sudah mencukupi sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis Kabupaten Buleleng. Sarana pelayanan kesehatan yang mengalami fluktuasi antara lain Posyandu pada tahun 2012 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan dari 713 unit menjadi 717 unit, Polindes pada tahun 2012 mengalami penurunandari 83 unit pada tahun 2012menjadi

sampai 82 unit dan pada tahun 2016 sampai tahun 2016 tidak ada polindes lagi karena status polindes sudah ditingkatkan menjadi poskesdes. BKIA terus mengalami penurunandari tahun 2012 sejumlah 8 unit menjadi tidak ada pada tahun 2016. Hal ini disebabkan beralihnya masyarakat dalam memenfaatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak ke Puskesmas dan Bidan praktek swasta. Sarana pelayanan kesehatan swasta yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2012 sampai 2016 adalah Dokter praktek sawsta dan Bidan praktek swasta. Peningkatan ini disebabkan karena semakin banyaknya lulusan tenaga dokter danbidan dimasyarakat.

Disamping sarana pelayanan kesehatan faktor pendukung lainnya yang berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan kesehatan adalah adanya peranan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sebagai tenaga paramedis non keperawatan, tenaga para medis keperawatan dan tenaga medis. Perkembangan jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Buleleng selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 34
Jumlah Tenaga Paramedis Non Perawat Kesehatan
Tahun 2012-2016

No.	Tenaga Paramedis	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Tenaga Sanitasi	65	68	55	57	55
2	Tenaga Kesehatan	40	39	13	17	20
3	Tenaga Gizi	62	60	56	59	62
4	Tenaga Analis Kesehatan	44	44	29	32	42
5	Tenaga Farmasi	46	47	37	23	22

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Buleleng

Jumlah tenaga paramedis non keperawatan/kebidanan rata-rata mengalami peningkatan disebabkan setiap tahun terdapat pengangkatan pegawai baru dan penambahan tempat pelayanan kesehatan.

Perkembanganjumlah tenaga paramedis keperawatan/kebidanan mengalami peningkatan dari tahun 2012 hingga tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 35
Jumlah Tenaga Paramedis Perawat Kesehatan dan Jenis Pendidikan
Tahun 2012-2016

No.	Tenaga Paramedis	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Sarjana Keperawatan	19	19	19	19	25
2	D-III Keperawatan	321	220	220	93	450
3	D-III Kebidanan	292	292	237	168	433
4	D-I Kebidanan	114	114	102	117	36
5	SPK	222	157	157	107	148

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Buleleng

Jumlah tenaga keperawatan dan kebidanan rata–rata mengalami peningkatan kecuali tenaga D-I Kebidanan dan SPK dikarenakan tenaga bersangkutan banyak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pelayanan Kesehatan terhadap masyarakat yang cukup berperan adalah peranan tenaga medis. Tenaga medis yang ada di Kabupaten Buleleng terdiri dari dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi. Perkembangan jumlah tenaga medis di Kabupaten Buleleng dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 36
Jumlah Tenaga Medis Kesehatan dan Jenis Pendidikan
Tahun 2012-2016

No.	Tenaga Medis	Tahu				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Dokter Umum	99	70	57	58	8
2	Dokter Spesialis	41	52	62	55	4
3	Dokter Gigi	31	26	22	30	2

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Buleleng

Jumlah tenaga medis rata–rata mengalami peningkatan disebabkan setiap tahun terdapat pengangkatan pegawai baru dan penambahan tempat pelayanan kesehatan. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerataan cakupan pelayanan

kesehatan kepada masyarakat. Hasil penyelenggaraan urusan kesehatan tersebut diatas, dicapai melalui pelaksanaan 21 program dan 127 kegiatan. Baik program maupun kegiatan jumlahnya terus mengalami peningkatan. Demikin juga dengan angaran Dinas Kesehatan, pda tahun 2012 Rp12.956.853.063 menjdi Rp122.447.152.785,49 pada tahun 2016, dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 37
Anggaran dan Realisasi Urusan Kesehatan
Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Program	20	20	21	21	21
2	Kegiatan	68	78	82	98	127
3	Anggaran (Rp)	12.956.853.063	22.001670.808	51.664.591.800	46.654.997.928,98	122.447.152.785,49
4	Realisasi (Rp)	9.517.960.692	20.109.835.022	38.982.077.220	30.468.054.846,70	93.435.480.865,23

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Buleleng

Pembangunan Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng. Dengan Kantor yang berlokasi di Jalan Veteran No. 15 Singaraja, 81117, Telepon(0362) 21789. Dengan struktur organisasi terdiri atas ; KEPALA DINAS (Eselon II/b) dibantu oleh Sekretaris Dinas (Eselon III/a), 4 Kepala Bidang ; Bidang P2M dan PL, Bidang Promosi Kesehatan, Bidang Bina Kesehatan Keluarga, Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat. 12 Kepala Seksi ; Seksi Pencegahan Penyakit Menular, Seksi Pemberantasan Penyakit Menular, Seksi Kesehatan lingkungan, Seksi Penyuluhan Kesehatan masyarakat, Seksi Peran Serta Masyarakat, Seksi Jaminan Kesehatan Masyarakat, Seksi Kesehatan Ibu dan Anak, Seksi Kesehatan Remaja dan Lanjut Usia, Seksi Gizi, Seksi Yankes dasar dan rujukan, Seksi Perijinan dan sertifikasi, Seksi Kefarmasian dan alat Kesehatan. 3 Kasubabg di bawah Sekretaris Dinas ; Ksb. Umum, Ksb. Perencanaan, Ksb. Keuangan. UPTD ; 20 Kepala Puskesmas, Kepala Defo Farmasi, Kepala Lab Kesehatan Masyarakat.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dan 20 Puskesmas berjumlah 736 orang. **Dengan pangkat dan golongan terdiri atas** : Pembina Utama Madya (IV/d) ; 2 orang Pembina Utama Muda (IV/c) ; 1 orang, Pembina Tk.I (IV/b) ; 5 orang, Pembina (IV/a) ; 41 orang, Penata Tk.I (III/d) ; 147 orang, Penata (III/c) ;

108 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) ; 112 orang, Penata Muda (III/a) ; 72 orang, Pengatur Tk.I (II/d) ; 130 orang, Pengatur (II/c) ; 85 orang, Pengatur Muda Tk.I ; 23 orang, Pengatur Muda ; 7 orang, Juru (I/c) ; 1 orang, Juru Muda Tk.I (I/b) ; 2 orang. **Dengan kualifikasi pendidikan (Dinas Kesehatan)** : Strata 2 (S2) ; 11 orang, Strata 1/ Diploma 4 (S1/D4) ; 37 orang, Diploma 3 (D3) ; 19 orang, Diploma 2 (D2); 4 orang, SMA/SMK/Mts ; 27 orang, SD ; 3 orang. **Jumlah Pejabat Struktural (Dinas Kesehatan)** : Eselon II/b ; 1 pejabat, Eselon III/a ; 1 pejabat, Eselon III/b ; 4 pejabat, Eselon IV/a ; 17 pejabat. **Pejabat Fungsional (Dinas Kesehatan);** Perawat ; 3 orang, Perawat Gigi ; 1 orang, Bidan ; 2 orang, Gizi ; 1 orang, Asisten Apoteker; 1orang,Sanitarian ; 5 orang, Penyuluh Keehatan Masyarakat ; 7 orang, Penata Laboratorium Kesehatan Masyarakat ; 3 orang.

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2016. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD. DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkannya menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program/kegiatan urusan kesehatan yang ditangani oleh Dinas Kesehatan adalah:

1) Belum optimalnya peran masyarakat dalam menunjang program kesehatan.
2) Belum optimalnya petugas dalam menjalankan kegiatan di lapangan.
3) Masih lemahnya koordinasi dan kemitraan dengan instansi/ lembaga terkait dalam mengatasi masalah kesehatan.

Sedangkan beberapa solusi yang telah ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan tersebut diatas, diantaranya :

1) Memberikan pemahaman dan motivasi kepada asyarakat agar berperan aktif dalam mengatasi masalah kesehatannya.
2) Memberikan pembinaan secara berkala dan intensif kepada petugas dilapangan/ Puskesmas.

3) Membangun kembali jejaring kemitraan dengan instansi terkait, lembaga/organisasi profesi dan kemasyarakatan dan dengan LSM.

Tabel 38
Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan sesuai RPJMD Tahun 2012-2017

Aspek		Satuan	Sept – Des 2012		2013		2014		2015		2016	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
1	Angka Usia Harapan Hidup (tahun)	tahun	70.25	69.53	70.80	70.58	71.6	70.71	72.25	70.81	72.8	70.81
2	Angka kematian bayi/1000 KH	per 1000 KH	5.6	7.84	4.50	3.83	4.0	5.28	3.5	5.63	3.0	4.7
3	Persentase balita gizi buruk	%	0.03	0.06	0.03	0.05	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03
4	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	< 90	87.35	90	93.22	>90	96.33	>90	96.47	>90	91.73
5	Cakupan kunjungan bayi	%	< 90	98.99	90	90.01	>90	109.4	>90	105.75	>90	99.26
	PELAYANAN UMUM											
6	Persentase posyandu Aktif	%	30.58	33.8	32	50.42	34	44.68	36	54.53	38	49
7	Persentase Balita gizi buruk	%	0.03	0.06	0.03	0.05	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03
8	Rasio Posyandu	per 100 balita	1.21	1.19	≥ 1	1.25	≥ 1	1.35	≥ 1			
9	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	per satuan penduduk	0.01	0.141	0.137	0.151	0.136	0.1541	0.134	0.1563	0.133	0.1563
10	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	per satuan penduduk	0.0011	0.0089	0.008	0.009	0.008	0.0093	0.009	0.0093	0.0112	0.0092
11	Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS (%)	%	63.11	50.41	64	52.12	65	53.56	67	74.03	68	76.33

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng sebagai Rumah Sakit rujukan di daerah Bali utara selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Buleleng. Untuk memastikan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien maka dibuat program-program penyelenggaraan urusan kesehatan.

Tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, RSUD Kabupaten Buleleng melaksanakan 12 program dengan 39 kegiatan pada tahun 2012, 40 kegiatan pada tahun 2013, dan 38 kegiatan pada tahun 2014. Sejak tahun 2015, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada pasal 11 ayat 3a yang bersumber dananya berasal dari pendapatan BLU dirinci dalam Satu Program dan Satu Kegiatan. Program yanag berseunber dana dari BLU yang dilaksanakan adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan (BLUD) dengan kegiatannya Pelayanan Kesehatan (BLUD). Program dan kegiatan yang bersumber dana dari APBD maupun APBN dilaksanakan dalam program dan kegiatan yang berbeda. Sejak tahun 2012-2016, total anggaran yang digunakan adalah Rp545.587.642.755,44 dan realisasi sebesar Rp504.817.566.783,97 atau 92,53%.

Tabel 39
Anggaran dan Realisasi Urusan Kesehatan
(RSUD) Tahun 2012-2016

No	Jenis Layanan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Program	12	12	12	2	3
2.	Jumlah Kegiatan	39	40	38	4	4
3.	Anggaran (Rp)	50.875.170.876	58.021.344.339	96.647.923.224,82	156.021.592.793,13	184.021.611.522,49
4.	Realisasi (Rp)	41.160.826.762	54.787.172.794	77.763.859.449,00	153.181.114.055,58	177.924.593.723,39

Sumber Data : Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Buleleng

RSUD Kabupaten Buleleng menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif maupun rehabilitatif dengan tidak mengesampingkan peran sebagai sarana promotif maupun preventif. Jenis pelayanan kesehatan yang diselenggarakan antara lain rawat inap, rawat jalan, IGD, pelayanan penunjang, pelayanan administrasi maupun

pelayanan penunjang lainnya. Jumlah pasien untuk rawat inap maupun rawat jalan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 40
Jumlah Pasien Untuk Rawat Inap dan Rawat Jalan RSUD
Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2016

No	Jenis Layanan	Tahun (orang)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Rawat Inap	17.538	19.292	19.949	22.601	24.915
2.	Rawat Jalan	131.190	142.044	130.546	121.016	155.419

Sumber Data : Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Buleleng

Jumlah masyarakat yang berobat ke RSUD Kabupaten Buleleng selama kurun waktu 2012-2016 mengalami fluktuasi. Jumlah pasien untuk pelayanan rawat inap, yaitu pasien yang masuk rumah sakit pada tahun tersebut diatas relatif mengalami peningkatan. Jumlah pasien rawat inap tahun 2012 adalah 17.538 pasien yang kemudian meningkat menjadi 24.915 pasien pada tahun 2016, dengan peningkatan rata-rata selama tahun 2012-2016 sebesar 8,25%. Hal ini tidak terlepas dari upaya peningkatan pelayanan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Buleleng secara bertahap dan konsisten.

Tabel 41
Kinerja Pelayanan Rawat Inap RSUD Kabupaten Buleleng
Tahun 2012-2016

No	Jenis Layanan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah tempat tidur	246	246	284	299	299
2.	Jumlah pasien	17.538	19.292	19.949	22.601	24.915
3.	Pasien hidup	16.620	18.260	19.009	21.621	23.743
4.	Pasien mati	880	847	934	1.055	1.151
5.	Lama Rawat (Total)	70.996	74.133	78.967	92.681	100.411
6.	Rata-rata pasien baru/hari	48/hr	53/hr	55/hr	62/hr	68/hr

Sumber Data : Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Buleleng

Jumlah pasien rawat jalan lebih mengalami fluktuasi. Dengan diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai tahun 2014, pasien rawat jalan diwajibkan terlebih dahulu untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan pertama seperti puskesmas dan dokter keluarga untuk

memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Dan apabila diperlukan baru dirujuk ke RSUD sebagai fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan. Hal ini menyebabkan kunjungan rawat jalan ke RSUD tahun 2014 dan 2015 sebagai pelayanan kesehatan lanjutan relatif menurun. Tahun 2016, terjadi pengalihan pelayanan JKBM yang semula bisa dilayani di seluruh RS, dialihkan hanya di RS pemerintah. Hal tersebut menyebabkan kunjungan rawat jalan RSUD Kab. Buleleng tahun 2016 mengalami peningkatan yang cukup besar. Peningkatan rata-rata kunjungan rawat jalan selama tahun 2012-2016 sebesar 3,25%. Sedangkan trend pelayanan rawat inap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:Jumlah pelayanan rawat inap dari tahun 2012-2016 terus mengalami peningkatan. Jumlah tempat tidur pada tahun 2012 adalah 246 tempat tidur dan meningkat menjadi 299 tempat tidur di tahun 2016. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan rawat inap. Jumlah pasien, lama rawat dan jumlah rata-rata pasien per hari juga mengalami peningkatan. Tahun 2012, rata-rata pasien baru yang dirawat adalah 48 pasien per hari, kemudian meningkat menjadi 68 pasien per hari di tahun 2016. Hal tersebut menujukkan perhatian dan kepercayaan masyarakat yang meningkat dalam hal memperoleh pelayanan rawat inap di RSUD Kabupaten Buleleng.

Sedangkan indikator pelayanan rawat inap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 42
Indikator Pelayanan Rawat Inap RSUD Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2016

No	Jenis Layanan	Nilai rujukan Depkes	T				
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	BOR (persen)	60-85%	74,49	79,55	98,12	82,78	91,96
2.	aLOS (hari)	6-9 hari	4,06	3,88	3,96	4,09	4,03
3.	TOI (hari)	1-3 hari	1,31	0,97	0,09	0,83	0,36
4.	BTO (kali)	40-50 kali	71,14	46,73	73,86	75,84	83,26
5.	GDR (Per 1000)	< 25 ‰	30,91	44,33	46,83	46,52	46,24
6.	NDR (per 1000)	< 45 ‰	50,29	27,90	17,30	31,58	33,38

Sumber Data : Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Buleleng

Keterangan :

BOR ; Bed Occupancy Rate yaitu rata-rata pemanfaatan empat tidur.
aLOS ; Average Length of Stay yaitu rata-rata lama dirawat.

TOI ; Term Over Interval yaitu Interval pergantian tempat tidur.
BTO ; Bed Turn Over yaitu angka perputaran tempat tidur.
GDR ; Gross Deadth Rate yaitu angka kematian umum.
NDR ; Net Death Rate yaitu angka kematian bersih.

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai rata-rata pemanfaatan tempat tidur relatif mengalami peningkatan. Tahun 2016, rata-rata pemanfaatan tempat tidur adalah 91,96% dan melebihi nilai rujukan Depkes RI yang hanya 60-85%. Hal ini menunjukkan kurangnya tempat tidur jika dibandingkan dengan jumlah hari rawat pasien. Rata-rata lama dirawat atau aLOS berkisar antara 3.88 samapai dengan 4.09 hari, dan nilai ini ada di bawah standar nasional yaitu 6-9 hari. Begitu juga dengan interval pergantian tempat tidur (TOI) tahun 2012-2016 berkisar antara 0,09-1,31 hari dan relatif berada di bawah standar nasional yaitu 1-3 hari. Rendahnya nilai TOI menunjukkan rendahnya rentang waktu tempat tidur yang kosong karena banyaknya jumlah pasien. Angka perputaran tempat tidur (BTO) di tahun 2012 adalah 71,14 kali kemudian meningkat menjadi 83,26 kali di tahun 2016. Angka ini jauh diatas nilai rujukan nasional yang hanya 40-50 kali. Tingginya nilai BTO menunjukkan tingginya intensitas penggunaan tempat tidur. Angka kematian umum (GDR) di tahun 2012 adalah 30,91% meningkat menjadi 46,24% di tahun 2016. Meningkatnya angka kematian disebabkan karena pasien seringkali datang maupun dirujuk ke RSUD dalam keadaan kritis. Sedangkan NDR (Kematian 48 jam setelah dirawat), relatif mengalami penurunan. Angka NDR tahun 2012 adalah 50,29% menurun menjadi 33,38% di tahun 2016.

Tenaga medis dan paramedis memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan pelayanan. Gambaran kualifikasi SDM dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 43
Kualifikasi SDM RSUD Kabupaten Buleleng
Tahun 2012-2016

No	Jenis Layanan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dokter Spesialis	29	28	31	35	36
2.	Dokter Umum	22	22	23	23	26
3.	Dokter Gigi/Mulut	4	4	5	5	5
4.	Paramedis Keperawatan	308	315	370	436	467
5.	Paramedis Non	103	101	119	123	124

6.	Non Medis	325	351	417	435	481

Sumber Data : Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Buleleng

Seiring dengan peningkatan tempat tidur serta sarana prasarana, RSUD Kabupaten Buleleng melakukan penambahan-penambahan SDM secara bertahap. Jumlah tenaga medis, baik dokter umum, dokter gigi maupun dokter spesialis meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah tenaga medis tahun 2012 adalah 55 orang, meningkat menjadi 67 orang di tahun 2016. Upaya pemenuhan tenaga medis baik jumlah maupun jenis spesialisnya akan terus dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan yang diberikan.

Tenaga paramedis keperawatan, paramedis non keperawatan, dan tenaga non medis juga mengalami peningkatan. Hal tersebut dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan baik pelayanan kesehatan, pelayanan penunjang,maupun pelayanan administrasi yang diberikan.

Selain penambahan SDM, penambahan sarana dan prasarana juga telah dilaksanakan antara lain:

1) Tahun 2013 RSUD Kabupaten Buleleng telah meresmikan gedung rawat inap kelas III untuk memenuhi kebutuhan ruang perawatan kelas III.
2) Tahun 2013 dan 2016 RSUD Kabupaten Buleleng melakukan penambahan masing-masing satu unit ambulance untuk memaksimalkan pelayanan rujukan dan pelayanan pasien ke pelosok daerah.
3) Tahun 2015 dan tahun 2016 RSUD Kabupaten Buleleng melakukan pembangunan IGD secara bertahap. Pembangunan IGD dilakukan untuk menyediakan pelayanan gawat darurat yang representatif.
4) Tahun 2016 RSUD Kabupaten Buleleng melakukan pembangunan poliklinik MDR khusus untuk pasien TB MDR untuk memisahkan pasien poliklinik paru dengan pasien TB MDR.
5) Tend pendapatan yang cenderung meningkat. Trend target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 44
Target dan Realisasi Pendapatan RSUD Kabupaten Buleleng
Tahun 2012-2016

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2012	58.424.633.000,00	60.655.040.714,73	104
2	2013	61.394.412.000,00	64.658.646.379,43	104
3	2014	73.344.412.000,00	78.109.193.867,11	106
4	2015	90.300.000.000,00	118.354.906.659,14	131

5	2016	115.500.000.000,00	117.821.469.180,67	102

Sumber Data : Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Buleleng

Terjadi peningkatan jumlah pendapatan RSUD Kabupaten Buleleng dari tahun ke tahun dengan peningkatan rata-rata selama tahun 2012-2016 sebesar 9,74%.

Penilaian Akreditasi Rumah Sakit Pada Tahun 2016.

Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Untuk menjamin agar mutu/kualitas diintegrasikan dan dibudayakan kedalam sistem pelayanan di Rumah Sakit, perlu dilakukan akreditasi rumah sakit. Akreditasi rumah sakit adalah pengakuan yang diberikan kepada rumah sakit oleh Pemerintah melalui badan yang berwenang (KARS) karena rumah sakit telah memenuhi standar pelayanan yang telah ditentukan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memenuhi standar akreditasi rumah sakit. Mulai dari pelatihan SDM, peningkatan sarana prasarana, studi banding, sampai penetapan komitmen pimpinan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pasien. Hasil penilaian akreditasi RSUD Kabupaten Buleleng adalah tingkat PARIPURNA.

SDM sesuai dengan standar merupakan jumlah SDM yang mengikuti pelatihan, baik tenaga medis maupun tenaga non medis. Jumlah yang dikirim untuk pelatihan bersifat fluktuatif yang disesuaikan dengan kebutuhan pada tahun yang bersangkutan. Target pelatihan tahun 2013-2017 baik tenaga medis maupun non medis adalah 1.597 orang dan realisasi 1.859 orang atau 116,41%. Tingginya capaian pelatihan dilakukan dalam upaya untuk memenuhi persyaratan akreditasi RS.

Target jumlah PNS di akhir tahun RPJMD adalah 851 orang, namun hanya terealisasi 515 orang pada tahun 2017 (data per Februari 2017) atau hanya terealisasi 60,52%. Rendahnya capaian disebabkan karena rekruitmen tenaga PNS merupakan kewenangan dari badan kepegawaian daerah Kabupaten Buleleng sehingga capaian tidak memenuh target. Untuk mengatasi hal tersebut pemenuhan SDM RS dilakukan melalui rekruitmen tenaga non PNS. Target penambahan tenaga non PNS tahun 2013-2017 adalah 280 orang dan realisasi 477 orang atau terealisasi 170,36%. Tingginya capaian penambahan tenaga non PNS dilakukan untuk

memenuhi kebutuhan SDM karena peningkatan sarana prasarana maupun karena peningkatan jumlah pasien yang berkunjung ke RSUD Kab. Buleleng.

Untuk program kesehatan masyarakat seperti waktu tunggu rawat jalan, waktu tunggu obat jadi, waktu tunggu pelayanan (patologi Klinik), kejadian kegagalan karena kerusakan foto rontgen dan RSUD memenuhi standar kesehatan lingkungan sudah mencapai target tiap tahunnya. Hal tersebut merupakan beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit. Pemenuhan alat kedokteran, alat laboratorium, maupun obat dan logistik juga terpenuhi 100% setiap tahunnya. Pembiayaan operasional seperti tersebut diatas dilakukan melalui anggaran BLUD sehingga terdapat fleksibilitas dalam upaya pemenuhannya. Untuk pembangunan sarana prasarana telah dilakukan pembangunan gedung rawat inap kelas III yaitu ruang lely pada tahun 2013. Begitu juga dengan pembangunan gedung IGD yang dilakukan secara bertahap dan telah selesai pada tahun 2016. Sedangkan untuk gedung perlengkapan, gedung rontgen, dan gedung IPSRS hanya dilakukan rehabilitasi mengingat anggaran pembangunan gedung pelayanan yang masih terbatas.

Dari tahun ke tahun, RSUD melaksanakan survei kepuasan pelanggan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna pelayanan di RSUD kabupaten Buleleng. Trend kepuasan masyarakat selama tahun 2012-2016 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 11
Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan RSUD Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017

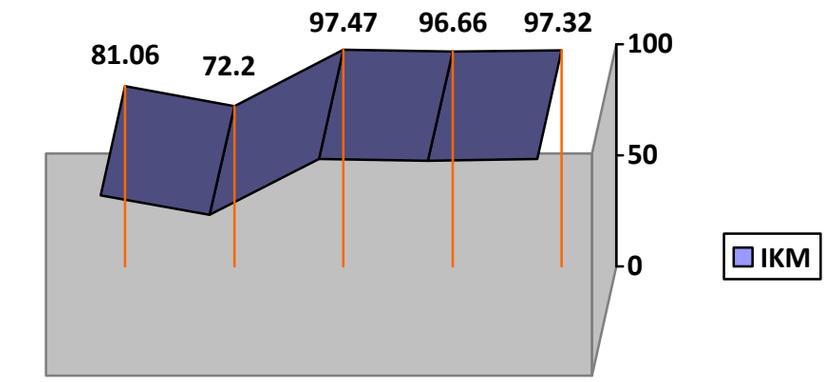

	2012	2013	2014	2015	2016
IKM	81.06	72.2	97.47	96.66	97.32

Indikator yang diukur dalam survei kepuasan masyarakat ini antara lain prosedur pelayanan, kecakapan dan keramahan SDM, kecepatan pelayanan, kenyamanan, serta keamanan pelayanan yang diberikan RSUD Kabupaten Buleleng. Hasil kepuasan masyarakat selama tahun 2012-2016 relatif meningkat, hal tersebut disebabkan karena pelayanan yang diberikan telah mampu memenuhi harapan masyarakat.

Adapun permasalahan yang ditemui dan upaya penyelesaian yang telah dilakukan adalah:

1) Kebutuhan rumah sakit yang dinamis menyebabkan anggaran sub kegiatan yang berubah-ubah
2) Regulasi penggunaan anggaran dari pusat, kurang mendukung untuk pengadaan alat-alat yang sangat dibutuhkan oleh RS
3) Dukungan anggaran dari propinsi maupun pusat masih kurang nilainya untuk kegiatan investasi seperti alat kesehatan dan fisik bangunan yang memerlukan perbaikan.
4) Rendahnya capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) disebabkan karena masih ada beberapa indikator SPM yang belum tercapai. Masih kurang SDM pemberi pelayanan, baik jumlah maupun kualifikasi pendidikan pemberi pelayanan kesehatan. Hal tersebut dilihat dari masih kurangnya beberapa dokter spesialis dan sub spesialis seperti dokter rehab medik, dokter spesialis gigi dn mulut, serta subspesialis lainnya. Selain itu, kualifikasi pemberi pelayanan juga belum memenuhi standar nasional, baik pendidikan maupun keikutsertaan dalam pelatihan. Sarana prasarana yang belum memenuhi persyaratan Rumah Sakit kelas B pada IGD, rawat inap, patologi klinik, Radiologi, rehab medik, dan penunjang lainnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa upaya yang dilakukan antara lain:

1) Selalu menyempurnakan dan mengupayakan perencanaan tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan juknis yang ada
2) Sesuai dengan kaidah BLUD, dimungkinkan adanya fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit yang dinamis melalui mekanisme pergeseran anggaran

3) Membuat usulan anggaran baik ke propinsi maupun pusat untuk mendukung program kegiatan investasi seperti pengadaan alat kesehatan maupun fisik bangunan RS
4) Melakukan perekrutan dokter spesialis maupun sub spesialis melalui pengusulan ke BKD maupun institusi pendidikan kedokteran. Peningkatan kualifikasi dan ketrampilan juga telah dilakukan melalui pengiriman SDM untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
5) Pemenuhan sarana-prasarana dilakukan secara bertahap.

Dengan dilakukan upaya-upaya tersebut diatas diharapkan RSUD Kabupaten Buleleng mampu memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal RS.

Selama tahun 2012-2017, prestasi dan penghargaan yang diperoleh RSUD Kabupaten Buleleng antara lain:

Tabel 45
Penghargaan yang diterima RSUD Kab. Buleleng Tahun 2012-2016

NO	NOMOR SURAT	TANGGAL	JENIS PENGHARGAAN	ASAL PENGHARGAAN
1	KARS-SERT/276/I/2012	12 Januari2012	Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit(Lulus Tingkat Lanjut)	Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KAR)
2	002-6/3179/BP3A	22 Desember 2012	Peserta Lomba Gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (GRSSI-B).(Tingkat Propinsi Bali Tahun 2012)	Gubernur Bali
3	445/9883/Yankes.Dinkes	29 Oktober 2013	Juara Harapan IV Lomba Gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (GRSSI-B) Propinsi Bali Tahun 2013	Gubernur Bali
4	649 Tahun 2013	6 Nopember 2013	Juara Harapan III Lomba Pengelolaan Lingkungan Hidup Kantor SKPD Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Gubernur Bali
5	002/11878/Yankes. Dinkes	7 Nopember 2014	Peringkat VII Lomba Gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (GRSSI-B).Propinsi Bali Tahun 2014	Gubernur Bali
6	1412058/SERT/KP/ 2014	16 Juni 2015	Sebagai Tanda Keikutsertaan Pada Program Nasional Pemantapan Mutu Eksternal (PNPME) Bidang Kimia Klinik Tahun 2014	Direktorat Jendral Bina Upaya Kesehatan Kemkes RI Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
7	1412058/SERT/HP/ 2014	16 Juni 2015	Sebagai Tanda Keikutsertaan Pada Program Nasional Pemantapan Mutu Eksternal (PNPME)Bidang Hematologi Tahun 2014	Direktorat Jendral Bina Upaya Kesehatan Kemkes RI Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya

8	1412058/SERT/UP/ 2014	16 Juni 2015	Sebagai Tanda Keikutsertaan Pada Program Nasional Pemantapan Mutu Eksternal (PNPME) Bidang Urinalisis Tahun 2014	Direktorat Jendral Bina Upaya Kesehatan Kemkes RI Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
9	KARS-SERT/310/VI/2016	03 Juni 2016	PARIPURNA	Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS)

Sumber Data : Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Buleleng

RSUD Kabupaten Buleleng sebagai pemberi pelayanan kesehatan tingkat lanjut tentu tidak bisa bekerja secara mandiri. Kerjasama dilakukan baik dengan institusi pendidikan, rekanan, maupun pelayanan kesehatan lainnya. Kerjasama terus digalang dengan pihak terkait demi kelancaran pelayanan kesehatan yang diberikan. Selama tahun 2012-2017 (per Februari 2017), telah ditandatangani sebanyak 130 kerjasama dari berbagai pihak. Kerjasama dilaksanakan untuk mempermudah koordinasi demi memaksimalkan pelayanan kesehatan.

Tabel 46
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan (RSUD) sesuai RPJMD Tahun 2012-2017

No	Uraian	Tahun										
		2012	2013		2014		2015		2016		2017	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi (per Feb)
1	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**											
	SDM RSUD sesuai standar :											
	-SDM /Tenaga Medis (org)	25	35	7	39	379	43	64	47	645	47	-
	- SDM/ Tenaga Non Medis (org)	155	226	169	249	201	247	191	302	203	332	-
	Jumlah PNS dan Non PNS sesuai standar :											
	-PNSD (org)	470	601	464	676	473	751	528	826	520	851	515
	-Non PNSD (org)	325	20	34	40	133	60	37	75	90	85	183
2	**Program Kesehatan Masyarakat**											
	- Waktu tunggu dirawat (rawat jalan)	≤ 60 menit	≤ 60 menit	60 menit	≤ 60 menit	60 menit	≤ 60 menit	60 menit	≤ 60 menit	29,92 menit	≤ 60 menit	53 menit
	-waktu tunggu pelayanan (obat jadi)	≤ 30 menit	≤ 30 menit	11,5 menit	≤ 30 menit	13,09 menit	≤ 30 menit	20,5 menit	≤ 30 menit	12,94 menit	≤ 30 menit	11 menit
	Meningkatnya mutu pelayanan penunjang											
	- Waktu tunggu hasil pelayanan (patologi klinik)	≤ 60 menit	≤ 60 menit	60 menit	≤ 60 menit	48,23 menit	≤ 60 menit	66,20 menit	≤ 60 menit	66,27 menit	≤ 60 menit	55,58 menit
	-Kejadian kegagalan pelayanan (karena kerusakan foto rontgen)	≤ 5 %	≤ 5 %	2,6%	≤ 5 %	4,24 %	≤ 5 %	2,70%	≤ 5 %	2,15%	≤ 5 %	1,86%

	RSUD memenuhi standar kesehatan lingkungan	95,21%	95,51%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	16,67%
3	Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana											
	Terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan rumah sakit sesuai standar											
	-Alat-alat kedokteran	30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	16,67%
	-Alat-alat laboratorium	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	16,67%
	-Terpenuhi-nya obat-obatan RSUD yang sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	16,67%
	Terpenuhinya bahan obat-obatan bagia pasien keluarga miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	16,67%
	Terpenuhinya kebutuhan logistic RSUD sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	16,67%
4	Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan											
	Terpenuhinya kebutuhan bangunan gedung yang memadai/sesuai standar											
	Gedung layanan rawat inap	30%	35%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-
	Gedung perlengkapan berfungsi baik	10%	-	70%	100%	75%	-	80%	-	80%	-	-
	Gedung rontgen (berfungsi baik)	10%	-	60%	-	65%	-	70%	100%	70%	-	-
	Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) tahap I s.d tahap IV berfungsi baik	10%	25%	0%	55%	0%	85%	70%	100%	100%	100%	100%
	Gedung IPSRS berfungsi baik	10%	-	65%	-	65%	-	65%	-	75%	100%	75%

2. URUSAN PERTANIAN.

Pembangunan Sub Sektor Pertanian dan Peternakan kedepan dihadapkan kepada tantangan yang cukup kompleks, antara lain kebutuhan pangan yang terus meningkat sebagai akibat pertambahan jumlah penduduk, tuntunan konsumen terhadap kualitas produk, persaingan pasar yang semakin ketat, alih fungsi lahan produktif ke non pertanian serta perubahan lingkungan strategis lainnya yang akan berpengaruh terhadap pembangunan Pertanian dan Peternakan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan re-orientasi kebijakan dan program pembangunan yang berwawasan agribisnis dengan lebih menekankan pada keunggulan spesifik lokasi.

Program yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang Pertanian dalam RPJMD Tahun 2012-2017 meliputi :

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan).
3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan.
4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan
5. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan.
6. Program Peberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan.
7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.
8. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
9. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.
10. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan.

Sawah adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk tanaman padi atau tanaman semusim lainnya dicirikan dengan adanya penggunaan sistim irigasi dan subak. Luas lahan sawah terbesar adalah di KecamatanSawan sebesar 2.654 Ha, KecamatanSukasada seluas 2.118 Ha, Kecamatan Seririt 1.729 Ha kemudian di Kecamatan Buleleng seluas 1.670 Ha, Kecamatan Busungbiu 755 Ha, Kecamatan Banjar 708 Ha dan di Kecamatan Gerokgak seluas 628 Ha serta di Kecamatan Kubutambahan seluas 527 Hasedangkan di Kecamatan Tejakula tidak memiliki lahan sawah.

Perkembangan Luas Panen dan Produksi Komoditas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2016 ditunjukkan oleh Tabel berikut ini:

Tabel 149

Perkembangan Luas Panen dan Produksi Komoditas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kabupaten Buleleng Tahun 2012- 2016

Jenis Komoditi	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Padi										
- Padi Sawah	22,359	134,028	22,361	136,286	22,198	133,44	21,135	128,209	22,666	137,243
- Padi Ladang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Palawija										
- Jagung	7,714	24,941	5,860	23,524	6,603	18,397	5,674	15,850	6,014	22,667
- Kedelai	127	161	25	37	27	29	18	20	266	271
- Kacang Tanah	1,6	2,555	1,093	1,538	996	1,200	1,061	1,215	991	1,403
- Kacang Hijau	390	243	295	188	330	213	134	82	192	197
- Ubi Kayu	553	12,657	627	15,947	635	14,572	753	7,787	641	6,211
- Ubi Jalar	20	222	18	286	12	115	9	101	8	83
Sayur-sayuran										
- Cabe	2,738	47,816	294	5,301	1,197	4,291	1,311	6,006	1,762	14,774
- Bawang Merah	10	55	15	77	24	78	28	142	45	204
- Bawang Putih	2	5	3	28	1	1	1	10	-	-
- Kubis	92	3,013	107	3,816	82	2,519	61	2,063	143	1,045
- Wortel	107	2,03	143	3,227	94	1,831	58	1,480	78	2,043
- Kentang	43	1,221	49	1,534	43	1,206	25	560	14	251

Jenis Komoditi	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
Buah-buahan										
- Mangga	7,261	27,622	7,147	30,078	3,625	27,711	5,565	36,732	4,153	24,562
- Rambutan	3,096	18,138	3,021	6,567	1,346	11,236	2,425	12,626	1,877	10,590
- Anggur	3,891	8,754	390	9,118	798	9,474	919	11,038	524	21,161
- Pisang	9,370	19,026	910	19,343	929	25,499	958	22,990	959	23,571
- Manggis	522	1,650	543	755	222	1,915	429	2,127	164	856
- Durian	1,032	3,308	1,068	1,224	702	3,890	826	4,96	1,151	1,855
- Jeruk	1,714	3,268	1,519	4,219	1,285	7,651	1,476	10,08	293	3,241

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan

Jagung adalah merupakan salah satu komoditas palawija yang menjadi unggulan Kabupaten Buleleng dan sebagai makanan pokok kedua setelah padi. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Buleleng mempunyai lahan kering yang cukup luas yaitu 70.430 Ha tersebar di seluruh Kecamatan. Selain jagung komoditas palawija yang berkembang di Kabupaten Buleleng adalah ubi kayu, kacang tanah, kacang hijau, kedelai dan ubi jalar.

Komoditas buah-buahan yang berkembang di Kabupaten Buleleng adalah mangga, rambutan, anggur, durian, pisang, manggis, pepaya, sawo dan nangka. Sedangkan komoditas sayur-sayuran yang berkembang di Kabupaten Buleleng adalah kentang, kubis, wortel, strawberry, tomat dan paprika yang perkembangannya sebagian besar di Kecamatan Sukasada bagian atas.Ternak yang berkembang cukup baik di Kabupaten Buleleng adalah sapi, kambing, babi dan ayam buras serta itik. Pada daerah dataran tinggi dikembangkan sapi kereman yaitu di Kec. Sukasada dan Busungbiu, sedangkan di dataran rendah lebih banyak berkembangsapi pembibitan.

Tabel 150
Populasi Ternak di Kabupaten Buleleng dalam
Tahun 2012- 2016

No	Jenis Ternak	Banyaknya Populasi (ekor)				
		Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Sapi Potong	145,600	120,127	121,613	119,491	125,408
2	Kerbau	173	106	134	103	108
3	Kuda Babi	47	43	43	5	5
4	Bali	153,344	134,794	133,457	111,802	107,265
5	Babi Sadleback	43,078	46,604	46,281	44,412	46,431
6	Babi Landrace	26,254	27,689	27,960	28,837	33,057
7	Kambing Kacang	6,429	6,105	6,191	59,950	6,080
8	Kambing PE	33,043	25,409	25,409	22,482	22,196
9	Ayam Buras	752,772	768,450	778,028	776,789	834,479
10	Ayam Ras	15,124	18,997	19,012	22,253	31,333
11	Petelur Ayam Ras	209,087	227,958	285,816	229,850	336,072
12	Pedaging Itik	67,104	70,110	64,289	70,662	64,103

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan

Perkembangan dan peningkatan produksi peternakan terus dipacu melalui berbagai program dan kegiatan, baik berupa intensifikasi dan ekstensifikasi, pengadaan bibit unggul, inseminasi buatan, peningkatan keterampilan dan pemanfaatan teknologi tepat guna serta pembinaan hijauan makanan ternak dan kesehatan hewan.

Potensi peternakan di Kabupaten Buleleng didukung oleh adanya sumber daya alam berupa lahan sawah, lahan kering, lahan perkebunan sebagai sumber hijauan makanan ternak (HMT).

Tabel 151
Perkembangan Produksi Daging dan Telur di Kabupaten Buleleng
Tahun 2012-2016

NO	Jenis Produksi	Tahun (Ton)				
		2012	2013	2014	2015	2016
I	**PRODUKSI DAGING**	**9.301,17**	**6.428,25**	**6.353,61**	**7.858,344**	**7.887,576**
1	Daging Sapi	2.917,40	1.668,39	1.205,91	1.496,051	1.173,146
2	Daging Kerbau	19,82	11,06	88,85	86.857	10.617
3	Daging Kambing	110,55	97,45	107,94	116.753	112.923
4	Daging Babi	5.146,42	3.576,45	3.859,41	5.147,904	5.339,337
5	Daging Ayam Buras	869,47	828,39	838,45	826.599	899.568
6	Daging Ayam Ras	200,61	206,75	216,59	224.984	327.756
7	Daging Itik	36,90	39,76	36,46	37.999	33.977
II	**PRODUKSI TELUR**	**1.063,77**	**1.046,70**	**1.019,78**	**1.055,834**	**1.180,505**
1	Telur Ayam Buras	517,91	497,57	503,62	496.496	540.325

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan

Pendapatan Daerah pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng didapatkan dari hasil restribusi Rumah Potong Hewan. Kabupaten Buleleng memiliki Rumah Potong Hewan yang terletak di Desa Panji Anom. Rumah Potong Hewan adalah suatu komplek bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan bagi konsumsi masyarakat luas. Untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan bagi masyarakat, daging harus memenuhi aspek kuantitatif, aspek kualitatif (nilai gizi), aspek kesehatan (syarat-syarat hygiene) dan aspek kehalalan, sehingga diperoleh produk yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).Target dan

Realiasi Pendapatan Daerah pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng selama lima tahun ditunjukkan oleh gambar berikut:

Gambar 14
Realisasi Pendapatan Daerah pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng

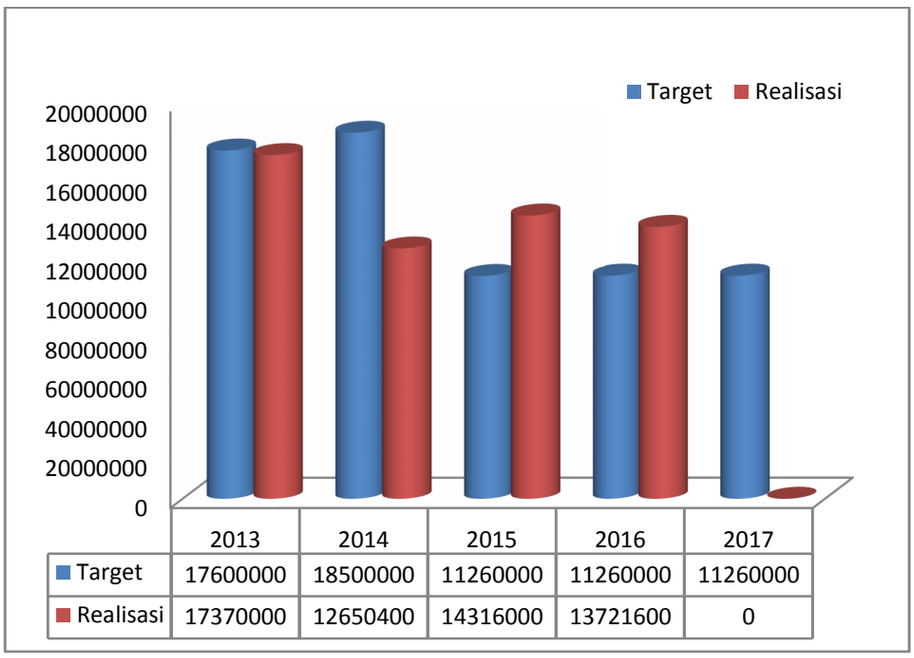

	2013	2014	2015	2016	2017
Target	17600000	18500000	11260000	11260000	11260000
Realisasi	17370000	12650400	14316000	13721600	0

Sumber data ; Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng

Pendapatan daerah dari Restribusi Rumah Potong hewan mengalami penurunan dari segi target yang ingin dicapai karena adanya kebijakan dari Pemerintah untuk tidak memotong Sapi betina produktif.

Anggaran belanja daerah pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng mengalami dinamika. Anggaran Belanja Daerah digunakan untuk membiayai Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pertanian dan Peternakan. Belanja Langsung dipergunakan dalam membiayai program kegiatan pertanian dan peternakan di Kabupaten Buleleng. Pada tahun 2015anggaran melonjak tinggi disebakan karena adanya Dana Alokasi Khusus Tambahan untukinfrastruktur pertanian berupa pembangunan sumber-sumber air pendukung pertanian di masyarakat.

Sepanjang tahun 2012 sampai dengan 2017 Belanja Langsung baik Belanja Modal maupun Belanja Operasi pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng diarahkan pada program dan kegiatan baik urusan wajib maupun urusan pertanian. Beberapa kegiatan bersifat langsung ke masyarakat yang diwujudkan melalui Belanja Hibah berupa barang kepada kelompok masyarakat seperti Pembangunan Jalan Pertanian baik berupa

Jalan Usaha Tani pada komoditas Tanaman Pangan, Jalan Produksi baik untuk komoditas Hortikultura maupun Peternakan. Selain itu hibah berupa barang juga dianggarakan untuk pembuatan lumbung pangan masyarakat termasuk juga Rice Miiling Unit, Saluran Irigasi Tersier, Perpipaan, Bak Penampungan Air, Dam Parit, Irigasi Air Tanah Dalam/Dangkal. Irigasi Air Permukaan, serta Alsintan.

Hibah berupa barang juga disalurkan ke masyarakat melalui bibit dan benih yaitu bibit ternak melalui kegiatan Pendistribusi Bibit Ternak. Pendistribusian bibit ternak dilaksanakan karena selain usulan masyarakat melalui proposal namun juga upaya Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng untuk menyebarkan bibit ternak yang baik dan unggul di masyarakat. Sapi Bali, Kerbau, Kambing Ettawa, Babi dan Ayam ras diantaranya bibit ternak yang disebarkan ke masyarakat. Selaindidistribusikan bibit ternak Dinas juga aktif melaksanakan pembinaan untuk terutama untuk budidaya, pelatihan pakan serta penguatan kelembagaan. Untuk benih tanaman juga Dinas menyalurkan kegiatan Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija serta Pengembangan bibit unggul pertanian.

Kegiatan pembinaan berupa Sekolah Lapang baik untuk penerapan budidaya yang baik, penanggulangan hama tanaman, serta kegiatan pasca panen juga dilaksanakan untuk kemajuan pertanian dan peternakan di Kabupaten Buleleng. Penyuluhan lapangan dilaksanakan sampai di tingkat desa, dimana setiap desa didampingi oleh tenaga penyuluh pertanian dengan satu wilayah binaan. Kelembagaan petani juga ditingkatkan agar petani mampu mandiri dalam mengelola permodalan.

Untuk pengenalan produk serta potensi pertanian unggulan Buleleng, Dinas bersama dengan SKPD lingkup Kabupaten Buleleng senantiasa aktif mengadakan kegiatan promosi baik bersifat local maupun nasional, salah satu kegiatan yang diadakan tiap tahun adalah Twin Lake Festival dimana lokasi penyelenggaraannya berada pada daerah pertanian hortikultura yaitu di Desa Pancasari.

Untuk Belanja Modal pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng diarahkan pada sarana dan prasaranadiantaranya pembangunan Balai Benih Terintegrasi yang terletak di Gerokgak. Selain itu dibangun Instalasi Bibit Ternak serta Hijauan Pakan Ternak. Sarana petugas terutama untuk penyuluh di lapangan juga diutamakan yaitu Sepeda Motor selain itu peralatan computer dengan printer, GPS, TV, Laptop, LCD Proyektor, Kamera, Alat ubinan, serta Soil Tester tersebar sampai pada BPP di 9 kecamatan Kabupaten Buleleng.

Dinamika penganggaran pada Belanja Langsung disebabkan karena kemampuan daerah terutama dari dana PAD sangat tidak memadai. Alokasi anggaran paling tinggi disumbangkan oleh Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian. DAK sangat berperan dalam membiayai kegiatan pertanian di Kabupaten Buleleng sesuai dengan Juknis yang telah ditentukan. Terutama kegiatan sarana prasarana pertanian yaitu hibah berupa barang di masyarakat. Selain itu DAK juga dialokasikan untuk sarana prasarana berupa Belanja Modal di Penyuluh.

Pada tahun 2015 terjadi kenaikan yang cukup tinggi dari segi anggaran pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng. Hal ini disebabkan pada tahun tersebut terdapat alokasi DAK Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet KerjaBidang Pertanian Tahun 2015 sebesar Rp13.678.500.000,00 . Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan P3K2 padaDinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng dimanfaatkan untuk kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan yang meliputi : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier, Pengembangan Sarana dan Prasarana Air (Irigasi Air Tanah, Irigasi Air Permukaan, Dam Parit), Pembanguna/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani dan Dana Penunjang. Untuk realisasi tahun 2015 tidak mencapai target disebabakan karena gagal tender disebabkan tidak adanya penawar / peminat dari kontraktor / penyedia karena waktu yang sangat terbatas dan persyaratan administrasi yang cukup banyak.

Tabel 152
Anggaran dan Realisasi Penyelenggaraan Urusan Pertanian
Tahun 2012-2016

NO	TAHUN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	PAGU	REALISASI
1	2012	12	36	10.384.670.969	9.712.522.048
2	2013	12	36	13.245.318.731	12.906.723.487
3	2014	14	34	17.272.988.000	16.970.659.962
4	2015	14	42	27.466.654.952	25.237.007.724
5	2016	14	41	13.413.396.818	12.918.162.278

Sumber data ; Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng

Produktivitas padi dari tahun ke tahun terus meningkat melebihi target dalam RPJMD wlaupun di tahun 2016 mengalami sedikit penurunan namun masih lebih tinggi dari target yang ingin dicapai dalam RPJMD. Peningkatan produktivitas padi tersebut didukung melalui kegiatan

pengembangan budidaya dengan penerapan teknologi system tanam jajar legowo 2 : 1 kepada masyarakat petani. Selain didukung kegiatan tersebut, juga dilaksanakan kegiatan pengembangan padi organic. Penyediaan sarana produksi berupa benih dan pupuk termasuk prasarana lainnya seperti pengembangan infrastruktur dan alat mesin pertanian yang memadai merupakan faktor kunci keberhasilan peningkatan produktivitas tanaman padi. Sarana produksi berupa benih padi disediakan melalui pengembangan Desa Mandiri Benih pada kelompok penangkar benih di masyarakat serta subsidi benih dari pemerintah. Untuk memenuhi kebutuhan pupuk disediakan melalui subsidi pupuk pemerintah pusat dan pupuk organik di Pemerintah Provinsi Bali. Tersedianya prasarana dan sarana penunjang lainnya seperti perbaikan jaringan irigasi dan pengembangan sumber-sumber air yang bertujuan untuk meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) serta penyediaan alat mesin pertanian yang memadai.

Dukungan kegiatan APBD Kabupaten Buleleng diantaranya adalah kegiatan pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija yaitu melalui pengembangan padi di lahan kering serta penangkaran benih padi di Balai Benih Pembantu (BBP) Gerokgak. Kegiatan lainnya berupa peningkatan mutu keamanan pangan dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para kelompok tani/subak dan pengendalian serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) yang mempunyai peran sangat penting dalam upaya menjaga tanaman dari serangan OPT.

Masalah yang dihadapi dalam pengembangan padi sawah adalah luas lahan garapan dari tahun ke tahun semakin menyempit akibat alih fungsi lahan ke non pertanian, sumber-sumber air yang semakin mengecil, serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dampak dari perubahan iklim dan terjadi kekeringan dari perubahan iklim yang sangat ekstrim.

Pemecahan masalah untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian adalah melalui pemberian insentif bagi petani berupa kegiatan seperti pemberian bantuan sarana produksi, perbaikan infrastruktur jaringan irigasi dan bantuan alat mesin pertanian baik dari pra panen sampai penanganan pascapanen. Untuk penanggulangan serangan OPT dilakukan pelatihan SL-PHT padi juga pembentukan Regu Pengendali Hama (RPH) masing-masing kecamatan, pengendalian STOP SPOT.

Sedangkan produksi palawija realisasinya juga terus mengalami peningkatan dari target RPJMD. Terjadinya peningkatan produksi palawija tersebut didukung melalui kegiatan pengembangan intensifikasi budidaya tanaman jagung hibrida. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian

target produksi palawija adanya serangan OPT sebagai dampak perubahan iklim yang sangat ekstrim, harga pasar yang kurang pasti serta menurunnya minat generasi muda untuk menjadi petani serta kurangnya sarana prasarana alsintan.

Cara pemecahan masalah yang dihadapi yaitu dengan melaksanakan SL-PHT untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan para petani dalam penanggulangan serangan OPT, mengkoordinasi dengan instansi terkait terhadap stabilitas harga produksi pertanian khususnya tanaman pangan, penyediaan mekanisasi melalui pemberian bantuan alat mesin pertanian yang memadai.

Pencapaian indikator kinerja sasaran jumlah produksi buah juga melebihi dari target RPJMD. Faktor yang mempengaruhi pencapaian target ini adalah perluasan areal tanam baik yang dilakukan oleh petani secara swadaya maupun dukungan dari dana APBN yaitu pengembangan kawasan di beberapa lokasi. Produksi pisang mulai meningkat karena penanaman baru beberapa varietas pisang yang cukup toleran dengan penyakit layu, kondisi ini tidak terlepas dari pembinaan pengendalian penyakit layu pada tanaman pisang. Produksi jeruk khususnya jeruk keprok meningkat karena mulai berproduksinya tanaman jeruk hasil pengembangan kawasan yang bersumber dari dana APBN maupun bantuan benih jeruk yang bersumber dari dana APBD. Produksi anggur mengalami peningkatan karena bertambahnya populasi tanaman anggur akibat bertambahnya areal tanaman anggur yang sempat menurun karena peremajaan tanaman serta peralihan komoditas dari anggur ke tanaman padi. Produksi stroberi meningkat karena bertambahnya areal tanam dan juga tidak terlepas dari penerapan hasil SL-GAP yang dilakukan di kelompok tani. Produksi semangka juga mengalami peningkatan karena bertambahnya areal tanam yang dilakukan oleh petani secara swadaya. Walaupun demikian beberapa produksi buah mengalami penurunan pada tahun 2016 yaitu mangga dan durian. Menurunnya produksi buah ini disebabkan karena faktor iklim yang tidak menentu. Curah hujan yang tinggi pada saat musim berbunga mangga dan durian menyebabkan gagalnya pembuahan, sehingga produksi mangga dan durian selama tahun 2016 menurun tajam.

Produksi sayuran sepanjang tahun dapat melampaui target RPJMD. Faktor yang mempengaruhi pencapaian target ini adalah naiknya produksi dibeberapa komoditas sayuran seperti cabai rawit merah, cabai besar dan wortel. Meningkatnya produksi cabai rawit merah ini disamping disebabkan karena tingginya harga dipasaran sehingga mendorong petani lebih bergairah

menanam cabai juga karena adanya kegiatan pengembangan kawasan cabai rawit merah seluas 40 ha yang bersumber dari dana APBN. Cabai besar juga mengalami peningkatan yang tajam dari 153 ton pada tahun 2015 menjadi 1.033 ton pada tahun 2016 atau meningkat sebesar 675,16%. Peningkatan ini disebabkan disamping disebabkan karena bertambahnya luas tanam dari 28 ha pada tahun 2015 menjadi 51 ha pada tahun 2016 atau bertambah sebesar 182,14% juga disebabkan karena lebih intesifnya pemeliharan tanaman oleh petani sebagai dampak dari pelaksanaan SL-GAP cabai serta yang terpenting adalah stabilnya harga cabai merah dipasaran mendorong petani menanam dan memelihara cabainya lebih intensif. Wortel juga mengalami peningkatan produksi dari 1.480 ton pada tahun 2015 menjadi 2.143 pada tahun 2016. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya luas panen dari 58 ha pada tahun 2015 menjadi 78 ha pada tahun 2016.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalampencapaian target diantaranya perubahan cuaca yang tidak menentu merupakan kendala bagi usaha pertanian yang dilakukan pada lahan konvensional. Curah hujan yang tinggi dan cuaca yang tidak menentu menyebakan mundurnya waktu panen dan menurunnya produksi buah.

Cara pemecahan masalah yang akan dilakukan diantaranya adalah melalui intensifikasi dan peningkatan populasi. Intensifikasi melalui Good Agriculture Practices (GAP) atau budidaya yang baik dan benar. Sedangkan peningkatan populasi tanaman dilaksanakan melalui pengembangan kawasan buah dengan memanfatkan lahan-lahan marginal seperti pengembangan kawasan jeruk di Kecamtan Gerokgak.

Pencapaian indikator kinerja sasaran jumlah populasi ternak diantaranya sapi potong, ayam buras, babi, kambing, walaupun mengalami peningkatan produksi namun tidak mencapai target yang diharapkan. Tidak tercapainya indikator kinerja sasaran jumlah populasi ternak disebabkan beberapa hal diantaranya adalah adanya pemutahiran data Sensus Pertanian dan program PSPK yang mendata keseluruhan pemilik sapi potong dan kerbau sampai ketingkat rumah tangga sehingga terjadi perubahan data karena perhitungan estimasi yang biasa digunakan diperbaiki, selain itu harga ternak sapi di pasar yang cukup tinggi sehingga peternak cenderung menjual ternaknya, gairah peternak untuk membudidayakan ternak menurun karena harga pakan yang berkualitas harganya mahal, SDM generasi muda yang enggan melanjutkan budidaya peternakan dan mereka lebih memilih menjadi pekerja disektor industri ataupun lainnya, sehingga dengan kondisi ini maka laju pertumbuhan peternakan terhambat serta penerapan teknologi pada

sektor ini menurun. Capaian kerja peningkatan populasi ayam ras menunjukkan gaerah peternak untuk memelihara ayam ras terutama ras pedaging, semakin tinggi juga disebabkan oleh adanya keadaan peningkatan kebutuhan daging ayam dimasyarakat.

Terhadap tidak tercapainya indikator kinerja sasaran jumlah populasi ternak tersebut Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng membuat langkah-langkah alternatif solusi. Alternatif solusi yang telah dilakukan diantaranya adalah melalui (1) Pembinaan dan penyuluhan masyarakat peternak untuk mengubah sistem peternakan tradisional menjadi peternakan berorientasi agribisnis, (2) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan peternak dalam manajemen usaha, intensifikasi proses produksi dan pemasaran, (3) Pemanfaatan lahan pengangonan dan lahan tidur menjadi lahan kebun rumput dan sumber pakan ternak yang dikelola secara intensif dan terpadu (4) Peningkatan produksi dan distribusi sumber pakan hijauan ternak yang dikelola secara optimal untuk memenuhi kebutuhan peternak secara berkesinambungan sepanjang tahun, (5) Peningkatan akses permodalan bagi kelompok ternak melalui kegiatan pendampingan usaha kerjasama dengan lembaga keuangan mikro/kecil dan perbankan dan (6) Meningkatkan aktifitas pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/ternak dengan melibatkan masyarakat.

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian target diantaranya adalah Pemberian penguatan kepada sapi betina bunting sehingga diharapkan akan meningkatkan populasi ternak sapi. Pengadaan bibit ternak dan sarana penunjang dan masih banyak lagi kegiatan pendampingan yang bersifat meningkatkan pengetahuan peternak dalam melakukan budidaya secara baik dan benar. Kegiatan – kegiatan yang dilakukan tahun 2016 ini tidak terlepas dari dukungan dana APBD maupun APBN.

Pencapaian indikator kinerja sasaran jumlah produksi daging rata-rata tidak mencapai target yang diharapkan namun pada tahun 2016 mencapai 11.173,15 ton atau 103,60 % dari target. Tercapainya target produksi daging disebabkan meningkatnya kebutuhan daging ayam ras, hal ini disebabkan oleh adanya kecendrungan peningkatan konsumsi daging ayam sebagai alternatif pilihan akibat terjadinya peningkatan harga daging sapid dan babi.

Pencapaian indikator kinerja sasaran jumlah produksi telur mencapai 1180,50 ton atau 77,99 % dari target. Apabila capaian kinerja tahun 2016 dibandingkan dengan capaian tahun 2015 mengalami kenaikan 160,5 ton. Tidak tercapainya target yang telah ditentukan disebabkan peternak ayam buras maupun ayam ras petelur serta peternak itik memelihara dalam jumlah

yang kecil dan belum skala usaha. Solusi yang telah dilakukan dalam mendorong peningkatan produksi telur diantaranya melalui pembinaan peternak unggas. Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja adalah program peningkatan produksi hasil peternakan, program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan serta program pelatihan dan pembinaan petani/peternak.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target populasi ternak, produksi daging dan telur diantaranya adalah terus naiknya harga bahan pakan yang memicu kenaikan pakan komersial atau pabrikan, terbatasnya hijauan makanan ternak di musim kering, keterbatasan permodalan usaha perternakan terkait mahalnya bibit ternak sapi potong, diperlukan peningkatan pengetahuan peternak tentang teknik budidaya dan penanganan penyakit, dan belum maksimalnya upaya pengendalian pemotongan sapi betina produktif.

Cara yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut diantaranya adalah peningkatan aplikasi teknologi peternakan oleh masyarakat, peningkatan kemampuan petani melalui pelatihan, kursus, magang, dan Sekolah Lapang, pengembangan kemitraan antar kelompok/gapoktan dengan pihak ketiga dalam membangun rantai pasokan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dan penanganan dampak bencana alam dan perubahan iklim serta fasilitasi prasarana dan sarana penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).

Capaian kinerja bidang pertanian Tahun 2016 ditunjukkan melalui pencapaian indicator berikut ini.

1. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar mencapai :
   - Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya (ton) sebesar 137.243 ton/tahun
   - Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya (ha) adalah seluas 22.666 Ha
2. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB pada tahun 2015 mencapai 5.827.841,27 juta rupiah, mengalami pertumbuhan sebesar 5,04 persen dari Tahun 2014 yang mencapai 4.926.772,75 juta rupiah.

Pencapaian indikator kinerja sasaran jumlah produktivitas padi diperoleh dengan cara membagi jumlah produksi dengan luas panen (kw/ha). Hasil yang diperoleh untuk produktivitas padi sebesar 59,77 kw/ha atau 105,98 % dari target. Peningkatan produktivitas padi tersebut didukung dengan penerapan teknologi tepat guna kepada masyarakat petani yaitu dengan

menerapkan Sistem Tanam Jajar Legowo 2:1, Sistem tanam SRI (System Rice of Intensification) dan penyediaan sasaran produksi yang memadai seperti benih bersubsidi, pupuk bersubsidi dengan penerapan pemupukan berimbang yang berbasis spesifik lokasi, serta tersedianya alat dan mesin pertanian yang memadai pula.

Gambar 15
Capaian Produktivitas Padi 1

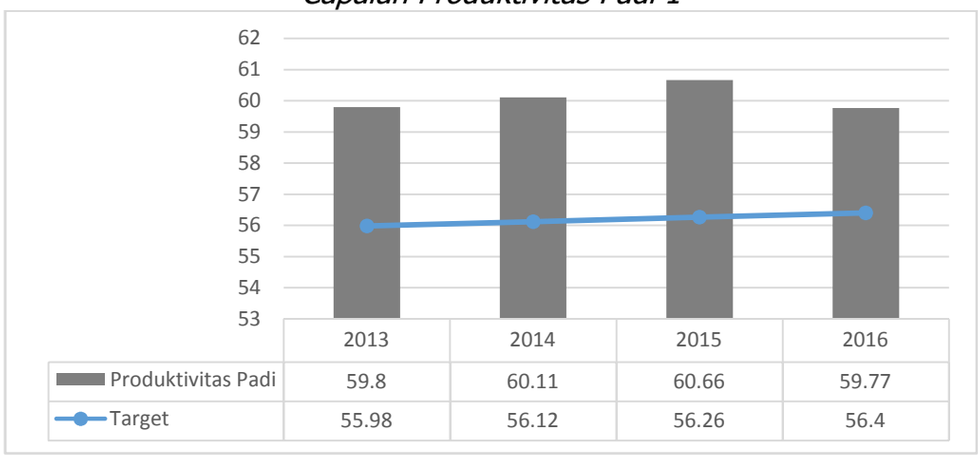

	2013	2014	2015	2016
Produktivitas Padi	59.8	60.11	60.66	59.77
Target	55.98	56.12	56.26	56.4

Sumber data : Distanak Kabupaten Buleleng

Pencapaian indikator kinerja sasaran jumlah produksi palawija mencapai 51.966 ton/tahun atau 124,62 % dari target. Pencapaian indikator tersebut diperoleh dengan mengalikan luas panen dengan produktivitas. Peningkatan produksi palawija tersebut didukung melalui kegiatan intensifikasi dan penyediaan sarana produksi yang memadai. Terjadinya peningkatan produksi palawija tersebut didukung melalui kegiatan pengembangan intensifikasi budidaya tanaman jagung hibrida seluas 2.000 ha. Selain pengembangan jagung juga dilaksanakan kegiatan intensifikasi budidaya tanaman kedelai seluas 250 ha.

Gambar 16
Capaian Produktivitas Padi 2

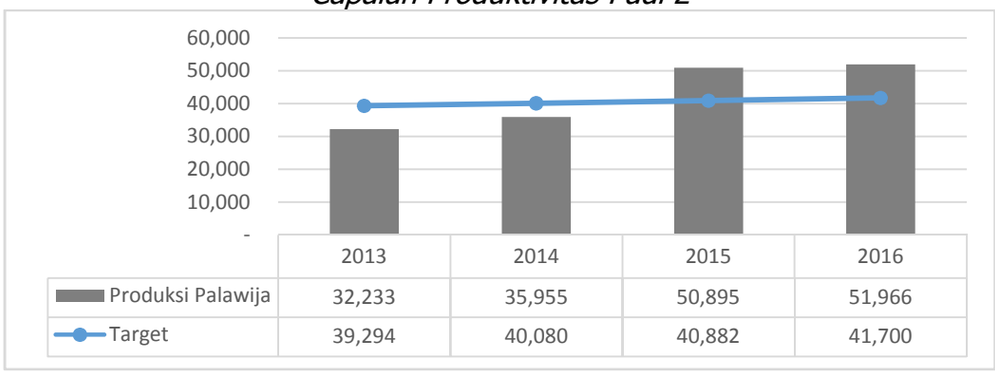

	2013	2014	2015	2016
Produksi Palawija	32,233	35,955	50,895	51,966
Target	39,294	40,080	40,882	41,700

Sumber data : Distanak Kabupaten Buleleng

Pencapaian indikator kinerja sasaran jumlah produksi buah-buahan

diperoleh dengan cara mengalikan luas panen dengan produktivitas. Hasil yang diperoleh mencapai 108.570 ton atau 100,03 % dari target. Faktor yang mempengaruhi pencapaian target ini adalah perluasan areal tanam yang dilakukan oleh petani dan juga tidak terlepas dari penerapan hasil SL GAP yang dilakukan oleh petani.

Gambar 17
Capaian Produksi Buah-buahan

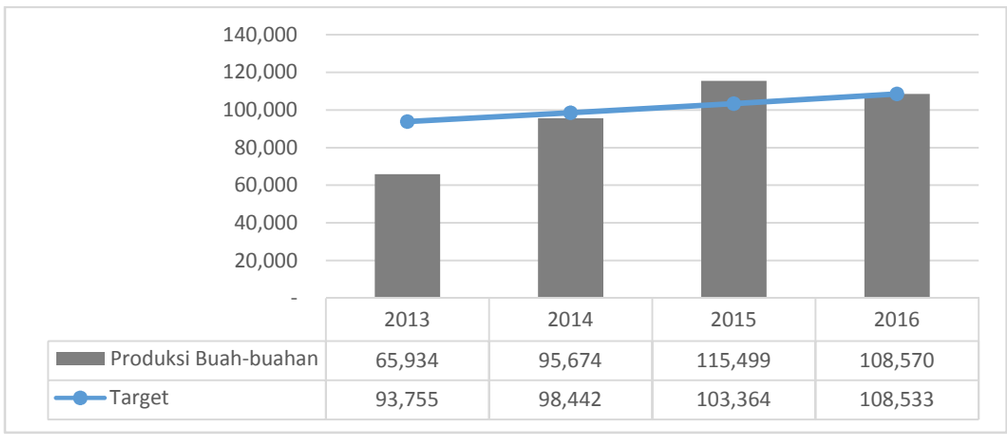

	2013	2014	2015	2016
Produksi Buah-buahan	65,934	95,674	115,499	108,570
Target	93,755	98,442	103,364	108,533

Sumber data : Distanak Kabupaten Buleleng

Pencapaian indikator kinerja sasaran jumlah produksi sayur-sayuran mencapai 22.954 ton atau 263,68 % dari target. Pencapaian indikator tersebut diperoleh dengan mengalikan luas panen dengan produktivitas. Faktor yang mempengaruhi pencapaian target ini adalah kenaikan produksi di beberapa komoditas sayuran seperta cabai rawit merah, cabai besar dan wortel. Peningkatan ini disamping karena bertambahnya luas tanam juga disebabkan penerapan SL GAP oleh petani serta dampak stabilnya harga cabai merah di pasaran.

Gambar 18
Grafik Capaian Produksi Sayur-sayuran

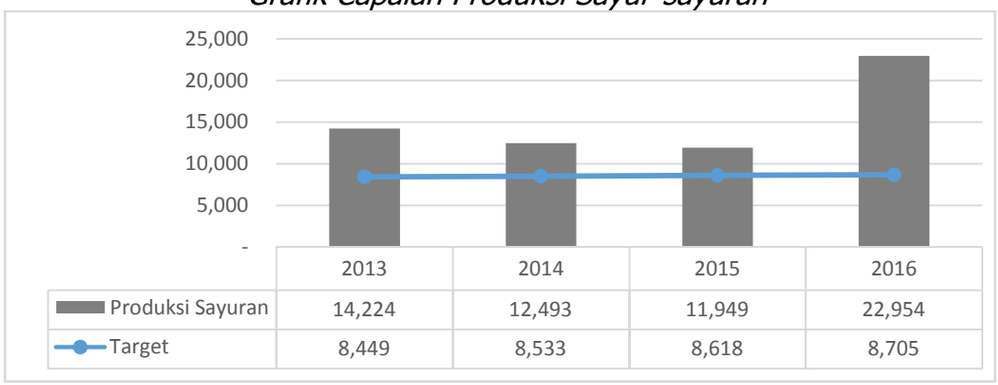

	2013	2014	2015	2016
Produksi Sayuran	14,224	12,493	11,949	22,954
Target	8,449	8,533	8,618	8,705

Sumber data : Distanak Kabupaten Buleleng

Pencapaian indikator kinerja sasaran jumlah populasi ternak diantaranya

sapi potong, ayam buras, babi, kambing, ayam ras, itik dan kerbau rata-rata tidak mencapai target. Tidak tercapainya indikator kinerja sasaran jumlah populasi ternak disebabkan beberapa hal diantaranya adalah adanya pemutahiran data Sensus Pertanian dan program PSPK yang mendata keseluruhan pemilik sapi potong dan kerbau sampai ketingkat rumah tangga sehingga terjadi perubahan data karena perhitungan estimasi yang biasa digunakan diperbaiki, selain itu harga ternak sapi di pasar yang cukup tinggi sehingga peternak cenderung menjual ternaknya, gairah peternak untuk membudidayakan ternak menurun karena harga pakan yang berkualitas harganya mahal, SDM generasi muda yang enggan melanjutkan budidaya peternakan dan mereka lebih memilih menjadi pekerja disektor industri ataupun lainnya, sehingga dengan kondisi ini maka laju pertumbuhan peternakan terhambat serta penerapan teknologi pada sektor ini menurun.

Pencapaian indikator kinerja sasaran jumlah produksi daging mencapai 11.173,15 ton atau 103,60 % dari target. Perhitungan produksi daging merupakan penjumlahan produksi daging sapi potong, ayam buras, babi, kambing, ayam ras, itik dan kerbau. Perhitungan produksi daging ternak besar dan kecil, dihitung dengan mengkalikan jumlah ternak yang dipotong dengan karkas. Karkas adalah bagian dari hewan ternak setelah disembelih dan dikurangi kepala, kaki, kulit, tulang, jeroan dan semua bagian yang tidak lazim dimakan. Tercapainya target disebabkan meningkatnya kebutuhan daging ayam ras, hal ini disebabkan oleh adanya kecenderungan peningkatan konsumsi daging ayam sebagai alternatif pilihan akibat terjadinya peningkatan harga daging sapi dan babi.

Pencapaian indikator kinerja sasaran jumlah produksi telur mencapai 1.180,50 ton atau 77,99 % dari target. Perhitungan produksi telur diperoleh dari penjumlahan telur ayam buras, ayam ras petelur dan telur itik. Tidak tercapainya target yang telah ditentukan disebabkan peternak ayam buras maupun ayam ras petelur serta peternak itik memelihara dalam jumlah yang kecil dan belum skala usaha.

Untuk penyelenggaraan Urusan Pertanian oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016 dialokasikan belanja Langsung sebesar Rp. 13.413.396.819 dan terealisasi sebesar Rp. 12.918.162.278 atau 96,31 persen, yang terdiri atas : Belanja Pegawai dengan anggaran Rp. 462.075.000 dan terealisasi Rp. 451.070.000, atau 97,61 persen, Belanja Barang dan jasa dengan anggaran Rp. 11.274.639.955,57 dan terealisasi Rp. 10.956.129.278 atau mencapai 97,17 persen, Belanja Modal dengan anggaran Rp. 1.676.681.863 dan terealisasi

Rp. 1.510.963.000 atau 90,11 persen.

Pembangunan di Bidang Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng, didukung dengan personil Tahun 2016 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 153
Kondisi Kepegawaian Pelaksana Urusan Pertanian

No	Uraian	Jumlah
1.	**Jumlah Pegawai**	
a.	PNS	158 orang
b.	- Pegawai Harian - Kontrak Daerah - Kontrak Pusat	1 orang 45 orang 53 orang
2.	**Pangkat dan Golongan**	
	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 orang
	Pembina Tk.I (IV/b)	5 orang
	Pembina	16 orang
	Penata Tk. I	38 orang
	Penata	36 orang
	Penata Muda Tk.I	25 orang
	Penata Muda	14 orang
	Pengatur Tk.I	3 orang
	Pengatur	8 orang
	Pengatur Muda Tk.I	10 orang
	Juru Tk.I	1 orang
	Juru	1 orang
3.	**Tingkat Pendidikan**	
	S2	7 orang
	SI/D4	83 orang
	D3	9 orang
	D1	7 orang
	SMA/SMK/MTs	48 orang
	SMP/MI	4 orang
4.	**Jumlah Pejabat**	
	Pejabat Setruktural :	
	Eselon IIb	1 orang
	Eselon IIIa	1 orang
	Eselon IIIb	5 orang
	Eselon Iva	16 orang
	Pejabat Fungsional	
	1. Fungsional Umum	56 orang
	2. Fungsional Arsiparis	1 orang
	3. Fungsional medik Veteriner	1 orang
	4. Fungsional POPT	9 orang
	5. Fungsional PPL	68 orang

Sumber data : Distanak Kabupaten Buleleng, 2016

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Selanjutnya

melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2016. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD. DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkannya menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Permasalahan yang dihadapi serta solusi untuk mengatasinya dalam pembangunan Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Buleleng antara lain :

a) Masih adanya gangguan penyakit baik pada tanaman pangan. Pengalaman menunjukkan bahwa tahun-tahun terakhir ini kondisi iklim sulit diprediksi. Anomali iklim (beberapa kebanjiran/kekeringan) sulit diramalkan dengan tepat (baik kapan terjadi maupun intensitasnya). Gangguan anomali iklim erat kaitannya dengan perkembangan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan penyakit ternak yang sampai saat ini belum dapat dikendalikan secara tuntas, diatasi dengan cara Mengadakan penyikapan, pengamatan, pengawasan, pencegahan, pengendalian dan pengobatan serta pemberantasan penyakit pada tanaman.
b) Skala usaha tani kecil dan produksinya berfluktuasi. Luas pemilikan lahan rata-rata relatif kecil (lebih kurang 0,30 Ha), akan mengakibatkan pengelolaan usaha tani tidak efisien dan akan berdampak pada produksi/produktivitas. Disamping itu dengan sifat produksi pertanian yang bersifat musiman akan mempengaruhi fluktuasi harga, diatasi dengan cara Optimalisasi dan intensifikasi pengelolaan lahan, Meningkatkan efisiensi usaha pasca panen, pengolahan hasil dan mengembangakan produksi sesuai potensi pasar.
c) Penerapan teknologi di tingkat petani belum optimal. Teknologi yang ada belum diaplikasikan secara optimal oleh petani, yang berdampak belum tercapainya tingkat produktivitas hasil sesuai dengan potensi yang ada. Beberapa faktor yang diperkirakan menghambat penerapan teknologi oleh petani adalah karena keterbatasan petani seperti permodalan, aksesibilitas terhadap sumber informasi keterampilan petani dan insentif harga yang diterima, diatasi dengan caraBerkoordinasi dengan sumber-sumber inovasi teknologi, meningkatkan penyuluhan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan kepada kelompok tani.
d) Terbatasnya sarana / prasarana. Dalam upaya penyediaan sarana

produksi terutama benih dan bibit bermutu belum handal dan belum memiliki prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, mutu, waktu, jumlah, tempat, dan harga. Demikian pula halnya dengan Alsin (alat dan mesin) pertanian relatif masih terbatas, diatasi dengan cara Pengembangan bantuan sarana dan prasarana pertanian (alsintan, cubang, embung, perbaikan jaringan irigasi ditingkat petani.

e) Pangsa pasar ekspor produksi pertanian masih kecil, sementara produksi yang dimiliki cukup besar, diatasi dengan cara Memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kemitraan usaha pada bidang pemasaran hasil pertanian dan Meningkatkan pelayanan informasi pasar dan promosi hasil-hasil pertanian.

Penghargaan yang diterima dalam penyelenggaraan Urusan Pertanian adalah sebagai berikut:

1) Tahun 2013 :
   - Juara III Tk. Provinsi Bali Lomba Ayam Buras olehKelompok Tani Ternak Pekarangan Desa MadenanKecamatan Tejakula.
   - Juara II Tk. Provinsi Bali Lomba Adhi Karya PanganNusantara olek KWT Sari TanjungMekar Desa CempagaKecamatan Banjar.
   - Juara I Petugas Penyuluh Pertanian PNS berprestasi Tingkat. Nasional Tahun 2013 atas namaIr. Nyoman Suarda (PPL Wilbin Cempaga Kec.Banjar).
2) Tahun 2014 :
   - Tingkat Nasional Petugas Penyuluh Pertanian Teladan a.n Made Sumetriani, SP, MSi, PPL Wilbin Pancasari Kecamatan Sukasada
   - Tingkat Nasional Balai Penyuluh Pertanian Berprestasi (Bpp Kubutambahan)
   - Juara I Tingkat Provinsi KTT Kambing Berpestasi Kelompok Tani Ternak Sumber Rejeki, Desa Sepang Kecamatan Busungbiu
   - Juara II Tingkat Provinsi Bali Adhi Karya Pangan Nusantara KWT Sari
   - Amertha Giri Desa Wanagiri Kecamatan Sukasada
   - Juara I Tingkat Provinsi Bali Lomba Cipta Menu Kelompok Wanita Tani
   - (KWT) Rukun Tani Desa Banyupoh Kecamatan Gerokgak
   - Tingkat Nasional Kelompok Tani Berprestasi; Evaluasi Penerapan.
   - Teknologi Padi Peringkat V Tk Nasional: Subak Tebu Merta Desa

Ringdikit Kecamatan Seririt.

- Tingkat Nasional Kelompok Tani Berprestasi; Evaluasi Kinerja Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Peringkat III Tk Nasional: Subak Gede Gerokgak Desa Gerokgak Kecamatan Gerokgak.
- Tingkat Nasional Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Berprestasi Tingkat Nasional a.n Putu Naya, SP , Petugas POPT Kecamatan Buleleng.

3) Tahun 2015 :
   - Juara I Tingkat Provinsi Bali; Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPTT) Padi Tahun 2015; Subak Umedesa, Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt
   - Juara I Tingkat Provinsi Bali; Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPTT) Jagung Tahun 2015; Subak Penyaringan Desa Kalianget Kecamatan Seririt
   - Wakil Provinsi Bali ke Tingkat Nasional; Balai Penyuluh Pertanian (BPP)
   - Berprestasi; BPP Gerokgak
   - Juara I Tingkat Provinsi Bali; Kelompok Tani Ternak Sapi; Kelompok Tani Ternak Kertiwinangun Desa Bukti Kecamatan Kubutambahan
   - Juara I Tingkat Provinsi Bali; Kelompok Tani Ternak Kambing; Kelompok Tani Ternak Palasari Desa Gesing Kecamatan Kubutambahan.
   - Juara II Tingkat Provinsi Bali; Kelompok Tani Ternak Ayam Buras Kelompok Tani Ternak Lemba Watiti Desa Ularan Kecamatan Seririt.
   - Juara III Tingkat Provinsi Bali; Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan); Gapoktan Sari Mekar Desa Bubunan Kecamatan Seririt).
   - Penghargaan Silpakara Nugraha Provinsi Bali; Kreativitas dan Inovasi Teknologi Pembangunan Ketahanan Pangan dan Agroindustri; Wayan Karta Desa Bulian Kecamatan Kubutambahan
   - Juara III Provinsi Bali Penyuluh Pertanian Teladan; Ida Ayu Putu Mahaindri (Kecamatan Buleleng).

4) Tahun 2016 :
   - Juara I Tingkat Provinsi Bali; Komoditas Kambing; Kelompok Tani Ternak Bina Artha Desa Bengkel Kecamatan Busungbiu
   - Juara II Tingkat Provinsi Bali; Komoditas Kambing; Kelompok Tani Ternak Giri Arsa Dana Desa Wanagiri Kecamatan Sukasada

- Juara II Tingkat Provinsi Bali; Komoditas Ayam Buras; Kelompok Tani Ternak Karya Busana Desa Madenan Kecamatan Tejakula
- Juara II Tingkat Provinsi Bali; Komoditas Sapi; Kelompok Tani Ternak Artha Sadhaya Desa Ambengan Kecamatan Sukasada
- Penyuluh Pertanian Penyuluh Pertanian PNS Teladan Tingkat Nasional; Emy. Alberthina Rumtily, BPP Seririt.

Tabel
Capaian Indikator Kinerja RPJMD Urusan Pertanian
Tahun 2012-2017

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indika tor Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Targetdan Realisasi Setiap Tahun										Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2013		2014		2015		2016		2017		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2.2.1.	**Pertanian**												
2.2.1.1.	Peningkatan produtivitas padi rata-rata 0,25% per tahun (Kw/Ha)	55,84	55.98	59.8	56,12	60.11	56,26	60,66	56,40	59,77	56,54		56,54
2.2.1.2.	Peningkatan produksi palawija rata- rata 2% per tahun (Ton/Tahun)	38.524	39.294	32.233	40.080	35.955	40.882	50.895	41.700	51.966	42.534		42.534
2.2.1.3.	Peningkatan produksi buah- buahan 5% per tahun (Kw/Ha)	89.290	93.755	65.934	98.442	95.674	103.364	115.499	108.533	108.570	113.959		113.959
2.2.1.4.	Peningkatan produksisayur- sayuran 1% per tahun (Ton/Tahun)	8.365	8.449	14.224	8.533	12.493	8.618	11.949	8.705	22.954	8.792		8.880
2.2.1.5.	Meningkatnya Populasi ternak (ekor)												
	Sapi potong 5% per tahun	136.189	137.551	120.127	138.926	121.126	140.316	119.272	141.719	125.408	143.136		143.136
	Ayam buras 5% per tahun	829.588	871.067	768.450	914.621	777.785	960.352	759.362	1.008.369	834.479	1.058.788		1.058.788
	Babi 3% per tahun	222.454	229.128	207.689	236.001	199.885	243.081	184.542	250.374	186.573	257.885		257.885
	Kambing 1% per tahun	33.004	33.334	31.514	33.667	28.864	34.004	27.910	34.344	28.276	34.688		34.688
	Ayam ras 1% per tahun	255.458	258.013	227.958	260.593	257.828	263.199	228.568	265.831	308.489	268.489		268.489
2.2.1.6.	Meningkatnya produksi daging 2%per tahun (ton)	9.963,31	10.162,58	6.442	10.365,83	3.569,33	10.573,14	8.691	10.784,61	11.173	11.000,30		11.000,30
2.2.1.7.	Meningkatnya produksi telur 3% per tahun	1.344,90	1.385,25	1.047	1.426,80	1.091,78	1.469,61	1.091,78	1.513,70	1.180,50	1.559,11		1.559,11

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan

Perkebunan

Produksi Perkebunan Rakyat di Kabupaten Buleleng secara umum meliputi: Kelapa Dalam, Kelapa Hybrida, Kopi Robusta, Kopi Arabika, Cengkeh, Jambu Mete, Panili, Kapok, Kakao, Tembakau Virginia, Lada, Lontar/Siwalan, Aren/Enau, Kunir dan lain-lain.

Total produksi perkebunan rakyat pada tahun 2013 sebesar 19.871,93 ton mengalami kenaikan 9.410,85 ton atau 32.14 % menjadi 29.282,78 ton pada tahun 2016, dengan kenaikan rata-rata sebesar 8.04 %. Namun terjadi penurunan luas areal perkebunan dari 34.900 Ha pada tahun 2013 menurun 624,82 Ha atau 1.79% menjadi 34.275,18 Ha pada tahun 2016, dengan penurunan rata-rata sebesar 0.45%. Walaupun terjadi kenaikan produksi perkebunan, namun Pemerintah Kabupaten Buleleng selalu mencari alternatif – alternatif lain dalam upaya untuk peningkatan kualitas hasil komoditas seperti melaksanakan pengolahan basah pada komoditas kopi, sehingga secara ekonomis dapat menggambarkan tercapainya tujuan pengembangan agribisnis perkebunan, juga memberikan dampak peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani perkebunan rakyat.

Terjadinya fluktuasi kenaikan penurunan produksi ini dipengaruhi oleh adanya sikulus panen raya pada komoditas tanaman perkebunan serta pengaruh iklim yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman perkebunan. Penurunan luas areal dari tahun 2013 s/d 2016 terjadi pada komoditi panili, kapas, jambu mete, lada, kelapa genjah dan kunir. Khusus untuk komoditas unggulan, luas areal pada tahun 2016 ditunjukkan pada grafik berikut:

Gambar 19
Luas Areal Komoditas Unggulan Tahun 2016

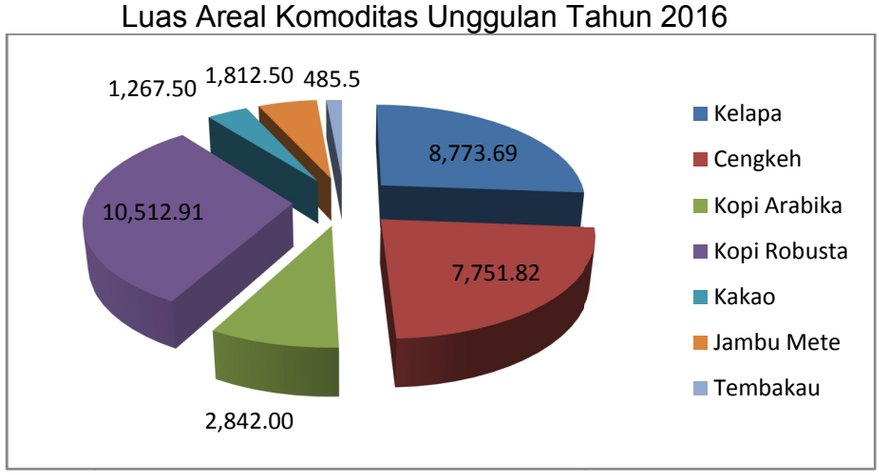

Sumber data ; Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Buleleng

Komoditi primadona (unggulan) Kabupaten Buleleng yaitu kopi robusta terus diupayakan untuk dioptimalkan kualitasnya Produksi komoditas ini mengalami kenaikan sebesar 2.941,72 Ton, atau sekitar 31,11%, namun luas areal tanamnya mengalami penurunan 0,58%. Budidaya perkebunan kopi robusta di wilayah Kabupaten Buleleng berada di 7 (tujuh) Kecamatan yaitu Kecamatan Tejakula, Kubutambahan, Sawan, Sukasada, Banjar, Seririt, dan Busungbiu. Diantara 7 kecamatan tersebut terdapat 4 (empat) kecamatan yang merupakan sentra pengembangan kopi robusta yaitu Kecamatan Busungbiu dengan luas areal 5.078 Ha, Kecamatan Sawan dengan luas areal 1.126 Ha, Kecamatan Sukasada dengan luas areal 1.743 Ha, dan Kecamatan Banjar dengan luas areal 1.715 Ha. Dari data tersebut Kecamatan Busungbiu paling luas komoditas kopi robustanya. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhanatau tempat tumbuh yang paling ideal untuk perkembangan kopi robusta pada ketinggian 400 – 650 dpl. Luas areal tanaman kopi robusta di 7 (tujuh) kecamatan adalah 10.512.91 Ha dan Kecamatan Busungbiu merupakan 48,30 % dari seluruh luas areal perkebunan kopi robusta yang ada di Kabupaten Buleleng. Produksi yang disumbangkan oleh Kecamatan Busungbiu pada tahun 2016 sebanyak 5.880.83 ton atau sebesar 62.20 % dari total produksi Kopi Robusta Kabupaten Buleleng pada tahun yang sama.

Hasil produksi kopi robusta secara berturut-turut disumbangkan oleh Kecamatan Tejakula 134.29 ton, Kecamatan Kubutambahan 299.14 ton, Kecamatan Sawan 1.507 ton, Kecamatan Sukasada 863.83 ton, Kecamatan Banjar 730.45 ton, dan Kecamatan Seririt 39.08 ton. Berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka meningkatkan produktivitas komoditas unggulan ini antara lain:

- Pengadaan sarana dan prasarana pengolahan kopi secara basah;
- Intensifikasi tanaman kopi robusta;
- Usaha pengembangan agribisnis kopi robusta;
- Magang dan temu wisata

Untuk meningkatkan kualitas, pengetahuan dan keahlian petani kopi robusta, telah dilakukan pelatihan petani perkebunan pada sentra tanaman kopi, demonstrasi pengendalian hama dan penyakit kopi serta diadakan bimbingan dan penyuluhan budidaya tanaman kopi.

Rencana penganggaran pembiayaan urusan perkebunan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Buleleng 2012-2017 dianggarkan sebesar Rp.15.909.656.000,- untuk membiayai 3 program, sampai dengan tahun

2016 untuk pembiayaan pelaksanaan program perkebunan sudah direalisasikan sebesar Rp. 14.005.043.409,-. Program kegiatan urusan perkebunan tersebut adalah :

1) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, untuk mencapai tujuan dari program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan yaitu Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Regional/Internasional Penyediaan Hasil Produksi dan Kegiiatan Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah. indikator kinerja program ini adalah terfasilitasinya kemitraan kelembagaan petani dengan pelaku usaha dengan target kondisi akhir RPJMD adalah temu mitra sebanyak 40 kali dan 10 kali promosi produk perkebunan unggulan lokal. Untuk Pembiayaan program ini selama 5 tahun direncanakan dianggarkan sebesar Rp. 1.037.867.000,- dan sampai dengan tahun 2016 sudah direalisasikan sebesar Rp. 709.412.000,-
2) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna, untuk mencapai tujuan dari program dilaksanakan melalui 3 kegiatan yaitu Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Tepat Guna, Kegiatan Pengadaan Sarna dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna dan Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna. Indikator keberhasilan dari program sampai dengan akhir masa RPJMD adalah meningkatnya pemanfaatan teknologi pertanian seluas 503,25 Ha dengan rencana anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 9.676.584.000,00 Sampai dengan tahun 2016 target fisik yang sudah dicapai adalah pemanfaatan teknologi pertanian seluas 3.624,5 Ha dengan anggaran yang sudah direalisasikan sebesar Rp.10.610.181.960,00.
3) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, untuk mencapai tujuan program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan yaitu Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan dan Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan dengan indikator keberhasilan meningkatnya produksi komoditi perkebunan, target fisik yang ingin dicapai pada akhir masa berakhirnya RPJMD adalah produksi 7 komoditas perkebunan unggulan (Cengkeh, Kopi Arabika, Kopi Robusta, Kakao, Kelapa, Tembakau dan Jambu Mete) sebanyak 19.693,32 Ton, dengan rencana anggaran pembiayaan selama 5 tahun sebesar Rp.5.195.205.000,-. Sampai dengan tahun 2016, anggaran yang sudah direalisasikan untuk pembiayaan program ini

sebesar Rp. 3.165.162.409,- dan realiasasi fisik yang sudah dicapai adalah produksi 7 komoditas perkebunan unggulan sebesar 29.004,63 Ton.

Secara umum pelaksanaan urusan perkebunan melalui 3 program tersebut diatas sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Buleleng tahun 2012-2017. ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng, dimana mulai tahun anggaran 2017 pelaksanaan urusan perkebunan akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng.

Tabel 155
Anggaran dan Realisasi Urusan Pertanian
(Sub Sektor Perkebunan) Tahun 2013-2016

No	Program	2013		2014		2015		2016	
		Target RPJMD	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
1	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	170.000.000	148.788.000	187.000.000	242.924.000	215.700.000	155.000.000	225.270.0000	162.700.000
2	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna	1.585.000.000	2.256.508.229	1.743.500.000	2.525.001.027	1.917.850.000	3.707.711.237	2.109.635.000	2.120.961.467
3	Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkeb unan	850.961.000	1.004.678.000	936.058.000	849.168.000	1.029.663.000	499.854.720	1.132.630.000	811.461.680

Sumber data ; Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Buleleng

Tabel Perkembangan target fisik dan capaian fisik masing - masing program tahun 2013 s/d 2016 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 156
Realisasi Fisik Urusan Pertanian
(Sub Sektor Perkebunan) Tahun 2013-2016

	Program	Indikator Kinerja	Satuan	2013		2014		2015		2016	
				Target RPJMD	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
1	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Per kebunan	Terfasilitasinya kemitraan kelembagaan petani dengan pelaku usaha	Temu mitra / promosi	8 temu mitra 2 promosi	10 temu mitra 2 promosi	8 temu mitra 2 promosi	10 temu mitra 2 promosi	8 temu mitra 2 promosi	10 temu mitra 2 promosi	8 temu mitra 2 promosi	2 temu mitra 2 promosi
2	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Per kebunan Tepat Guna	Meningkatnya pemanfaatan teknologi pertanian	Ha	82.5	985	90.75	1.053	100	608.5	110	978
3	Peningkatan Produksi Pertanian/Per kebunan	Meningkatnya produksi komoditi perkebunan	Ton	13.450,8	19.302,8	14.795,9	25.287,30	16.275,47	29.004,6	17.903	29.004,6

Sumber data ; Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Buleleng

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang ditemui dalam proses penyelenggaraan urusan perkebunan antara lain :

a) Adanya alih fungsi lahan dari lahan perkebunan menjadi lahan tanaman semusim yang masih cukup tinggi
b) Rendahnya produktivitas dan kualitas hasil perkebunan.
c) Masih adanya serangan hama penyakit tanaman(HPT) pada komoditas tanaman perkebunan.

Kualitas sumberdaya petani di Kabupaten Buleleng masih rendah Langkah-langkah yang sudah diambil untuk mengantisipasi permasalahan tersebut diatas adalah :

1) Mengadakan pameran dan promosi terhadap produk unggulan local Kabupaten Buleleng.
2) Mengadakan pelatihan pengolahan hasil serta penyediaan sarana dan prasarana pengolhan hasil perkebunan.
3) Penerapan teknologi pertanian tepat guna untuk meningkatkan kualitas hasil perkebunan.
4) Intensifikasi dan diversikasi komoditas perkebunan untuk menekan terjadinta laih fungsi lahan.
5) Pengendalian hama penyakit penyakit tanaman dengan memberikan bantuan cara mengendalikan hama penyakit melalui Sekolah Lapang pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) serta bantuan pengadaan obat-obatan.
6) Penyediaan bibit unggul tanaman perkebunan yang berkualitas serta penyediaan sarana dan prasarana produksi perkebunan.
7) Peningkatan sumber daya manusia petani melalui penyuluhan, pelatihan, sekolah lapang maupun anjangkarya/studibanding ke daerah yang dianggap lebih berhasil dalam pengelolaan komoditas perkebunan.

4. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan urusan strategis yang menyangkut eksplorasi dan pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Mineral yang diarahkan kepada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan dan mengindahkan prinsip-prinsip pengelolaan yang berwawasan lingkungan secara berkesinambungan.

Atas dasar kondisi tersebut tujuan dan sasaran penyelenggaraan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral adalah meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan sasaran penyelenggaraan urusan adalah terwujudnya pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan ketenagalistrikan.

Untuk mencapai target sasaran urusan energidan sumber daya mineral, program dan kegiatan pokok yang dilaksanakan pada tahun 2012-2017 adalah :

1. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan.
2. Program ini melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan galian batuan dan air tanah.
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Program ini terdiri dari beberapa kegiatan yang meliputi : pemasangan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum (LPJU), pembangunan energi terbarukan.

Pelaksaan program/kegiatan pada urusan ini ditujukan: (1) sebagai bagian dari identifikasi dan pengawasan terhadap tambang galian batuan di Kabupaten Buleleng, dan (2) sebagai upaya merencanakan sumber energi alternatif yang tidak bergantung dengan jumlah daya dukung seperti sumber energi yang bersumber dari bahan fosil serta pemasangan/pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum sebagai pelayanan terhadap kepentingan umum dalam upaya menciptakan rasa aman bagi pengendara kendaraan maupun pejalan kaki. Adapun hasil realisasi anggaran Program Penanganan Infrastruktur Bidang Pertambangan dan ESDM Tahun 2013-2016 dan alokasi Anggaran Tahun 2017 dijabarkan pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 161
Anggaran dan Realisasi Urusan ESDM Tahun 2013-2017

Program	Kegiatan	Realisasi APBD (Rp. Ribu)				Alokasi APBD 2017
		20	20	2015	201	
Pembina an dan Pengawa san Bidang Pertamba ngan	Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan galian batuan dan air tanah	41.912,70	200.505,35	83.049.350,00	0	0
Pembina an dan pengemb angan bidang ketenaga listrikan	Pemasangan dan pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	12.087.371,709	15.052.805,822	18.223.813,622	17.125.525,808	0
	Pembangunan Energi Terbarukan	0	2.483.631,950	3.612.791,145	4.173.038,25	0
Penyelen ggaraan Penerang an Jalan Umum	Rehabilitasi / Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	0	0	0	0	12.958.726,80
	Penyediaan Sarana Penerangan Jalan Umum	0	0	0	0	16.742.286,20
	Monitoring Evaluasi Pelaporan	0	0	0	0	73.990,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi urusan Pemerintah Provinsi sehingga Dinas Pekerjaan Umum sejak Tahun Anggaran 2016 tidak dapat melaksanakan kegiatan Pembangunan Energi Terbarukan. Salah Satu sumber energi yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng adalah Energi Listrik yaitu Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), yang bertujuan memberikan penerangan pada ruas-ruas jalan Nasional, Propinsi dan Kabupaten pada malam hari, guna memperlancar arus lalu lintas kendaraan maupun pejalan kaki sehingga dapat menekan tingkat kecelakaan dan kriminalitas serta dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Kebijakan yang telah dilakukan pemerintah daerah adalah dengan memasang lampu penerangan jalan umum, melakukan pemeliharaan dan memasang jaringan dengan meterisasi.

Adapun pemasangan dan pemeliharaan LPJU pada 9 kecamatan sampai dengan akhir tahun 2016 adalah sebanyak 12.013 titik. Sedangkan sampai dengan akhir tahun 2015 adalah sebanyak 12.089 titik. Sedangkan pelayanan LPJU sampai dengan akhir tahun 2016 adalah sebanyak 12.240 titik. Luas areal pertambangan di Kabupaten Buleleng khususnya Bahan Galian Batuan sesuai dengan data informasi pertambangan Dinas PU Propinsi tahun 2007, diperoleh data sebaran dan potensi bahan galian batuan seluas 4.606 Ha,

dengan cadangan tereka 497.675.000 tersebar di 9 Kecamatan. Potensi tersebut masih merupakan indikasi tereka dan masih perlu ditindaklanjuti dengan melakukan pemetaan terukur untuk mengetahui jenis dan potensinya secara pasti. Data terukur potensi bahan galian batuan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa di Dusun Abasan Desa Sangsit Kecamatan Sawan mempunyai potensi Jenis Galian Batu abu Taro/ Paras dengan Volume cadangan 539.708,20 M 3 seluas ± 4.500 Ha dan Dusun Dajan Rurung Desa Banjarasem Kecamatan Seririt terdapat Tanah urug dengan volume cadangan 174.911.,80 M3 ,Breksit dengan volume cadangan 149.924,40 M3, Batu Andesit dengan volume cadangan 3.508.094,60 M 3, dengan Luas areal ± 8.62 Ha. Selanjutnya di Dusun Alas Sari Desa Pacung Kecamatan Tejakula terdapat potensi Batu Kali seluas 59,50 Ha, Batu Kerikil seluas 8 Ha, Batu Pilah seluas 30,30 Ha, Batu Merah seluas 5,63 Ha dan Sirtu seluas 5 Ha.

Jumlah kegiatan usaha pertambangan bahan galian batuan yang sudah berijin sampai dengan akhir tahun 2015 adalah 15 penambang. Dan diprediksi akan terus bertambah pada tahun 2016 menjadi 18 penambang. Sedangkan untuk pemanfaatan air tanah sampai dengan tahun 2015, jumlah pemakai air tanah yang sudah dibina adalah 407 pengusaha dan sudah memiliki ijin sebanyak 379 pengusaha, sedangkan sampai akhir tahun 2015 diprediksi menjadi 420 pengusaha yang sudah berijin dan memenuhi kewajibannya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk menghitung luas areal dan volume bahan tambang Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Buleleng, perlu dilakukan inventarisasi dan pemetaan geologi sehingga dapat diketahui potensinya secara pasti dan terukur. Lokasi bahan galian batuan di Kabupaten Buleleng yang telah dilakukan pemetaan potensinya secara terukur adalah Kecamatan Gerokgak, Tejakula, Seririt, Sukasada dan Kubutambahan, seluas 4.606 Ha dari luasan tereka dengan potensi cadangan sebesar 497.675.000 m3. Data tersebut masih merupakan prediksi dan masih perlu ditindaklanjuti dengan melakukan pemetaan terukur untuk mengetahui potensinya secara pasti.

Pembangunan di bidang energi dan SDM dilaksanakan oleh Dinas PU Kabupaten Buleleng, dengan jumlah personil yang mendukung pelaksanaan kegiatan berjumlah 18 orang ; 10 PNS dan 8 orang Pegawai Kontrak. Pangkat dan Golongan PNS yang ada yakni ; Pembina Utama Muda (IV/c) ; 1 orang, Pembina (IV/a) ; 2 orang, Penata ; 2 orang, Penata Muda ; 1 orang, Pengatur ; 2 orang dan Pengatur Muda Tk.I ; 2 Orang. Kualifikasi pendidikan yang dimiliki adalah Sarjana (S1) ; 5 orang, D3 ; 1 orang dan SMA/SMK ;4 orang.

Terdapat 3 pejabat struktural dalam susunan organisasi yakni Pejabat eselon IIIb ; 1 pejabat dan eselon IVa ; 2 pejabat.

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2015. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD.DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkannya menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Permasalahan yang dihadapi Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral secara umum adalah hingga tahun 2015 pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan terkendala luasnya wilayah penambangan di Kabupaten Buleleng dibandingkan dengan kemampuan SDM dari petugas di lapangan tidak seimbang sehingga pengawasan yang telah dilaksanakan belum optimal bisa dilaksanakan. Sedangkan permasalahan pada urusan Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum adalah semakin banyaknya pemasangan lampu penerangan jalan umum yang bersumber dari dana swadaya masyarakat maupun pemasangan secara liar (tanpa berkoordinasi dengan Dinas PU) sehingga tagihan rekening listrik penerangan jalan umum yang dibankan pada anggaran Dinas Pekerjaan Umum menjadi sangat besar.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan melaksanakan pemasangan meterisasi di tiap-tiap titik Lampu Penerangan Jalan Umum sehingga tarif yang dibayar tidak dengan perhitungan rata-rata namun sesuai dengan pemakaian, hal ini terbukti efektif menekan biaya tagihan rekening listrik penerangan jalan umum.

5. URUSAN PARIWISATA

Dengan melihat kondisi geografis dan topografi wilayah Kabupaten Buleleng yang Nyegara Gunung yang terdiri dari lembah dan perbukitan dengan persawahan yang berpetak-petak akan memunculkan banyak air terjun dan memberikan panorama alam yang indah dan mempesona. Kondisi Nyegara Gunung ini juga menimbulkan perpaduan hawa laut dan hawa gunung yang sangat cocok dalam mendukung agroklimat tanaman buah-buahan di Bali. Buleleng dengan panjang pantai 157,05 km menyimpan banyak potensi di bidang kelautan khususnya terumbu karang dengan pantai yang berpasir hitam maupun berpasir putih (di kawasan Taman Nasional Bali Barat). Hal ini merupakan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi obyek wisata khususnya agrowisata dan ekowisata. Pertumbuhan kepariwisataan diharapkan dapat menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Buleleng.

Pembangunan pariwisata Kabupaten Buleleng selama kurun waktu 2012-2017 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar wisata, meningkatkan kualitas dan kuantitas produk wisata, sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kunjungan wisata. Untuk mencapai tujuan tersebut kebijakan yang ditempuh adalah dengan meningkatkan kualitas SDM kepariwisataan, meningkatkan kualitas dan kuantitas obyek dan daya tarik wisata, dan meningkatkan promosi kepariwisataan.

Salah satu indikator yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan penyelengaraan urusan pariwisata adalah jumlah kunjungan wisata. Adapun tingkat kunjungan wisatawan dalam kurun waktu 2012 – 2016 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 162
Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2016

No.	Tahun	Wisatawan		
		Nusantara	Mancanegara	Jumlah
1.	2012	268.794	266.053	534.847
2.	2013	349.981	288.166	638147
3.	2014	372.814	291.012	663.826
4.	2015	402.639	300.305	702.944
5.	2016	504.145	301.313	805.458

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Buleleng

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat terlihat bahwa jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Buleleng mengalami trend peningkatan setiap tahunnya, yang secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dan keamanan regional, nasional, maupun internasional. Peningkatan tersebut dikarenakan wisatawan yang berkunjung baik itu wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara mengapresiasi potensi yang dimiliki daya tarik wisata di Kabupaten Buleleng, baik wisata kultural, wisata natural, maupun wisata buatan.Atraksi, Akomodasi, Kenyamanan danKebersihan daya tarik wisata memegang peranan penting dalam peningkatan kunjungan wisatawan, juga tidak terlepas penataan Daya Tarik Wisata (DTW) secara bertahap dan promosi yang dilakukan, baik melalui media elektonik, cetak maupun keikutsertaan dalam event-event promosi dalam dan luar negeri. Berikut analisa kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Buleleng dalam kurun waktu 5 Tahun ke Kabupaten Buleleng berdasarkan peringkat 5 besar.

Tabel 163
Perkembangan Lima Besar Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kabupaten Buleleng selama 5 Tahun dari Tahun 2012-2016

No	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
	Negara	Jml	Negara	Jml	Negara	Jml	Negara	Jml	Negara	Jml
1	Belanda	57.824	Belanda	19.540	Belanda	95.254	Belanda	51.683	Belanda	51.683
2	Perancis	47.772	Perancis	17.340	Perancis	47.126	Perancis	38.894	Perancis	38.894
3	Jerman	35.276	Jerman	15.770	Jerman	34.536	Jerman	35.753	Jerman	35.753
4	Australia	14.688	Australia	11.230	Australia	12.187	Australia	14.638	Australia	14.638
5	Dermark	9.672	Dermark	9.340	Malasya	7.480	Rusia	6.638	Rusia	6.638

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Buleleng

Pemerintah Kabupaten Buleleng senantiasa melakukan upaya-upaya mewujudkan DTW yang representatif, unik, dan layak jual, salah satunya adalah melalui upaya penataan DTW. Pelaksanaan kegiatan penataan daya tarik wisata selama periode 2012 – 2016 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 164
Pelaksanaan kegiatan penataan daya tarik wisata
Tahun 2012-2016

No	Nama Desa dan Daya Tarik Wisata	T				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Desa Munduk					
	- Penataan jalan setapak dan pembuatan candi bentar di Air Terjun Melanting.	√				
	- Pemeliharaan 1 unit kamar mandi/WC di Daya Tarik Wisata Danau Tamblingan		√			

	- Pekerjaan Rehabilitasi toilet dan shelter di Daya Tarik Wisata Danau Tamblingan.					√
2	Desa Pacung					
	- Perbaikan kios tenun di Desa Pacung untuk Kelompok Tenun Cagcag Surya Indigo	√				
3	DesaPancasari					
	- Pemeliharaan 1 unit kamar mandi/WC di Daya Tarik Wisata Danau Buyan		√			
	- Penataan Kawasan Danau Buyan berupa pembuatan toilet dan penataan kolam pancing di Daya Tarik Wisata Danau Buyan			√		
4	Desa Wanagiri					
	- Perbaikan paving parkir di Daya Tarik Wisata Wanagiri		√			
5	Desa Kalibukbuk					
	- Pemeliharaan 2 unit kamar mandi/wc pada Daya Tarik Wisata Lovina		√			
	- Penataan Daya TarikWisata Lovina		√			
	- Pekerjaan Penataan areal parkir dan sodetan air di kawasan Patung Dolpin Lovina					√
6	Desa Gesing					
	- Pembangunan toilet di Desa Gesing Kec. Banjar untuk Panitia pembangunan penataan parkir Obyek		√			
7	Desa Ambengan					
	- Pembangunan tempat parker dan toilet di Desa Ambengan, Kec. Sukasada untuk kelompok Sadrar Ambengan, Kec. Sukasada untuk kelompok Sadar Wisata Banten Sari Korwil Jembong Desa Ambengan		√			
8	Desa Gitgit					
	- Peralatan penunjang Agro Tourism untuk kelompok pengelola obyek wisata Air Terjun Campuhan di Desa Girgit pada Program IPTEK Bagi Wilayah di Kawasan Green Belt		√			
	- Penataan Daya Tarik Wisata Air Terjun Gitgit berupa jalan setapak, tempat peristirahatan taman dan saluran air untuk pengelola Obyek Wisata Air Terjun Gitgit, Di Desa, Kec.			√		
9	Desa Bukti					
	- Penataan daya tarik wisata Air Sanih		√			
10	- Pengadaan papan informasi Daya Tarik Wisata (Billboard) besar		√			
11	- Pengadaan papan informasi Daya Tarik Wisata (Billboard) besar		√			
12	Eks. Pelabuhan Buleleng					
	- Pemilharaan Patung di Eks. Pelabuhan Buleleng			√		
	- PemeliharaanGedungMr. Puja			√	√	
	- Penataan Gedung Kesenian Gde Manik dan Penataan Areal Parkir			√		
	- Finishing Gedung Kesenian Gde Manik dan Penataan Areal Parkir				√	
	- Pembangunan wantilan di Eks. Pelabuhan Buleleng					√
	- Rehab Gedung Mr. Puja di DTW Eks Pelabuhan					√
13	Rehab bangunan TIS di lingkungan Puri Seni Sasana Budaya					√
14	Pekerjaan Penataan lanjutan areal parkir dan pembersihan pagar, candi bentar Gedung Kesenian Gde Manik					√

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Buleleng

Selain hal tersebut diatas, penyelenggaraan Urusan Pariwisata di Kabupaten Buleleng pun mendapatkan berbagai apreasiasi/penghargaan

yang membanggakan. Rincian prestasi yang diraih Kabupaten Buleleng selama kurun waktu 2014-2016 adalah sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 165
Prestasi Penyelenggaraan Urusan Pariwisata di Kabupaten Buleleng
Tahun 2014-2016

NO	PRESTASI	TAHUN
1	Tri Hita Karana Tourism Award *Silver Medal* 2014	2014
2	Boot Terbaik dalam pameran Yogyakarta TTI (Tourism Trade Invesment) Expo 2015	2015
3	Tri Hita Karana Tourism Award *Silver Medal* 2015	2015
4	Pelayanan Informasi Terbaik BITTC (Bandung Investment Tourism Trade and Expo Commodity)	2016
5	Boot Terbaik dalam pameran Yogyakarta TTI (Tourism Trade Invesment) Expo 2015	2016
6	Tri Hita Karana Tourism Award *Silver Medal* 2016	2016

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Buleleng

Sepanjang kurun waktu 2012-2017, penyelenggaraan urusan pariwisata dicapai melalui pelaksanaan total 15 Program dan 50 Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp16.764.630.200,00 dan terealisasi sebesar Rp15.472.280.224,00 atau (92,29%), dengan rincian :

Tabel 166
Anggaran dan Realisasi Urusan Pariwisata
Tahun 2012-2017

No	Uraian	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Program	3	3	3	3	3	4
2.	Jumlah Kegiatan	9	9	11	11	11	15
3.	Anggaran (Rp)	855.007.000	5.759.144.500	2.150.074.700	2.883.900.000	5.116.504.000	5.804.895.410
4.	Realisasi (Rp)	805.847.200	5.391.067.426	2.104.354.038	2.754.203.694	4.416.807.866	-

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Buleleng

Secara umum dapat disampaikan bahwa target-target penyelenggaraan urusan pariwisata seperti tercantum pada RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017 dapat tercapai. Pencapaian tersebut salah satunya didukung oleh upaya peningkatan pelaksanaan promosi dalam/luar daerah baik itu festival maupun expo, selain itu kerjasama antar pelaku pariwisata dan penyebaran informasi pariwisata melaui media dilakukan secara bertahap sebagai penunjang dalam pelaksanaan promosi guna meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Buleleng setiap tahunnya.

6. URUSAN PERDAGANGAN

Urusan Perdagangan merupakan urusan strategis yang menyangkut pelayanan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi. Upaya peningkatan tersebut dapat melalui peningkatan peluang pasar, ataupun pengembangan fasilitas yang bersifat fisik. Di satu sisi, laju sektor perdagangan yang begitu pesat, menuntut pengawasan yang lebih seksama agar perkembangan usaha yang ada dapat sejalan dengan aturan- aturan yang berlaku.

- Pada tahun 2012 pencapaian kinerja didukung melalui pelaksaan 4 program dan 6 kegiatan. Total dana yang dianggarkan sebesar Rp1.449.000.000,00 dan realisasi Rp1.405.771.000,00 atau 97,02% dan sisa anggaran sebesar Rp43.229.000,00 atau 3,08%.
- Pelaksanaan Program di Bidang Perdagangan tahun 2013 dijabarkan melalui pelaksanaan 4 Program dan 6 kegiatan dengan jumlah dana yang dianggarkan Bidang Perdagangan sebesar Rp6.438.124.700,00 dengan realisasi sebesar Rp5.664.071.280,00atau 96,81% dengan sisa anggaran Rp774.053.420,00 atau 12,02 %.
- Pada tahun 2014 Pelaksanaan Program di Bidang Perdagangan ini dijabarkan melalui 4 Program dan 5 Kegiatan dengan jumlah dana yang dianggarkan pada Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng sebesar Rp3.196.513.590,00 dengan realisasi sebesar Rp2.462.621.991,00 atau 77,04 % dengan sisa anggaran Rp733.891.599,00 atau 22,96 %.
- Pada tahun 2015 Pelaksanaan Program di Bidang Perdagangan ini dijabarkan melalui pelaksanaan 4 Program dan 5 kegiatan dengan jumlah dana yang dianggarkan pada Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng sebesar Rp3.034.939.320,00 dengan realisasi sebesar Rp2.400.361.882,00 atau 93,73% dengan sisa anggaran Rp634.577.438,00.
- Pencapaian sasaran tahun 2016 pada urusan Perdagangan didukung melalui pelaksanaan 4 program dan 5 kegiatan. Total dana yang dianggarkan sejumlahRp15.696.291.615,00dan realisasi keuangan sebesar Rp13.883.845.390,00atau 88,45% dengan sisa anggaran Rp1.862.446.225,00.

Pasar rakyat/pasar tradisonal adalah pasar yang cukup potensial untuk dikembangkan mengingat lokasi pasar sangat strategis dan sebagai pusat aktivitas perekonomian pedesaan diwilayah Kabupaten Buleleng. Selama periode RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017, dapat diwujudkan kondisi pasar dalam keadaan baik sejumlah 51 pasar yang tersebar di 9 kecamatan.Capaian indikator kinerja urusan Perdagangan dapat dilihat padaTabel dibawah ini.

Tabel 167
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan
Sesuai RPJMD Tahun 2012 - 2017

URUSAN BIDANG DAN INDIKATOR		SATUAN	2013		2014		2015		2016		20017	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1. PERDAGANGAN												
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Pgs/prj	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Orang	1	1	5	5	5	5	5	5	5	0
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Unit	12	2	13	6	14	8	15	6	17	0

Sumber : Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian

) Capaian program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor ini mencapai

100% disebabkan adanya kegiatan pameran ditingkat nasional, sehingga produk-produk kerajinan dan UMKM dikenal ditingkat nasional maupun internasional.

2) Capaian program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri mencapai 100% dikarenakan setiap tahunnya diselenggarakan pasar murah di Kabupaten Buleleng, sehingga bisa menekan laju kenaikan harga di pasaran.

3) Tidak tercapainya realisasi program Pembinaan Kaki Lima dan Asongan pada kegiatan Penataan Tempat Berusaha bagi

pedagang kaki lima dan Asongan dikarenakan masih banyaknya aset pasar desa belum diserahkan ke pemerintah daerah, sehingga menghambat proses

pembangunan revitalisasi pasar. Hal ini dikarenakan adanya Permendagri No. 14 Tahun 2016 Pasar 5 yang mengatur tentang pedoman pemberian hibah yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Derah, dan atau Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia.

Permasalahan yang ditemui dalam proses penyelenggaran urusan perdagangan yang didukung dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut di atas antara lain:

Masih minimnya jaringan pasar yang terbentuk

b) Masih banyaknya pasar desa yang memerlukan pembenahan sebagai upaya peningkatan perekonomian perdesaan.
c) Masih lemahnya interaksi antar golongan pedagang, yang menyebabkan pedagang golongan ekonomi lemah sulit mengembangkan usahanya.
d) Kurangnya pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa yang ada dipasar

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah :

a) Membuka kontak dagang yang baru dengan daerah/pembeli yang memiliki potensi untuk memberikan kontribusi, melalui pengoptimalan even-even pameran dan pasar lelang daerah.
b) Membuat skala Prioritas di dalam penentuan pembenahan pasar desa serta mengusulkan untuk mendapatkan rehab dari pemerintah provinsi dan pusat

c) Pembinaan dan penataan kepada pedagang golongan ekonomi lemah. d) Mengadakan pembinaan dan monitoring harga dipasar

8. URUSAN TRANSMIGRASI.

Upaya untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat serta pemerataan penyebaran penduduk dilakukan melalui program transmigrasi. Pemerintah Kabupaten telah menyiapkan perangkat dibidang transmigrasi dengan tugas pokok untuk melaksanakan pendaftaran, seleksi, penyuluhan dan pemindahan masyarakat/calon transmigran.

Realisasi kegiatan bidang ketransmigrasian yaitu pada tahun 2012 s/d2016 telah dilakukan pembinaan terhadap masyarakat yang potensial bertransmigrasi sebanyak 1.250 orang. Dari pembinaan tersebut telah mendaftar sebagai calon transmigran sebanyak 144 KK,dan sampai akhir tahun 2016 para calon transmigran yang bisa diberangkatkan sebanyak 37 KK karena adanya beberapa masalah yang harus diselesaikan dengan pemerintah daerah yang menjadi tujuan daerah transmigrasi. Disamping itu kuota yang diberikan sangat pada Pemerintah Pusat dan Provinsi Bali.

Penyelenggaraan urusan transmigrasi tersebut dicapai melalui pelaksanaan 1 program dan 4 kegiatan dengan total anggaran sebesarRp174.040.935,00 dan terealisasi sebesar Rp161.164.600,00 atau 92,60%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 169
Anggaran dan Realisasi Urusan Ketransmigrasian
Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Program	2	2	2	2	1
2.	Jumlah Kegiatan	4	4	4	4	4
3.	Anggaran (Rp)	180.000.000	254.926.000	275.830.000	227.567.000	174.040.935
4.	Realisasi (Rp)	172.001.410	252.939.340	228.538.200	109.002.105	161.164.600

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kendala dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program antara lain belum adanya petunjuk jelas dari pemerintah pusat dan kesediaan untuk menerima dari pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari calon transmigran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah dilakukan upaya anjangsana ke daerah tujuan transmigrasi yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara (UPT. Sinyoinyoi). Selain itu Pemerintah Kabupaten telah meminta kepada Pemerintah Provinsi Bali agar diberikan kuota pemberangkatan transmigrasi sebanyak 25 KK.

23. URUSAN BUDAYA

Kebudayaan yang selama ini terbentuk di Kabupaten Buleleng memiliki nilai-nilai positif dan normatif yang secara tidak langsung memberikan pengaruh positif terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, penyelenggaraan Urusan Kebudayaan selama kurun waktu lima tahun (2007-2011) diarahkan kepada pembinaan, pengembangan, dan pelestarian nilai-nilai budaya warisan leluhur serta pemanfaatan potensi desa adat dan masyarakat untuk mampu membangun secara mandiri. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan yang diambil adalah dengan meningkatkan pemahaman nilai-nilai budaya daerah sebagai rujukan menghadapi era globalisasi dalam totalitas perilaku masyarakat dan mengembangkan kehidupan berkesenian sebagai wujud kepekaan rasa yang dilandasi etika, estetika dan agama.

Melalui kebijakan-kebijakan di atas, Kabupaten Buleleng berupaya secara berkesinambungan untuk terus melestarikan, mengembangkan dan menyebarluaskannya. Salah satu kebanggaan daerah yang sampai saat ini berhasil dikembangkan dengan dilestarikan tari-tarian, sanggar seni, kesenian langka, desa adat, desa tua dan lain-lain. Keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilihat antara lain:

a) Apresiasi seni dan budaya di Buleleng mengalami peningkatan dan perkembangan yang signifikan terbukti dengan terbentuknya sanggar seni sebesar 2.216 sanggar seni dengan 49 jenis kesenian tersebar di 9 Kecamatan.Berikut perkembangan sanggar seni di Kabupaten Buleleng :

Tabel 132
Perkembangan Sanggar Seni Tahun 2012-2016
Di Kabupaten Buleleng

NO	URAIAN	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kesenian	1.190	1.190	1.253	2.010	2.216

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Buleleng

b) Meningkatnya Apresiasi Seni Budaya pada tingkat desa/kecamatan pada lomba Utsawa Merdangga Gong Kebyar,

Pawai Budaya, Pesta Kesenian Bali Tingkat Kabupaten, Pesta Kesenian Bali Tingkat Propinsi dan gelar seni;

c) Meningkatnya kepedulian masyarakat dalam menjaga dan melestarikan warisan leluhur berupa prasasti, situs, kesenian maupun tradisi-tradisi budaya seperti subak yang merupakan organisasi sosial ekonomi religius;

e) Meningkatnya minat masyarakat dalam mempelajari dan menjaga kelestarian pustaka-pustaka kuno yang sudah dialihbahasakan sehingga menjadi dokumen sejarah dalam perkembangan budaya berupa lontar dan buku-buku budaya;

f) Prestasi yang diraih dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 diantaranya :

Tabel 133
Prestasi Penyelenggaraan Urusan

NO	PRESTASI	TAHUN
1	*Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage 'Three Genres Of Traditional Of Dance In Bali From UNESCO*	2015
2	Juara II Film Dokumenter oleh Putu Satria Koesuma	2015
3	Juara II Lomba Mabladbadan	2015
4	Juara II Satua Bali Putri	2015
5	Juara III Lomba Pidarta Bali Putri	2015
6	Juara Harapan II Lomba Cerpen Bali Modern	2015

Kebudayaan Kabupaten Buleleng
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Buleleng

Anggaran dan Realisasi

Hasil penyelenggaraan Urusan Kebudayaan dicapai melalui pelaksanaan 41 program dan 164 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp35.042.266.009,00 dan terealisasi sebesar Rp34.288.900.326,00 atau 97,85% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 134
Anggaran dan Realisasi Urusan Kebudayaan Tahun 2012-2017

No	Uraian	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017

1.	Jumlah Program Jumlah	9	9	8	8	8	9
2.	Kegiatan	29	28	29	30	40	43
3.	Anggaran (Rp)	3.393.854.459	5.555.114.250	9.077.212.300	7.155.750.000	9.860.335.000	17.642.935.270
4.	Realisasi (Rp)	3.366.667.451	5.398.883.999	8.901.129.836	6.994.330.370	9.627.888.670	-

Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Buleleng

Pencapaian target RPJMD 2012-2017 Urusan Kebudayaan pada umumnya dapat tercapai. Pencapaian tersebut didasari oleh meningkatnya kunjungan wisatawan ke museum dan perpustakaan lontar. Peningkatan kunjungan wisatawan tidak lepas dari upaya penataan, pemeliharaan fisik maupun penambahan daftar pustaka lontar. Kegiatan pemberian penghargaan kepada seniman dan pembinaan Desa Pakraman, Subak, Subak Abian dan Sekaa Teruna dilaksanakan setiap tahunnya.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang Kebudayaan pada Tahun Anggaran 2016 meliputi 8 program dan 40 kegiatan, yaitu :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
- Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Kegiatan Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
- Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
- Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
- Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasl ke luar daerah/dalam daerah

b. Program Peningkatan sarana dan Prasarana

- Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Kegiatan Pengadaan Mebeleur
- Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana & Prasarana Upacara
- Kegiatan Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional
- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional
- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- Kegiatan Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

- Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
- Kegiatan Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur

d. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

e. Program Perencanaan Anggaran SKPD

- Kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD

f. Program Pengembangan Nilai Budaya

- Kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
- Kegiatan Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah
- Kegiatan Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

g. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

- Kegiatan Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
- Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
- Kegiatan Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program
- Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah
- Kegiatan Pengelolaan karya cetak dan karya rekam

h. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

- Kegiatan Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
- Kegiatan Penyusunan sistem informasi data base bidang kebudayaan
- Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
- Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
- Kegiatan Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya local

Pembangunan di bidang Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng. Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng didukung dengan personil sejumlah 130 orang, yang terdiri atas 56 PNS dan 74 Pegawai kontrak. Pangkat dan Golongan PNS meliputi ; Pembina Utama Muda (IV/c); 1 orang, Pembina Tk.I (IV/b); 1 orang, Pembina (IV/a); 2 orang, Penata Tk. I (III/d); 5 orang, Penata (III/c); 5 orang, Penata Muda Tk.I (III/b); 4 orang, Penata Muda (III/a); 6 orang, Pengatur Tk.I (II/d); 2 orang, Pengatur (II/c); 8 orang, Pengatur Muda Tk.I (II/b); 14 orang, Pengatur Muda (II/a); 4 orang, Juru Tk.I (I/d); 1 orang, Juru (I/c); 1 orang, Juru Muda Tk. I(I/b); 2 orang. Kualifikasi pendidikan PNS ; S2; 3 orang, SI/D4; 15 orang, D3; 5 orang, D1;1 orang, SMA/SMK; 28 orang, SMP; 2 orang dan SD ; 2 orang. Pejabat structural pada struktur organisasi meliputi ; Eselon IIb 1 pejabat, Eselon IIIa; 1 pejabat, Eselon IIIb; 2 pejabat, Eselon IVa; 10 pejabat dan eselon IVb; 1 pejabat.

7. URUSAN INDUSTRI.

Urusan Perindustrian merupakan urusan strategis yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat dalam hal pengetahuan, keterampilan, permodalan dan produksi. Pembangunan industri kecil diharapkan dapat memperluas kesempatan berusaha dengan menumbuhkan wirausaha baru, yang pada akhirnya dapat mendorong laju perekonomian daerah.

Anggaran dan Realisasi.

- Pencapaian kinerja tahun 2012 urusan Perindustrian didukung melalui pelaksaanaan 3 program dan 5 kegiatan. Total jumlah anggaran Rp489.100.000,00 dengan realisasi Rp461.071.500,00 atau 94,27% dan sisa anggaran sebesar Rp28.028.500,00 atau 6,08%.
- Pelaksanaan Program di urusan Perindustrian tahun 2013 dijabarkan melalui 3 program dan5 kegiatan. Jumlah dana yang dianggarkan pada Bidang Perindustrian sebesar Rp.516.949.095,00 dengan realisasi sebesar Rp441.285.628,00 atau 85,36%. Sisa anggaran pada tahun 2013 sebesar Rp75.663.467,00 atau 14,64%.
- Pada tahun 2014 Pelaksanaan Program di urusan Perindustrian ini didukung melalui 3 program dan 5 kegiatan. Jumlah dana yang dianggarkan pada Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp501.450.000,00 dengan realisasi sebesar Rp485.752.050,00 atau 96,87%. Total sisa anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp15.697.950,00.
- Dalam pelaksanaan Urusan Perindustrian tahun 2015 dijabarkan dalam 3 program dan4 kegiatan. Total dana yang dianggarkan sejumlah Rp323.999.950,00 dengan realisasi sebesar Rp322.778.900,00 atau 99,62%. Sisa anggaran pada tahun 2015 sebesar Rp1.221.050,00.
- Pada tahun 2016 Urusan Perindustrian 3 Program utama dengan 4 kegiatan. Untuk pelaksanaan 4 kegiatan di urusan Perindutrian pada Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng dengan alokasi anggaran sebesar Rp388.795.300,00yang Realisasi belanja langsung sebesar Rp384.809.100,00atau 99,10% dengan sisa anggaran sebesar Rp3.986.200,00.

Hasil/Output

Adapun keberhasilan atau prestasi selama periode RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut:

1. I Ketut Rajin (Artha Dharma), Menerima Penghargaan dari Dewan Kerajinan Nasional Sebagai Karya Kriya Unggulan Kategori Kain tenun pada Dekranas Award Tahun 2013.
2. Putu Suda Arta (Eva Gold dan Silver), Menerima penghargaan dari Dewan Kerajinan Nasional Sebagai Karya Kriya Unggulan Kategori Logam pada Dekranas Award Tahun 2013.
3. Nyoman Mahendra (Maharani Silver) Sebagai juara 3 Lomba Handicraft dalam Rangka Pekan Kreatif/inovasi RRI Denpasar Tahun 2015, Menyambut Hari Radio ke 70 "Karya inovasi Anak Bangsa Untuk Indonesia Hebat".

Sedangkan capaian indikator kinerja Urusan Perindustrian yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng berdasarkan dokumen RPJMD 2012-2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 168
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian sesuai RPJMD
Tahun 2012-2017

URUSAN BIDANG DAN INDIKATOR		Satuan	2013		2014		2015		2016		2017	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
PERINDUSTRIAN												
1	Program Pengembang an Industri Kecil dan Menengah	Orang	61	61	100	100	150	150	200	200	250	0
2	Program Pengembang an Sentra- sentra Industri Potensial	Produk Kerajinan	10	10	12	12	12	12	13	13	14	0

Sumber : Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian

Capaian Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada kegiatan pembinaan Industri Kecil Menengah dalam memperkuat jaringan klaster mencapai 100% karena terlaksananya pembinaa UMKM industri dan pemetaan potensi industri kecil dalam pemanfaatan sumber daya manusia.

Capaian program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial pada kegiatan penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat mencapai 100% karena adanya pameran-pameran yang

diselenggarakan oleh pihak pemerintah maupun swasta sehingga produk kerajinan unggulan daerah dikenal ditingkat nasional.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang ditemui dalam proses penyelenggaran urusan perindustrian didukung dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut di atas antara lain :

- Keterampilan sumber daya manusia masih rendah b) Sarana Produksi belum memadai.
- Mutu Produk belum optimal.
- Pengenalan Produk unggulan belum merata.

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah :

- Memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para pengerajin.
- Melaksanakan studi banding ke daerah-daerah yang memiliki pengembangan produk yang lebih baik.
- Memfasilitasi penguatan modal dengan pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya serta memberikan bantuan peralatan pendukung produksi melalui dana APBD II, serta mengupayakan mengakses bantuan-bantuan baik dalam bentuk peralatan maupun Hibah melalui Kementrian Perindustrian RI.
- Mengikut sertakan para pengerajin dalam pameran yang dilaksanakan baik tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional untuk mempromosikan produk-produk yang dihasilkan oleh pengerajin di Kabupaten Buleleng.
- Mengusulkan produk unggulan yang dihasilkan oleh para pengerajin untuk mendapatkan HAKI (Hak Kekayaan Intlektual) melaui lembaga yang membidangi
- Mendorong para pengerajin khususnya pengerajin yang menggunakan bahan baku dari kayu supaya bahan baku yang dipakai sudah mendapatkan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing dipasaran
- Melaksanakan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait baik tingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi untuk memecahkan masalah yang ada pada Bidang Perindustrian.

24. URUSAN KEARSIPAN

Pembangunan bidang kearsipan diarahkan untuk meningkatkan peran dan fungsi arsip sebagai sumber informasi pusat ingatan, alat pengendali, sarana evaluasi pelaksanaan pembangunan dan merupakan bukti autentik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penyelenggaraan kearsipan berpedoman pada Undang-undang R.I nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri RI, yang dalam penerapannya disebut dengan Sistem Kearsipan Pola Baru.

Kebijakan penyelenggaraan Urusan Kearsipan bertujuan untuk :

1) Meningkatkan layanan kearsipan;
2) Meningkatkan sistem pengelolaan dan penataan kearsipan;
3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur dibidang kearsipan. Sedangkan sasaran penyelenggaraan Urusan Kearsipan adalah :

1) Terlaksananya sistem kearsipan pola baru;
2) Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan kearsipan;
3) Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Kearsipan.

Tabel 135
Data Perkembangan Pengelolaan Dokumen arsip

No	Jenis Arsip	Tahun/Jumlah				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Dokumen Arsip Inaktif	1.431	1.656	1.899	2.610	2.418
2	Dokumen Arsip Statis	259	93	51	47	86
3	Foto-Foto Arsip Statis	1.022	135	95	158	37
	Jumlah	**2.482**	**1.884**	**2.045**	**2.815**	**2.541**

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Penyelenggaraan urusan kearsipan dilaksanakan melalui 3 Program Utama, yaitu :

1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.
2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Tabel 136
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan
Sesuai RPJMD Tahun
2012-2017

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Ket
			Kondisi Awal	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
I	**URUSAN KEARSIPAN**														
1	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan														
	a. Jumlah SKPD yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis aktif (SKPB)	SKPD	32	32	33	33	34	34	35	36	36	36	37		
	b. Jumlah SKPD yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis inaktif (SKPB)	SKPD	32	32	33	33	34	34	35	36	36	36	37		
	c. Jumlah sarana dan prasarana kearsipan sesuai standar	Box	240	240	245	245	250	250	255	255	260	260	265		
	d. Jumlah SDM pengelola kearsipan terampil/sesuai standar	Orang	1	1	3	3	5	5	7	7	9	9	11		

	e. Jumlah dokumen arsip yang dilestarikan dan diselamatkan	Dokumen	1.200	1.431	1.400	1.656	1.600	1.899	1.900	2.160	2.000	2.418	1.400	
	f. Jumlah lembaga kemitraan dengan lembaga kearsipan dan tersedianya pedoman kearsipan	Lembaga	5	5	7	7	9	9	11	11	13	13	15	

Dilihat dari capaian indikator kinerja Tahun 2012 – 2017 pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Buleleng yang tertuang pada tabel diatas adalah sebagai berikut :

1) Jumlah SKPD yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis aktif dari tahun 2012 – 2016 sudah mencapai 100 % sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan anggaran yang tersedia.
2) Jumlah SKPD yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis inaktif dari tahun 2012 – 2016 sudah mencapai 100 % sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan anggaran yang tersedia.
3) Jumlah sarana prasarana kearsipan sesuai standar dari tahun 2012 – 2016 sudah mencapai 100 % sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan anggaran yang tersedia.
4) Jumlah SDM pengelola kearsipan terampil sesuai standar dari tahun 2012 – 2016 sudah mencapai 100 % sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan anggaran yang tersedia.
5) Jumlah dokumen arsip yang dilestarikan dan diselamatkan dari tahun 2012 – 2016 rata-rata mengalami kenaikan sebesar 17 %. Jadi capaian indikator kinerja melebihi target karena terdapat dokumen arsip dari lembaga/instansi yang disampaikan diluar dari target yang telah ditetapkan.
6) Jumlah lembaga kemitraan dengan lembaga kearsipan dan tersedianya pedoman kearsipan dari tahun 2012 – 2016 sudah mencapai 100 % sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan anggaran yang tersedia.

Pembangunan di bidang Kearsipan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Buleleng. Yang didukung dengan personil sebagaimana tabel berikut :

Tabel 137
Kondisi Kepegawaian Urusan Kearsipan

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Pegawai	
	PNS	3
	Pegawai Harian/Kontrak	3
2.	Pangkat/Golongan	
	Pembina	1
	Penata Tk. I	1
	Penata	1
3.	Tingkat Pendidikan	
	S2	1
	S1/D4	1
	SMA/SMK/MTs	4
4.	Jumlah Pejabat	
	Pejabat Struktural :	
	Eselon IVa	1 Orang
	Pejabat Fungsional	
	1. Nama Jabatan Fungsional	1 Orang

Sumber data ; Kantor Pusipda Kabupaten Buleleng, 2016

3. URUSAN KEHUTANAN

Luas kawasan hutan di Kabupaten Buleleng sampai saat ini adalah 51.436,21 Ha (39,36%). Sedangnkan luas kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal 30 % (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 pasal 18 ayat 2 tentang Kehutanan.

Luas kawasan hutan berdasarkan fungsi di Kabupaten Buleleng tahun 2016 sebagai berikut 1) Hutan Lindung (HL) = 31.936,32 Ha (62,09 %), 2) Hutan Produksi (HP) = 1.524 Ha (2,96 %), 3) Hutan Produksi Terbatas (HPT) = 3.207,95 Ha (6,24 %), 4) Cagar Alam (CA) = 1.004,40 Ha (1,95 %), 5) Taman Nasional (TN) = 12.814,84 Ha (24,91 %), 6) Taman Wisata (TW) = 948,65 Ha (1,84 %). Jika dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Buleleng sekitar 136.588 Ha, dengan luas kawasan hutan 51.436,21 Ha maka secara kuantitas sudah melebihi standar yang ditentukan UU Nomor 41 tahun 1999. Namun secara kualitas sangat perlu ditingkatkan, mengingat fungsi sosial ekonomi dan fungsi ekologi hutan sangat penting bagi penyangga kehidupan.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 1030/02-C/HK/2014 tentang lahan kritis di Provinsi Bali Tahun 2013, tingkatkekritisan lahan dibagi dalam 4 kategori tingkat kekritisan lahan, yaitu : sangat kritis, kritis, agak kritis dan potensial kritis. Untuk luasan masing –masing kategori tingkat kekritisan tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 157
Keadaan Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan
di Kabupaten Buleleng

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Tingkat Kekritisan Lahan				Jumlah
			Sangat Kritis	Kritis	Agak Kritis	Potensial Kritis	
1	Kubutambahan	11.824,00	-	-	6.229,01	1.885,40	8.114,41
2	Tejakula	9.768,00	-	83,63	2.832,31	2.243,37	5.159,31
3	Sawan	9.252.,00	-	-	1.407,11	1.750,68	3.157,79
4	Sukasada	17.293,00	-	-	3.699,47	3.1511,01	6.850,48
5	Banjar	17.260,00	-	-	7.298,59	4.167,79	11.456,38
6	Busungbiu	19.662,00	-	-	1.299,51	7.413,49	8.713,00
7	Seririt	11.178,00	-	-	165,02	914,15	1.079,17
8	Gerokgak	35.657,00	-	544,5	320,54	2.656,97	3.522,05
9	Buleleng	4.694,00	-	-	-	-	-
	Jumlah:	**136.588,00**	**-**	**628,1**	**23.251,56**	**24.182,86**	**48.062,59**

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Tabel 158
Keadaan Lahan Kritis di dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Buleleng

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Tingkat Kekritisan Lahan				Jumlah
			Sangat Kritis	Kritis	Agak Kritis	Potensial Kritis	
1	Kubutambahan	1.629,95	-	1.282,41	241.14	71,71	1.595,26
2	Tejakula	2.590,15	-	-	242,38	1.125,29	1.367,67
3	Sawan	403,72	-	-	245,38	158,34	403,72
4	Sukasada	2.761,60	-	-	1.168,94	1.048,02	2.216,96
5	Banjar	2.300,79	-	-	75,62	281,84	357,46
6	Busungbiu	7.284,23	-	-	387,52	468,54	856,06
7	Seririt	5.942,54	-	563,16	1.040,20	1.268,00	2.889,36
8	Gerokgak	28.523,23	318,18	4.702,89	5.448,08	5.094,94	15.564,09
	Jumlah:	**51.436,21**	**318,18**	**6.548,46**	**8.849,26**	9.534,68	**25.250,58**

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Penyelenggaraan program prioritas urusan kehutanan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Buleleng tahun 2012-2017 dilaksanakan melalui 1 program kegiatan yaitu Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan 3 kegiatan yaitu :

1) Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan.
2) Penanaman Pohon Pada Kawasan Hutan Industri Dan Hutan Wisata/Dalam Kawasan Dan Luar Kawasan.
3) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan.

Target pembiayaan pelaksanaan program rehabilitasi hutan dan lahan sampai dengan berakhirnya RPJMD adalah sebesar Rp12.853.225.000, dan sampai dengan tahun 2016 realisasi jumlah anggaran yang sudah dialokasikan untuk pembiayaan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah sebesar Rp5.313.937.295,00.

Target fisik yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017 untuk urusan kehutanan adalah terehabilitasinya lahan kritis didalam kawasan dan diluar kawasan hutan seluas 5.500 hektar, dan sampai dengan tahun 2016 luas lahan kritis yang sudah mendapat penanganan rehabilitasi sudah melampaui target dari RPJMD yaitu sudah mencapai 6.128 hektar

Tabel 159
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kehutanan sesuai RPJMD
Tahun 2012-2017

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	2013		2014		2015		2016	
				Target RPJMD	Realisasi	Target RPJ MD	Realisasi	Target RPJ MD	Realisasi	Target RPJ MD	Realisasi
1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Terehabilitasi nya lahan kritis di dalam dan di	Ha	1.100	1.100	1.100	1.010	1.100	1.018	1.100	3.000

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2012 -2017, target dari program rehabilitasi hutan dan lahan adalah terehabilitasinya lahan kritis di dalam dan diluar kawasan hutan seluas 5.500 Hektar dan sampai dengan akhir tahun 2016 realisasi penanganan lahan kritis di Kabupaten Buleleng sudah mencapai 6.128 Ha, atau sudah melebihi dari target yang ditentukan didalam RPJMD Kabupaten Buleleng.

Untuk pelaksanaan urusan kehutanan pada tahun anggaran 2016 yang seharusnya dibiaya melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan karena beberapa pertimbangan teknis maupun administrasi tidak bisa dilaksanakan, sedangkan untuk memenuhi target dari RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017, pelaksanaan urusan kehutanan di Kabupaten Buleleng dibiaya oleh Pemerintah Pusat melalui Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Unda Anyar selaku Unit Pelaksana Teknis Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Program Kebun Bibit Rakyat dengan anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 yang digunakan untuk membiayai pembuatan bibit kehutanan sebanyak 600.000 batang atau jika dikonversikan dalam bentuk luasan maka akan dapat merehabilitasi hutan dan lahan seluas 3.000 Ha. Pelaksanaan pembuatan bibit tanaman kehutanan ini dilaksanakan oleh 30 kelompok yang tersebar di wilayah Kabupaten Buleleng, dengan masing-masing kelompok membuat bibit sebanyak 20.000 batang, dengan anggaran sebesar Rp50.000.000,00.

Dengan demikian jika dilihat dari grafik di atas maka pelaksanaan urusan kehutanan sudah melampai target dari RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017, meskipun pada tahun anggaran 2017 urusan kehutanan tidak mendapat alokasi anggaran karena kewenangan urusan kehutanan sudah menjadi tanggungjawab dari Pemerintah Provinsi Bali.

Program pembangunan bidang kehutanan pada RPJMD Tahun 2012-2017 meliputi 4 program yaitu :

1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.
2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan.
4. ProgramPerencanaan dan Pengembangan Hutan.

Untuk penyelenggaraan Urusan Kehutanan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016 dialokasikan belanja daerah sebesar Rp.13.805.518.647,89 dan terealisasi sebesar Rp.11.792.891.863 atau 85,42 persen, yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp.7.138.626.000 dan terealisasi Rp. 7.040.305.367 atau 98,62 persen dan belanja langsung sebesar Rp. 6.666.892.647,89 dan realisasi anggaran untuk belanja langsung pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebesar Rp.4.752.586.495 atau mencapai 71,29 persen, yang meliputi : Belanja Pegawai dengan anggaran Rp.313.515.000 dan terealisasi Rp.305.395.000, atau 97,41 persen, Belanja Barang dan jasa dengan anggaran Rp.5.997.877.647,89 dan terealisasi Rp.4.111.982.495 atau mencapai 88,58 persen, Belanja Modal dengan anggaran Rp.355.500.000 dan terealisasi Rp.335.209.000 atau 94,29 persen.

Pembangunan di bidang kehutanan daerah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Buleleng, dengan dukungan pegawai sebagaimana ditunjukkan tabel berikut :

Tabel 160
Kondisi Pegawai Yang Menangani Urusan kehutanan

No	Uraian	Jumlah
1.	**Jumlah Pegawai**	
	PNS	84
	Pegawai Harian /Kontrak	25
2.	**Pangkat dan Golongan**	
	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
	Pembina Tk.I (IV/b)	5
	Pembina	13
	Penata Tk. I	19
	Penata	13
	Penata Muda Tk.I	14
	Penata Muda	3
	Pengatur Tk.I	2
	Pengatur	3

	Pengatur Muda Tk.I	8
	Pengatur Muda	1
	Juru Tk.I	1
	Juru	1
3.	**Tingkat Pendidikan**	
	S2	7
	SI/D4	43
	D3	8
	SMA/SMK/MTs	44
	SMP/MI	6
	SD	1
4.	**Jumlah Pejabat**	
	Pejabat Setruktural :	
	Eselon IIb	1
	Eselon IIIa	1
	Eselon IIIb	5
	Eselon Iva	17
	Pejabat Fungsional	
	1. Penyuluh Kehutanan (PKL)	14
	2. Penyuluh Perkebunan (PPL)	13

Sumber data : Dinas Dishutbun Kabupaten Buleleng,2016

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2016. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD.DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkannya menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Permasalahan yang ditemui dalam proses penyelenggaraan Urusan Kehutanan yang didukung dengan pelaksanaan program dan kegiatan diatas antara lain :

a) Terbatasnya wilayah kerja penyelenggara Urusan Kehutanan Kabupaten Buleleng, yang dalam hal ini adalah Dinas Kehutanan dan Kehutanan berdasarkan perangkat peraturan perundang-undangan yang baru bahwa Dinas Kehutanan Kabupaten tidak lagi berwenang terhadap program reboisasi (penanaman di dalam hutan) dan diperkuat

dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya mengatur bahwa kewenangan urusan kehutanan berada di pemerintah Provinsi Bali, sehingga mulai tahun anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Buleleng sudah tidak memberikan alokasi anggaran untuk pembiayaan urusan kehutanan.

b) Masih tingginya tingkat pelanggaran hutan, baik berupa pelanggaran batas maupun penebangan kayu yang tidak dibarengi dengan ketersediaan SDM dan otoritas pengamanan hutan, yang menyebabkan Kabupaten Buleleng tergantung pada tindakan preventif/represif oleh pihak provinsi.
c) Tingginya minat menanam masyarakat Buleleng yang belum dapat diimbangi dengan ketersediaan bibit tanaman kehutanan dalam jumlah yang memadai.
d) Masih relatif terbatasnya tenaga penyuluh dan SDM pengelola program dan kegiatan kehutanan yang tersedia di Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Solusi yang telah ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu :

a) Berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pihak provinsi agar diperoleh kejelasan kewenangan dan otoritas dalam mengoptimalkan pembangunan Urusan Kehutanan di Kabupaten Buleleng;
b) Berkoordinasi dan berkomunikasi secara intensif dengan aparatur Resor Polisi Hutan (RPH) yang tersebar di Kabupaten Buleleng (di bawah otoritas Dinas Kehutanan Provinsi Bali) agar dapat bersama-sama menjaga keberadaan hutan dengan pecalang hutan bentukan Dinas Kabupaten;
c) Mengkonsentrasikan kebijakan pembangunan kehutanan dan menyediakan alokasi anggaran yang memadai bagi penyediaan bibit tanaman kehutanan yang berkualitas dan bermutu sebagai sarana kegiatan penghijauan lingkungan masyarakat Buleleng;
d) Melaksanakan bimbingan, pembinaaan dan mengirimkan SDM perkebunan untuk meningkatkan kapasitas melalui studi banding dan pelatihan-pelatihan yang tersedia, dibarengi dengan upaya-upaya reposisi dan optimalisasi pemberdayaan SDM yang tersedia.

Prestasi yang diraih dalam penyelenggaraan urusan kehutanan dan perkebunan dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2016 antara lain adalah :

1) Tahun 2013 ;
   - Juara I Tingkat Provinsi Lomba Penyuluh Kehutanan Swadaya Mandiri (PKSM) atas nama I Nengah Kanten, Desa Selat, Kecamatan Sukasada.
   - Juara IV Tingkat Nasional Lomba Penyuluh Kehutanan Swadaya Mandiri (PKSM) atas nama I Nengah Kanten, Desa Selat, Kecamatan Sukasada.
2) Tahun 2014;
   - Juara III Tingkat Provinsi Lomba Penanaman 1 Milyar Pohon
   - Juara I Tingkat Provinsi Lomba Penyuluh Kehutanan Lapangan (PKL) atas nama Neneng Anengsih, PKL Wilayah Binaan Desa Bungkulan, Sangsit, Girimas Kecamatan Sawan
   - Juara II Tingkat Provinsi Lomba Penyuluh Kehutanan Swadaya Mandiri (PKSM) atas nama Putu Mudesna Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan
   - Juara I Tingkat Provinsi Lomba Olahan Bahan Pangan Lokal atas nama KWT Candra Wangi, Desa Unggaran, Kecamatan Seririt.
3) Tahun 2016 ;
   - Peraih Kalpataru katagori Pengabdi Lingkungan dari PKL atas nama Neneng Anengsih
   - Juara II Tingkat Provinsi Bali dalam Lomba Pembinaan dan Evaluasi Subak Abian/Kelompok Tani dan KWT pada Dinas Perkebunan yang diwakili oleh KWT. Batur Sari, Desa Sepang Kelod, Kecamatan Busungbiu.
   - Juara IV Tingkat Nasional dan Juara I Tingkat Provinsi Bali dalam Lomba Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat yang di raih oleh I Nengah Kanten dari Desa Selat Kecamatan Sukasada.
   - Juara II Lomba Penanaman Pohon Tingkat Provinsi Bali yang di berikan kepada Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, ST.

21. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Buleleng dikelola oleh satuan kerja perangkat daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buleleng. Hal ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng. BPMPD Kabupaten Buleleng memiliki tugas pokok, fungsi dan tata kerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2014tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Sebagai instansi yang menangani urusan pemberdayaan dan pemerintahan desa, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buleleng memiliki peran dalam rangka meningkatkan keberdayaan masyarakat aparatur pemerintahan desa, baik melalui bantuan program, dana stimulan maupun melalui peningkatan kapasitas aparatur maupun masyarakat perdesaan.

Untuk mencapai sasaran yang telah dirumuskan maka ditetapkan beberapa arah kebijakan dalam kurun waktu 5 tahun sehingga apa yang telah menjadi visi dan misi BPMPD Kabupaten Buleleng dapat tercapai. Adapun arah kebijakan yang dirumuskan antara lain :

a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai teknik pengelolaan tanaman pangan untuk mendapatkan pangan alternatif;
b. Meningkatkan koordinasi antar beberapa sektor yang terkait dalam rangka mewujudkan keamanan pangan;
c. Meningkatkan manajemen pengelola UED dan BUMDES untuk meningkatkan ekonomi perdesaan;
d. Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk sinkronisasi kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pendataan rumah tangga sasaran;
e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa melalui semangat gotong royong;

f. Meningkatkan kinerja lembaga kemasyarakatan yang ada di desa melalui pembinaan secara terus menerus kepada lembaga-lembaga perdesaan;
g. Meningkatkan pembinaan kepada desa-desa dalam penataan administrasi khususnya partisipasi pembinaan lomba desa;
h. Meningkatkan pemahaman pengelolaan kawasan perdesaan terpadu berbasis pemberdayaan masyarakat;
i. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap pemanfaatan SDA dan teknologi tepat guna;
j. Meningkatkan kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan desa;
k. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa dalam manajemen pemerintahan desa;
l. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Implementasi atas kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai program yang dilakukan yaitu:

a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;
b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa;
c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;
d. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.

Capaian Kinerja

Indikator capaian kinerja dari tahun 2012 – 2017 pada BPMPD Kabupaten Buleleng seperti yang tertera pada Tabel berikut :

Tabel 122

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat
Desa Sesuai RPJMD Tahun 2012-2017

No	Uraian	Tahun										
		2012	2013		2014		2015		2016		2017	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Terwujudnya peningkatan keberdayaan organisasi masyarakat desa												
1	LPM Berkinerja baik	-	10 LPM	10 LPM	10 LPM	10 LPM	10 LPM	10 LPM	10 LPM	10 LPM	10 LPM	
2	Prosentase PKK desa aktif dan berprestasi	95%	96%	96%	97%	97%	98%	98%	99%	99%	100%	
3	Posyandu berstatus mandiri:											
	a. Mandiri	5	5	10	15	15	30	23	50	23	75	
	b. Purnama	202	202	247	197	220	200	368	225	368	300	
	c. Madya	421	421	436	436	448	448	320	428	320	338	
	d. Pratama	85	85	20	65	30	35	6	10	6	0	
4	Tingkat konsumsi diversifikasi pangan bergizi, seimbang dan aman	80%	83%	83%	85%	85%	87%	65,6%	90%	90%	93%	
5	Pola penganekaragaman pengolahan pangan alternative	20%	23%	23%	27%	27%	30%	28%	33%	30%	35%	
6	Kelompok masyarakat mampu mengaplikasikan TTG	2 Klp	1 Klp	1 Klp	2 Klp	2 Klp	2 Klp	2 Klp	2 Klp	2 Klp	2 Klp	
7	Jumlah desa yang mampu mengelola potensi SDA	7 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	4 Desa	4 Desa	4 Desa	4 Desa	4 Desa	
Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan												
8	Jumlah desa mampu mengelola pemerintahan secara professional	27 Desa	54 Desa	54 Desa	27 Desa	54 Desa	27 Desa	27 Desa	27 Desa	27 Desa	27 Desa	
9	Jumlah banjar dinas yang dimekarkan	5 Br. Dinas	5 Br. Dinas	4 Br. Dinas	5 Br. Dinas	4 Br. Dinas	5 Br. Dinas	1 Br. Dinas	5 Br. Dinas	-	5 Br. Dinas	
10	Jumlah desa yang mengelola keuangan secara akuntabel dan efektis dan efisien	27 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	240 Orang	50 Orang	240 Orang	50 Orang	

11	Jumlah desa yang melaksanakan pilkel yang demokratis dan luber	3 Desa	78 Desa	74 Desa	38 Desa	4 Desa	3 Desa	42 Desa	3 Desa	2 Desa	3 Desa	

Upaya untuk meningkatkan keberdayaan organisasi masyarakat desa senantiasa terus dilakukan guna menciptakan organisasi yang berdaya seperti dengan melakukan pembinaan kepada LPM, PKK, Posyandu, dan kelompok wanita tani maupun kepada kelompok masyarakat pemanfaat sumber daya alam.

Capaian kinerja selama 5 tahun telah diperoleh hasil yang cukup baik, yakni dengan dilakukannya pembinaan dan pemberian pelatihan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) setiap tahunnya sehingga diperoleh hasil yang maksimal dimana LPM telah mampu berkinerja baik dalam membantu roda pemerintahan desa, demikan juga dengan PKK yang mampu diaktifkan dan bahkan mampu berkontribusi memberikan penghargaan ditingkat Provinsi maupun Nasional.

Namun pada upaya peningkatan keberdayaan kelompok posyandu dan upaya penganekaragaman pangan ada beberapa yang tidak dapat mencapai target yang ditetapkan. Adapun yang menjadi alasan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan pada kelompok posyandu yakni jenis indikator yang dijadikan sebagai pemberian status bagi posyandu antara lain :

a) Frekwensi Penimbangan;
b) Rerata Kader Tugas;
c) Rerata Cakupan D/S;
d) Cakupan Kumulatif KIA;
e) Cakupan Kumulatif KB;
f) Cakupan Kumulatif Imunisasi;
g) Program Tambahan;
h) Cakupan Dana Sehat.

Sehingga apabila disalah satu indikator terdapat penurunan nilai, maka secara otomatis status posyandu bisa turun dan begitu sebaliknya, apabila nilai dari indikator tersebut meningkat maka status posyandu bisa meningkat/naik pula. Jadi peningkatan status posyandu tiap tahunnya

terkadang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan atau dengan kata lain status posyandu berfluktuasi. Selain mengupayakan keberdayaan organisasi masyarakat desa telah diupayakan juga peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dimana kegiatan yang telah dilaksanakan disetiap tahunnya selama 5 tahun yaitu dengan memberikan pelatihan kepada aparatur pemerintah desa terkait manajemen pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa serta memfasilitasi pemilihan dan pelantikan perbekel definitif.

Upaya untuk menciptakan pemerintahan desa yang akuntabel dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang profesional apalagi dengan di undangkannya Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta turunannya, maka pemberian pelatihan kepada aparatur pemerintah desa terkait pengelolaan manajemen pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan disetiap tahunnya bahkan telah melebihi dari target yang ditetapkan.

Untuk fasilitasi kegiatan pemilihan dan pelantikan perbekel di Kabupaten Buleleng secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan kebijakan yang ada. Namun keterkaitan dengan pelaksanaan capaian kinerja 5 tahunan terdapat beberapa target yang tidak sesuai ini dikarenakan adanya kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Pada tahun 2013 telah dilaksanakan pemilihan di 78 desa, namun yang mengikuti pelantikan sebanyak 74 perbekel definitif, dan sebanyak 4 perbekel masih mengalami beberapa proses sehingga pelantikannya dilaksanakan di tahun 2014. Pada tahun 2014 terdapat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/7635/PMD tahun 2013 mengisyaratkan tentang penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa ditahun 2014. Jadi pada tahun 2014 tidak ada kegiatan pemilihan perbekel dan hanya memfasilitasi kegiatan pelantikan 4 perbekel yang tertunda ditahun 2013. Seluruh desa yang masa jabatan perbekelnya telah habis ditahun 2014, pelaksanaannya akan difasilitasi di tahun 2015. Pada tahun 2015 pelaksanaan pemilihan dan pelantikan perbekel dilaksanakan secara serentak dengan terpilih 42 perbekel definitif. Namun pada tahun 2016 kembali terbentur oleh adanya regulasi terbaru yakni pada Undang – undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta turunannya mengintruksikan bahwasanya pemilihan dan pelantikan perbekel dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam 6 tahun. Ini berarti karena pelaksanaan pemilihan dan pelantikan perbekel terakhir telah dilaksanakan pada tahun 2015 maka pelaksanaan selanjutnya adalah setelah 2 tahunnya atau ditahun 2017. Namun pada tahun 2016 terdapat pemilihan dan pelantikan perbekel antar waktu sebanyak 2 perbekel definitif. Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemberdayaan masyarakat juga melakukan pendampingan terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd).

Demikian halnya dengan implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat desa yang diwujudkan dalam bentuk dana pemberdayaan masyarakat dan desa. Dari tahun 2012 sampai dengan 2017 nilainya semakin bertambah. Sampai dengan tahun 2017 jumlah dana yang disalurkan ke desa sebesar Rp614.188.005.100,70. Data alokasi dana secara umum adalah sebagai berikut :

Tabel 123
Alokasi Keuangan Desa Tahun 2012 - 2017

Tahun	Dana Desa (APBN)	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	ADD	Jumlah
2012	-	2,850,000,000.00	800,000,000.00	12,120,000,000.00	15,770,000,000.00
2013	-	2,932,557,760.00	997,536,780.00	23,530,700,220.00	27,460,794,760.00
2014	-	6,897,233,735.00	1,310,607,050.00	28,805,739,579.00	37,013,580,364.00
2015	16,081,170,349.00	8,577,848,668.37	1,302,188,959.33	90,214,133,600.00	116,175,341,576.70
2016	82,620,493,000.00	11,595,603,500.00	1,835,917,100.00	101,478,898,600.00	197,530,912,200.00
2017	105,860,971,000.00	10,851,312,657.00	2,048,687,343.00	101,476,405,200.00	220,237,376,200.00
Total	**204,562,634,349.00**	**43,704,556,320.37**	**8,294,937,232.33**	**357,625,877,199.00**	**614,188,005,100.70**

Dengan adanya regulasi terbaru yakni diundangkannya Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta turunannya, mulai di tahun 2015 Pemerintah Desa diseluruh Indonesia mendapatkan alokasi keuangan dari Pemerintah Pusat melalui Dana Desa dan khusus di Kabupaten Buleleng pada tahun 2015 mendapatkan Rp16.081.170.349,00 yang tersebar di 129 Desa di Kabupaten Buleleng. Demikian pada tahun 2016 dan 2017 Dana Desa terus mengalami peningkatan yakni Rp82.620.493.000,00 pada tahun 2016 dan Rp105.860.971.000,00 pada tahun 2017.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Tiap Tahunnya

Jika dilihat pencapaian kinerja BPMPD Kabupaten Buleleng tiap tahun dimulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 maka akan diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 124
Perbandingan Realisasi Kinerja pada BPMPD Kabupaten Buleleng Tahun 2012 – 2016

Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
Keuangan (%)	93,87	90,80	96,92	85,93	98,48
Fisik (%)	98,09	96,30	99,72	99,37	99,82
Total Kegiatan	**97,11**	**94,86**	**98,51**	**96,87**	**98,22**

Sumber Data : BPMPD Kabupaten Buleleng

2. Alokasi Anggaran Untuk Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan program/kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada BPMPD Kabupaten Buleleng dari tahun anggaran 2012 sampai dengan 2017 sebagai berikut :

Tabel 125
Perbandingan Pagu/Anggaran pada BPMPD Kabupaten Buleleng Tahun 2012- 2017

NO	PAGU/ ANGGARAN	JUMLAH
1	Pagu 2012	Rp5.056.611.800,00
2	Pagu 2013	Rp7.107.481.777,00
3	Pagu 2014	Rp7.802.347.000,00
4	Pagu 2015	Rp9.170.001.167,00
5	Pagu 2016	Rp7.459.043.168,26
6	Pagu 2017	Rp8.420.419.323,00

Sumber Data : BPMPD Kabupaten Buleleng

Kondisi alokasi anggaran pada BPMPD Kabupaten Buleleng ditiap tahunnya berfluktuasi, dimana dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan, ditahun 2016 mengalami peunurunan dan ditahun

2017 kembali mengalami peningkatan. Peningkatan alokasi anggaran pada tahun 2012 ke 2013 sebesar 40,56%, peningkatan ditahun 2013 ke 2014 hanya sebesar 9,78% dan peningkatan alokasi anggaran pada tahun 2014 ke 2015 sebesar 17,53%, namun pada tahun 2016 alokasi anggaran menurun sebesar 18,66% dan kembali meningkat sebesar 12,89% ditahun 2017.

Peningkatan maupun penurunan alokasi anggaran pada BPMPD Kabupaten Buleleng lebih disebabkan pada prioritas program dan kegiatan yang dilaksanakan, dimana prioritas program dan kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan guna menunjang proses pembangunan yang diantaranya kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG), pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) guna penganekaragaman pangan berbasis pangan lokal, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui Perlombaan Desa dan Kelurahan, pelatihan aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan Pemerintahan Desa dan keuangan Desa serta pemilihan dan pelantikan Perbekel.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa pada Tahun Anggaran 2016 meliputi 9 program dan 40 kegiatan, yaitu :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- Kegiatan Peneyedian Jasa Surat Menyurat.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
- Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan.
- Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor.
- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
- Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
- Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman.

- Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/dalam daerah.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

- Kegiatan Penyelenggaraan dan pengadaan sarana/prasarana upacara.
- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
- Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional.
- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
- Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

- Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu.
- Kegiatan Pembinaan rohani dan budaya aparatur.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan.

- Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD.

e. Program Perencanaan Anggaran SKPD.

- Kegiatan Penyusunan anggaran SKPD.

f. Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.

- Kegiatan Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan.
- Kegiatan Pemberdayaan kelompok posyandu.
- Kegiatan Pemberdayaan keluarga miskin dan fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- Kegiatan Koordinasi ketersediaan, distribuasi dan konsumsi keanekaragaman pangan.
- Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, pendayagunaan dan pemasyarakatan TTG.
- Kegiatan Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan bagi masyarakat.
- Kegiatan Monitoring, evaluasi dan koordinasi program pemberdayaan masyarakat.

g. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.

- Kegiatan Monitoring dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi desa.

h. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.

- Kegiatan Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa.
- Kegiatan Pemberian stimulan pembangunan desa.
- Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat melalui gotong-royong.
- Kegiatan Fasilitasi pengembangan kawasan perdesaan.
- Kegiatan Pembinaan masyarakat desa dalam rangka lomba desa / kelurahan terpadu.

i. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.

- Kegiatan Pelatihan manajemen pemerintahan desa bagi aparatur pemerintah desa.
- Kegiatan Pengkajian pemekaran banjar dinas.
- Kegiatan Pembinaan pelaksanaan pemerintah desa dan alokasi dana desa (ADD).
- Kegiatan Fasilitasi dan monitoring penyelenggaraan pemilihan dan pelantikan perbekel.
- Kegiatan Fasilitasi pendataan, pengolahan dan pendayagunaan profil desa/kelurahan.

Jumlah PKK aktif di Kabupaten Buleleng Tahun 2016 sebanyak 148 PKK dari total PKK yang ada seluruhnya yang berjumlah 148 PKK. Sedangkan Posyandu Aktif yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng berjumlah 717 posyandu dan semua kelompok tersebut aktif didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buleleng. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada BPMPD Kabupaten Buleleng tersaji pada tabel berikut :

Tabel 126
Kondisi Kepegawaian pada BPMPD Kabupaten Buleleng

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Pegawai	
	PNS	40
	Pegawai Harian /Kontrak	50
2.	Pangkat dan Golongan	
	Pembina Tk.I (IV/b)	2
	Pembina	1
	Penata Tk. I	12
	Penata	2
	Penata Muda Tk.I	5

	Penata Muda	2
	Pengatur Tk.I	2
	Pengatur	8
	Pengatur Muda Tk.I	6
3.	Tingkat Pendidikan	
	S2	6
	SI/D4	28
	D3	2
	SMA/SMK/MTs	54
4.	Jumlah Pejabat	
	Pejabat Setruktural :	
	Eselon IIb	1
	Eselon IIIb	4
	Eselon IVa	12

Sumber data : BPMPD Kabupaten Buleleng, 2016

C. PRIORITAS URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN.

Terdapat 8 Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten Buleleng, yang meliputi Urusan Perikanan, Urusan Pertanian, Urusan Kehutanan, Urusan Pariwisata, Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, Urusan Industri, Urusan Perdagangan dan Urusan Transmigrasi.

1. URUSAN PERIKANAN

Pembangunan urusan perikanan pada hakekatnya merupakan upaya untuk memanfaatkan sumberdaya perikanan dan kelautanpotensial menjadi sumberdaya perikanan dan kelautan nyata yang secara langsung dapat dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu peningkatan perikanan dan kelautan diarahkan pada peningkatan kontribusi subsektor perikanan dalam menunjang pertanian yang maju, efisien dan tangguh sehingga mampu meningkatkan nilai gizi dan bahan baku industri di dalam negeri, meningkatkan dan mendorong perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar serta menunjang pembangunan daerah.

Pembangunan urusan perikanan di Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kegiatan ekonomis yang mempunyai nilai strategis dan sangat prospektif. Dalam pengembangan usaha perikanan dan kelautan tersebut diperlukan dukungan kemampuan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia ditambah pula kemampuan dana yang relatif besar. Untuk mencapai sasaran tersebut maka pembangunan perikanan dilaksanakan dengan pendekatan agribisnis dan agroindustri, terpadu dan berkelanjutan mulai dari penyediaan sarana dan prasarana produksi, proses produksi, pasca panen, pemasaran dan pembinaan lainnya.

Adapun potensi perikanan dan kelautan meliputi :

a) Perikanan Laut

Potensi dan Produksi Perikanan Tangkap.

Potensi perikanan laut seluas 1.166,75 km^2 untuk 4 mil untuk kewenangan wilayah Kabupaten. Berdasarkan data tahun 2016 produksi perikanan laut baru mencapai16.383,7 ton.

Potensi dan Produksi Budidaya.

Luas lahan potensial untuk budidaya laut diperkirakan ± 1.050 Ha. Adapun lokasi yang berpotensi untuk budidaya laut antara lain Desa Pejarakan, Desa Sumberkima, Desa Pemuteran, Desa Penyabangan, Desa Banyupoh, Desa Sanggalangit, Desa Musi, Desa Patas, Desa Pacung dan Desa Bukti. Potensi yang baru dimanfaatkan untuk budidaya laut seluas 151,15 Ha atau 14,39 %. Komoditas yang dikembangkan adalah rumput laut jenis *Euchema Cottonii* yang luas tebarnya 29,6 Ha dengan produksi 488,7 ton. Sedangkan untuk jenis komoditas lainnya seperti kerapu dengan luas 48,2 Ha (7.533 unit) telah berproduksi sebesar 289,8 ton, bandeng dalam KJA dengan luas 0,9 Ha (140 unit) dengan produksi sebesar 500 ton.Untuk kerang mutiara dimanfaatkan dengan luas lahan 112,4 Ha dengan produksi sepat sebesar 719.400 ekor, mutiara sebanyak 5.040 gram dan cangkang mutiara sebesar 9,5 ton.

b) Perikanan Darat.

Potensi dan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya di Perairan Umum.

Potensi perairan umum di kabupaten Buleleng memiliki luas kurang lebih 481,3 Ha yang terdiri dari dua buah danau dengan luas 446 Ha, 25 Ha perairan sungai 10 Ha perairan waduk dan 0,30 Ha saluran irigasi. Perairan umum ini memiliki potensi lestari sebesar 1.250 ton di mana pemanfaatannya melalui kegiatan penangkapan sebesar 55,1 ton atau 4,4%, sedangkan kegiatan budidaya Karamba Jaring Apung (KJA) Nila di Danau Buyan Desa Pancasari Kecamatan Sukasada yang dikelola oleh kelompok pembudidaya Bulian Sari produksinya mencapai 24,7 ton.

Potensi dan Produksi Budidaya Air Payau.

Luas lahan potensi untuk budidaya ikan dan udang di tambak adalah + 500 Ha yang terdiri dari lahan pasang surut 350 Ha dan non pasang surut 150 Ha. Luas pemanfaatan budidaya tambak Tahun 2016 adalah seluas 227,60 Ha. Luas usaha yang dipanen adalah 96.85 Ha dengan pencapaian produksi sebesar 1.775,9 ton udang vanamea. Potensi perikanan darat berupa Kolam seluas 130,00 Ha dan Minapadi 1.300,00 Ha. Untuk kolam potensi yang dimanfaatkan baru mencapai 26,3 Ha.

Secara keseluruhan, konsumsi ikan masyarakat kabupaten Buleleng tahun 2016 mencapai 36,38 kg per kapita/tahun atau 95,73% dari standar nasional yaitu 38,00 kg/kapita/tahun, oleh karena sasaran pemasaran hasil perikanan kabupaten Buleleng diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dalam daerah dan ekspor. Hasil penyelenggaraan urusan perikanan dan kelautan dari tahun 2012 sampai dengan 2016 dicapai melalui pelaksanaan 71 program dan 220 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp61.945.893.500,95 realisasi sebesar Rp59.552.745.360,00 atau 96,14% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 44

Anggaran dan Realisasi Urusan Perikanan dan Kelautan

Tahun 2012- 2017

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Program	17	14	14	13	13	11
2	Jumlah Kegiatan	43	44	45	43	45	40
3	Anggaran	9.528.854.344	13.047.769.225	13.695.779.655	14.294.298.460	11.379.191.816,95	10.722.569.300
4	Realisasi	8.845.815.378	12.762.001.282	13.301.683.594	13.755.342.800	10.887.902.306	-
5	Realisai	92,83 %	97,8 %	97,12 %	96,23 %	95,68 %	-

Capaian indikator kinerja sasaran yang dicapai pada tahun 2012-2016 sesuai dengan visi misi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng secara umum dapat dikategorikan berhasil.Keberhasilan penyelenggaraan urusan perikanan dan kelautan dapat diukur melalui pencapaian sasaran indikator kinerja selama tahun 2013 sampai dengan 2016 sesuai dengan target RPJMD Kabupaten Buleleng urusan Perikanan dan kelautan dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 145

Capaian Indikator Kinerja Urusan Perikanan dan Kelautan

sesuai RPJMD Tahun 2012 - 2017

	Uraian	2		2014		2015		2016		2017
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
1	Jumlah produksi perikanan budidaya	1.136 ton	1.979,7 ton	1.192,8 ton	2.055,2 ton	1.252,4 ton	3.216,9 ton	1.315 ton	3.439,4 ton	2.915 ton
	Jumlah produksi perikanan tangkap	14.177 ton	14.243,4 ton	14.027,6 ton	17.809,2 ton	15.929,2 ton	16.318,4 ton	16.885 ton	16.509,6 ton	16.811,2 ton
2	Jumlah konsumsi Ikan masyarakat	29,1 kg/or/th	25,8 kg/or/th	32 kg/or/th	30,9 kg/or/th	33,2 kg/or/th	31,23 kg/or/th	35 kg/or/th	36,38 kg/or/th	35 kg/or/th
3	Jumlah pengusaha yang bergerak di bidang perikanan dan kelautan	74 pengusaha	74 pengusaha	75 pengusaha	75 pengusaha	76 pengusaha	78 pengusaha	77 pengusaha	102 pengusaha	78 pengusaha

4	Jumlah SDM kelompok perikanan yang mengalami peningkatan	15 Klp	15 klp	15 Klp	15 Klp	15 klp	15 klp	15 Klp	15 klp	15 klp
5	Prosentase Penurunan jumlah pelanggaran yang terjadi di perairan/laut	4 kali	0 kali	3 kali	0 kali	2 kali	0 kali	1 kali	0 kali	0 kali

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Buleleng

Jika dilihat trend produksi perikanan dan kelautan secara total dari tahun 2012 sampai dengan 2016 peningkatannya rata-rata mencapai 7,5%, dimana dari tahun 2014 ke tahun 2015 saja yang mengalami penurunan sebesar 1,6%. Begitu pula halnya dengan perbandingan produksi perikanan selama 5 tahun dari tahun 2012-2016 yang cenderung mengalami peningkatan kecuali dari tahun 2014 ke 2015 mengalami penurunan, secara rinci berturut-turut sebagai berikut: 14.456,4 ton, 16.327,7 ton, 19.864,4 ton, 19.535,3 ton dan 19.949 ton. Jika dibandingkan produksi tahun 2013 dengan 2012 mengalami peningkatan sebesar 12,94%, tahun 2014 dengan 2013 mengalami peningkatan sebesar 21,66%, tahun 2015 dengan tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 1,6% dan tahun 2016 dengan 2015 mengalami kenaikan sebesar 2,1%. Produksi perikanan dan kelautan tentunya tidak dapat dilepaskan dari keadaan cuaca dan iklim mikro, maupun makro; sehingga angka produksinya pun cenderung akan berfluktuasi mengikuti kondisi cuaca dan iklim. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 146
Jumlah Produksi Perikanan Serta Nilai Penjualan di
Kabupaten Buleleng Tahun 2012 - 2016

Jenis Usaha Perikanan	Produksi (Ton)	Nilai (Rp.1.000)

Perikanan Laut	**17.239,5**	**283.648.746**
Perikanan Tangkap di Laut	**16.383,7**	**241.189.656**
Perikanan Budidaya Laut	**855.8**	**42.459.090**
a. Budidaya Rumput Laut	7.2	5.040
b. Budidaya Bandeng	-	-
c. Budidaya Kerapu	190.5	12.674.555
d. Budidaya Mutiara	5.5	11.000
e. Budidaya Kakap	652,6	29.768.500
Perikanan Darat	**2.709,6**	**112.573.901**
Penangkapan di Perairan Umum	**125,9**	**1.981.586**
a. Penangkapan di Danau	125,9	1.981.586
b. Penangkapan di Sungai	-	-
Budidaya	**2.583,7**	**110.592.315**
a. Budidaya Air Payau (Tambak)	2.468,5	107.837.200
b. Budidaya Kolam	68,2	1.568.565
c. Budidaya Mina Padi	-	-
d. Budidaya KJA	47	1.186.550
Jumlah Tahun 2016	19.949,0	396.222.647
Jumlah Tahun 2015	19.535,3	435.826.828
Jumlah Tahun 2014	19.864,4	487.737.603
Jumlah Tahun 2013	16.327,7	358.088.950
Jumlah Tahun 2012	14.456,4	289.689.880

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Buleleng

Jika dilihat trend daripada produksi perikanan dan kelautan secara total dari tahun 2012 sampai dengan 2016 peningkatannya rata-rata sebesar 8% dimana dari tahun 2014 ke tahun 2015 saja yang mengalami penurunan sebesar 1,6%. Perbandingan produksi perikanan selama 5 tahun dari tahun 2012-2016 terus mengalami peningkatan kecuali dari tahun 2014 ke 2015 mengalami penurunan, secara rinci berturut-turut sebagai berikut: 14.456,4ton, 16.327,7ton, 19.864,4ton, 19.535,3ton dan 19.949ton. Jika dibandingkan produksi tahun 2013 dengan 2012 mengalami peningkatan sebesar 12,94%, tahun 2014 dengan 2013 mengalami peningkatan sebesar 21,66%, tahun 2015 dengan tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 1,6% dan tahun 2016 dengan 2015 mengalami kenaikan sebesar 2,1%. Penurunan produksi dari tahun 2014 ke 2015 disebabkan oleh menurunnya hasil penangkapan ikan di laut sebesar 1.490,8 Ton ikan. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2015 terjadi cuaca yang ekstrim tidak menentu selama setahun dan gelombang pasang yang mengakibatkan nelayan menjadi waspada melaut. Selain hal tersebut, kemungkinan adanya penurunan potensi perikanan tangkap yang terjadi selama tahun 2015 mengakibatkan jumlah tangkapan nelayan tidak maksimal setiap melaut.

Untuk usaha yang paling menonjol dalam tahun 2012-2016 adalah usaha dibidang penangkapan laut dimana produksinya terus mengalami peningkatan yaitu tahun 2012 sebesar 13.374,5 ton, tahun 2013 sebesar14.348 ton, tahun 2014 sebesar 17.809.2 ton, tahun 2015 sebesar 16.318,4 ton dan tahun 2016 sebesar 17.239,5 ton. Rata-rata peningkatan produksinya adalah sebesar 5,7% dengan jenis ikan yang paling banyak ditangkap adalah Tongkol, Cakalang, Lemadang, Madidihang dan Layang.

Untuk budidaya ikan laut dengan komoditi ikan kerapu pada tahun 2012-2016 secara keseluruhan mengalami peningkatan dari 143,7 ton menjadi 190,5 ton atau sekitar 32,5%. Untuk produksi budidaya kerapu setiap tahunnya mengalami peningkatan pada tahun 2012-2015 dengan produksi 143,7 ton tahun 2012, 277,6 tahun 2013, 280,3 tahun 2014 dan 289,8 ton tahun 2015. Sedangkan produksi budidaya kerapu tahun 2016 dengan produksi sebesar 190,5 Ton mengalami penurunan dibandingkan dari tahun 2015. Hal ini disebabkan karena adanya regulasi mengenai ekspor kerapu ke luar daerah sehingga para pengusaha pembudidaya mengalihkan jenis budidaya dari ikan kerapu ke komiditi lainnya.

Disamping itu usaha budidaya di air tawar dengan jenis komoditiikan nila baik di tambak maupun di KJA juga trennya terus mengalami peningkatan rata-rata mencapai50% per tahun. Produksi budidaya ikan nila di Tambak pada tahun 2012 adalah sebesar 16,1 Ton menjadi 28,3 Ton pada tahun 2016 sedangkan produksi ikan nila di KJA mengalami peningkatan dari 5,7 ton menjadi 47 ton. Hal ini disebabkan karena semakin banyak kelompok pembudidaya ikan yang membudidayakan jenis ikan nila di kolam maupun KJA serta adanya bantuan dari pemerintah untuk budiaya ikan nila.

Peningkatan produksi perikanan kelautan dari tahun 2012-2016 merupakan hasil program kerja Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan beberapa kegiatan unggulan :

1) Pendampingan pada kelompok nelayan dan kelompok pembudidaya ikan, berupa pembinaan, pelatihan, bimtek ataupun kajiterap.
2) Pengembangan sarana dan prasarana perikanan berupa, pengadaan jukung, mesin dorong, jaring minipurseine, jaring bendera, jaring tasi, bubu, mesin genset, kapal, pembangunan balai kelompok, PPI, TPI, SPDN, sarana prasarana budidaya rumput laut, teripang, dan kekerangan, pengadaan paket sarana

prasarana budidaya kolam dengan jenis komoditi lele, karper, gurame, nila. Disamping juga pengadaan sarana KJA, induk ikan, kolam pembenihan dan peralatan pembenihan untuk kelompok UPR, dengan jenis komoditi lele,karper dan nila, pengadaan bangsal pengolahan, serta peralatan pengolahan pasca panen.

3) Pengembangan bibit ikan unggul, berupa penyediaan benih ikan yang bermutu dan berkualitas dengan meningkatkan sarana prasarana di Balai Benih Ikan (BBI).
4) Pembinaan dan pengembangan pembenihan ikan, berupa pengadaan sarana prasarana pembenihan seperti Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan. Kegiatan ini merupakan operasional Pasar Benih Ikan (PBI), dimana melalui PBI dapat menstabilisasi harga jual hasil perikanan di pasaran baik lokal maupun antar pulau.
5) Peningkatan prasarana sarana pengolahan hasil perikanan yaitu melalui Peningkatan dan pengolahan mutu hasil perikanan yaitu melalui pembinaan akan mampu meningkatkan kualitas/mutu olahan hasil perikanan. Sehingga mampu meningkatkan nilai tambah dari hasil olahan tersebut.
6) Pengembangan dan penatausahaan perikanan yaitu penataan perusahaan perikanan yang ada di kabupaten Buleleng, sehingga terjadi peningkatan investasi di bidang perikanan dan kelautan.

Tabel 147
Produksi Hasil Pengolahan Ikan di Kab.Buleleng
Tahun 2012-2016

No	Jenis Pengolahan	Jumlah Produksi Total (Ton)
1.	Diawetkan	
2.	Kering/Asin	
3.	Pindang	28,3
	Asapan	2.876,6
	Jumlah Tahun 2016	**3.139,0**
	Jumlah Tahun 2015	**2.245.5**
	Jumlah Tahun 2014	**3.149,5**
	Jumlah Tahun 2013	**2.646,0**
	Jumlah Tahun 2012	**2.619,1**

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Buleleng

Produksi hasil pengolahan ikan di Kabupaten Buleleng juga merupakan salah satu indikator kinerja bidang perikanan dan kelautan.

Produksi hasil pengolahan tahun 2016 sebesar 3.139,0 ton, jenis olahannya adalahkering/asin, pindang dan asap. Adapun jenis ikan yang diolah adalah ikan laut (teri, terbang, tongkol, cakalang, kembung dan lemuru). Produksi hasil olahan perikanan dari tahun 2012-2016 secara berturut-turut yaitu tahun 2012 sebesar 2.619,1 ton, tahun 2013 sebesar 2.646 ton, tahun 2014 sebesar 3.149,5 ton, tahun 2015 sebesar 2.245.5 ton dan tahun 2016 sebesar 3.139,0 ton. Jumlah produksi olahan dari tahun ke tahun masih bersifat fluktuatif dimana peningkatan atau penurunan produksi olahan tidak terlalu signifikan, semua ini tergantung pada jumlah dan jenis ikan yang ditangkap dan diolah oleh kelompok wanita pengolah.

Disamping olahan dari jenis ikan laut ada juga olahan yang berasal dari jenis ikan air tawar yaitu ikan lele yang jenis olahannya kering (abon,kripik) dan juga diasap. Namun produksinya masih sedikit. Demikian halnya dengan olahan rumput laut yang dijadikan kue, dodol, manisan, krupuk yang produksinya masih sangat terbatas. Sistim pengolahan hasil perikanan masih bersifat tradisional, sebagian besar merupakan usaha skala rumah tangga atau usaha mikro kecil, meskipun ada beberapa sistim pengelolaannya dengan berkelompok dalam satu unit bangsal pengolahan. Ikan yang diolah merupakan kelebihan atau sisa dari penjualan ikan segar maupun ikan yang dibeli dari kabupaten lain yang jenisnya memang untuk diolah. Jadi sebenarnya usaha pengolahan ini sudah ada sedikit yang mengarah menuju unit pengolahan ikan yang lebih besar, sehingga hasil olahan bertambah besar. Untuk pamasaran juga perlu kemasan yang baik dan higienis sehingga dapat menarik para konsumen untuk membelinya. Unit pengolahan hasil perikanan yang ada hanya dimiliki oleh kelompok, meskipun pengolahannya dilaksanakan secara perorangan, karena belum semua kelompok memiliki bangsal pengolahan.

Jumlah unit pengolahan ikan (UPI) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kecuali dari tahun 2013 ke tahun 2014dan 2014 ke tahun 2015 jumlah UPI tetap. Tahun 2012 sebanyak 52 UPI dengan 1.216 anggota, tahun 2013 sebanyak 52 UPI dengan 1.216 anggota, tahun 2014 sebanyak 58 UPI dengan 1.309 anggota, tahun 2015 sebanyak 58 UPI dengan 1.309 anggota dan tahun 2016 sebanyak 80 UPI dengan 1.688 anggota. Peningkatan jumlah unit pengolahan ikan (UPI) disebabkan semakin banyaknya keinginan masyarakat, khususnya wanita nelayan untuk meningkatkan nilai tambah dari ikan yang dijual, disamping pada

saat musim ikan, sisa ikan yang tidak habis terjual segar bisa diolah oleh kelompok wanita pengolah, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Tabel 148
Data Nelayan Kabupaten Buleleng 2012- 2016

No	Kecamatan	Nelayan Laut			Perairan Umum		
		A	B	C	A	B	C
1.	Gerokgak	829	371	40	0	0	0
2.	Seririt	301	205	37	0	0	0
3.	Busungbiu	0	0	0	0	0	55
4	Banjar	105	149	59	27	40	0
5.	Buleleng	125	109	40	0	0	0
6.	Sukasada	0	0	0	40	50	63
7.	Sawan	348	129	35	0	0	0
8.	Kubutambahan	748	100	40	0	0	0
9.	Tejakula	1.176	365	30	0	0	0
	Jumlah Tahun 2016	3.632	1.428	281	67	90	118
	Jumlah Tahun 2015	3.565	1.390	386	67	84	110
	Jumlah Tahun 2014	5.004	1.450	403	134	84	110
	Jumlah Tahun 2013	4.969	1.450	403	134	84	110
	Jumlah Tahun 2012	4.968	1.430	350	134	84	147

* Keterangan : A = nelayan penuh
B = nelayan sambilan utama
C = nelayan sambilan tambahan

Demikian juga halnya dengan jumlah pembudidaya, dengan melihat peningkatan pembudidaya dapat meningkatkan produktivitas pembudidaya dan memacu terjadinya peningkatan produksi budidaya. Khususnya untuk budidaya kolam dengan jenis komoditi lele mengalami peningkatan jumlah pembudidaya yang cukup signifikan. Hal ini juga menunjukkan Dinas Perikanan dan Kelautan mampu memperluas lapangan pekerjaan.

Negara yang menjadi tujuan ekspor untuk produksi perikanan dan kelautan adalah sebagai berikut :

a) Komoditi nener negara tujuan ekspor adalah negara Malaysia, Vietnam, Singapura, RRC, Taiwan dan Filipina.
b) Komoditi benih kerapu dan kerapu konsumsi negara tujuan ekspor adalah RRC, Vietnam, Hongkong, Malaysia dan Singapura.
c) Komoditi mutiara negara tujuan ekspor adalah Jepang, Singapura,Hongkong dan Uni Eropa.

Pembangunan di bidang Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng. Dengan struktur organisasi yang terdiri atas Kepala Dinas (Eselon II/b), Sekretaris Dinas (Eselon III/a), Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Kepala Bidang Usaha dan Pengolahan Hasil dan Kepala Sumber Daya (Eselon III/b), Kepala Seksi Sarana Perikanan Tangkap, Kepala Seksi Prasarana Perikanan Tangkap, Kepala Seksi Pengembangan Produksi Penangkapan, Kepala Seksi Budidaya Air Laut dan Payau, Kepala Seksi Budidaya Air Tawar, Kepala Seksi Pembenihan dan Kesehatan Ikan, Kepala Seksi Pengolahan dan Bina Mutu, Kepala Seksi Pengembangan dan Pelayanan Usaha, Kepala Seksi Pemasaran Hasil Perikanan, Kepala Seksi pengawasan pengendalian sumber daya ikan& penegakan hukum, Kepala Seksi konservasi tata ruang laut dan pesisir, Kepala Seksi penyuluhan &pemberdayaan masyarakat pesisir, Kasubbag perencanaan, Kasubbag umum, Kasubbag Keuangan (Eselon IV/a), UPTD ; Kepala Pasar Benih Ikan, Kepala Balai Benih Ikan, Kepala Pangkalan Pendaratan Ikan (Eselon IV/b).

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng berjumlah 65 orang. Dengan pangkat dan golongan terdiri atas : Pembina Utama Muda (IV/c) ; 1 orang, Pembina Tk.I (IV/b) ; 3 orang, Pembina (IV/a) ; 4 orang, Penata Tk.I (III/d) ; 18 orang, Penata (III/c) ; 8 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) ; 11 orang, Penata Muda (III/a) ; 4 orang, Pengatur Tk.I ; 1 orang, Pengatur (II/c) ; 8 orang, Pengatur Muda Tk.I ; 6 orang, Juru (I/c) ; 1 orang. Dengan kualifikasi pendidikan meliputi : Strata 2 (S2) ; 2 orang, Strata 1/ Diploma 4 (S1/D4) ; 31 orang, Diploma 3 (D3) ; 10 orang, SMA/SMK/Mts ; 21 orang, SMP/MI ; 1 orang. Jumlah Pejabat Struktural : Eselon II/b ; 1 pejabat, Eselon III/a ; 1 pejabat, Eselon III/b ; 4 pejabat, Eselon IV/a ; 17 pejabat, Eselon IV/b ; 3 pejabat. Jabatan fungsional dalam struktur organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng melipiti ; Penyuluh perikanan Madya ; 1 orang, Penyuluh Perikanan penyelia ; 6 orang, Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan ; 2 orang, Penyuluh Perikanan Pertama ; 6 orang, Penyuluh Perikanan Pelaksana ; 1 orang.

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2016. RKPD

digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD. DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkannya menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan perikanan dan kelautan adalah sebagai berikut :

a) SDM masyarakat perikanan dan kelautan masih terbatas baik nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar didalam melaksanakan penerapan teknologi tepat guna.
b) Sarana dan prasarana yang dimiliki masyarakat juga masih terbatas dan sebagian besar masih bersifat tradisional.
c) Kurangnya permodalan yang dimiliki nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar.
d) Pengembangan akses pasar masih terbatas.
e) Masih adanya penangkapan ikan yang bersifat destruktif.

Upaya penanganan yang telah dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan di bidang perikanan dan kelautan kepada nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar.
b. Memberikan sarana prasanana perikanan dan kelautan.
c. Memberikan penguatan modal baik melalui koperasi koperasi KTA, KUR yang dilaksanakan perbankan.
d. Melaksanakan atau mengikuti pameran sebagai ajang promosi dan upaya pengembangan akses pasar.
e. Secara berkesinambungan maupun reguler melaksanakan operasi pengawasan baik yang dilaksanakan tim Satgas maupun kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) di perairan/laut maupun perijinan.

Beberapa prestasi menonjol yang dicapai bidang perikanan dan kelautan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2012-2016 antara lain :

1. The Equator Prize Award (PBB UNDP) di Rio de Janeiro Brazil sebagai penghargaan tingkat Internasional di Bidang Pelestarian Terumbu Karang yang diterima oleh Yayasan Karang Lestari dan Kabupaten Buleleng Tahun 2012.

2. Juara I Tingkat Propinsi Bali Lomba Pokmaswas tahun 2012 atas nama Kelompok Nelayan Pecalang Segara, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak.
3. Juara I Tingkat Propinsi Bali Lomba UKM tahun 2012 atas nama Kelompok Sari Luih, Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan.
4. Juara I Tingkat Nasional dalam Satuan Kerja Terbaik Pada Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2013 Satker TP Ditjen KP3K yang diterima oleh Dinas Perikanan dan Kelautan kabupaten Buleleng.
5. Juara II Tingkat Nasional dalam Pameran Industri Bahari Expo yang diterima oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng.
6. Penghargaan Nasional yang diterima Bupati Buleleng dalam Efektivitas Kawasn Konservasi Perairan Kategori Percepatan.
7. Juara III Tingkat Provinsi Lomba UMKM atas nama Kelompok Putri Sumber Laut, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak.
8. Juara II Tingkat Nasional dalam Pameran Indonesian Investment Marine and Fisheries Expo 2014 yang diterima oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng.
9. Juara I Tingkat Nasional dalam Gempita Regional II di Malang atas nama Poklahsar Sari Luih, Desa Tajun.
10. Juara II Tingkat Provinsi dalam Lomba UKM Pengolahan atas nama Poklahsar Jaya Mandiri, Desa Bondalem.
11. Juara I Tingkat Nasional dalam Program "Berani jadi Milyarder" di Metro TV atas nama Poklahsar Yeh Pasih, Kelurahan Banjar Jawa.
12. Penghargaan Internasional CORAL Conservation Prize Tahun 2014 atas nama Nyoman Sugiarta (Pengurus Daerah perlindungan Laut Desa Bondalem) dan Abdul Manaf, S.Pi (Staf Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng).
13. Juara I Stand Terbaik dalam Bandung Investment Tourism and Trade Bittra Expo 2015 yang diterima oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng.
14. Anugerah Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-pulau Kecil (Kategori Percepatan) yang diterima oleh Bupati Buleleng dari EKP3K Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
15. Anugrah Adibakti Mina Bahari dalam Kategori Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yang diterima oleh Wayan Kanten dari Kugar Uyah Buleleng.

16. Juara Harapan I dalam Festival Garam Nasional yang diterima oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng.
17. Juara III Tingkat provinsi dalam Lomba Pengelolaan Non Konsumsi Tahun 2015 atas nama Kelompok Bajoe, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak.
18. Juara II Tingkat Provinsi dalam Lomba Memasak Serba Ikan Tahun 2015 atas nama PKK Ds. Musi, Kec. Gerokgak
19. Penghargaan Gerakan Makan Ikan Nasional oleh kementerian Kelautan dan perikanan Republik Indonesia yang diterima oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng pada tahun 2016.
20. Juara II Tingkat Internasional dalam UNWTO Award di Kota Madrid, Spanyol atas nama Yayasan Karang Lestari, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak Tahun 2016.

25. URUSAN PERPUSTAKAAN

Perpustakaan sebagai daya dukung kemajuan dunia pendidikan dan peningkatan mutu sumberdaya manusia sangat diperlukan peranannya. Kemajuan perpustakaan baik dari segi kuantitas maupun kualitas menjadi salah satu barometer kemajuan dunia pendidikan pada umumnya. Oleh sebab itu, pembangunan bidang perpustakaan diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa serta menumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.

Sesuai Undang – Undang nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dalam pasal 2, 3 dan 4 disebutkan bahwa perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, kerukunan dan kemitraan. Oleh sebab itu, pembangunan bidang perpustakaan diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa serta menumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Sedangkan pembangunan Perpustakaan secara khusus ditujukan untuk memberikan layanan kepada masyarakat pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kebijakan penyelenggaraan urusan perpustakaan bertujuan untuk :

a) Meningkatkan kecerdasan masyarakat melalui budaya baca dan perpustakaan;
b) Meningkatkan pengelolaan, penataan dan pelayanan perpustakaan;
c) Meningkatkan pengetahuan teknis petugas di bidang perpustakaan melalui pelatihan - pelatihan dan bimbingan teknis;
d) Meningkatkan koleksi bahan pustaka.

Sedangkan sasaran penyelenggaraan urusan perpustakaan antara lain :

a) Meningkatnya budaya baca dan perpustakaan;
b) Meningkatnya pengelolaan, penataan dan pelayanan perpustakaan;

c) Meningkatnya kemampuan teknis petugas dibidang perpustakaan;

d) Meningkatnya koleksi bahan pustaka.

Tabel 138
Data Perkembangan Jumlah Bahan Pustaka

No	Jenis Bahan Pustaka	Tahun /Jumlah				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Karya Umum	498	565	626	702	772
2	Filsafat	475	812	886	956	1.046
3	Agama	1.295	1.365	1.565	1.715	1.850
4	Ilmu Sosial	3.906	3.973	4.164	4.338	4.538
5	Bahasa	579	646	723	823	953
6	Ilmu Murni	1.712	1.779	1.921	2.031	2.141
7	Ilmu Terapan	4.494	4.561	5.066	5.166	5.366
8	Kesenian,Hiburan,Olah Raga	595	662	705	805	905
9	Kesusastraan	1.766	1833	1.935	2.055	2.195
10	Sejarah/Geografi	945	1.012	1.087	1.187	1.337
	Jumlah	**16.535**	**17.205**	**18.678**	**19.778**	**21.103**

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Tabel 139
Data Perkembangan Jumlah Anggota Perpustakaan /Jenis Kelamin

No.	Jenis Anggota	Tahun/Jenis Kelamin/Jumlah									
		2012		2013		2014		2015		2017	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Pelajar	6	5	7	9	16	17	10	24	12	10
2	Mahasiswa	50	40	70	40	20	38	150	157	50	63
3	Umum	15	40	20	29	10	14	30	40	11	26
	Jumlah	**71**	**85**	**97**	**78**	**46**	**69**	**190**	**121**	**73**	**99**

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Tabel 140
Data Perkembangan Jumlah Pengunjung Perpustakaan/Jenis Kelamin

No.	Jenis Pengunjung	Tahun/Jenis Kelamin/Jumlah									
		2012		2013		2014		2015		2017	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Pelajar	400	300	500	560	2.000	1.555	1.755	1.951	2.890	1.408
2	Mahasiswa	1.950	1.450	2.050	2.017	1.600	1.703	2.761	2.302	2.314	2.279
3	Umum	2.200	1.000	500	347	850	857	700	698	554	576
	Jumlah	**4.550**	**2.750**	**3.050**	**2.924**	**4.450**	**4.115**	**6.971**	**4.951**	**5.758**	**4.263**

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Tabel 141
Data Perkembangan Jumlah Peminjam Perpustakaan /Jenis Kelamin

No.	Jenis Peminjam	Tahun/Jenis Kelamin/Jumlah									
		2012		2013		2014		2015		2017	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Pelajar	100	185	100	128	300	406	100	181	89	100
2	Mahasiswa	400	259	687	502	987	1.054	888	475	356	357
3	Umum	300	200	400	367	300	217	199	199	130	137
	Jumlah	**800**	**644**	**1.187**	**997**	**1.587**	**1.677**	**1.187**	**855**	**575**	**594**

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Penyelenggaraan urusan perpustakaan dalam tahun anggaran 2016 dilakukan melalui 1 Program Utama dengan 3 Kegiatan.

1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

a. Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca;

b. Kegiatan Supervisi,Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan perpustakaan Masyarakat;

c. Kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan perpustakaan dan Minat Baca di Daerah.

Tabel 142
Data Perkembangan Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Tahun/Jumlah				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Program	5	5	6	6	8
2	Kegiatan	21	21	25	25	27
	Jumlah	**26**	**26**	**31**	**31**	**35**

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Data Perkembangan Program/Kegiatan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Buleleng pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 sebagai berikut : Tahun 2012 melaksanakan 5 program dan 21 kegiatan, Tahun 2013 melaksanakan 5 program dan 21 kegiatan, Tahun 2014 melaksanakan 6 program dan 25 kegiatan, Tahun 2015 melaksanakan 6 program dan 25 kegiatan.

Data Perkembangan Anggaran Belanja Tak Langsung (BLT), Belanja Langsung (BL) dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Buleleng Sebagai berikut :

1) Tahun 2012 Anggaran BTL sebesar Rp1.511.939.798,00 trealisasi sebesar Rp1.424.266.977,00 dan Anggaran BL sebesar Rp789.539.000,00 terealisasi sebesar Rp745.133.337,00 sehingga total anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp2.301.478.798,00 dan terealisasi sebesar Rp2.169.400.314,00;
2) Tahun 2013 Anggaran BTL sebesar Rp1.820.148.015,00 trealisasi sebesar Rp1.776.822.089,00 dan Anggaran BL sebesar Rp1.146.450.000,00 terealisasi sebesar Rp1.122.833.816,00 sehingga total anggaran pada tahun 2013 sebesar Rp2.966.598.015,00 dan terealisasi sebesar Rp2.899.655.905,00;
3) Tahun 2014 Anggaran BTL sebesar Rp1.841.456.001,52 trealisasi sebesar Rp1.794.499.620,00 dan Anggaran BL sebesar Rp1.214.333.000,00 terealisasi sebesar Rp1.207.297.753,00 sehingga total anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp3.055.789.001,52 dan terealisasi sebesar Rp3.001.797.373,00;
4) Tahun 2015 Anggaran BTL sebesar Rp1.623.099.000,00 trealisasi sebesar Rp1.608.664.288,00 dan Anggaran BL sebesar Rp1.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.475.331.581,00 sehingga total anggaran pada tahun 2015 sebesar Rp3.123.099.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.085.995.860,00;
5) Tahun 2016 Anggaran BTL sebesar Rp1.684.728.000,00 trealisasi sebesar Rp1.663.970.456,00 dan Anggaran BL sebesar Rp1.098.499.116,25 terealisasi sebesar Rp1.082.641.075,00 sehingga total anggaran pada tahun 2016 sebesar Rp2.783.224.116,25 dan terealisasi sebesar Rp2.746.611.531,00.

Pembangunan di bidang Perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Buleleng, dengan dukungan personil sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 143
Kondisi Kepegawaian Urusan Perpustakaan

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Pegawai	
	PNS	19
	Pegawai Harian/Kontrak	19
2.	Pangkat/Golongan	
	Pembina Tk.I (IV/b)	2
	Pembina	3
	Penata Tk. I	3
	Penata	3
	Penata Muda Tk. I	3
	Penata Muda	2
	Pengatur Tk. I	2
	Juru Tk. I	1
3.	Tingkat Pendidikan	
	S2	3
	S1/D4	11
	D3	2
	SMA/SMK/MTs	22
4.	Jumlah Pejabat	
	Pejabat Struktural :	
	Eselon IIIa	1 Orang
	Eselon IVa	3 Orang
	Pejabat Fungsional	
	1. Pustakawan Madya	3 Orang

Sumber data : Kantor Pusipda Kabupaten Buleleng, 2016

22. URUSAN SOSIAL

Pembangunan dibidang Kesejahteraan Sosial merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan secara menyeluruh yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Permasalahan dan kebutuhan manusia tidak terlepas dari kondisi dan perubahan lingkungan baik fisik maupun non fisik. Pembangunan dibidang Kesejahteraan Sosial yang telah dilaksanakan pada umumnya telah memberi kontribusi peran pemerintah dan masyarakat.

Program yang dilaksanakan untuk penanganan masalah kesejahteraan sosial yang diarahkan pada peningkatan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta mengurangi timbulnya masalah sosial baru. Program-program tersebut antara lain penanggulangan kemiskinan, penanggulangan penyandang cacat, penanggulangan keterlantaran, penanganan ketunaan sosial, penanggulangan bencana alam/sosial termasuk pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan. Kondisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Buleleng selama Tahun 2012–2016 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 127
Kondisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Tahun 2011 - 2015

No.	Kategori	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Anak Balita Terlantar	321	227	321	230	222
2	Anak Terlantar	1.194	1.483	1.478	1.654	1.644
3	Anak Nakal	59	53	66	40	20
4	Anak Jalanan	27	n/a	22	21	22
5	Wanita Rawan Sosial Ekonomi (KK)	3.654	4.287	4.264	4.223	4.208
6	Lanjut Usia Terlantar	3.651	4.964	5.204	5.165	5.295
7	Penyandang Cacat	4.364	4.899	5.046	5.046	4.590
8	Tuna Susila	29	28	28	26	n/a
9	Pengemis	24	n/a	2	1	1
10	Gelandangan	17	n/a	18	16	14
11	Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan	278	349	409	40	200
12	Korban penyalahgunaan Napza	13	16	17	12	38
13	Keluarga Fakir Miskin/RTM (KK)	45.187	47.908	51.375	51.384	49.231

14	Keluarga Tinggal di Rumah Tak Layak Huni (KK)	6.873	9.001	9.131	9.131	5.882
15	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (KK)	66	66	74	82	79
16	Komunitas Adat Terpencil	-	-	-	-	-
17	Korban Bencana Alam (KK)	98	236	2.550	300	731
18	Korban Bencana Sosial (KK)	70	n/a	13	4	52
19	Pekerja Migran Terlantar/Bermasalah	24	n/a	22	21	21
20	Penyandang HIV/AIDS	n/a	n/a	12	13	11

Sumber Data: BPS- Buleleng dan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Berdasarkan tabel tersebut di atas, kondisi PMKS di Kabupaten Buleleng cenderung mengalami penurunan dan beberapa kategori mengalami kenaikan. Hal ini diakibatkan karena beberapa program dan kegiatan telah dilaksanakan dalam penanganan masalah sosial. Sehingga tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial dapat terwujud diantaranya meningkatkan kemampuan PMKS, Organisasi Sosial/ Panti Sosial dan memulihkan kehidupan sosial ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan pada dasarnya dapat mengurangi jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Pola penanganan tersebut dapat berupa Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Sosial, Bantuan Usaha Ekonomi Produktif dan Bantuan Perbaikan Gizi (sembako) bagi anak terlantar/anak balita terlantar, lanjut usia terlantar, keluarga miskin, penyandang cacat, wanita rawan sosial ekonomi, anak nakal, dan bantuan rumah tidak layak huni (bedah rumah), maupun pembinaan terhadap panti sosial/orsos guna meningkatkan pelayanannya. Dan untuk penanganan kepada eks para korban diberikan bimbingan, motivasi sosial dan keterampilan praktis sesuai dengan potensi keterampilan dasar yang dimiliki serta potensi daerah masing-masing seperti beternak babi/kambing/sapi dan seterusnya termasuk pemberian bahan bangunan
rumah.

Terhadap beberapa kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial mengalami kenaikan. Hal ini diakibatkan karena kondisi dan perkembangan globalisasi yang disalahgunakan seperti bertambahnya kasus Penyandang HIV/AIDS. Namun

demikian semua bentuk permasalahan sosial tersebut di atas , telah ditangani dari tahun ke tahun secara berkelanjutan dan permasalahan yang ditangani tersebut menyebar di 9 kecamatan wilayah Kabupaten Buleleng.

Perkembangan jumlah panti sosial baik yang mengasuh anak-anak maupun lanjut usia (jompo) tahun 2012-2016 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 128
Jumlah Panti Asuhan dan Penghuni Panti Tahun 2011 - 2015

No.	Tahun	Jumlah Panti Asuhan	Jumlah Penghuni
1.	2011	19	8
2.	2012	20	9
3.	2013	20	8
4.	2014	20	8
5.	2015	20	8

Sumber Data: Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Data tabel tersebut di atas terdapat peningkatan jumlah panti yang semula terdapat 19 Panti pada tahun 2011 menjadi 20 Panti tahun 2015. Hal tersebut berdampak pada jumlah penyandang masalah sosial yang dapat ditampung menjadi lebih banyak sesuai dengan perkembangan populasi permasalahan anak terlantar/lanjut usia terlantar serta kepedulian masyarakat terhadap penanganan masalah sosial.

Hasil penyelenggaraan urusan kesejahteraan sosial tersebut di atas dicapai melalui pelaksanaan 49 program dan 75 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp45.292.322.253,00 dan terealisasi sebesar Rp35.441.492.607 atau 95,44%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 129
Anggaran dan Realisasi Urusan Sosial
Tahun 2012-2017

No.	Uraian	Tahu					
		2012	2013	2014	2015	2016	201
1	Jumlah Program	13	12	12	11	13	1
2	Jumlah Kegiatan	38	42	43	39	43	4

3	Anggaran (Rp)	3.160.175.000	4.288.170.665,02	5.924.209.000	4.336.424.100	19.390.392.380	8.192.951.108
4	Realisasi (Rp)	2.965.797.620	4.201.007.491	5.839.730.695	3.195.219.000	19.239.737.801	-

Sumber Data : Dinas Sosial Kab. Buleleng

Dari jumlah anggaran tersebut, capaian realisasi pelaksanaan program dan keguiatan selama periode RPJMD 2012-2017, Capaian indikator kinerja urusan sosial dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 130
Rekapitulasi capaian Kinerja Urusan Sosial RPJMD
Tahun 2012-2017

NO	Program / Kegiatan	Target RPJMD	Capaian RPJMD	Persentase
1.	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin,KAT dan PMKS lainnya**			
1.1	Meningkatnya Jumlah dan keterampilan petugas pendamping sosial pemberdayaan FM, KAT dan PMKS lainnya.	770 Orang	813 Orang	105,5 %
1.2	Meningkatnya Jumlah Fakir Miskin yang terampil dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif melalui KUBE.	340 Orang	340 Orang	100 %
1.3	Meningkatnya sarana / prasarana perumahan bagi keluarga miskin berupa penerimaan bahan bangunan rumah .	485 KK	526 KK	108 %
2	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**			
2.1	Jumlah sasaran penanganan tanggap darurat dan kejadian luar biasa (KLB)	1.750 Orang	2.263 Orang	129 %
2.2	Jumlah sasaran pelayanan dan perlindungan sosial korban hukum, eksploitasi dan perdagangan anak dan perempuan	1.390 Orang	1.380 Orang	99,28 %
2.3	Jumlah sasaran pelayanan anak terlantar (anak jalanan, anak nakal, anak cacat dan anak putus sekolah) mendapat pelatihan keterampilan kerja .	90 anak	80 anak	88,90 %
3.	**Program pembinaan Anak Terlantar**			
3.1	Persentase cakupan jumlah anak terlantar mendapat bantuan dan pembinaan/keterampilan	1.150 anak	2.977 anak	258,80 %

4.	**Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma**			
4.1	Meningkatnya kemandirian danketerampilan penyandang cacat dalam berusaha	100 Orang	105 Orang	105 %
4.2	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan dasar penyandang cacat dan eks trauma	1.077 Orang	1.442 Orang	133,8 %

Sumber :Dinas Sosial

Capaian indikator kinerja urusan sosial setiap tahun secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikuit :

Tabel 131
Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial
Sesuai RPJMD Tahun 2012-2017

Indikator Kinerja (*outcome*	Satuan	TAHUN										
		2012	2013		2014		2015		2016		2017	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Program Pemberdayaan Fakir Miskin,KAT dan PMKS lainnya												
- Meningkatnya Jumlah dan keterampilan petugas pendamping sosial pemberdayaan FM, KAT dan PMKS lainnya	orang	30	148	148	148	165	148	148	148	184	148	148
- Meningkatnya Jumlah Fakir Miskin yang terampil dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif	orang	0	30	0	50	0	70	70	90	100	100	170
- Meningkatnya sarana / prasarana perumahan bagi keluarga miskin berupa penerimaan bahan bangunan	KK	310	35	48	50	78	75	6	100	26	125	58
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial												
- Jumlah sasaran penanganan tanggap darurat dan kejadian	KK	300	350	300	400	413	400	400	400	500	400	350
- Jumlah sasaran pelayanan dan perlindungan sosial korban hukum, eksploitasi dan perdagangan	orang	25	175	175	200	225	225	225	250	180	575	550

- Jumlah sasaran pelayanan anak terlantar (anak jalanan, anak nakal, anak cacat dan anak putus sekolah) mendapat pelatihan keterampilan kerja	Orang anak nakal	10	10	10	15	10	20	20	20	10	20	20
Program pembinaan Anak Terlantar												
- Persentase cakupan jumlah anak terlantar mendapat bantuan dan pembinaan/ket	anak	212	220	220	552	220	660	820	792	800	950	705
Program Pembinaan Para												
Penyandang Cacat dan Trauma												
- Meningkatnya kemandirian dan keterampilan penyandang cacat dalam	Oran	10	10	10	20	15	20	20	20	20	20	30
- Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan dasar penyandang cacat	oran g	192	127	151	200	138	200	228	200	178	200	555

Program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Urusan Sosial pada Tahun 2016 meliputi ;

1) **Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :
   - Peningkatan Kemampuan (capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya .
   - Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin.
   - Pengadaan Sarana Prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin.

2) **Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**, dengan kegiatan yang dilaksanakan
   - Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak.
   - Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi Penyandang masalah kesejahteraan sosial.
   - Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal.
   - Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.
   - Pembinaan dan bimbingan motivasi kepada Lansia di Luar Panti.

3) **Program Pembinaan Anak Terlantar**, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah yang dijabarkan melalui kegiatan Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar.
4) **Program pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma**, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :
   - Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma.
   - Pendayagunaan penyandang cacat dan eks trauma.
5) **Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo**, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo dan pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo.
6) **Program Pembinaan Eks penyandang penyakit sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya**, dengan kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
   - Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial.
   - Pemberdayaan eks penyandang Penyakit Sosial.
7) **Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial,** dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :
   - Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha.
   - Peningkatan Jejaring kerjasama pelaku-peaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat.
   - Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan sosial masyarakat.
   - Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial.
8) **Program pelestarian nilai Kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial**, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :
   - Penanaman Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial.
   - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Monumen / Tugu Perjuangan.
   - Pemeliharaan Monumen Perjuangan Tri Yudha Sakti.

Pembangunan di bidang sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Berlokasi di Jalan Veteran Nomor 7 Kelurahan Paket Agung, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali 81117,(0362) 21248. Dengan struktur organisasi yang terdiri atas : Kepala Dinas (Eselon II/b), Sekretaris Dinas (Eselon III/a), Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Kepala Bidang Pelayanan Sosial dan Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial (Eselon III/b), Kepala Seksi Penyuluhan dan Sumbangan sosial, Kepala Seksi Pencegahan Rehabilitasi Penyandang Cacat, Kepala Seksi Kesejahteraan Anak dan Keluarga, Kepala Seksi

Perlindungan Sosial, Kepala Seksi Pemberdayaan Karang taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat, Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Kepala Seksi Pembinaan Organisasi Sosial, Kepala Seksi Kepahlawanan dan Monumen Perjuangan, Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin, Kepala Seksi Rehabilitasi Anak-Anak Nakal dan Korban Nafza, Kepala Seksi Kesejahteraan Lanjut Usia, Kepala Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial, Kesubbag Perencanaan, Kasubbag Umum, Kasubbag Keuangan, Kepala UPTD Monumen Tri Yudha Sakti (Eselon IV/a) dan Kepala Tata Usaha UPTD Monumen Tri Yudha Sakti (Eselon IV/b).

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng berjumlah 35 orang. **Dengan pangkat dan golongan terdiri atas** : Pembina Utama Muda (IV/c) ; 1 orang, Pembina Tk.I (IV/b) ; 1 orang, Pembina (IV/a) ; 7 orang, Penata Tk.I (III/d) ; 8 orang, Penata (III/c) ; 5 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) ; 2 orang, Penata Muda (III/a) ; 2 orang, Pengatur (II/c) ; 1 orang, Pengatur Muda Tk.I ; 7 orang, Juru Tk.I (I/d) ; 1 orang. **Dengan kualifikasi pendidikan meliputi** : Strata 2 (S2) ; 4 orang, Strata 1/ Diploma 4 (S1/D4) ; 13 orang, Diploma 3 (D3) ; 2 orang, SMA/SMK/Mts ; 15 orang, SMP/MI ; 1 orang. **Jumlah Pejabat Struktural** : Eselon II/b ; 1 pejabat, Eselon III/a ; 1 pejabat, Eselon III/b ; 4 pejabat, Eselon IV/a ; 16 pejabat, Eselon IV/b ; 1 pejabat. Tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Sosial pada Tahun 2016 adalah Mengingat banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang masih tersebar di seluruh Desa/ Kelurahan yang belum dapat tertangani sedangkan dana yang tersedia sangat terbatas, maka dari tahun ke tahun sangat dibutuhkan anggaran yang cukup guna menangani permasalahan tersebut diatas secara berkelanjutan. Kemudian belum memiliki rumah singgah /shelter yang berfungsi untuk memberikan pelayanan , advokasi , recovery social dan protecsi social terhadap korban Bencana Sosial, Pembinaan bagi Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) ,WTS, Orang Terlantar Luar Daerah , Korban Eksploitasi perdagangan anak dan perempuan dan Korban Kekerasan dalam rumah tangga dan permasalahan sosial secara psikologis. Kurangnya SDM yang memiliki keahlian dibidang Informasi dan Teknologi, di bidang Ekonomi dan dibidang Pendidikan Pekerja Sosial serta kurangnya sarana kendaraan roda 4 untuk operasional kegiatan.

Solusi yang telah ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah : Mengajukan usulan penambahan anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahunan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Buleleng dan mengadakan koordinasi yang baik dengan instansi terkait guna memperlancar tugas-tugas di bidang Kesejahteraan Sosial dengan Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian, BPBD, RSUD, PMI, Kepolisian, Kodim, Pemuda Panca Marga (P2M), Pramuka dan lain-lain (dalam rangka menangani masalah Tuna Sosial dan penanggulangan bencana) serta dengan BKD untuk mengusulkan penambahan pegawai sesuai dengan kriteria yang diharapkan serta usulan penambahan anggaran untuk pengadaan kendaraan operasional roda 4 (empat).

BAB IV
TUGAS PEMBANTUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan roda pemerintahannya. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program dan kegiatan dekonsentrasi/tugas pembantuan yang didanai dari APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai dari APBD.

Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Sedangkan penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan.

Penyelenggaraan kedua asas tersebut memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah harus didanai dari APBN melalui Kementerian/Lembaga.

a. Tugas Pembantuan Yang Diterima

Dana Tugas Pembantuan (TP) yang diterima dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng selama kurun waktu 2012-2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 170
Perkembangan Anggaran Tugas Pembantuan yang Diterima Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017

No	Tahun	Jumlah Anggaran TP (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
1	2012	9.409.215.000	9.239.348.955	169.866.045
2	2013	15.984.785.000	15.590.430.175	394.354.825
3	2014	20.234.195.000	14.399.707.700	5.834.487.300
4	2015	62.259.335.000	49.382.876.045	12.876.458.955
5	2016	19.536.335.000	15.483.906.143	4.052.428.857
6	2017 (Tw.I)	6.630.474.000		-
	Jumlah Total	**134.054.339.00**	**104.096.269.01**	**23.327.595.98**

Sumber : Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng (diolah)

Dana tugas pembantuan yang diterima Pemerintah Kabupaten Buleleng selama lima tahun anggaran berfluktuatif, seiring dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Pelaksanaan tugas pembantuan di daerah dilaksanakan secara langsung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerima alokasi anggaran tugas pembantuan selama tahun 2012-2017 antara lain :

Tabel 171
Pagu Anggaran dan Realisasi Dana Tugas Pembantuan per SKPD Penerima Tahun 2012-2016

No	SKPD PENERIMA	PAGU	REALISASI (Rp	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4*	*(5)*
1	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	2.411.940.000,00	2.387.235.000,00	98,98
2	Dinas Pertanian dan Peternakan	26.800.196.000,00	15.939.156.724,00	68.28
3	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3.998.035.000,00	2.827.874.834,00	70,73
4	Dinas Kesehatan	7.773.769.000,00	7.705.365.650,00	99,12
5	RSUD Kabupaten	64.979.400.000,00	50.199.958.487,	77,26
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	8.686.201.000,00	7.842.019.403,00	90,28
7	Dinas Tenaga Kerja dan	4.276.879.000,00	4.168.619.175,00	97,47

8	Dinas Koperasi, Perdagangan dan	12.477.919.000,00	8.989.502.000,00	72,04
9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.000.000.000,00	222,202,200,00	11,11
10	Dinas Sosial	650.000.000,00	634.293.945,00	97,58

Sumber : Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng (diolah)

Berdasarkan data tersebut diatas, maka terdapat 9 (sembilan) perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng yang melaksanakan Tugas Pembantuan pada kurun waktu 2012-2017. Keberadaan dana TP dimaksud sangat tergantung pada prioritas Pemerintah Pusat melalui kementerian masing-masing, sehingga tidak menutup kemungkinan pada tahun anggaran tertentu, Satuan Kerja (satker) yang menerima dana TP tahun sebelumnya otomatis akan mendapatkan sumber dana yang sama pada tahun berikutnya.

Tahun 2012 Tugas Pembantuan yang diterima dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng adalah :

1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

URUSAN BERSAMA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN TAHUN 2012.

A. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan Urusan Bersama (UB) program PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2010 adalah :

- Undang-undang Nmor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga;
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- Keputusan Prsiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
- Keputusan Presien Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahaannya;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemeriontah Pusat;

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.05/2007 tentang bagan Akun Standar;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Departemen Dalam Negeri.

B. Instansi Pemberi Urusan Bersama

Instansi Pemberi Urusan Bersama (UB) adalah Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui dana APBN.

C. Pogram dan Kegiatan

Program PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) tahun 2012, terdiri atas 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan, yaitu :

- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

  Sasaran program ini adalah Peningkatan Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan berbasis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

  Untuk mencapai sasaran program tersebut ditetapkan kegiatan. Yaitu :

  Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM Peredesaan dengan Kecamatan, ddengan sasaran yang ingin dicapai adalah Meninatnya peran dan partisiapasi masyarakat dan peemrintahan lokal dalam Program Nasional Pemberdayaan masyarakat Perdesaan.

  Adapun indikator Keluaran Sub Kegiatan:

  - Kelancaran Administrasi Kegiatan selama 12 bulan;
  - Terlaksananya Kegiatan semiloka DPRD, SKPD dan Pelatihan bagi Aparat Pemerintah Daerah, dengan output sebanyak 3 laporan
  - Terlaksananya pemberian Bantuan Langsung Masyarakat bagi masyarakat miskin di Perdesaan untuk Peningkatan Usaha Produktif, pembangunan Sarana/Prasarana Dasar, Pendidikan dan Kesehatan sebanyak 8 paket (8 kecamatan).

D. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan di Kabupaten Buleleng Tahun 2012, Melaksanakan Kebijakan Optimalisasi dan Pengintergrasian. Untuk Tahap Perencanaan yang dimulai dengan Musyawarah antar Desa Sosialisasi Bulan Januari 2012 dan dilanjutkan ketahapan berikutnya dan tahapan terakhir dalam proses Perencanaan adalah Musyawarah Desa Informasi Hasil MAD Penetapan usulan dilaksanakan minggu ke empat. Program PNPM-MP di Kabupaten Buleleng terdiri dari delapan kecamatan dan satu kecamatan yakni Kecamatan Buleleng mendapatkan program P2KP. Untuk tahun 2012 jumlah desa yang yang berpartisipasi adalah 119 desa yaitu:

1. Kecamatan Tejakula terdiri dari 10 desa;
2. Kecamatan Kubutambahan terdiri dari 15 desa;
3. Kecamatan Sawan Terdiri dari 14 desa;
4. Kecamatan Sukasada terdiri dari 15 desa;
5. Kecamatan banjar terdiri dari 17 desa;
6. Kecamatan Busungbiu terdiri dari 15 desa;
7. Kecamatan Seririt terdiri dari 21 desa;
8. Kecamatan Gerokgak terdiri dari 14 desa;

Jenis dan volume serta dana kegiatan yang dibiayai dapat dilihat dalam lampiran laporan ini.

E. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan.

Pendanaan program PNPM-MP tahun 2012 merupakan kegiatan urusan Bersama sehingga sumber dana tidak hanya bersumber dari dana APBN akan tetapi juga bersumber dari dana APBD Provinsi dan APBD Kabupaten sebagai dana sharing (cost sharing) sebesar 35,6% total dananya dalah berjumlah Rp. 14.635.531.000,-

F. SKPD yang Melaksanakan.

Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buleleng yang memfasilitasi Program PNPM-MP tahun 2012, sedangkan kecamatan-kecamatan yang mendapat program membantu mengkordinasikan serta memfasilitasi pelaksanaan PNPM-MP.

G. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

NO	URAIAN JABATAN	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Fasilitator Kabupaten : 1.Fasilitator Pemberdayaan 2.Fasiliator Teknik 3.Fasilitator Keuangan 4.Operator Komputer	 S1 S1 S1 D3	 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang
2	Fasiliator Kecamatan ; 1. Fasilitator Pemberdayaan 2. Fasilitaor Teknik	 S1 S1	 8 orang 8 orang
3	Unit Pelaksana Kegiatan (UPK)	SLTA S1	17 orang 10 orang
	JUMLAH TOTAL		47 Orang

H. Kondisi Sarana Prasarana yang dipergunakan.

No	Uraian	Jumlah	Satuan
1	Komputer dan Printer Fasilitator Kabupaten	1	Unit
2	Lemari Arsip fasilitator Kabupaten	1	Unit
3	Lemari Arsip Fasilitator Kecamatan	9	Unit
4	Meja Fasilitator Kabupaten	2	unit
5	Meja Fasilitator Kecamatan	3	Unit
6	Kursi Fasilitator Kabupaten	4	unit
7	Kursi Fasilitator Kecamatan	27	Unit

I. Permasalahan dan Solusi.

Masalah yang paling menonjol pada Program PNPM-MP di Kabupaten Buleleng adalah permasalahan yang ada di Kecamatan Gerokgak dan menjadi matrik nasional adalah adanya penyalahgunaan dana di Desa Sumberkelampok Temuan awal senilai Rp. 22.850.000,- yang di gelapkan oleh ketua kelompoknya a/n Maysaroh, banyak tindakan yang dilakukan oleh UPK Kecamatan Gerokgak seperti memberikan Sosialisasi dan SP untuk

pembayaran tunggakan, dan adanya penyitaan barang yang dilakukan oleh UPK Kecamatan Gerokgak dan Kepala Desa.

Solusi atas permasalahan yang ada adalah dengan terus mengupayakan pendekatan melalui Fasilitator Kecamatan dan UPK sehingga adanya pembayaran yang bisa mengurangi tunggakan yang ditemukan dan ada pertanggungjawaban dari maysaroh sendiri.

J. Hal lain yang dianggap perlu dilaporkan.

Berdasarkan RKTL yang telah direncanakan pada tahun 2012 dapat disimpulkan beberapa hal yang belum dapat diselesaikan antara lain :

1. Pekerjaan fisik / infrastruktur di 9 kecamatan banyak yg belum ada gambar perencanaannya ;
2. Staretegi normal sudah dilakukan MAD Prioritas dan Penyempurnaan desain dan RAB;
3. Di 9 kecamatan banyak ada permasalahan untuk SPP yang permasalahannya sangat bermacam-macam namun sudah ada tindakan dari UPK Kecamatan untuk penanganannya;
4. RPJMDes belum semua penyempurnaannya dapat diselesaikan.

2. Bidang Pariwisata

A. Dasar hukum

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang APBN TA. 2012.
- Keputusan Presiden Rincian ABPP Tahun 2012 dan SPRKAKL NO.STAP-040.05.08.0.AG/2012 dan DNA NO.22/040.05/2012.
- DIPA Nomor : 0299/040-05.4.01/20/2012.

B. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Jendral Pengembangan Destinasi Pariwisata.

C. Program dan Kegiatan.

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata

D. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Program ini dialokasikan melalui APBN, realisasi dan hasil kegiatan pengembangan daya tarik wisata berupa tersedianya dermaga

tambat kapal wisata di daya tarik wisata pantai lovina, dengan anggaran sebesar Rp. 1.240.175.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.137.550.800,- atau 91,73% dan realisasi fisik 100%.

E. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan.
Sumber anggaran dari APBN dengan jumlah anggaran yang diguanakan atau yang terealisasi sebesar Rp. 1.137.550.800,-

F. SKPD Yang Melaksanakan.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng

G. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.
Dalam pelaksanaan program pengembangan destinasi pariwisata pada kegiatan pengembangan daya tarik wisata melibatkan 14 pegawai, berikut rinciannya :

No	Nama / NIP	Pangkat dan Golongan	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan
1.	Drs. I Ketut Warkadea, M.Si NIP. 19640720 198603 1 023	Pembina, (IV/a)	Kuasa Pengguna Anggaran	S2
2.	Ni Nengah Susantini, SS NIP.19650227 200003 2 003	Penata Tk.I (III/d)	Pejabat Pembuat Komitmen	S1
3.	I Nyoman Agus Swadarma Adnyana, SST.Par NIP. 19810831 200902 1 001	Penata Muda, (III/a)	Pejabat Penandatangan SPM	D4
4.	Luh Juliarti NIP. 19730721 200701 2 013	Pengatur Muda (II/b)	Bendahara Pengeluaran	SMA
5.	Luh Meylin Swaryanthi, SST.Par NIP. 19750527 200902 2 001	Penata Muda, (III/a)	Staf Pengelola	D4
6	Made Pasmida, AP.Par.Bud NIP. 19771009 201001 1 012	Pengatur Muda (II/a)	Staf Pengelola	D1
7	Mukhlison, A.Md NIP. 19580630 198403 1 005	Penata Tk.I (III/d)	Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa	D3
8	Ketut Budiyasa, ST NIP. 19731108 200501 1 003	Penata, (III/c)	Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa	S1
9.	I Made Suwitra Yadnya, ST NIP. 19701029 199703 1 004	Penata Tk.I (III/d)	Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa	S1
10	I Ketut Mastapa NIP. 19770630 199903 1 008	Pengatur Muda (II/b)	Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa	SMA
11.	I Nyoman Budi Astika NIP. 19840520 200501 1 006	Pengatur Muda (II/b)	Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa	SMA
12.	Gede Arya Ciptana, S.Sos, M.Si NIP. 19730826 199903 1 007	Penata Tk.I (III/d)	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	S2
13.	Nyoman Dodi Irianto, S.Pd NIP. 19620908 198411 1 003	Pembina, (IV/a)	Panitia Pemeriksa	S1

			Barang/Jasa	
14.	Ir. Yudi Hartono NIP. 19690616 200312 1 005	Penata, (III/c)	Panitia Penerima Barang/Jasa	S1

H. Kondisi Sarana Prasarana Yang Digunakan.

Kondisi sarana prasarana yang digunakan dalam kegiatan pengembangan daya tarik wisata cukup memadai dan dalam kondisi baik.

I. Permasalahan dan Solusi.

Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan keterlambatan turunya DIPA dari pusat sehingga terbatasnya waktu pelaksanaan pekerjaan dan juga sarana penunjang berupa alat berat mengalami kendala kedatangan yang diakibatkan kurang koordinasinya dari pihak pelaksana pekerjaan.

Solusinya dipercepatnya pengesahan DIPA pada triwulan I.

3. Bidang Kehutanan

Kegiatan yang dibiayai melalaui anggaran pendapatan dan belanja negara melalui Kementerian Kehutanan yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Unda Anyar Nomor : 0363/029.04.2.01/20/2012 tanggal 9 Desember 2011. Untuk Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Buleleng anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 2.411.940.000,00 terealisasi sebanyak Rp 2.387.235.000,00 atau realisasi keuangan sebesar 98,98%. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ini dilaksanakan melalui program Rehabilitasi Hutan dan lahan yang terdiri dari 4 kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Kebun Bibit Rakyat adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan bibit berkualitas sebanyak 750.000 batang/30 kelompok KBR realisasi fisik sebesar 100 %, serta tertanamnya bibit hasil KBR sebanyak 750.000 batang, realisasi fisik sebesar 100%, jumlah dana yang dialokasikan sebesar Rp. 2.062.500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.062.500.000,00 realisasi keuangan sebesar 100%
- Kegiatan Penanaman Seremonial dalam rangka Hari Menanam Pohon Indonesia dengan hasil kegiatan terlaksananya Kegiatan Penanaman seremonial dalam rangka hari menanan pohon indonesia sebanyak 1 paket realisasi fisik sebesar 100 %, jumlah

dana yang dialokasikan sebesar Rp. 25.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 25.000.000,00 atau realisasi keuangan sebesar 100%.

- Kegiatan Pemeliharaan I Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Sempadan Pantai dengan hasil kegiatan terpeliharanya kegiatan rehabilitasi kawasan sempadan pantai seluas 50 Ha, realisasi fisiknya sebesar 100 %, jumlah dana yang dialokasikan sebesar Rp. 35.330.000,00 terealisasi sebesar Rp. 35.330.000,00 atau realisasi anggaran sebesar 100%.
- Kegiatan Pendukung dengan hasil kegiatan terlaksananya kegiatan pembangunan kebun bibit rakyat 1 paket terealisasi sebesar 100%, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 289.110.000,00, terealisasi sebesar Rp. 264.405.000 atau realisasi keuangan sebesar 91,45%.

4. Bidang Perikanan

A. Dasar hukum
   - DIPA Nomor : 0620/032/07.4.01/20/2012 tanggal 5 Desember 2011 untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan usaha
   - DIPA Nomor : 5085/032-03.4.01/20/2012 untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penagkap ikan dan pengawakan kapal perikanan.

B. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

   Pemberi tugas dari kegiatan yang dananya bersumber dari APBN ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan RI melalui Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (KP3K) serta Ditjen Perikanan Tangkap.

C. Program dan Kegiatan
   - Program pengembangan sumber daya laut, pesisir dan pulau – pulau kecil, yang dijabarkan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan usaha atau pemberdayaan usaha garam rakyat (PUGAR).
   - Program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap, melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkap ikan dan pengawakan kapal perikanan.

D. Realisasi Program dan Kegiatan.

Melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan hasil – hasil yang dicapai yaitu :

- Terwujudnya bantuan langsung kepada 21 kelompok usaha garam rakyat di Kabupaten Buleleng.
- Terwujudnya pengadaan kapal 30GT sebanyak 1 unit yang dihibahkan kepada kelompok nelayan Sumber Sari, Desa Sumberkima Kewcamatan Gerokgak.

E. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Dipergunakan.

Anggaran yang dipergunakan bersumber dari APBN yang direalisasikan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.913.300.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.812.333.265,- atau mencapai 96,53%.

F. SKPD Yang melaksanakan Tugas Pembantuan.

Dinas Perikanan dan Kelautan kabupaten Buleleng

G. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, Golongan, Pejabat Setruktural dan Fungsional.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng didukung oleh sumber daya de ngan rincian ; Jumlah Pegawai 80 orang (PNS), Golongan IV; 9 orang, III; 51 orang, II; 19 orang, I; 1 orang, Pejabat setruktural 27 pejabat ; Eselon II ; 1 pejabat, eselon III; 5 pejabat, eselon IV; 21 pejabat, sedangkan pejabat fungsional 13 orang.

H. Sarana dan Prasarana.

Mobil dinas 4 unit, Sepeda motor 65 unit, Komputer 19 unit, Laptop/ noote book 9 unit, Mesin ketik 2 unit, Infokus 1 unit, Layar 1 unit, Kamera 10 unit, Handycam 1 unit, Kapal dan perlengkapannya 4 unit, Kolam 30 unit.

I. Permasalahan dan Solusi

Kendala yang dihadapai dalam penyelenggaraan kegiatan Tugas Pembantuan adalah sering terjadinya kesalahan pada kode akun yang tidak sesuai dengan kode belanja sehingga memerlukan perubahan atau perbaikan.

Upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan tetap mengadakan koordinasi dengan Kantor wilayah XX Perbendaharaan Denpasar.

Tahun 2013 Tugas Pembantuan yang diterima dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng adalah :

1. Bidang Perikanan dan Kelautan.

a. Dasar Hukum Tugas Pembantuan.
   DIPA Nomor : 032-07.4.229175/2013, Tanggal 5 Desember 2012 untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha.

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.
   Pemberi tugas dari kegiatan yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan (TP) yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dari Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (KP3K), dengan harapan masyarakat nelayan ataupun pembudidaya dapat meningkatkan produktivitas usahanya. Dengan demikian pendapatan mereka dapat meningkatkan .

c. Program Dan Kegiatan.
   Program Pengembangan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil.
   Melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha atau Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR).

d. Realisasi Program Dan Kegiatan.
   Program Pengembangan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha atau Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), outcomenya adalah terwujudnya bantuan langsung masyarakat (BLM) kepada 35 kelompok masyarakat pesisir/petambak garam. Adapun anggarannya sebesar Rp.1.413.300.000,-, Realisasi fisiknya mencapai 100,00% dan realisasi keuangannya sebesar Rp.1.357.369.655,- Kegiatan PUGAR ini berupa bantuan langsung masyarakat (BLM) dengan nilai BLM Rp. 825.000.000,-.

e. Sumber Dan Jumlah anggaran Yang Digunakan.
   Anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan Tugas Pembantuan (TP) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI bersumber dari APBN, dengan jumlah total anggaran yang diperoleh sebesar Rp. 1.189.300.000,- terealisasi sebesar Rp.1.182.709.600,- atau mencapai 99,45%. Dari dana Tugas Pembantuan (TP) terdapat 1 program dan 1 kegiatan yaitu

Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil. Prrogram ini dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan usaha dan Pemberdayaan Masyarakat atau Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat dengan anggaran sebesar Rp. 1.189.300.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp.1.182.709.600,- atau mencapai 99.45%, dan realisasi fisik mencapai 100,00% sisa anggaran Rp. 6.590.400,-. Hasil kegiatan adalah tersalurnya Bantuan langsung masyarakat (BLM) kepada 35 kelompok usaha garam rakyat di kabupaten Buleleng.

f. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan.
   Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng.
g. Jumlah Pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat golongan, jumlah pejabat struktural**.**
   Pegawai Negeri Sipil : 70 orang ; Pegawai Honor Daerah / Pegawai Kontrak : 51 orang
   Tingkat Pendidikan : S2 : 2 orang ; S1: 30 orang ; Diploma III: 5 orang; SMA : 32 orang ; SMP : 1 orang ; SD : 0 orang ; Golongan : IV: 8 orang ; III : 44 orang ; II : 17 orang ; I : 1 orang ; Pejabat Setruktural : 25 orang (Eselon II : 1 orang ; Eselon III : 5 orang ; Eselon IV : 20 orang) ; Pejabat Fungsional : 16 orang ;
h. Sarana Dan Prasarana.
   Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang ada di Dinas Perikanan dan Kelauatan Kabupaten Buleleng sudah cukup memadai. Sarana dan prasarana tersebut diantaranya :
   Mobil dinas 4 unit, Sepeda motor 63 unit, Komputer 21 unit, Laptop/ noote book 21 unit, Mesin ketik 2 unit, Infokus 1 unit, Layar 1 unit, Kamera 12 unit, Handycam 1 unit, Almari 34 unit, Brankas 7 unit, filling kabinet 21 unit, meja + kursi kerja 389 unit, AC 22 unit, Printer 28 unit, Kapal dan perlengkapannya 6 unit, Komputer 2 unit, CPU 4 unit, Monitor 4 unit, UPS 7 unit, Hardisk Eksternal 500 GB 2 unit, HT 16 unit, Tabung O2 2 unit, Kipas angin 3 unit, Coldstorage dan Icemaker 1 unit, Alat bengkel dan ukur 116 bh, alat pertanian/perikanan 182 unit, alat laboratorium perikanan 16 bh, bangunan gedung 74 unit, Jalan dan jembatan/dermaga 4 unit, bangunan air/irigasi/kolam 24 unit, Instalasi listrik 14 unit, jaringan air minum 3 unit, Induk Ikan 892 Kg.
i. Permasalahan Dan Solusi.

Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan kegiatan Tugas Pembantuan sering terjadinya kesalahan pada kode akun yang tidak sesuai dengan kode belanja, sehingga perlu perubahan/perbaikan. Upaya untuk mengatasinya dengan tetap berkoordinasi dengan Kantor Wilayah XX Perbendaharaan Denpasar.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan pemerintah dan pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Secara garis besar program penanggulangan kemiskinan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu program penanggulangan kemiskinan yang bersifat bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan ekonomi mikro/kecil.

Penanggulangan kemiskinan merupakan agenda pokok pembangunan Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagaimana termuat pada RPJMD Tahun 2012-2017. Pada RPJMD Tahun 2012-2017 dirancang adanya penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buleleng sebesar 6,75% per-tahun. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Buleleng sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat telah menunjukkan hasil nyata dan masyarakat telah banyak merasakan hasil/manfaat dari PNPM Mandiri Perdesaan. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dengan subyek masyarakat perdesaan terdiri dari 3 (tiga) komponen utama, yaitu; (a) Dana BLM untuk pembangunan sarana/prasarana infrastuktur perdesaan; (b) Dana BLM operasional untuk kegiatan perencanaan dan pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat; dan (c) pendampingan masyarakat yang dilaksanakan oleh fasilitator. PNPM Mandiri Perdesaan merupakan kegiatan urusan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan diperlukan sinergitas pelaksanaan program mulai dari perencanaan penganggaran /pendanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian program.

a. Dasar Hukum.

   Dasar hukum penyelenggaraan Urusan Bersama (UB) program PNPMMandiri Perdesaan Tahun 2013 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraTahun Anggaran 2014;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
17. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
18. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

19. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
20. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor3 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007Tahun 2007 tentang Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.07/2012Tahun 2012 tentang Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah Dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2013;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2013Tahun 2013 tentang Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah Dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2014;
28. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Departemen Dalam Negeri.

b. Pelaksana Kegiatan Urusan Bersama

Kegiatan urusan bersama yang dilaksanakan adalah urusan bersama untuk penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan antara Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Pelaksanaan kegiatan urusan bersama dimaksud dituangkan dalam Naskah Perjanjian Urusan Bersama (NPUB) antara Pemerintah dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng Nomor : NPUB-16-08/PNPM Mandiri Perdesaan/I/2013 tanggal 02 Januari 2013.

c. Pogram dan Kegiatan

Pelaksanan kegiatan urusan bersama Program Penanggulangan Kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2013 antara Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Buleleng, terdiri atas 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan, yaitu :Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; Kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat (PNPM).

d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Buleleng Tahun 2013melaksanakan Kebijakan Optimalisasi dan Pengintergrasian. Kebijakan optimalisasi dan pengintegrasian dimaksud bahwa tahapan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan terintegrasi dengan tahapan pelaksanaan pembangunan reguler, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi (rincian tahapan dan realisasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana terlampir). Cakupan Program PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Buleleng Tahun 2013 terdiri dari 8 (delapan) kecamatan inti dan 1 (satu) kecamatan fase out yakni Kecamatan Buleleng. Sedangkan kecamatan inti dan jumlah desa yang tercakup pada pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Buleleng Tahun 2013 adalag sebagai berikut :

1. Kecamatan Tejakula terdiri dari 10 desa;
2. Kecamatan Kubutambahan terdiri dari 15 desa;
3. Kecamatan Sawan Terdiri dari 14 desa;
4. Kecamatan Sukasada terdiri dari 15 desa;
5. Kecamatan banjar terdiri dari 17 desa;
6. Kecamatan Busungbiu terdiri dari 15 desa;
7. Kecamatan Seririt terdiri dari 21 desa;

8. Kecamatan Gerokgak terdiri dari 14 desa;

e. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan

Pendanaan program PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2013 merupakan kegiatan urusan bersama, sehingga sumber dana kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan tidak hanya bersumber dari dana APBN, akan tetapi juga bersumber dari dana APBD Provinsi dan APBD Kabupaten sebagai Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) dengan jumlah dana total sebesar Rp. 12.966.163.000

f. SKPD yang Melaksanakan.

Satker PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Buleleng TA. 2013 adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Buleleng yang memfasilitasi pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2013. Dalam pelaksanaannya pada BPMPD Kabupaten Buleleng di bentuk Perangkat Satuan Kerja BPMPD Kabupaten Buleleng ditetapkan oleh Kepala BPMPD Kabupaten Buleleng selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) PNPM Mandiri Kabupaten Buleleng TA. 2013. Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas operasional pembinaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan monitoring PNPM Mandiri Perdesaan di Tingkat Kabupaten Buleleng juga dibentuk Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Buleleng yang ditetapkan oleh Bupati Buleleng.

g. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan disamping berupa bantuan dana langsung kepada masyarakat, juga ada bantuan pembinaan dan pendampingan yang dilaksanakan oleh para fasilitator, baik fasilitator kabupaten maupun fasilitator kecamatan. Sedangkan dari segi pelaksana program di tingkat kecamatan dibentuk Unit Pengelola Kegiatan (UPK), sebagai ujung tombak pelaksana program PNPM Mandiri Perdesaan.

Adapun jumlah dan kualifikasi pendidikan Fasilitator Kabupaten, Fasilitator Kecamatan dan UPK pelaksana PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Buleleng TA. 203 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN JABATAN	PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5
1	Fasilitator Kabupaten : 1.Fasilitator Pemberdayaan	S1	1 orang	

	2.Fasiliator Teknik 3.Fasilitator Keuangan 4.Operator Komputer	S1 S1 D3	1 orang 1 orang 2 orang	
2	Fasiliator Kecamatan ; 3. Fasilitator Pemberdayaan 4. Fasilitaor Teknik	 S1 S1	 8 orang 8 orang	
3	Unit Pelaksana Kegiatan (UPK)	SLTA S1	17 orang 10 orang	
JUMLAH TOTAL			47 orang	

Sedangkan jumlah, kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan pegawai pada perangkat Satker BPMPD Kabupaten Buleleng adalah sebagai

berikut :

NO	URAIAN JABATAN	PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5
1	Kuasa Pengguna Anggaran	S2	1 Orang	
2	Pejabat Pembut Komitmen	S2	1 Orang	
3	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM	S1	1 Orang	
4.	Pejabat Pengadaan Barang	S1	1 Orang	
5.	Bendahara Pengeluaran	S1	1 Orang	
6	Pengelola Kegiatan Pelaksanaan SAI Pusat	SMA	1 Orang	
7	Staf Pengelola	S1 D3	1 Orang 1 Orang	
8	PJO Kecamatan	S1 D3 SMA	4 Orang 2 Orang 2 Orang	
Jumlah Total			16 orang	

h. Kondisi Sarana Prasarana yang dipergunakan

Untuk mendukung operasional pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan diperlukan sarana prasaran pendukung, baik untuk keperluan operasional kedinasan maupun admistrasi ketatausahaan kegiatan. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia untuk operasional fasilitatasi dan pendampingan program pada sekretariat Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah	Satuan
1	2	3
1. Komputer dan Printer Fasilitator Kab.	2	Unit
2. Lemari Arsip fasilitator Kabupaten	1	Unit
3 .Lemari Arsip Fasilitator Kecamatan	9	Unit
4. Meja Fasilitator Kabupaten	3	unit
5.Meja Fasilitator Kecamatan	3	Unit
6. Kursi Fasilitator Kabupaten	4	unit
7. Kursi Fasilitator Kecamatan	27	Unit

i. Permasalahan dan Solusi

Secara umum pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Buleleng TA.2013 sudah dapat berjalan sesuai dengan rencana dan target kegiatan yang telah ditetapkan, namun demikian pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulelng TA. 2013 juga tidak terlepas dari permasalahan sebagai dinamika pelaksanaan program. Adapun permasalahan-permasalahan yang menonjol pada Program PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

- Permasalahan penyimpangan dalam pengelolaan SPP dan tunggakan SPP pada UPK PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Buleleng. Permasalahan tersebut mengakibatkan penyerapan dan pemanfaatan dana SPP di masing-masing UPK menjadi tidak optimal.
- Keterbatasan kemampuan fasilitator dan pelaku program yang akan menyebabkan turunnya kualitas pengendalian terhadap pelaksanaan program sehingga berdampak langsung terhadap kinerja program. Hal tersebut ditandai dengan pencapaian progres kegiatan pada beberapa TPK yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum mampu menyelesaikan kegiatan fisik dan administrasi program.

Solusi atas permasalahan yang ada adalah dengan terus mengupayakan pendekatan dan koordinasi melalui para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan pada semua tingkatan. Untuk masalah SPP semua pelaku PNPM Mandiri Perdesaan utamanya di Tingkat Kecamatan dan Desa dengan dikoordinasikan oleh Fasilitator Kecamatan dan UPK untuk dapat menyelesaikan masalah tunggakan SPP dengan berbagai pendekatan, termasuk dengan

melibatkan para pihak di luar program. Untuk masalah progres penyelesaian kegiatan fisik dan administrasi pada Tingkat TPK telah dilakukan berbagai upaya, utamanya dengan koordinasi para pelaku di Tingkat Desa untuk dapat segera menuntaskan kegiatan fisik dan administrasi sesuai dengan proposal kegiatan yang telah ditetapkan.

j. Hal lain yang dianggap perlu dilaporkan

Berdasarkan RKTL yang telah direncanakan pada tahun 20134 dapat disimpulkan beberapa hal yang belum dapat diselesaikan antara lain :

- Pekerjaan fisik / infrastruktur dan administrasi pelaporan di 8 kecamatan sampai dengan akhir TA. 2013 masih ada beberapa desa yang belum tuntas, dan bahkan untuk penyelesaian administrasi banyak yang belum selesai walaupun kegiatan fisiknya sudah selesai ;
- Staretegi optimalisasi dan integrasi pelaksanaan program dalam perencanaan pembangunan regional belum dapat berjalan dengan optimal, utamanya dalam integrasi perencanaan program terintegrasi.
- Pada 9 UPK PNPM Mandiri Perdesaan masih ada permasalahan SPP yang belum dapat dituntaskan penyelesaiannya, namun demikian sudah ada upaya terkoordinatif dari para pelaku di Tingkat Kecamatan untuk penanganannya.
- Belum semua desa melakukan pendataan RTM sebagai upaya untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang ditandai dengan menurunnya jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM).

3. Bidang Kesehatan

Tahun 2013 Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, dengan dasar pelaksanaan tertuang melalui DIPA Nomor : 024-03.4.229/20013. Pelaksanaan tugas pembantuan ini dijabarkan melalui Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dengan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas. Pembiayaan program dan kegiatan dengan anggaran yang bersumber dari dana tugas pembantuan dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp.1.749.000.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.1.744.802.400,00 atau tercapai 99,76%. Dengan

hasil yang dapat dicapai adalah terwujudnya bantuan operasional kesehatan, alat kedokteran, kesehatan dan KB sebanyak 4 unit.

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Ditjen Bina Upaya Kesehatan, dengan dasar pelaksanaan DIPA Nomor : 024-04.4.229/172/2013. Pelaksanaan Tugas Pembantuan ini dituangkan dalam pelaksanaan program pembinaan upaya kesehatan dengan kegiatan yaitu dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan. Alokasi anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan tugas pembatuan ini bersumber melalui dana tugas pembantuan sebesar Rp. 12.500.000.000,00 yang berhasil direalisasikan sebesar Rp. 12.182.500.000,00 atau 97,46%.

4. **Bidang Tenaga Kerja**

   Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia melalui DIPA Nomor : 026-04.4.220/149/2013. Pelaksanaannya dituangkan melalui Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja yang dijabarkan melalui kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja. Pelaksanaan program dan kegiatan dibiayai melalui dana tugas pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 546.485.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 541.949.175,00 atau mencapai 99,17%. Hasil pelaksanaan tugas pembantuan ini adalah terlaksananya padat karya produktif pembuatan infrasetruktur badan jalan di Desa Bubunan dan Desa Tamblang.

Tahun 2014 Tugas Pembantuan yang diterima dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng adalah :

1. **Laporan Urusan Bersama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2014.**

   Bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan pemerintah dan pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Secara garis besar program penanggulangan kemiskinan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu program penanggulangan kemiskinan yang bersifat bantuan sosial, program

penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan ekonomi mikro/kecil.

Penanggulangan kemiskinan merupakan agenda pokok pembangunan Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagaimana termuat pada RPJMD Tahun 2012-2017. Pada RPJMD Tahun 2012-2017 dirancang adanya penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buleleng sebesar 6,75% per-tahun.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Buleleng sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat telah menunjukkan hasil nyata dan masyarakat telah banyak merasakan hasil/manfaat dari PNPM Mandiri Perdesaan.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dengan subyek masyarakat perdesaan terdiri dari 3 (tiga) komponen utama, yaitu; (a) Dana BLM untuk pembangunan sarana/prasarana infrastuktur perdesaan; (b) Dana BLM operasional untuk kegiatan perencanaan dan pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat; dan (c) pendampingan masyarakat yang dilaksanakan oleh fasilitator.

PNPM Mandiri Perdesaan merupakan kegiatan urusan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan diperlukan sinergitas pelaksanaan program mulai dari perencanaan, penganggaran/pendanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian program.

a. Dasar Hukum.

   Dasar hukum penyelenggaraan Urusan Bersama (UB) program PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2014 adalah :

   1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
   2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
   3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
17. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
18. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
20. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah Dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2013;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2013 Tahun 2013 tentang Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah Dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2014;
28. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Departemen Dalam Negeri.

b. Pelaksanaan Kegiatan Urusan Bersama.

Kegiatan urusan bersama yang dilaksanakan adalah urusan bersama untuk penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan antara Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Pelaksanaan kegiatan urusan bersama dimaksud dituangkan dalam Naskah Perjanjian Urusan Bersama (NPUB) antara Pemerintah dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng Nomor : NPUB-16-08/PNPM Mandiri Perdesaan/I/2014 dan Nomor 075/01.A/KS/2014 tanggal 02 Januari 2014.

c. Pogram dan Kegiatan

Pelaksanan kegiatan urusan bersama Program Penanggulangan Kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2014 antara

Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Buleleng, terdiri atas 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan, yaitu : Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; Kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat (PNPM).

d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Buleleng Tahun 2014 melaksanakan Kebijakan Optimalisasi dan Pengintergrasian. Kebijakan optimalisasi dan pengintegrasian dimaksud bahwa tahapan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan terintegrasi dengan tahapan pelaksanaan pembangunan reguler, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi (rincian tahapan dan realisasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana terlampir).

Cakupan Program PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Buleleng Tahun 2014 terdiri dari 8 (delapan) kecamatan inti dan 1 (satu) kecamatan fase out yakni Kecamatan Buleleng. Sedangkan kecamatan inti dan jumlah desa yang tercakup pada pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Buleleng Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Tejakula terdiri dari 10 desa
2. Kecamatan Kubutambahan terdiri dari 15 desa
3. Kecamatan Sawan Terdiri dari 14 desa
4. Kecamatan Sukasada terdiri dari 15 desa
5. Kecamatan banjar terdiri dari 17 desa
6. Kecamatan Busungbiu terdiri dari 15 desa
7. Kecamatan Seririt terdiri dari 21 desa
8. Kecamatan Gerokgak terdiri dari 14 desa

Pada Tahun Anggaran 2014 di Kabupaten Buleleng mendapatkan Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan MP3KI pada 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Gerokgak dan Kecamatan Kubutambahan.

e. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan

Pendanaan program PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2014 merupakan kegiatan urusan bersama, sehingga sumber dana kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan tidak hanya bersumber dari dana APBN, akan tetapi juga bersumber dari dana APBD Provinsi dan

APBD Kabupaten sebagai Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) dengan jumlah dana total sebesar Rp. 16.527.459.000,- Jumlah Dana Urusan Bersama dan Dana Daerah Urusan Bersama dapat dirinci sebagai berikut :

No.	APBN		BLM APBD Provinsi	BLM APBD Kabupaten	Jumlah
	Dana Operasional dan Pengawasan	BLM			
1	2	3	4	5	6=(2+3+4+5)
1	274.308.000	11.653.151.000	600.000.000	4.000.000.000	16.527.459.000

Sedangkan rincian lokasi dan alokasi dana per-kecamatan dan kabupaten kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Buleleng TA. 2014 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA KECAMATAN	BLM Kegiatan dan Ops Satker (Rp)	DOK PNPM-MPd (RP)	DOK PL UPK PNPM-MPd	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Tejakula	1.161.530.000	63.851.000	-	1.225.381.000
2.	Kubutambahan	3.959.675.000	68.855.000	12.000.000	4.040.530.000
3.	Sawan	1.538.585.000	70.523.000	12.000.000	1.621.108.000
4.	Sukasada	1.245.320.000	77.760.000	12.000.000	1.335.080.000
5.	Banjar	1.245.320.000	80.528.000	12.000.000	1.337.848.000
6.	Seririt	1.245.320.000	87.200.000	12.000.000	1.344.520.000
7.	Busungbiu	1.077.740.000	72.191.000	-	1.149.931.000
8.	Gerokgak	4.116.320.000	70.523.000	12.000.000	4.198.753.000
9.	Satker BPMPD	261.458.000	-	-	261.458.000
10.	Pengawasan Inspek.	12.850.000	-	-	12.850.000
Total		15.589.810.000	591.431.000	72.000.000	16.527.459.000

Realisasi anggaran PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

No.	APBN		BLM APBD PROVINSI Rp.	BLM APBD KABUPATEN Rp.	JUMLAH Rp.
	Dana Operasional dan Pengawasan Rp.	BLM Rp.			
1	2	3	4	5	6=(2+3+4+5)
1	256.478.557 (93.50)	11.653.151.000 (100.00)	600.000.000 (100.00)	4.000.000.000 (100.00)	16.509.629.557 (99.89)

f. SKPD yang Melaksanakan

Satker PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Buleleng TA. 2014 adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Buleleng yang memfasilitasi pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggran 2014. Dalam pelaksanaannya pada BPMPD Kabupaten Buleleng di bentuk Perangkat Satuan Kerja BPMPD Kabupaten Buleleng ditetapkan oleh Kepala BPMPD Kabupaten Buleleng selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) PNPM Mandiri Kabupaten Buleleng TA. 2014. Adapun susunan perangkat satker BPMPD Kabupaten Buleleng sebagai Pengelola Keuangan Urusan Bersama PNPM Mandiri Perdesaan Satker BPMPD Kabupaten Buleleng TA. 2014 (sebagaimana terlampir).

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas operasional pembinaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan monitoring PNPM Mandiri Perdesaan di Tingkat Kabupaten Buleleng juga dibentuk Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Buleleng yang ditetapkan oleh Bupati Buleleng (sebagaimana terlampir).

g. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan disamping berupa bantuan dana langsung kepada masyarakat, juga ada bantuan pembinaan dan pendampingan yang dilaksanakan oleh para fasilitator, baik fasilitator kabupaten maupun fasilitator kecamatan. Sedangkan dari segi pelaksana program di tingkat kecamatan dibentuk Unit Pengelola Kegiatan (UPK), sebagai ujung tombak pelaksana program PNPM Mandiri Perdesaan.

Adapun jumlah dan kualifikasi pendidikan Fasilitator Kabupaten, Fasilitator Kecamatan dan UPK pelaksana PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Buleleng TA. 2014 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN JABATAN	PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5
1	Fasilitator Kabupaten :			
	1.Fasilitator Pemberdayaan	S1	1 orang	
	2.Fasiliator Teknik	S1	1 orang	
	3.Fasilitator Keuangan	S1	1 orang	
	4.Operator Komputer	D3	2 orang	

2	Fasiliator Kecamatan ; 5. Fasilitator Pemberdayaan 6. Fasilitaor Teknik	 S1 S1	 8 orang 8 orang	
3	Unit Pelaksana Kegiatan (UPK)	SLTA S1	17 orang 10 orang	
JUMLAH TOTAL			47 orang	

Sedangkan jumlah, kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan pegawai pada perangkat Satker BPMPD Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut

No	Uraian Jabatan	Pendidikan	Jumlah	Ket
1	2	3	4	5
1	Kuasa Pengguna Anggaran	S2	1 Orang	
2	Pejabat Pembut Komitmen	S2	1 Orang	
3	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM	S1	1 Orang	
4.	Pejabat Pengadaan Barang	S1	1 Orang	
5.	Bendahara Pengeluaran	S1	1 Orang	
6	Pengelola Kegiatan Pelaksanaan SAI Pusat	SMA	1 Orang	
7	Staf Pengelola	S1 D3	1 Orang 1 Orang	
8	PJO Kecamatan	S1 D3 SMA	4 Orang 2 Orang 2 Orang	
Jumlah Total			16 orang	

h. Kondisi Sarana Prasarana yang dipergunakan

Untuk mendukung operasional pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan diperlukan sarana prasaran pendukung, baik untuk keperluan operasional kedinasan maupun admistrasi ketatausahaan kegiatan. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia untuk operasional fasilitatasi dan pendampingan program pada sekretariat Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah	Satuan
1	2	3
1. Komputer dan Printer Fasilitator Kabupaten	2	Unit
2. Lemari Arsip fasilitator Kabupaten	1	Unit
3 .Lemari Arsip Fasilitator Kecamatan	9	Unit

4. Meja Fasilitator Kabupaten	3	unit
5. Meja Fasilitator Kecamatan	3	Unit
6. Kursi Fasilitator Kabupaten	4	unit
7. Kursi Fasilitator Kecamatan	27	Unit

i. Permasalahan dan Solusi.

Secara umum pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Buleleng TA. 2014 sudah dapat berjalan sesuai dengan rencana dan target kegiatan yang telah ditetapkan, namun demikian pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bulelng TA. 2014 juga tidak terlepas dari permasalahan sebagai dinamika pelaksanaan program. Adapun permasalahan-permasalahan yang menonjol pada Program PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

- Permasalahan penyimpangan dalam pengelolaan SPP dan tunggakan SPP pada UPK PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Buleleng. Permasalahan tersebut mengakibatkan penyerapan dan pemanfaatan dana SPP di masing-masing UPK menjadi tidak optimal.
- Keterbatasan kemampuan fasilitator dan pelaku program yang akan menyebabkan turunnya kualitas pengendalian terhadap pelaksanaan program sehingga berdampak langsung terhadap kinerja program. Hal tersebut ditandai dengan pencapaian progres kegiatan pada beberapa TPK yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum mampu menyelesaikan kegiatan fisik dan administrasi program.

Solusi atas permasalahan yang ada adalah dengan terus mengupayakan pendekatan dan koordinasi melalui para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan pada semua tingkatan. Untuk masalah SPP semua pelaku PNPM Mandiri Perdesaan utamanya di Tingkat Kecamatan dan Desa dengan dikoordinasikan oleh Fasilitator Kecamatan dan UPK untuk dapat menyelesaikan masalah tunggakan SPP dengan berbagai pendekatan, termasuk dengan melibatkan para pihak di luar program. Untuk masalah progres penyelesaian kegiatan fisik dan administrasi pada Tingkat TPK telah dilakukan berbagai upaya, utamanya dengan koordinasi para pelaku di Tingkat Desa untuk dapat segera menuntaskan kegiatan fisik dan administrasi sesuai dengan proposal kegiatan yang telah ditetapkan.

j. Hal lain yang dianggap perlu dilaporkan

Berdasarkan RKTL yang telah direncanakan pada tahun 2014 dapat disimpulkan beberapa hal yang belum dapat diselesaikan antara lain :

- Pekerjaan fisik / infrastruktur dan administrasi pelaporan di 8 kecamatan sampai dengan akhir TA. 2014 masih ada beberapa desa yang belum tuntas, dan bahkan untuk penyelesaian administrasi banyak yang belum selesai walaupun kegiatan fisiknya sudah selesai ;
- Staretegi optimalisasi dan integrasi pelaksanaan program dalam perencanaan pembangunan regional belum dapat berjalan dengan optimal, utamanya dalam integrasi perencanaan program terintegrasi.
- Pada 9 UPK PNPM Mandiri Perdesaan masih ada permasalahan SPP yang belum dapat dituntaskan penyelesaiannya, namun demikian sudah ada upaya terkoordinatif dari para pelaku di Tingkat Kecamatan untuk penanganannya.
- Belum semua desa melakukan pendataan RTM sebagai upaya untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang ditandai dengan menurunnya jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM).

Faktor sukses pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan yang perlu dilestarikan dan diwariskan adalah :

- Alokasi dana langsung disalurkan ke kelompok masyarakat dengan cara sederhana dan terukur (dengan proposal yang diverifikasi, bertahap sesuai kemajuan pelaksanaan).
- Pendampingan intensif berjenjang, mengembangkan kapasitas kader desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
- Afirmatif terhadap kaum perempuan dan marjinal/miskin (memberi kesempatan untuk ikut dalam perencanaan dan pengambilan keputusan).
- Musyawarah desa yang partisipatif dilaksanakan untuk menentukan prioritas, pemilihan pengelola kegiatan dan forum pertanggungjawaban/serah terima hasil kegiatan.
- Sistem swakelola dilakukan utuk semua kegiatan skala desa dengan mengikutkan penduduk miskin, baik pembangunan infrastrukur, pengelolaan pelayanan publik maupun pengembangan ekonomi rumah tangga.

- Penciptaan lapangan kerja ditujukan untuk menyerap tenaga kerja lokal (desa) dengan prioritas warga miskin, sesuai dengan keterampilan dan kondisi desa.
- Transparasi dan akuntanbilitas menjadi prosedur baku pada setiap tahap kegiatan dengan sanksi yang tegas dan jelas.

2. Tugas Pembantuan Pada Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Buleleng.

a) Dasar Hukum : DIPA No. SP-018-08.4.229106/AG/2014, Tanggal 5 Desember 2013.
b) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan adalah Kementrian Pertanian Republik Indonesia.
c) Program – programnya meliputi :
   1. Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan, kegiatannya berupa Pengembangan Optimasi Lahan dan Pengembangan perluasan areal.
   2. Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian, kegiatannya berupa Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar dan kegiatan Penanaman kapas.
d) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan berupa Bantuan Sosial (Bansos) untuk pemberdayaan social dalam bentuk uang yang diberikan kepada :
   1) Subak Abian Gunung Sari, Desa Lemukih, Kecamatan Sawan sebesar Rp 102.500.000,-
   2) Kelompok Tani Toya Mantra, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu sebesarRp 102.500.000,-
   3) Kelompok Tani Kopi Arabika Amerta Sari, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar sebesar Rp 175.000.000,-
   4) Kelompok Tani Lingga Sari, Desa Silangjana, Kecamatan Sukasada sebesar Rp 210.000.000,-
   5) Subak Abian Gunung Sari, Desa Tegallinggah, Kecamatan Sukasada sebesarRp 175.000.000,-
   6) Kelompok Tani Uptiti Sari, Desa Lemukih, Kecamatan Sawan sebesar Rp 140.000.000,-

7) Kelompok Tani Tumpang Sari, Desa Munduk, Kecamatan Banjar sebesar Rp 350.000.000,-
8) Sisanya untuk administrasi satuan kerja (satker).

e) Sumber Anggaran APBN dan Jumlah Anggaran yang Digunakan Rp 1.330.000.000,- terealisasi sebesar Rp 1.328.450.000,- atau 99,88 %
f) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Buleleng
g) Jumlah Pegawai yang melaksanakan tugas pembantuan ini sebanyak 12 orang. Kualifikasi Pendidikannya meliputi : SMA 6 orang, Sarjana 6 orang; Pangkat dan Golongan sebagai berikut : Pembina (IV/a) 1 orang, Penata Tk. I (III/d) 3 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) 2 orang, Pengatur (II/c) 1 orang, Pengatur Muda Tk.I (II/b) 1 orang, Pengatur Muda (II/a) 4 orang.
h) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan : Lengkap.
i) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi meluputi :

- Nilai bansos tidak mencukupi untuk melaksanakan masing – masing kegiatan.
- Musim hujan datangnya terlambat, sehingga kegiatan yang terkait penanaman pelaksanaannya baru dapat dilaksanakan pada bulan Desember 2014 akhir.
- Untuk perluasan areal pengadaan saprodi berupa pupuk, harus pupuk organic.

Solusi dari masalah tersebut :

- Meningkatkan peran masyarakat / anggota kelompok tani penerima manfaat kegiatan untuk berswadaya lebih besar guna dapat terlaksananya kegiatan yang telah diberikan oleh pemerintah.
- Meningkatkan kegiatan gotong royong dengan cara tanpa mengambil upah sehingga upah dimaksud dapat dipakai untuk kegiatan fisik.
- Diusahakan agar pupuk yang dicari pupuk organic.

3. Tugas Pembantuan Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng.

a) Sebagai dasar pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan tahun 2014 adalah sebagai berikut :
   1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2014 dengan nomor SP DIPA-018.04.4.229034/2014 Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng (229034); tanggal 5 Desember 2014 dengan perubahan Revisi 04.
   2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Rincian Kertas Kerja Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng (229034) tahun anggaran 2014.
   3. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 5110/Kpts/KU.410/12/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas/Badan/ Kantor yang membidangi Hortikultura Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun anggaran 2014;
   4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/373/Horti/Distanak tentang Penetapan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Personalia Pengelola Anggaran pada Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2014 tanggal 13 Januari 2014 dan Perubahannya Nomor : 188.4/2252/Horti/Distanak, tanggal 6 Juni 2014;
   5. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/718/Horti/Distanak tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Dari Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan Lingkup Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2014 tanggal 7 Pebruari 2014 dan Perubahannya Nomor : 188.4/2967/Horti/Distanak, tanggal 10 Juli 2014;
   6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/739/Horti/Distanak tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Dari Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan Lingkup Satker Dinas Pertanian dan

Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2014 tanggal 20 Pebruari 2014;

7. Pedoman Teknis Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan Tahun 2014;
8. Pedoman Teknis Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan Tahun 2014;
9. Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Krisan, Fasilitasi Bantuan Sarana Prasarana Budidaya Krisan, Fasilitasi Bantuan Sarana Prasarana Pascapanen Krisan;
10. Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Cabai Rawit Merah, Fasilitasi Bantuan Sarana Prasarana Budidaya Cabai Rawit Merah, Fasilitasi Bantuan Sarana Prasarana Pascapanen Cabai Rawit Merah, Pengembangan Kawasan Bawang Merah;

b) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Yang memberikan Tugas Pembantuan Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng (229034) Tahun Anggaran 2014 adalah Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Hortikultura di Jakarta.

c) Program dan Kegiatan

Program Tugas Pembantuan yang diberikan pada Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng adalah Pogram Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura dengan tiga kegiatan yang terdiri dari :

1. Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan.
2. Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan.
3. Dukungan Manajemen dan Fisik Lainnya.

d) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pembiayaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan yang dibagi menjadi tiga kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan dan Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan serta Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya bersumber dari Dana APBN Tugas Pembantuan

(TP) Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2014.

Total anggaran untuk Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan sebesar Rp. 1.063.148.000,-realisasinya sebesar 1.023.042.100,- (96,22%) yang dibagi menjadi dua kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan dengan jumlah dana Rp.480.925.000,- realisasinya sebesar 471.766.000,- (98,10%) dan Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan pagu dananya sebesar Rp.461.223.000,- realisasinya sebesar Rp.434.804.400,- (94,27%) dan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pagu dananya sebesar Rp.121.000.000,- realisasinya sebesar Rp.116.471.700,- (96,26).

Dari pendanaan kegiatan-kegiatan tersebut di atas ada beberapa target output yang harus dicapai yang tertuang kedalam beberapa sub kegiatan antara lain :

1. Dari Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan sub kegiatan yang menjadi target output kegiatan antara lain :
   a. Pengembangan Kawasan Florikultura (Krisan) target outputnya 3.000 m2.
   b. Sekolah Lapang Good Agrikulture Praktices (SL-GAP).
   c. Fasilitasi Bantuan Sarana Prasarana Budidaya Krisan sebanyak 2 Unit.
   d. Fasilitasi Bantuan Sarana Prasarana Pascapanen sebanyak 2 unit.
2. Dari Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan sub kegiatan yang menjadi target output kegiatan antara lain :
   a. Pengembangan Kawasan Cabai Rawit Merah target outputnya 20 Ha.
   b. Pengembangan Kawasan Bawang Merah target outputnya 5 Ha.
   c. Sekolah Lapang Good Agriculture Praktices (SL-GAP) target outputnya 1 kelompok.
   d. Fasilitasi Bantuan Sarana Prasarana Budidaya Cabai Rawit Merah berupa Handsprayer target outputnya 4 unit.

e. Fasilitasi Bantuan Sarana Prasarana Pascapanen Cabai Rawit Merah berupa Motor Roda Tiga target outputnya 1 unit.

3. Dari Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura targetnya antara lain :
   a. Penataan dan Pengelolaan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Hortikultura target outputnya 1 Laporan.
   b. Penataan dan Pengelolaan Perencanaan Keuangan dan Perlengkapan Kepegawaian Kegiatan Pengembangan Hortikultura target outputnya 2 dokumen.

Target output dari seluruh kegiatan tersebut di atas telah dilaksanakan dengan baik berkat adanya dukungan dari semua pihak.

Lokasi Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan di Kelompok Tani Sekar Sari, Agro Pudak Lestari dan Mekar Sari Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.

Lokasi Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan di Kelompok Tani Cakra Sakti Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dan Subak Yangai Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.

Untuk lebih jelasnya mengenai realisasi pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel

Realisasi Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan

No. MAK	Jenis Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi Keuangan	%	Fisik %
018.04.07	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan				
1770	Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan	480.925.000	471.766.000	98,10	100
1771	Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman	461.223.000	434.804.400	94,27	100

	Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan				
1774	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	121.000.000	116.471.700	96,26	100
	Jumlah	*1.063.148.000*	1.023.042.100	96,22	100

e) Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan

Dana yang digunakan dalam melaksanakan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan yang tediri dari Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan dan Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan serta Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya bersumber dari Dana APBN Tugas Pembantuan (TP) Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2014.

Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan sebesar Rp. 1.063.148.000,-.

f) Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan.

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan yang tediri dari Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan dan Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan serta Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng.

g) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan yang diberikan tugas melaksanakan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan yang tediri dari Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan dan Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan serta Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya sebanyak 11 orang dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat dan Golongan
1	I Gede Subudi,SP	S1 Pertanian	Penata Tk.I (III/d)
2	Putu Santika,SP	S1 Pertanian	Penata Tk.I (III/d)
3	Ir. Nyoman Tista Laksana	S1 Pertanian	Pembina (IV/a)
4.	Ketut Darsana,SP	S1 Pertanian	Penata Tk.I (III/d)
5.	Putu Supartha	D3	Penata Tk.I (III/d)
6.	Nengah Sudiani	SPMA	Penata Muda Tk.I (III/b)
7.	Ni Luh Kerisnawati,SP	S1 Pertanian	Penata Muda Tk.I (III/b)
8.	I Gede Tusan Wijaya	SMA	Pengatur Muda Tk.I (II/b)
9.	Zulkarnaen	SMA	Pengatur Muda Tk.I (II/b)
10.	Made Artawan	SMA	-
11.	Nyoman Sri Murtini	SMA	-

h) Permasalahan dan pemecahan masalah

Dalam pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan yang tediri dari Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan dan Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan serta Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya ada beberapa permasalahan yang dapat teridentifikasi antara lain :

a) Beberapa petani belum terbiasa menerapkan teknologi budidaya yang baik dan benar (GAP) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
b) Petani belum banyak tahu informasi pasar sehingga posisinya lemah dalam pemasaran dan petani berjalan sendiri-sendiri dalam pemasaranan sehingga sering kali dipermainkan oleh para pembeli.
c) Dalam pengembangan cabai rawit adanya serangan virus kuning terhadap pertanaman cabai rawit merah yang diusahakan petani
d) Beberapa petani masih ragu-ragu mengusahakan tanaman cabai rawit merah karena khawatir akan harga sangat rendah sebagaimana yang pernah dialami pada masa-masa lalu.

e) Beberapa petani masih sulit untuk menggunakan bahan-bahan organik dalam budidaya cabai rawit merah karena merasa perlu tenaga dan waktu yang lebih.
f) Terbatasnya penyediaan anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan kawasan bawang merah.
g) Adanya serangan ulat bawang yang cukup besar terhadap pertanaman bawang merah yang diusahakan petani
h) Adanya pemotongan anggaran terhadap kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura.

Pemecahan Masalah ;

a) Diadakan sekolah lapang Good Agrikulture Practices (SL-GAP) bagi petani dan kedepannya perlu dibuatkan buku Standar Operasional Prosedur (SOP) Bawang Merah spesifikasi lokasi sehingga ada pedoman bagi petani dalam budidaya bawang merah.
b) Melakukan pembinaan kepada petani agar lebih jeli mencari informasi pasar sehinga produksi dapat dipasarkan dengan harga yang bersaing. Dan disarankan agar dalam proses pemasaran jangan sendiri-sendiri tetapi dikelola oleh kelompok sehingga tidak mudah dipermainkan oleh para tengkulak.
c) Petani diminta agar segera melakukan eradikasi tanaman yang terinfeksi penyakit virus kuning agar penyebarannya tidak berlanjut pada tanaman cabai yang masih sehat.
d) Memberikan pembinaan dan penjelasan kepada petani untuk mengatur luas pertanaman dan mencari peluang pasar yang lebih baik.
e) Melakukan pembinaan kepada petani untuk tentang pentingnya bahan-bahan organik dalam upaya memperbaiki lingkungan pertanaman dan dengan adanya kegiatan pengembangan kawasan ini mereka terdorong untuk memanfaatkan bahan-bahan organik dalam budidaya tanaman.
f) Mengingat dana yang tersedia terbatas dan petani belum terbiasa menggunakan benih dari biji dalam budidaya tanaman bawang merah maka benih yang diadakan berupa benih umbi saja dan sarana penunjang lainnya menjadi swadaya petani.
g) Petani disarankan menggunakan pestisida kimia secara bijaksana dalam upaya mempertahankan tanaman bawang

merahnya agar dapat memberikan hasil bagi petani agar petani tidak rugi.

h) Menunda kegiatan sampai turunnya revisi DIPA terhadap Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura.

4. Tugas Pembantuan Pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng.

a. Dasar Hukum

DIPA Nomor : SP DIPA-032.07.4.229175/2014, Tanggal 5 Desember 2014 untuk Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil dengan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha.

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.

Pemberi tugas dari kegiatan yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan (TP) yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dari Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (KP3K) dengan harapan masyarakat pesisir dapat meningkatkan produktivitas usahanya. Dengan demikian pendapatan mereka dapat ditingkatkan.

c. Program dan Kegiatan.

Program, kegiatan yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan (TP) adalah Program Pengembangan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, dengan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha atau Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR).

d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha atau Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), outcomenya adalah terwujudnya bantuan langsung masyarakat (BLM) kepada masyarakat pesisir/petambak garam. Adapun anggarannya sebesar Rp. 832.730.000,-,

Realisasi fisiknya mencapai 79 persen dan realisasi keuangannya sebesar Rp. 625.068.800,- atau mencapai 75,06 persen, dengan sisa anggaran Rp. 207.661.200,-. Realisasi fisik tidak mencapai target 100 persen karena terdapat 2 pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu pembangunan gudang 1 unit dengan nilai

Rp.100.000.000,- dan dengan nilai Rp.75.000.000,-. Pembangunan gudang tidak dapat dilaksanakan karena terkait lahan yang tidak tersedia oleh kelompok sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Sedangkan pengadaan alat pengemasan garam 1 paket tidak dapat dilaksanakan karena nilai pengadaan lenih tinggi dari pagu yang tertuang dalam DIPA.

Kegiatan PUGAR ini berupa bantuan langsung masyarakat (BLM). Adapun kelompok usaha garam rakyat yang menerima BLM ada 6 kelompok meliputi :

1) Kelompok Bumi Putih I, Ds.Pejarakan, Kec.Gerokgak, dengan nilai Rp.50.000.000,-
2) Kelompok Bumi Putih III, Ds.Pejarakan, Kec.Gerokgak, dengan nilai Rp.50.000.000,-
3) Kelompok Bumi Putih XIII, Ds.Pejarakan, Kec.Gerokgak, dengan nilai Rp.50.000.000,-
4) Kelompok Bumi Putih XIV, Ds.Pejarakan, Kec.Gerokgak, dengan nilai Rp.50.000.000,-
5) Kelompok Tasik Segara I, Ds.Les, Kec. Tejakula dengan nilai Rp.50.000.000,-
6) Kelompok Tasik Segara II, Ds.Les, Kec. Tejakula dengan nilai Rp.50.000.000,-

e. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan.

Anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan Tugas Pembantuan (TP) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI bersumber dari APBN, dengan jumlah total anggaran yang diperoleh sebesar Rp.832.730.000,-

Dari dana Tugas Pembantuan (TP) hanya terdapat 1program dan 1kegiatan yaitu Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil**.** Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan usaha dan Pemberdayaan Masyarakat atau Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat yang sering disingkat PUGAR dengan anggaran sebesar Rp. 832.730.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp.625.068.800,- atau mencapai 75,06%, dan realisasi fisik mencapai 79,00% sisa anggaran Rp. 207.661.200,-. Hasil kegiatan adalah tersalurnya Bantuan langsung masyarakat (BLM) kepada 6 kelompok usaha garam rakyat di Kabupaten Buleleng yang masing – masing nilainya sebesar Rp.50.000.000,-

f. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng.

g. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.
Pegawai Negeri Sipil : 64 orang ; Pegawai Honor Daerah / Pegawai Kontrak : 51 orang ;Tingkat Pendidikan : S2 : 2 orang ; S1: 26 orang ; Diploma III: 4 orang; SMA : 31 orang ; SMP : 1 orang ; SD : - orang ; Golongan IV: 7 orang ; III : 39 orang ; II : 17 orang ; I : 1 orang ;Pejabat Setruktural : 27 orang (Eselon II : 1 orang ; Eselon III : 5 orang ; Eselon IV : 21 orang) ; Pejabat Fungsional : 14 orang

h. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan.
Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang ada di Dinas Perikanan dan Kelauatan Kabupaten Buleleng sudah cukup memadai. Sarana dan prasarana tersebut diantaranya : Mobil dinas 7 unit, Sepeda motor 66 unit, Komputer 20 unit, Laptop/ noote book 19 unit, Mesin ketik 2 unit, Infokus 1 unit, Layar 1 unit, Kamera 14 unit, Handycam 1 unit, Almari 33 unit, Brankas 11 unit, filling kabinet 24 unit, meja + kursi kerja 214 unit, AC 19 unit, Printer 22 unit, Kapal dan perlengkapannya 1 unit, Kolam 105 buah (petak).

i. Permasalahan dan Solusi.
Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan kegiatan Tugas Pembantuan pada awal bulan Juni terjadinya terjadi pemotongan anggaran untuk BLM sebesar Rp.150.000.000,- Namun pada awal bulan September anggaran tersebut dikembalikan lagi sehingga tetap sebesar Rp.300.000.000,- Terdapat 2 pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu pembangunan gudang 1 unit senilai Rp.100.000.000,- dan pengadaan pengemasan garam senilai Rp.75.000.000,- Untuk pekerjaan gudang tidak dapat dilaksanakan karena terkait dengan lahan yang tidak tersedia, sesuai dengan aturan. Sedangkan untuk pengadaan pengemasan garam tidak dapat dilaksanakan karena harga pada saat pengadaan lebih tinggi dari pada pagu. Sebenarnya untuk kedua pekerjaan bukan merupakan usulan dari Kuasa Pengguna Anggaran, namun sudah tertuang dalam DIPA, dimana RKA KL disusun oleh pusat tanpa ada klarifikasi dari kabupaten/kpta penerima TP.

5. Tugas Pembantuan Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng.

a. Dasar Hukum :
   1. UU No. 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara.
   2. UU No. 1 TYahun 2004 tentang Perbendahaan Negara.
   3. UU No. 23 Tahun 2013 tentang APBN TA. 2014.

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI.

c. Program dan Kegiatan.
   Program yang dilaksanakan adalah Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan kegiatan yakni Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata.

d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 222.202.200,- (11,11%)

e. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan dialokasikan pada APBN Tahun Anggaran 2014.

f. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pembantuan yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng.

g. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.

No	Nama Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat dan Golongan
1	Drs. I Ketut Warkadea, M.Si	S2	Pembina / (IV/b)
2	I Made Subur, SH	S1	Pembina / (IV/a)
3	Nyoman Gunawan, SS	S1	Pembina / (IV/a)
4	Made Sri Laksmi Ratna Dewi, SH	S1	Penata Tk.I / (III/d)
5	I Gst. Ayu Maheri Agung, SST.Par	S1	Penata / (III/c)
6	I Nym. Agus Swadarma Adnyana, SST.Par	DIV	Penata Muda Tk.I/(III/b)
7	Putu Ariadi Pribadi, S.STP, MAP	S2	Penata Tk.I/(III/d)
8	Kadek Mila Pradnyani, A.Md	DIII	Pengatur /(II/c)
9	Arya Ardana	SMK	Pengatur Muda Tk.I / (II/b)
10	Ida Ayu Ptu Mas Wedayanti	SMU	Pengatur Muda Tk.I / (II/b)
11	Luh Juliartini	SMU	Pengatur Muda Tk.I / (II/b)

h. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan mencukupi dalam menunjang pelaksanaan tugas pembantuan.

i. Permasalahan dan Solusi.
   Tidak dijumpai permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan tugas pembantuan.

6. Tugas Pembantuan Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.

a. Dasar Hukum.
   1. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
   2. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
   3. Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
   4. PP No.102/2012 tentang Perubahan PP No.37/2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 .
   5. Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
   6. Permendagri No.79/2012 tentang Pelimpahan dan Penugasan urusan Pemerintah Lingkup Kementerian Dalam Negeri.
   7. Permenkeu No.72/PMK.02/2013 tentang standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014.
   8. DIPA Nomor : DIPA-010.08.4.220152/2014,tnggal 25 September 2014 untuk Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu.

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.
   Pemberi tugas dari kegiatan yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan (TP) yaitu Kementerian Dalam Negeri dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan harapan meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab serta kelancaran penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Kabupaten /Kota, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebgai Instansi Pelaksana.

c. Program Kegiatan.
   Program kegiatan yang bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (TP) adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu .

d. Pelaksanaan Program Penataan Administrasi Kependudukan .
   Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu yang outcomenya berupa Tertib Database Kependudukn Berbasis NIK Nasional dan Pelayanan Dokumen Kependudukan ,Terwujudnya Pemberian NIK

pada Setiap Penduduk,Koneksitas NIK dengan Identitas Kependudukan. Adapun anggarannya sebesar Rp.1.546.797.000,- .Realisasi keuangannya sebesar RP. 482.718.700,- atau mencapai 31,2 % dengan sisa anggaran Rp. 1.064.078.300,- realisasi keuangan tidak mencapai target karena terdapat beberapa paket pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu Pengadaan Tinta /Ribbon,Flim Printer dan Pembersih Printer (Cleaning Kit) dengan Nilai Rp.948.986.000,-,ATK dan Cetak Formulir senilai Rp.47.582.300,-,Honor Panitia Pengadaan Barang Jasa senilai Rp.9.550.000,- Belanja Perjalanan Dinas biasa senilai Rp.5.400.000,- Belaanja Modal senilai Rp.52.560.000,-,hal ini tidak dapat waktu pelaksanaan anggaran tidak mencukupi, dan adanya paket pekerjaan yang kontraknya diputus disebabkan rekanan tidak bisa melaksanakan paket pekerjaan tersebut.

e. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan.

   Anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan Tugas Pembantuan (TP) dari Kementerian Dalam Negeri bersuber dari APBN-P dengan Jumlah total anggaran yang diperoleh sebesar Rp.1.546.797.000,- .

   Dari dana Tugas Pembantuan (TP) hanya terdapat 1 program dan 1 kegiatan yaitu Progam Penataan Administrasi Kependudukan ini dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu dengan anggaran sebesar Rp.1.546.797.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.482.718.700,- atau mencapai 31,2 % dengan sisa anggaran Rp.1.064.078.300,- hasil kegiatan tertib data base kependudukan yang berbasis NIK Nasional dan Pelayanan Dokumen Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

f. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.

g. Jumlah Pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat golongan, jumlah pejabat struktural.

   Pegawai Negeri Sipil : 38 orang, Pegawai Honor Daerah : 2 orang, Pegawai Kontrak : 74 orang, Tingkat Pendidikan : S2 : 3 orang, S1 : 23 orang, SMA : 9 orang, SMP : 2 orang. Golongan IV : 9 orang, Golongan III : 21 orang, Golongan II : 7 orang, Golongan I : 1 orang. Pejabat Struktural : 20 orang, (Eselon II : 1 orang, Eselon III : 5 orang,Eselon IV : 14 orang).

h. Sarana Dan Prasarana.

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dalam kondisi baik dan cukup memadai.

Sarana dan prasarana tersebut diantaranya :

Mobil Dinas : 1 Unit, Sepeda Motor : 24 Unit, Komputer : 36 Unit, Laptop/noote book : 18 Unit,

Tablet dan Monitor LCD : 6 Unit, Printer : 42 Unit, Mesin ketik : 2 Unit , Hardisk Eksternal 15 Unit,Ac. : 12 Unit, Camera Digital : 3 Unit, Handycam : 2 Unit, TV : 7 buah, Almari : 5 buah,Filling Besi Metal : 12 buah,Kursi Tunggu 10 buah, Kursi kerja dan Kursi Rapat : 49 buah, Meja Kerja : 28 buah, UPS Stabilizer : 1 Unit, Server : 2 Unit, Jaringan SIAK online,1 unit.

i. Permasalahan Dan Solusi.

Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan kegiatan Tugas Pembantuan adalah turunya dana tugas pmbantuan melalui APBN-P mengakibatkan kurangnya waktu pelaksanaan kegiatan sehingga ada beberapa kegiatan yang tidk bisa dilaksanakan sebab DIPA baru terbit pertanggal 25 September 2014 sehingga limit waktu penyelesaian anggaran menjadi berkurang,apa yang tertuang dalam DIPA dibeberapa sub.kegitan tidk sesuai dengan kebutuhan dimana RKA /KL disusun oleh pusat tanpa ada klarifikasi dari Kabupaten /Kota penerima dana Tugas Pembantuan.

7. Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.

Pada Tahun 2014 Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng melaksanakan 2 tugas pembantuan yakni Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bina Upaya Kesehatan (BUK).

1) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Dasar Hukum yaitu SP. DIPA -024.03.4.229173/2014.

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan adalah Direktorat Jendral Bina Gigi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementrian Kesehatan RI.Program dan kegiatan : Bina Gizi Kesehatan Ibu dan anak. Realisasi pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya upaya bina gizi ibu dan anak melalui realiasasi bantuan operasional kesehatan. Sumber anggaran berasal dari APBN dengan jumlah anggaran yang digunakan sebesar Rp. 1.749.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.

1.735.468.900 atau tercapai 99,23 persen. SKPD pelaksana adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dengan jumlah pegawai yang dilibatkan dalam pelaksanaan tugas pembantuan ini berjumlah 14 PNS dengan pangkat dan golongan; Pembina (IV/a) ; 1 orang, Penata Tk.1 (III/d) ; 3 orang, Penata (III/c) ; 6 orang, Penata Muda Tk.1 (III/b) ; 2 orang, Penata Muda (III/a) ; 1 orang dan Pengatur Tk.1 (II/d) ; 1 orang. Dengan tingkat pendidikan, S2 ; 2 orang, S1 ; 9 orang, DIII ; 3 orang. Sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas pembantuan ; cukup memadai. Tidak terdapat permasalahan yang berarti yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan.

2) Bina Upaya Kesehatan (BUK).
   Dasar hukum : Sp. DIPA-024.04.4.220153/2014.
   Instansi pemberi tugas pembantuan adalah Ditjen Bina Upaya Kesehatan Kementrian Kesehatan RI. Program dan kegiatan yang dilaksanakan yaitu Bina upaya kesehatan dengan alokasi anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp. 1.000.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.990.639.90 atau 99,06 persen. SKPD pelaksana adalah Dinas Kesehatan kabupaten Buleleng dengan personil pelaksana sebanyak 8 orang dengan pangkat/golongan : Pembina (IV/a) ; 1 orang, Penata (III/c) ; 2 orang, Penata Tk.I (III/b) ; 1 orang, Penata Muda (III/a) ; 3 orang. Denga kualifikasi pendidikan : S2 ; 2 orang, S1; 4 orang , SKM ; 1 orang, dan SMA ; 1 orang. Kondisi sarana dan prasarana cukup memadai dan permasalahan yang dihadapi adalah DIPA yang baru turun pada Bulan Nopember 2014 sehingga mempengaruhi optimalisasi kinerja.

Tahun 2015 Tugas Pembantuan yang diterima dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng adalah :

1. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

Selain dari dana APBD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2015 juga mendapat dana APBN dalam bentuk Tugas Pembantuan sebesar Rp. 1.610.976.000,-(Satu Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar 1.505.092.123,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah) yaitu 93,43 % dari dana

yang dialokasikan untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.

Dasar hukum pelaksanaan Tugas Pembantuan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, adalah :

- Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- PP No.102/2012 tentang Perubahan PP No.37/2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 .
- Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- Permendagri No.79/2012 tentang Pelimpahan dan Penugasan urusan Pemerintah Lingkup Kementerian Dalam Negeri.
- Permenkeu No.53/PMK.02/2014 tentang standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintah Lingkup Kementrian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintah Lingkup Kementrian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2015.
- DIPA Nomor : SP DIPA-0152/2015, tanggal 14 November 2014 untuk Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu.

Instansi pemberi tugas yaitu dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dengan harapan meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab serta kelancaran penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Kabupaten /Kota, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai Instansi Pelaksana.

Program kegiatan yang bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (TP) adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu yang outcomenya berupa

Tertib Database Kependudukn Berbasis NIK Nasional dan Pelayanan Dokumen Kependudukan. Terwujudnya Pemberian NIK pada setiap penduduk, koneksitas NIK dengan Identitas Kependudukan. Adapun anggarannya bersumber dari APBN sebesar Rp. 1.610.976.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar 1.505.092.123,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah) yaitu 93,43 % dari dana yang dialokasikan untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. dengan sisa anggaran Rp. 105.883.877,- (Seratus lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Dalam pelaksanaan Program Penataan Administrasi Kependudukan dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu pada prinsipnya tidak mengalami permasalahan atau hambatan. Dalam pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan banyak melakukan revisi terhadap DIPA dan POK (Petunjuk Oprasional Kegiatan) karena disusun oleh pusat dalam hal ini Dirjendukcapil Kemendagri yang banyak tidak sesuai dengan kebutuhan dan standar harga Kabupaten. Untuk Tahun Anggaran 2016 revisi akan diminimalisir dengan lebih memantapkan perencanaan kegiatan pada awal atau pada tahap perencanaan awal agar ke depan tidak banyak harus merevisi POK.

2. Bidang Ketahanan Pangan.

Sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas pembantuan adalah sebagai berikut :

- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2015 dengan nomor SP DIPA-018.03.4.229071/2015 Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng (229071) tanggal 14 Nopember 2014 dengan perubahan Revisi 03;
- Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Rincian Kertas Kerja Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng (229071) tahun anggaran 2015;
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 136/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 126/Permentan/OT.140/11/2014 tentang Penugasan Kepada Bupati/ Walikota Dalam Pelaksanaan Kegiatan

dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2015;

- Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 900/41/HK/2015 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2015;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/434/PPPw/DISTANAK tentang Penetapan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Personalia Pengelola Anggaran pada Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2015 tanggal 29 Januari 2015 dan Perubahannya Nomor : 188.4/968/PPPw/DISTANAK, tanggal 16 Maret 2015;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/510/PPPw/DISTANAK tentang Pengesahan Kelompoktani Penerima Bantuan Sosial (Bansos) Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) Padi Inhibrida dan Jagung Hibrida Non Kawasan Tahun Anggaran 2015 tanggal 20 Pebruari 2015;
- Pedoman Teknis Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) Padi dan Jagung Tahun 2015;
- Petunjuk Teknis Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) Padi Inhibrida;
- Petunjuk Teknis Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) Jagung Hibrida;

Yang memberikan Tugas Pembantuan Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng (229071) Tahun Anggaran 2015 adalah Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan di Jakarta.

Program Tugas Pembantuan yang diberikan pada Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng adalah Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan dengan dua kegiatan yang terdiri dari :

a. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia.
b. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan.

Pembiayaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan yang dibagi menjadi dua kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia dan Kegiatan Dukungan

Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan bersumber dari Dana APBN Tugas Pembantuan (TP) Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2015.

Total anggaran untuk Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan sebesar Rp. 4.212.500.000,- realisasinya sebesar 4.192.521.500,- (99,53%) yang dibagi menjadi dua kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia dengan jumlah dana Rp. 4.104.500.000,- realisasinya sebesar 4.099.057.500,- (99,87%) dan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan pagu dananya sebesar Rp.108.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 93.464.000,- (86,54%). Dari pendanaan kegiatan-kegiatan tersebut di atas ada beberapa target output yang harus dicapai yang tertuang kedalam beberapa sub kegiatan antara lain :

- Dari Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia sub kegiatan yang menjadi target output kegiatan antara lain :
  a. Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) Padi Non Kawasan target outputnya 1.000 ha.
  b. Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) Jagung Non Kawasan target outputnya 500 ha.
- Dari Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan targetnya antara lain :
  a. Penyusunan Dokumen Perencanaan target outputnya 1 Dokumen
  b. Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Tanaman Pangan target outputnya 12 bulan.
  c. Laporan Pelaksanaan Manajemen Tanaman Pangan target outputnya 5 laporan.

Target output dari seluruh kegiatan tersebut di atas telah dilaksanakan dengan baik berkat adanya dukungan dari semua pihak.

Lokasi Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia terletak di 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Sukasada, Buleleng, Banjar, Seririt, Busungbiu dan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Untuk lebih jelasnya mengenai realisasi pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 172
Realisasi Pogram Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

No. MAK	Jenis Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi Keuangan	Sisa	Realisasi Fisik
018.03.06	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	4.212.500.000	4.192.521.500 (99,53%)	19.978.500	100 %
1762	Kegiatan Pengelolaan Produksi Serealia	4.104.500.000	4.099.057.500 (99,87%)	5.442.500	100 %
1766	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan	108.000.000	93.464.000 (86,54%)	14.536.000	100 %
Jumlah		**4.212.500.000**	**4.192.521.500**	**19.978.500,**	**100 %**

Sumber data ; Distanak Kab. Buleleng

Dana yang digunakan dalam melaksanakan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan yang tediri dari Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia dan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan bersumber dari Dana APBN Tugas Pembantuan (TP) Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2015. Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan Pogram Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan sebesar Rp. 4.212.500.000,-

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan yang tediri dari Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia dan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng.

Dalam pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan yang tediri dari Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia dan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan ada beberapa permasalahan yang dapat teridentifikasi antara lain :

- Para petani belum sepenuhnya mampu menerapkan teknologi budidaya tanaman pangan sesuai anjuran.
- Lahan pertanian sawah yang semakin sempit akibat terjadinya alih fungsi lahan dari sektor pertanian ke non pertanian.
- Penerapan alih teknologi dari Sistem Tanam Biasa menjadi Sistem Tanam Legowo 2 : 1 untuk tanam padi belum mampu terlaksana secara berkelanjutan disebabkan karena biaya upah tanam yang relative mahal.
- Kondisi iklim yang sangat ekstrim berdampak terhadap kekeringan berkepanjangan mengakibatkan debit air irigasi semakin menurun dan berpotensi terhadap gagal panen.
- Terjadinya serangan OPT pada tanaman pangan yang semakin meluas akibat minimnya para petani tentang informasi varietas unggul baru yang tahan terhadap serangan OPT.
- Masih adanya keraguan dari para petani dalam mengusahakan komoditi jagung untuk panen tua karena khawatir harga yang diperoleh tidak sesuai dan cenderung berkeinginan untuk panen muda.
- Terjadinya persaingan komoditas dari tanaman pangan ke non tanaman pangan yang lebih menguntungkan.
- Sering terjadinya revisi anggaran berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan non fisik mengalami penundaan.

Dalam mengatasi permasalahan yang ada dilakukan langkah – langkah :

- Dilaksanakannya kegiatan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu untuk padi dan jagung agar para petani memahami secara baik dan benar terhadap penerapan teknologi tepat guna untuk pengembangan tanaman pangan.
- Pembinaan kepada masyarakat petani dilakukan secara berkesinambungan dan menghimbau agar lahan-lahan produktif tidak dialih fungsikan ke non pertanian melalui pemberian insentif berupa kegiatan yang dapat mendukung terlaksananya usaha tani padi.
- Dalam penerapan alih teknologi dari tanam biasa ke Sistem Tanam Jajar Legowo 2 : 1 agar disediakan insentif ongkos tanam untuk mendorong minat petani melaksanakan Teknologi Sistem Tanam Jajar Legowo 2 : 1 secara berkelanjutan.
- Terus diupayakan melakukan perbaikan terhadap Infrastruktur Jaringan Irigasi dan pemberian bantuan alat mesin pertanian berupa

pompa air bagi wilayahnya yang tersedia sumber mata air sehingga dampak kekeringan dapat diantisipasi.

- Pendampingan dan pengawalan kegiatan terus dilakukan secara terus menerus untuk antisipasi serangan OPT melalui diseminasi terhadap varietas unggul baru yang tahan serangan OPT dan mempunyai potensi produksi tinggi.
- Dilakukan upaya melalui Temu Usaha antara para kelompok tani dengan pengusaha/ assosiasi yang bergerak di bidang pemasaran komoditas tanaman pangan sehingga produksi dapat diserap dengan harga yang memadai.
- Pembinaan pada kelompok tani/ masyarakat petani agar senantiasa disinergikan dengan pemahaman analisa usaha tani sehingga para petani dalam mengusahakan komoditinya lebih fokus pada yang lebih menguntungkan.
- Menunda pelaksanaan kegiatan sampai turunnya revisi DIPA.

3. Bidang Pertanian.

Sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas pembantuan melalui Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2015 dengan nomor SP DIPA-018.04.4.229034/2015 Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng (229034); tanggal 14 Nopember 2014 dengan perubahan Revisi 01;
- Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Rincian Kertas Kerja Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng (229034) tahun anggaran 2015;
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 136/Permentan/OT.140/11/2014 tanggal 15 Desember 2014 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota tahun anggaran 2015;
- Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 900/41/HK/2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang Penetapan Kuasa Penggina Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2015;

- Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/200/Horti/Distanak tanggal 29 Januari 2015 tentang Penetapan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Personalia Pengelola Anggaran pada Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2015;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/201/Horti/Distanak tanggal 29 Januari 2015 tentang Pembentukan Tim Teknis Kagiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah, Florikultura, Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan Lingkup Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2015;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/531/Horti/Distanak tanggal 23 Pebruari 2015 tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Dari Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah Lingkungan Lingkup Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2015;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/532/Horti/Distanak tanggal 23 Pebruari 2015 tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Dari Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Florikultura Ramah Lingkungan Lingkup Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2015;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/533/Horti/Distanak tanggal 23 Pebruari 2015 tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Dari Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan Lingkup Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2015;
- Pedoman Teknis Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah Lingkungan Tahun 2015;
- Pedoman Teknis Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Florikultura Ramah Lingkungan Tahun 2015;

- Pedoman Teknis Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan Tahun 2015;
- Petunjuk Tenis Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktoran Jenderal Hortikultura Tahun 2015;
- Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Jeruk, Fasilitasi Bantuan Sarana Prasarana Budidaya Jeruk, Fasilitasi Bantuan Sarana Prasarana Pascapanen Jeruk;
- Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Krisan dan Snap Dragon, Fasilitasi Bantuan Sarana Prasarana Budidaya Krisan, Fasilitasi Bantuan Sarana Prasarana Pascapanen Krisan;
- Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Bawang Merah, Pengembangan Kawasan Cabai Rawit Merah, Fasilitasi Bantuan Sarana Prasarana Pascapanen Bawang Merah;

Yang memberikan Tugas Pembantuan Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng (229034) Tahun Anggaran 2015 adalah Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Hortikultura di Jakarta.

Program Tugas Pembantuan yang diberikan pada Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng adalah Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan dengan 5 (lima) kegiatan yang terdiri dari :

a. Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah Lingkungan
b. Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Florikultura Ramah Lingkungan.
c. Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan.
d. Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan.
e. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura.

Pembiayaan Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan yang dibagi menjadi 5 (lima) kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah Lingkungan, Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Florikultura Ramah Lingkungan, Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah

Lingkungan, Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan, serta Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura bersumber dari Dana APBN Tugas Pembantuan (TP) Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2015.

Total anggaran untuk Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan sebesar Rp. 3.456.010.000,-, dengan jumlah anggaran masing-masing kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah Lingkungan dengan jumlah anggaran Rp. 1.627.610.000,-
b. Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Florikultura Ramah Lingkungan dengan jumlah anggaran Rp. 913.950.000,-
c. Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan dengan jumlah anggaran Rp. 762.495.000,-
d. Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan dengan jumlah anggaran Rp. 63.300.000,-
e. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura dengan jumlah anggaran Rp. 88.655.000,-

Dari pendanaan kegiatan-kegiatan tersebut di atas ada beberapa target output yang harus dicapai yang tertuang kedalam beberapa sub kegiatan antara lain :

1) Dari Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah Lingkungan, sub kegiatan yang menjadi target output kegiatan antara lain :
   a) Pengembangan Kawasan Buah (Jeruk) target outputnya 100 Ha
   b) Sekolah Lapang Good Agrikulture Practices (SL-GAP) Jeruk 2 Klp
   c) Sekolah Lapang Good Handling Practices (SL-GHP) Jeruk 2 klp
   d) Fasilitasi Bantuan Sarana Prasarana Budidaya Jeruk sebanyak 1 Unit
   e) Fasilitasi Bantuan Sarana Prasarana Pascapanen sebanyak 270 unit
2) Dari Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Florikultura Ramah Lingkungan, sub kegiatan yang menjadi target output kegiatan antara lain :
   a) Pengembangan Kawasan Florikultura target outputnya 10.000 m2 terdiri dari Pengembangan Kawasam Krisan 5.000 m2 dan Pengembangan Kawasan Snap Dragon 5.000 m2.

b) Sekolah Lapang Good Agrikulture Praktices (SL-GAP) Krisan 1 klp dan SL-GAP Snap Dragon 1 klp.
c) Fasilitasi Bantuan Sarana Prasarana Budidaya Krisan sebanyak 1 Unit.
d) Fasilitasi Bantuan Sarana Prasarana Pascapanen Krisan sebanyak 1 unit.

3) Dari Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan sub kegiatan yang menjadi target output kegiatan antara lain :
   a) Pengembangan Kawasan Cabai Rawit Merah target outputnya 20 Ha.
   b) Pengembangan Kawasan Bawang Merah target outputnya 15 Ha
   c) Sekolah Lapang Good Agriculture Praktices (SL-GAP) Cabai Rawit Merah target outputnya 1 kelompok.
   d) Sekolah Lapang Good Agriculture Praktices (SL-GAP) Bawang Merah target outputnya 1 kelompok.
   e) Fasilitasi Bantuan Sarana Prasarana Pascapanen Sayuran dan Tanaman Obat target outputnya 1 unit terdiri dari Bangsal Pascapanen Bawang Merah 1 unit dan Sarana Prasarana Pascapanen Bawang Merah 38 unit.
4) Dari Kegiatan Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan sub kegiatan yang menjadi target output kegiatan adalah Pengelolaan dan Pengendalian OPT Hortikultura target outputnya 3 kali.
5) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura targetnya antara lain :
   a) Penataan dan Pengelolaan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Hortikultura target outputnya 1 Laporan.
   b) Penataan dan Pengelolaan Perencanaan Keuangan dan Perlengkapan Kepegawaian Kegiatan Pengembangan Hortikultura target outputnya 2 dokumen.
   c) Layanan Perkantoran target outputmya 12 bulan.

Target output dari seluruh kegiatan tersebut di atas telah dilaksanakan dengan baik berkat adanya dukungan dari semua pihak.

Lokasi Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah Lingkungan di 8 Kelompok Tani/Gapoktan di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng yaitu Kelompok Tani Kerta Buana, Bukit Sari dan Karya Sejati Desa Pejarakan, Kelompok Tani Gumbleng Amerta

Desa Tukadsumaga, Kelompok Tani Budi Damai Desa Sumberkima, Kelompok Tani Pucak Taman Sari Desa Pemuteran, Kelompok Tani Tunas Mekar Desa Sumberklampok dan Gapoktan Sangga Darma Satwa Desa Sanggalangit.

Lokasi Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Florikultura Ramah Lingkungan di Kelompok Tani Agro Pudak Lestari dan Mekar Sari Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.

Lokasi Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan di Subak Kudungan Desa Bontihing Kecamatan Kubutambahan, Subak Abian Laba Karya Desa Tukadsumaga Kecamatan Gerokgak dan Subak Yangai Desa Bungkulan Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.

Untuk lebih jelasnya mengenai realisasi pelaksanaan Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 173
Realisasi Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan Tahun 2015

No. MAK	Jenis Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi Keuangan	Sisa	Realisasi Fisik
018.04.07	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan	3.456.010.000,-	3.331.388.100,- (96,39%)	124.621.900,-	100%
1769	Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Berkelanjutan	1.627.610.000,-	1.589.914.000,- (97,68%)	37.696.000,-	100%
1770	Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Florikultura Ramah Lingkungan	913.950.000,-	858.600.200,- (93,94%)	55.349.800,-	100%
1771	Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan	762.495.000,-	731.527.400,- (95,94)	30.967.600,-	100%
1773	Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan	63.300.000,-	63.300.000,- (100,00)	-	100%
1774	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pda Ditjen Hortikultura	88.655.000,-	88.046.500,- (99,31)	608.500,-	100%
	Jumlah	**3.456.010.000**	**3.331.388.100**	**124.621.900**	**100%**

Sumber data ; Distanak kab. Buleleng

Dana yang digunakan dalam melaksanakan Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan yang terdiri dari Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah Lingkungan, Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Florikultura Ramah Lingkungan, Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan, Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan, serta Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura bersumber dari Dana APBN Tugas Pembantuan (TP) Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2015.

Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan sebesar Rp. 3.456.010.000,-.

Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan yang tediri dari Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah Lingkungan, Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Florikultura Ramah Lingkungan, Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan, Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan, serta Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng.

Dalam pelaksanaan Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan yang tediri dari Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah Lingkungan, Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Florikultura Ramah Lingkungan, Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan, Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan, serta Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura ada beberapa permasalahan yang dapat teridentifikasi antara lain :

1. Terbatasnya sumber air untuk pengembangan kawasan jeruk
2. Terbatasnya luasan rumah lindung yang dimiliki petani untuk pengembangan tanaman krisan dan snap dragon

3. Beberapa petani belum terbiasa menerapkan teknologi budidaya yang baik dan benar (GAP) dan penangan pasca panen yang baik dan benar (GHP) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
4. Petani belum banyak tahu informasi pasar sehingga posisinya lemah dalam pemasaran dan petani berjalan sendiri-sendiri dalam pemasaran sehingga sering kali dipermainkan oleh para pembeli.
5. Beberapa petani masih sulit untuk menggunakan bahan-bahan organik dalam budidaya cabai rawit merah karena merasa perlu tenaga dan waktu yang lebih.
6. Terbatasnya penyediaan anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan kawasan bawang merah.

Solusi terhadap permasalahan yang ada yaitu ;

1. Melakukan fasilitasi sarana prasarana pengembangan sumber air berupa bak penampungan air, pompa air dan jaringan perpipaan.
2. Melakukan fasilitasi sarana prasarana budidaya berupa rumah lindung dan bahan rumah lindung kepada kelompok tani.
3. Diadakan sekolah lapang Good Agriculture Practices (SL-GAP) dan sekolah lapang Good Handling Practices (SL-GHP) bagi petani.
4. Melakukan pembinaan kepada petani agar lebih jeli mencari informasi pasar sehinga produksi dapat dipasarkan dengan harga yang bersaing. Dan disarankan agar dalam proses pemasaran jangan sendiri-sendiri tetapi dikelola oleh kelompok sehingga tidak mudah dipermainkan oleh para tengkulak.
5. Melakukan pembinaan kepada petani untuk tentang pentingnya bahan-bahan organik dalam upaya memperbaiki lingkungan pertanaman dan dengan adanya kegiatan pengembangan kawasan ini mereka terdorong untuk memanfaatkan bahan-bahan organik dalam budidaya tanaman.
6. Mengingat dana yang tersedia terbatas dan petani belum terbiasa menggunakan benih dari biji dalam budidaya tanaman bawang merah maka benih yang diadakan berupa benih umbi saja dan sarana penunjang lainnya menjadi swadaya petani.

4. Bidang Perikanan

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng dalam tahun 2015 memperoleh Program/Kegiatan yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan (TP) dengan dasar hokum :

- Dasar Hukum dari program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan pulau Pulau Kecil, dengan Kegiatan pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha adalah SP DIPA – 032.07.4.229175/2014, Tanggal 14 Nopember 2014 dari Ditjen Kelautan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
- Dasar Hukum dari Program Pengelolaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap dengan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanana Alat Penangkap Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan. adalah SP DIPA–032.03.4.220148/2015, Tanggal 14 Nopember 2014 Dari Ditjen Perikanan Tangkap Kementrian Kelautan dan Perikanan RI

Program /Kegiatan yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan(TP) ada 2 yaitu :

- Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan pulau Pulau Kecil, dengan Kegiatan pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap dengan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanana Alat Penangkap Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan.

Alokasi dan realisasai anggaran pelaksanaan tugas pembantuan bidang perikanan Tahun 2015 :

- Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan pulau Pulau Kecil, dengan Kegiatan pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha dengan Anggaran sebesar Rp.1.486.000.000,- Realisasi fisik mencapai 77,92%, sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp.1.157.857.650,- atau mencapai 77,92 % dengan sisa anggaran sebesar Rp.328.142.350,- Realisasi fisik tidak mencapai target 100,00%, hal ini disebabkan karena beberapa hal yaitu :
  1) Pengadaan peralatan dan mesin 1 paket sebesar Rp.75.000.000,- tidak dapat dilaksanakan juknis baru diterima bulan September 2015,dimana dalam juknis peralatan mesin berupa mesin pompa, sedangkan sebelumnya sudah disiapkan untuk mesin pengemasan garam.
  2) Pembangunan infrastruktur jalan dengan anggaran sebesar Rp.245.000.000,- tidak dapat dilaksanakan karena ada surat dari Ditjen KP3K KKP RI untuk merevisi akun belanja infrastruktur jalan, irigasi dan jaringan menjadi pengadaan geoisolator

sebesar Rp.206.310.000,- dan operasional untuk pendampingan geoisolator sebesar Rp.39.288.500,-. Selanjutnya diterima lagi surat dari Ditjen KP3K tertanggal 9 Desember 2015, menyampaikan bahwa Buleleng tidak mendapatkan geoisolator sehingga dana tersebut tidak tersebut, akibat dari ketidaksanggupan produsen memenuhi permintaan dari KKP RI

3) Bimbingan Teknologi garam tidak dapat dilaksanakan karena bimtek sangat terkait dengan geoisolator, dimana dimana Buleleng tidak mendapatkan geoisolator.
4) Untuk kegiatan fisik lainnnya berupa pembangunan rumah kaca, gudang beserta peralatan pengolahan garam pyramid. Kegiatan fisik tersebut dihibahkan kepada Kelompok Garam Uyah Buleleng, Desa.Pemuteran,Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng

- Program Pengelolaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap dengan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanana Alat Penangkap Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan dengan anggaran sebesar Rp.1.078.856.000,- Realisasi fisik mencapai 100,00%, sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp.1.049.633.640,- atau mencapai 97,29% dengan sisa anggaran sebesar Rp.29.192.360,- Pengadaan Kapal Inkamina sudah realisasi 100,00% dihibahkan kepada Kelompok Nelayan Ketapang Sondoh, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang yang melaksanakan program/kegiatan yang bersumber dari dana Tugas pembantuan (TP) adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan ; Pegawai Negeri Sipil : 66 orang, Pegawai Honor Daerah : 3 orang, Pegawai Kontrak : 52 orang. Tingkat Pendidikan : S2 : 2 orang, S1 : 30 orang, D3 : 9 orang, SMA sederajat : 24 orang, SMP sederajat : 1 orang, Golongan IV:8 orang, Golongan III:41 orang, Golongan II:16 orang, Golongan I:2 orang Pejabat Struktural : 27 orang (Eselon II : 1 orang, Eselon III : 5 orang, Eselon IV : 21 orang) dan Pejabat Fungsional 17 orang

Secara umum kondisi sarana prasarana yang ada pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng cukup memadai. Sarana dan prasarana tersebut diantaranya : mobil dinas 5 unit, sepeda motor 47 unit, komputer 18 unit, laptop/notebook 19 unit, printer 22 buah, mesin

ketik 2 unit, Infokus 1 unit, layar 1 buah, kamera 10 buah, Almari 33 buah,brankas 11 buah, filling cabinet 20 buah, meja dan kursi 214 buah, AC 19 unit, gedung kantor 4 unit, kolam 105 petak, kapal serta kelemgkapannya 1 paket.

Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan kegiatan yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan adalah sebagai berikut :

1. Tidak bisa dilaksanakannya pengadaan peralatan dan mesin 1 paket sebesar Rp.75.000.000,- karena juknis baru diterima bulan September 2015,dimana dalam juknis peralatan mesin berupa mesin pompa, sedangkan sebelumnya sudah disiapkan untuk mesin pengemasan garam.
2. Tidak dapat dilaksanakannya pembangunan infrastruktur jalan dengan anggaran sebesar Rp.245.000.000,- karena ada surat dari Ditjen KP3K KKP RI untuk merevisi akun belanja infrastruktur jalan, irigasi dan jaringan menjadi pengadaan geoisolator sebesar Rp.206.310.000,- dan operasional untuk pendampingan geoisolator sebesar Rp.39.288.500,-. Selanjutnya diterima lagi surat dari Ditjen KP3K tertanggal 9 Desember 2015, menyampaikan bahwa Buleleng tidak mendapatkan geoisolator sehingga dana tersebut tidak tersebut, akibat dari ketidaksanggupan produsen memenuhi permintaan dari KKP RI
3. Tidak dapat dilaksanakannya Bimbingan Teknologi garam karena bimtek sangat terkait dengan geoisolator, dimana dimana Buleleng tidak mendapatkan geoisolator.

Tahun 2016 Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng yaitu;

1. Bidang Perikanan dan Kelautan.

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng dalam tahun 2016 memperoleh Program/Kegiatan yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan (TP) dengan total anggaran sebesar Rp.1.915.000.000, namun berdasarkan surat Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP RI No.479/PRL.5/IV/2016 tanggal 25 April 2016, terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 641.525.000, dimana sudah diajukan RKA/KL ke pusat, namun setelah disetujuinya DIPA/RKA-KL tanggal 26 Juli 2016

efisiensinya menjadi Rp.728.985.000, sehingga total anggaran setelah efisiensi sebesar Rp.1.186.015.000,

Dasar Hukum dari Program Pengelolaan Ruang Laut adalah SP DIPA – 032.07.4.229175/2016, Tanggal 07 Desember 2016 dari Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Dasar Hukum dari Program Pengelolaan Ruang Laut adalah SP DIPA Revisi 01 – 032.07.4.229175/2016, Tanggal 26 Juli 2016 dari Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Pemberi tugas dari program/kegiatan yang bersumber dari dana Tugas pembantuan (TP) yaitu Program Pengelolaan Ruang Laut, dengan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha diberikan oleh Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Program /Kegiatan yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan(TP) yaitu Program Pengelolaan Ruang Laut, dengan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha. Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan pulau Pulau Kecil, dengan Kegiatan pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha dengan Anggaran sebesar Rp.1.186.015.000, Realisasi fisik mencapai 100,00%, sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp.1.017.061.458,- atau mencapai 85,75% dengan sisa anggaran sebesar Rp.168.953.542,- Adapun kegiatan fisiknya berupa pengadaan Geoisolator 17.100 m2, pengadaan traktor 2 unit, pembangunan gudang garam 1 paket, pengadaan kendaraan roda dua 2 unit. Kegiatan fisik tersebut dihibahkan kepada Koperasi Produsen Bumi Putih Nusantara Desa.Pejarakan,Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraanTugas Pembantuan (TP) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan bersumber dari dana APBN dengan jumlah total anggaran yang diperoleh sebesar Rp.1.186.015.000,-

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang yang melaksanakan program/kegiatan yang bersumber dari dana Tugas pembantuan (TP) adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan dukungan personil Pegawai Negeri Sipil : 65 orang, Pegawai Honor Daerah : 3 orang, Pegawai Kontrak Daerah/Pusat : 61 orang. Tingkat Pendidikan : S2 : 2 orang, S1 : 31 orang, D3 : 10 orang, SMA sederajat : 21 orang, SMP sederajat : 1 orang, Golongan IV:8 orang, Golongan III:43 orang, Golongan II:15 orang, Golongan I:2 orang Pejabat Struktural : 26 orang (Eselon II : 1 orang, Eselon III : 5 orang, Eselon IV : 20 orang) dan Pejabat Fungsional 16 orang.

Secara umum kondisi sarana prasarana yang ada pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng cukup memadai. Sarana dan prasarana tersebut diantaranya : mobil dinas 5 unit, sepeda motor 47 unit, komputer 18 unit, laptop/notebook 19 unit, printer 22 buah, mesin ketik 2 unit, Infokus 1 unit, layar 1 buah, kamera 10 buah, Almari 33 buah,brankas 11 buah, filling cabinet 20 buah, meja dan kursi 214 buah, AC 19 unit, gedung kantor 4 unit, kolam 105 petak, kapal serta kelemgkapannya 1 paket.

2. Bidang Ketenagakerjaaan.

Dengan dasar hukum DIPA Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2016 No. SP DIPA – 026.04.4.220149/2016, Tanggal : 7 Desember 2015, Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Buleleng melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Penugasan ini dituangkan melalui Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja yang dijabarkan melalui Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja. Pembiayaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan bersumber dari dana APBN yaitu DIPA Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.762.175.000,00. Realisasi anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan sebesar .731.480.400 atau 98,26 persen dan realisasi fisik kegiatan mencapai 100 persen.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng selaku Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pembantuan didukung oleh personil Jumlah Pegawai PNS : 5 Orang, Jumlah Pegawai Non PNS / Kontrak : 5 orang. Kualifikasi pendidikan : SMA : 5 orang; DIII : 1 orang; Sarjana : 4 orang. Pangkat dan Golongan : Golongan II : 1 orang, Golongan III : 4 orang.

Sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas pembantuan ini masih kurang, sehingga permasalahan – permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan yakni usulan masyarakat belum sepenuhnya dapat diakomodasi dan solusinya Pemerintah Daerah memberikan suntikan dana sehingga usulan masyarakat untuk Program Padat Karya secara bertahap bisa diakomodasi. Respon masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan Padat karya sangat positif harapannya kegiatan ini terus berlanjut.

3. Bidang Pertanian.

Tugas Pembantuan yang diterima oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng pada Tahun 2016 tertuang dalam Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura, dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2016 dengan nomor SP DIPA-018.04.4.229034/2016 Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng (229034); tanggal 7 Desember 2015 dengan perubahan Revisi 03 tanggal 30 September 2016;
2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Rincian Kertas Kerja Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng (229034) tahun anggaran 2016;
3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 65/Permentan/RC.130/12/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota tahun anggaran 2016;
4. Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 520/29/HK/2016 tanggal 6 Januari 2016 tentang Penetapan Kuasa Penggina Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016;
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/13/Horti/Distanak tanggal 7 Januari 2016 tentang Penetapan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Personalia Pengelola Anggaran pada Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016;
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/12/Horti/Distanak tanggal 7 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Lingkup Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016;
7. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/754/Horti/Distanak tanggal 22 Pebruari 2016 tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Kawasan Jeruk dan Desa

Organik dari Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Lingkup Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016;

8. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/755/Horti/Distanak tanggal 22 Pebruari 2016 tentang Penetapan Calon Petani Calon Lahan/CPCL Kawasan Jeruk dari Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Lingkup Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016;
9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/868/Horti/Distanak tanggal 1 Maret 2016 tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Pengembangan Kawasan Bawang Merah dan Cabai Rawit Merah Dari Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Lingkup Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016;
10. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/869/Horti/Distanak tanggal 1 Maret 2016 tentang Penetapan Calon Petani Calon Lahan/CPCL Penerima Bantuan Pengembangan Kawasan Bawang Merah dan Cabai Rawit Merah dari Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Lingkup Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016;
11. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/3372/Horti/Distanak tanggal 23 Agustus 2016 tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Kawasan Jeruk (APBN-P) dari Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Lingkup Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016;
12. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/3373/Horti/Distanak tanggal 23 Agustus 2016 tentang Penetapan Calon Petani Calon Lahan/CPCL Kawasan Jeruk (APBN-P) dari Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Lingkup

Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016;

13. Pedoman Teknis Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Tahun 2016;
14. Pedoman Teknis Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2016;
15. Petunjuk Tenis Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2016;

Yang memberikan Tugas Pembantuan Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016 adalah Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian. Program Tugas Pembantuan yang diberikan pada Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng dituangkan melalui 3 kegiatan yang terdiri dari Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat, Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura dan Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura.

Pembiayaan Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura yang dibagi menjadi 3 (tiga) kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat, Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura serta Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura bersumber dari Dana APBN Tugas Pembantuan (TP) Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016. Total anggaran untuk Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura sebesar Rp. 4.142.500.000, dengan jumlah anggaran masing-masing kegiatan meliputi Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat dengan jumlah anggaran Rp. 2.382.500.000, Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura dengan jumlah anggaran Rp. 140.000.000, dan Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura dengan jumlah anggaran Rp. 1.620.000.000.

Dari pendanaan kegiatan-kegiatan tersebut di atas ada beberapa target output yang harus dicapai yang tertuang ke dalam beberapa sub kegiatan antara lain dari Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat dengan sub kegiatan yang menjadi target output kegiatan adalah Kawasan Bawang Merah target output 30 Ha, Kawasan

Aneka Cabai target outputnya 40 Ha. Dari Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura targetnya adalah Dokumen Perencanaan, Hukum, Kehumasan dan Kepegawaian target outputnya 1 jenis dokumen, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Hortikultura target outputnya 2 laporan dan Layanan Perkantoran target outputnya 12 bulan layanan. Selanjutnya dari Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura, sub kegiatan yang menjadi target output kegiatan antara lain Kawasan Jeruk target outputnya 65 Ha, terdiri dari Kawasan jeruk seluas 50 Ha dan Kawasan jeruk (APBN-P) seluas 15 Ha, Desa Organik Berbasis Tanaman Buah/Florikultura target outputnya 2 desa. Dari alokasi anggaran yang tersedia untuk penyelenggaraan program dan kegiatan terealisasi sebesar 98,31 persen, dimana dari anggaran sebesar Rp. 4.142.500.000 terealisasi sebesar Rp. 4.072.549.849 dengan capaian fisik yang terealisasi 100 persen.

Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura yang tediri dari Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat, Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura serta Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng.

Dalam pelaksanaan Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura yang tediri dari Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat, Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura serta Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura ada beberapa permasalahan yang dapat teridentifikasi antara lain :

1. Terbatasnya sumber air untuk pengembangan kawasan jeruk.
2. Cuaca yang sangat ekstrim sepanjang tahun 2016 menyebabkan tingginya serangan OPT pada tanaman bawang dan cabai rawit merah.
3. Beberapa petani belum terbiasa menerapkan teknologi budidaya yang baik dan benar (GAP) dan penanganan pasca panen yang baik dan benar (GHP) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
4. Petani belum banyak tahu informasi pasar sehingga posisinya lemah dalam pemasaran dan petani berjalan sendiri-sendiri dalam pemasaran sehingga sering kali dipermainkan oleh para pembeli.

5. Beberapa petani masih sulit untuk menggunakan bahan-bahan organik dalam budidaya cabai rawit merah karena merasa perlu tenaga dan waktu yang lebih.

Usaha – usaha dalam mengatasi permasalahan yang ada yaitu ;

1. Melakukan fasilitasi sarana prasarana pengembangan sumber air berupa bak penampungan air dan jaringan perpipaan.
2. Meningkatkan pengamatan dan melaksanakan pengendalian OPT lebih intensif.
3. Diadakan sekolah lapang Good Agriculture Practices (SL-GAP) dan sekolah lapang Good Handling Practices (SL-GHP) bagi petani yang besumber dari dana APBD Kabupaten Buleleng.
4. Melakukan pembinaan kepada petani agar lebih jeli mencari informasi pasar sehingga produksi dapat dipasarkan dengan harga yang bersaing. Dan disarankan agar dalam proses pemasaran jangan sendiri-sendiri tetapi dikelola oleh kelompok sehingga tidak mudah dipermainkan oleh para tengkulak.
5. Melakukan pembinaan kepada petani untuk tentang pentingnya bahan-bahan organik dalam upaya memperbaiki lingkungan pertanaman dan dengan adanya kegiatan pengembangan kawasan ini mereka terdorong untuk memanfaatkan bahan-bahan organik dalam budidaya tanaman.

Sebagai dasar pelaksanaan Tugas Pembantuan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan adalah sebagai berikut :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2016 dengan nomor SP DIPA-018.03.4.229071/2016 Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng (229071) tanggal 7 Desember 2015 dengan perubahan Revisi 04;
2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Rincian Kertas Kerja Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng (229071) tahun anggaran 2016;
3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 65/Permentan/RC.130/12/2015 tentang Penugasan kepada Bupati/Walikota dalam pelaksanaan kegiatan dan tanggung jawab pengelolaan dana tugas pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015;

4. Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 520/29/HK/2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016;
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/116/PPPw/DISTANAK tentang Penetapan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Personalia Pengelola Anggaran pada Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016 tanggal 11 Januari 2016;
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/1230/PPPw/DISTANAK tentang Pengesahan Kelompoktani Penerima Bantuan Pengembangan Budidaya Kedelai Tahun Anggaran 2016;
7. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/1231/PPPw/DISTANAK tentang Pengesahan Kelompoktani Penerima Bantuan Penanaman Padi Jajar Legowo (Jarwo) Tahun Anggaran 2016;
8. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/1232/PPPw/DISTANAK tentang Pengesahan Kelompoktani Penerima Bantuan Gerakan Pengembangan Desa Pertanian Organik Untuk Padi Tahun Anggaran 2016;
9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/1233/PPPw/DISTANAK tentang Pengesahan Kelompoktani Penerima Bantuan Pengembangan Jagung Hibrida Tahun Anggaran 2016;
10. Petunjuk Teknis Pengembangan Desa Pertanian Organik Padi Tahun 2016;
11. Petunjuk Teknis Teknologi Tanam Jajar Legowo Tahun 2016;
12. Petunjuk Teknis Gerakan Pengembangan Jagung Hibrida 2016;
13. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Kedelai dan Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2016;

Yang memberikan Tugas Pembantuan Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng (229071) Tahun Anggaran 2016 adalah

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan di Jakarta.

Program Tugas Pembantuan yang diberikan pada Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng adalah Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan dengan tiga kegiatan yang terdiri dari : Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia dan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan.

Pembiayaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan yang dibagi menjadi tiga kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia, dan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan bersumber dari Dana APBN Tugas Pembantuan (TP) Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016.

Total anggaran untuk Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan sebesar Rp. 5.627.464.000,- realisasinya sebesar 5.039.866.325,- (89,56%) yang dibagi menjadi tiga kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Produksi aneka kacang dan umbi dengan jumlah dana Rp. 320.731.000,- realisasinya 253.500.750,- (79,04%), Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia dengan jumlah dana Rp. 5.187.842.000,- realisasinya sebesar 4.690.786.500,- (90,42%) dan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan pagu dananya sebesar Rp.118.891.000,- realisasinya sebesar Rp. 95.579.075,- (80,39%).

Dari pendanaan kegiatan-kegiatan tersebut di atas ada beberapa target output yang harus dicapai yang tertuang kedalam beberapa sub kegiatan antara lain dari Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi. Pengembangan Budidaya Kedelai target outputnya 250 Ha. Dari Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia sub kegiatan yang menjadi target output kegiatan antara lain Pengembangan Budidaya Kedelai target outputnya 250 Ha, Bantuan Padi Provitas target outputnya 7.000 Ha dan bantuan dalam rangka Gerakan Pengembangan Desa Pertanian Organik untuk Padi target outputnya 40 Ha. Pengembangan Jagung Hibrida target outputnya 2.000 Ha. Dari Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan targetnya adalah Penyusunan Dokumen Perencanaan

target outputnya 1 Dokumen, Penyusunan Dokumen Keuangan dan Perlengkapan Target outputnya 12 bulan. Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Data Informasi target outputnya 1 Tahun. Target output dari seluruh kegiatan tersebut di atas telah dilaksanakan dengan baik berkat adanya dukungan dari semua pihak.

Lokasi Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan umbi terletak di kecamatan Buleleng, dan Lokasi Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia terletak di 9 Kecamatan yaitu Kecamatan Tejakula, Kubutambahan, Sawan Sukasada, Buleleng, Banjar, Seririt, Busungbiu dan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.

Dana yang digunakan dalam melaksanakan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan yang tediri dari Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia dan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan bersumber dari Dana APBN Tugas Pembantuan (TP) Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016. Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan Pogram Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan sebesar Rp. 5.627.464.000, dan terealisasi sebesar Rp. 5.039.866.325, atau 89,56 dan capaian fisik kegiatan mencapai 100 persen.

Dalam pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan yang tediri dari Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia dan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan ada beberapa permasalahan yang dapat teridentifikasi antara lain :

1. Para petani belum sepenuhnya mampu menerapkan teknologi budidaya tanaman pangan sesuai anjuran.
2. Lahan pertanian sawah yang semakin sempit akibat terjadinya alih fungsi lahan dari sektor pertanian ke non pertanian.
3. Penerapan alih teknologi dari Sistem Tanam Biasa menjadi Sistem Tanam Legowo 2 : 1 untuk tanam padi belum mampu terlaksana secara berkelanjutan disebabkan karena biaya upah tanam yang relative mahal.
4. Sumberdaya manusia (petani) sangat lemah dan semakin berkurang hal ini disebabkan karena pendididkan Petanii rendah dan kebanyakan umurnya sudah lanjut serta statusnya kebanyakan penggarap.

5. Kondisi iklim yang sangat ekstrim berdampak terhadap kekeringan berkepanjangan mengakibatkan debit air irigasi semakin menurun dan berpotensi terhadap gagal panen.
6. Terjadinya serangan OPT pada tanaman pangan yang semakin meluas akibat minimnya para petani tentang informasi varietas unggul baru yang tahan terhadap serangan OPT.
7. Masih adanya keraguan dari para petani dalam mengusahakan komoditi jagung untuk panen tua karena khawatir harga yang diperoleh tidak sesuai dan cenderung berkeinginan untuk panen muda.
8. Terjadinya persaingan komoditas dari tanaman pangan ke non tanaman pangan yang lebih menguntungkan.
9. Adanya pemblokiran anggaran/pemotongan anggaran yang mengakibatkan realisasi anggaran satker 229071 kurang dari 90%.

Upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada yaitu :

1. Dilaksanakannya kegiatan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu untuk padi dan jagung agar para petani memahami secara baik dan benar terhadap penerapan teknologi tepat guna untuk pengembangan tanaman pangan.
2. Pembinaan kepada masyarakat petani dilakukan secara berkesinambungan dan menghimbau agar lahan-lahan produktif tidak dialih fungsikan ke non pertanian melalui pemberian insentif berupa kegiatan yang dapat mendukung terlaksananya usaha tani padi.
3. Dalam penerapan alih teknologi dari tanam biasa ke Sistem Tanam Jajar Legowo 2 : 1 agar disediakan insentif ongkos tanam untuk mendorong minat petani melaksanakan Teknologi Sistem Tanam Jajar Legowo 2 : 1 secara berkelanjutan.
4. Status petani di tingkatkan dari status penggarap 25%,30% ditingkatkan menjadi 50% atau bagi hasil supaya petani bergairah.
5. Provitas dan Produksi harus meningkat secara maksimal khususnya di PAJALE (Padi, Jagung, Kedelai) agar para generasi muda mau bertani (Usaha Tani harus menjanjikan)
6. Terus diupayakan melakukan perbaikan terhadap Infrastruktur Jaringan Irigasi dan pemberian bantuan alat mesin pertanian berupa pompa air bagi wilayahnya yang tersedia sumber mata air sehingga dampak kekeringan dapat diantisipasi.

7. Pendampingan dan pengawalan kegiatan terus dilakukan secara terus menerus untuk antisipasi serangan OPT melalui diseminasi terhadap varietas unggul baru yang tahan serangan OPT dan mempunyai potensi produksi tinggi.
8. Dilakukan upaya melalui Temu Usaha antara para kelompok tani dengan pengusaha/ assosiasi yang bergerak di bidang pemasaran komoditas tanaman pangan sehingga produksi dapat diserap dengan harga yang memadai.
9. Pembinaan pada kelompok tani/ masyarakat petani agar senantiasa disinergikan dengan pemahaman analisa usaha tani sehingga para petani dalam mengusahakan komoditinya lebih fokus pada yang lebih menguntungkan.

4. Bidang Kehutanan dan Perkebunan.

Tugas pembantuan yang dituangkan melalui Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan dan Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian diberikan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Program – Program tersebut dituangkan melalui kegiatan ; pengembangan optimalisasi lahan, pengembangan perluasan areal, Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar dan penanamn kapas.

Sumber anggaran dialokasikan melalui anggaran APBN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebesar Rp. 1.650.000.000 yang realisasinya mencapai 100 persen. SKPD pelaksana tugas pembantuan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Buleleng, yang didukung oleh personil sebanyak 12 orang; Kualifikasi Pendidikannya meliputi : SMA 5 orang, Sarjana 1 orang; Pangkat dan Golongan sebagai berikut : Pembina (IV/a) 1 orang, Penata Tk. I (III/c) 3 orang, Penata Muda Tk. I (III/b) 1 orang.

Sarana prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas pembantuan ini cukup memadai, namun masih terdapat permasalahan – permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yaitu ; nilai PPMPBK (Bansos) tidak mencukupi untuk melaksanakan masing – masing kegiatan dan musim hujan datangnya terlambat, sehingga kegiatan yang terkait penanaman pelaksanaannya baru dapat dilaksanakan pada akhir Bulan Desember 2016. Solusi yang telah diambil dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada adalah meningkatkan peran masyarakat /

anggota kelompok tani penerima manfaat kegiatan untuk berswadaya lebih besar guna dapat terlaksananya kegiatan yang telah diberikan oleh pemerintah dan meningkatkan kegiatan gotong royong dengan cara tanpa mengambil upah sehingga upah dimaksud dapat dipakai untuk kegiatan fisik.

b. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

Secara langsung tidak ada bentuk Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng pada kurun waktu tahun 2012-2017. Nemun pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh kecamatan, desa, kelurahan, maupun kelompok masyarakat diberikan dalam bentuk alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Khusus bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Buleleng telah dianggarkan alokasi dana yang bersumber dana dari APBD melalui skema Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD), sedangkan bagi kelurahan di Kabupaten Buleleng telah dipenuhi alokasi anggarannya secara proporsional.

BAB V
TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dengan asas desentralisasi kewenangan Pemerintahan diserahkan kepada daerah otonom dan daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan daerah lain dan pihak ketiga. Kerjasama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkat pertukaran pengetahuan dan teknologi.

Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sejak bergulirnya otonomi daerah menuntut adanya suatu pola kerjasama yang sinergis dan berkelanjutan antar daerah untuk membangun daerahnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pola kerjasama yang lazim diselenggarakan oleh Pemkab Buleleng dengan Pemerintah Kabupaten /Kota lainnya diantaranya melalui kegiatan studi banding yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam rangka peningkatan kapasitas pencapaian kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada berbagai fungsi atau urusan pemerintahan seperti bidang pertanian, perencanaan pembangunan, Penatausahaan keuangan daerah, pemberdayaan masyarakat desa, pariwisata, penataan kelembagaan perangkat daerah, Kehumasan dan politik dalam negeri. Adapun dasar hukum dilaksanakannya kerja sama antar daerah :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata cara Kerjasama Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang petunjuk Teknis Tata cara Kerjasama Daerah;

3. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 130/1014/HK/2012 tentang pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Perjanjian Kerjasama Antar Daerah Periode Tahun 2012 – 2016 :

1. Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Perjanjian Kerjasama Nomor : 475.1/1934.a/2011-075/4597/PEM/2011 tentang Penyeleng-garaan Program Transmigrasi Di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Lengora Pantai Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara. Maksud dan tujuan pelaksanaan kerjasama antara kedua daerah adalah untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan semua potensi yang ada di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Bombana, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di kedua daerah tersebut.
2. Pemerintah Kabupaten Buleleng mengadakan kerjasama dengan Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan dasar hukum Perjanjian Kerjasama Nomor : No.075/20/KS/2012. - No.595/449/SNT/XII/2012, Tgl.6-11-2012 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi Di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Maksud dan tujuan pelaksanaan kerjasama antara kedua daerah adalah untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan semua potensi yang ada di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Morowali, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di kedua daerah tersebut.
3. Pada tahun 2013 berdasarkan perjanjian kerjasama nomor : 075/11/KS/2013 – 28 Tahun 2013 tanggal 24 April 2013 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi Di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Tumbang Jutuh Kec. Rungan Kab. Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng mengadakan kerjasama bidang transmigrasi dengan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah melalui kegiatan peningkatan lokasi transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng, dengan pembiayaan dari APBD Kabupaten Buleleng sebesar Rp. 61.320.000,00. Penyelenggaraan kerjasama ini dalam rangka

meningkatkan dan mengembangkan semua potensi yang ada di Kabupaten Buleleng maupun di di kabupaten Gunung Mas, dengan jangka waktu pelaksanaan kerjasama 5 (lima) tahun sejak perjanjian ini ditandatangani dan dapat diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir.

4. Berdasarkan Kesepakan Bersama Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 181/28/XI/2016-075/29/KB/2016 dan Perjanjian Kerjasama Nomor : 181/29/XI/2016-075/30/KS/2016 tanggal 24 Nopember 2016. Ruang lingkup kerjasama yaitu penyelenggaraan transmigrasi di lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Sinyonyoi Kecamatan kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Mamuju menyediakan bagi 10 KK dari Kabupaten Buleleng sesuai kebutuhan untuk transmigrasi yang bebas dan tidaki tumpang tindih dengan kepentingan lain atau bermasaalah dengan perolehan lahan seluas 2 Ha tiap KK dengan perincian ; lahan pekarangan seluas o,25 Ha, lahan usaha I seluas 0,75 Ha dan lahan usaha II seluas ; 1 Ha (dalam bentuk hutan).
5. Berdasarkan kesepakatan bersama Nomor 15/KB/HK/2016-075/22/KB/2016, dan perjanjian kerjasama Nomor :16/PKS/HK/2016-075/23/KS/2016, tanggal 19 September 2016, Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Pemerintah Kabupaten Ngada melaksanakan kesepakatan bersama melalui kegiatan pembangunan dan pengembangan sektor pertanian berbasis agribisnis dalam rangka menciptakan keterpaduan pembangunan dan pengembangan sektor pertanian berbasis agribisnis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ngada dan Kabupaten Buleleng. Kesepakatan bersama tersebut ditindaklanjuti melalui perjanjian kerjasama tentang pengembangan usaha tani anggur berbasis managemen dan teknologi. Tujuan dilaksanakannya kerjasama ini adalah untuk menghasilkan produk usaha tani anggur yang dilakukan melalui konsep managemen dan teknologi serta menciptakan produk – produk unggulan daerah yang berorientasi agrobisnis sebagai upaya perwujudan sarana penunjang ekonomi masyarakat. Ruang lingkup perjanjian kerjasama meliputi pengembangan usaha tani anggur dengan pemanfaatan lahan melalui sharing pengetahuan

tentang pengembangan usaha tani anggur, sharing pengetahuan tentang system agrobisnis lahan melalui teknologi pengolahan tanah, pengairan, pemeliharaan, pengendalian organism penggangu tananam dan pemupukan pada uasaha tani anggur ; dari hulu berupa input sarana prasarana dan sarana produksi sampai hilir berupa teknologi panen, pasca panen dan pemasaran.

6. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Kabupaten Badung Nomor : 075/17/KB/2016-134.4/2840/KB/Ad.Prem.Um/2016, tanggal 29 Juli 2016 tentang Distribusi dan Pemasaran Pangan antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Kabupaten Badung. Maksud kesepakatan bersama ini adalah untuk mewujudkan perpaduan yang sinergi saling membantu dalam distribusi dan pemasaran pangan, sejalan dengan spirit pola pembangunan semesta berencana. Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk mempercepat distribusi dan pemasaran pangan sehingga akses pangan masyarakat di Bali dan khususnya di Kabupaten Buleleng dan Badung menjadi lebih terjamin. Ruang lingkup kesepakatan bersama ini yaitu ; memantapkan sinergi kerjasama antara Kabupaten Buleleng dengan Badung sejalan dengan spirit pola pembangunan semesta berencana, penyediaan informasi tentang ketersediaan dan pemasaran pangan khususnya beras, cabai, kopi dan komoditas lainnya, memperkuat system yang telah dibangun melalui Tim Penanggulangan Inflasi Daerah di masing – masing kabupaten, memperkuat system smart city yang akan dibangun sehingga terwujud pola connecting, controlling dan managemen di bidang pangan serta memantapkan aksesbilitas pangan bagi masyarakat sebagai wujud ketahanan pangan masyarakat.

B. Kerjasama Antar Pemerintah.

Kerjasama Antar Pemerintah Periode 2012 – 2016.

1) Bidang Kesehatan.

1. Dalam bidang kesehatan Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng mengadakan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Bupati Buleleng dengan Gubernur Bali Nomor 075/2484/pem/2011 tanggal 8 Juni 2011

tentang Kerjasama Praktik Klinik Kebidanan dan Keterampilan Dasar Praktik Klinik. Maksud dari perjanjian ini adalah untuk melaksanakan pendidikan kebidanan dalam rangka meningkatkan keterampilan mahasiswa kebidanan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada masyarakat; Tujuan perjanjian adalah memperoleh sumber daya manusia yang terampil di bidang kebidanan. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun sejak perjanjian kerjasama ini ditandatangani atau sampai Tahun 2016.

2. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Provinsi Bali yang dituangkan melalui Perjanjian Kerjasama Nomor: 075/32/KS/2016-075/33/PKS/B.Pem/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang pembiayaan peserta penerima bantuan iuran (PBI) daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk menyediakan dana pembayaran iuran peserta penerima bantuan iuran daerah dalam integrasi Jaminan Kesehatan Bali Mandara ke Program Jaminan Kesehatan Nasional. Ruang lingkup kerjasama ; mengintegrasikan program Integrasi Jaminan Kesehatan Bali Mandara ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional, menyediakan anggaran untuk pembayaran iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah dan melakukan pembayaran iuran ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai jumlah peserta yang menjadi tanggungan. Peserta penerima bantuan iuran daerah Kabupaten Buleleng berjumlah 117.439, dengan besaran iuran per peserta Rp. 23.000 per bulan. Persentase sharing pembayaran bantuan iuran daerah Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Provinsi Bali 51,97 persen berbanding 48,03 persen. Dana yang harus dibayarkan Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai tindaklanjut perjanjian kerjasama ini adalah Rp. 16.845.121.330,80.
3. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Provinsi Bali yang dituangkan melalui Perjanjian Kerjasama Nomor : 075/28/KS/2016-075/25/PKS/B.Pem/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016, tentang pelaksanaan pelayanan penderita tuberculosis multi drug resistance (TB MDR) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng. Pelaksanaan kerjasama ini dimaksudkan untuk mengembangkan program

penanggulangan tuberculosis multi drug resistance dengan tujuan untuk menemukan, mengobati dan merawat pasien tuberculosis multi drug resistance. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi kegiatan tuberculosis multi drug resistance; pelayanan pasien penderita tuberculosis multi drug resistance di RSUD Kabupaten Buleleng ; pelayanan pasien tuberculosis multi drug resistance diperuntukkan hanya untuk WNI. Segala biaya yang timbul untuk kegiatan bersumber dari anggaran Global Fund ATM, Komponen TB fase Ner Funding Model (NFM) 2016/2017.

4. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Provinsi Bali yang dituangkan melalui Perjanjian Kerjasama Nomor : 075/12/KS/2016-075/15/PKS/B.Pem/X/2016 tanggal 28 Juni 2016, tentang Tenaga Pengajar dan Praktek Mahasiswa UPT. Akademi Kebidanan Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Pelaksanaan kerjasama ini dimaksudkan untuk melaksanakan pembelajaran teori dan praktikum di kelas/Lab UPT. Akademi Kebidanan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, pembelajaran teori dan praktikum kebidanan dalam tatanan pelayanan nyata di fasilitas pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dan RSUD Kabupaten Buleleng. Tujuannya adalah untuk memperoleh sumber daya manusia yang kompeten di bidang kebidanan dalam rangka meningkatkan kompetensi mahasiswa Diploma III Kebidanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Provinsi Bali Nomor : 075/24/KS/2013 tentang Jaminan Kesehatan bali Mandara (JKBM). SKPD Pelaksana untuk perjanjian kerjasama ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.

2) Bidang Energi Sumber Daya Mineral.

Kesepakatan Bersama Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Gubernur Bali dan Bupati Buleleng. Bidang kerjasama yaitu Penelitian dan Pengembangan Pemanfaatan Gas Metan dari Sanitary Landfill TPA Sampah untuk bahan bakar dan Pembangkit Listrik di TPA

Bengkala, Desa Bungkulan Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. SKPD Pelaksana Kerjasama adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng. Hasil kerjasama adalah termanfaatkannya gas metan di TPA Bengkala sebagai pembangkit enerrgi alternatif bagi masyarakat di sekitar TPA Bengkala. Saat ini tindaklanjut kerjasama sudah pada fase melaksanakan tahap uji kinerja Peralatan Pembangkit Listrik dengan Gas Metan.

3) Bidang Kepegawaian.
   1. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Kementerian Pertanian RI, yang dituangkan melalui Kesepakatan Bersama Nomor : 075/24/KB/2016-13.1/MOU/09/2016 tanggal 2 September 2016, tentang Pengadaan CPNS Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah kabupaten Buleleng dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian. Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan pengadaan CPNS Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dari THL-TB Penyuluh Pertanian, yang bertujuan ubtuk memenuhi kebutuhan Penyuluh Pertanian PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng yang berkualitas dan berkompeten. Ruang lingkup kesepahaman bersama ini meliputi perencanaan, seleksi, pengangkatan dan penempatan CPNS dari Pelamar THL-TB Penyuluh Pertanian.
   2. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Kementerian Kesehatan RI, yang dituangkan melalui Kesepakatan Bersama Nomor : 075/04/KB/2016-HK.0501/11/875/2016 tanggal 5 April 2016, tentang Pengadaan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dari Pegawai Tidak Tetap Pusat. Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan pengadaan PNS Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk kebutuhan jabatan dokter, dokter gigi dan bidan dari PTT pusat yang masih aktif terhitung mulai 1 September 2015.

4) Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
   Kerjasama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Provinsi Bali yang dituangkan melalui Perjanjian Kerjasama Nomor : 075/14/KS/2016-075/16/PKS/B.Pem/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016,

tentang pembinaan bahasa/penyuluh bahasa, aksara dan sastra Bali. Perjanjian ini dimaksudkan untuk menjaga ketahanan budaya Bali untuk melestarikan, mengembangkan bahasa, aksara dan sastra Bali agar tidak punah dari ancaman globalisasi. Ruang lingkup perjanjian ini meliputi ; pelestarian dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara Bali, penempatan tenaga penyuluh bahasa bali di desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Buleleng.

5) Bidang Penyedian Air Minum.
Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Pemerintah Kabupaten Jembrana, yang dituangkan melalui Perjanjian Kerjasama Nomor : 075/13/PKS/B.PEM/VI/2016-075/10/KS/2016-415.4 /01 /PKS /Pem /2016, tanggal 15 Juni 2016 tentang Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pengelolaan system Penyediaan Air Minum Regional Titab Provinsi Bali. Tujuan perjanian kerjasama ini adalah untuk melaksanakan percepatan kelengkapan sarana dan prasarana SPAM Regional Titab Provinsi Bali, mensinergikan pengelolaan SPAM Regional Titab Provinsi Bali, mewujudkan efesiensi, efektifitas dan produktifitas dalam penyediaan layanan air minum, memenuhi kebutuhan air secara kualitas, kuantitas dan kontinuitas dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan, derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buleleng dan Jembrana, perluasan pelayanan air minum secara berkelanjutan di Kabupaten Buleleng dan Jembrana. Ruang lingkup perjanjian ini meliputi ; pengaturan tentang pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan SPAM Regional Titab Provinsi Bali, Pengembangan dan pengelolaan SPAM Regional Titab Provinsi Bali untuk Kabupaten Buleleng dan Jembrana meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan dan unit pengelolaan. Pembiayaan yang ditimbulkan akibat perjanjian kerjasama ini dibebankian melalui anggaran APBN, APBD Provinsi Bali, APBD Kabupaten Buleleng dan APBD Kabupaten Jembrana.

6) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Kesepakatan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah kabupaten Buleleng Nomor 075/25/KB/2013 tanggal 25 Oktober 2013 tentang Gerbangsadu Mandara. SKPD Pelakasana

kesepatan bersama ini adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buleleng.

C. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga.

1) Pada Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Buleleng mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Advokat, Penasehat Hukum/Konsultan Hukum Trias Law Firm yang beralamat di Jln. Anggrek Nomor 36 Singaraja.
2) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Kantor Regional X BKN Denpasar dengan Dasar Hukum Perka BKN No. 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan CPNS.
3) Perjanjian Kerjasama Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng dengan PT. Tropical Ocean Prawn (PT.TOP),Nomor : 028/2697/Per/2012 tentang sewa pakai fasilitas di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sangsit Kecamatan sawan Kabupaten Buleleng. Perjanjian Kerjasama Nomor : 028/2702/Per/2012 – 024/KPN-MB/VII/2012 tentang pemanfaatan /pengelolaan solar packet dealer nelayan (SPDN) di PPI sangsit.
4) Melalui perjanjian kerjasama Nomor : 075/02/KS/2013-005/PASCA-UM/I/2013, tanggal 5 Januari 2013 Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Bagian Humas dan Protokol melaksanakan kerjasama dengan Universitas Pendidikan Nasional Denpasar tentang pelaksanaan Tri Dharma Pergiuruan Tinggi. Kerjasama ini dilaksanakan dalam rangka penelitian dan pengkajian pengembangan sumber daya manusia dalam membangun ekonomi kreatif guna mewujudkan produk unggulan di Kabupaten Buleleng.
5) Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Bappeda Kabupaten Buleleng mengadakan kerjasama dengan Universitas Panji Sakti Singaraja, dengan dasar kesepakatan bersama Nomor : 075/17/KB/2013 – 172/UNIPAS/UM 10101/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013 tentang pelaksanaan Tri Dharma Pergiuruan Tinggi.
6) Pemerintah Kabupaten Buleleng mengadakan kerjasama dengan Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja melalui Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng dan LPM Universitas Pendidikan Ganesa, dengan perjanjian kerjasama Nomor : . 075/16/KS/2013 – 2731/UN 48/KS/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Pengkajian perubahan dan penataan organisasi perangkat kerja Kabupaten Buleleng yaitu Kantor Pelayanan Terpadu, Kantor Lingkungan Hidup, Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, Bagian Perlengkapan dan asset Daerah Sekretariat Daerah dan Satuan

Polisi Pamong Praja. Kerjasama ini bertujuan untuk menghasilkan naskah akademik tentang perubahan dan penataan organisasi perangkat kerja Kabupaten Buleleng.

7) Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng melaksanakan Kerjasama dengan Badan Kerjasama Lembaga Perkreditan Desa (BKS-LPD) yang dituangkan melalui perjanjian kerjasama Nomor : 075/09/KS/2013 – 81/SP.PEMB/BKS/BLL/III/2013 tanggal 6 Maret 2013 tentang pembinaan dan pengawasan LPD di Kabupaten Buleleng.
8) Melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng pada tahun 2013 Pemerintah kabupaten Buleleng mengadakan kerjasama dengan Advokat/Konsultan Hukum Gede Indria,SH yang bekedudukan di Jalan Suli Nomor 119 B1 Denpasar dengan Perjanjian Kerjasama Nomor : 075/05A/KS/2013-26/GI&R/Adv/02/2013 tanggal 4 Pebruari 2013, tentang pemberian bantuan hukum kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng. Kerjasama ini dilaksanakan untuk memberikan bantuan hokum dalam penyelesaian perkara gugatan tata usaha Negara Nomor : 32/G/2012/PTUN.Dps yang diajukan oleh Nyoman Parsua,MBA kepada Panitia Pengadaan Barang dan jasa Dinas Pendidikan kabupaten Buleleng Tahun 2012 dalam obyek sengketa pengumuman pemenang pelelangan Nomor : 027/68/P2BJ-PJ/DISDIK/2012 tertanggal 22 Nopember 2012.
9) Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Pendidikan kabupaten Buleleng melaksanakan Kerajsama dengan Advokat/Konsultan Hukum Gede Indria,SH yang bekedudukan di Jalan Suli Nomor 119 B1 Denpasar dengan perjanjian kersama Nomor : 075/21/KS/2013 - 37/GI&R/Adv/02/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang pemberian bantuan hukum kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng. Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan dalam rangka pemberian bantuan hokum atas upaya banding atas Putusan PTUN Denpasar Nomor :32/G/2012/PTUN.Dps tanggal 11 Juni 2013.
10) Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng melaksanakan kerjasama dengan /Konsultan Hukum Gede Indria,SH yang bekedudukan di Jalan Suli Nomor 119 B1 Denpasar, dengan perjanjian kerjasama Nomor : 075/19/KS/Pem/2013 – 35.KS/Adv/GI&R/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 tentang pemberian bantuan hokum pada Pemerintah Kabupaten Buleleng.
11) Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng melaksanakan kerjasama dengan /Konsultan Hukum Gede

Indria,SH yang bekedudukan di Jalan Suli Nomor 119 B1 Denpasar, dengan perjanjian kerjasama Nomor : 075/05/KS/Pem/2013 – 25 /GI&R/Adv/02/2013 tanggal 4 Pebruari 2013 tentang pemberian bantuan hokum pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. Kerjasama ini dilaksanakan dalam rangka penyelesaian gugatan tata usaha Negara Nomor : 02/G/2013/PTUN.Dps yang diajukan oleh Komang Yoga dalam obyek sengketa Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 503/1661/HK/2012 tentang pencabutan ijin usaha bar Nomor : 503-22/013/IUB/KPT/2010 tertanggal 5 Oktober 2012.

12) Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : JAN-08/C.5.7/TAS/07/2013, tanggal 1 Juli 2013, Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Bagian Keuangan Setda kabupaten Buleleng melaksanakan kerjasama dengan PT.Taspen (Persero) yang berkedudukan di Jalan Raya Puputan No.21 Niti Mandala Renon, Denpasar tentang penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah Dan Pelayanan Proaktif PNS Daerah. Kerjasama ini dilaksanakan berkaitan dengan terbitnya Peraturan Direksi PT Taspen (Persero) Nomor : PD-07/DIR/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang penerapan aplikasi system informasi managemen gaji (SIMGAJI) PNS daerah dan pelayanan proaktif.
13) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Lembaga Gapura Indonesia Sejahtera (LGIS). Dengan dasar hukum SPK Nomor : 027/16/SPK/BKD/2014, tertanggal 2 Juli 2014. Bidang yang dikerjasamakan adalah Pelatihan Pengadaan Barang Jasa (P2BJ), yang dituangkan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.
14) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan PT Nirwana Media Televisi, dengan dasar hukum Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dengan PT.Nirwana Media Televisi Nomor : 075/36/KB/PEM/2014 - 071/DIR-NIR/XI/2014 Tentang Peliputan dan Penyiaran Kegiatan di bidang Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng.
15) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan CV. Dewata Solusindo, dengan dasar hukum Undang – Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 1992 tentang Pokok – Pokok Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 140 Tahun 1997 tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi Departemen Dalam Negeri dan

Pemerintah Daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Bidang kerjasama adalah Jasa Konsultasi Pengembangan Aplikasi yang dituangkan melalui kegiatan Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

16) Perjanjian kerjasama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan PT Wisata Bali Nusa Indah. Dengan Dasar Hukum SPK Nomor : 027/15/SPK/BKD/2014 (Diklatpim Tk. III) dan SPK Nomor : 027/19/SPK/BKD/2014 (Diklatpim Tk.IV). Bidang Kerjasama yaitu Belanja Jasa Akomodasi dan Transportasi Diklatpim Tk.III dan Belanja Jasa Akomodasi dan Transportasi Diklatpim Tk. IV. 4.
17) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan UD. Sari Mertha dengan Dasar Hukum SPK Nomor : 027/25/SPK/BKD/2014. Bidang Kerjasama yaitu Pengadaan makanan dan minuman Diklatpim Tk. IV. Pelaksanaan kerjasama ini dituangkan melalui Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah.
18) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan PT Tropical Ocean Prawn (PT. TOP), dengan dasar hukum Perjanjian kerjasama antara PT Tropical Ocean Prawn (PT. TOP) dengan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan kabupaten Buleleng Nomor : 523.3/903/Diskanla/2013 tentang Perjanjian Sewa Pakai Fasilitas di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sangsit,Kecamatan Sawan, Kabupaten Bueleng. Bidang kerjasama adalah Sewa pakai fasilitas yang ada di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sangsit berupa 1 unit rumah jaga,kios, mess dan satu areal lahan di sebelah selatan SPDN yang digiunakan sebagai kanntor untuk fasilitas pengembangan udang dengan system aquapot. Dengan nana kegiatan sewa pakai fasilitas di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sangsit. Penyelenggara kerjasama yang dilaksanakan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng dengan Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan dan Golongan yang dilibatkan meliputi Pegawai Negeri Sipil : 66 orang, Pegawai Honor Daerah : 3 orang, Pegawai Kontrak : 52 orang. Tingkat Pendidikan : S2 : 2 orang, S1 : 30 orang, D3 : 9 orang, SMA sederajat : 24 orang, SMP sederajat : 1 orang, Golongan IV:8 orang, Golongan III:41 orang, Golongan II:16 orang, Golongan I:2 orang Pejabat Struktural : 27 orang (Eselon IIb : 1 orang, Eselon IIIb : 5 orang, Eselon IV : 21 orang) dan Pejabat Fungsional 17 orang. Dalam melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga ini tidak terdapat pembebanan anggaran pada APBD Kabupaten Buleleng (DPA Dinas Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Buleleng). Perjanjian sewa pakai fasilitas di Pangkalan Pendaratan ikan (PPI) Sangsit selama 5 tahun terhitung sejak 11 Pebruari 2013 sampai dengan 11 pebruari 2018. Hasil pelaksanaan kerjasama adalah adanya penerimaan dari perjanjian sewa pakai fasilitas di PPI Samgsit sebesar Rp.12.960.000,- per tahun. Dan belum ada permasalahan yang menjadi hambatan pelaksanaan kerjasama.

19) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Mina Bahari, Dengan dasar hukum yaitu Perjanjian kerjasasama antara Pemkab. Buleleng dengan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Mina Bahari Nomor : 028/2702/Perl/2012 - 024/KPN-MB/VII/2012 tentang Pemanfaatan/Pengelolaan Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) di Pangkalan Pendaratan ikan (PPI) Sangsit, Kecamatan Sawan,Kabupaten Buleleng. Bidang kerjasama adalah Pemanfaatan atau pengelolaan Solar Pocked Dealer Nelayan (SPDN) di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Desa Sangsit,Kecamatan Sawan,Kabupaten Buleleng. Dengan nana kegiatan pemanfaatan/pengelolaan Solar Pocked Dealer Nelayan (SPDN) di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sangsit. Penyelenggara kerjasama yang dilaksanakan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng dengan Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan dan Golongan yang dilibatkan meliputi Pegawai Negeri Sipil : 66 orang, Pegawai Honor Daerah : 3 orang, Pegawai Kontrak : 52 orang. Tingkat Pendidikan : S2 : 2 orang, S1 : 30 orang, D3 : 9 orang, SMA sederajat : 24 orang, SMP sederajat : 1 orang, Golongan IV:8 orang, Golongan III:41 orang, Golongan II:16 orang, Golongan I:2 orang Pejabat Struktural : 27 orang (Eselon IIb : 1 orang, Eselon IIIb : 5 orang, Eselon IV : 21 orang) dan Pejabat Fungsional 17 orang. Dalam melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga ini tidak terdapat pembebanan anggaran pada APBD Kabupaten Buleleng (DPA Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng). Perjanjian pemanfaatan/ pengelolaan Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) di PPI Sangsit selama 15 tahun terhitung sejak Tanggal 2 Juli 2012 sampai dengan 2 Juli 2027. Dan belum ada permasalahan yang menjadi hambatan pelaksanaan kerjasama.

20) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Yayasan Reef Chek Indonesia, dengan dasar hukum Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah daerah Kabupaten Buleleng dengan Yayasan Reef Check Indonesia Nomor : 075/32/KS/PEM/2014 - 15/12-1/MOU/YRCI-3 Tentang Dana Bantuan Penelitian di Bidang Kelautan dan Terumbu Karang di Kabupaten Buleleng. Bidang kerjasama adalah Dana bantuan penelitian di bidang kelautan dan

terumbu karang di Kabupaten Buleleng. Penyelenggara kerjasama yang dilaksanakan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng dengan Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan dan Golongan yang dilibatkan meliputi Pegawai Negeri Sipil : 66 orang, Pegawai Honor Daerah : 3 orang, Pegawai Kontrak : 52 orang. Tingkat Pendidikan : S2 : 2 orang, S1 : 30 orang, D3 : 9 orang, SMA sederajat : 24 orang, SMP sederajat : 1 orang, Golongan IV:8 orang, Golongan III:41 orang, Golongan II:16 orang, Golongan I:2 orang Pejabat Struktural : 27 orang (Eselon IIb : 1 orang, Eselon IIIb : 5 orang, Eselon IV : 21 orang) dan Pejabat Fungsional 17 orang. Dalam melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga ini tidak terdapat pembebanan anggaran pada APBD Kabupaten Buleleng (DPA Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng). Perjanjian dana bantuan penelitian di bidang kelautan dan terumbu karang diKabupaten Buleleng selama 3 tahun terhitung sejak 3 Desember 2014 sampai dengan 3 Desember 2017. Hasil pelaksanaan kerjasama adalah tersedianya hasil penelitian tentang terumbu karang di Kabupaten Buleleng. Dan belum ada permasalahan yang menjadi hambatan pelaksanaan kerjasama.

21) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk dengan alamat Jalan Letkol Wisnu Nomor 2 Singaraja. Dengan dasar Hukum yaitu Surat Perintah Kerja Nomor : 027/ 146/Kominfo/2016, Tanggal : 14 Januari 2016 dan Surat Perjanjian Kerjasama, Nomor : 027/135/Kominfo/2016, Tanggal : 13 Januari 2016. Bidang Kerjasama yaitu kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi bidang kerjasama yang dilakukan adalah sewa jaringan internet Desa/Kelurahan dan kegiatan Fasilitasi Penyebarluasan Informasi bidang kerjasama yang dilakukan adalah penyediaan bandwidth untuk akses internet. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng, yang didukung oleh personil sebanyak 8 orang, dengan jenjang pendidikan S2 sebanyak 2 orang, pendidikan S1 sebanyak 3 orang, pendidikan D3 sebanyak 1 orang, pedidikan SMA/SMK sebanyak 2 orang. Pegawai dengan golongan golongan III sebanyak 8 orang. Sumber dana pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi adalah dari APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016, DPPA Nomor :1.25/01/78/DPPA/2016 dengan Kode Rekening : 1.25.1.25.01.15.02.5.2.2.10.0011. Jumlah Anggaran yang digunakan sebesar Rp 105.754.000, dan Sumber dana pada Kegiatan Fasilitasi

Penyebarluasan Informasi adalah dari APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016, DPPA Nomor :1.25/01/78/DPPA/2016 dengan Kode Rekening : 1.25.1.25.01.15.09.5.2.2.03.0006. Jumlah Anggaran yang digunakan sebesar Rp553.443.000. Jangka Waktu Kerjasama yaitu sewa jaringan online sistem pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi adalah selama 12 (sebelas) bulan kalender terhitung mulai bulan 14 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 dan jangka waktu kerjasama penyediaan bandwidth untuk akses internet pada Kegiatan Fasilitasi Penyebarluasan Informasi adalah selama 12 bulan terhitung mulai tanggal 13Januari 2016 s/d 31 Desember 2016. Hasil (Output) dari kerjasama pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi adalah berfungsinya jaringan komunikasi dan informasi (online) Pemkab sebanyak 95 titik. Hasil (Output) dari kerjasama pada Kegiatan Fasilitasi Penyebarluasan Informasi adalah lancarnya akses informasi melalui internet dan multimedia danterlayaninya akses internet bagi instansi pemerintah dan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi adalah masih banyaknya desa yang belum terjangkau oleh jaringan kabel Telkom sehingga kurang lancarnya akses informasi internet dan multi media. Dengan adanya masalah diatas diharapkan adanya pengembangan jaringan kabel Telkom dengan diabuatkannya repearter / antena penerus untuk daerah-daerah yang belum di jangkau oleh kabel sehingga jaringan komunikasi dan informasi dan akses informasi melalui internet dan multimedia dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan.

22) Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan BPJS Kesehatan Cabang Singaraja yang dituangkan melalui Perjanjian Kerjasama Nomor 075/21/KS/2016 – 33/KTR/XI-09/2016, tentang Pemanfaatan KTP Elektonik dan database kependudukan yang berbasis NIK dalam layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Perjanjiankerjasama ini dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi dan peran Pemerintah Kabupaten Buleleng dan BPJS Cabang Singaraja dalam pemanfaatan KTP-el dan database kependudukan yang berbasis NIK untuk mengefektifkan penyelenggaraan Program l Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
23) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, yang dituangkan melalui Perjanjian Kerjasama Nomor 075/19/KB/2016 – 0658/SPK/DIR/DJA/2016, tertanggal 26 Juli 2016 tentang Pemanfaatan teknologi informasi untuk monitoring pajak

hotel, pajak restoran dan pajak hiburan secara online dan pemanfaatan layanan jasa perbankan untuk menerima pembayaran pajak daerah. Perjanjian kerjasama ini untuk memberikan kemudahan bagi Kabupaten Buleleng dalam melakukan pemantauan dan pengawasan dengan memanfaatakan teknologi informasi dari PT. BPD Bali terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajak setiap bulannya.

24) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan PT Baruna Indonesia yang dituangkan melalui Kesepakatan Bersama Nomor 075/07/KB/2016 tertanggal 18 Mei 2016, tentang pengembangan dan pengelolaan Bandar Udara Letkol Wisnu di Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Maksud dari kesepakatan bersama ini adalah untuk memberdayakan potensi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Buleleng dan PT. Baruna Indonesia dalam penggunaan dan pengembangan lahan serta pariwisata. Sedangkan tujuan dari perjanjian kerjasama ini yaitu untuk dapat memberikan suatu manfaat yang besar terutama dalam hal penggunaan dan pengembangan lahan – lahan dan Bandar Udara Letkol Wisnu sehingga dapat menghasilkan secara optimal serta dapat memberikan pelayanan secra optimal bagi peningkatan perekonomian daerah dengan mempertahankan dan memelihara kelestarian alam dan budaya serta kekhususan daerah sebagai kawasan pariwisata alami, unik dan anggun.
25) Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan BPJS Kesehatan Cabang Singaraja yang dituangkan melalui Perjanjian Kerjasama Nomor 075/34/KS/2016 – 47/KTR/XI-09/2016, tertanggal 19 Desember 2016, tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng. Perjanjiankerjasama ini dilaksanakan sebagai dasar pelaksanaan jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan sebagai PBI Daerah dalam Program JKN. Ruang lingkup kerjasama meliputi kepesertaan PBI Daerah Program JKN, pelayanan kesehatan peserta PBI Daerah JKN dan pembayaran iuran peserta PBI daerah. Jumlah maksimal peserta PBI Daerah di Kabupaten Buleleng sejumlah 117.439 jiwa, sedangkan jumlah awal yang didaftarkan Pemerintah Kabupaten Buleleng sejumlah 86.258 jiwa. Besaran iuran penduduk yang didaftarkan Pemerintah Kabupaten sebesar Rp. 23.000 per jiwa per bulan. Jumlah total iuran yang harus disetorkan Pemerintah Kabupaten Buleleng per bulan sebesar Rp. 1.983.934.000.000,00.

26) Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Universitas Panji Sakti Singaraja, yang dituangkan melalui Perjanjian Kerjasama Nomor 075/06/KS/2016 – 055/UNIPAS/UM.01.01/V/2016 tertanggal 2 Mei 2016 tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pelaksanaan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Panji Sakti Singaraja dan meningkatkan efesiensi, efektifitas, inovasi serta mutu pelaksanaan program pembangunan daerah Kabupaten Buleleng. Ruang lingkup pelaksanaan kerjasama meliputi Bidang Pendidikan yakni pengembangan kompetensi sumber daya manusia, Bidang penelitian meliputi ; kegiatan ilmiah dan pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi bakti social dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
27) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, yang dituangkan melalui Perjanjian Kerjasama Nomor : 075/25/KS/2016-419/II.4/UND/IX/2016 tertanggal 24 September 2016 tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pelaksanaan kerjasama dimaksudkan untuk menjadikan perguruan tinggi, khususnya Universitas Nasional Denpasar sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Kabupaten Buleleng. Tujuan pelaksanaan kerjasama adalah meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pelaksanaan tugas Tri Darma Perguruan Tinggi Universitas Nasional Denpasar dan meningkatkan efesiensi, efektifitas, inovasi serta mutu pelaksanaan program pembangunan daerah dan pengembangan potensi sumber daya daerah Kabupaten Buleleng.

D. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah.

1) Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng telah melaksanakan koordinasi dan bekerja sama dengan instansi vertikal seperti Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan, Komando Distrik Militer (Kodim) serta unsur akademisi dari perguruan tinggi. Kerjasama antar instansi ini secara nyata dilaksanakan pada Program dan kegiatan-kegiatan,sebagai berikut :
   - Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Perundang-undangan.
   - Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
   - Kegiatan Fasilitasi Sosialisai Peraturan Perundang-undangan.

- Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan.
- Pembinaan dan Penuntunan Penyuratan Awig-awig.
- Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RAN HAM).

2) Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng mengadakan kesepakatan bersama dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali terkait petunjuk teknis pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data pada Pemkab. Buleleng dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, dengan dasar hokum kegiatan Kesepakatan Bersama Nomor : 075/03/KS/2013 tanggal 21 Januari 2013.
3) Pemerintah kabupaten Buleleng juga melaksanakan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Singaraja melalui kesepakatan bersama Nomor : 075/14/KB/2013 tanggal 29 Juli 2013 terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha Negara.
4) Dalam rangka keselarasan dan keserasian pelaksanaan pemerintahan daerah, diperlukan adanya koordinasi yang mantap dan berkelanjutan antar para unsur pimpinan daerah. Kegiatan koordinasi ini di kabupaten Buleleng pada tahun 2012 - 2016 dilaksanakan melalui rapat koordinasi, rapat kerja maupun pertemuan – pertemuan formal para anggota Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten Buleleng. Selain pertemuan formal melalui rapat maka koordinasi para anggota Forkopimda setiap saat dilaksanakan baik melalui komunikasi langsung, via telpon, maupun surat. Dengan adanya koordinasi antar para pimpinan daerah membawa dampak adanya jalinan hubungan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dengan instansi vertikal daerah yang mewakili kewenangan pemerintah di daerah. Hal tersebut berimplikasi kepada semakin terarahnya kebijakan – kebijakan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu –isu strategis, aktual dan memerlukan penanganan cepat yang menyangkut kondisi politik, sosial, budaya dan keamanan ketertiban di Kabupaten Buleleng adalah hal – hal pokok yang dibahas dalam forum koordinasi. Adapun instansi vertikal yang turut dalam Forum koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kabupaten Buleleng adalah Kodim 1609/Buleleng, Polres Buleleng, Pengadilan Negeri Singaraja, Kejaksaan Negeri Singaraja. Disamping itu koordinasi juga

dilaksanakan dengan Badan Statistik Kabupaten Buleleng, Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, Kantor Kementrian Agama Kabupaten Buleleng, Kantor Pajak Pratama Kabupaten Buleleng serta instansi lainnya.

5) Bahwa untuk meningkatkan efektifitas capaian sasaran kinerja kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buleleng, di pandang perlu membentuk Forum Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 360/288/HK/2013 tentang Pembentukan Forum Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013. BPBD yang merupakan sebuah instansi yang berwenang dalam kaitan dengan penanggulangan bencana memiliki TUPOKSI yang telah diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 yang memiliki fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan. Sehubungan dengan itu dalam rangka untuk mempermudah koordinasi penanganan bencana baik yang termasuk dalam fase pra bencana, tanggap darurat maupun rehabilitasi dan rekonstruksi, maka dengan Menyikapi amanat UU 24 Tahun 2007 yang antara lain menyebutkan bahwa fungsi dari BPBD adalah koordinasi, komando, dan pelaksana. Sehubungan dengan fungsi dari lembaga tersebut, maka dibentuklah suatu Forum Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 yang beranggotakan SKPD terkait, TNI/ POLRI, Pramuka, PMI, RRI RAPI dan ORARI, serta Komunitas Jurnalis . Dengan adanya Forum ini, diharapkan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah dalam bidang penanggulangan bencana bisa berjalan dengan efektif dan efisien.
6) Penyelenggaraan urusan kehutanan di Kabupaten Buleleng senantiasa disertai koordinasi dengan Instansi Vertikal dalam hal ini Departemen Kehutanan yang ada di daerah. Materi koordinasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan urusan kehutanan adalah pembahasan dan pelaksanaan program dan kegiatan nasional yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan di daerah Kabupaten Buleleng seperti Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Instansi yang terlibat dalam koordinasi tersebut yaitu :
   a) Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Unda Anyar
   b) Balai Pembenihan Tanaman Hutan (BPTH) Bali, Nusra.
   c) Balai Pengelolaan Hutan Mangrove (BPHM) Wilayah I
   d) Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VIII
   e) Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)
   f) Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Wilayah IX

Penyelenggaraan koordinasi yang dilaksanakan di bidang Urusan Kehutanan adalah kegiatan – kegiatan nasional yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di daerah yaitu :

1) Pelaksanaan kegiatan pengembangan Hutan Rakyat
2) Pelaksanaan kegiatan Reboisasi Hutan Dalam Kawasan dan Luar Kawasan
3) Pelaksanaan kegiatan Pembentukan Tim Forum Daerah Aliran Sungai (FDAS)
4) Pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan
5) Pelaksanaan kegiatan Konservasi Sempadan pantai
6) Penyelenggaraan kegiatan pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR)

Hasil yang diperoleh dalam koordinasi dengan Instansi Vertikal di daerah adalah terselenggaranya pengembangan Hutan Rakyat, terselenggaranya kegiatan Reboisasi hutan dan Lahan, terbentuknya Forum DAS, terselenggaranya kegiatan perlindungan hutan, terpeliharanya tanaman kehutanan di kawasan sempadan pantai dan terselenggaranya pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR).

7) Pelaksanaan Koordinasi Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem , dengan dasar hukum Perjanjian kerjasasama antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Balai Besar Penelitian Pengembangan Budidaya Laut Gondol Nomor 075 / 34 / KS / PEM / 2014 - 31 / BALITBANG KP /BBPPBL / TU.210 /2014 Tentang Pemanfaatan Zona Penelitian Budidaya di Dusun Gondol, Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak,Kabupaten Buleleng. Bidang kerjasama adalah Pemanfaaatan zone penelitian budidaya di Duusun Goldol, desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Dengan nana kegiatan pemanfaatan zona penelitian budidaya di Dusun Gondol, Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, kabupaten Bulelelng. Penyelenggara kerjasama yang dilaksanakan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng dengan Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan dan Golongan yang dilibatkan meliputi Pegawai Negeri Sipil : 66 orang, Pegawai Honor Daerah : 3 orang, Pegawai Kontrak : 52 orang. Tingkat Pendidikan : S2 : 2 orang, S1 : 30 orang, D3 : 9 orang, SMA sederajat : 24 orang, SMP sederajat : 1 orang, Golongan IV:8 orang, Golongan III:41 orang, Golongan II:16 orang, Golongan I:2 orang Pejabat Struktural : 27 orang (Eselon IIb : 1 orang, Eselon IIIb : 5 orang, Eselon IV : 21 orang) dan Pejabat Fungsional 17 orang. Dalam melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga ini tidak terdapat

pembebanan anggaran pada APBD Kabupaten Buleleng (DPA Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng). Perjanjian pemanfaatan zone penelitian budidaya di Dusun Gondol Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng selama 5 tahun, terhitung sejak 3 Desember 2014 sampai dengan 3 Desember 2019. Hasil pelaksanaan kerjasama adalah tersedianya dokumen hasil penelitian budidaya laut oleh Balai Besar Riset Budidaya Laut Gondol. Dan belum ada permasalahan yang menjadi hambatan pelaksanaan koordinasi.

8) Koordinasi Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem, dengan dasar hukum Perjanjian Kerjasama anatara pemerintah daerah Kabupaten Buleleng dengan Balai Produksi Udang unggul dan Kekerangan Karangasem Nomor : 075 / 35 / KB / Pem / 2014 -_ I/BPIU2K.K/HK/2014/XII/2014 tentang Pengembangan Instalasi Budidaya Kekerangan Wilayah Laut, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak,Kabupaten Buleleng. Bidang dan kegiatan kerjasama adalah Pengembangan instalasi budidaya kekerangan wilayah laut desa Sumberkima,Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Penyelenggara kerjasama yang dilaksanakan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng dengan Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan dan Golongan yang dilibatkan meliputi Pegawai Negeri Sipil : 66 orang, Pegawai Honor Daerah : 3 orang, Pegawai Kontrak : 52 orang. Tingkat Pendidikan : S2 : 2 orang, S1 : 30 orang, D3 : 9 orang, SMA sederajat : 24 orang, SMP sederajat : 1 orang, Golongan IV:8 orang, Golongan III:41 orang, Golongan II:16 orang, Golongan I:2 orang Pejabat Struktural : 27 orang (Eselon IIb : 1 orang, Eselon IIIb : 5 orang, Eselon IV : 21 orang) dan Pejabat Fungsional 17 orang. Dalam melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga ini tidak terdapat pembebanan anggaran pada APBD Kabupaten Buleleng (DPA Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng). Perjanjian pengembangan instalasi budidaya kekerangan wilayah laut Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng terhitung sejak 3 Desember 2014 sampai dengan 3 Desember 2019. Hasil pelaksanaan kerjasama adalah adanya pengembangan budidaya kekerangan di Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Dan belum ada permasalahan yang menjadi hambatan pelaksanaan kerjasama.

9) Koordinasi Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara. Dengan dasar hukum PP Nomor 99 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah

dengan PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan Perjanjian kerjasama antara Badan Kepegawaian Daerah Kab. Buleleng dengan Kantor Regional X BKN Denpasar, Nomor : 800/897/BKD & Nomor : 96/KR.X.K/2016. Materi pelaksanaan koordinasi Pembuatan Soal, Lembar Jawaban, Pengawasan dan Pemeriksaan Hasil Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Buleleng Tahun 2016 dan Pembinaan Pegawai Daerah melalui Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah. SKPD Pelaksana koordinasi adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buleleng, yang didukung personil sejumlah 40 orang, dengan pangkat / golongan ; III/a ; 31 orang, II/c ; 8 orang dan II/a ; 1 orang. Dengan kualifikasi pendidikan S1 ; 31 orang, D3 ; 1 orang dan SMA ; 8 orang. Anggaran yang dialokasikan untuk pembiayaan pelaksanaan koordinasu berasal dari APBD Kabupaten Buleleng sebesar Rp. 25.000.000,00, Sedangkan hasil pelaksanaan koordinasi adalah terlaksananya ujian penyesuaian ijazah.

10) Koordinasi Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Bali, melalui kesepakatan bersama Nomor : KEP-124/WPB.21/BD.03/2016-075/26/KB/2016 tertanggal 3 Oktober 2016, tentang penggunaan system informasi kredit program (SIKP). Materi koordinasi adalah pelatihan penggunaan SIKP, penatausahaan calon debitur potensial KUR dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIKP di Kabupaten Buleleng. Tujuan pelaksanaan koordinasi adalah untuk melaksanakan dan mengimplementasikan SIKP dengan lancar untuk mendukung Program KUR yang mendukung pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dan memanfaatkan SIKP secara optimal khususnya dalam rangka monitoring dan evaluasi pembiayaan dan pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

11) Koordinasi Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng, melalui kesepakatan bersama Nomor : 075/26/KB/2016 – 51081.001/KB/2016 tertanggal 4 Januari 2016, tentang pengembangan data dan informasi pembangunan. Materi koordinasi adalah Koordinasi dan sinkronisasi serta penyusunan data dan informasi pembangunan di bidang ekonomi, social, budaya, hukum, pemerintahan serta fisik dan sarana prasarana. Tujuan pelaksanaan koordinasi adalah untuk melakukan peningkatan dan penyempurnaan kualitas dan pengelolaan data oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng guna memperoleh data statistic yang akan dijadikan bahan analisa dan evaluasi

berbagai program pembangunan daerah dan sebagai dasar pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

12) Koordinasi Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Balai Taman Nasional Bali Barat, yang dituangkan ke dalam kesepakatan bersama Nomor : KB 478/BTNBB-1/2016 – 075/03/KB/2016, tertanggal 4 Maret 2016 tentang Pemanfaatan Zona Religi/Budaya/Sejarah Taman Nasional Bali Barat untuk tujuan ritual keagamaan Umat Hindu dalam rangka penguatan fungsi kawasan pelestarian alam. Materi koordinasi meliputi perlindungan kawasan, tumbuhan dan satwa di Kawasan Taman Nasional Bali Barat, pelestarian keanekaragaman hayati dan pelaksanaan ritual keagamaan Umat Hindu serta sosialisasi bersama tentang ruang lingkup kerjasama. Tujuan pelaksanaan koordinasi adalah untukm mendukung amanat peraturan yang berlaku khususnya penguatan fungsi kawasan pelestarian alam dan pemanfaatan zona religi, budaya dan sejarah untuk Umat Hindu di Kabupaten Buleleng dalam kawasan Taman Nasional Bali Barat.

E. PEMBINAAN BATAS WILAYAH.

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan batas Daerah, bahwa penegasan batas wilayah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Kabupaten Buleleng yang memiliki potensi pembangunan berupa luas wilayah yang cukup besar, yaitu 1.365,88 Km2 atau 24,25% dari luas Provinsi Bali, berbatasan langsung dengan 5 (lima) kabupaten lain di Provinsi Bali, dengan batas-batas wilayah di Sebelah Barat Kabupaten Jembrana, Sebelah Utara Laut Bali, Sebelah Timur Kabupaten Karangasem dan di Sebelah Selatan Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung dan Bangli. Memperhatikan kondisi tersebut maka penetapan dan penegasan batas wilayah memiliki fungsi yang setrategis dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kewenangan pada berbagai fungsi bidang pemerintahan. Kebijakan yang ditempuh terkait penetapan dan penegasan batas wilayah diarahkan dalam rangka menginventarisasi , mengkaji, dan menetapkan dasar hukum tertulis maupaun tidak tertulis yang nantinya akan dijadikan dasar hukum dalam mensosialisasikan mekanisme penetapan dan penegasan batas wilayah tersebut. Dalam rangka penataan batas wilayah dengan

Kabupaten lain, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Buleleng yang dituangkan melalui Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 130/7/HK/2016. Terkait batas wilayah Kabupaten Buleleng dengan kabupaten lainnya di Bali telah dilaksanakan kegiatan penegasan batas daerah secara pasti dilapangan. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut hasil rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Dirjen Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri RI pada tanggal 13 s/15 Pebruari 2013 di Balairung Jakarta Timur, yang diikuti oleh perwakilan dari 4 provinsi dan 17 perwakilan kabupaten / kota termasuk Kabupaten Buleleng. Dari hasil rapat tersebut bahwa pelaksanakan kegiatan penegasan batas daerah secara pasti dilapangan antar Kabupaten Kota di Provinsi Bali dilaksanakan pada tahun 2013, dimana anggaran kegiatan pelaksanaan penegasan batas daerah dialokasikan melalui Angaran Dana DEKON Tahun Anggaran 2013.

Untuk kabupaten/kota di wilayah Provinsi Bali ditegaskan untuk membantu dengan melibatkan instansi terkait sehingga pelaksanaan penegasan batas daerah tidak terjadi permasalahan serta dibuatkan Berita Acara Rapat dan Data Cakupan Wilayah Perbatasan Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung dan Bangli. Terkait hal tersebut selanjutnya Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan Pertemuan/ Rapat Kordinasi, Fasilitasi dan Sosialisasii penegasan Batas Daerah secara pasti di lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 12 Juni 2013 di Hotel Harrads Denpasar, yang dihadiri oleh Para Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten/Kota se – Bali, Para camat yang ada di Perbatasan yaitu 6 (enam) Camat dari Kabuapen Buleleng, 3 (tiga) Camat dari Kabupaten Tabanan, 4 (empat) Camat dari Kabupaten Jembrana, 1 (satu) Camat dari Kabupaten Badung, 1 (satu) Camat dari Kabupaten Bangli, Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Penegasan Batas Daerah Provinsi Bali dan Instansi terkait di Provinsi Bali. Dalam pertemuan tersebut beberapa hal yang dibahas antara lain Sosialisasi Permendagri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah oleh Direktur Wilayah Administrasi dan Perbatasan Ditjen Pemerintahan Umum Kementrian dalam Negeri. Kemudian Kebijakan Penegasan Batas Daerah dan Teknis Penegasan Batas Daerah Oleh Sub. Dit.Batas Wilayah II Direktorat Wilayah Administrasi Perbatasan Ditjen Pemerintahan Umum Kementrian Dsalam Negeri . Serta penentuan segmen batas untuk Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung serta Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Bangli. Kegiatan penegasan batas daerah secara pasti dilapangan antara Kabupaten Buleleng

dengan Kabupaten Jembrana dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2013 dan 3 Juli 2013 meliputi panjang batas 81,4 Km dengan medan batas meliputi Gunung Bakungan, Gunung Penginuman, Gunung Bangkiangjaran, Gunung Banyuwedang, Gunung Pengumbahan, Gunung Merebuk, Gunung Pangkung lesung dan Gunung Lesung. Untuk penegasan batas daerah secara pasti dilapangan antara Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Tabanan dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2013 dan 5 Juli 2013, meliputi panjang batas 48,2 Km dengan medan batas meliputi Tukad Yeh Leh, Tukad Yeh Aya, Tukad Saba, Tukad Getas, Tukad Dati, Gunung Sengayang, Gunung Pohan dan Gunung Pengelengan. Penegasan batas daerah secara pasti dilapangan antara Kabupaten Buleleng dengan kabupaten Badung dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2013 meliputi panjang batas 5,5 Km dengan medan batas meliputi Gunung Pengelengan dan Gunung Catur. Tanggal 4 Juli 2013 dilaksanakan penegasan batas daerah secara pasti dilapangan antara Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Bangli meliputi panjang batas 42,6 Km dengan medan batas meliputi Tukad Bon, Tukad Sagae, Tukad maesam, Tukad Bangkah, Tukad Samuh dan Tukad Yeh batu. Terhadap hasil lacak lapangan terhadap batas daerah antara kabupaten Buleleng dengan kabupaten Jembrana, badung, Tabanan dan Bangli telah dibuatkan berita acara penegasan dan penetapan batas daerah, yang nantinya dilaporkan ke Kementrian Dalam Negeri RI untuk ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Untuk batas wilayah antara Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem telah dilaksanakan penegasan dan penetapan pada Tahun 2006 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 36 Tahun 2006 tanggal 28 Desember 2006, tentang batas daerah Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Karangasem. Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2014 bertempat di Kantor Gubernur Bali dengan dihadiri Pemerintah Provinsi Bali, Ditjen PUM Kementrian Dalam Negeri RI, Taopdam IX Udayana, Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bangli, Karangasem, Klungkung, Tabanan serta Dinas Kehutanan Provinsi Bali, telah dilaksanakan rapat koordinasi dalam rangka klarifikasi hasil verifikasi lapangan dan verifikasi kartometrik batas daerah di wilayah Provinsi Bali antara Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Badung serta verifikasi hasil perapatan batas daerah antara Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Karangasem. Dan pada tanggal 18 s/d 21 Nopember 2015 bertempat di Goodway Hotel dan Resort Nusa Dua telah dilaksanakan rapat koordinasi batas daerah kabupaten di wilayah Provinsi Bali yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Bina

Administrasi dan Kewilayahan Kementrian Dalam Negeri RI dalam rangka verifikasi tahap akhir terhadap koordinat titik batas antara Kabupaten Buleleng, Bangli, Tabanan, Badung dan Jembrana dan verifikasi terhadap nama desa, nama kecamatan serta obyek – obyek geogarfis yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara kesepakatan oleh perwakilan masing – masing kabupaten sebelum dituangkan ke dalam draf Permendagri tentang batas daerah kabupaten.

Dalam kaitannya dengan penataan batas wilayah kabupaten dan menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor T.005/ 1131/BAK dan sesuai dengan Surat Tugas Nomor 800/221/III/ST/HP/2016, maka Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Buleleng menghadiri Rapat Pembahasan dan Harmonisasi Permendagri dan Peta Batas Daerah yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI bertempat di Hitel Grand Cemara, Jakarta pada tanggal 14 s/d 16 Maret 2016. Rapat Pembahasan dan Harmonisasi Permendagri dan Peta Batas Daerah dihadiri oleh Para Pejabat dari Pemerintah Kabupaten Buleleng, Pemerintah Kabupaten Tabanan, Pemerintah Kabupaten Jembrana, Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah Provinsi Bali, Topdam IX Udayana, Dittopad TNI AD, Badan Informasi Geospasial, Biro Hukum Kemendagri dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, dibuka secara resmi oleh Sekretaris Direktur Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Ibu Dra. Hajjah Endang. S, MM. Rapat Pembahasan dan Harmonisasi Permendagri dan Peta Batas Daerah, berhasil menuangkan beberapa kesepakatan berupa Segmen batas yang dibahas yang meliputi batas daerah antara Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Jembrana, batas daerah antara Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Tabanan, batas daerah antara Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Badung, batas daerah antara Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Bangli dan batas daerah antara Kabupaten Tabanan dengan Kabupaten Jembrana. Proses pembahasan segmen batas daerah dilakukan secara bersama – sama dengan melakukan klarifikasi dan harmonisasi serta menyepakati titik koordinat batas, jalur batas dan toponimi batas daerah antara Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Tabanan, Bangli, Jembrana dan Badung yang tertuang dalam Rancangan Permendagri tentang batas daerah beserta lampiran petanya. Peserta rapat sepakat untuk segera memproses penerbitan Rancangan Permendagri batas daerah beserta lampiran petanya sebagaimana dimaksud diatas sesuai dengan prosedur perundangan yang berlaku. Kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembahasan dan

Harmonisasi Permendagri dan Peta Batas Daerah yang ditandatangani oleh Para Pejabat dari Pemerintah Kabupaten Buleleng, Pemerintah Kabupaten Tabanan, Pemerintah Kabupaten Jembrana, Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah Provinsi Bali, Topdam IX Udayana, Dittopad TNI AD, Badan Informasi Geospasial, Biro Hukum Kemendagri dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.

Dan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Buleleng, Badung,Bangli, Tabanan dan Jembrana maka pada tanggal 11 Agustus 2016 telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Bangli Provinsi Bali, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 65 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Badung Provinsi Bali, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 66 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Jembrana Provinsi Bali,

Bahwa dengan terbentuknya Tim Penetapan dan Pegasan Batas Desa dan Kelurahan Kabupaten Buleleng Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 130/7/HK/2016, maka tugas pertama Tim Penetapan dan Pegasan Batas Desa dan Kelurahan Kabupaten Buleleng Tahun 2016 adalah menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas desa dan kelurahan. Berdasarkan hasil inventarisasi tim bahwa dasar hukum tertulis yang berupa hukum positif yang dipakai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Desa, disamping dasar hukum tertulis lainnya yang berkaitan dengan batas desa yakni : UU No. 69 Tahun 1959, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 52 Tahun 2001, Permendagri No. 27 Tahun 2006 dan Perda Kabupaten Buleleng No. 11 Tahun 2015 serta Peraturan Bupati Buleleng Nomor 66 Tahun 2015.

Berdasarkan evaluasi terhadap kegiatan dimaksud yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 yang masih menyisakan permasalahan terkait penetapan batas antara Desa Banjar dan Desa Dencarik di Kecamatan Banjar, maka pada Tahun 2016 kegiatan diprioritaskan bagi desa – desa yang mempunyai tingkat permasalahan kecil terkait batas desa. Perencanaan dimaksud penting untuk tercapainya sasaran kegiatan pada Tahun Anggaran 2016. Tim Penetapan dan Pegasan Batas Desa dan Kelurahan Kabupaten Buleleng Tahun 2016 menetapkan perencanaan untuk kegiatan penetapan

dan penegasan batas desa difokuskan di wilayah Kecamatan Kubutambahan meliputi segmen batas antara Desa Mengening – Tajun, Mengening – Tamblang, Mengening – Bontihing, Mengening-Pakisan dan Mengening – Satra (Kabupaten Bangli). Wilayah Kecamatan Sawan meliputi segmen batas antara Desa Giri Emas – Desa Bungkulan, Desa Giri Emas – Desa Sangsit dan melanjutkan penataan terhadap penetapan dan penegasan batas antara Desa Tampekan, Desa Sidetapa dan Desa Banjar Tegeha di Kecamatan Banjar.

Selanjutnya berdasarkan surat dari Badan Informasi Geospasial Nomor : B-21.3/PBW/IGD/7/2016 tertanggal 21 Juli 2016 perihal pemberitahuan temu kerja kegiatan survey deleniasi batas desa di Kabupaten Buleleng, maka pada tanggal 27 April 2016 bertempat di Ruang Rapat Unit IV Kantor Bupati Buleleng dilaksanakan temu kerja antara Perwakilan Badan Informasi dan Geospasial dengan Tim Penetapan dan Pegasan Batas Desa dan Kelurahan Kabupaten Buleleng Tahun 2016. Pada kesempatan dimaksud Perwakilan Badan Informasi dan Geospasial menyampaikan maksud, tujuan dan teknis pelaksanaan kegiatan deleniasi batas desa dan kelurahan pada Tahun 2016 di Kabupaten Buleleng. Kegiatan deleniasi batas desa merupakan penarikan garis batas secara kartometrik pada peta kerja yang natinya disepakati oleh desa – desa yang berbatasan yang dapat dipakai sebagai dasar penegasan batas desa. Seluruh Anggaran kegiatan ini bersumber dari Alokasi Anggaran pada Badan Informasi dan Geospasial, Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam hal ini Tim Penetapan dan Pegasan Batas Desa dan Kelurahan Kabupaten Buleleng untuk dapat menfasilitasi pelaksanaan kegiatan dimaksud sehingga kegiatan ini dapat dituntaskan pada akhir Bulan Agustus 2016.

Pada Bulan April 2016 Tim Penetapan dan Pegasan Batas Desa dan Kelurahan Kabupaten Buleleng juga telah melaksanakan tahapan pelacakan dan pemasangan pilar batas desa antara Desa Tampekan – Sidetapa dan Tampekan – Banjar Tegeha. Sedangkan pelacakan Batas Desa Giri Emas Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng dilaksanakan pada tanggal 28 April 2016. Acara diawali dengan pengecekan Peta Blok di Ruang rapat Kantor Desa Giri Emas yang dihadiri oleh Perbekel Bungkulan, Perbekel Giri Emas dan Staf dari Kecamatan Sawan, didampingi oleh perwakilan dari Topdam kemudian dilanjutkan dengan pelacakan ke lapangan bersama-sama. Pelacakan pertama di lakukan di daerah pantai batas Desa Giri Emas dengan Desa Bungkulan terus lanjut keselatan sampai Kuburan Cina dan dilanjutkan pelacakan batas antara Desa Giri Emas dengan Desa Jagaraga. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Buleleng selanjutnya mengakomodasikan kegiatan penetapan dan penegasan batas

Desa Mengening di Kecamatan Kubutambahan. Desa Mengening berbatasan langsung dengan Desa Tamblang, Desa Tajun dan Desa Satra di wilayah Kabupaten Bangli. Terkait kegiatan dimaksud maka bentuk fasilitasi yang dilaksanakan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dan Kelurahan Kabupaten Buleleng adalah melaksanakan penetapan titik batas antara Desa Mengening dengan Desa Tajun, Desa Mengening dengan Desa Tamblang pada tanggal 11 Mei 2016 melalui pembacaan peta yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Kesepakan Penetapan Garis Batas Desa. Fasilitasi terhadap penegasan batas melalui pemasangan patok batas serta pengambilan titik koordinat untuk kepastian titik batas. Pelacakan lapangan ini juga melibatkan komponen masyarakat desa yang berkompeten untuk mengetahui secara rinci dan dapat menunjukkan lokasi titik – titik batas secara jelas diantaranya Kelian Subak Abian, Pemuka Masyarakat dan Perangkat Desa. Dalam kegiatan ini Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan Kabupaten Buleleng bekerjasama dengan Topografi Kodam IX/Udayana untuk pengerjaan teknis terkait penentuan titik koordinat melalui satelit citra.

Untuk penetapan segmen batas antara Desa Giri Emas dengan Desa Bungkulan ternyata menyisakan permasalahan dimana kedua desa yang berbatasan ini belum menemui kesepakatan terkait posisi titik batas kedua desa. Pada tanggal 13 Mei 2016 Tim Penetapan dan Pegasan Batas Desa dan Kelurahan Kabupaten Buleleng menfasilitasi pertemuan antara kedua desa bertempat di Ruang Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng. Dari hasil pertemuan tersebut ternyata kedua desa masih tetap bertahan dengan asumsi masing – masing terkait titik batas kedua desa sehingga belum bisa diambil kesepakan. Disepakati oleh kedua desa untuk kembali melaksanakan lacak lapangan bersama – sama yang akan difasilitasi oleh Camat Sawan selaku anggota Tim Penetapan dan Pegasan Batas Desa dan Kelurahan Kabupaten Buleleng dan diharapkan aka nada kesepakatan yang tertuang dalam berita acara kesepakatan penetapan dan penegasan batas antara Desa Giri Emas -.Desa Bungkulan. Diharapkan seluruh komponen desa utamanya para pemuka desa yang mengetahui sejarah dalam kaitannya dengan perbatasan kedua desa untuk bersinergi sehingga permasalahan terkait batas kedua desa dapat dicarikan solusi yang nantinya menguntungkan kedua desa.

Pada tanggal 25 Juli 2016 dilaksanakan sosialisasi deleniasi batas wilayah administrasi desa dan kelurahan oleh Badan Informasi Geospasial bersama Rekanan yakni PT. Fasade Internasional bertempat di Ruang Rapat Unit IV Kantor Bupati Buleleng diikuti oleh Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan

Kelurahan Kabupaten Buleleng dan Anggota Forum Komunikasi Desa Kabupaten Buleleng. Materi sosialisasi menitikberatkan pada teknis kegiatan deleniasi yang meliputi tahapan perencanaan dan pelaksanaan di semua kecamatan di Kabupaten Buleleng. Untuk pelaksanaan sosialisasi di tingkat kecamatan dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2016 s/d 1 Agustus 2016 mengambil locus di 3 (tiga) kecamatan setiap harinya. Pada tanggal 29 Juli 2016 sosialisasi Kegiatan Delineasi Batas Administrasi Desa/Kelurahan diselenggarakan di Kecamatan Banjar, Sukasada dan Buleleng. Kegiatan ini dilaksanakan serentak sehingga untuk mengakomodasikan maka Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan Kabupaten Buleleng harus dibagi menjadi 3 untuk dapat mendampingi Rekanan BIG yakni PT. Fasade Internasional menyampaikan sosialisasi di ketiga kecamatan dimaksud. Dalam pelaksanaan sosialisasi di ketiga kecamatan tersebut, Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan Kabupaten Buleleng didampingi oleh Camat dan Kasi Pemerintahan Kecamatan. Peserta sosialisasi yang terdiri dari Para Perbekel dan seorang perangkat desa dan kasi pemerintahan kelurahan dari masing – masing desa serta kelurahan yang ada di Kecamatan Buleleng, Sukasada dan Banjar. Pemaparan secara menyeluruh disampaikan oleh perwakilan PT. Fasade Internasional selaku rekanan BIG yang merupakan pelaksana teknis dari kegiatan deleniasai batas desa dan kelurahan. Pada kesempatan tersebut kepada para perbekel/Lurah dibagikan peta wilayahnya masing – masing yang telah berisikan garis indikatif batas desa/kelurahan yang nantinya harus dipelajari dan dimusyawarahkan kembali di desa/kelurahan untuk mendapatkan masukan terkait garis batas yang benar dan pasti. Peta hasil koreksi nantinya agar dibawa kembali pada saat pelaksanaan deleniasi dengan jadwal untuk Kecamatan Banjar tanggal 8 Agustus 2016, Kecamatan sukasada tanggal 9 Agustus 2016 dan Kecamatan Buleleng pada tanggal 18 Agustus 2016. Dan pada saat pelaksanaan deleniasi batas desa/kelurahan diminta agar Perbekel/Lurah hadir dengan tanpa mewakilkan dengan membawa stempel karena akan dilaksanakan penandatanganan berita acara kesepakatan dan ataupun berita acara ketidak sepakatan. Pada tanggal 30 Juli 2016 sosialisasi Kegiatan Delineasi Batas Administrasi Desa/Kelurahan diselenggarakan di Kecamatan Seririt, Busungbiu dan Gerokgak. Dan tanggal 1 Agustus 2016 merupakan sesi terakhir pelaksanaan sosialisasi bertempat di Kecamatan Tejakula, Kubutambahan dan Sawan. Dengan mekanisme dan tahapan pelaksanaan sama dengan pelaksanaan di ketiga kecamatan sebelumnya. Secara umum

pelaksanaan sosialisasi berjalan sesuai harapan dan mendapat animo yang cukup besar dari perangkat desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Buleleng.
Berdasarkan hasil sosialisasi deliniasi batas desa/kelurahan yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Juli s/d 1 Agustus 2016 di seluruh kecamatan di Kabupaten Buleleng maka mulai dipetakan batas – batas desa dalam satu kecamatan dan batas – batas desa/kelurahan antar kecamatan. Pemetaan ini penting mengingat kegiatan deliniasi batas desa/kelurahan merupakan penggambaran batas di atas peta berupa garis secara kartometrik sehingga pemetaan batas awal sangat diperlukan.Dengan cakupan 129 desa dan 19 kelurahan serta bentangan wilayah yang cukup luas sangat diperlukan kesiapan awal yang nantinya berorientasi pada hasil yang diharapkan. Kegiatan deleniasi batas desa dan kelurahan Tahun 2016 di Kecamatan Gerokgak diselenggarakan pada tanggal 2 Agustus 2016, bertempat di Kantor Camat Gerokgak. Pertemuan yang dipimpin oleh Sekcam Gerokgak juga menghadirkan Kapolsek Gerokgak dan Unsur Koramil Gerokgak serta Para Perbekel dari 10 desa di wilayah kecamatan Gerokgak. Sedangkan PT. Fasade Internasional selaku rekanan BIG sebagai pelaksana teknis kegiatan didampingi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan Kabupaten Buleleng. Kegiatan yang dipandu langsung oleh para teknisi dari PT Fasade Internasional diawali konfirmasi terhadap peta kerja yang telah dibagikan pada saat sosialisasi. Penggambaran garis batas indikatif berdasarkan peta BIG Tahun 2000 ternyata masih menyisakan kesalahan walaupun dalm prosentase kecil dan bisa diperbaiki dan kemudian disepakati antar desa yang berbatasan. Dalam kegiatan ini berhasil ditetapkan dan disepakati melalui penandatanganan berita acara kesepakatan titik batas batas desa sejumlah 35 titik. Untuk permasalahan yang ada yang meliputi penentuan beberapa titik batas antara Desa Celukanbawang dan Desa Pengulon akan dimusyawarahkan kembali antar desa yang bersangkutan. Demikian halnya permasalahan titik batas antara Desa Gerokgak dengan Desa Pejarakan belum dicapai kata sepakat dan akan diadakan pertemuan kembali yang akan difasilitasi oleh Camat Gerokgak.
Kegiatan deleniasi batas desa dan kelurahan Tahun 2016 di Kecamatan Seririt diselenggarakan pada tanggal 3 Agustus 2016, bertempat di Kantor Camat Seririt. Pertemuan yang dipimpin oleh Camat Seririt juga menghadirkan Unsur Polsek Seririt dan Unsur Koramil Seririt serta Para Perbekel dari 20 desa dan 1 kelurahan di wilayah kecamatan Seririt. Sebagaimana proses deleniasi di Kecamatan Gerokgak maka di Kecamatan Seririt berhasil ditetapkan 80 titik batas yang disepakati yang dituangkan melalui berita acara kesepakatan yang

ditandatangani oleh Para Perbekel. Dari keseluruhan titik batas wilayah desa masih menyisakan 23 titik batas yang belum disepakati. Beberapa permasalahan terkait penentuan garis batas diantaranya Desa Tangguwisia dengan Sulanyah, Desa Banjarasem dengan Desa Kalisada, Desa Patemon dengan Desa Bubunan, belum bisa disepakati antar kedua desa sehingga dituangkan dalam berita acara ketidaksepakatan yang akan dibahas lebih lanjut dengan difasilitasi oleh Camat Sukasada.

Kegiatan deleniasi batas desa dan kelurahan Tahun 2016 di Kecamatan Busungbiu diselenggarakan pada tanggal 4 Agustus 2016, bertempat di Kantor Camat Busungbiu. Pertemuan yang dipimpin oleh Camat Seririt juga menghadirkan Unsur Polsek Busungbiu dan Unsur Koramil Busungbiu serta Para Perbekel dari 15 desa di wilayah kecamatan Busungbiu serta difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan Kabupaten Buleleng. Sebagaimana proses deleniasi di Kecamatan Seririt maka di Kecamatan Busungbiu berhasil ditetapkan 62 titik batas yang disepakati yang dituangkan melalui berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh Para Perbekel. Dari keseluruhan titik batas wilayah desa masih menyisakan 7 titik batas yang belum disepakati, dikarenakan Perbekel desa bersangkutan berhalangan hadir. Secara keseluruhan proses deleniasi berjalan sesuai ekspektasi awal sebagaimana yang diharapkan.

Kegiatan deleniasi batas desa dan kelurahan Tahun 2016 di Kecamatan Banjar diselenggarakan pada tanggal 8 Agustus 2016, bertempat di Kantor Camat Banjar. Pertemuan yang dipimpin oleh Sekcam Banjar menghadirkan Para Perbekel dari 17 desa di wilayah kecamatan Banjar, Desa Kalibukbuk (Kec. Buleleng), dan 4 desa di Kecamatan Sukasada serta difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan Kabupaten Buleleng. Sebagaimana proses deleniasi di Kecamatan lainnya maka di Kecamatan Banjar berhasil ditetapkan 54 titik batas yang disepakati yang dituangkan melalui berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh Para Perbekel. Dari keseluruhan titik batas wilayah desa masih menyisakan 36 titik batas yang belum disepakati, dikarenakan Perbekel desa bersangkutan berhalangan hadir ataupun karena memang belum adanya kesepakatan antar desa. Diantara titik batas yang belum disepakati meliputi titik batas antara Desa Dencarik dengan Desa Banjar, Desa Banjar dengan Desa Banjar Tegeha, Desa Banyuatis dengan Desa Kayuputih, dan beberapa titik batas dengan desa – desa yang berada di wilayah kecamatan lain.

Kegiatan deleniasi batas desa dan kelurahan Tahun 2016 di Kecamatan Buleleng diselenggarakan pada tanggal 9 Agustus 2016, bertempat Ruang

Rapat Unit IV Kantor Bupati Buleleng. Pertemuan yang difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan Kabupaten Buleleng, menghadirkan Perbekel dan Lurah di wilayah Kecamatan Buleleng. Sebagaimana proses deleniasi di Kecamatan lainnya maka di Kecamatan Buleleng berhasil ditetapkan 134 titik batas yang disepakati yang dituangkan melalui berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh Para Perbekel dan Lurah. Dari keseluruhan titik batas wilayah desa masih menyisakan 7 titik batas yang belum disepakati, perubahan alih fungsi lahan menyebabkan banyak penada batas antar desa dan antar kelurahan maupun antar desa dengan kelurahan tidak ditemukan lagi atau hilang, sehingga diperlukan pelacakan ulang kembali untuk menemukan dan menentukan titik batas yang dulu sudah disepakati.

Kegiatan deleniasi batas desa dan kelurahan Tahun 2016 di Kecamatan Sukasada diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 2016, bertempat Ruang Rapat Unit IV Kantor Bupati Buleleng. Pertemuan yang difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan Kabupaten Buleleng, menghadirkan Perbekel dan Lurah di wilayah Kecamatan Sukasada dan beberapa desa dari wilayah Kecamatan Buleleng dan Sawan. Proses deleniasi berlangsung sebagaimana proses yang dilaksanakan di kecamatan lain yakni konfirmasi terhadap garis batas indikatif yang digambarkan seacara katrometrik. Kesepakatan maupun ketidaksepakatan lanjut dituangkan dalam berita acara yang ditandatanagani para perbekel dan lurah.

Kegiatan deleniasi batas desa dan kelurahan Tahun 2016 di Kecamatan Kubutambahan diselenggarakan pada tanggal 19 Agustus 2016, bertempat Kantor Camat Kubutambahan. Pertemuan yang difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan Kabupaten Buleleng, menghadirkan Para di wilayah Kecamatan Kubutambahan. Sebagaimana proses deleniasi di Kecamatan lainnya maka di Kecamatan Kubutambahan berhasil ditetapkan 50 titik batas yang disepakati yang dituangkan melalui berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh Para Perbekel. Dari keseluruhan titik batas wilayah desa masih menyisakan 18 titik batas yang belum disepakati, yang akan dibahas lebih lanjut melalui musyawarah antar desa dengan difasilitasi oleh Camat Kubutambahan.

Kegiatan deleniasi batas desa dan kelurahan Tahun 2016 di Kecamatan Sawan diselenggarakan pada tanggal 22 Agustus 2016, bertempat Kantor Camat Sawan. Pertemuan yang difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan Kabupaten Buleleng, menghadirkan Para Perbekel di wilayah Kecamatan Sawan. Proses deleniasi berlangsung

sebagaimana proses yang dilaksanakan di kecamatan lain yakni konfirmasi terhadap garis batas indikatif yang digambarkan seacara katrometrik. Kesepakatan maupun ketidaksepakatan lanjut dituangkan dalam berita acara yang ditandatanagani para perbekel.

Kegiatan deleniasi batas desa dan kelurahan Tahun 2016 di Kecamatan Tejakula diselenggarakan pada tanggal 23 Agustus 2016, bertempat Kantor Camat Tejakula. Pertemuan yang difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan Kabupaten Buleleng, menghadirkan Para Perbekel di wilayah Kecamatan Tejakula. Proses deleniasi berlangsung sebagaimana proses yang dilaksanakan di kecamatan lain yakni konfirmasi terhadap garis batas indikatif yang digambarkan seacara katrometrik. Kesepakatan maupun ketidaksepakatan lanjut dituangkan dalam berita acara yang ditandatanagani para perbekel. Dalam proses dimaksud berhasil di ditetapkan 29 titik batas yang disepakati dan 17 titik batas yang belum disepakati.

Berdasarkan hasil kegiatan deliniasi batas desa/kelurahan yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus s/d 23 Agustus 2016 di seluruh kecamatan di Kabupaten Buleleng maka dapat diinventarisasi titik – titik batas yang belum disepakati maupun sudah disepakati namun belum dituangkan ke dalam Berita Acara Kesepakatan. Terhadap kondisi tersebut maka Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan Kabupaten Buleleng melaksanakan pertemuan untuk menfasilitasi terwujudnya administrasi batas desa. Pada tanggal 5 September 2016 dilaksanakan pertemuan di Kantor Desa Bebetin dalam rangka menfasilitasi tercapainya kesepakatan penentuan garis batas antara Desa Bebetin dengan beberapa desa di Kecamatan Sawan (Desa Sawan, Sudaji, Sekumpul, Galungan dan Menyali) dan 2 Desa di Kecamatan Kubutambahan (Desa Bontihing dan Pakisan). Pertemuan ini dilaksanakan karena pada saat pelaksanaan deleniasi batas desa untuk Kecamatan Sawan, Perbekel Bebetin berhalangan hadir sehingga dari hasil koordinasi dengan Tim dari PT. Fasade Internasional dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan Kabupaten Buleleng, disepakati pelakasanaan pertemuan di Kantor Desa Bebetin. Tanggal 13 September 2016 dilaksanakan pertemuan di Kantor Camat Banjar untuk menfasilitasi Desa Banjar dengan Desa Cempaga dan Desa Sidetapa yang administrasi batas desanya belum ada hasil sebagai tindaklanjut deleniasi pada tanggal 8 Agustus 2016. Inventarisasi terhadap pelaksanaan penataan batas desa/ kelurahan yang difasilitasi oleh PT. Fasade Internasional selaku rekanan BIG ternyata menyisakan beberapa permasalahan yakni masih ada titik batas

desa / kelurahan yang belum disepakati yang berjumlah 113 titik tersebar di 9 kecamatan. Untuk kelengkapan administrasi masih ada berita acara kesepakatan / ketidaksepakatan yang belum ditandatangani oleh Perbekel / Lurah ataupun belum ada stempel desa/kelurahan. Masih ada desa yang belum mengikuti kegiatan deleniasi batas karena alas an tertentu sehingga harus dijadwalkan ulang.

Dari inventarisasi kegiatan dimaksud maka direncanakan untuk melaksanakan kegiatan deleniasi lanjutan dengan jadwal yang disusun menyesuaikan dengan agenda kegiatan di Bagian Pemerintahan, guna memfasilitasi desa / kelurahan yang belum mencapai kesepakatan ataupun masih kekurangan dalam aspek kelengkapan administrasinya baik berupa tanda tangan maupun stempel. Perencanaan kegiatan lanjutan ini diupayakan pelaksanaannya di Kantor Bupati dengan menghadirkan seluruh desa/kelurahan yang belum tuntas administrasi batas desa/kelurahan. Untuk beberapa desa kegiatan lanjutan ini direncanakan untuk pelaksanaannya di Kantor Camat masing – masing. Diantaranya untuk menfasilitasi Desa Banjar dengan Desa Cempaga dan Desa Sidetapa yang administrasi batas desanya belum ada hasil kegiatan deleniasi lanjutan akan dilaksanakan di Kantor Camat Banjar. Sedangkan untuk menfasilitasi tercapainya kesepakatan penentuan garis batas antara Desa Bebetin dengan beberapa desa di Kecamatan Sawan (Desa Sawan, Sudaji, Sekumpul, Galungan dan Menyali) dan 2 Desa di Kecamatan Kubutambahan (Desa Bontihing dan Pakisan) maka pertemuan direncanakan di Kantor Desa Bebetin dengan jadwal yang akan disusun selanjutnya. Pertemuan ini dilaksanakan karena pada saat pelaksanaan deleniasi batas desa untuk Kecamatan Sawan, Perbekel Bebetin berhalangan hadir sehingga dari hasil koordinasi dengan Tim dari PT. Fasade Internasional dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan Kabupaten Buleleng, disepakati pelakasanaan pertemuan di Kantor Desa Bebetin. Tanggal 18 Nopember 2016 dilaksanakan pertemuan di Kantor Camat Banjar untuk menfasilitasi Desa Banjar dengan Desa Cempaga dan Desa Sidetapa yang administrasi batas desanya belum ada hasil sebagai tindaklanjut deleniasi pada tanggal 8 Nopember 2016.

Berdasarkan hasil kegiatan deliniasi batas desa/kelurahan yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus s/d 23 Agustus 2016 di seluruh kecamatan di Kabupaten Buleleng maka dapat diinventarisasi titik – titik batas yang belum disepakati maupun sudah disepakati yang dituangkan dalam berita acara. Untuk optimalisasi pencapaian sasaran kegiatan yakni tercapainya penyelesaian dan kesepakatan penataan batas antar desa /

kelurahan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan di 148 desa dan kelurahan di Kabupaten Buleleng, maka Tim Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa/Kelurahan Kabupaten Buleleng akan menyusun penetapan tentang penentuan segmen batas desa yang nantinya dituangkan dalam Peraturan Bupati Buleleng. Belum adanya data yang diserahkan oleh Rekanan BIG selaku pelaksana deleniasi batas desa di Kabupaten Buleleng merupakan kondisi mengapa belum adanya penetapan dan penegasan batas desa yang dituangkan melalui Peraturan Bupati Buleleng. Rentang waktu yang singkat dan adanya permasalahan di lapangan menjadikan sasaran awal penyelesaian pekerjaan oleh rekanan BIG tidak bisa terpenuhi sehingga hasil yang sudah ada belum bisa dilaporkan. Koordinasi ke BIG yang telah dilaksanakan belum bisa merealisasikan rencana untuk segera menetapkan dan menegaskan batas desa / kelurahan di Kabupaten Buleleng. Sehingga rancangan kegiatan untuk segera bisa mewujudkan cetak peta desa/kelurahan akhirnya tidak bida direalisasikan.

Selanjutnya koordinasi dalam pembahasan terkait serah terima data geospasial berupa peta desa dan kelurahan di Badan Informasi dan Geospasial (BIG) di Cibinong, Bogor pada tanggal 21 Desember 2016. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Buleleng diterima oleh Bapak Ade Komara selaku Kabid Pemetaan Batas Wilayah Negara, dan beliau secara terbuka menyampaikan bahwa BIG selaku instansi yang berwenang dalam pembuatan peta di Indonesia merasa gembira bilamana ada daerah yang mau memakai ataupun memanfaatkan hasil pekerjaan BIG dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun tetap ada kehati – hatian terhadap distribusi dari data – data yang dimiliki BIG sebagai sebuah asset Negara yang tentunya harus dipertanggungjawabkan didalam pemamfaatannya. Sehingga sebelum data yang telah disiapkan tersebut diserahkan terlebih dahulu harus atas ijin dan sepengetahuan Pusat Penelitian, Promosi dan Kerjasama BIG selaku bidang yang berwenang untuk mengeluarkan data dimaksud. Di Bidang Pusat Penelitian, Promosi dan Kerjasama BIG, Tim diterima langsung oleh Bapak Suranto selaku staf yang ditugaskan untuk memfasilitasi penyusunan draf kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama antara BIG dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka pemanfaatan data geospasial BIG oleh Kabupaten Buleleng. Berdasarkan penjelasan bahwa draf kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama BIG dengan Kabupaten Buleleng saat ini sudah pada posisi di Bagian Hukum BIG. Dan secara lisan hal tersebut sudah dilaporkan terkait rencana pelaksanaan kerjasama kepada

Kepala BIG dan rencana ini sudah di acc dan petunjuk untuk ditindaklanjuti. Sebagai hasil koordinasi maka rekaman data digital scan draf peta kerja deleniasi batas desa Kabupaten Buleleng (geotif), scan berita acara deleniasai batas desa Kabupaten Buleleng, file geodatabase deleniasi dan peta kerja hasil deleniasi batas desa Kabupaten Buleleng, dengan tariff Rp. 0,- yang dimohon dalam rangka tindaklanjut penegasan batas desa/kelurahan di Kabupaten Buleleng telah diberikan dalam bentuk soft copy.

Anggaran yang dialokasikan dari APBD Kabupaten Buleleng untuk pembiayaan kegiatan ini berupa belanja langsung yang berjumlah sebesar Rp. 237.950.000 dan terealisasi sebesar Rp. 215.863.270 atau mencapai 90,72 persen. Untuk Tahun 2016 sebagai hasil pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan Desa/Kelurahan, telah disusun draf Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Tampekan Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng dan draf Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Mengening Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng. Segmen batas Desa Tampekan meliputi Batas Desa Tampekan dengan Desa Dencarik yang di mulai dari Batas paling Selatan terletak di simpul tiga Batas Desa yaitu Desa Dencarik, Desa Tampekan dan Desa Banjar Tegeha Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng, selanjutnya saluran air ke arah Utara sampai pada PABU 01 dengan Koordinat 114o 58’ 20.654” BT dan 08o 11’ 55.064” LS, yang terletak di Desa Dencarik dengan Desa Tampekan Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng, selanjutanya ke arah Utara sampai pada PABU 02 dengan Koordinat 114o 58’ 22.734” BT dan 08o 11’ 52.970” LS yang terletak di Desa Dencarik dengan Desa Tampekan Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. PABU 02 selanjutnya kearah Timur sampai pada PABU 03 dengan Koordinat 114o 58’ 22.746” BT dan 08o 11’ 53.135” LS yang terletak di Desa Dencarik dengan Desa Tampekan Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng, selanjutnya ke arah Utara menyusuri saluran air sampai pada PABU 04 dengan Koordinat 114o 58’ 27.427 ” BT dan 08o 11’ 52.146” LS yang terletak di Desa Dencarik dengan Desa Tampekan Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. PABU 04 selanjutnya kearah Selatan sampai pada PABU 05 dengan Koordinat 114o 58’ 27.525” BT dan 08o 11’ 52.035” LS yang terletak di Desa Dencarik dengan Desa Tampekan Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng, selanjutnya ke arah Utara menyusuri saluran air sampai pada PABU 06 dengan Koordinat 114o 58’ 31.491 ” BT dan 08o 11’ 53.349” LS yang terletak di Desa Dencarik dengan Desa Tampekan Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. PABU 06 selanjutnya ke arah Utara menyusuri saluran air sampai pada PABU 07 dengan Koordinat 114o 58’ 31.668” BT dan 08o 11’ 52.863” LS

yang terletak di Desa Dencarik dengan Desa Tampekan Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng, selanjutnya ke arah Utara menyusuri saluran air sampai pada PABU 08 dengan Koordinat 114o 58' 33.044 " BT dan 08o 11' 55.794" LS yang terletak di simpul Batas tiga Desa yaitu Desa Dencarik , Desa Tampekan dan Desa Sidetapa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. Selanjutnya Batas Desa Tampekan dengan Desa Sidetapa, dimulai dari Batas paling Selatan terletak di Jalan Desa Tampekan dengan Desa Sidetapa yang ditandai dengan PBU 01 dengan Koordinat 114o 58' 21.695" BT dan 08o 12' 14,334" LS, yang terletak di Desa Tampekan dan di Desa Sidetapa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng, selanjutanya ke arah Barat pada PBU 02 dengan Koordinat 114o 58' 21.695" BT dan 08o 12' 14,334" LS yang terletak di Desa Tampekan dengan Desa Sidetapa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. PBU 02 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 03 dengan Koordinat 114o 58' 21.695" BT dan 08o 12' 14,334" LS yang terletak di Desa Tampekan dengan Desa Sidetapa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri saluran air sampai pada PABU 04 dengan Koordinat 114o 58' 2.695 " BT dan 08o 12' 14.334" LS yang terletak di Desa Sidatapa dengan Desa Tampekan Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. PABU 04 selanjutnya kearah Barat Daya sampai pada PABU 05 dengan Koordinat 114o 58' 21.695" BT dan 08o 12' 14.334" LS yang terletak di Desa Sidatapa dengan Desa Tampekan Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. Batas Desa Tampekan dengan Desa Banjar Tegeha, Batas Desa Tampekan dengan Desa Banjar Tegeha, dimulai dari batas paling selatan pada PABU 06 dengan koordinat 114o 58' 21.695" BT dan 08o 12' 14.334" LS selanjutnya menyusuri aliran Tukad Tampekan ke arah utara samapai pada simpul pada batas antara Batas Desa Banjar Tegeha, Desa Tampekan dan Desa Sidetapa. Batas Desa Mengening dengan Desa Tajun, di mulai dari Batas paling Selatan terletak di simpul tiga Batas Desa yaitu Desa Satra Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Desa Tajun Kecamatan Kubutambahan dan Desa Mengening Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng, selanjutnya menyusuri jalan raya ke arah Utara sampai pada PBU 01 dengan Koordinat 115o 15' 10.057" BT dan 08o 09' 56.608" LS, yang terletak di Desa Mengening dengan Desa Tajun Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng, selanjutanya ke arah Utara menyusuri jalan sampai sampai pada PBU 02 dengan Koordinat 115o 15' 08.826" BT dan 08o 09' 54.129" LS yang terletak di Desa Mengening dengan Desa Tajun Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng. PBU 02 selanjutnya kearah Utara sampai pada PABU 03 dengan Koordinat 115o 14' 54.119" BT dan 08o

09’ 40.721” LS yang terletak di Desa Mengening dengan Desa Tajun Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU 04 dengan Koordinat 115o 14’ 54.054 ” BT dan 08o 09’ 40.753” LS yang terletak di Desa Mengening dengan Desa Tajun Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng. PABU 04 selanjutnya kearah Utara menyusuri jalan raya sampai pada PABU 05 dengan Koordinat 115o 14’ 52.838” BT dan 08o 09’ 34.921” LS yang terletak di Desa Mengening dengan Desa Tajun Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU 06 dengan Koordinat 115o 14’ 50.975” BT dan 08o 09’ 27.753” LS yang terletak di Desa Mengening dengan Desa Tajun Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng. PABU 06 selanjutnya kearah Barat Laut menyusuri tanah tegalan sampai pada PABU 07 dengan Koordinat 115o 14’ 21.962” BT dan 08o 08’ 44.076” LS yang terletak di Desa Mengening dengan Desa Tajun Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU 08 dengan Koordinat 115o 14’ 22.128 ” BT dan 08o 08’ 43.524” LS yang terletak di Desa Mengening dengan Desa Tajun Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng. PABU 08 selanjutnya kearah Barat Laut menyusuri jalan desa sampai pada PBU 09 dengan Koordinat 115o 14’ 9.206” BT dan 08o 08’ 25.598” LS yang terletak di simpul Batas tiga Desa yaitu Desa Mengening, Desa Tajun dan Desa Tamblang Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng. Selanjutnya Batas Desa Mengening dengan Desa Tamblang di mulai dari Batas paling Timur terletak di simpul tiga Batas Desa yaitu Desa Tajun, Desa Mengening dan Desa Tamblang Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng,selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri jalan setapak sampai pada PABU 10 dengan Koordinat 115o 14’ 6.895 ” BT dan 08o 08’ 23.765” LS yang terletak di Desa Mengening dengan Desa Tamblang Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng. PABU 10 selanjutnya kearah Barat Daya menyusuri sampai pada PABU 11 dengan Koordinat 115o 13’ 54.589” BT dan 08o 08’ 29.213” LS yang terletak di Desa Mengening dengan Desa Tajun Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 12 dengan Koordinat 115o 13’ 52.497 ” BT dan 08o 08’ 29.594” LS yang terletak di Desa Mengening dengan Desa Tamblang Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng. PABU 12 selanjutnya kearah Barat Daya menyusuri jalan setapak sampai pada TK dengan koordinat 115o 13’ 49.621” BT dan 08o 08’ 30.005” LS yang terletak di simpul tiga Batas Desa yaitu Desa Bontihing, Desa Mengening dan Desa Tamblang Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng. Batas Desa Mengening dengan Desa Tambakan dimulai dari simpul

tiga batas Desa yaitu Desa Mengening, Desa Tambakan dan Desa Pengejaran Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli ke arah utara menyusuri Tukad Aya sampai di simpul tiga batas Desa, yaitu Desa Mengening, Desa Tambakan dan Desa Pakisan. Batas Desa Mengening dengan Desa Pakisan dimulai dari simpul tiga batas Desa yaitu Desa Mengening, Desa Tambakan dan Desa Pakisan menyusuri ke arah Utara Tukad Aya sampai pada simpul tiga batas Desa, yaitu Desa Mengening, Desa Pakisan dan Desa Bintihing, selanjutnya ke arah utara menyusuri Tukad Aya sampai pada TK 01 dengan koordinat 115o 13' 49.621" BT dan 08o 08' 30.005" LS yang terletak di simpul tiga batas Desa, yaitu Desa Mengening, Desa pakisan dan Desa Bontihing.

F. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Kabupaten Buleleng yang memiliki topografi membujur dari barat ke timur dengan panjang pantai 157,05 Km; serta dari utara ke selatan dengan kondisi gunung dan perbukitan yang cukup terjal berpotensi menimbulkan bencana alam. Dilihat dari ketinggiannya, wilayah Kabupaten Buleleng berada pada ketinggian 0-1.200 m diatas permukaan laut dengan kemiringan lahan bervariasi, semakin ke arah selatan semakin curam. Apabila hal ini tidak dikelola dengan baik, akan dapat memberikan ancaman-ancaman yang nantinya berdampak pada terhambatnya sasaran pembangunan yang ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya melakukan langkah-langkah secara terpadu dan sistematis alam rangka pencegahan bencana alam serta penanganan korban bencana alam yang terjadi pada kurun waktu tahun 2012-2017 disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 174
Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2016

N O	URUSAN WAJIB/PILIHAN	BENCANA YANG TERJADI	PENANGGULANGANNYA	STATUS BENCANA (NASIONAL REGIONAL/PROVINSI ATAU LOKAL/KABUPATEN /KOTA)	SUMBER ANGGARAN	JUMLAH ANGGARAN	ANTISIPASI DAERAH DALAM MENGHADAPI KEMUNGKINAN BENCANA	POTENSI BENCANA YANG DI PERKIRAKAN TERJADI
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tahun 2012 1. Urusan pemerintahan Umum	- Banjir Bandang; - Tanah Longsor; - Angin Puting Beliung; - Gelombang Pasang Air Laut; - Abrasi Pantai;	- Perbaikan rumah akibat bencana; - Peningkatan Kesiagaan bahaya kebakaran; - Pengadaan tempat penampungan; sementara korban bencana alam; - Pengadaan Logistik dan Obat-obatan Bagi Penduduk di tempat penampungan sementara;	Lokal/ Kabupaten	APBN APBD	Rp.8.424.990.000 Rp.6.641.970.700	- Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana; - Pembentukan tim forum penanggulangan bencana Kab. Buleleng; - Pendataan daerah rawan bencana di Kab. Buleleng sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam penanganan bencana; - Pengadaan tempat penampungan sementara;	- Banjir bandang; - Tanah longsor; - Angin Puting Beliung; - Gelombang pasang air laut; - Abrasi pantai;

							sarana umum; - Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam; - Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial;	
	Tahun 2013 Urusan Pemerintahan Umum	- Banjir Bandang; - Tanah Longsor; - Angin Puting Beliung; - Gelombang Pasang Air Laut; - Abrasi Pantai;	- Program Fasilitas Umum; - Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial; - Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran; - Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam;	Lokal/ Kabupaten	APBD	Rp.8.371.758.407	- Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana; - Pembentukan tim forum penanggulangan bencana Kab. Buleleng; - Pendataan daerah rawan bencana di Kab. Buleleng sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam penanganan bencana; - Pengadaan tempat penampungan sementara; - Pengadaan logistik dan obat- obatan; - Perbaikan	- Banjir bandang; - Tanah longsor; - Angin Puting Beliung; - Gelombang pasang air laut; - Abrasi pantai;.

							rehabilitasi rumah akibat bencana alam; - Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat	
	Tahun 2014 Urusan Pemerintahan Umum	- Banjir Bandang; - Tanah Longsor; - Angin Puting Beliung; - Gelombang Pasang Air Laut; - Abrasi Pantai;	- Program Pembangunan Fasilitas Umum; - Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial; - Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran; - Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.	Lokal/ Kabupaten	APBD	Rp.8.978.962.089	- Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana; - Pembentukan tim forum penanggulangan bencana Kab. Buleleng; - Pendataan daerah rawan bencana di Kab. Buleleng sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam penanganan bencana; - Pengadaan tempat penampungan sementara; - Pengadaan logistik dan obat- obatan; - Perbaikan Prasarana	- Banjir bandang; - Tanah longsor; - Angin Puting Beliung; - Gelombang pasang air laut; - Abrasi pantai;

							alam; - Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial.	
	Tahun 2015 Urusan Pemerintahan	- Tanah Longsor; - Angin Puting Beliung; - Gelombang Pasang Air Laut; - Abrasi Pantai;	- Program Pembangunan Fasilitas Umum; - Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial; - Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran; - Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Lokal/ Kabupaten	APBD	Rp.3.522.436.900	- Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana; - Pembentukan tim forum penanggulangan bencana Kab. Buleleng; - Pendataan daerah rawan bencana di Kab. Buleleng sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam penanganan bencana; - Pengadaan tempat penampungan sementara; - pengadaan logistik dan obat- obatan; - Perbaikan Prasarana dan sarana umum;	- Banjir bandang; - Tanah longsor; - Angin Puting Beliung; - Gelombang pasang air laut; - Abrasi pantai;

							- Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial.	
	Tahun 2016 Urusan Pemerintahan Umum	- Tanah Longsor; - Angin Puting Beliung; - Gelombang Pasang Air Laut; - Abrasi Pantai;	- Fasilitas Umum Air Bersih Musi-Gerokgak; - Fasilitas Umum Air Bersih Penyabangan-Gerokgak; - Fasilitas Umum Air Bersih Banyupoh-Gerokgak; - Fasilitas Umum - Perbaikan Rumah; - Jembatan Darurat; - Perbaikan jalan Penyabangan-gerokgak; - Pengadaan semen Penyabangan-Gerokgak; - Operasional Alat Berat Penyabangan-Gerokgak; - Pengadaan Semen Musi-Gerokgak; - Operasional Alat Berat dan	Lokal/ Kabupaten	APBD	Rp.3.281.005.529,13	- Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana; - Pembentukan tim forum penanggulangan bencana Kab. Buleleng; - Pendataan daerah rawan bencana di Kab. Buleleng sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam penanganan bencana - Pengadaan logistik dan obat- obatan; - Perbaikan Prasarana dan sarana umum; - Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam; - Fasilitasi dan	- Banjir bandang; - Tanah longsor; - Angin Puting Beliung; - Gelombang pasang air laut; - Abrasi pantai;

							penyesuaian alokasi anggaran yang tersedia pada proses perubahan APBD Tahun 2016 agar	

G. Pengelolaan Kawasan Khusus.

Kawasan Khusus yang ada di Kabupaten Buleleng bukan merupakan kawasan tertentu yang ditetapkan secara nasional oleh pemerintah pusat, tetapi lebih merupakan arahan pemanfaatan kawasan agar jelas peruntukannya berdasarkan karakteristik dan potensi daya dukungnya. Pengelolaan kawasan khusus ini merupakan kebijakan daerah yang diatur melalui Peraturan Daerah Propinsi Bali maupun Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng. Berdasarkan hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng dalam rangka penyusunan Rencana Kawasan Induk Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng, maka pengembangan wilayah Kabupaten Buleleng diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan kawasan meliputi :

1. Kawasan budidaya seluas 89.593,67 Ha atau 65,59% dari luas wilayah kabupaten, meliputi :
   a. Kawasan peruntukan hutan produksi seluas 4.731,95 Ha; meliputi hutan produksi terbatas seluas 3.207 Ha yang terdapat di Kecamatan Gerokgak; 2.910,40 Ha, Kecamatan Seririt ; 112 ha dan Kecamatan Tejakula 185,55 Ha, dan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 1.524 Ha, yang terdapat di Kecamatan Gerokgak seluas 1.274,40 Ha dan di Kecamatan Seririt ; 249,60 Ha.
   b. Kawasan hutan rakyat, terutama pada kawasan-kawasan dengan kemiringan di atas 40%, pada kawasan berbatasan dengan hutan lindung, pada kawasan di dalam radius kawasan tempat suci, serta kawasan lainnya, meliputi Kecamatan Gerokgak, Seririt, Sukasada dan Kubutambahan.
   c. Kawasan peruntukan pertanian dirancang seluas 48.741,51 Ha atau 35,68% dari luas wilayah Kabupaten Buleleng, terdiri atas :
      1) Kawasan peruntukan tanaman pangan seluas sekitar 11.070 Ha, dengan jenis tanaman pangan yang banyak dikembangkan adalah padi, jagung, kacang tanah, kedelai, ketela pohon dan ubi jalar.
      2) Kawasan peruntukan hortikultura seluas 5.391 Ha. Komoditas tanaman buah-buahan: mangga (Mangga Arumanis dan Lalijiwa/Madu) dan rambutan di Kecamatan Tejakula, Kubutambahan, sawan dan Gerokgak. Tanaman pisang hampir di semua kecamatan. Durian, wani dan manggis di Kecamatan Sawan, Banjar dan Busungbiu.

Pembibitan tanaman buah-buahan di Desa Suwug, Sinabun dan Sudaji Kecamatan Sawan; Desa Bila Kecamatan Kubutambahan; dan Desa Les Kecamatan Tejakula. Komoditi sayur-sayuran dataran tinggi di Kecamatan Sukasada, dan sayuran dataran rendah di Kecamatan Kubutambahan, Sawan dan Seririt. Tanaman hias banyak dikembangkan di Kecamatan Sukasada dan Banjar. Tanaman biofarmaka banyak dikembangkan di Kecamatan Seririt, Busungbiu dan Banjar.

3) Kawasan peruntukan perkebunan seluas sekitar 20.274 Ha, meliputi pengembangan Komoditas kopi Robusta pada dataran sedang dan Arabika pada dataran tinggi di Kecamatan Busungbiu, Banjar, Sukasada, dan Kubutambahan. Komoditas kakao di kawasan perkebunan dataran sedang di setiap kecamatan. Komoditi cengkeh dan vanili di Kecamatan Busungbiu, Banjar, Sukasada, Kubutambahan, dan Tejakula. Komoditi tembakau Virginia di Kecamatan Buleleng, Sukasada dan Sawan.Komoditi kelapa dan jambu mete tersebar di dataran rendah dan sedang hampir di setiap kecamatan.
4) Kawasan peruntukan peternakan, meliputi potensi ternak yang ada dan sudah berkembang selama ini yaitu Ternak besar : sapi, babi, kambing dan kerbau. Ternak unggas : ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging dan itik.

d. Kawasan peruntukan perikanan, Kabupaten Buleleng memiliki pantai sepanjang ± 157,05 Km atau ± 1.166,75 Km2 luas radius 4 mil perairan laut yang membentang dari Barat ke Timur mulai dari Desa Sumberkelampok di Kecamatan Gerokgak sampai Desa Tembok di Kecamatan Tejakula.
e. Kawasan peruntukan pariwisata, Kawasan pariwisata, meliputi 3 (tiga) kawasan, yaitu : Kawasan Pariwisata Kalibukbuk, meliputi : Desa Kalibukbuk, Pemaron, Tukad Mungga dan Anturan di Kecamatan Buleleng, dan Desa Kaliasem, Temukus, dan Tigawasa di Kecamatan Banjar. Desa Kayuputih Melaka di Kecamatan Sukasada, dipromosikan menjadi bagian dari kawasan pariwisata kalibukbuk. Kawasan Pariwisata Batu Ampar meliputi Desa Penyabangan, desa Banyupoh, desa Pemuteran, desa Sumberkima dan desa pejarakan di Kecamatan Gerokgak

dan Kawasan Pariwisata Air Sanih meliputi : Desa Tembok, Sambirenteng, Penuktukan, Les, Bondalem, Tejakula, Julah, Sembiran dan Pacung di Kecamatan Tejakula, dan Desa Bukti Kecamatan Kubutambahan.

1) Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (DTWK) Meliputi : Desa Pancasari dan Wanagiri di Kecamatan Sukasada, Desa Munduk, Gesing dan Gobleg di Kecamatan Banjar, dan Desa Umejero di Kecamatan Busungbiu.
2) Daerah Tujuan Wisata (DTW) terdiri dari : Wisata Alam meliputi Monkey Forest,Air Terjun Gitgit,Air Terjun Bertingkat Gitgit, Air Terjun Sambangan, Wisata Alam Ambengan-Sambangan, Ricefield Terrces Ambengan,Air Terjun Carat di Kecamatan Kubutambahan,Air Terjun Melanting, Munduk Air Panes BGanyuwedang, Yeh Panes Nirmala Banjar, Air Terjun Singsing di Kecamatan Banjar, Air Terjun Les, Air Terjun Yeh Mampeh di Kecamatan Tejakula, Pantai Penimbangan, Pantai Kerobokan, Wisata Alam Sudaji di Kecamatan Sawan. Wisata Budaya/Sejarah Meliputi : Makam Jayaprana dan Lingkungan Pura Pulaki di Kecamatan Gerokgak, Brahma Wihara Asrama,DesaTua Sidatapa,Desa Tua Pedawa.Desa Tua Cempaga, Desa Tua Banyuseri, dan Desa Tua Tigawasa di Kecamatan BAnjar, Tugu Bhuana Kerta di Kecamatan Sukasada, Lingkungan Pura Beji, Lingkungan Pura Dalem Sangsit,Lingkungan Pura Dalem Jagaraga di Kecamatan Sawan, Lingkungan Pura Medue Karang di Kecamatan Kubutambahan, Eks Pelabuhan Buleleng, Tugu Singa Ambara Raja, Gedong Kertya, Museum Buleleng, di Kecamatan Buleleng, Lingkungan Ponjok Batu, Pemandian Kuda, Desa Tua Sambiran, PAcung, MAdenan dan Desa Tua Julah di Kecamatan Tejakula dan Wiasata Buatan yang meliputi ; Bendung Renon di Kecamatan Seririt, Rencana Bendungan Titab di KEcamatan Seririt dan Kecamatan Busungbiu, Perkebunan Rakyat komoditas Anggur di Desa Dencarik Kecamatan Bajar, Tugu Tri Yuda Sakti di Kecamatan Sukasada

f. Kawasan peruntukan pertambangan berupa pertambangan skala kecil, meliputi : Lokasi kawasan pertambangan batuan tersebar di Wilayah Kecamatan sesuai dengan potensi masing-

masing meliputi : Pertambangan Batu Kapur, batu andesit, dan batu mulia di Kecamatan Gerokgak, BAtu apung, batu merah, dan batu lahar, batu andesit di Kecamatan Kubutambahan, Batu pilah dan batu andesit di Kecamatan Tejakula, Tanah liat, dan batu andesit di Kecamatan Buleleng dan Seririt dan di tegaskan lebih lanjut dalam Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan, Lokasi kegiatan pertambangan pengambilan air bawah tanah tersebar di seluruh wilayah Kabupaten dengan kapasitas pengeboran sesuai dengan potensi yang tersedia dan pemanfaatannya mengacu pada ketentuan penatagunaan air; dan Kawasan peruntukan pertambangan sumber energi minyak lepas pantai di perairan Laut Bali sesuai potensi yang ada setelah diadakan penelitian serta dinilai layak baik secara ekonomis maupun lingkungan.

g. Kawasan peruntukan industry mencakup kawasan : Kawasan peruntukan aneka industri Celukan Bawang yang meliputi : Desa Patas, Tinga-tinga, Celukan Bawang, Pengulon dan Tukad Sumaga di Kecamatan Gerokgak seluas sekitar 1.762 Ha. Sentra-sentra industri kecil kreatif dan kerajinan rumah tangga, makanan olahan dan unggulan lainnya yang lokasinya tersebar pada kawasan permukiman dan Pengembangan agroindustri di kawasan Agropolitan Depeha, Tista, Banjar dan Pancasari.
h. Kawasan peruntukan pemukiman merupakan kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan permukiman atau didominasi oleh lingkunan hunian uang di arahkan seluas 10.960,72 Ha atau 8,03 % dari luas wilayah Kabupaten meliputi :
    1) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana adalah bagian dari kawasan perkotaan yang diperuntukan sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan, beserta penyediaan pusat-pusat pelayanan sesuai fungsi kawasan perkotaan , terdiri atas :
        a) Kawasan permukiman di kawasan perkotaan fungsi PKW di perkotaan Singaraja;
        b) Kawasan permukiman di kawasan perkotaan fungsi PKL di perkotaan Seririt;
        c) Kawasan permukiman di kawasan perkotaan yang berfungsi PKK meliputi kawasan perkotaan Gerokgak,

Celukan Bawang, Busungbiu, Banjar, Kalibukbuk, Pancasari, Kubutambahan, Sangsit dan Tejakula.

2) Kawasan permukiman perdesaan adalah bagian dari kawasan perdesaan yang diperuntukan untuk tempat tingga atau lingkungan huniandan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan beserta pusat-pusat pelayanan kawasan perdesaan sesuai fungsi kawasan baik yang berfungsi PPL, KAwasan Agropolitan maupun kawasan perdesaan murni, yang sebarannya mencakup seluruh pemusatan permukiman pada desa-desa yang berfungsi PPL. Agropolitan dan Kawasan perdesaan laninnya.
3) Kawasan peruntukan fasilitas penunjang permukiman, Kawasan ini merupakan bagian dari kawasan permukiman baik permukiman perkotaan maupun permukiman perdesaan meliputi : a) fasilitas perdagangan dan jasa, b) fasilitas perkantoran dan pemerintahan, c) fasilitas pendidikan, d) fasilitas kesehatan, e) fasilitas peribadatan, dan e) fasilitas rekreasi dan olahraga.

2. Kawasan peruntukan lainnya, meliputi : Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan terdapat di Desa Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan, Kelurahan Banyuning dan Banjar Tegal di Kecamatan Buleleng, dan Kawasan Dodiklat TNI AD di Desa Banyupoh Kecamatan Gerokgak; Kawasan peruntukan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang luasnya minimal 30% dari luas kawasan perkotaan; Kawasan minapolitan; Kawasan agropolitan; dan Kawasan andalan.

H. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Buleleng telah dilaksanakan selama periode tahun 2012-2017. Ketentraman dan ketertiban umum merupakan harapan dan kebutuhan mendasar bagi masyarakat Buleleng. Terwujudnya situasi yang aman, tertib dan nyaman sudah barang tentu tiak bisa terlepas dari dukungan yang optimal oleh berbagai elemen masyarakat dan aparat keamanan terkait. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Buleleng dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka ikut

menunjang suksesnya pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Buleleng. Adapun berbagai upaya- upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Buleleng selama periode tahun 2012-2017 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 175
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Buleleng
Tahun 2012-2016

NO	URUSAN WAJIB/ PILIHAN	GANGGUAN YANG TERJADI	SKPD	JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN PANGKAT DAN GOLONGAN	SUMBER ANGGARAN	JUMLAH ANGGARAN	PENANGGULANGAN	KENDALANYA	KEIKUT SERTAAN APARAT KEAMANAN DALAM PENANGGULANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Tahun 2012** Urusan Kebangsaan	- Gelandangan dan Pengemis (GEPENG) yang merupakan eksodus dari daerah lain - Pelanggaran oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) - Gangguan akibat Wanita Tuna Susila (WTS)	Satuan Polisi Pamong Praja	129	APBD Kab. Buleleng	Rp.1.309.539.000	Melakukan operasi terhadap Gelandangan dan Pengemis (GEPENG), yang merupakan eksodus dari daerah lain,pelanggaran oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) dan gangguan akibat keberadaan Wanita Tuna Susila (WTS)	Para Gepeng yang telah di amankan dan di bina serta dikembalikan ke daerah asalnya ternyata kemudian balik kembali dan melakukan aktivitas di Kabupaten Buleleng dan hal ini terjadi secara kontinyu. Sedangkan untuk penataan pedagang kaki lima sering terjadi kesalahpahaman antara petugas dan pedagang di karenakan para pedagang kaki lima kurang memahami aturan-aturan yang telah di tetapkan dalam Peraturan Daerah, dan dalam penanganan para Wanita Tuna Susila pembinaan dan sangsi yang dikenakan terkadang mentah dan mubasir karena ternyata masih saja ada penduduk/anggota masyarakat yang kemudian menampung kembali.	Pihak Kepolisian dan Intansi terkait

2	**Tahun 2013** Urusan	- Gelandangan (GEPENG) - Pedagang Kaki Lima - Wanita Tuna Susila (WTS)	Satuan Pamong Praja	121	APBD Kab.	Rp.4.981.257.129	Melakukan Pembinaan masih di temukan pelanggaran ketentraman dan ketertiban Masyarakat di laporkan ke Tim Yustisi Kabupaten Buleleng untuk mendapat tindak lanjut.	Para Gepeng yang telah di dikembalikan ke daerah asalnya ternyata kemudian balik kembali dan melakukan aktivitas di Kabupaten Buleleng dan hal ini terjadi secara kontinyu. Sedangkan untuk penataan pedagang kaki lima sering terjadi kesalahpahaman antara petugas dan pedagang di karenakan para pedagang kaki lima kurang memahami aturan-aturan yang telah di tetapkan dalam Peraturan Daerah, dan dalam penanganan para Wanita Tuna Susila pembinaan dan sangsi yang dikenakan terkadang mentah dan mubasir karena ternyata masih saja ada penduduk/anggota masyarakat yang kemudian menampung kembali.	
3	**Tahun 2014** Urusan Kebangsaan	- Gelandangan dan Pengemis (GEPENG) - Pedagang Kaki Lima	Satuan Polisi Pamong Praja	123	APBD Kab. Buleleng	Rp.1.830.614.000	Melakukan Pembinaan secara rutin, apabila masih di temukan pelanggaran ketentraman dan ketertiban Masyarakat di laporkan ke Tim Yustisi Kabupaten	Para Gepeng yang telah di amankan dan di bina serta dikembalikan ke daerah asalnya ternyata kemudian balik kembali dan melakukan aktivitas di Kabupaten Buleleng dan hal ini terjadi secara kontinyu. Sedangkan untuk penataan pedagang	Pihak Kepolisian dan Intansi terkait

								kaki lima sering terjadi kesalahpahaman antara petugas dan pedagang di karenakan para pedagang kaki lima kurang memahami aturan-aturan yang telah di tetapkan dalam Peraturan Daerah, dan dalam penanganan para Wanita Tuna Susila pembinaan dan sangsi yang dikenakan terkadang mentah dan mubasir karena ternyata masih saja ada penduduk/anggota masyarakat yang kemudian menampung kembali.	
4	**Tahun 2015** Urusan Kebangsaan	- Gelandangan dan Pengemis (GEPENG) - Pedagang Kaki Lima - Wanita Tuna Susila (WTS)	Satuan Polisi Pamong Praja	147	APBD Kab. Buleleng	Rp.3.654.427.000	Melakukan Pembinaan secara rutin, apabila masih di temukan pelanggaran ketentraman dan ketertiban Masyarakat di laporkan ke Tim Yustisi Kabupaten Buleleng untuk mendapat tindak lanjut.	Para Gepeng yang telah di amankan dan di bina serta dikembalikan ke daerah asalnya ternyata kemudian balik kembali dan melakukan aktivitas di Kabupaten Buleleng dan hal ini terjadi secara kontinyu. Sedangkan untuk penataan pedagang kaki lima sering terjadi kesalahpahaman antara petugas dan pedagang di karenakan para pedagang kaki lima kurang memahami aturan-aturan yang telah di tetapkan dalam Peraturan	Pihak Kepolisian dan Intansi terkait

								Daerah, dan dalam penanganan para Wanita Tuna Susila pembinaan dan sangsi yang dikenakan terkadang mentah dan mubasir karena ternyata masih saja ada penduduk/anggota masyarakat yang kemudian menampung kembali.	
5	**Tahun 2016** Urusan Kebangsaan	- Gelandangan dan Pengemis (GEPENG) - Pedagang Kaki Lima - Wanita Tuna Susila (WTS)	Satuan Polisi Pamong Praja	177	APBD Kab. Buleleng	Rp.4.154.478.679	Melakukan tindak pengamanan dan pembinaan,serta pemulangan terhadap Gelandangan dan Pengemis (GEPENG),pemberian peringatan lisan pembinaan/pemahaman terhadap peraturan, serta memindahkan/mengarah kan aktivitas kaki lima pada tempat yang sesuai,serta melakukan pembinaan terhadap tuan rumah,pemberian sanksi dengan cara memulangkan Penduduk Pendatang (DUKTANG) kembali ke domisi asalnya.	Penindakan dan pembinaan yang dilakukan oleh satpol pp terhadap Penakit Masyarakat (PEKAT) yang ada di Kabupaten Buleleng seringkali kurang efektif dan tidak menimbulkan efek jera. Hal ini terlihat berulangnya kejadian/kasus pekat yang sama dengan pelaku yang sama pula. Penindakan terhadap pelanggaran perda/perkada seringkali dilemahkan oleh bahasa "*backing*" dan/atau alasan Kemanusiaan, sehingga tindak persuasif selalu di kedepankan dalam pelaksanaan tugas satpol pp,Kualitas dan kuantitas SDM serta sarana prasarana pada satpol pp masih relatif rendah, sehingga penegakan perda/perkada seringkali terkendala sarana komunikasi,mobilitas,maupun sarana pengendali massa.	Pihak Kepolisian dan Intansi terkait serta Tokoh Masyarakat

BAB VI
PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Masa Jabatan Bupati Buleleng Tahun 2012-2017 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai hasil dari pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunan daerah. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya sebagai laporan *progress report* perjalanan pembangunan selama masa jabatan Bupati dan Pemerintah sebagai bahan evaluasi dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng. Di masa mendatang, Pemerintah Kabupaten Buleleng akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

Segala bentuk keberhasilan yang telah dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada kurun waktu periode 2012-2017 tersebut patut disyukuri, mengingat pencapaiannya diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen pemerintahan daerah serta segenap masyarakat Kabupaten Buleleng. Hasil-hasil yang telah dicapai selama ini mencerminkan adanya bentuk kesungguhan dan totalitas upaya bersama yang kuat dari seluruh elemen pemerintahan daerah yang dapat dijadikan pijakan yang kokoh untuk meraih kinerja yang lebih baik dari waktu ke waktu.

Disamping keberhasilan yang telah dicapai, disadari masih ada kekurangan atau kelemahan dalam penyelenggaraan umum pemerintahan dan pembangunan maupun dalam pelayanan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan dan kendala yang masih kita hadapi. Tentunya hal ini dapat diatasi dengan menumbuhkembangkan kerjasama dan partisipasi dari semua pihak. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng yang meliputi penyelenggaran urusan desentralisasi yang mencakup pelaksanaan urusan wajib dan pilihan, tugas – tugas pembantuan serta tugas – tugas umum pemerintahan telah terlaksana dengan baik, hal ini terjadi melalui kerja sama dan hubungan yang harmonis antara Pemerintah Daerah dengan seluruh

komponen masyarakat Kabupaten Buleleng dalam kerangka Good Governance berlandaskan falsafah Tri Hita Karana, yakni ;

1. Partisipasi *stakeholders,* antara lain Perangkat Daerah, instansi pemerintah pusat di daerah, lembaga kemasyarakatan dan LSM, pihak swasta serta para tokoh masyarakat, untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat sehingga dalam pengambilan kebijakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat akan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Daerah.
2. Koordinasi dan Sinkronisasi program dan kegiatan antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng maupun Pemerintah Provinsi dan Pusat serta penyelarasan dengan Program Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan sebagai bahan Perumusan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Buleleng yang berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Perubahan paradigma aparat Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk lebih menekankan pelaksanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil/*outcome* dibanding berorientasi proses/keluaran/*output*, sehingga terjadi sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat Buleleng dengan upaya yang dilakukan pemerintah daerah, yang pada gilirannya akan berdampak luas demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Buleleng.